SALINAN

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyebutkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

11. Qanun ...

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Kawasan ...

6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, swasta dan perorangan untuk kepentingan umum, seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, halte, alat penerangan umum, rambu lalu lintas, jaringan listrik, banjir kanal, turap, trotoar, lajur khusus sepeda, bus sekolah dan orang berkebutuhan khusus dan usia lanjut, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir.
10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

14. Rencana ...

14. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
16. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
19. Permukiman Kembali adalah kegiatan yang dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
20. *Water Treatment Plan* selanjutnya disingkat WTP adalah fasilitas sistem terpadu untuk mengubah air terkontaminasi menjadi air layak konsumsi.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah ...

23. Pemerintah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkatnya.
24. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
26. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
27. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
28. Pihak Swasta, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media adalah pihak non pemerintah yaitu para pelaku pembangunan yang berkelanjutan yang berasal dari luar sektor Pemerintah Kabupaten.
29. *New Urban Agenda* selanjutnya disingkat NUA adalah kesepakatan yang disusun untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
30. *Sustainable Development Goals* selanjutnya disingkat SDGs adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

31. *Corporate* ...

31. *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
32. *Creating Shared Value* selanjutnya disingkat CSV adalah sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan dengan menekankan pada nilai bersama.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RP2KPKPK dimaksudkan sebagai dokumen rencana terpadu penanganan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) Permukiman Kumuh.
(2) RP2KPKPK bertujuan:
    a. sebagai instrumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan maupun partisipasi publik;
    b. sebagai dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan jangka menengah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas Kumuh; dan

c. sebagai ...

c. sebagai dokumen perencanaan yang bersinergi dengan perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas atau pemberdayaan, sosial, dan ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
c. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
d. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten;
e. rencana penyediaan tanah;
f. rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. rumusan peran pemangku kepentingan.

BAB II

SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

(1) Permasalahan berdasarkan kondisi aktual Kabupaten terkait Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdapat pada tujuh aspek, yaitu:
    a. kondisi bangunan gedung;

b. jalan ...

b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

(2) Aspek kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki permasalahan meliputi:
a. ketidakteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
c. kualitas dan kelayakan bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(3) Aspek jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki permasalahan meliputi:
a. kondisi jalan lingkungan belum memenuhi persyaratan teknis;
b. penyalahgunaan fungsi jalan/sempadan jalan yang dapat mengganggu akses pejalan kaki/kendaraan seperti pedagang kaki lima atau bangunan liar
c. konektifitas jaringan jalan belum optimal.

(4) Aspek penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki permasalahan meliputi:
a. belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi;
b. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang sesuai persyaratan teknis;
c. WTP yang belum cukup memadai dan lokasinya terlalu jauh dari wilayah layanan, sehingga mengakibatkan waktu distribusi air tidak dapat melayani setiap hari (dua puluh empat jam); dan
d. kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.

(5) Aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki permasalahan meliputi:

a. sistem …

a. sistem jaringan drainase lingkungan belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;
b. kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;
c. kawasan Permukiman yang tergenang; dan
d. belum optimalnya fungsi drainase lingkungan akibat timbunan sampah di lingkungan Permukiman.

(6) Aspek pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki permasalahan meliputi:
a. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang sesuai persyaratan teknis;
b. rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak; dan
c. rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah.

(7) Aspek pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki permasalahan meliputi:
a. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan belum memenuhi persyaratan teknis baik skala kawasan, kota, maupun regional; dan
c. rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

(8) Aspek proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki permasalahan meliputi:
a. belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran di tingkat kawasan maupun lingkup hunian; dan
b. kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mitigasi kebakaran.

BAB IV

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 6

(1) Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten dilakukan dengan tindakan:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Tindakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan tahap pemanfaatan;
   b. pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi, untuk menjadi kondisi sistem pelayanan;
   c. pengawasan dan pengendalian terhadap kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya; dan
   d. pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi keberfungsian bangunan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bangunan tidak mengurangi keberfungsiannya.

(3) Tindakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pendampingan; dan
   b. pelayanan informasi.

(4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. penyuluhan;
   b. pembinaan; dan
   c. bantuan teknis.

(5) Kegiatan ...

(5) Kegiatan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. rencana tata ruang;
   b. rencana penataan bangunan dan lingkungan;
   c. perizinan; dan
   d. standar teknis.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 7

(1) Rencana aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten terdiri dari:
   a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; dan
   b. peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.

(3) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:
   a. pemugaran;
   b. peremajaan; dan
   c. permukiman kembali.

BAB V

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Perintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

(3) Program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

(4) Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas Kota Meureudu

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan 2 kawasan kumuh prioritas yaitu Kawasan Keude Meureudu dengan luas 93,69 Ha dan Kawasan Panteraja dengan luas 14,90 berdasarkan hasil penilaian skala prioritas penanganan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten.

(2) Program Peningkatan Kualitas kawasan prioritas dirumuskan berdasarkan kondisi dan permasalahan aktual yang terjadi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 10

Rencana aksi program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 11

Rencana penyediaan tanah memuat rumusan penyediaan tanah terhadap penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan Permukiman Kembali.

Pasal 12

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk permukiman kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2) Penyediaan tanah bagi pembangunan permukiman kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 13

(1) Sumber pembiayaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten direncanakan berasal dari:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Provinsi;
    c. Pemerintah Kabupaten; dan
    d. non pemerintahan atau pembiayaan lainnya.

Bagian ...

Bagian Kedua

Rencana Investasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten

Pasal 14

Rencana Investasi dan pembiayaan mengidentifikasi kebutuhan anggaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten yang dijabarkan selama lima tahun ke depan.

BAB VIII

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

(1) Pemangku kepentingan dalam upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten terdiri dari:
   a. pemerintah Pusat;
   b. pemerintah Provinsi;
   c. pemerintah Kabupaten;
   d. pihak swasta;
   e. pihak akademisi;
   f. pihak Organisasi Masyarakat; dan
   g. pihak media.

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai peran antara lain:
   a. menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs;
   b. mengkoordinasikan pemerintah daerah;
   c. untuk menangani permasalahan Pembangunan lintas daerah; dan
   d. mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.

(3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai peran antara lain:
   a. memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota; dan
   b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.

(4) Pemerintah ...

(4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai peran antara lain:
   a. menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   b. memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD; dan
   c. mendorong kerja sama dengan badan usaha.

(5) Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai peran antara lain:
   a. menggiatkan CSR dan CSV; dan
   b. mendorong kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.

(6) Pihak Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai peran berupa penyediaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.

(7) Pihak Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai peran antara lain:
   a. terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan Kabupaten; dan
   b. mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.

(8) Pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mempunyai peran berupa pemantauan perkembangan pembangunan Kabupaten secara objektif serta mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Februari 2025 M
4 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

TTD

T. AHMAD DADEK

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Februari 2025 M
4 Sya'ban 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

TTD

SAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PIDIE JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN
RP2KPKPK

RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kabupaten Pidie Jaya



Lembar Pengesahan

Pengesahan
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
Kabupaten Pidie Jaya

Pada hari ini Senin Tanggal Depalan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, telah dilaksanakan pembahasan dan penyepakatan hasil penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024-2028

Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Pidie Jaya ini menjadi pedoman untuk melaksanakan dan mewujudkan penanganan kumuh Kabupaten Pidie Jaya menuju terwujudnya lingkungan permukiman bebas kumuh dan layak huni dengan memadainya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berkualitas, anggap terhadap bencana disertai pemeliharaan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Pidie Jaya.

Menyetujui

KETUA POKJA PKP
KABUPATEN PIDIE JAYA

Ir. Jailani
NIP. 19641231 199503 1 016

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pidie Jaya.

Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak untuk dihuni dimulai dengan pendekatan komprehensif dan kerjasama yang erat dalam penanganan permukiman kumuh. Keterpaduan antara berbagai aspek permukiman menjadi krusial dalam memastikan penanganan yang menyeluruh yang terintegrasi dengan perencanaan pengembangan kota. Sistem terpadu ini juga bergantung pada partisipasi seluruh pihak terkait dalam proses pembangunan. Keterlibatan yang kokoh dari stakeholder sesuai dengan peran masing-masing menjadi pondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab pengembangan kawasan perkotaan.

Penanganan permukiman kumuh di kota adalah upaya bersama yang memperjuangkan kesetaraan bagi semua pihak terlibat dalam pembangunan, guna mencapai pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan.

Terakhir, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Meureudu, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan		**I**
Kata Pengantar		**II**
Daftar Isi		**III**
Daftar Gambar		**VI**
Daftar Tabel		**VII**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I – 2**
1.1	Latar Belakang	I – 2
1.2	Maksud Tujuan Dan Sasaran	I – 3
	1.2.1 Maksud	I – 3
	1.2.2 Tujuan	I – 3
	1.2.3 Sasaran	I – 3
1.3	Ruang Lingkup	I - 3
	1.3.1 Ruang Lingkup Substansi	I - 3
	1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah	I - 6
1.4	Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota	I - 7
1.5	Sistematika Penyajian	I - 9
BAB II	**KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN**	**II – 2**
2.1	Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman	II – 2
	2.1.1 Pengembangan Permukiman	II – 3
	2.1.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan	II – 3
	2.1.3 Sistem Penyediaan Air Minum	II – 3
	2.1.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman	II - 3
2.2	Kajian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman	II - 4
2.3	Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	II - 17
	2.3.1 Amanat terkait Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	II - 17
	2.3.2 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	II - 17
BAB III	**PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**III - 2**
3.1	Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Delineasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasannya Hasil Verifikasi Kabupaten Pidie Jaya	III - 2
3.2	Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya Dan Gambaran Kelembagaan	III - 5
	3.2.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya	III - 5
	1 Profil Permukiman Kumuh Gampong Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru	III - 6
	2 Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru	III - 9
	3 Profil Permukiman Kumuh Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru	III - 12
	4 Profil Permukiman Kumuh Gampong Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru	III - 15
	5 Profil Permukiman Kumuh Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru	III - 18
	6 Profil Permukiman Kumuh Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru	III - 21
	7 Profil Permukiman Kumuh Gampong Baro Lancok Kecamatan Bandar Baru	III - 24
	8 Profil Permukiman Kumuh Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru	III - 27
	9 Profil Permukiman Kumuh Gampong Jiem Jiem Kecamatan Bandar Baru	III - 30
	10 Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru	III - 33
	11 Profil Permukiman Kumuh Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru	III - 36
	12 Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Rheng Kecamatan Bandar Baru	III - 39
	13 Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru	III - 42
	14 Profil Permukiman Kumuh Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua	III - 45
	15 Profil Permukiman Kumuh Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua	III - 48
	16 Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua	III - 51
	17 Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua	III - 54
	18 Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua	III - 57
	19 Profil Permukiman Kumuh Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua	III - 60
	20 Profil Permukiman Kumuh Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua	III - 63
	21 Profil Permukiman Kumuh Gampong Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua	III - 66
	22 Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua	III - 69

23	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua	III - 72
24	Profil Permukiman Kumuh Gampong Alue Ketapang Kecamatan Bandar Dua	III - 75
25	Profil Permukiman Kumuh Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya	III - 78
26	Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Baroh Kecamatan Jangka Buya	III - 81
27	Profil Permukiman Kumuh Gampong Beureumbang Kecamatan Jangka Buya	III - 84
28	Profil Permukiman Kumuh Gampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya	III - 87
29	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya	III - 90
30	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua	III - 93
31	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua	III - 96
32	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Mancang Kecamatan Meurah Dua	III - 99
33	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua	III - 102
34	Profil Permukiman Kumuh Gampong Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua	III - 105
35	Profil Permukiman Kumuh Gampong Pantai Beureune Kecamatan Meurah Dua	III - 108
36	Profil Permukiman Kumuh Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua	III - 111
37	Profil Permukiman Kumuh Gampong Pohroh Kecamatan Meureudu	III - 114
38	Profil Permukiman Kumuh Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu	III - 117
39	Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Kulam Beuracan Kecamatan Meureudu	III - 120
40	Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Mulieng Beuracan Kecamatan Meureudu	III - 123
41	Profil Permukiman Kumuh Gampong Rhieng Mancang Kecamatan Meureudu	III - 126
42	Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu	III - 129
43	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu	III - 132
44	Profil Permukiman Kumuh Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu	III - 135
45	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Meureudu Kecamatan Meureudu	III - 138
46	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu	III - 141
47	Profil Permukiman Kumuh Gampong Manyang CutKecamatan Meureudu	III - 144
48	Profil Permukiman Kumuh Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu	III - 147
49	Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Kulam Beuracan Kecamatan Meureudu	III - 150
50	Profil Permukiman Kumuh Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng	III - 153
51	Profil Permukiman Kumuh Gampong Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng	III - 156
52	Profil Permukiman Kumuh Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng	III - 159
53	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng	III - 162
54	Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng	III - 165
55	Profil Permukiman Kumuh Gampong Rawa Sari Kecamatan Trienggadeng	III - 168
56	Profil Permukiman Kumuh Gampong Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng	III - 171
57	Profil Permukiman Kumuh Gampong Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng	III - 174
58	Profil Permukiman Kumuh Gampong Tanjong Ulim Kecamatan Ulim	III - 177
59	Profil Permukiman Kumuh Gampong Mesjid Ulim Baroh Kecamatan Ulim	III - 180
60	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Ulim Kecamatan Ulim	III - 183
61	Profil Permukiman Kumuh Gampong Nanggroe Barat Kecamatan Ulim	III - 186
62	Profil Permukiman Kumuh Gampong Reuleut Kecamatan Ulim	III - 189
63	Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja	III - 192
64	Profil Permukiman Kumuh Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja	III - 195

3.3	Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Dengan Cakupan Skala Kabupaten Dan Skala Lingkungan	III - 198
	3.3.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh	III - 198
	3.3.2 Pola Kolaborasi Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	III - 205
BAB IV	**PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**IV - 2**
4.1	Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	IV - 2
4.2	Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas	IV - 3
4.3	Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan Permasalahan Permukiman Kumuh	IV - 52
BAB V	**KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**V - 2**
5.1	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota	V - 2
	5.1.1 Konsep Perbaikan Kampung Atau Kampong Improvement Program (KIP)	V - 4
	5.1.2 Konsep Kota Hijau	V - 4
5.2	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan	V - 11
BAB VI	**RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BEKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**VI - 2**
6.1	Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI - 2
	6.1.1 Pengawasan Dan Pengendalian	VI - 2
	6.1.2 Pemberdayaan Masyarakat	VI - 3
6.2	Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten, Skala Kawasan, Dan Skala Lingkungan	VI - 7
6.3	Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI - 10
BAB VII	**RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**VII - 2**
7.1	Program Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VII - 2
7.2	Rencana Aksi Program Peningkatan Perumahan Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan	VII - 5
7.3	Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	VII - 62
7.4	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas	VII - 67
7.5	Konsep Desain Kawasan Prioritas	VII - 68
	7.5.1 Kawasan Meureudu	VII - 69
	7.5.2 Kawasan Panteraja	VII - 75
7.6	Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP)	VII - 80
BAB VIII	**RENCANA PENYEDIAAN TANAH**	**VIII - 2**
8.1	Pola Penyediaan Tanah	VIII - 2
8.2	Pengadaan Tanah Dan Permukiman Kembali	VIII - 2
	8.2.1 Ketentuan Umum	VIII - 2
	8.2.2 Prinsip Umum Pengadaan Tanah Dan Pemukiman Kembali	VIII - 2
	8.2.3 Rencana Penyediaan Tanah	VIII - 2
	8.2.4 Ketentuan Penyusunan Dokumen Penyediaan Tanah Dan Permukiman Kembali	VIII - 4
	8.2.5 Pelaku Dan Tahapan Pelaksanaan	VIII - 5
	1 Persiapan	VIII - 5
	2 Sosialisasi Awal	VIII - 6
	3 Pendataan	VIII - 6
	4 Rembuk dan Kosultasi	VIII - 7
	5 Penyusunan Dokumen LARAP	VIII - 7
	6 Pelaksanaan LARAP	VIII - 9
BAB IX	**RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN**	**IX - 2**
9.1	Identifikasi Kebutuhan Program Penangan Dan Investasi	IX - 2
9.2	Rancangan Skema Pembiayaan Penataan Kawasan Kumuh	IX - 3
BAB X	**RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN**	**X - 2**
10.1	Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	X - 2
	10.1.1 Partisipasi Masyarakat	X - 3
	10.1.2 Peran Pemerintah	X - 3
	10.1.3 Keterlibatan Dunia Usaha	X - 4
10.2	Peran Dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK	X - 7
Lampiran		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RP2KPKPK	I - 6
Gambar 1.2	Peta Delineasi Kumuh	I - 7
Gambar 1.3	Konsep Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	I - 8
Gambar 1.4	Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya	I - 8
Gambar 3.1	Peta Orientasi Kabupaten Pidie Jaya	III - 2
Gambar 3.2	Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya	III - 2
Gambar 3.3	Sk Kumuh Kabupaten Pidie Jaya	III - 3
Gambar 3.4	Peta Delineasi Kumuh Hasil Verifikasi	III - 5
Gambar 5.1	Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	V - 3
Gambar 5.2	Konsep Green Village Dan Green City	V - 5
Gambar 5.3	Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	V - 12
Gambar 7.1	Masterplan Kawasan Meureudu	VII - 68
Gambar 7.2	Masterplan Desain Kawasan Panteraja	VII - 74
Gambar 8.1	Bagan Penyusunan Larap	VIII - 8
Gambar 10.1	Proses Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	X - 2
Gambar 10.2	Struktur Pembagian Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat	X - 2
Gambar 10.3	Skema Peran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	X - 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ruang Lingkup Substansi Penyusunan dokumen RP2KPKPK	I - 4
Tabel 1.2	Lokasi Kumuh SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021	I - 6
Tabel 2.1	Isu Strategis Bangunan dan Lingkungan	II - 3
Tabel 2.2	Isu Strategis Air Minum	II - 3
Tabel 2.3	Isu Strategis Penyehatan Lingkungan	II - 4
Tabel 2.4	Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pidie Jaya	II - 5
Tabel 2.5	Overview Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah	II - 7
Tabel 3.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya	III - 2
	Perbandingan Luas Kumuh SK 2021 dengan Luas Kumuh Verifikasi 2023	III - 3
Tabel 4.1	Isu dan Permasalahan Kabupaten Pidie Jaya	IV - 2
Tabel 4.2	Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas	IV - 3
Tabel 4.3	Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan	IV - 7
Tabel 4.4	Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Bandar Baru	IV - 9
Tabel 4.5	Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Bandar Dua	IV - 16
Tabel 4.6	Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Jangka Buya, Ulim, dan Meurah Dua	IV - 23
Tabel 4.7	Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Meureudu	IV - 32
Tabel 4.8	Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Trienggadeng dan Panteraja	IV - 39
Tabel 4.9	Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	IV - 48
Tabel 4.10	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten Pidie Jaya	IV - 50
Tabel 4.11	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Bandar Baru	IV - 53
Tabel 4.12	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Bandar Dua	IV - 54
Tabel 4.13	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Jangka Buya	IV - 55
Tabel 4.14	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Meurah Dua	IV - 56
Tabel 4.15	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Meureudu	IV - 58
Tabel 4.16	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Trienggadeng	IV - 59
Tabel 4.17	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Panteraja	IV - 60
Tabel 4.18	Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Ulim	IV - 61
Tabel 5.1	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	V - 6
Tabel 5.2	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Bandar Baru	V - 13
Tabel 5.3	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Bandar Dua	V - 17
Tabel 5.4	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Jangka Buya	V - 21
Tabel 5.5	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Meurah Dua	V - 26
Tabel 5.6	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Meureudu	V - 31
Tabel 5.7	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Panteraja	V - 36
Tabel 5.8	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Trienggadeng	V - 40
Tabel 5.9	Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Ulim	V - 44
Tabel 6.1	Matriks Program Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan	VI - 3
Tabel 6.2	Rencana Aksi Pencegahan dan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI - 7
Tabel 6.3	Rencana Aksi Sosial Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	VI - 11
Tabel 7.1	Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten	VII - 2

Tabel 7.2	Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan	VII - 4
Tabel 7.3	Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan	VII - 6
Tabel 7.4	Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya	VII - 62
Tabel 7.5	Kawasan Kumuh Prioritas	VII - 67
Tabel 9.1	Karakteristik Kebutuhan Program Penanganan	IX -2
Tabel 9.2	Karakteristik Sumber Pembiayaan	IX - 4
Tabel 9.3	Skema Pembiayaan Berdasarkan Nilai Ekonomi	IX - 5
Tabel 9.4	Skema Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan	IX - 5
Tabel 10.1	Peran para pelaku dalam pembangunan yang berkelanjutan sesuai prinsip NUA dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh	X - 5
Tabel 10.2	Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh	X - 7
Tabel 10.3	Peran dan bentuk keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Dokumen RP2KPKPK	X - 7

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Membahas Mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Kedudukan Dokumen Rp2kpkpk Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Kota, Dan Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dalam pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di pemukiman tersebut, Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs (*Sustainable Development Goal's*) pada tujuan 11 *sustainable citirs and communities* beserta dengan target dan indikatornya, *New Urban Agenda* (NUA) dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Pemenuhan akses 90% air minum layak
2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak
3. Penanganan 10.000 ha kawasan permukiman kumuh

Rancangan penanganan ini pada hakikatnya adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan amanat dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam perumusannya juga mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan muatan-muatan lokal berupa filosofis, sosiologis, ekonomi dan yuridis masing-masing Kabupaten/Kota.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pidie Jaya untuk pembangunan permukiman selaras sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang baik tingkat regional maupun tingkat nasional.

1.2 Maksud Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen untuk memberikan panduan teknis bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan RP2KPKPK di Kabupaten Pidie Jaya sehingga penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sehat, aman, serasi dan teratur. Sehingga pembangunan permukiman selaras sesuai dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang baik tingkat regional maupun tingkat nasional.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK bupati.
2. Terciptakan keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan dan menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama kelompok Swadaya Masyarakat/ *Community Based Organization* dan kelompok badan usaha / *Corporate Social Responsibility* (CSR)
4. Terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (*New Urban Agenda*) sesuai dengan tujuan SDG's.

1.2.3 Sasaran

Penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pidie Jaya memiliki tujuan:

1. Terumuskannya profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam suatu profil berdasarkan SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021 meliputi 64 gampong berlokasi di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.
2. Terumuskannya konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh baik skala kabupaten maupun skala kawasan.
3. Terumuskannya rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rencana aksi program kegiatan penanganan kumuh baik skala kabupaten, skala kawasan maupun skala lingkungan.
4. Terumuskannya rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
5. Terumuskannya rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali.
6. Terumuskannya rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh dan,
7. Terumuskannya peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya ini dibagi menjadi 7 tahap, yaitu:

Tabel 1. 1 Ruang Lingkup Substansi Penyusunan dokumen RP2KPKPK

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
A. PERSIAPAN	
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK	a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan
2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	a. Rencana Kerja b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait	Data awal profil permukiman kumuh
4. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK	a. SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/ Kota dan Peta Dasar b. Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten c. Peta skala 1:5.000 untuk skala kawasan d. Peta skala 1:1.000 untuk skala kawasan prioritas
5. *Overview* kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/ kota dan status tanah permukiman	a. Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah b. Hasil overview dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/ kota (guna lahan permukiman)
6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi	Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi
7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat ditingkat kabupaten/ kota	Terbentuknya/ tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/ LKSM) yang terdaftar/ legal secara hukum
B. SURVEI	
1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder	Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)
2. Menyusun desain survei	Desain survei
3. Melaksanakan survey dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/ kota	a. Hasil survey berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/ kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh b. Hasil kompilasi data dari hasil survey dan data baseline sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor14/PRT/M/2018
C. PENYUSUNAN DATA DAN FAKTA	
Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi
D. ANALISIS	
1. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh)
2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh	a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh
E. PENYUSUNAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh	a. Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN
(pencegahan dan peningkatan kualitas)	b. Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/ kota
3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)	a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Agenda/ rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/ kota yang berkelanjutan, dengan adanya added value dalam penanganan kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD 2 (konsep dan strategi dan indikasi added value dalam penanganan permukiman kumuh)
F. PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Merumuskan scenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian	a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan b. Desain kawasan dan skenario penanganan permukiman kumuh
2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan	a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/ kota, skala kawasan dan skala lingkungan. b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh c. Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh
4. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas	Konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
5. Menyusun rencana penyediaan tanah	Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali
6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasan prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas	a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/ kota
8. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan kegiatan)
9. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas	a. Peta rinci/ siteplan b. Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D) c. Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan d. Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur e. DED (gambar kerja, RAB, RKS) komponen infrastruktur permukiman
G. LEGALISASI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	
1. Penyusunan *legal drafting* rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK)
2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Peraturan Walikota/ Peratuan Bupati RP2KPKPK

Sumber: Surat Edaran DJCK Nomor 30/SE/DC/2020



Gambar 1. 1 Proses Penyusunan RP2KPKPK
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

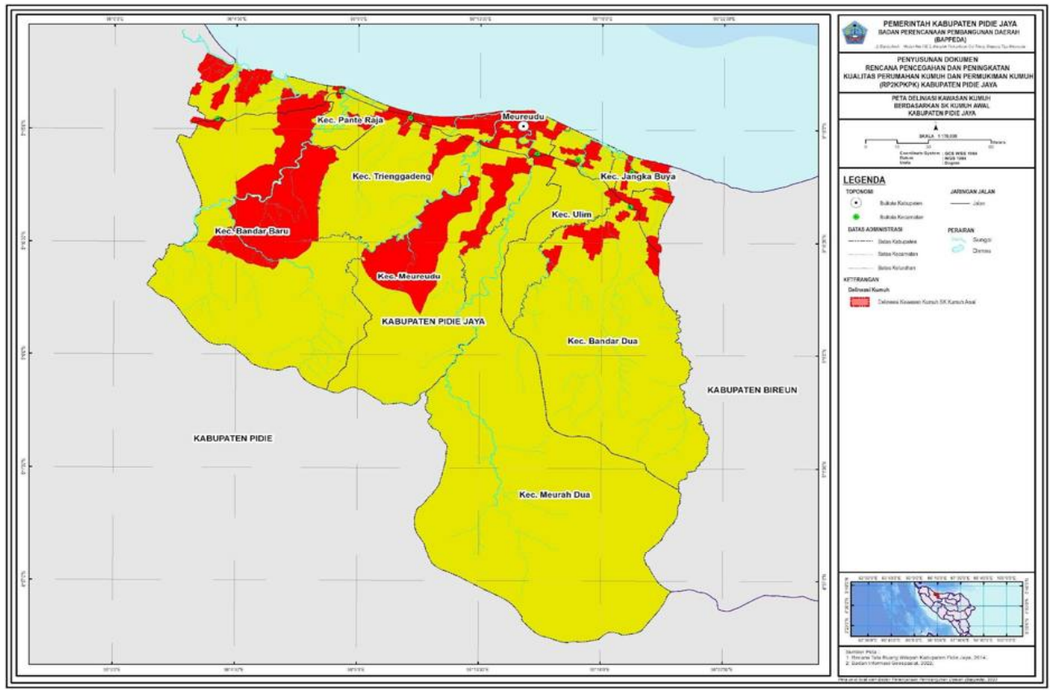
Lokasi kegiatan, kajian, penyusunan dokumen serta pembahasan laporan RP2KPKPK Kabupaten Pidie Jaya ini dilaksanakan dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya, yang meliputi seluruh kawasan permukiman kumuh yang disebutkan dalam SK Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 652 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan luas total lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah seluas 45.716 Ha atau 457,16 km2 yang tesebar di 66 Gampong dan 8 Kecamatan.

Tabel 1. 2 Lokasi Kumuh SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021

No	Gampong	Kecamatan	Luas (KM2)
1	Keude Lueng Putu	Banda Baru	5,80
2	Sarah Panyang	Banda Baru	2,26
3	Kayee Jatoe	Banda Baru	6,00
4	Pulo Pueb	Banda Baru	1,25
5	Cut Njong	Banda Baru	3,60
6	Manyang Lancok	Banda Baru	1,50
7	Paru Keude	Banda Baru	7,60
8	Paru Cot	Banda Baru	20,00
9	Baroh Lancok	Banda Baru	2,35
10	Pulo Rheng	Banda Baru	8,60
11	Abah Lueng	Banda Baru	6,10
12	Jiem Jiem	Banda Baru	3,02
13	Blang Sukon	Banda Baru	5,60
14	Blang Baro	Banda Baru	2,90
15	Keude Ulee Gle	Bandar Dua	5,00
16	Alue Keutapang	Bandar Dua	20,00
17	Asan Kumbang	Bandar Dua	3,00
18	Paya Pisang Klat	Bandar Dua	30,00
19	Blang Dalam	Bandar Dua	22,00
20	Muko Kuthang	Bandar Dua	9,00
21	Kuta Krueng	Bandar Dua	12,50
22	Blang Kuta	Bandar Dua	22,50
23	Alue Sane	Bandar Dua	22,50
24	Pulo	Bandar Dua	15,00
25	Meurandeh Alue	Bandar Dua	22,50
26	Keude Jangka Buya	Jangka Buya	6,80
27	Kiran Baroh	Jangka Buya	8,00
28	Kuta Broh	Jangka Buya	7,40
29	Beureumbang	Jangka Buya	13,00
30	Jurong Binje	Jangka Buya	8,50
31	Keude Ulim	Ulim	5,00
32	Tanjong Ulim/Keude Parek	Ulim	1,03
33	Mesjid Ulim Baroh	Ulim	1,69
34	Grong-grong Capa	Ulim	10,04
35	Meunasah Bie	Meurah Dua	4,17
36	Meunasah Raya	Meurah Dua	2,70
37	Meunasah Mancang	Meurah Dua	2,81
38	Meunasah Jurong/Teupin Pukat	Meurah Dua	2,81
39	Lueng Bimba	Meurah Dua	8,84
40	Pante Beureune	Meurah Dua	2,15
41	Beuringen	Meurah Dua	2,15
42	Keude Meureudeu	Meureudu	1,39
43	Meuraksa	Meureudu	4,72
44	Meunasah Balek	Meureudu	4,72
45	Pohroh	Meureudu	7,58
46	Rungkom	Meureudu	7,00
47	Manyang Cut	Meureudu	3,07
48	Mns Kulam Beuracan	Meureudu	3,85
49	Mns Mulieng Beuracan	Meureudu	3,12
50	Mns Lhok/Mns Gantung	Meureudu	5,19
51	Masjid Tuha/Dayah U Paneuk	Meureudu	3,78
46	Pohroh	Meureudu	7,58

No	Gampong	Kecamatan	Luas (KM2)
47	Rungkom	Meureudu	7,00
52	Teupin Peuraho	Meureudu	2,49
53	Rhieng Krueng	Meureudu	2,23
54	Rhieng Mancang	Meureudu	0,75
55	Gampong Meue	Trienggadeng	2,41
56	Masjid Trienggadeng	Trienggadeng	3,54
57	Sagoe	Trienggadeng	3,28
58	Keude Trienggadeng	Trienggadeng	0,79
59	Kuta Pangwa	Trienggadeng	7,87
60	Rawa Sari	Trienggadeng	4,88
61	Deah Pangwa	Trienggadeng	12,45
62	Cot Lheu Rheng	Trienggadeng	6,55
63	Keude Panteraja	Pante Raja	1,25
64	Gampong Teungoh	Pante Raja	2,00
	Total		**457,16**

Sumber: SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021



Gambar 1. 2 Peta Delineasi Kumuh
Sumber: SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu dari sisi ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sektoral seperti Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

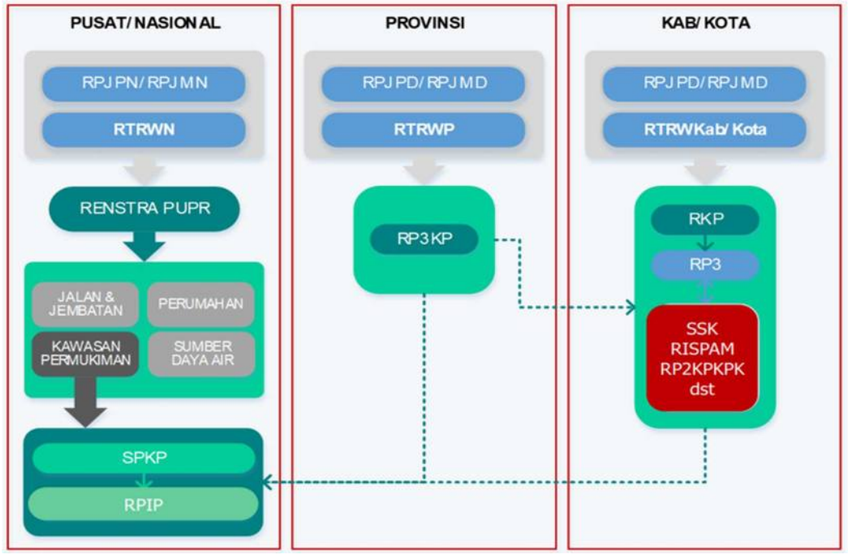
Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang terdiri dari Rencana Pembangunan dan Pengembangnan Perumahan (RP3) dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). RP3KP ini, terutama RKP merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK.

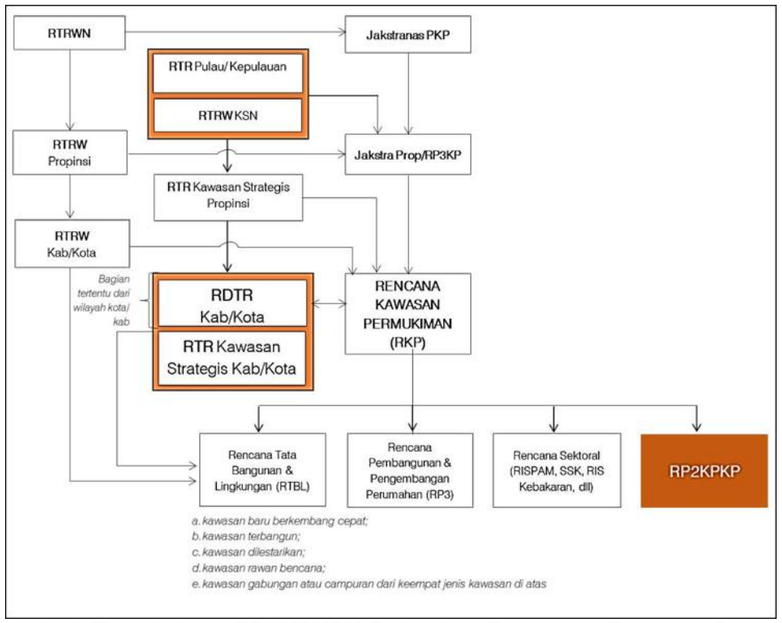
RP2KPKPK yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan rencana induk sektor yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 1. 3 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020



Gambar 1. 4 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

1.5 Sistematika Penyajian

Untuk memudahkan dan memahami proses dan subtansi penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Pidie Jaya ini, maka RP2KPKPK ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu:

I. BAGIAN PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan Latar Belakang penyusunan dokumen, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup yang terdiri dari Ruang Lingkup Substansi dan Ruang Lingkup Wilayah, Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota serta uraian Sistematika penyajian laporan.

II. BAGIAN KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya yang telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan tersebut. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Pidie Jaya, Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pidie Jaya, serta Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pidie Jaya.

III. BAGIAN PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait. Secara lebih rinci, bagian ini turut menjelaskan tentang Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM), serta Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.

IV. BAGIAN PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya. Secara lebih rinci, bagian ini turut memaparkan tentang Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya, Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan, serta Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh tersebut.

V. BAGIAN KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh. Bagian ini akan mengulas tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota serta Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.

VI. BAGIAN RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) yang berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan membahas tentang Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya, Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP), serta Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya.

VII. BAGIAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Ini merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Secara lebih rinci, bagian ini akan memaparkan tentang Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya, Program peningkatan kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan, Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas, dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

VII. BAGIAN RENCANAN PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali

IX. BAGIAN RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

X. BAGIAN RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan membuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Pada Bagian Ini Mencerminkan Karakter Dan Kekhasan Penanganan Kawasan Kumuh Di Masing-masing Kota/Kabupaten Yang Telah Dioverview. Rumusan Bagian Ini Lebih Menggambarkan Dan Memaparkan Secara Jelas Rumusan Kebijakan Penanganan Kumuh Perkotaan

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bab ini akan membahas mengenai kajian kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang meliputi isu strategis pembangunan dan permukiman, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, serta kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.1 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Isu strategis pembangunan permukiman perkotaan terbagi menjadi empat sektor, yaitu pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air limbah, persampahan dan drainase. Penjabaran isu-isu strategis yang mempengaruhi penjabaran kondisi eksisting sebagai baseline awal perencanaan serta permasalahan dan tantangan yang harus diantisipasi.

2.1.1 Pengembangan Permukiman

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan serta desa tertinggal. Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah:

1. Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Percepatan pencapaian target SDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.
3. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Program-program Direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI.
4. Percepatan pembangunan di wilayah barat Indonesia (Provinsi Aceh) untuk mengatasi kesenjangan.
5. Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin.
6. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya kawasan permukiman kumuh.
7. Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun.
8. Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman.
9. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman dan ditambah belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Isu-isu strategis di Kabupaten Pidie Jaya terkait pengembangan permukiman Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan dokumen RPD Pidie Jaya tahun 2023-2026 saat ini adalah:

- Masih adanya jaringan irigasi dengan kondisi belum baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan debit air pada musim kemarau menjadi 10%.
- Masih perlunya perbaikan beberapa kawasan pemukiman di wilayah sungai diakibatkan banjir, tanah longsor dan erosi.
- Belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan.

- Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak.
- Masih adanya drainase dengan kondisi buruk/rusak.
- Masih banyaknya ruas jalan lingkungan yang rusak.
- Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, nonalam dan wabah).
- Belum tersedianya strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
- Masih minimnya ketersediaan peralatan Penanggulangan Bencana.
- Belum optimlanya pemulihan pasca bencana.
- Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Belum optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air, pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengendalian pencemaran udara.
- Masih terjadinya penurunan kualitas air.
- Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

2.1.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Berdasarkan dokumen RPD Pidie Jaya tahun 2023-2026 kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut:

1) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah,
2) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah.
3) Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 16.856 unit.

Tabel 2. 1 Isu Strategis Bangunan dan Lingkungan

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Bangunan Gedung	58,44 % / 7.750 unit rumah tidak teratur
		19,29% / 2.558 unit rumah tidak sesuai dengan Persyaratan teknis atau rumah tidak layak huni
		Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
		Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai kawasan permukiman.
		Membangun kesadaran masyarakat pada kawasan padat agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh.
2	Kondisi Jalan Lingkungan	7,95 % /15.197,08 meter kebutuhan akan jalan lingkungan baru
		42,86 % / 81.335,82 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan
		Jalan antar desa masih memerlukan pengembangan / mengingat kontruksi jaringan jalan yang belum memadai di dalam permukiman.
3	Kondisi Proteksi Kebakaran	60,82 % / 8.066 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		96,62 % / 12.813 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber: Analisis dan Baseline Kumuh, 2023

2.1.3 Sistem Penyediaan Air Minum

Isu strategis Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2. 2 Isu Strategis Air Minum

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Penyediaan Air Minum	38,45 % / 6.130 KK tidak memiliki akses aman air minum tidak berbau dan tidak berasa
		34,71 % / 5.534 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari
		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pidie Jaya
		PDAM Tirta Krueng Meureudu belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan, banyak yang beralih ke sumur Bor, sumur digali dengan pompa dan Penampungan Air hujan

Sumber: Analisis dan Baseline Kumuh, 2023

2.1.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman

Isu strategis Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2. 3 Isu Strategis Penyehatan Lingkungan

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Drainase Lingkungan	8.30 Ha genangan di permukiman kumuh
		17,96 % / 24.051,62 meter kebutuhan drainase lingkungan baru
		43,27 % / 57.928,41 meter drainase lingkungan mengalami kerusakan
		Beberapa ruas jalan tidak dilengkapi oleh jaringan drainase baik jaringan sekunder maupun tersier di beberapa ruas Kabupaten Pidie Jaya
		Sebagian besar drainase mengalami penyumbatan atau pendangkalan (sedimentasi).
		Kondisi lahan yang berkontur menyebabkan fungsi drainase tidak maksimal
2	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	17,65 % / 2.814 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		17,65 % / 2.814 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Belum optimalnya penggunaan tangkiseptik aman
3	Kondisi Pengelolaan Persampahan	96,25% / 15.354 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis
		89,75 % / 14.309 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis
		Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah
		Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah

Sumber: Analisis dan Baseline Kumuh, 2023

2.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Sesuai amanat UU No.1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dapat disampaikan bahwa:

A. Amanat terkait Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah:
   1. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 59 antara lain mencakup:
      a. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan perumahan kumuh
      b. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidaK terencana dan tidak teratur.
   2. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 66 antara lain mencakup:
      a. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
      b. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
   3. Pengendalian kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan untuk:
      a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
      b. Mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

B. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang termaktub dalam pasal 94 dengan maksud:
   1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.
   2. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
   3. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

1. Pencegahan (UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 95)
   a. Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:
      1) Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi.
      2) Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum.
      3) Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
      4) Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah.

b. Pelaksanaan pencegahan melalui:

1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian:
   a) Perijinan
   b) Standar teknis
   c) Kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan undang-undangan.
2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pencegahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Peningkatan kualitas Pola-pola penanganan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

a. Pemugaran
b. Peremajaan
c. Permukiman kembali
d. Pengelolaan

Penetapan lokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan persyaratan:

1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan tata ruang kota/kabupaten;
2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
3. Kondisi dan kualitas prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
5. Kualitas bangunan;
6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib disahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Syarat dan tatacara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengingat kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kabupaten yang sangat strategis, maka penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk mengembangkan lapangan kerja, serta mencapai stabilitas ekonomi daerah. Oleh karenanya pembangunan kota membutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan antisipatif.

Adapun untuk inventarisasi dokumen kebijakan dan sektoral di Kabupaten Pidie Jaya yang akan menjadi dasar dan menjadi pertimbangan penting dalam rencana pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pidie Jaya

No	Dokumen	Ada/ Tidak	Keterangan
1	RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033	ADA	Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033
2	RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2036	ADA	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2016
3	Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	ADA	Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026
4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2025	Ada	Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2009
5	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026	ADA	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 - 2026
6	SSK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022	ADA	

7	RISPAM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021	ADA	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Lebih rinci, overview kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan target pembangunan tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Overview Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
1	RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033	Visi "Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan". Misi RTRW Aceh terkiat dengan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman: Kedua: menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, perdalaman dan kepulauan; Keempat: melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.	Tujuan dari Rencana Tata Ruang Provinsi Aceh secara umum: memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh; menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera; mewujudkan kesimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh; dan mewujudkan penurunan risiko bencana.	Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi antara lain: 1. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh; 2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh. Strategi pengembangan struktur ruang meliputi antara lain: Strategi 1: mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan; mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Strategi 2: meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, dan udara) yang berskala regional, nasional dan internasional; meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan air minum dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi antara lain: 1. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan 2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				lingkungan. Strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi antara lain: Strategi 1: mengembangkan kawasan budidaya unggulan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan standar yang berlaku secara sinergis untuk mendorong pengembangan ekonomi; dan mewujudkan pengembangan kawasan pembangunan dan pelayanan terpadu yang multi fungsi (*mixed use*) dalam satu kawasan dan antar kawasan. Strategi 2: membatasi perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya rawan bencana; mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk fungsi komersil/bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan penyediaan ruang terbuka; dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mengoptimalkan fungsi kawasan Gampong dan nama lain di sekitarnya.
2	RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2034		Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah: "Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Agrobisnis dan Perikanan yang produktif dan berkelanjutan". Tujuan penataan ruang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Agrobisnis dan Perikanan: pembangunan daerah berbasis potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor andalan. 2. Produktif: proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien	Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pidie meliputi: 1. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup. 2. Penataan lahan hutan untuk mendukung kelestarian dan keserasian lingkungan hidup. 3. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
			sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. 3. Berkelanjutan: pembangunan daerah memperhatikan pada kebutuhan serta kepentingan generasi saat ini, dan generasi yang akan datang.	5. Pengembangan sistem jaringan prasarana kegiatan agrobisnis dan permukiman. 6. Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya.
3	Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026	-	Tujuan dari Rencana Pembangunan Aceh terkait Perumahan dan permukiman adalah meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Dengan sasaran sebagai berikut: meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah; meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik.	Strategi dan Arah kebijakan untuk menjawab tujuan sebagai berikut: Strategi 1: peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi Arah Kebijakan : pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan. Strategi 2: Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkuta jalan, pelayaran, dan penerbangan Arah Kebijakan: pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan; pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi. Strategi 3: menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang Arah Kebijakan: pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA Strategi 4: peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat Arah Kebijakan: peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian; peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air.
4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2032	Visi: "Pidie Jaya yang islami, berkualitas, adil, makmur dan sejartera" Misi: 1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam, Budaya dan Adat Istiadat. 2. Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. 3. Mewujudkan Pidie Jaya yang demokratis, aman, damai dan bersatu berlandaskan hukum 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 6. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Maksud: 1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya 2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa yang akan datang. Tujuan: 1. Menjelasakan gambaran umum kondisi Kabupaten Pidie Jaya, analisis isu-isu strategis, visi dan misi kabupaten Pidie Jaya, arah kebijakan dan kaedah pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. 2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten pidie jaya sesuai dengan wilayah ruang dan waktu 3. Mendukung jalinan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat 4. Pidie Jaya yang sesuai dengan visi dan misi daerah.	Pembangunan daerah dalam jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya ditujukan kepada hal-hal antara lain: 1. Terwujudnya pelaksanaan syariat islam, budaya dan adat istiadat 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 3. Terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan 4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas 5. Terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera 6. Mewujudkan Pidie Jaya yang demokratis, aman, damai dan bersatu berlandaskan hukum
5	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026	-	Tujuan: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian daerah berwawasan lingkungan. Sasaran: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar lingkungan permukiman dan perekonomian yang berkelanjutan	Strategi: - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat - Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup Arah Kebijakan: - Memperkecil ketimpangan antar wilayah - Membangun konektivitas perhubungan - Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				- Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup - Pengelolaan persampahan bersama masyarakat.
6	SSK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022	Visi: Memberikan gambaran dan arah pengembangan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif serta sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	Tujuan: menopang dan mengimplementasikan terwujudnya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang bersih, sehat dan cerdas melalui pembangunan sanitasi yang benar dan berkelanjutan	
		Misi: Dalam penyelenggaraan sanitasi merupakan kerangka pengembangan sanitasi sebagai upaya mencapai target *universal access* pada Tahun 2019 yang meliputi pengelolaan air limbah permukiman, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan.	Sasaran: ada tiga komponen yang menjadi fokus utama yaitu: (1) air limbah domestik, (2) persampahan dan (3) drainase perkotaan. Ketiga sub sektor layanan sanitasi ini merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan sanitasi akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.	
		Misi Persampahan 1. Meningkatkan sistem pengelolaan, operasional dan pelayanan publik sektor persampahan yang optimal dan berkelanjutan Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. 2. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan: Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan *stakeholder* terkait 3. Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.		Strategi 1: Peningkatan area pelayanan persampahan. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access Tahun 2019 dan terlayaninya seluruh penduduk serta mengurangi sampah yang tidak dikelola dengan baik dan dibuang sembarangan. Strategi 2: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemahaman PHBS dan pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 dan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS serta pengelolaan sampah melalui sistem 3R. Strategi 3: Peningkatan sumber pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan persampahan. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				lingkungan menuju Universal Access Tahun 2019 serta bertambahnya sarana dan sarana persampahan. Strategi 4: Penyusunan dokumen perencanaan persampahan serta sistem 3R dan integrasi dengan dokumen perencanaan persampahan yang telah ada. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 serta penerapan dokumen perencanaan teknis dan sistem 3R yang hasilnya adalah terbangunnya sarana dan prasarana persampahan. Strategi 5: Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana persampahan. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 dan tersedianya fasilitas sarana dan sarana persampahan yang memadai dan berteknologi tinggi. Strategi 6: Peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat sistem 3R. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 serta bertambahnya informasi pengelolaan persampahan melalui mekanisme sistem 3R bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Strategi 7: Pengoptimalisasian TPA. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah perlunya optimalisasi TPA dengan *sistem Sanitary Landfill* Tahun 2018 dan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 8:

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				Penyediaan peraturan daerah dan standar operasional terkait pengelolaan persampahan. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah adanya komitmen pemerintah Kabupaten dalam melahirkan regulasi Perda/qanun yang mengatur pengelolaan persampahan dan standar operasional pada tahun 2017 serta peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju Universal Access Tahun 2019. Strategi 9: Pengoptimalisasian organisasi/UPTD yang mengelola persampahan baik regulator maupun operator. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah berfungsinya organisasi/UPTD yang mengelola persampahan baik regulator maupun operator pada tahun 2017 dan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019.
		Misi Drainase 1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih melalui pembangunan sarana drainase; 2. Mendorong peningkatan upaya-upaya penyelenggaraan drainase secara berwawasan lingkungan (*ecodrain*) untuk meminimalkan genangan dan banjir yang berdampak negatif; 3. Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan 4. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan prasarana dan sarana drainase perkotaan.		Strategi 1: Perlunya Komitmen dan pendanaan dari Pemerintah untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase secara bertahap. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur dan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 2: Pengembangan perencanaan drainase kota yang terintegrasi dan komprehensif. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah pengelolaan drainase berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 serta tersedianya sarana dan prasarana drainase yang efisien dan terpadu dan memenuhi standarisasi. Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase perkotaan. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan infrastruktur dan pengelolaan drainase berwawasan lingkungan menuju

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				Universal Access Tahun 2019 serta menurunnya area genangan air dan lancarnya badan alir air saluran. Strategi 4: Peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat terhadap PHBS secara bertahap. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat dan nyaman di Kabupaten Pidie Jaya menuju *Universal Access* Tahun 2019 serta bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS.
		Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan fasilitas dan akses layanan sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*). 4. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman; 5. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.		Strategi 1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap PHBS secara bertahap. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah mengurangi BABs dan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas BABs menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 2: Pengembangan teknologi pengolahan dan air limbah secara modern. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah adanya sistem yang mengolah hasil dari saluran pembuangan air limbah dan mengurangi pencemaran SPAL serta menurunnya tangki septik tank tidak aman serta menciptakan pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 3: Peningkatan sarana dan prasana air limbah. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah tersedianya fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 4: Pengoptimalisasian IPLT. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah tersedianya sarana fasilitas terpusat pembuangan air limbah dan terciptanya pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 5:

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				Pembangunan IPLT. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah tersedianya fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju *Universal Access* Tahun 2019. Strategi 6: Penganggaran biaya sektor air limbah. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah dengan adanya anggaran maka tujuan sanitasi kabupaten yaitu meningkatkan lingkungan permukiman masyarakat Pidie Jaya yang bersih, sehat dan nyaman serta lingkungan yang lestari melalui pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan menuju *Universal Access* Tahun 2019 dan sasaran sanitasi mengurangi BABS dan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas BABS, tersedianya sarana dan prasarana untuk mengurangi pencemaran SPAL serta menurunnya tangki septik tank tidak aman dan optimalisasi IPLT akan tercapai dan terlaksana menuju *Universal Access* pada Tahun 2019. Strategi 7: Penyediaan standar operasional dan peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah adanya komitmen pemerintah Kabupaten dalam melahirkan regulasi Perda/qanun dan standar operasional yang mengatur air limbah melalui pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan menuju universal access Tahun 2019. Strategi 8: Penyiapan organisasi/lembaga pengelola air limbah. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi adalah pembentukan organisasi/lembaga yang mengelola air limbah domestik melalui pengelolaan air Limbah domestik berwawasan lingkungan menuju Universal Access Tahun 2019. Strategi 9: Peningkatan kapasitas pengetahuan sektor air limbah bagi SDM. Kaitannya dengan tujuan dan sasaran sanitasi

No.	Sumber / Dokumen	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Kebijakan dan Strategi
				adalah tersedianya SDM yang memadai untuk pengelolaan air limbah domestik berwawasan lingkungan menuju Universal Access Tahun 2019.
7	RISPAM Kabupaten Pidie JayaTahun 2021		Tujuan: Menghasilkan dokumen Rencana Induk SPAM yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021-2040 (periode 20 tahun ke depan). Sasaran: 1. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan SPAM. 2. Indentifikasi kebutuhan Penyelenggaraan SPAM yang terdiri dari air baku, produksi, distribusi, cakupan pelayanan, dan pelayanan. 3. Tersusunnya strategi dan program Penyelenggaraan SPAM yang terdiri dari pola investasi dan pembiayaan serta tahapan pembangunan SPAM	Ruang Lingkup: 1. Melaksanan koordinasi, mengumpulkan data dan konsultasi kepada instansi terkait. 2. Menganalisis kinerja badan pengelola air minum daerah. 3. Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum. 4. Melaksanakan identifikasi potensi pengembangan pelayanan air minum dan potensi air baku. 5. Melaksanakan survei sosial ekonomi masyarakat. 6. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan hasil survei kebutuhan nyata (*Real Demand Survey*), kriteria dan standar pelayanan. 7. Membuat skematisasi pemakaiaian air dan hidrolis rencana pengembangan sistem jaringan pipa eksisting dan perencanaan jaringan pipa pada SPAM baru. 8. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru. 9. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan pengembangan SPAM dengan sanitasi. 10. Menyusun strategi dan program pengembangan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya. 11. Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM

Sumber: Berbagai Sumber Dokumen Kabupaten Pidie Jaya, 2023

2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan karena mengingat kedudukan, fungsi dan peranan Pemerintah Kota yang sangat strategis, maka penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kota, diarahkan untuk mengembangkan lapangan kerja, serta mencapai stabilitas ekonomi daerah. Oleh karenanya pembangunan kota membutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan antisipatif.

Selanjutnya, sesuai amanat UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan bahwa:

2.3.1 Amanat terkait Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

1. Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 59 antara lain mencakup:
   a. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   b. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
2. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan pada pasal 66 antara lain mencakup:
   a. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   b. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
3. Pengendalian kawasan permukiman merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan untuk:
   a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   b. Mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

2.3.2 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang termaktub dalam pasal 94 dengan maksud:

1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.
2. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Pencegahan (UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 95)

1) Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:
   a) Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi.
   b) Ketidaklengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum.
   c) Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
   d) Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah.

2)Pelaksanaan pencegahan melalui:

a) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian;

1. Perijinan
2. Standar teknis
3. Kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

b)Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pencegahan kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Peningkatan kualitas

Konsep penanganan permukiman kumuh sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97 menyebutkan bahwa pola-pola penanganan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1) Pemugaran

a) Pengertian

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, yang meliputi perbaikan dan/atau pembangunan bangunan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di dalamnya, sehingga memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan untuk kegiatan permukiman.

b) Penerapan

Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh diterapkan berdasarkan tingkat perbaikan dan/atau pembangunan kembali yang dibutuhkan. Kebutuhan perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama – sama masyarakat. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau oleh masyarakat secara swadaya tergantung dari berat/ringannya perbaikan yang harus dilakukan serta berdasarkan pertimbangan lain.

c) Jenis - jenis penanganan pemugaran

Revitalisasi Kawasan Permukiman Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini bertujuan memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana eksisting yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuan dari prasarana dan sarana melalui program perbaikan dan peningkatan tanpa melakukan pembongkaran berarti.

Pada kegiatan ini dilakukan pula pengadaan sarana dan prasarana baru yang diperlukan tanpa merubah struktur yang ada dan memanfaatkan bangunan eksisting secara maksimal.

Rehabilitasi (Perbaikan) Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain.

Renovasi Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Bentuk umumnya adalah peningkatan kemampuan dan kualitas komponen tersebut sesuai dengan persayaratan baru.

Yang termasuk renovasi adalah:

1. Penyesuaian organisasi ruang (pemanfaatan ruang) dan peningkatan system prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan;
2. Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan;
3. Orientasi ruang.

Rekonstruksi Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman kedalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannya. Dalam hal ini tidak ada kekhawatiran terhadap konsekuensi yang timbul karena perubahan ukuran dan bentuk komponen.

Preservasi (Pemeliharaan dan Pengendalian) Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan.

Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KBD, KLB, GSB, GSJ, dan lain-lain). Sifat penanganan ini cenderung lebih kearah pencegahan timbulnya permukiman kumuh, sehingga seringkali upaya ini dilakukan bersamaan dengan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi (Sumber: UU No. 1 Pasal 97 Tahun 2011).

2) Peremajaan

a) Pengertian

Peremajaan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

b) Penerapan

Peremajaan diterapkan pada permukiman kumuh secara struktur ruang, ekonomi dan perilaku tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak dapat ditangani hanya dengan perbaikan dan peningkatan fisik.

c) Jenis – Jenis Penanganan

1. *Renewel* (peremajaan)

Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian merubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru.

Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini adalah:

- Konsolidasi tanah
- *Land re-adjusment*
- *Land sharing*, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersil

2. Redevelopment

Merupakan upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana

pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya. Perubahan secara struktural dan peruntukan lahan serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur pembangunan baru (KLB, KDB, GSB, dan lain-lain) bisanya terjadi.

3. Restorasi

Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru. Sumber: UU No. 1 Pasal 97, 2011.

3) Permukiman Kembali

a) Pengertian

Permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi batang ataupun orang.

b) Penerapan

Penanganan ini diterapkan pada permukiman:

1. Secara lokasi berada pada lahan illegal
2. Tidak memiliki potensi yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan
3. Secara lingkungan memberikan dampak negative yang lebih besar apabila tetap dipertahankan

Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antar lain:

1. Lokasi yang berada di atas tanah Negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan dan lain-lain).
2. Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi) yaitu permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di: bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, di bawah SUTET (tiang tegangan tinggi) serta tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pola – pola penanganan ini dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman.

c. Konsep Permukiman

1) Konsep Permukiman Kumuh di Tepi Air

Permukiman kumuh di tepi air biasanya berwujud permukiman kumuh di sepanjang bantaran sungai, tepi pantai dan tepi danau yang ada di dalam suatu kawasan perkotaan. Kekumuhan di permukiman tepi air ini terjadi akibat utamanya adalah badan air berupa sungai, pantai dan danau dijadikan tempat buangan limbah rumah tangga seperti tempat membuang sampah, membuang air bekas kamar mandi bahkan sebagai jamban rumah tangga. Bentuk fisik tata bangunan permukiman kumuh tepi air sering didapati membelakangi badan air, rapat dan tidak ada jarak bahkan mengarah ke dalam badan air. Gambaran

permukiman kumuh di tepi air (Permukiman Kumuh Tepi Pantai, Permukiman kumuh Tepi Sungai.

Seperti halnya permukiman tepi pantai yang kumuh, permukiman kumuh di tepian sungai sering terjadi akibat urbanisasi masyarakat desa ke kota yang berusaha mencari tempat tinggal yang murah di sekitar kota, biasanya tanah di tepi sungai yang terlantar dan tidak dimanfaatkan Pemerintah kota selalu menjadi sasaran para pendatang untuk mendirikan rumah seadanya. Karena rumah-rumah ini di tepi sungai dengan status lahan ilegal maka masyarakat urban tidak akan membuat rumah menjadi permanen di samping keterbatasan dana pembangunan, sifat hidup yang abai kebersihan dan kesehatan.

Pemanfaatan lahan tepi danau oleh para perambah lahan yang ada di dalam kota biasanya dipergunakan untuk perumahan semi permanen ini akhirnya merusak ekosistem danau, hal ini diakibatkan oleh buangan sampah dan limbah domestik rumah tangga terlebih lagi tidak ada usaha pemeliharaan danau oleh masyarakat setempat.

Dari banyak kasus terjadinya hunian kumuh di tepi air dan usaha-usaha untuk menanganinya dari tingkat menata ulang tanpa menggusur, sampai merelokasi rumah-rumah kumuh yang berada di atas lahan bantaran ke lokasi lain. Belajar dari kasus-kasus penataan permukiman kumuh di tepi air yang sering gagal, maka diusulkan konsep penataan kampung kumuh tepi pantai adalah *"Water Front Kampung*" dimana konsep ini mengambil dari konsep *Water Front city* yang merubah sama sekali wajah kota yang berada di tepi pantai untuk keperluan pariwisata, komersial dan taman. Pada konsep *Water Front Kampung*, konsep utamanya adalah menjadikan badan air menjadi bagian hidup masyarakat kampung untuk bertempat tinggal, bekerja dan bersosial yang memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan dan menambah nilai permukiman itu sendiri. Langkah-langkah penataannya berupa:

a. Pembangunan jalan tepi air untuk akses pemeliharaan, merubah orientasi bangunan rumah menghadap badan air dan menjadikan jalan tepi air untuk fasilitas ekonomi lokal.
b. Relokasi rumah-rumah masih dalam lokasi yang disiapkan secara formal bisa berupa rumah susun atau rumah tapak, lokasi lahan yang telah dibebaskan dijadikan RTH kota dan sarana pariwisata.
c. Pembangunan fasilitas ekonomi berupa pasar rakyat ataupun kompleks pertokoan yang bertematik.

2) Konsep Permukiman Kumuh di Dataran Rendah

Permukiman kumuh di dataran rendah dalam kawasan kota, biasanya terdapat di sepanjang jalur rel kereta api, tanah-tanah negara atau swasta yang kosong dan tidak dijaga, atau perkampungan padat yang dibangun swadaya masyarakat di tengah kota yang sedikit mendapatkan akses jalan lingkungan.

Permukiman kumuh di sepanjang tepi rel dan tanah terlantar biasanya juga terintegrasi dengan sistem ekonomi ruang kota berupa satu kawasan perdagangan. Para penghuni permukiman kumuh ini umumnya masyarakat urban yang berusaha mendapatkan penghasilan dari sistem ekonomi perkotaan tersebut, tetapi di satu sisi bagaimana hidup berhemat dengan tinggal di perkampungan kumuh tepi rel atau atau tanah terlantar. Gambaran permukiman kumuh di dataran rendah dalam kota terlihat masyarakat urban yang tinggal di sepanjang bantaran rel memanfaatkan lahan kosong PJKA yang tidak bertindak tegas. Biasanya permukiman kumuh ini letaknya sangat strategi di belakang pasar atau pusat-pusat ekonomi Kota.

Akar permasalahan dari permukiman kumuh di lahan dataran rendah di kawasan perkotaan terdapat dua penyebab yaitu; masalah perambahan lahan kosong oleh masyarakat miskin untuk mencari lahan tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja, untuk kasus ini konsep yang bisa dipergunakan adalah relokasi hunian kumuh kedalam hunian susun yang dekat dengan kegiatan ekonomi sebelumnya.

Untuk permukiman kumuh di lahan dataran rendah yang berada di dalam kawasan perkotaan yang terjadi pada kampung-kampung kota dengan sejarah terbentuknya ada terlebih dahulu sebelum kawasan perkotaan berkembang,

konsep yang bisa dipergunakan seperti adalah menjadikan wajah kampung kumuh perkotaan lebih asri dan bercitra seni, dilengkapi dengan, penyediaan prasarana jalan lingkungan, drainase, persampahan, RTH dan fasilitas sosial ekonomi.

3) Konsep Permukiman Kumuh di Daerah Rawan Bencana

Permukiman kumuh di daerah rawan bencana terdapat di lahan perkotaan yang mempunyai perbukitan dengan kemiringan lahan yang curang dan tidak bervegetasi. Lokasi permukiman kumuh yang rawan bencana juga terdapat pada tepi pantai dengan tingkat abrasi yang cukup tinggi.

Kedua jenis lokasi ini umumnya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan lahan untuk tinggal dekat dengan tempat bekerjanya sebagai nelayan dan petani, tetapi yang tersedia hanya lahan-lahan kritis dan ilegal. Kerawanan bencana di permukiman kumuh ini semakin mengancam karena kondisi alam yang semakin parah akibat pemanasan global dan ketidakpedulian masyarakatnya. Gambaran permukiman kumuh di kawasan bencana (Permukiman Kumuh di Tepi Pantai dengan tingkat abrasi yang tinggi, Permukiman Kumuh di lahan Longsor).

Dengan kondisi lahan yang sampai mengancam jiwa dan tidak hanya tidak menyediakan kenyamanan, tetapi apabila pemerintah kota mempertahankan keberadaan permukiman ini, maka Konsep yang bisa dipergunakan untuk penataan permukiman kumuh di atas atau berada di sekitar lahan kritis bencana bisa dilakukan melalui konsep;

a. Penanggulan, pemberian pemecah ombak dan pembuatan jalan di tepi pantai.
b. Terasering, penghijauan dan sistem drainase perbukitan untuk mengurangi resapan limpasan air hujan langsung ke badan bukit.

4) Konsep Permukiman Kumuh di Atas Air

Kumuh di atas air biasanya didapatkan pada permukiman nelayan yang membangun perumahan diatas dasar pantai pasang surut untuk keperluan tempat tinggal dan bekerja. Faktor ketersediaan lahan untuk rumah nelayan juga sering menjadi penyebab mengapa nelayan memilih tinggal di atas permukaan air di antaranya adalah pantai di tepi perbukitan yang sedikit sekali menyediakan lahan datar untuk dibangun rumah, kepadatan tinggi di kawasan permukiman nelayan yang tidak menyisakan lahan lagi untuk keluarga nelayan baru dan Pola hidup urban yang nomaden tinggal sementara di dalam permukiman juga membentuk permukiman hanya sebagai tempat tinggal semi permanen.

Pola kerja nelayan dari menyiapkan atau membuat jaring penangkap ikan, menjemur ikan atau rumput laut, berdagang dan menambat perahu di pinggir jeti sekaligus jalan lingkungan. Permasalahan kumuh terjadi pada saat tata letak bangunan rumah nelayan yang tidak teratur, sampah dibuang langsung ke laut begitu juga limbah hasil kegiatan MCK akibat cara hidup segampangnya saja tanpa memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Gambaran permukiman kumuh nelayan.

Keadaan permukiman kumuh di atas air sering ditemui pesisir pantai yang mempunyai kegiatan ekonomi di sektor perikanan yang mempunyai pelabuhan rakyat dan pasar ikan. Dengan intensitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi maka terjadi tingkat urbanisasi nelayan kedalam perkampungan tetapi disisi lain kapasitas tampung yang terbatas sehingga kepadatan tinggi yang terjadi sekaligus mengalami penurunan pelayanan prasarana jalan, air bersih dan MCK. Percepatan kepadatan juga ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk alami nelayan selain urbanisasi oleh pendatang baru.

Konsep penataan permukiman kumuh di atas air bisa diterapkan seperti konsep penataan permukiman kumuh di tepi air, yaitu “Water Front Kampung” melalui pembangunan:

a. Jalan setapak permanen di atas pantai untuk pelayanan akses perumahan.
b. Penataan tata letak rumah dan rehabilitasi rumah semi permanen menjadi permanen.

c. Penyediaan sarana air bersih, septictank komunal dan persampahan komunal.

5) Konsep Permukiman Kumuh di Dataran Tinggi

Permukiman kumuh di daerah dataran tinggi seringkali menghadapi tantangan tersendiri karena topografi dan kondisi geografisnya yang berbeda dengan daerah dataran rendah. Beberapa karakteristik yang mungkin ditemui dalam permukiman kumuh di dataran tinggi meliputi:

Aksesibilitas yang Terbatas: Daerah dataran tinggi cenderung memiliki akses yang sulit, terutama jika jalan atau infrastruktur transportasi tidak memadai. Hal ini dapat mengisolasi permukiman kumuh dari layanan dan fasilitas penting seperti pusat kesehatan, sekolah, atau tempat kerja.

Kondisi Geografis yang Meningkatkan Risiko Bencana: Dataran tinggi rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau bahkan erupsi gunung berapi. Permukiman kumuh yang dibangun di daerah ini dapat lebih rentan terhadap risiko-risiko tersebut karena seringkali bangunan mereka dibangun tanpa pertimbangan yang memadai terhadap faktor-faktor keamanan.

Akses Terhadap Sumber Air Bersih: Meskipun air mungkin lebih melimpah di daerah dataran tinggi karena kontur alaminya, akses terhadap sumber air bersih dapat menjadi masalah di permukiman kumuh. Praktek sanitasi yang buruk atau akses terbatas terhadap sumber air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penduduk.

Keterbatasan Ruang untuk Pembangunan: Topografi yang curam atau berbatasan dengan lereng gunung dapat membatasi ruang untuk pembangunan yang aman. Ini bisa menyebabkan pemukiman yang padat dan tidak teratur.

Ketersediaan Lahan yang Terbatas: Lahan yang tersedia untuk pemukiman bisa menjadi terbatas karena karakteristik geografis dataran tinggi yang cenderung curam dan tidak setiap bagian bisa dibangun.

Pemecahan masalah di permukiman kumuh di dataran tinggi memerlukan perencanaan yang hati-hati, kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, menyediakan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta mengurangi risiko bencana. Ini juga memerlukan peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik geografis daerah tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Delineasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasannya Hasil Verifikasi Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah Provinsi Aceh, dengan Ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dengan letak geografis 9603'16,62" sampai dengan 960¬20'40,5" Bujur Timur dan 50¬18'6,607" sampai dengan 4056'42,1" Lintang Utara.

Terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

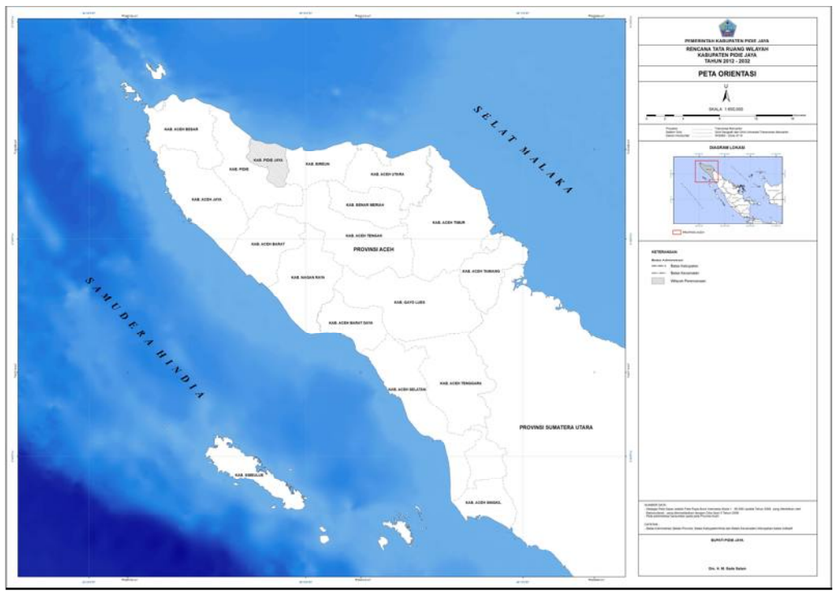
- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie (Kecamatan Kembang Tanjong)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.1, Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

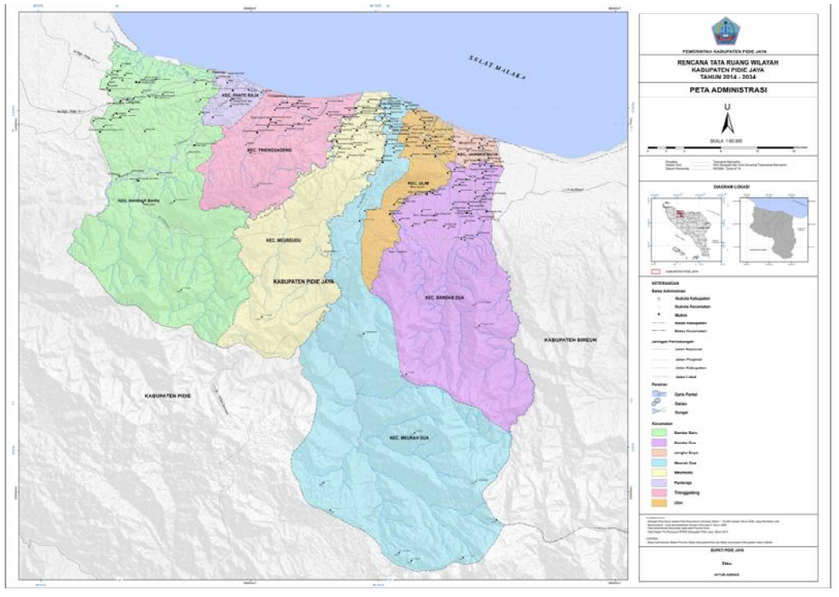
Tabel 3. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Ulim	4.175,16
2	Trienggadeng	7.936,75
3	Pante Raja	1.499,61
4	Meureudu	12.479,30
5	Meurah Dua	28.706,50
6	Jangka Buya	934,77
7	Bandar Dua	17.432,20
8	Bandar Baru	22.046,70
Total		**95.210,99**

Sumber: Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka, 2023

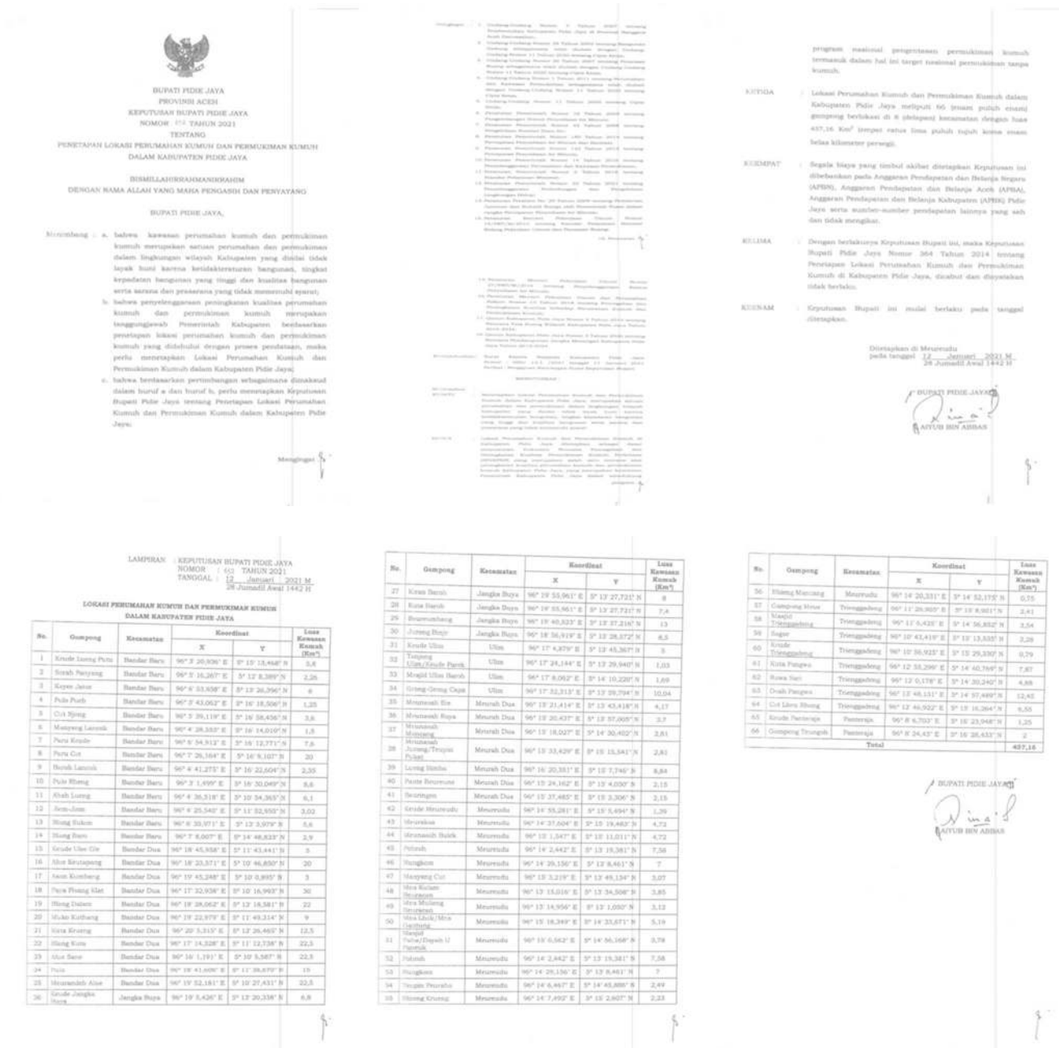


Gambar 3. 1 Peta Orientasi Kabupaten Pidie Jaya
Sumber: RTRW Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034



Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya
Sumber: RTRW Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 652 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan SK tersebut ditetapkan luas total lokasi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah seluas 45.716 Ha atau 457,16 km2 yang tesebar di 66 Gampong dan 8 Kecamatan.



Gambar 3. 3 SK Kumuh Kabupaten Pidie Jaya
Sumber: SK Bupati Pidie Jaya Nomor 652 Tahun 2021

Berdasarkan penyelarasan luas perumahan kumuh dan permukiman antara sk 2021 dengan hasil pengamatan lapangan (Baseline) tahun 2023 maka, perbandingan tersebut dapat dilihat pada uraian sub-sub dibawah ini. Lihat Tabel 3.2.

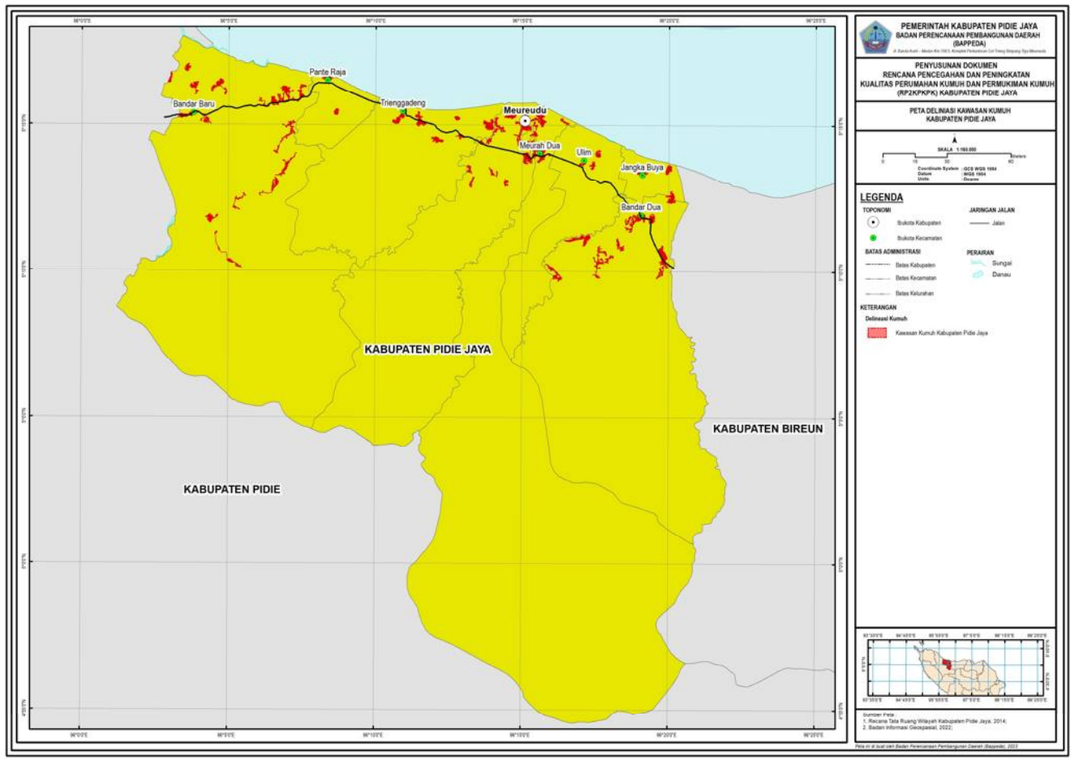
Tabel 3. 2 Perbandingan Luas Kumuh SK 2021 dengan Luas Kumuh Verifikasi 2023

No	Gampong	Kecamatan	Luas SK 2021 (KM2)	Luas Verifikasi Baseline 2023 (Ha)	Skor Kumuh 2021 (KM2)	Skor Kumuh Baseline 2023 (Ha)
1	Keude Lueng Putu	Banda Baru	5,8	31,50	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
2	Sarah Panyang	Banda Baru	2,26	8,20	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
3	Kayee Jatoe	Banda Baru	6	24,00	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
4	Pulo Pueb	Banda Baru	1,25	16,07	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
5	Cut Njong	Banda Baru	3,6	10,34	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
6	Manyang Lancok	Banda Baru	1,5	6,32	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
7	Paru Keude	Banda Baru	7,6	55,35	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
8	Paru Cot	Banda Baru	20	18,89	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
9	Baroh Lancok	Banda Baru	2,35	19,35	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
10	Pulo Rheng	Banda Baru	8,6	28,00	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
11	Abah Lueng	Banda Baru	6,1	12,92	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
12	Jiem Jiem	Banda Baru	3,02	15,15	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
13	Blang Sukon	Banda Baru	5,6	0	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
14	Blang Baro	Banda Baru	2,9	29,51	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
15	Keude Ulee Gle	Bandar Dua	5	23,66	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
16	Alue Keutapang	Bandar Dua	20	19,08	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
17	Asan Kumbang	Bandar Dua	3	9,54	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
18	Paya Pisang Klat	Bandar Dua	30	23,34	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan

No	Gampong	Kecamatan	Luas SK 2021 (KM2)	Luas Verifikasi Baseline 2023 (Ha)	Skor Kumuh 2021 (KM2)	Skor Kumuh Baseline 2023 (Ha)
19	Blang Dalam	Bandar Dua	22	34,41	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
20	Muko Kuthang	Bandar Dua	9	17,56	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
21	Kuta Krueng	Bandar Dua	12,5	11,44	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
22	Blang Kuta	Bandar Dua	22,5	31,38	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
23	Alue Sane	Bandar Dua	22,5	21,52	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
24	Pulo	Bandar Dua	15	20,99	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
25	Meurandeh Alue	Bandar Dua	22,5	41,24	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
26	Keude Jangka Buya	Jangka Buya	6,8	6,14	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
27	Kiran Baroh	Jangka Buya	8	14,12	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
28	Kuta Baroh	Jangka Buya	7,4	9,74	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
29	Beureumbang	Jangka Buya	13	5,97	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
30	Jurong Binje	Jangka Buya	8,5	13,42	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
31	Keude Ulim	Ulim	5	12,75	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
32	Tanjong Ulim/Keude Parek	Ulim	1,03	8,03	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
33	Mesjid Ulim Baroh	Ulim	1,69	9,79	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
34	Grong-grong Capa	Ulim	10,04	0	Kumuh Ringan	Tidak Kumuh
35	Meunasah Bie	Meurah Dua	4,17	20,88	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
36	Meunasah Raya	Meurah Dua	2,7	20,59	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
37	Meunasah Mancang	Meurah Dua	2,81	6,97	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
38	Meunasah Jurong/Teupin Pukat	Meurah Dua	2,81	13,42	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
39	Lueng Bimba	Meurah Dua	8,84	4,86	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
40	Pante Beureune	Meurah Dua	2,15	4,63	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
41	Beuringen	Meurah Dua	2,15	13,62	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang
42	Keude Meureudeu	Meureudu	1,39	11,58	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
43	Meuraksa	Meureudu	4,72	27,34	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
44	Meunasah Balek	Meureudu	4,72	16,92	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
45	Pohroh	Meureudu	7,58	6,24	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
46	Rungkom	Meureudu	7	6,16	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
47	Manyang Cut	Meureudu	3,07	28,90	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
48	Mns Kulam Beuracan	Meureudu	3,85	7,14	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
49	Mns Mulieng Beuracan	Meureudu	3,12	6,48	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
50	Mns Lhok/Mns Gantung	Meureudu	5,19	15,45	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
51	Masjid Tuha/Dayah U Paneuk	Meureudu	3,78	65,19	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
52	Teupin Peuraho	Meureudu	2,49	13,09	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
53	Rhieng Krueng	Meureudu	2,23	8,14	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
54	Rhieng Mancang	Meureudu	0,75	5,36	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
55	Gampong Meue	Trienggadeng	2,41	9,77	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
56	Masjid Trienggadeng	Trienggadeng	3,54	14,51	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
57	Sagoe	Trienggadeng	3,28	20,00	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
58	Keude Trienggadeng	Trienggadeng	0,79	6,49	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
59	Kuta Pangwa	Trienggadeng	7,87	7,59	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
60	Rawa Sari	Trienggadeng	4,88	14,97	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
61	Deah Pangwa	Trienggadeng	12,45	27,04	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
62	Cot Lheu Rheng	Trienggadeng	6,55	6,13	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
63	Keude Panteraja	Pante Raja	1,25	14,90	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan

No	Gampong	Kecamatan	Luas SK 2021 (KM2)	Luas Verifikasi Baseline 2023 (Ha)	Skor Kumuh 2021 (KM2)	Skor Kumuh Baseline 2023 (Ha)
64	Gampong Teungoh	Pante Raja	2	7,61	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
65	Nanggroe Barat	Ulim	0	38,35	-	Kumuh Ringan
66	Reuleut	Ulim	0	8,15	-	Kumuh Ringan
	Total		**457,16**	**1.088,20**		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023



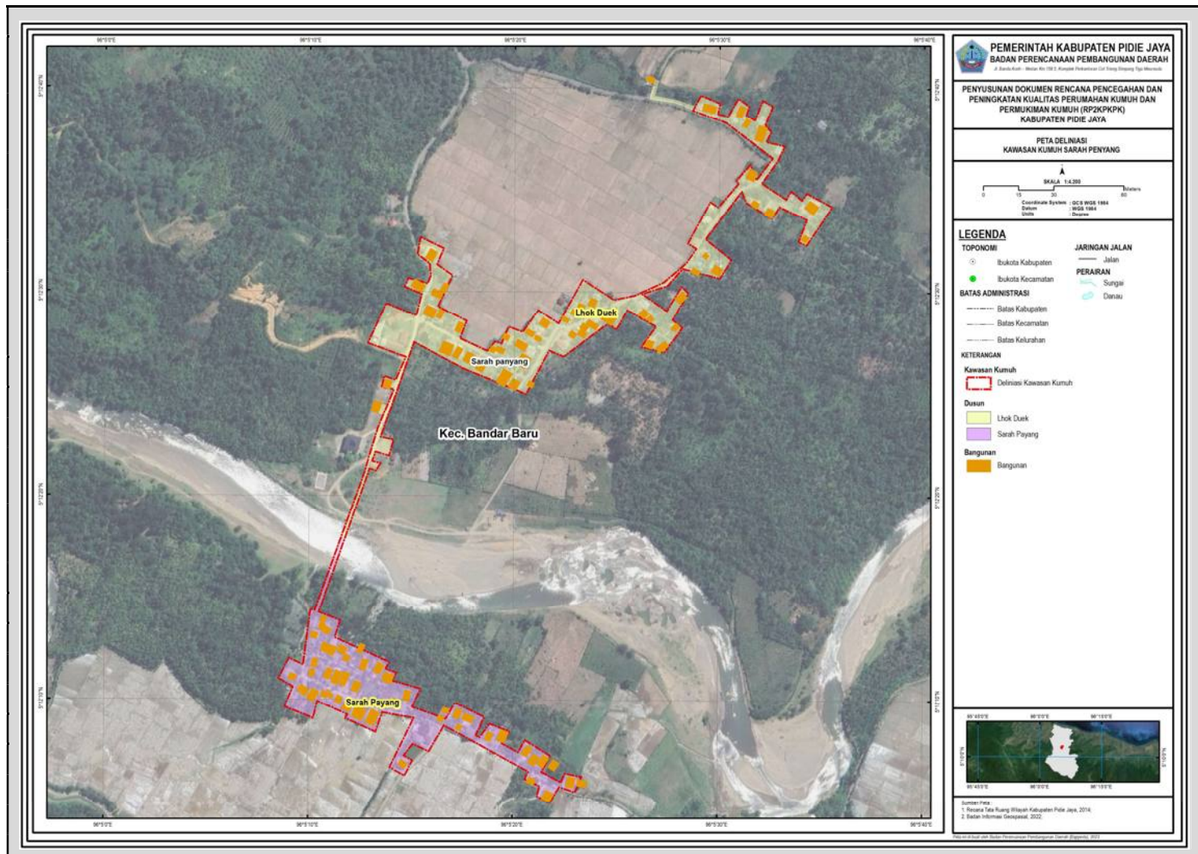
Gambar 3. 4 Peta Delineasi Kumuh Hasil Verifikasi
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya

3.2 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya dan Gambaran Kelembagaan

3.2.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya

Pada bagian ini, penjelasan detail terkait permukiman dan perumahan kumuh, adapun yang menjadi bahan pembahasan adalah desa-desa di Kabupaten Pidie Jaya yang termasuk kedalam SK penetapan yaitu 64 Gampong yang terdiri dari 8 Kecamatan

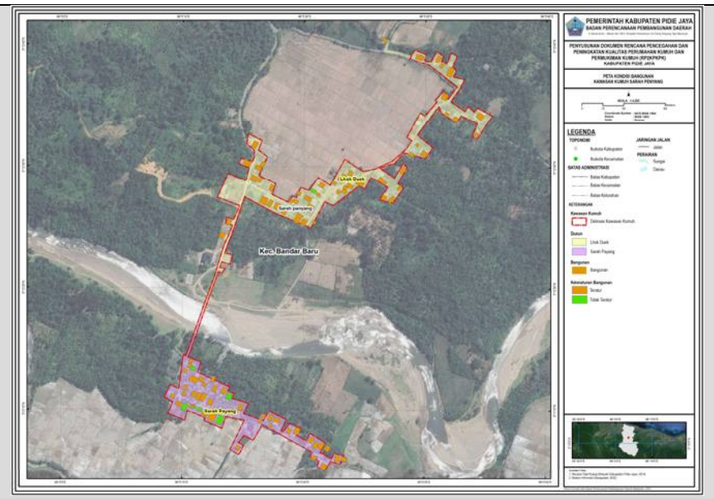
1. Profil Permukiman Kumuh Gampong Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru

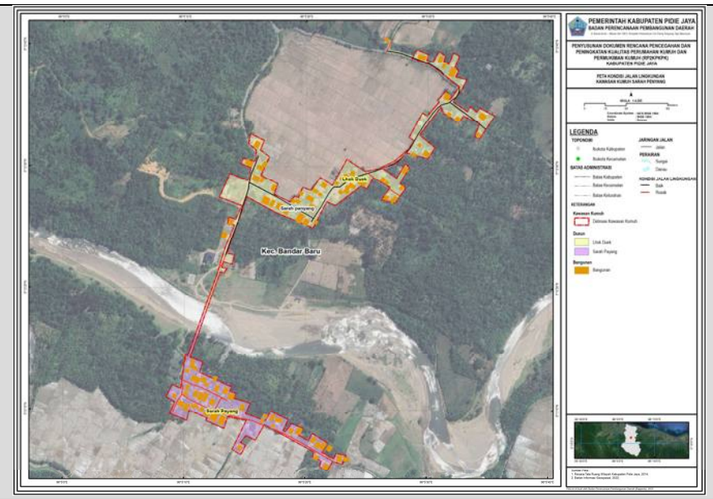


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Sarah Panyang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Sarah Panyang	1	Sarah Panyang	Lhok Duek	5,10	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Sarah Panyang	Sarah Panyang	3,10	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	8,20					
KOORDINAT						
Latitude	5,206202					
Longitude	96,088865					
Jumlah Bangunan (Unit)	150					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	476					
Jumlah Kk	109					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

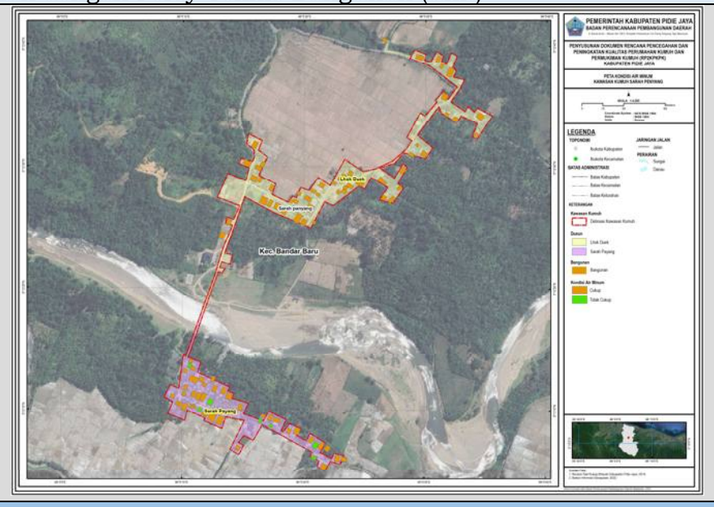


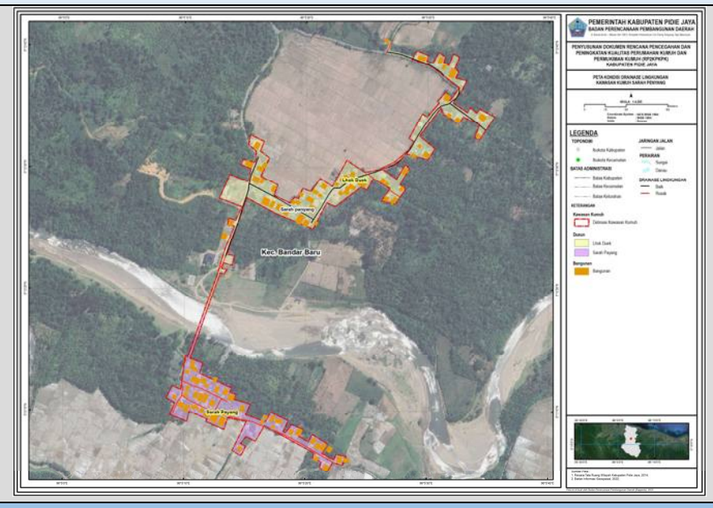


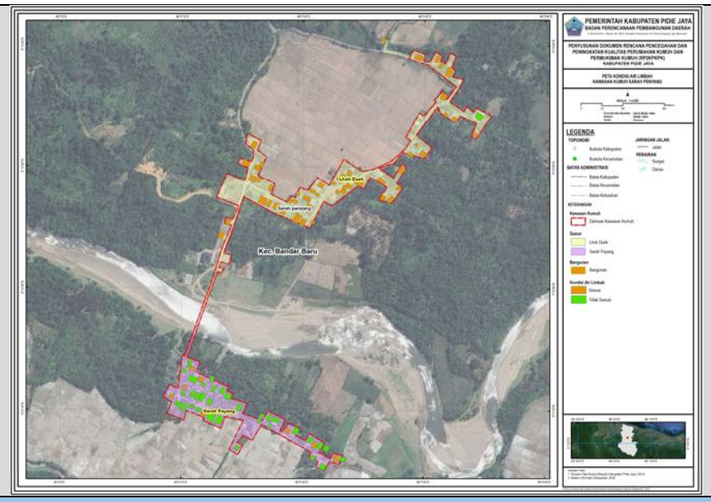


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	150	Panjang Jalan Ideal (m)	2043,043
Jumlah RTLH (unit)	4	Panjang Jalan Eksisting (m)	2043,043
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	96	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	0
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	823,072
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	4		

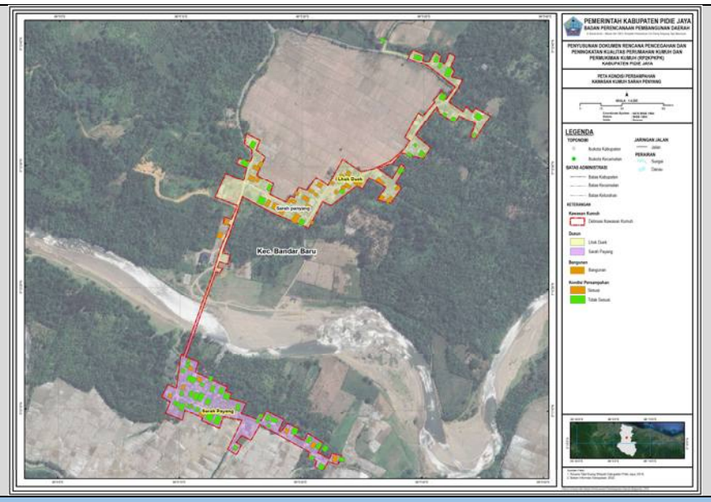




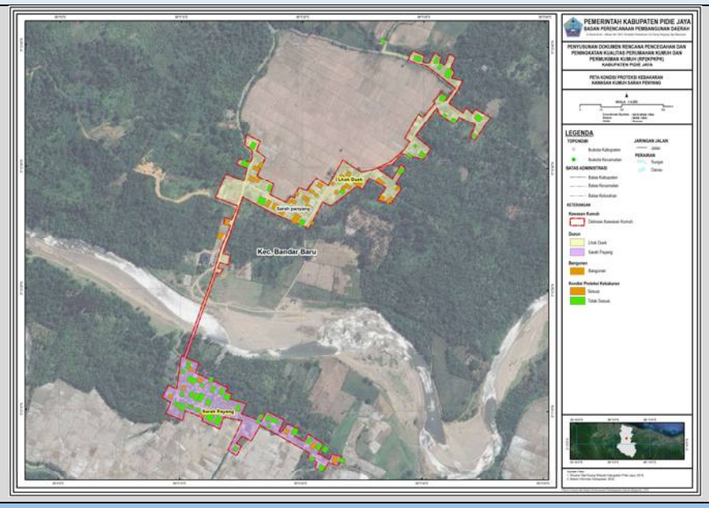
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	109	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	0	Panjang Drainase Ideal (m)	2381,11
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	8	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	0,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	109,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	21
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	21

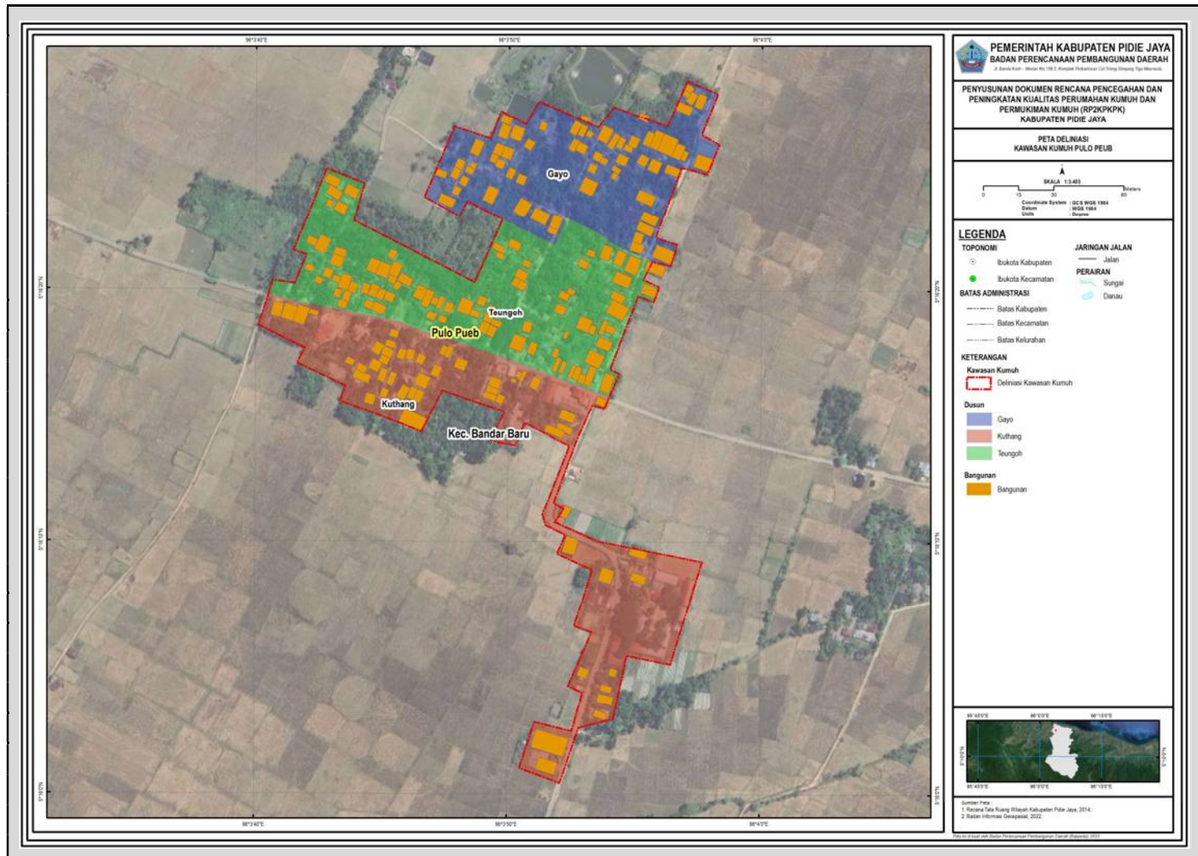


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	109,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	109
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	63



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	150
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	150
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	150

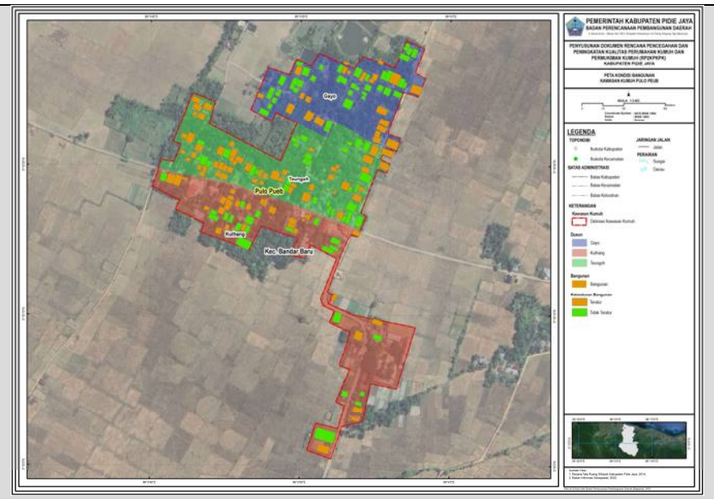
2. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru

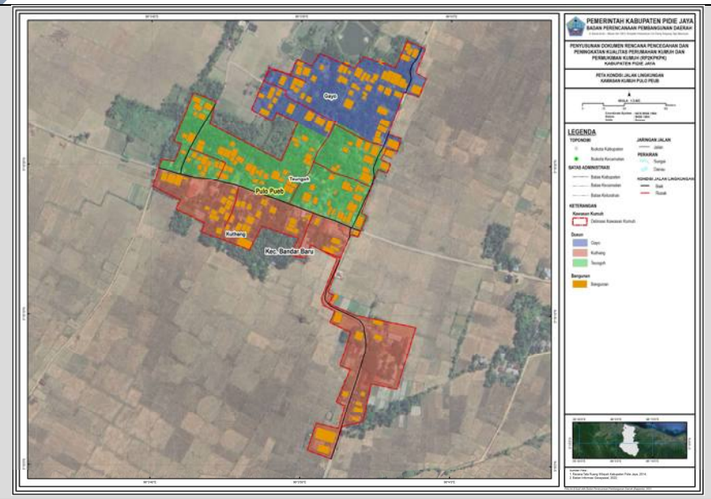


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Pulo Pueb	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Pulo Pueb	1	Pulo Pueb	Gayo	6,07	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Pulo Pueb	Kuthang	4,30	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Pulo Pueb	Teungoh	5,69	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh				16,07	
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	16,03					
KOORDINAT						
Latitude	5,271764					
Longitude	96,064055					
Jumlah Bangunan (Unit)	349,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	896,00					
Jumlah Kk	283,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

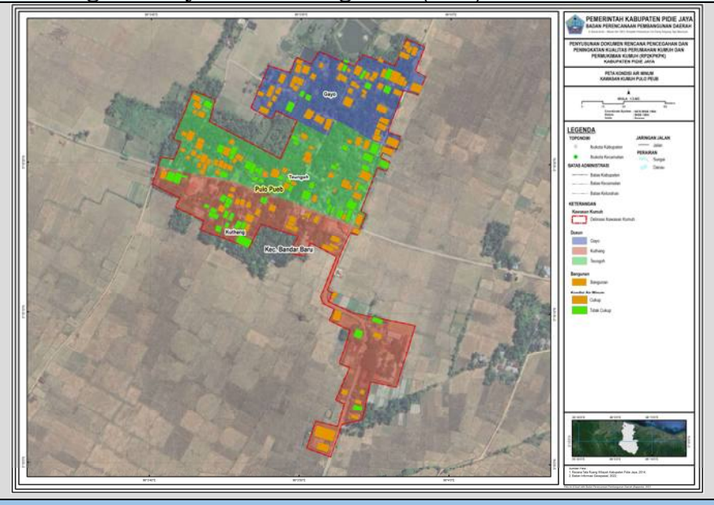


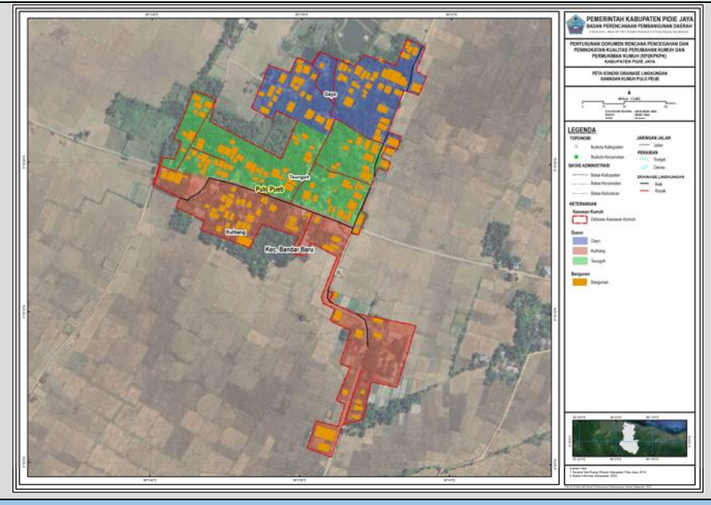




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	349
Jumlah RTLH (unit)	76
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	86
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	76

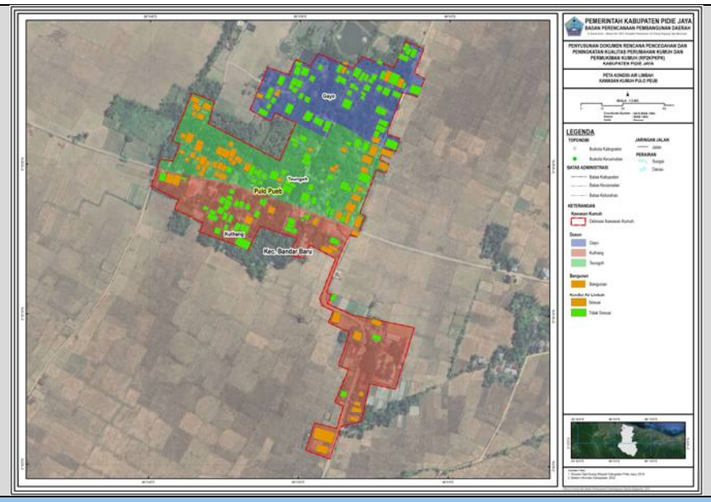
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	1.956,73
Panjang Jalan Eksisting (m)	1.956,73
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	548,28

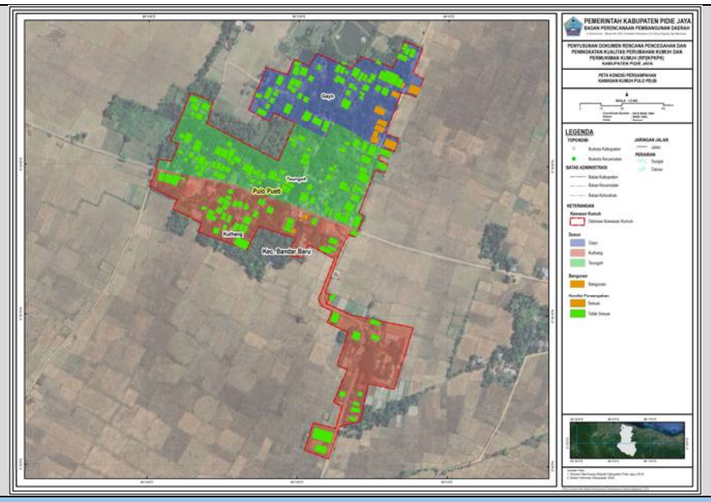




KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	283
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	142
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	87

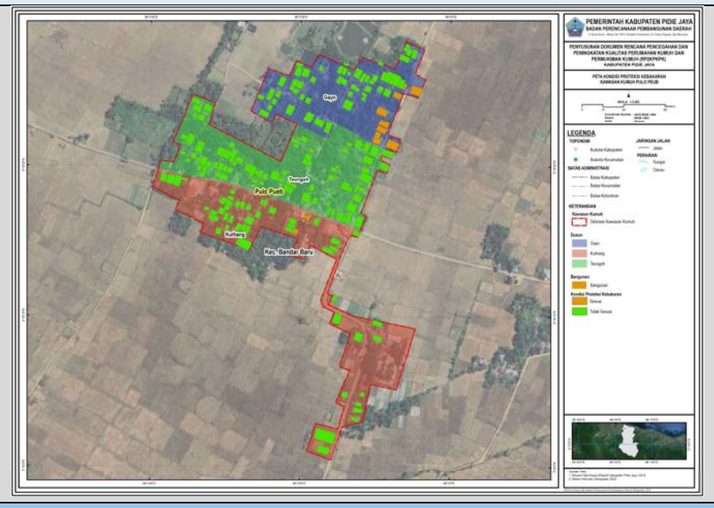
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
Panjang Drainase Ideal (m)	2064,87
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2064,87
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1257,88





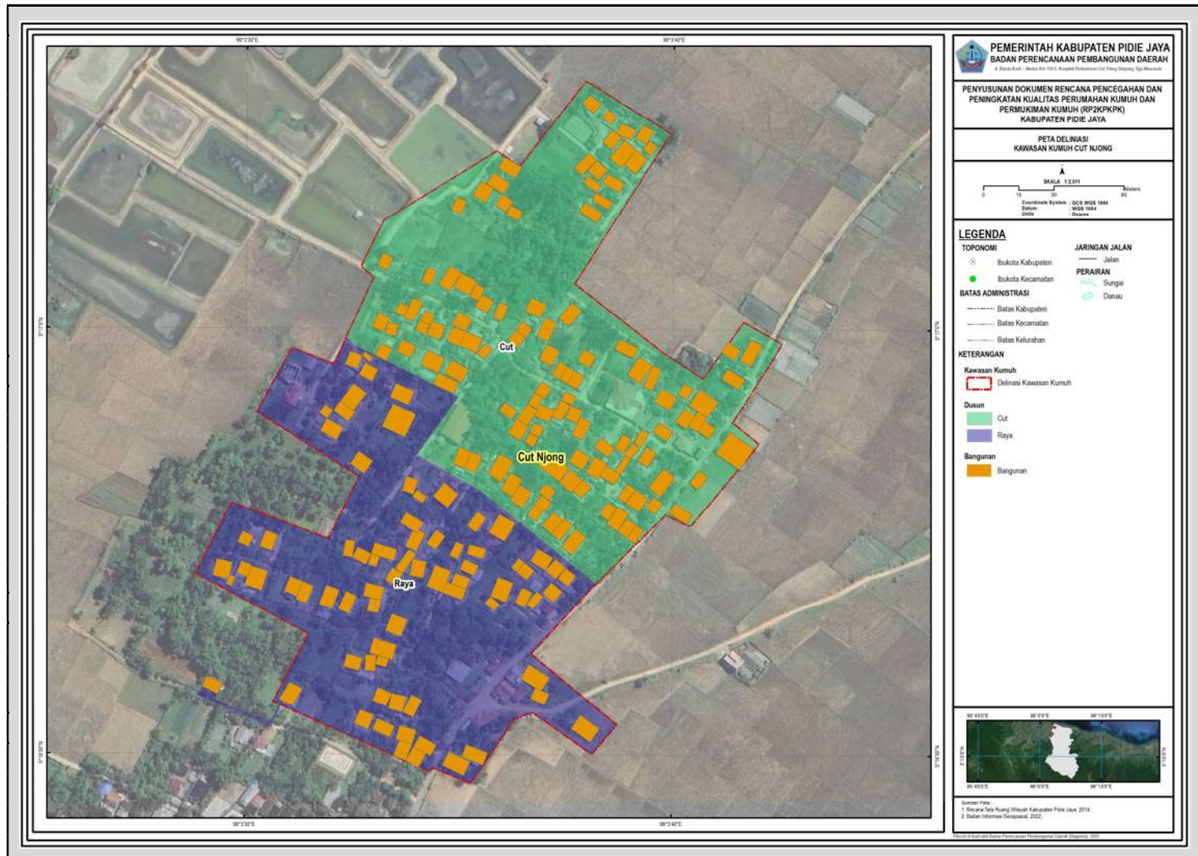
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	283,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	70
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	70

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	283,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	283
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	263



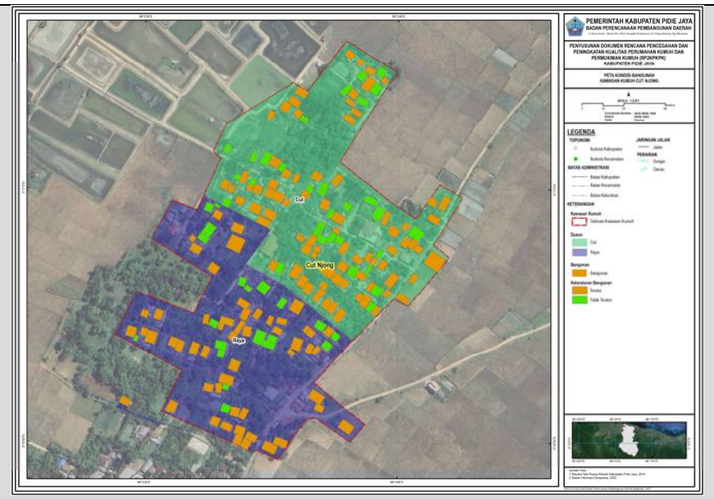
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	349,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	349
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	349

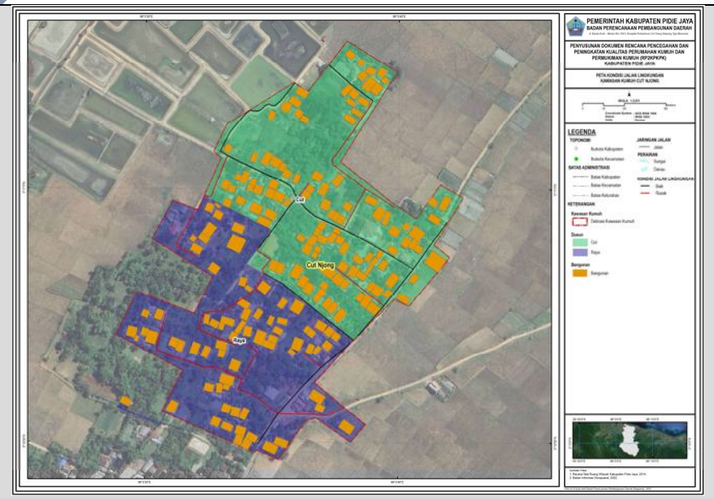
3. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Cut Njong Kecamatan Bandar Baru*



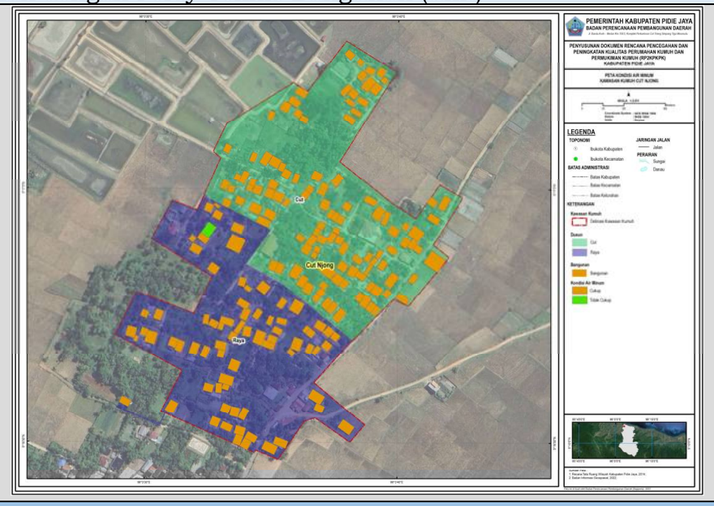
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Cut Njong	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Cut Njong	1	Cut Nyong	Cut	5,50	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Cut Nyong	Cut Raya	4,84	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya				10,34	
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	10,30					
KOORDINAT						
Latitude	5,282512					
Longitude	96,059951					
Jumlah Bangunan (Unit)	186					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	491					
Jumlah Kk	244					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

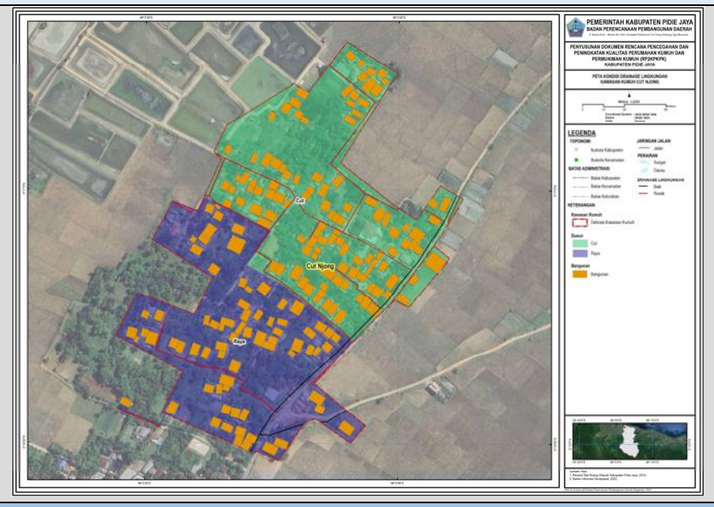




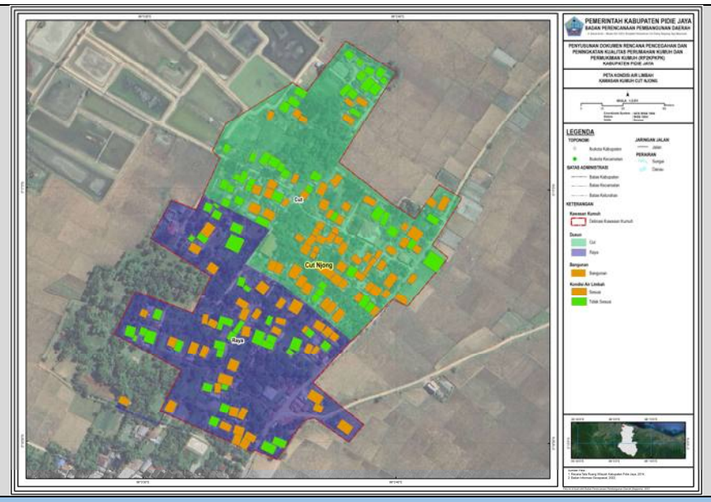


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	186	Panjang Jalan Ideal (m)	1.037,77
Jumlah RTLH (unit)	13	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.037,77
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	186	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	-
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	13		

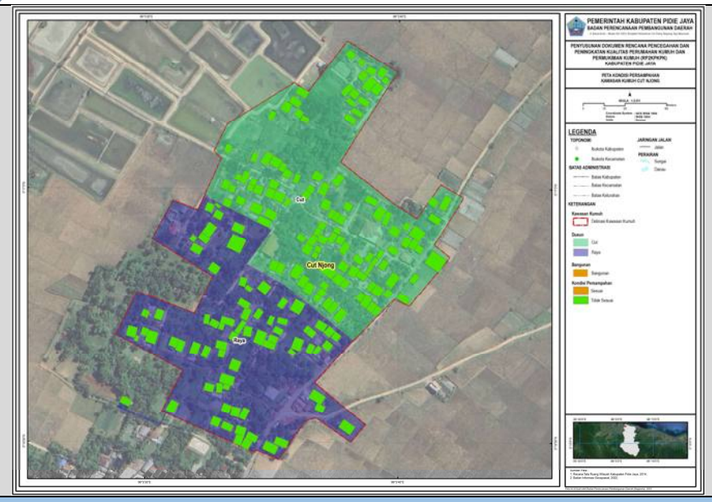




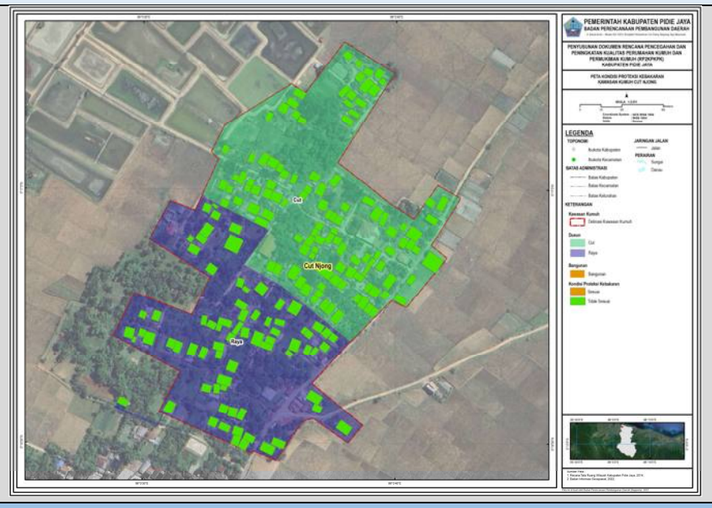
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	244	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	6	Panjang Drainase Ideal (m)	2101,71
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	1	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2101,71
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1607,83



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	244,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	106
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	106

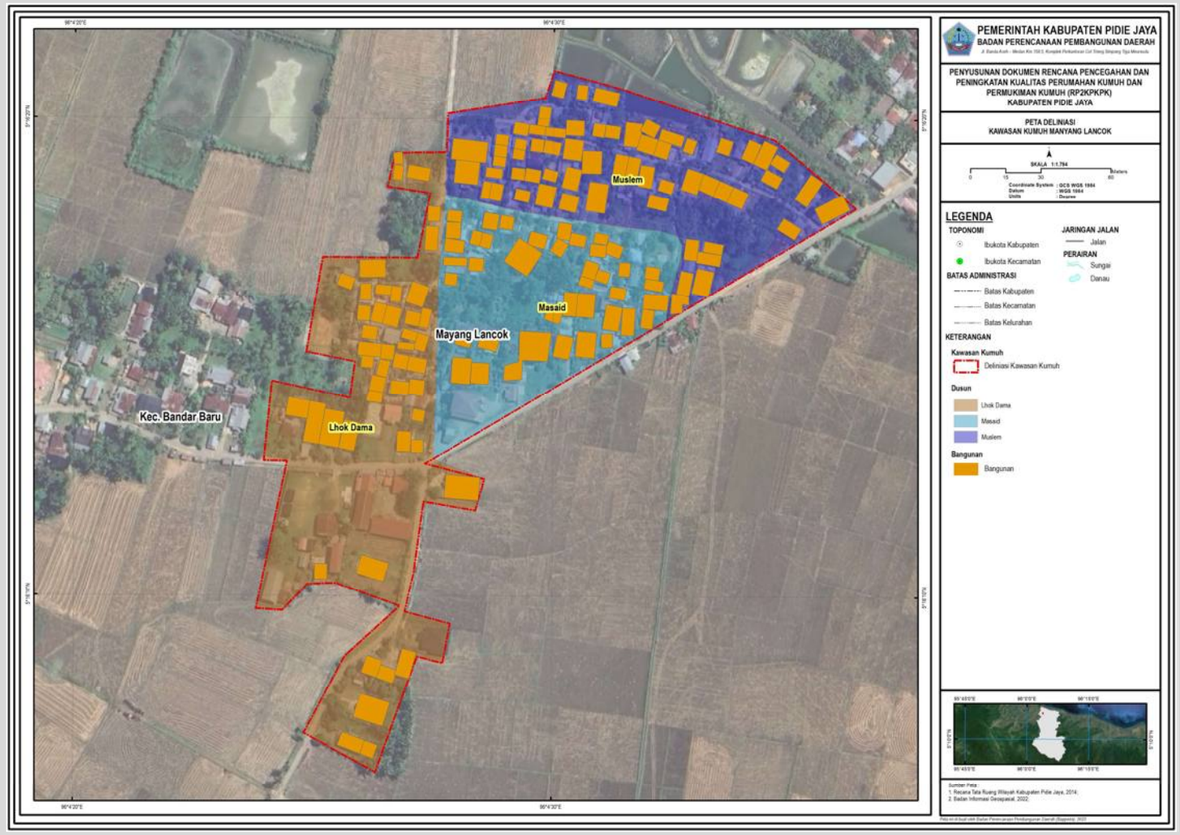


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	244,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	244
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	244



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	186,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	186

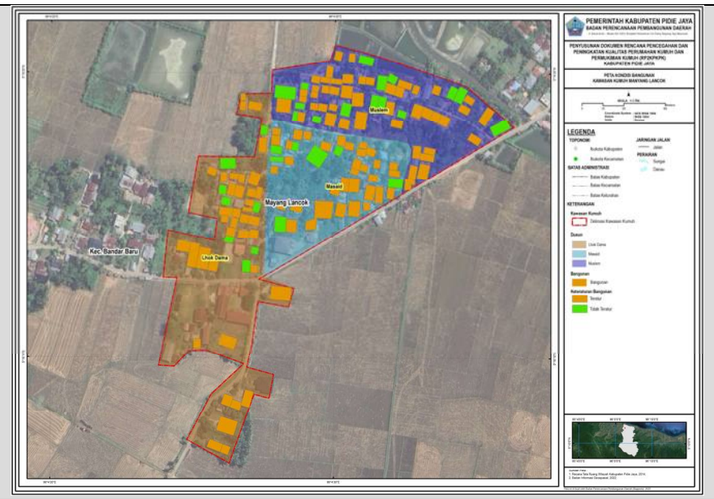
4. Profil Permukiman Kumuh Gampong Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru

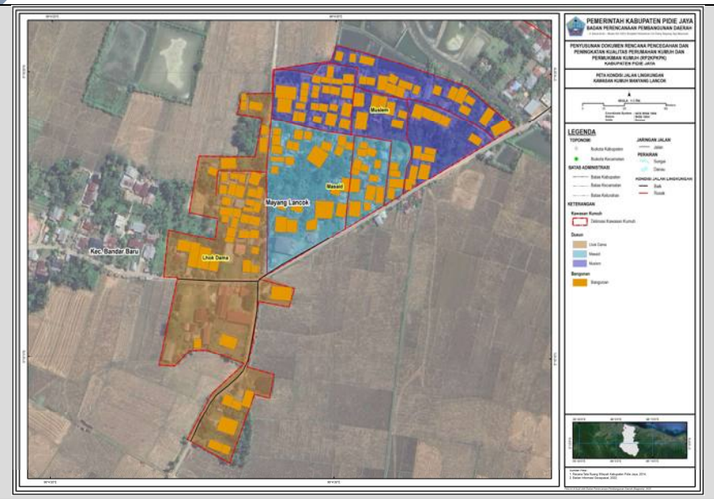


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Manyang Lancok	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Manyang Lancok	1	Manyang Lancok	Lhok Dama	2,63	Kumuh Sedang
Kecamatan	Banda Baru	2	Manyang Lancok	Muslem	2,02	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Manyang Lancok	Masaid	1,67	Kumuh Sedang
Provinsi	Aceh				6,32	
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,31					
KOORDINAT						
Latitude	5,270978					
Longitude	96,074763					
Jumlah Bangunan (Unit)	149					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	458					
Jumlah Kk	187					

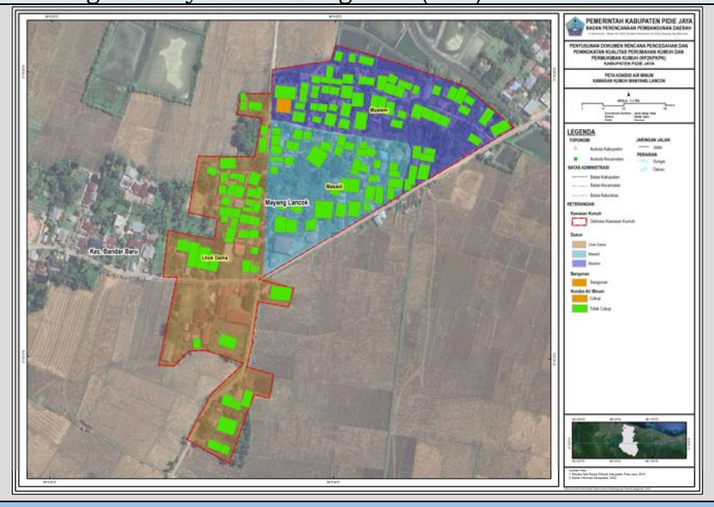
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Sedang
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

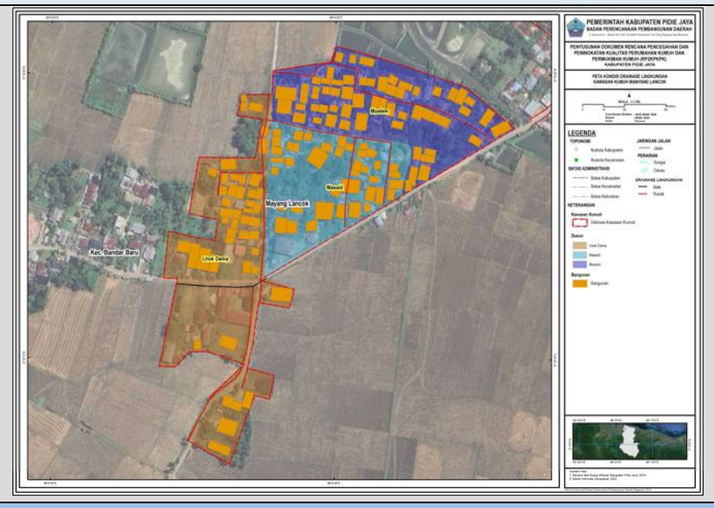




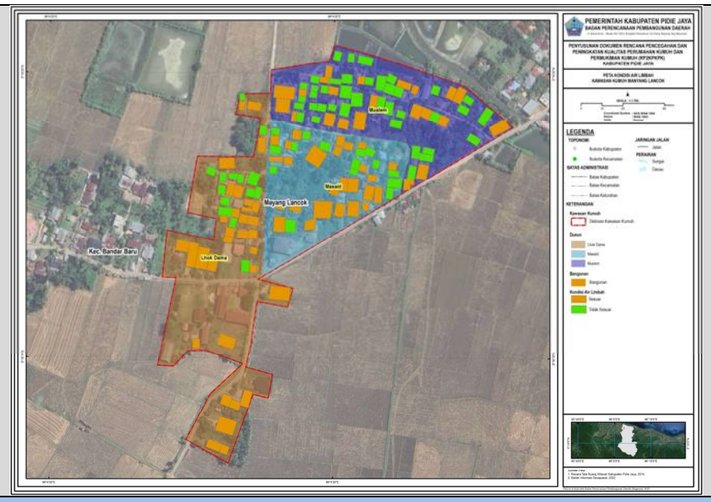


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	149	Panjang Jalan Ideal (m)	1.329,78
Jumlah RTLH (unit)	0	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.329,78
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	94	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	871,86
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	0		

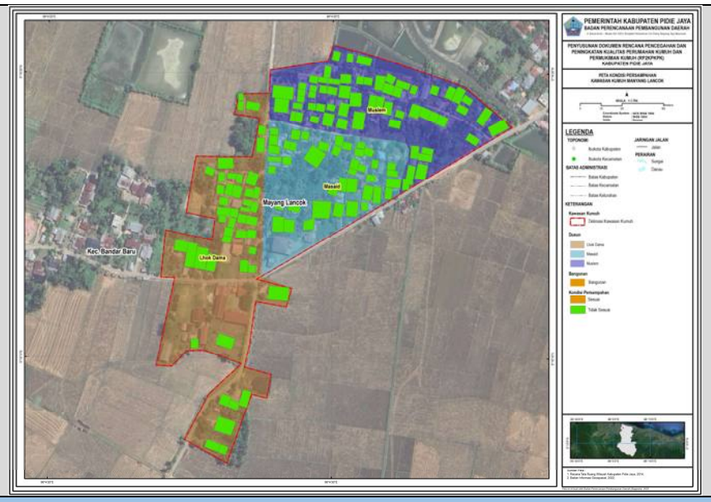




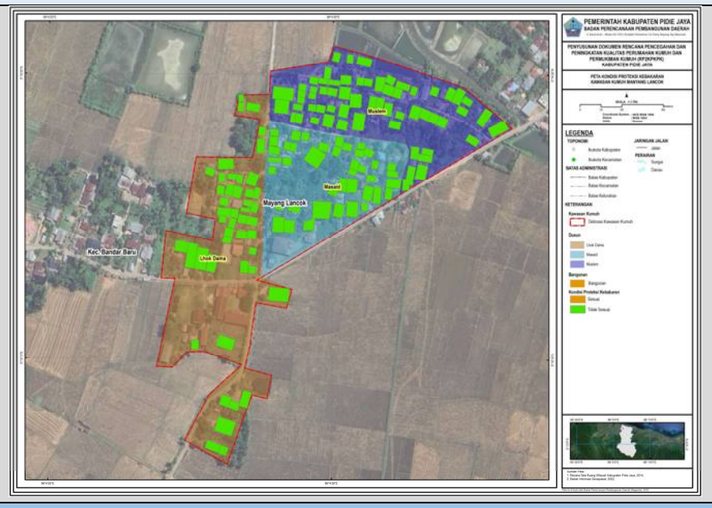
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	187	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	187	Panjang Drainase Ideal (m)	1179,64
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	185	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1179,64
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1079,35



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	187,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	88
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	88

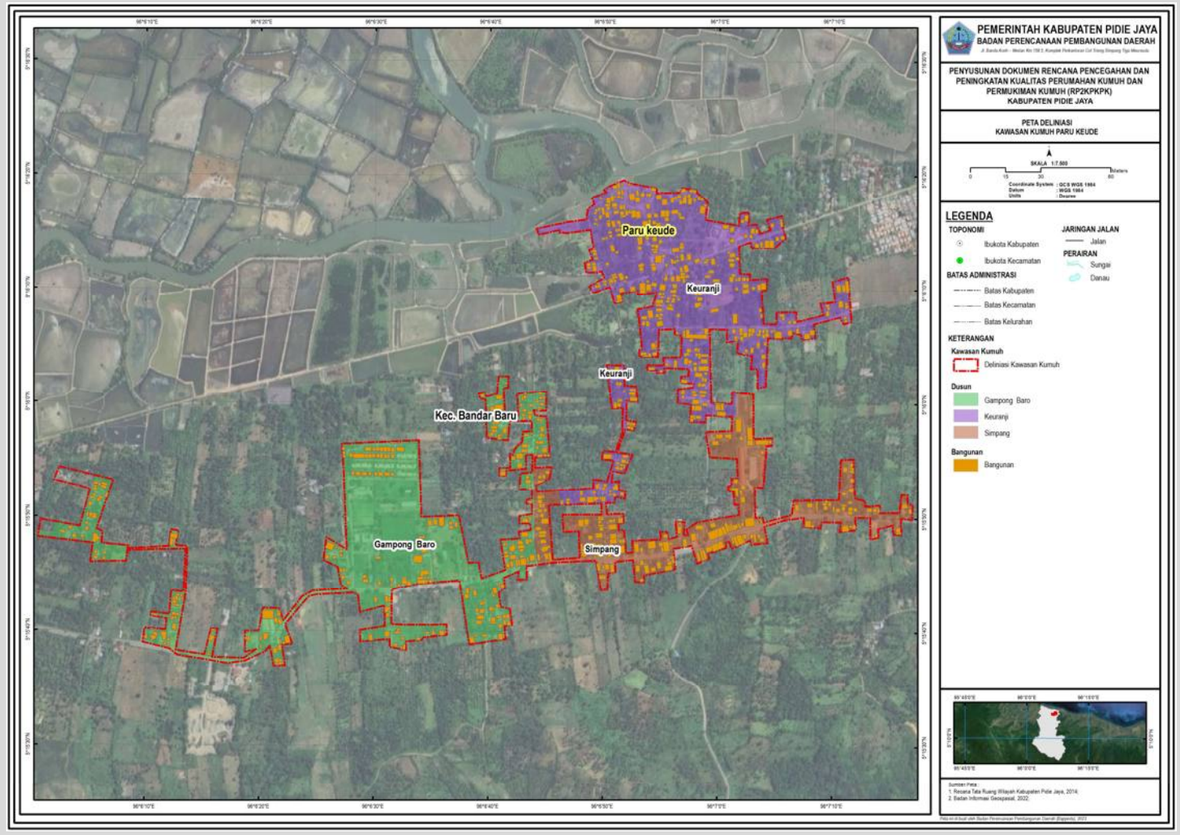


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	187,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	187
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	187



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	149,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	149
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	149

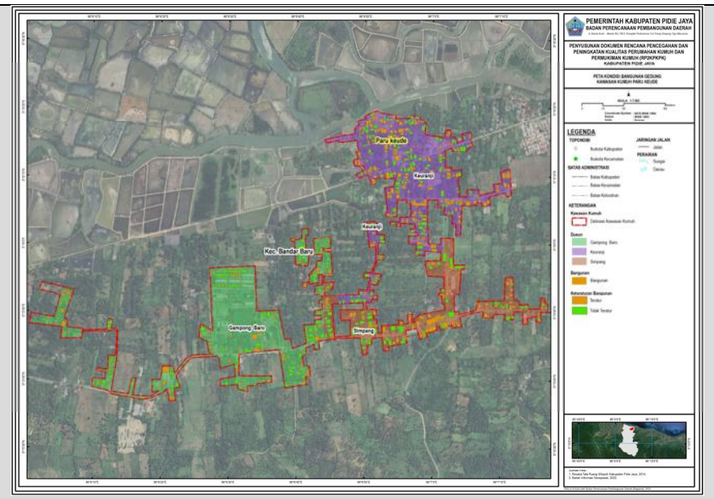
5. Profil Permukiman Kumuh Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru

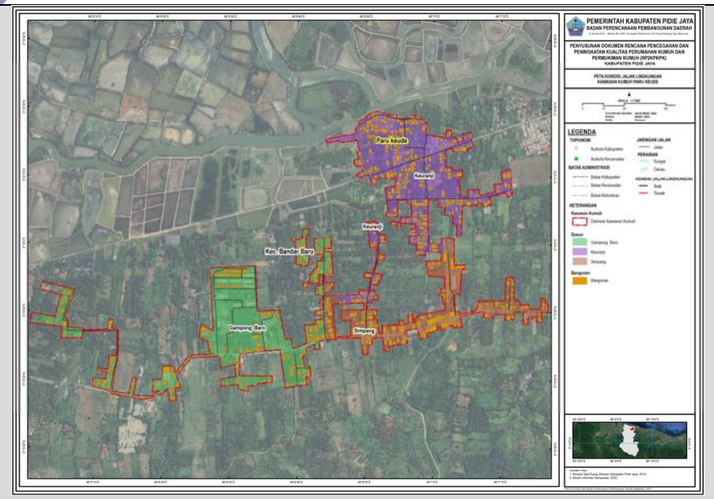


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Paru Keude	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Paru Keude	1	Paru Keude	Dusun Baro	22,18	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Paru Keude	Dusun Keuranji	21,79	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Paru Keude	Dusun Simpang	11,38	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh				55,35	
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	55,35					
KOORDINAT						
Latitude	5,265793					
Longitude	96,112894					
Jumlah Bangunan (Unit)	989					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	4414					
Jumlah Kk	1389					

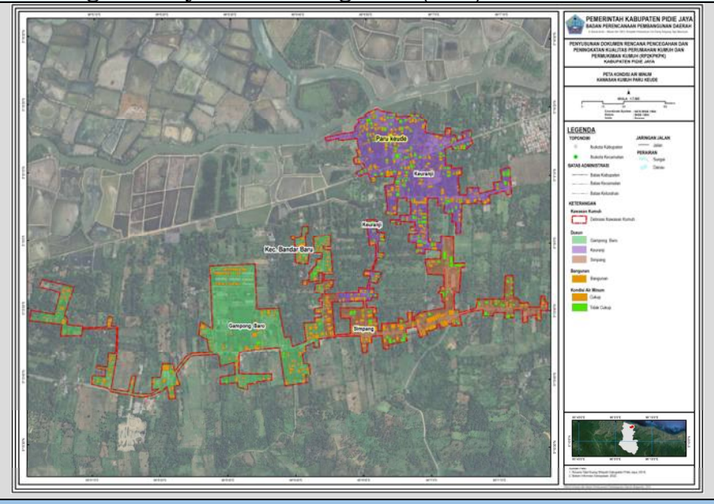
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

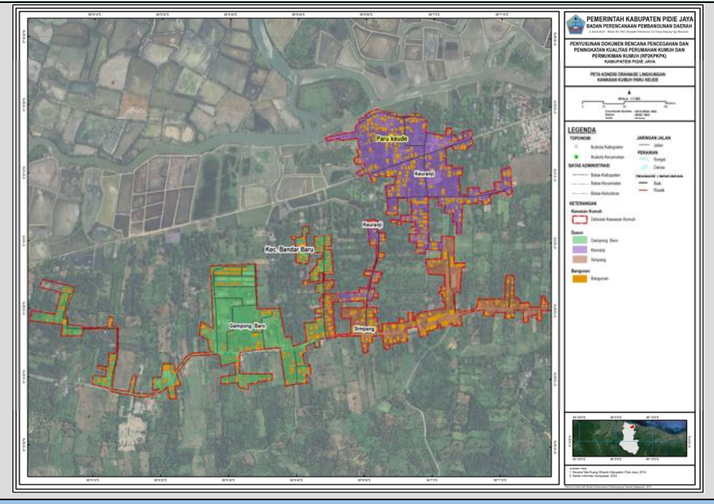




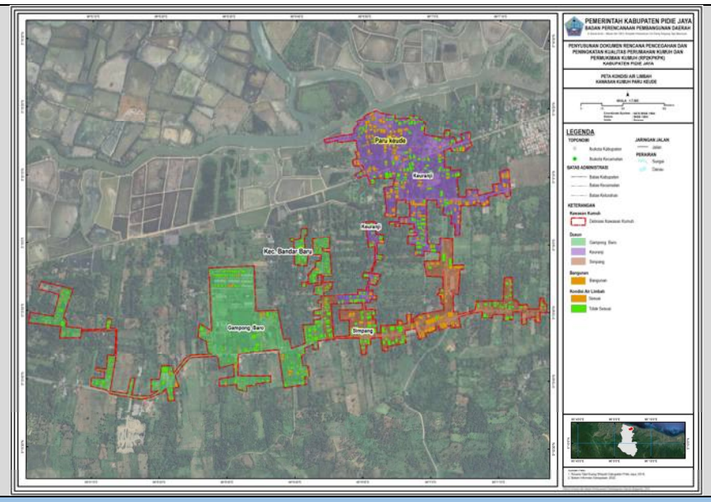


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	989	Panjang Jalan Ideal (m)	6.061,96
Jumlah RTLH (unit)	387	Panjang Jalan Eksisting (m)	6.061,96
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	409	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	-
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	387		

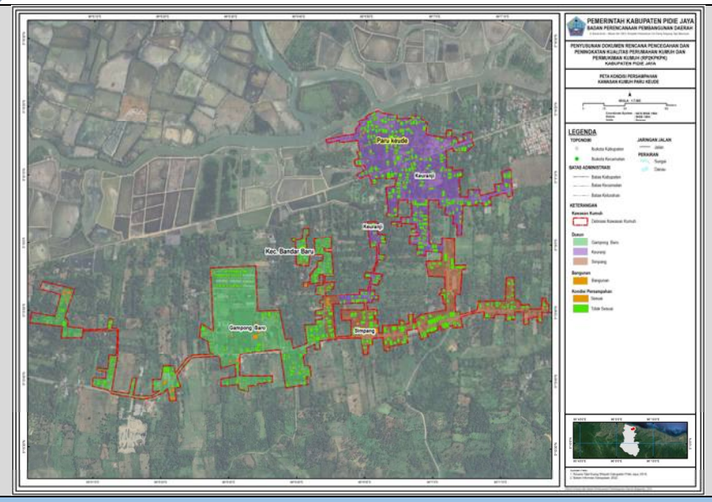




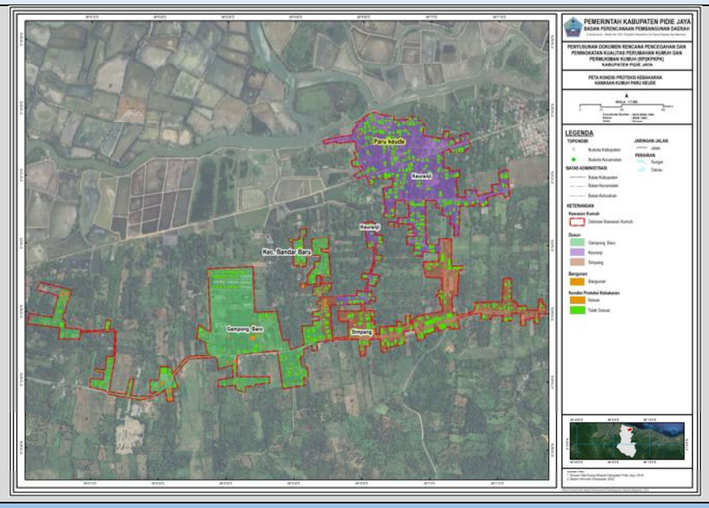
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	1389	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	708	Panjang Drainase Ideal (m)	6061,96
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	416	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	6061,96
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	3061,96



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	1389,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	347
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	347

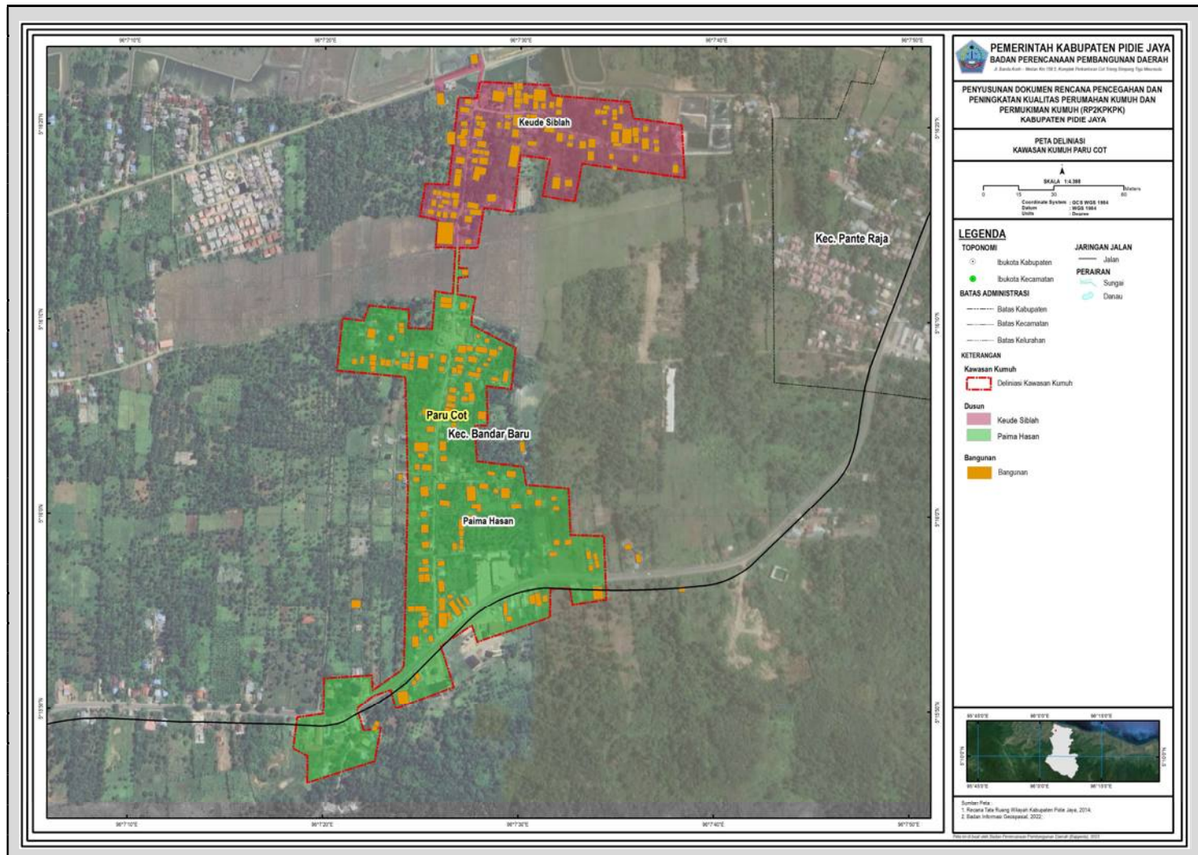


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	1389,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	1389
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	1286



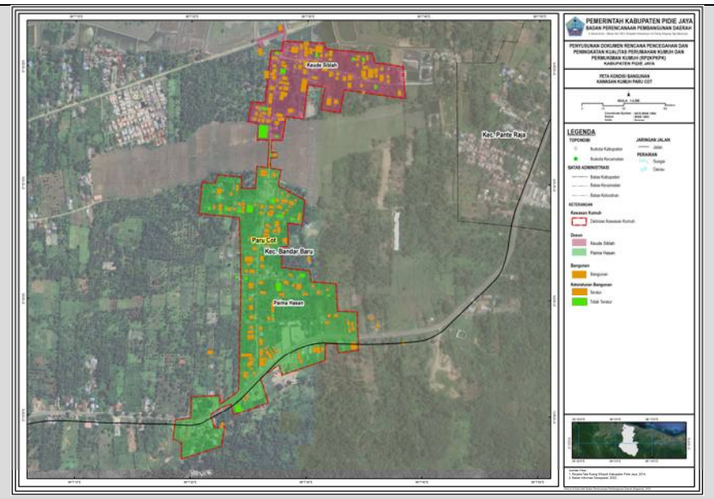
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	989,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	989
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	989

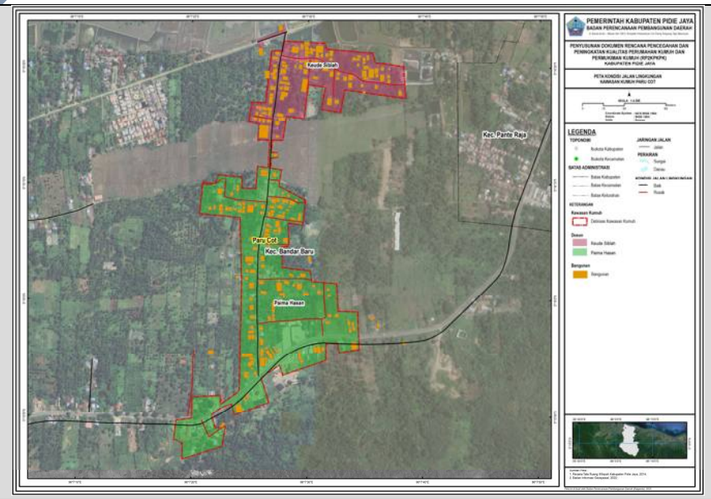
6. Profil Permukiman Kumuh Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru



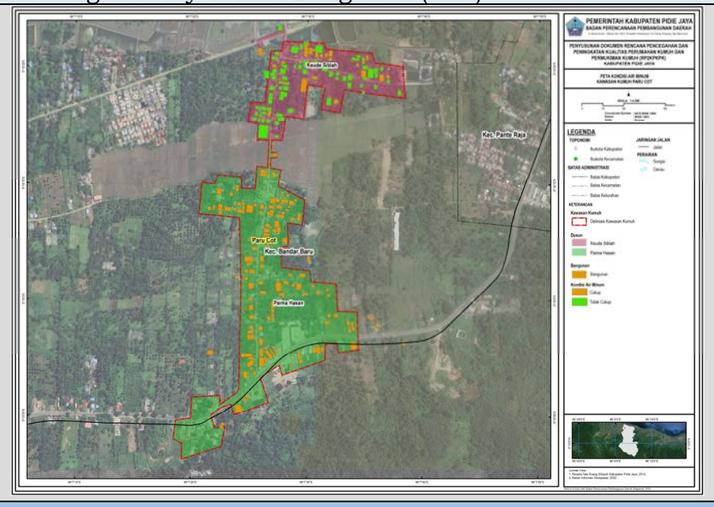
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Paru Cot	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Paru Cot	1	Paru Cot	Keude Siblah	13,20	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Paru Cot	Paima Hasan	5,69	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya				18,89	
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	18,89					
KOORDINAT						
Latitude	5,268125					
Longitude	96,124458					
Jumlah Bangunan (Unit)	186					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	745					
Jumlah Kk	207					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

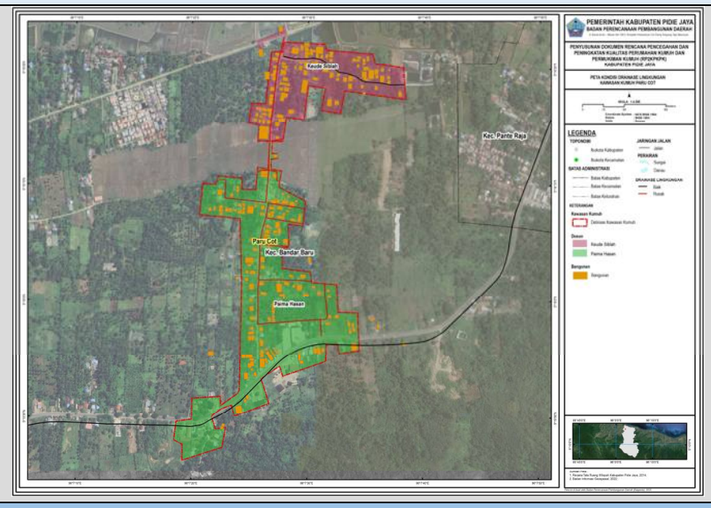




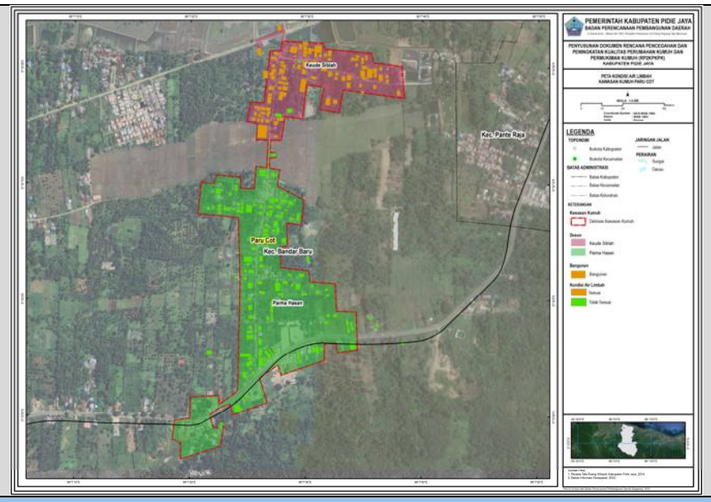


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)		Panjang Jalan Ideal (m)	
Jumlah RTLH (unit)		Panjang Jalan Eksisting (m)	
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)		a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	
b. Kepadatan Bangunan (unit)		b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)			

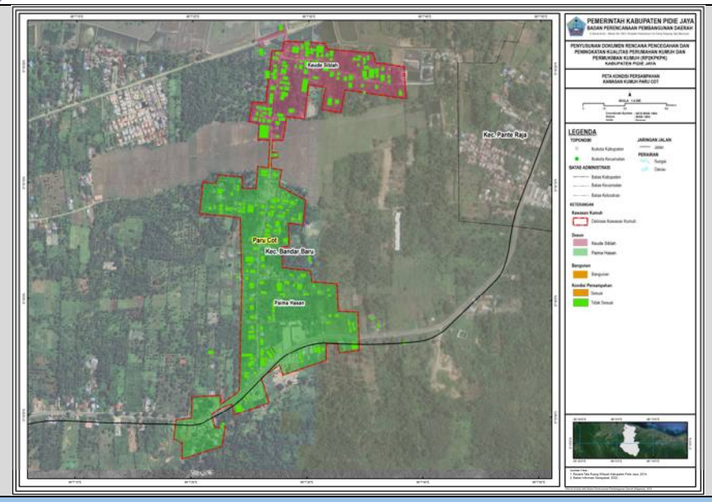




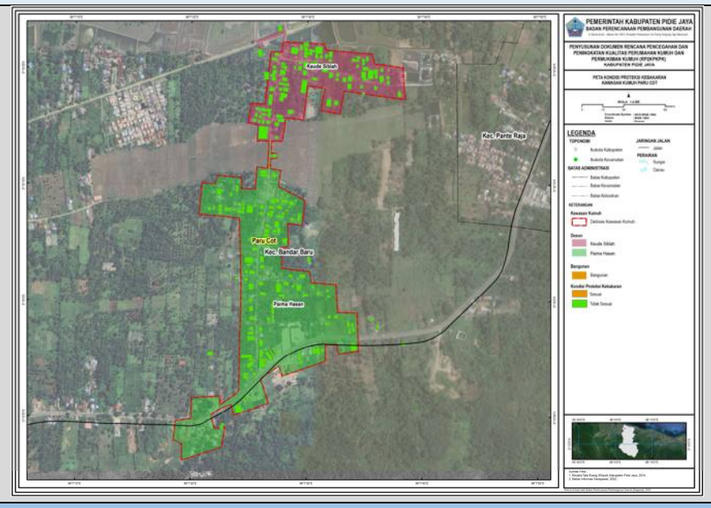
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK		Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman		Panjang Drainase Ideal (m)	
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari		Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	

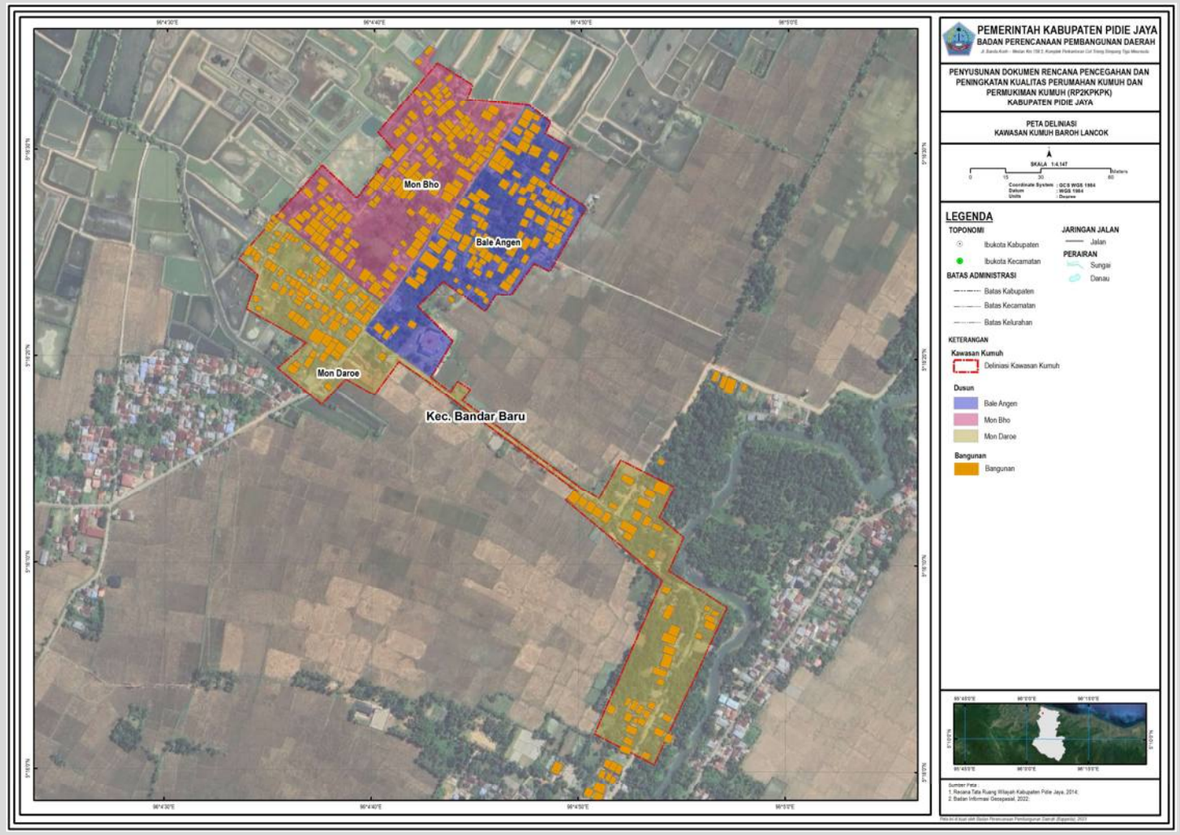


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	



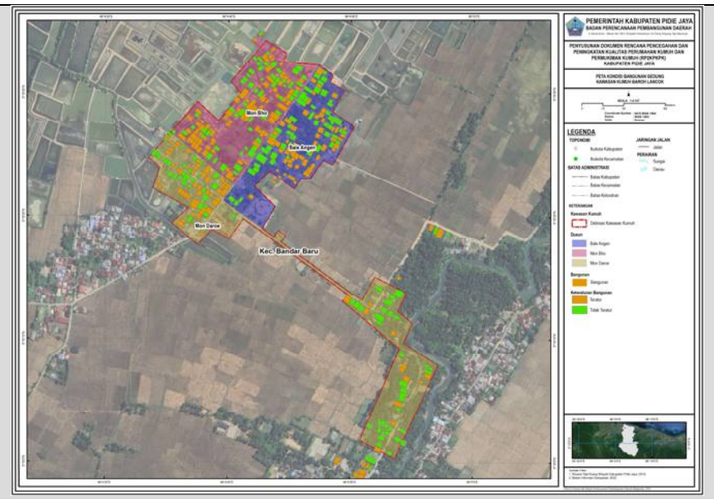
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	

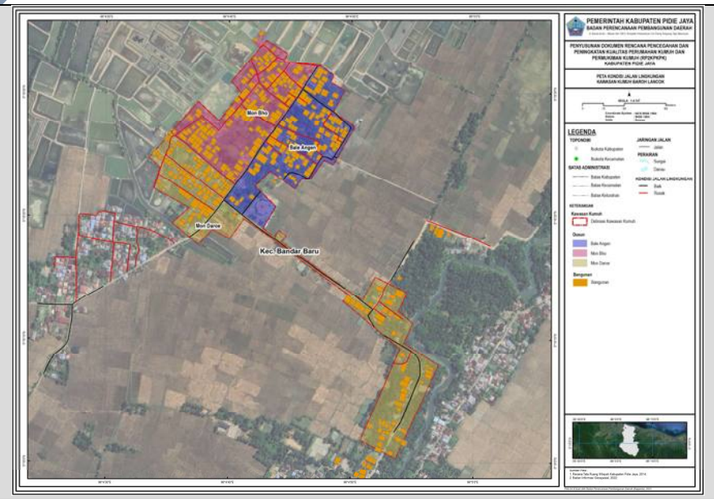
7. Profil Permukiman Kumuh Gampong Baro Lancok Kecamatan Bandar Baru



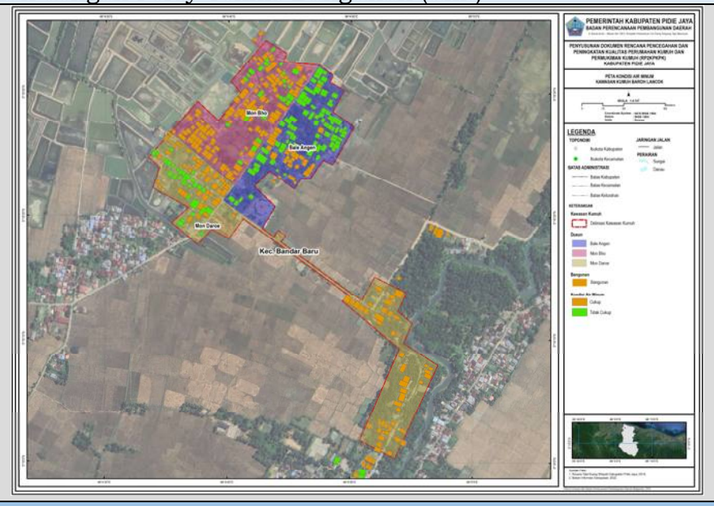
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Baro Lancok	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Baro Lancok	1	Baro Lancok	Bale Angin	4,94	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Baro Lancok	Mon Bho	5,43	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Baro Lancok	Mon Daroe	8,98	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	19,35					
KOORDINAT						
Latitude	5,272658					
Longitude	96,079111					
Jumlah Bangunan (Unit)	392					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1635					
Jumlah Kk	495					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

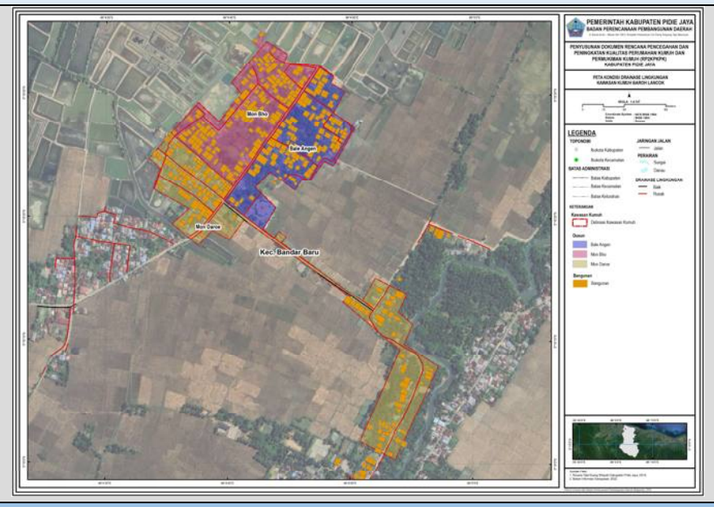




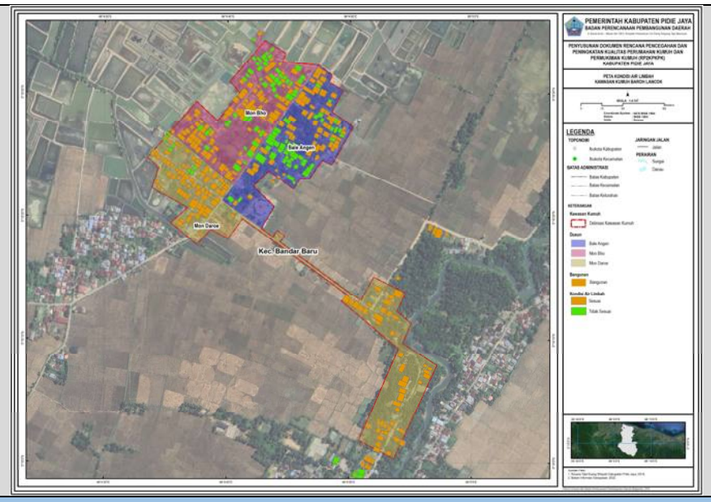


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)		Panjang Jalan Ideal (m)	
Jumlah RTLH (unit)		Panjang Jalan Eksisting (m)	
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)		a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	
b. Kepadatan Bangunan (unit)		b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)			

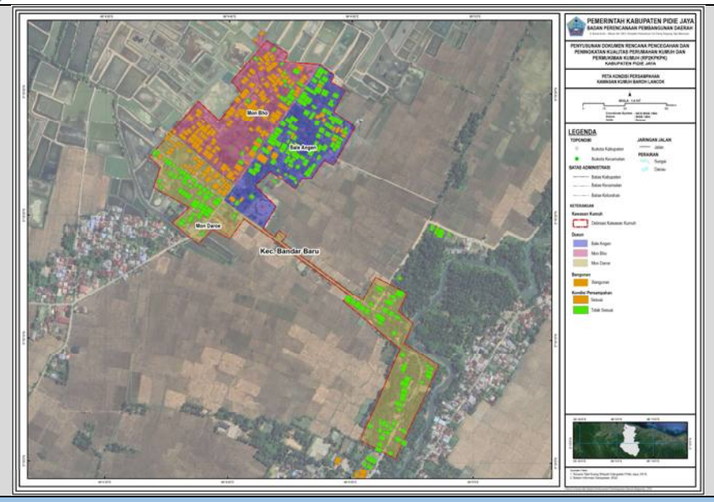




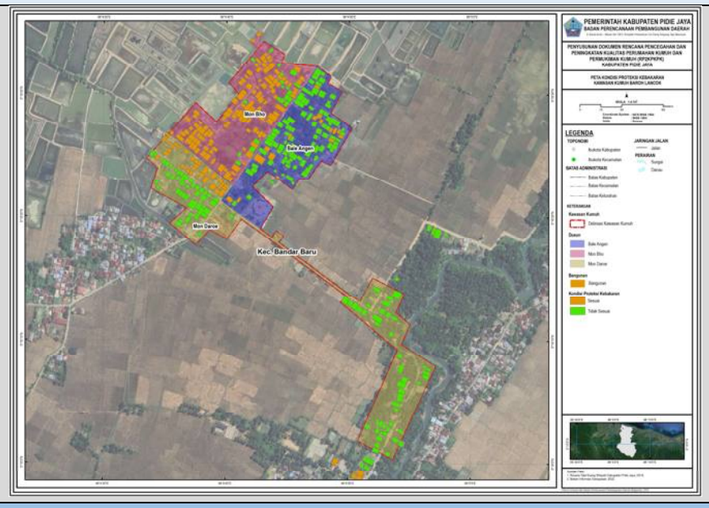
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK		Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman		Panjang Drainase Ideal (m)	
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari		Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	

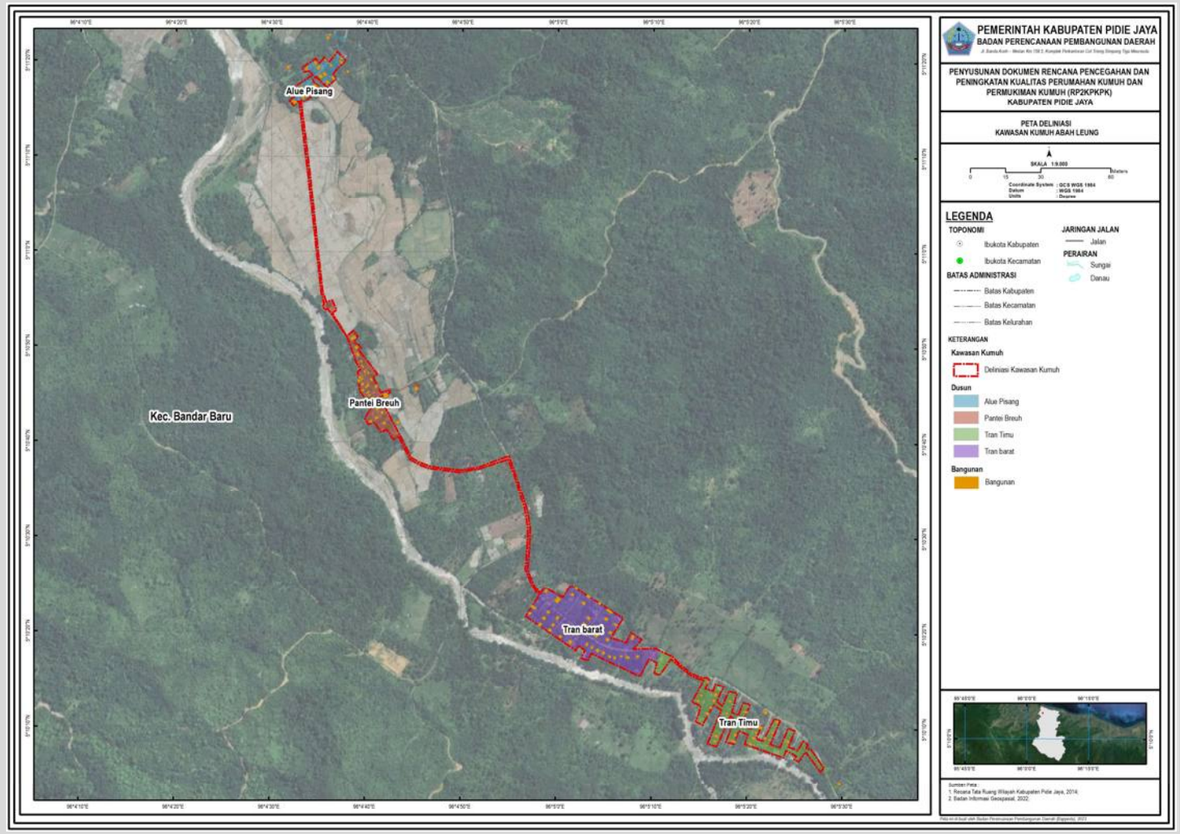


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	

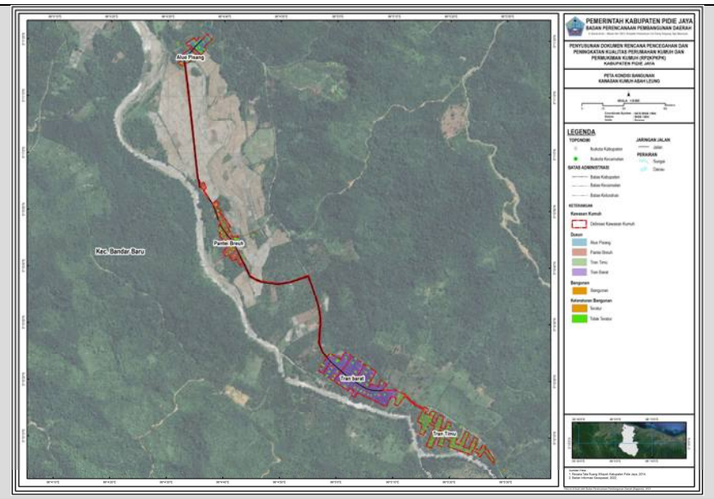
8. Profil Permukiman Kumuh Gampong Abah Leung Kecamatan Bandar Baru

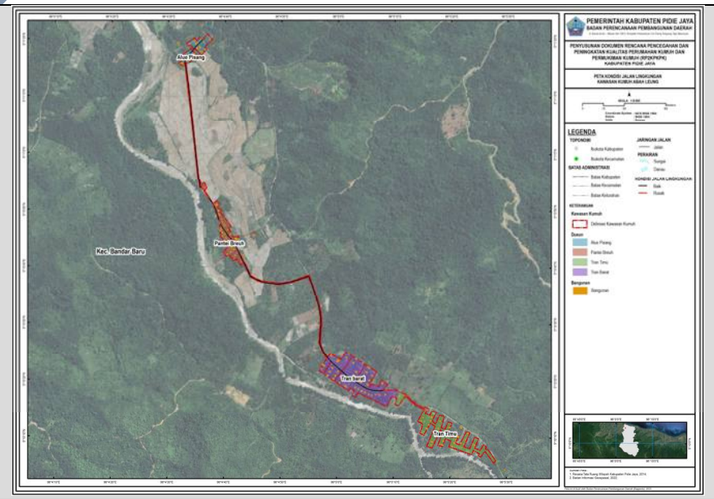


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Abah Leung	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Abah Leung	1	Abah Leung	Alue Pisang	1,64	Kumuh Sedang
Kecamatan	Banda Baru	2	Abah Leung	Pantei Breuh	2,43	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Abah Leung	Tran Barat	5,55	Kumuh Sedang
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	9,62					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	117,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	409,00					
Jumlah Kk	117,00					

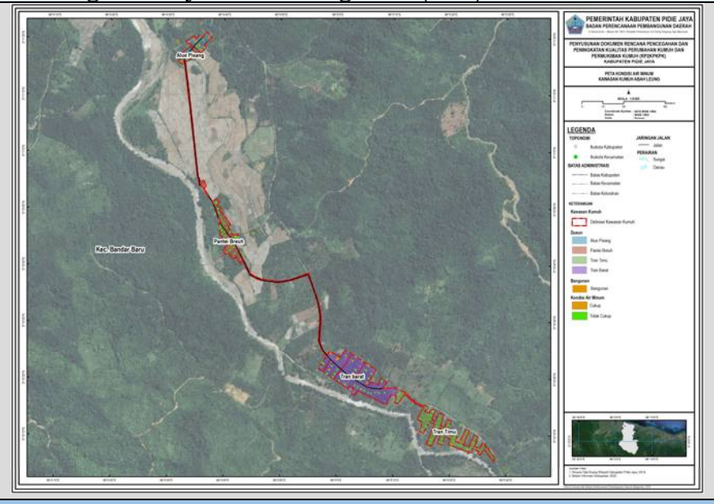
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

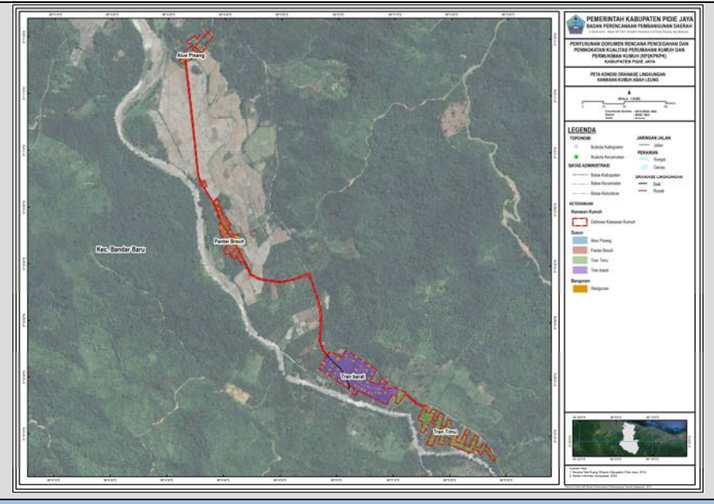




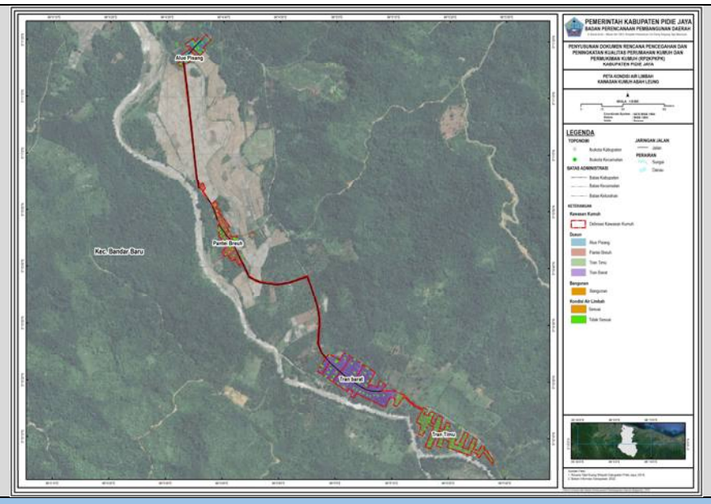


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	117	Panjang Jalan Ideal (m)	2.829,62
Jumlah RTLH (unit)	34	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.829,62
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	59	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	376,91
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	34		

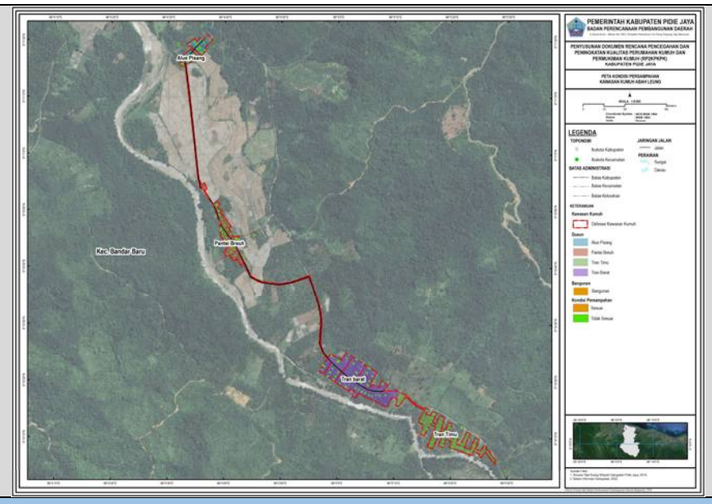




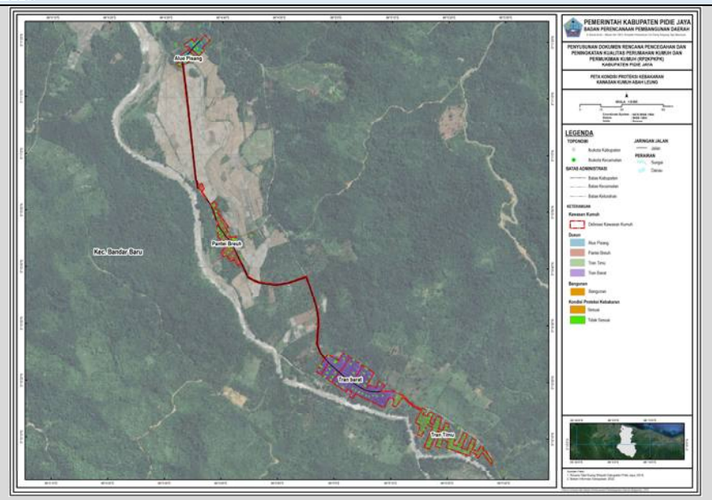
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	117	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	109	Panjang Drainase Ideal (m)	989,29
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	66	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	989,29
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	760,02



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	117,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	117
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	116

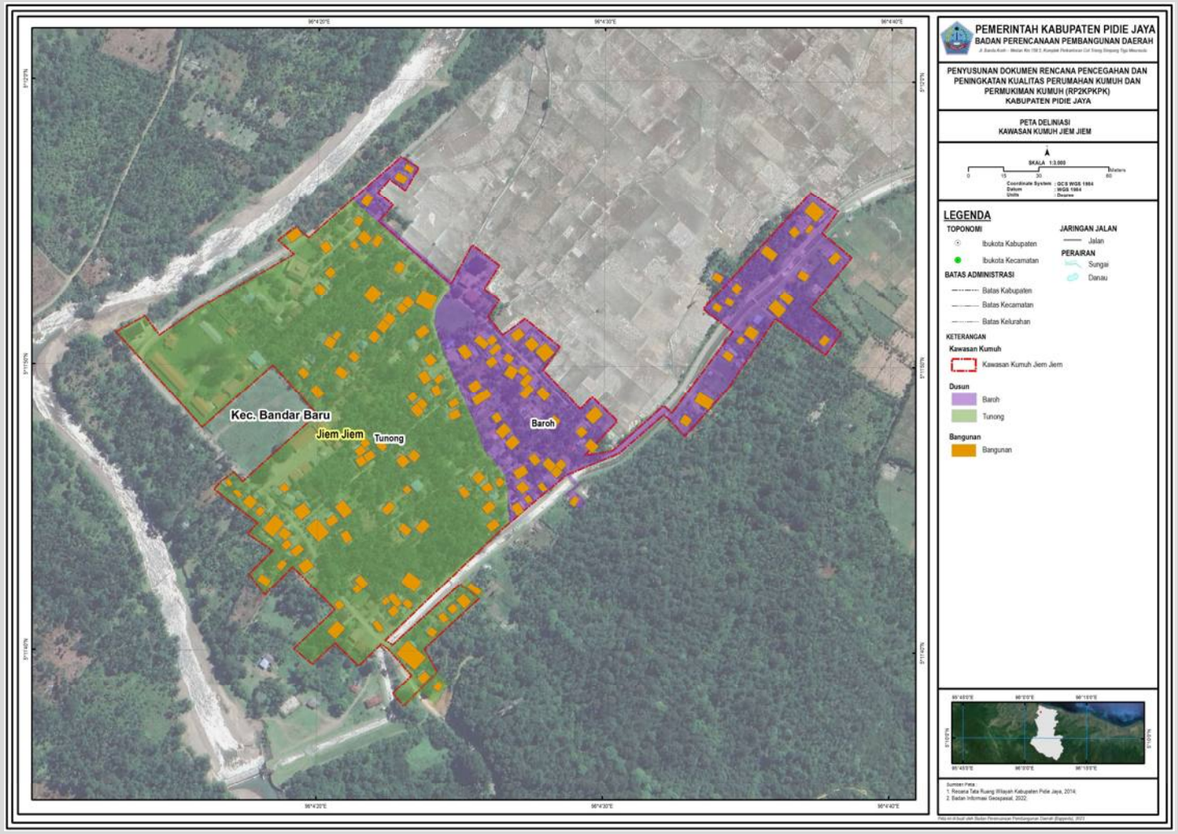


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	117,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	117
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	117



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	117,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	409,00
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	117,00

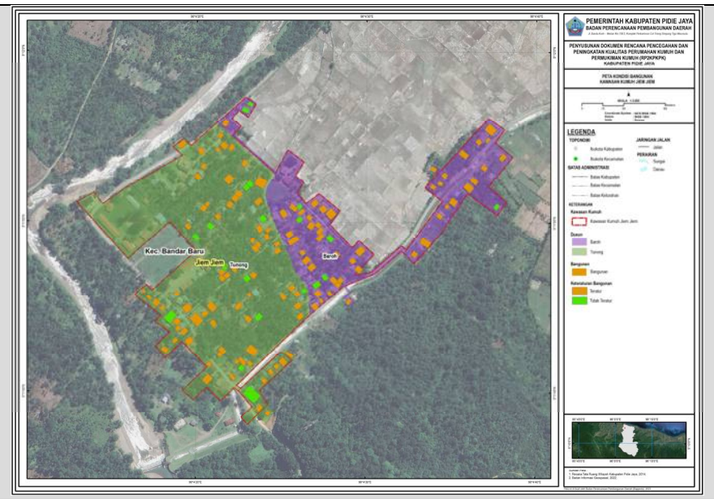
9. Profil Permukiman Kumuh Gampong Jiem Jiem Kecamatan Bandar Baru

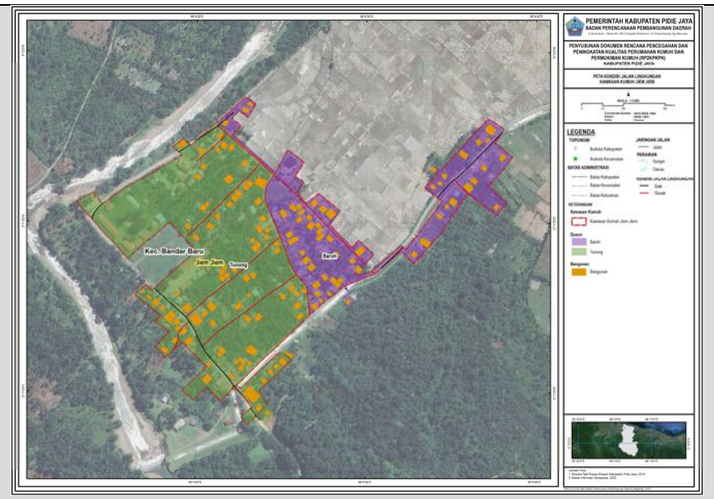


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Jiem-Jiem	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Jiem-Jiem	1	Jiem-Jiem	Baroh	4,49	Kumuh Sedang
Kecamatan	Banda Baru	2	Jiem-Jiem	Tunong	10,66	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	15,15					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	130,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	581,00					
Jumlah Kk	152,00					

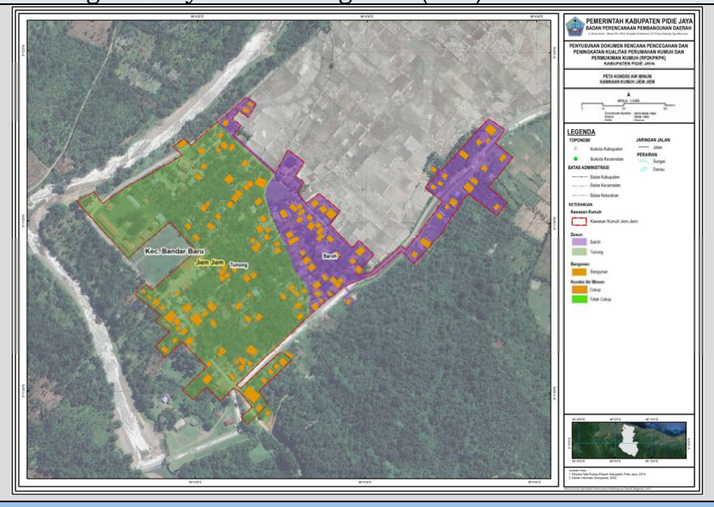
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

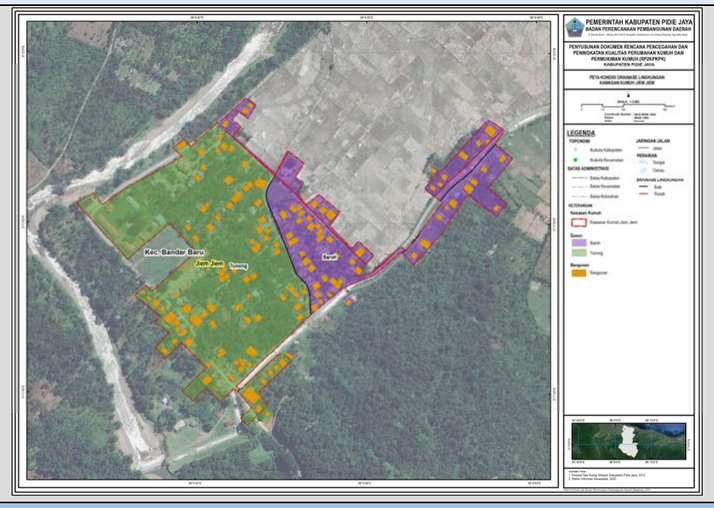




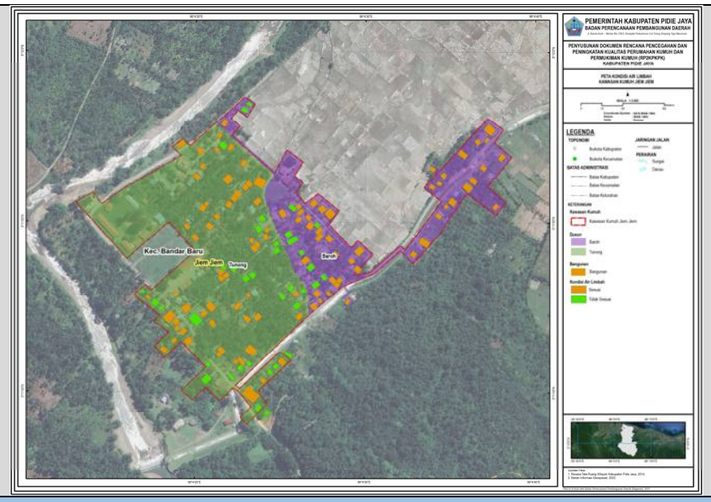


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	130	Panjang Jalan Ideal (m)	2.106,86
Jumlah RTLH (unit)	9	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.106,86
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	127	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.460,41
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	9		

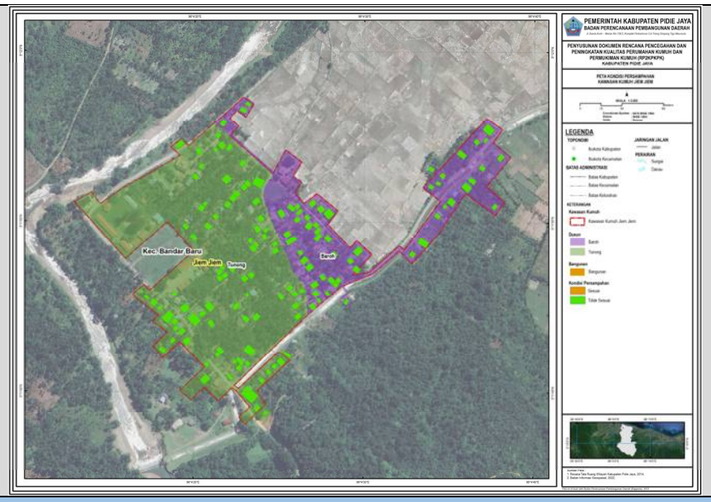




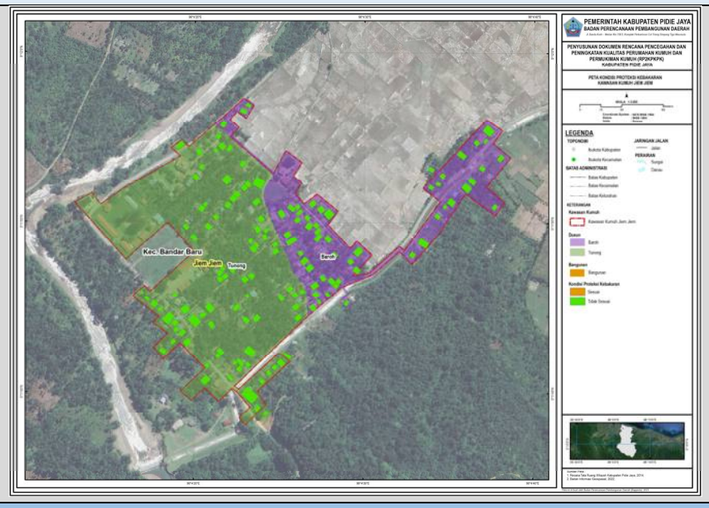
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	152	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	146	Panjang Drainase Ideal (m)	1287,90
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1087,90
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	200,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	635,48



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	152,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	58
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	58

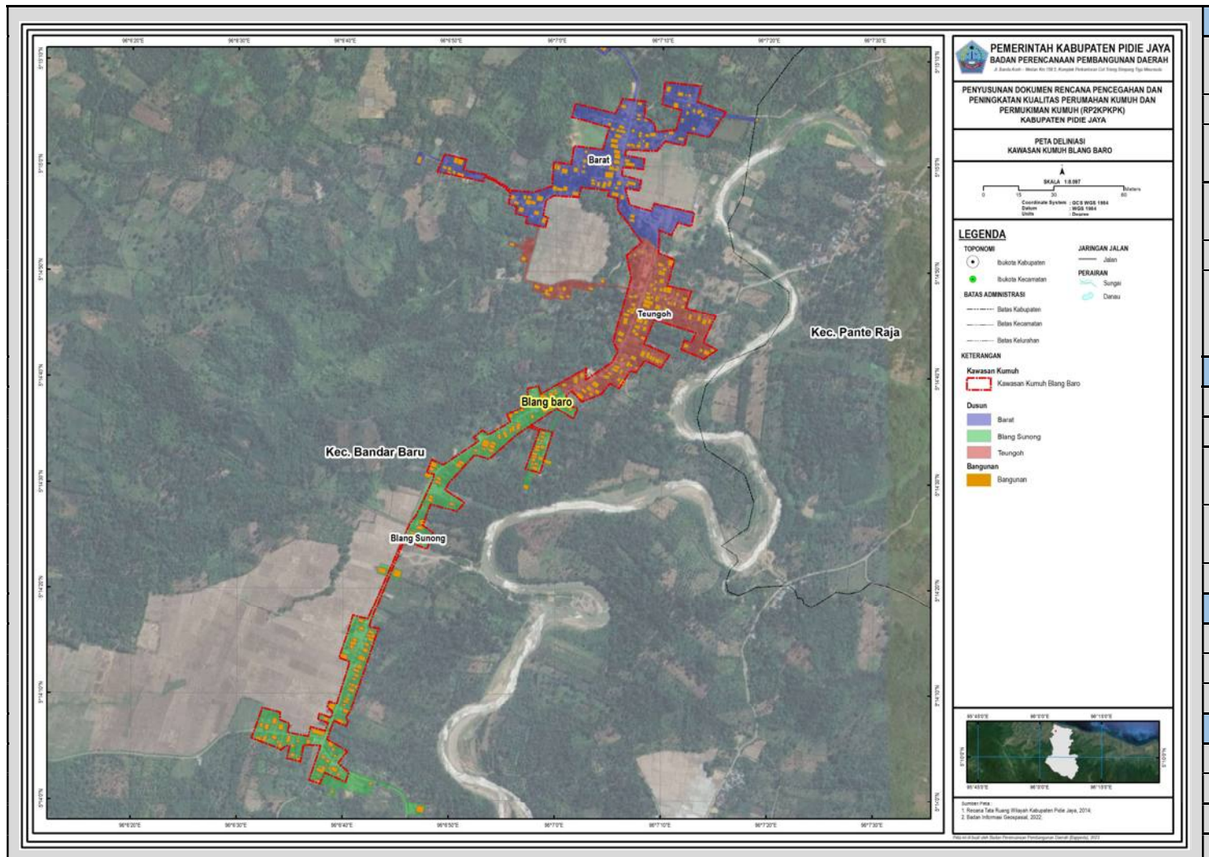


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	152,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	152
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	152



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	130,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	130
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	130

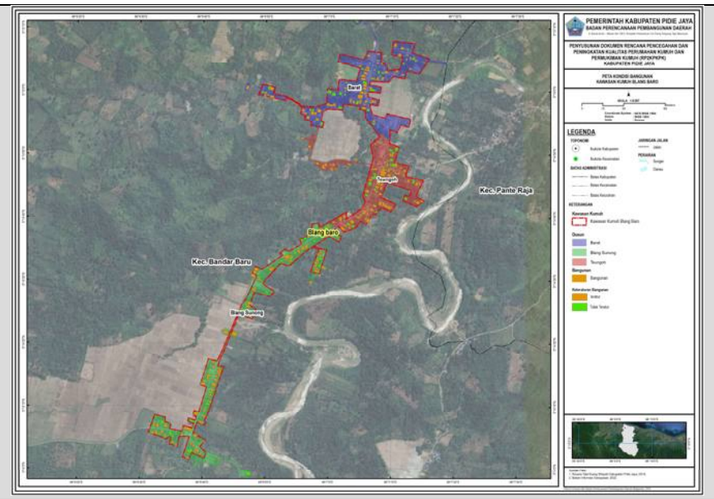
10. Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru

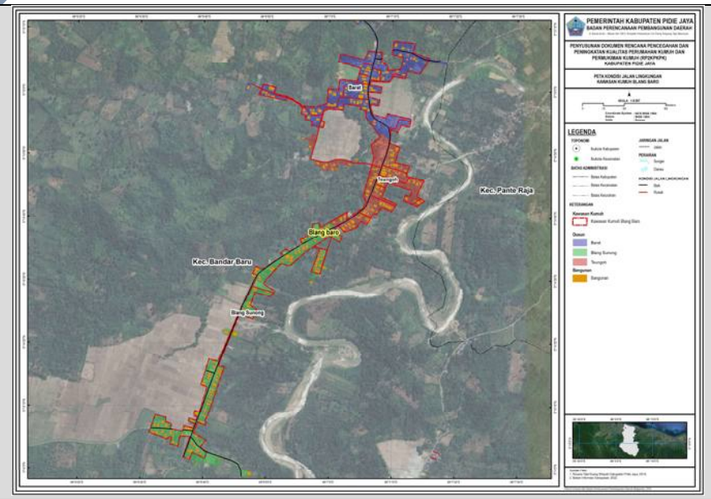


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Blang Baro	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Blang Baro	1	Blang Baro	Barat	11,08	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Blang Baro	Blang Sunong	10,46	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Blang Baro	Dusun Teungoh	7,97	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)						
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	324,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1399,00					
Jumlah Kk	383,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

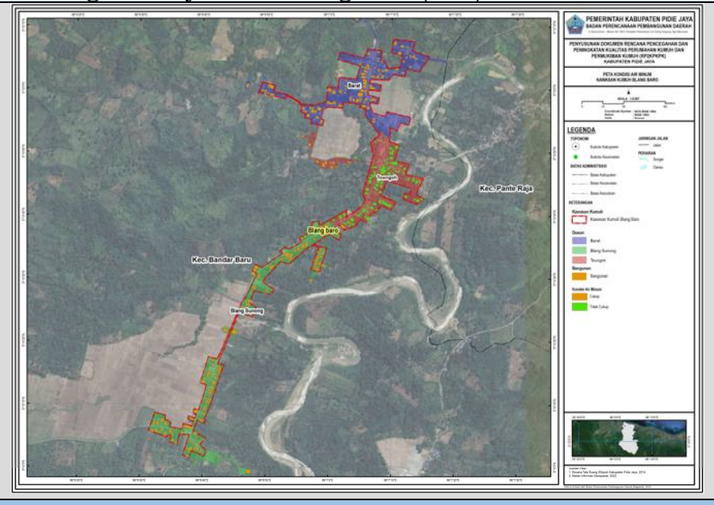


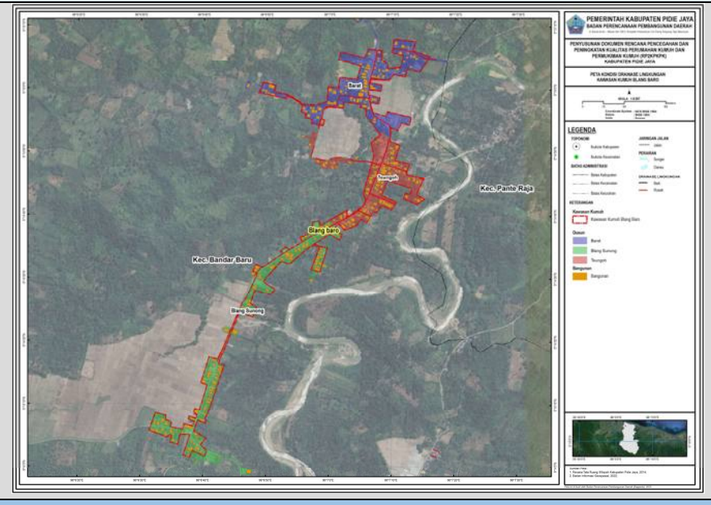


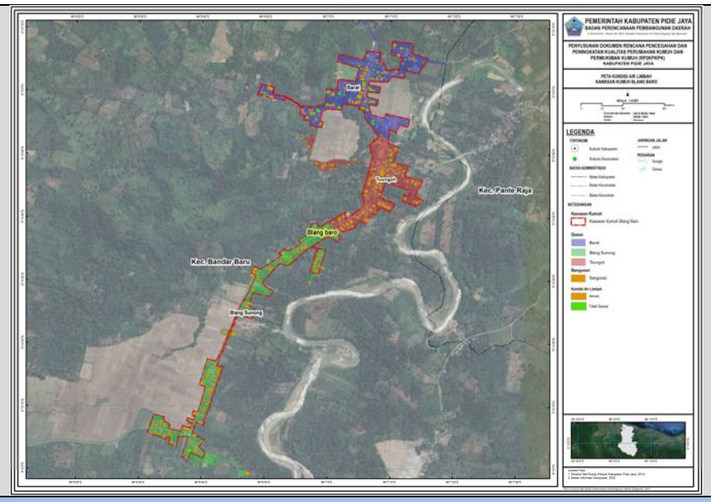


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	324	Panjang Jalan Ideal (m)	6.551,60
Jumlah RTLH (unit)	70	Panjang Jalan Eksisting (m)	6.551,60
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	161	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2.944,29
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	70		

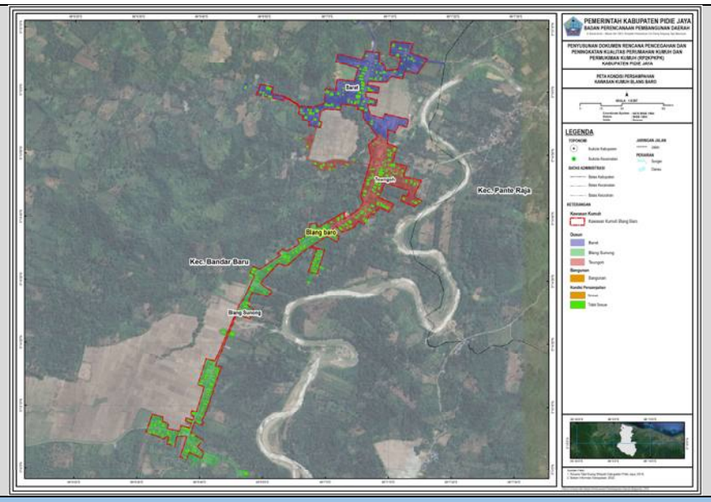




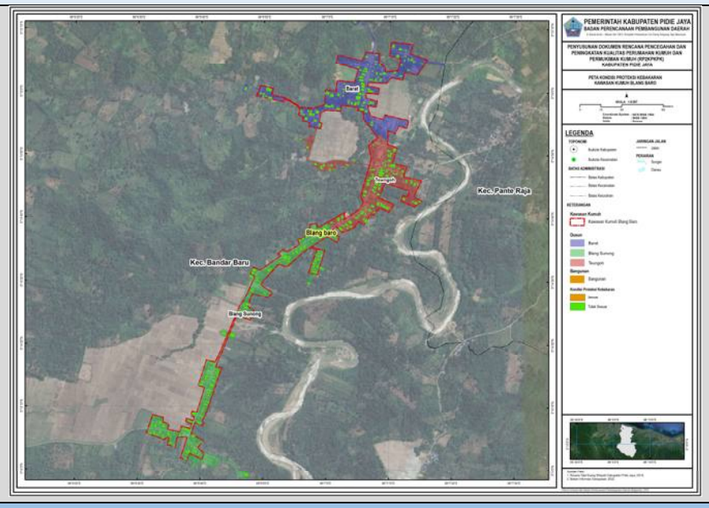
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	383	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	13	Panjang Drainase Ideal (m)	2736,98
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	100	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2736,98
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	2736,98



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	383,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	65
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	65

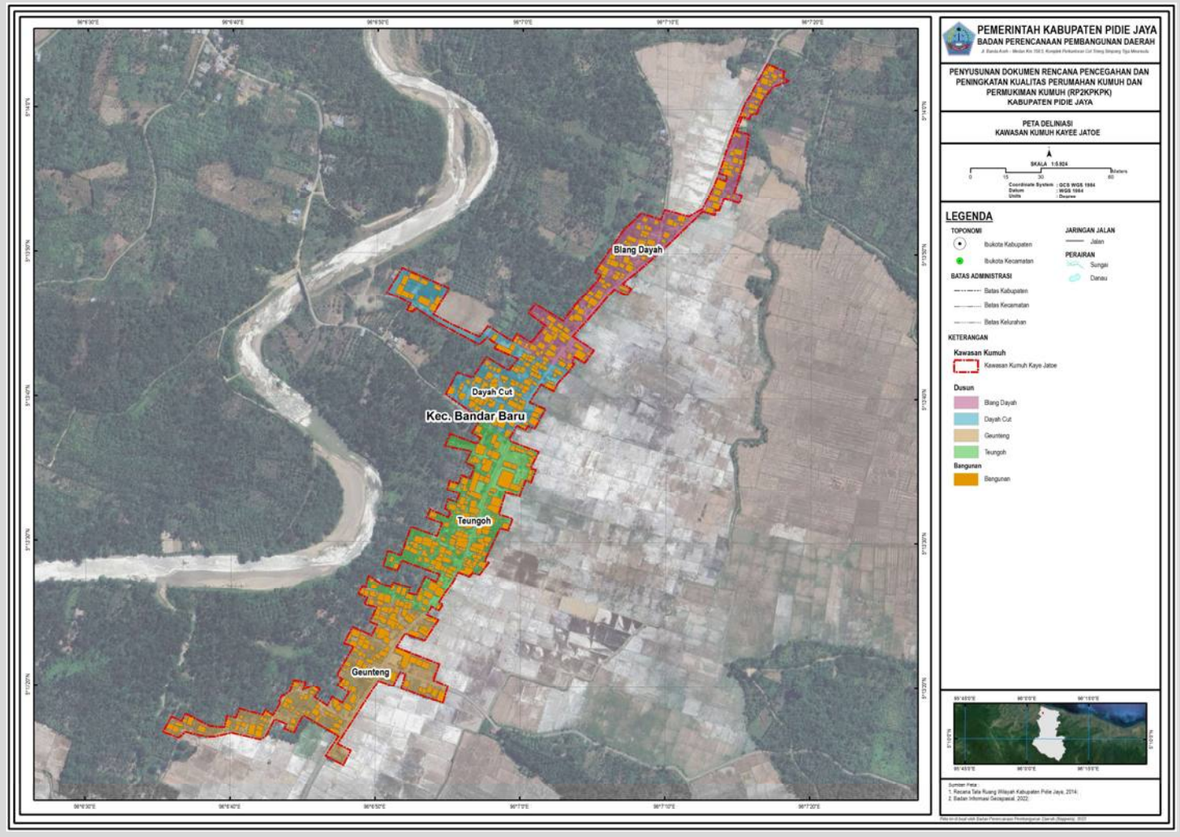


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	383,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	383
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	383



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	324,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	324
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	324

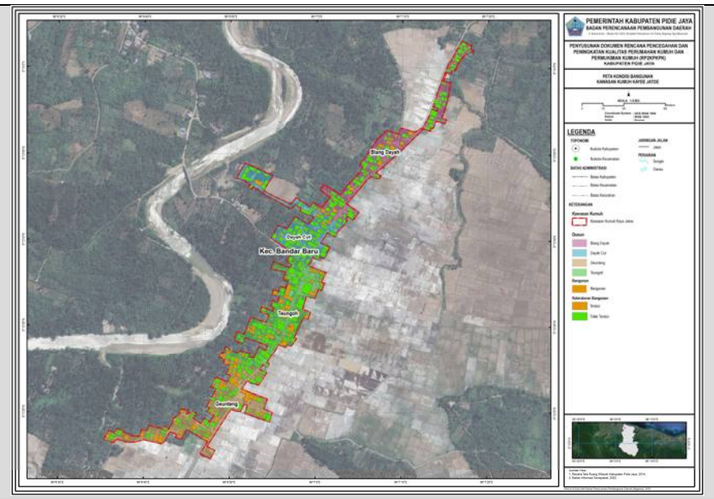
11. Profil Permukiman Kumuh Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru

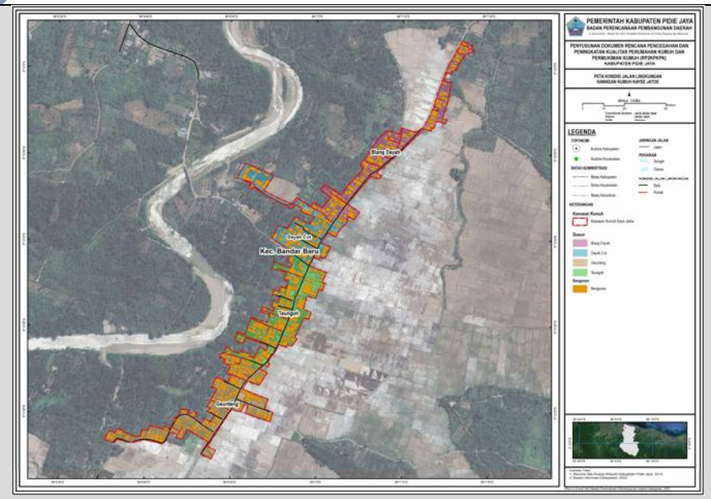


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kayee Jatoe	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kayee Jatoe	1	Kayee Jatoe	Blang Dayah	10,00	Kumuh Sedang
Kecamatan	Banda Baru	2	Kayee Jatoe	Dayah Cut	3,60	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Kayee Jatoe	Teungoh	5,10	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	24					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	390,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1509,00					
Jumlah Kk	445,00					

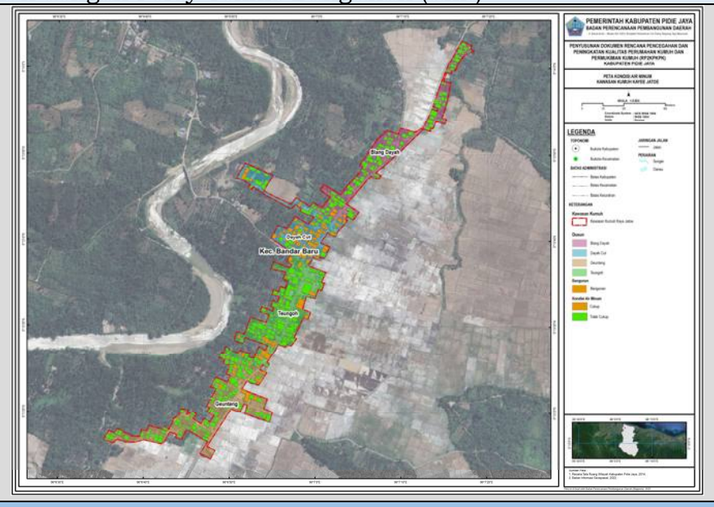
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

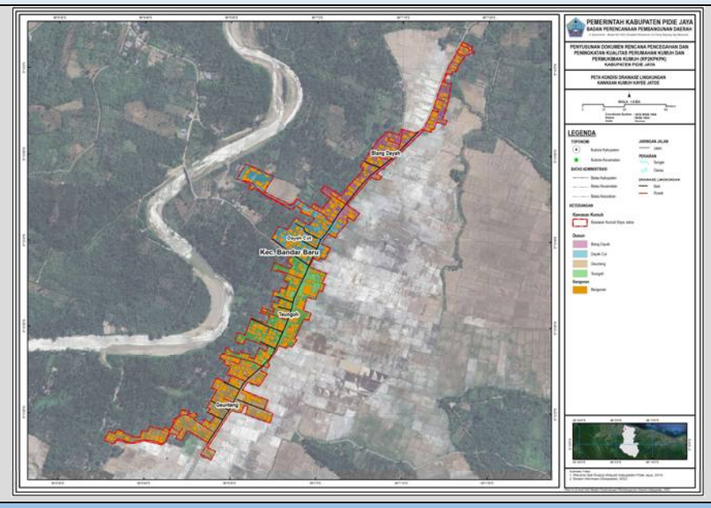




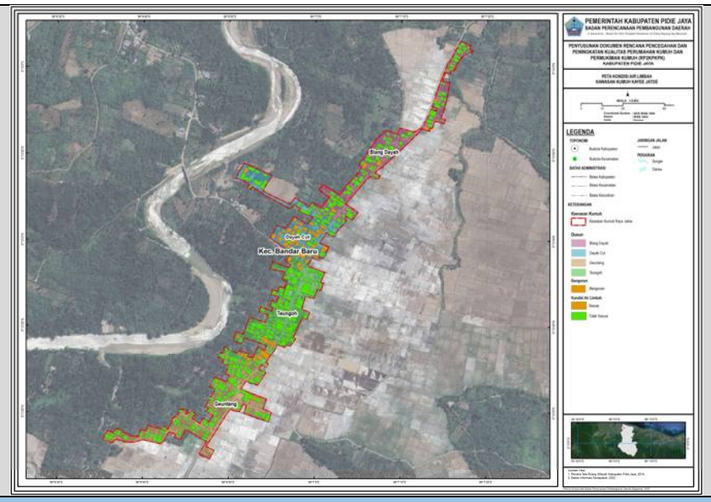


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	390	Panjang Jalan Ideal (m)	4.850,00
Jumlah RTLH (unit)	233	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.800,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	368	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	1.050,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2.850,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	233		

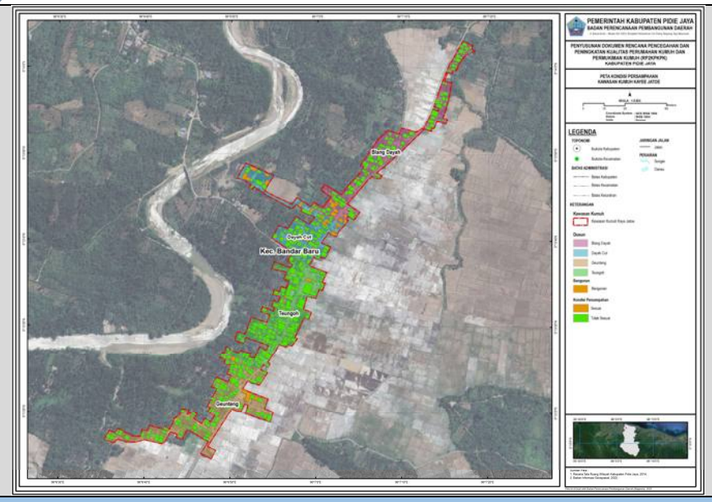




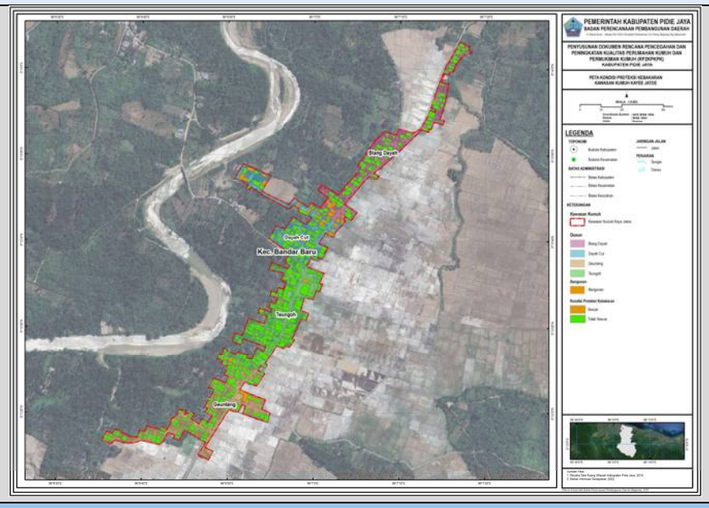
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	445	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	3,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	301	Panjang Drainase Ideal (m)	3700,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	322	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1800,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	1900,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1400,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	445,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	205
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	205

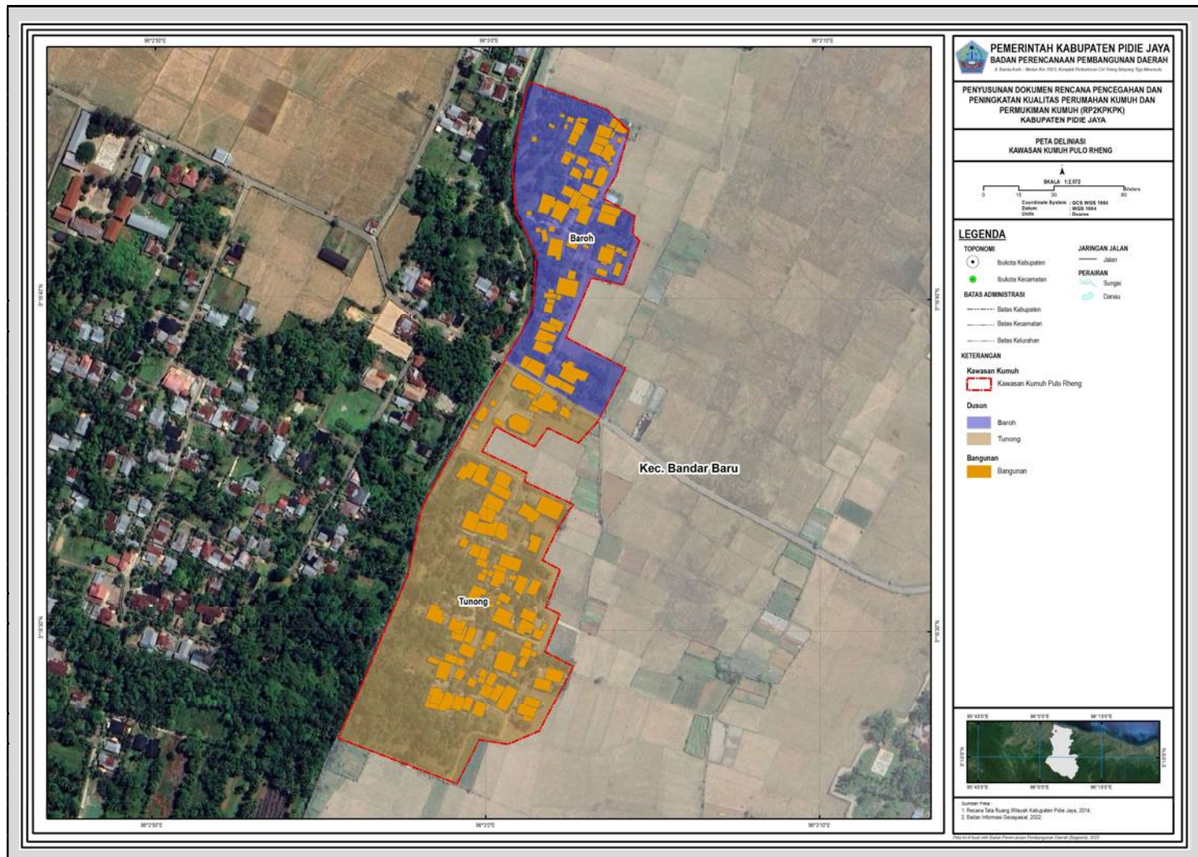


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	445,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	445
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	386



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	390,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	390

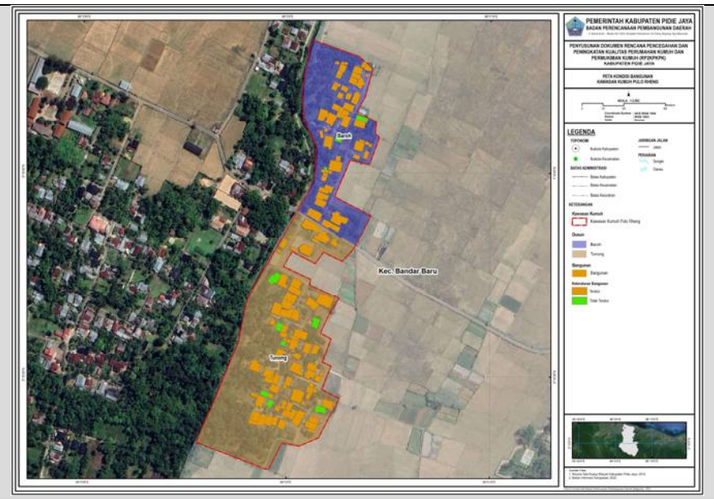
12. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Rheng Kecamatan Bandar Baru

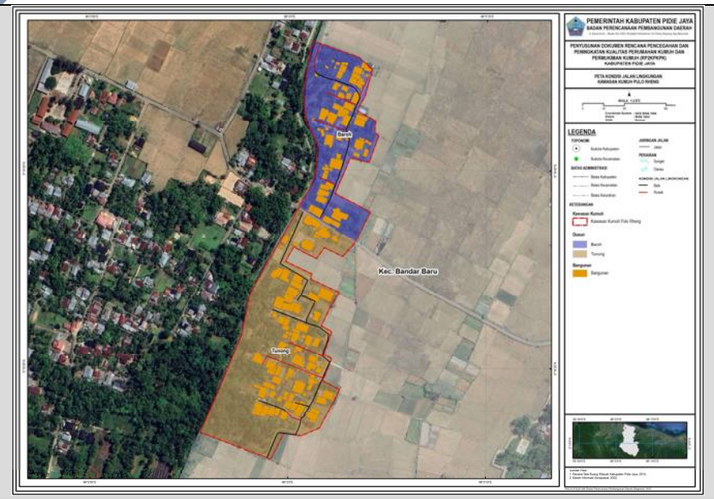


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Pulo Rheng	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Pulo Rheng	1		Baroh	13,00	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2		Tunong	15,00	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	28					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	93,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	340,00					
Jumlah Kk	107,00					

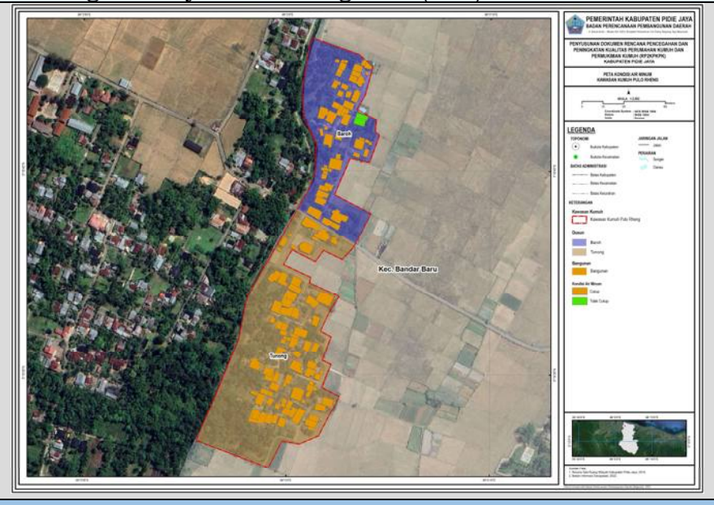
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

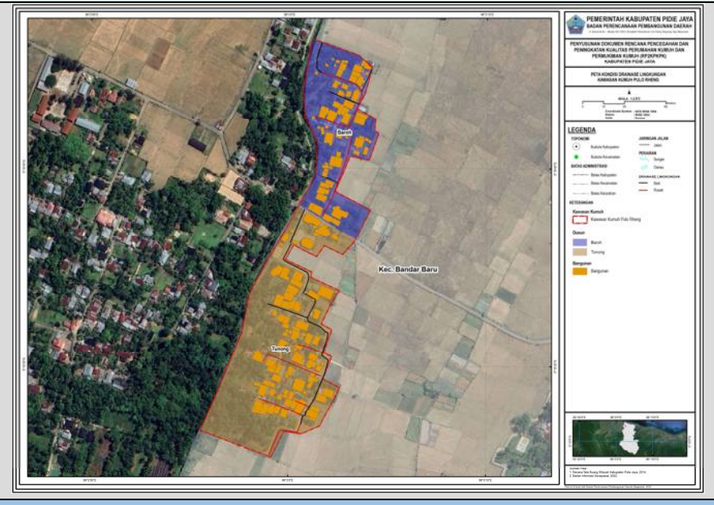




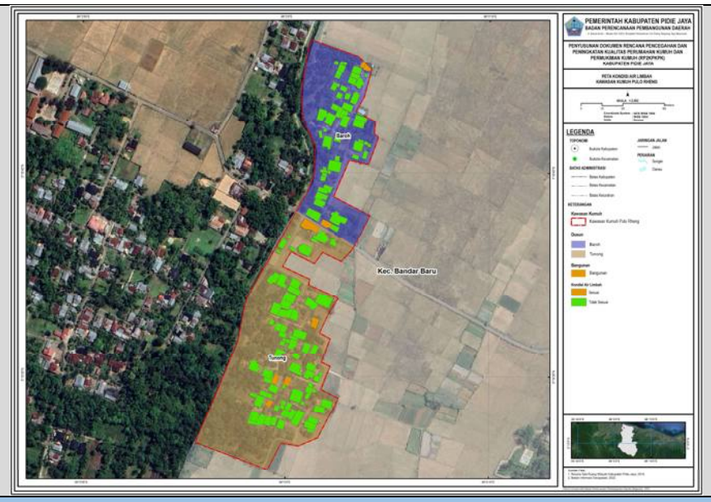


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	93	Panjang Jalan Ideal (m)	1.871,00
Jumlah RTLH (unit)	3	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.461,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	53	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	410,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	805,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	3		

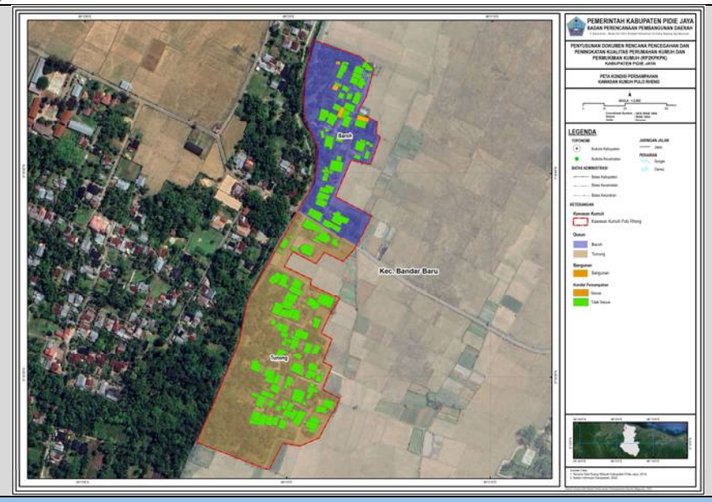




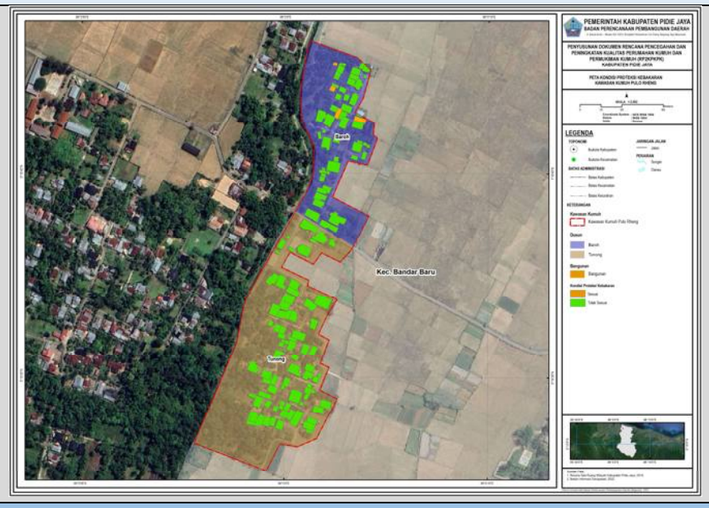
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	107	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	93	Panjang Drainase Ideal (m)	981,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	3	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	333,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	648,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	333,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	107,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	41
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	41

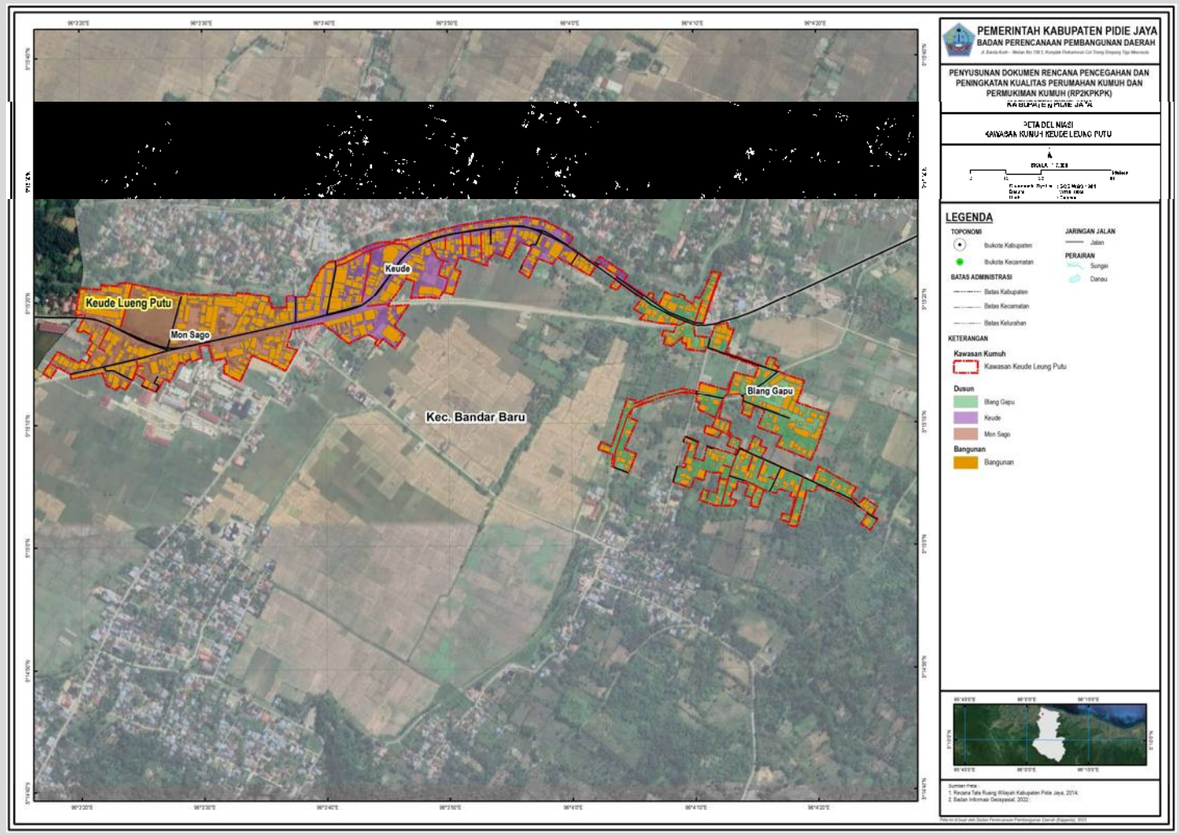


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	107,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	107
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	101



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	93,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	15
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	93

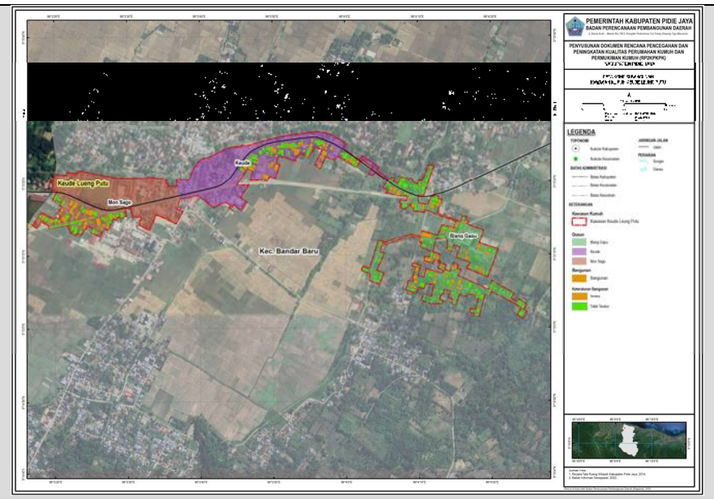
13. Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru

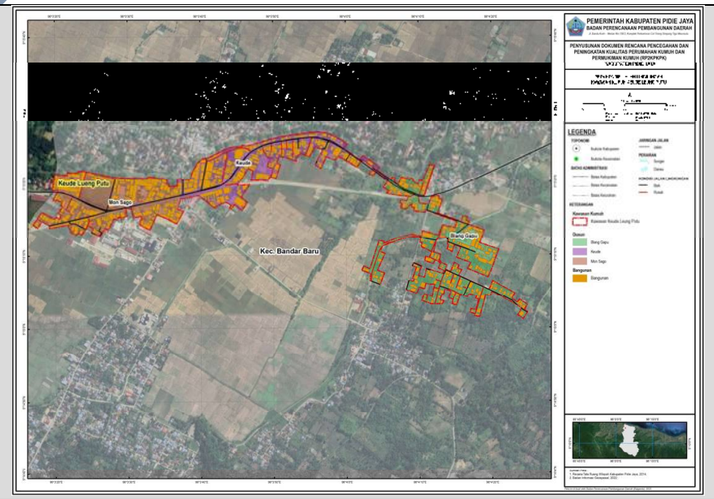


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Lueng Putu	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Lueng Putu	1	Keude Lueng Putu	Mon Sagau	10,80	Kumuh Ringan
Kecamatan	Banda Baru	2	Keude Lueng Putu	Keude	10,10	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Keude Lueng Putu	Blang Gapu	10,60	Kumuh Sedang
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	31,50					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	392,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1625,00					
Jumlah Kk	462,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

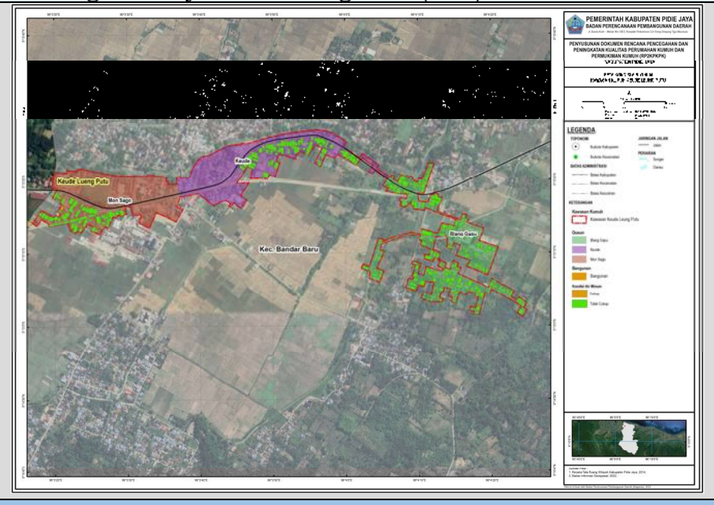


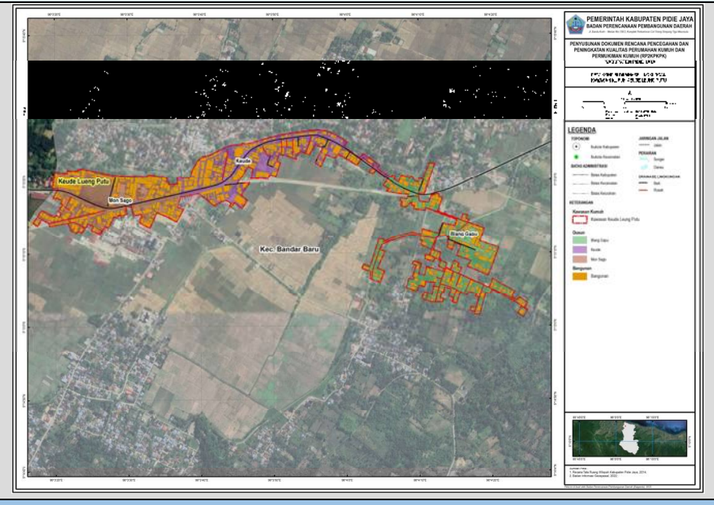




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	392
Jumlah RTLH (unit)	259
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	377
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	259

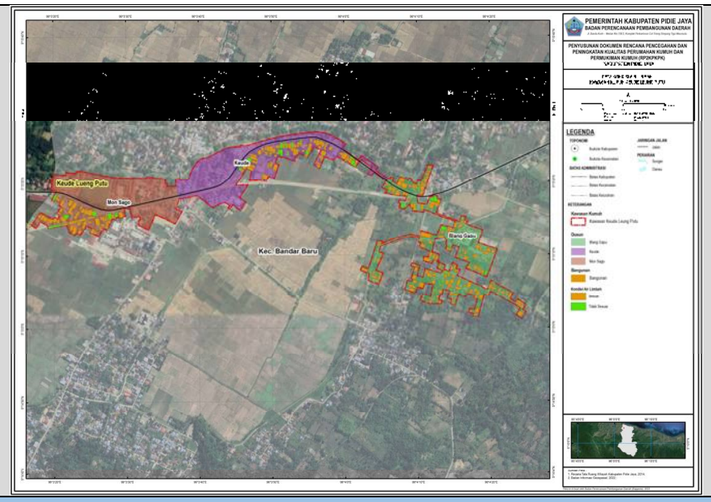
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	5.115,00
Panjang Jalan Eksisting (m)	4.165,00
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	950,00
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	3.565,00



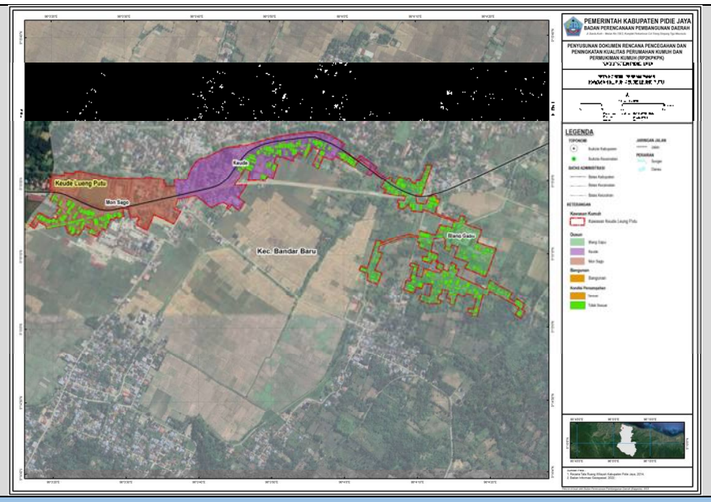


KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	462
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	462
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	455

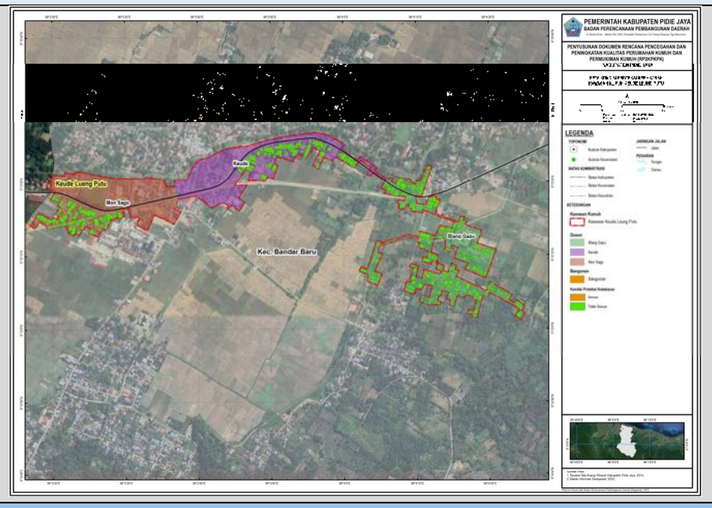
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	5,00
Panjang Drainase Ideal (m)	2680,00
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2380,00
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	300,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1150,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	462,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	17
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	17

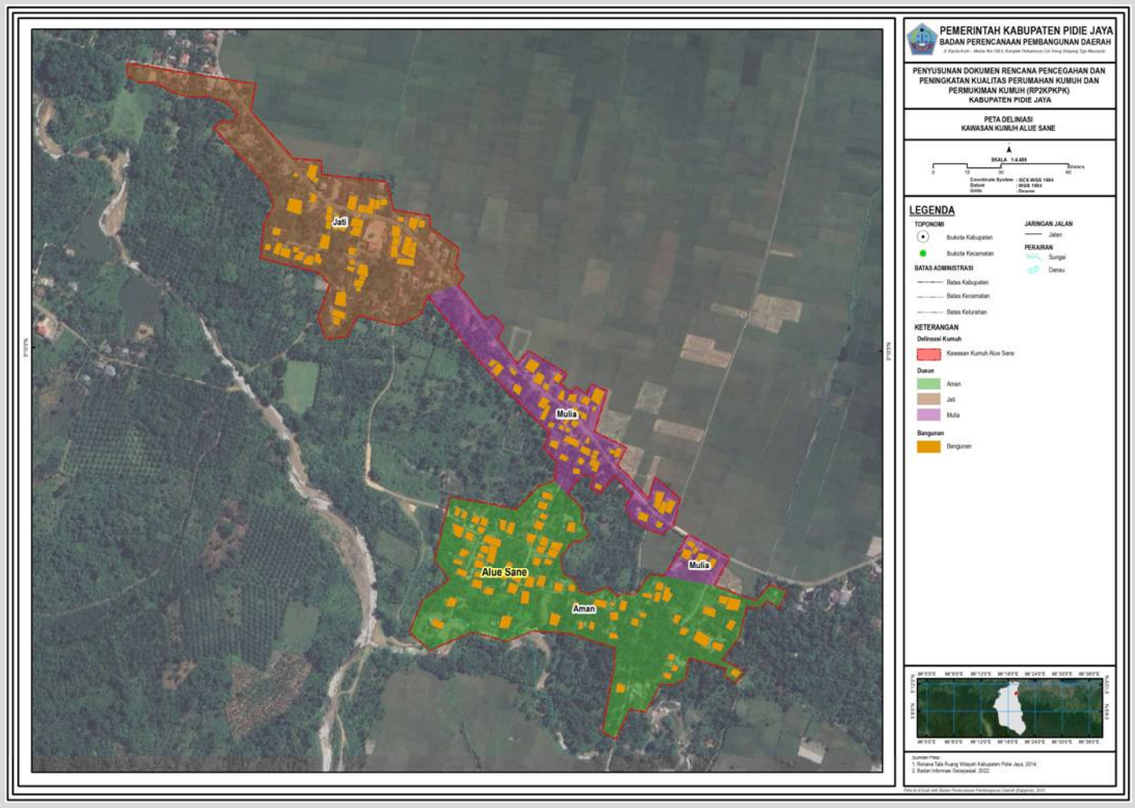


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	462,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	462
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	462



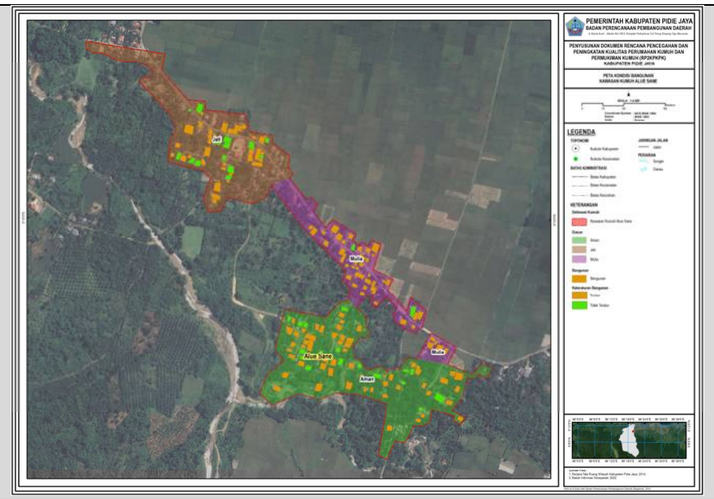
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	392,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	319
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	392

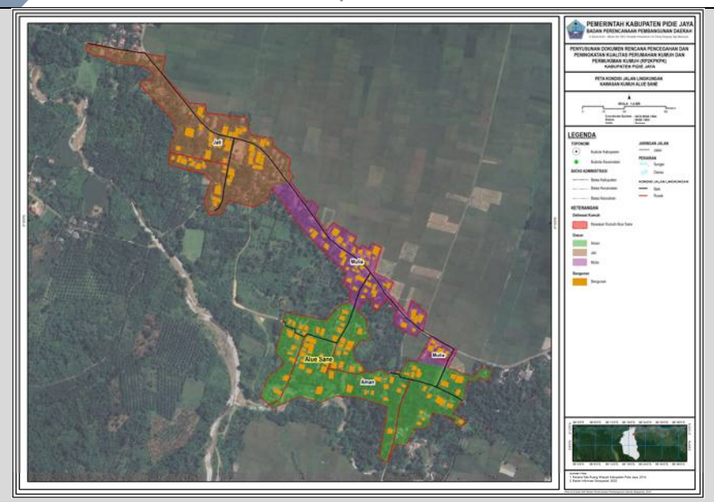
14. Profil Permukiman Kumuh Gampong Alue Sane Kecamatan Bandar Dua



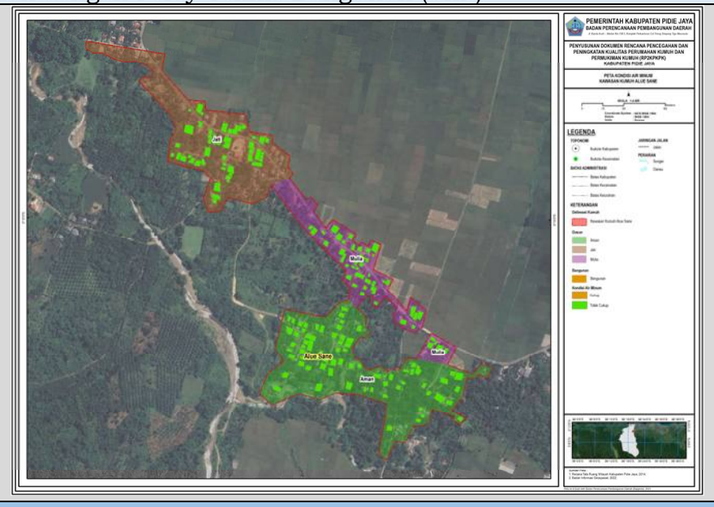
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Alue Sane	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Alue Sane	1	Alue Sane	Dusun Aman	9,75	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Alue Sane	Dusun Jati	7,44	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Alue Sane	Dusun Mulia	4,32	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	21,52					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	168,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	710,00					
Jumlah Kk	195,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

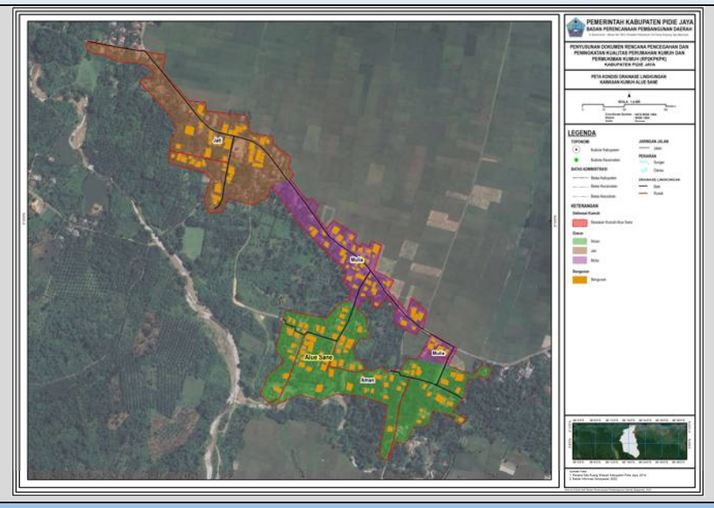




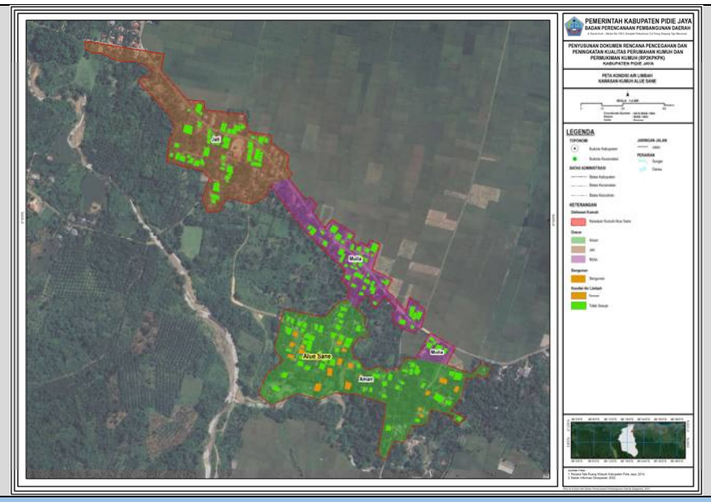


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	168	Panjang Jalan Ideal (m)	2.077,82
Jumlah RTLH (unit)	16	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.077,82
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	161	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	16		

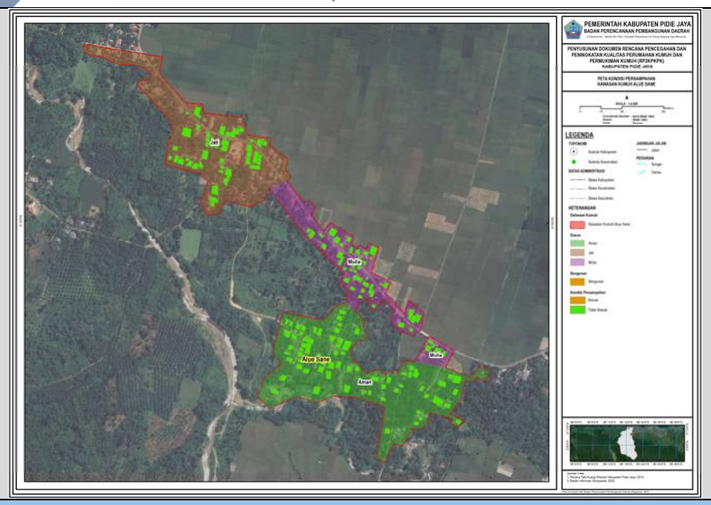




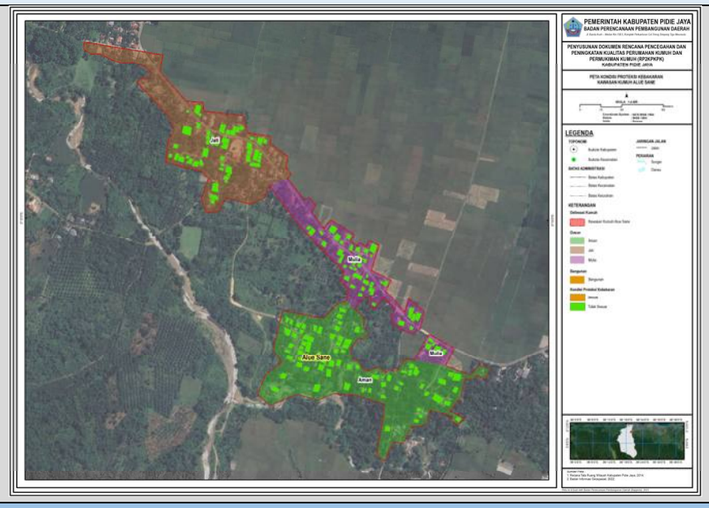
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	195	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	2077,82
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	195	Panjang Drainase Ideal (m)	2077,82
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	195	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	0,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	195,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	79
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	79

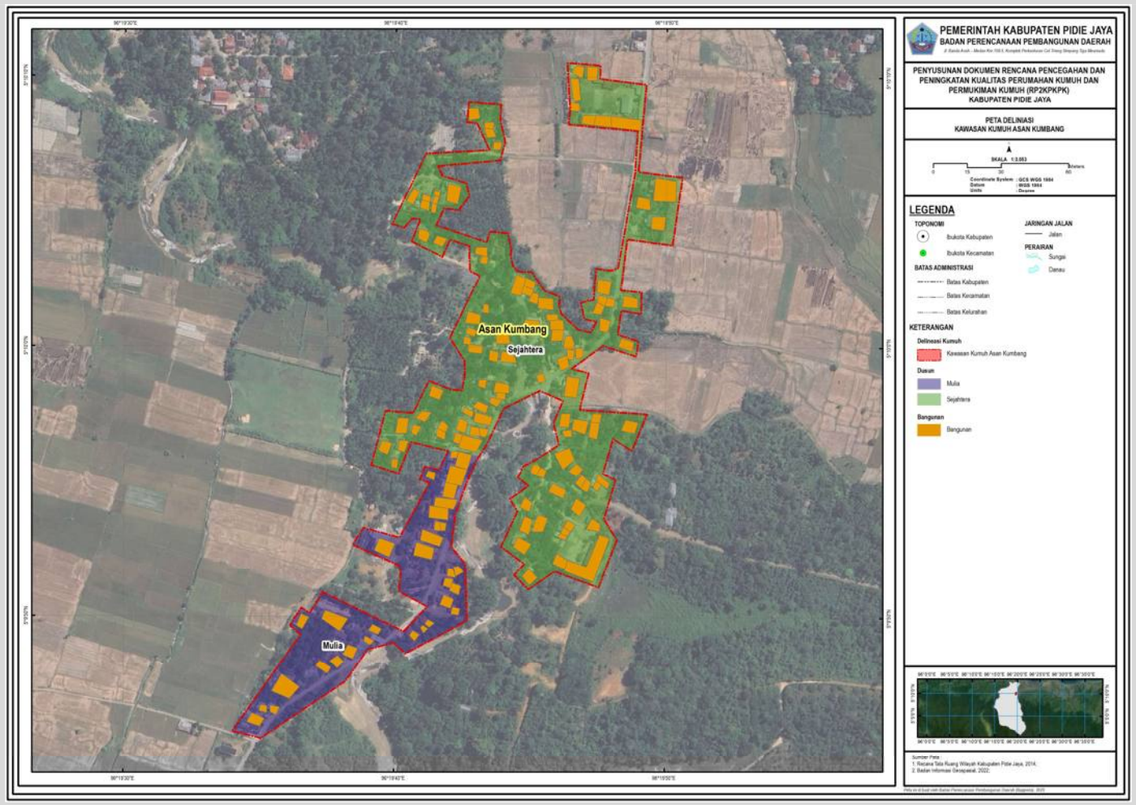


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	195,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	195
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	195



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	168,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	168
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	168

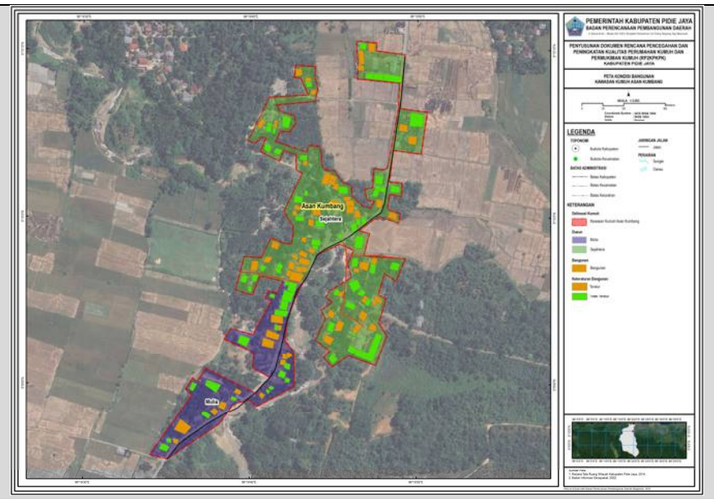
15. Profil Permukiman Kumuh Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua

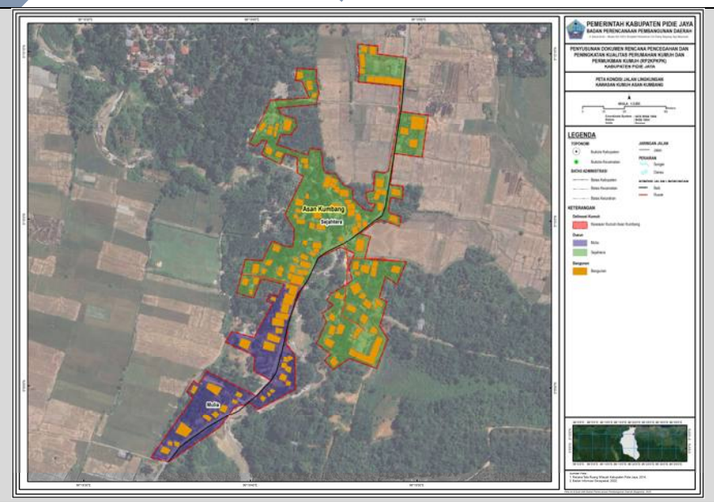


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Asan Kumbang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Asan Kumbang	1	Asan Kumbang	Dusun Mulia	2,60	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Asan Kumbang	Dusun Sejahtera	6,94	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	9,54					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	90,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	412,00					
Jumlah Kk	103,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

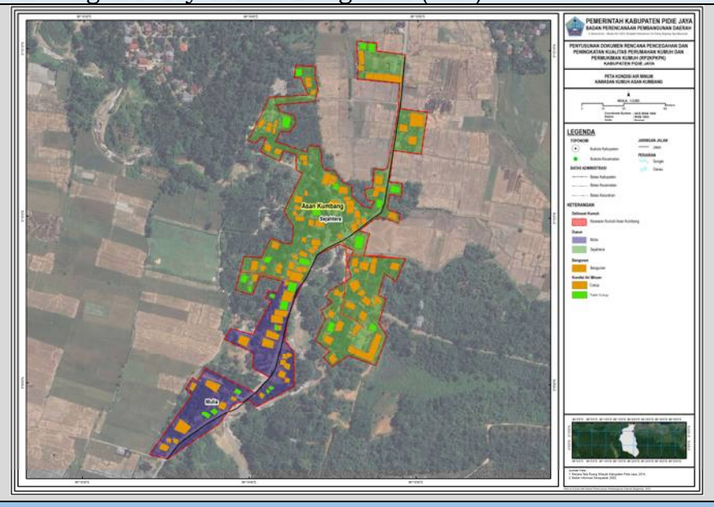


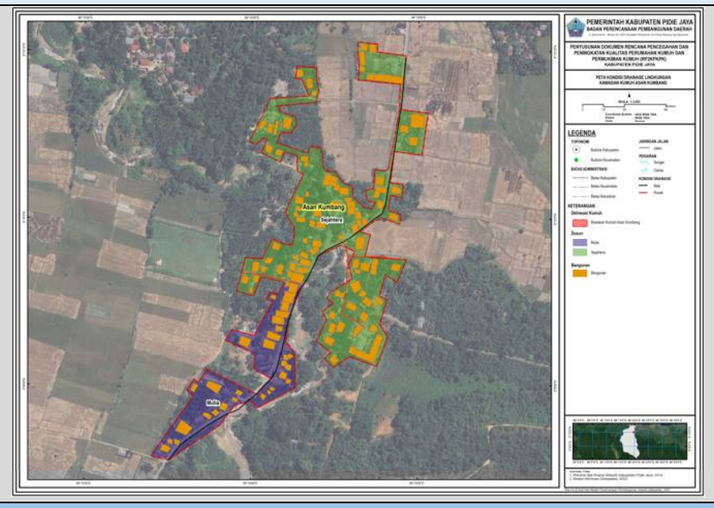


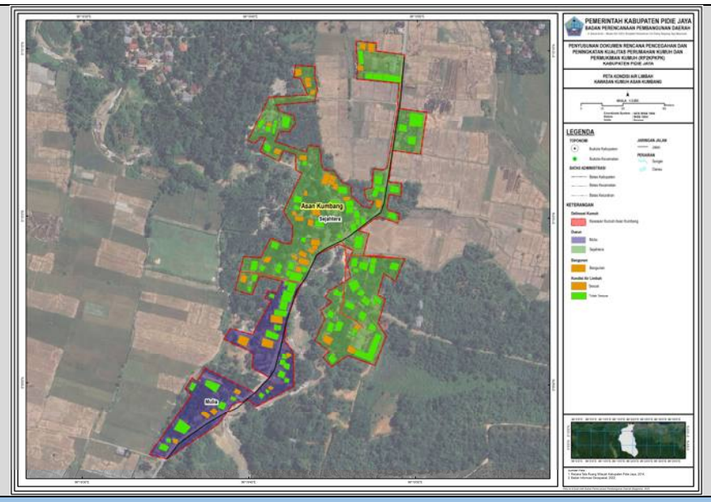


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	90	Panjang Jalan Ideal (m)	1.146,44
Jumlah RTLH (unit)	36	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.146,44
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	47	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	265,55
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	36		

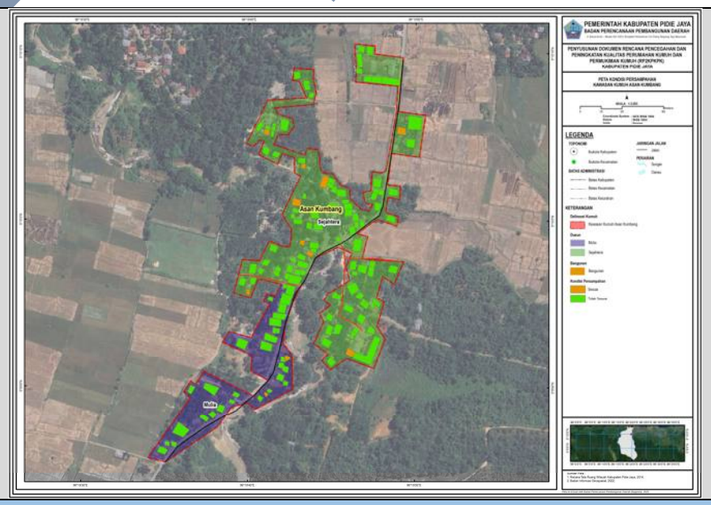




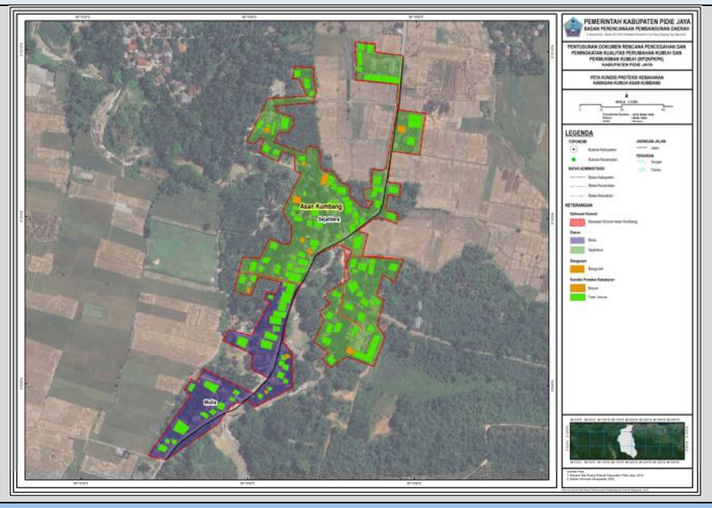
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	103	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	55	Panjang Drainase Ideal (m)	1146,44
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	16	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1146,44
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	265,55



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	103,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	33
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	33

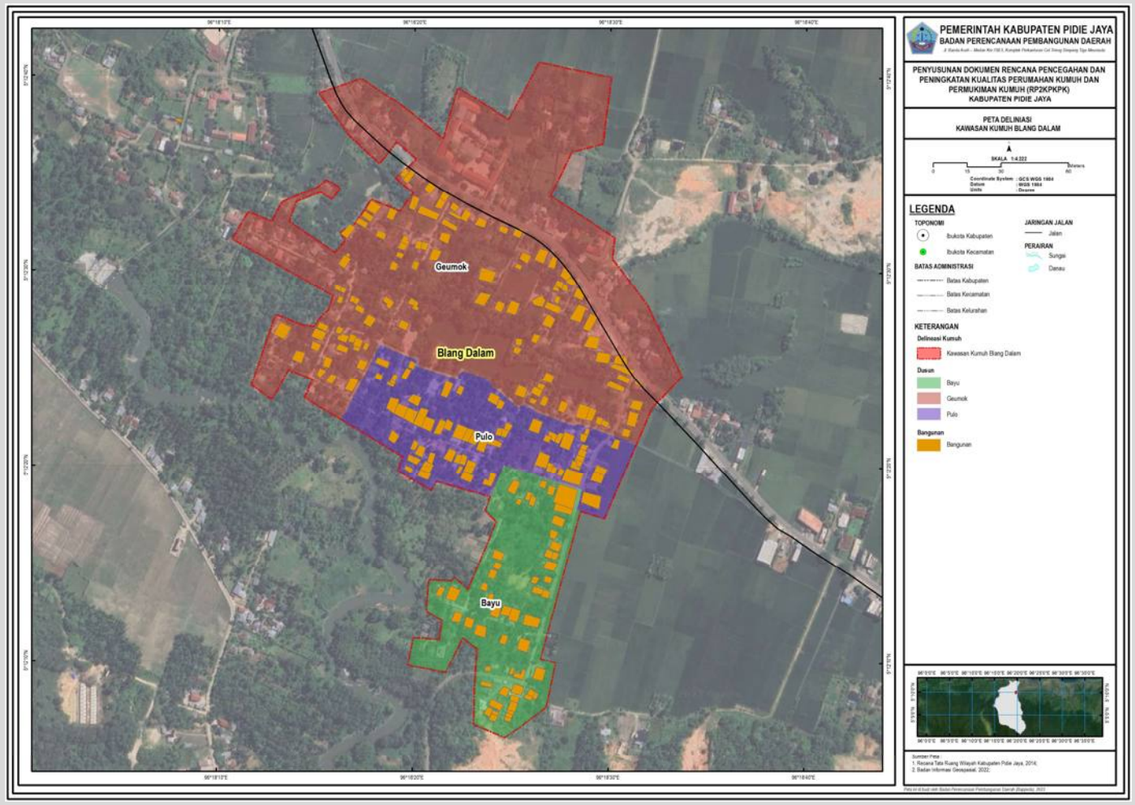


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	103,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	103
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	94



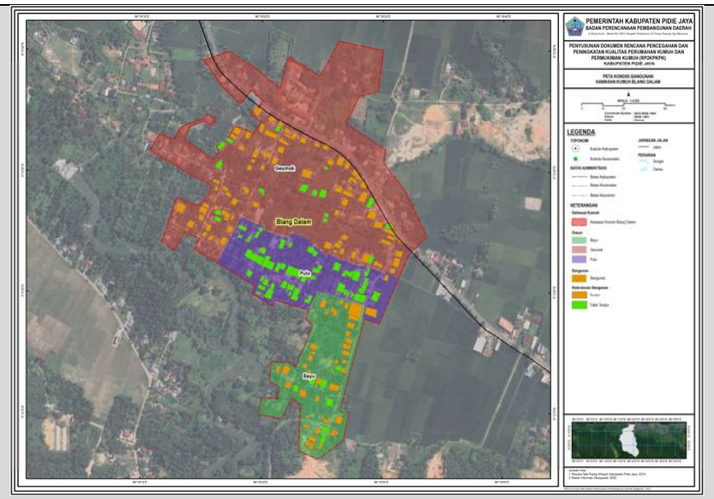
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	90,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	90
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	90

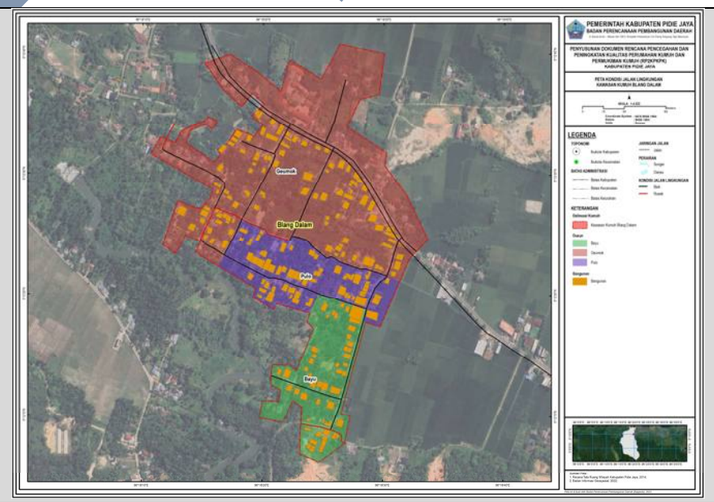
16. Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua



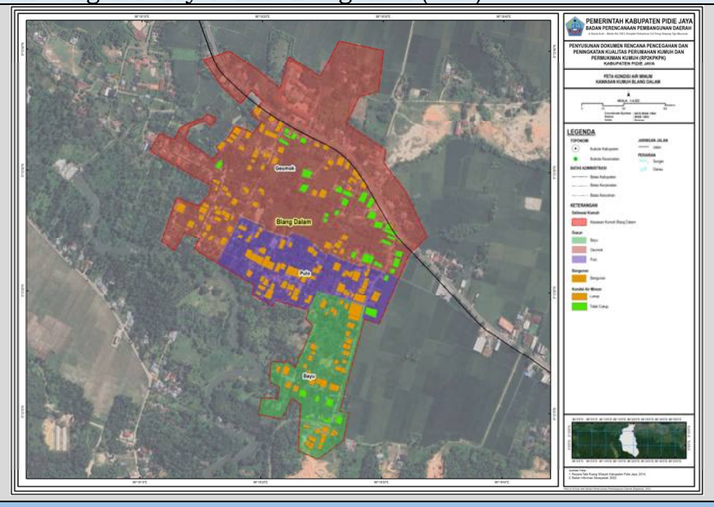
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Blang Dalam	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Blang Dalam	1	Blang Dalam	Tgk. Di Bayu	5,84	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Blang Dalam	Dusun Tgk. Di Geumok	22,64	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Blang Dalam	Dusun Tgk. Di Pulo	5,93	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	34,41					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	220,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	973,00					
Jumlah Kk	292,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

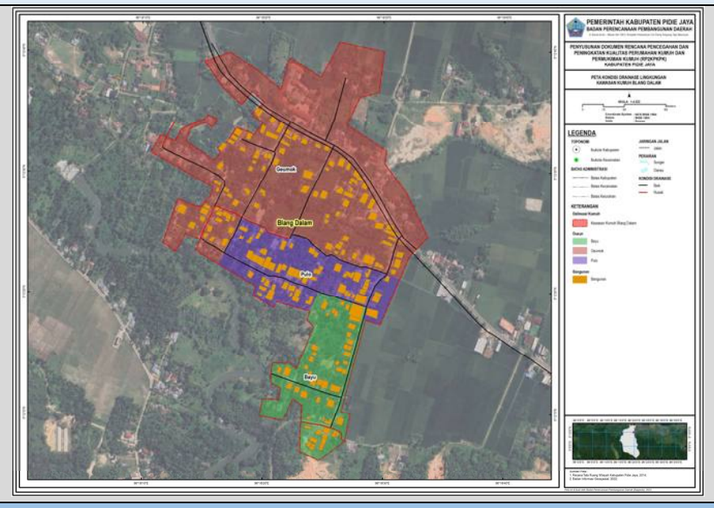




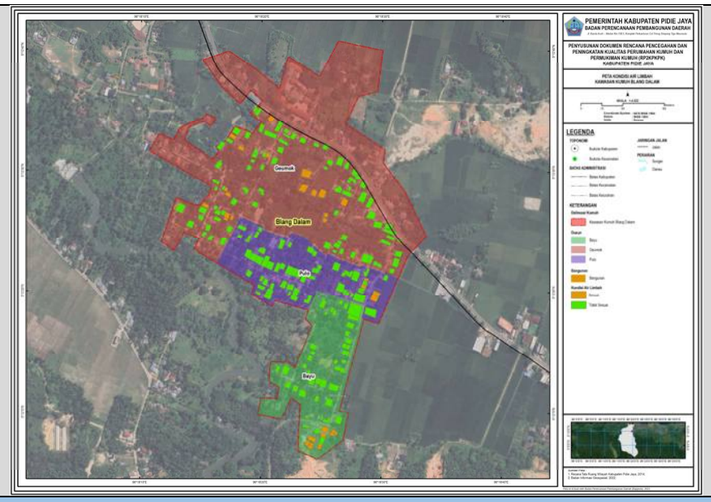


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	220	Panjang Jalan Ideal (m)	2.998,93
Jumlah RTLH (unit)	12	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.998,93
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	21	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	261,83
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	12		

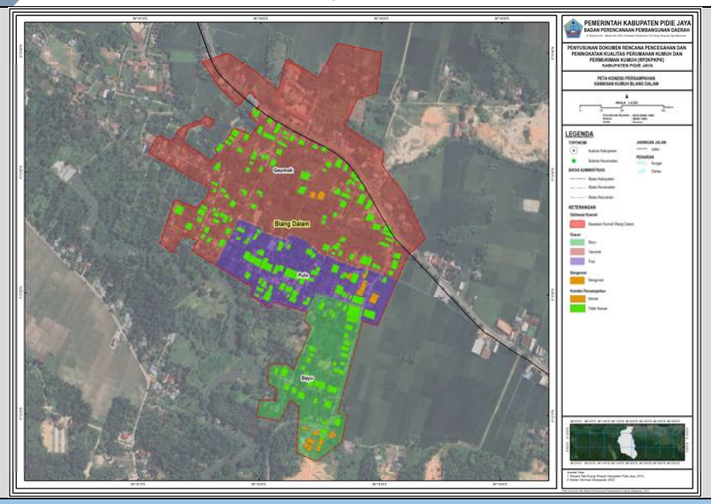




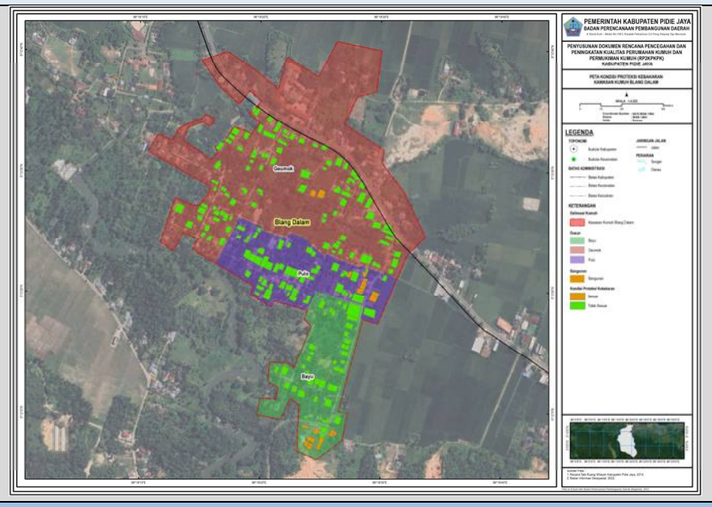
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	292	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	66	Panjang Drainase Ideal (m)	2998,93
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	57	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2998,93
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	292,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	1
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	1

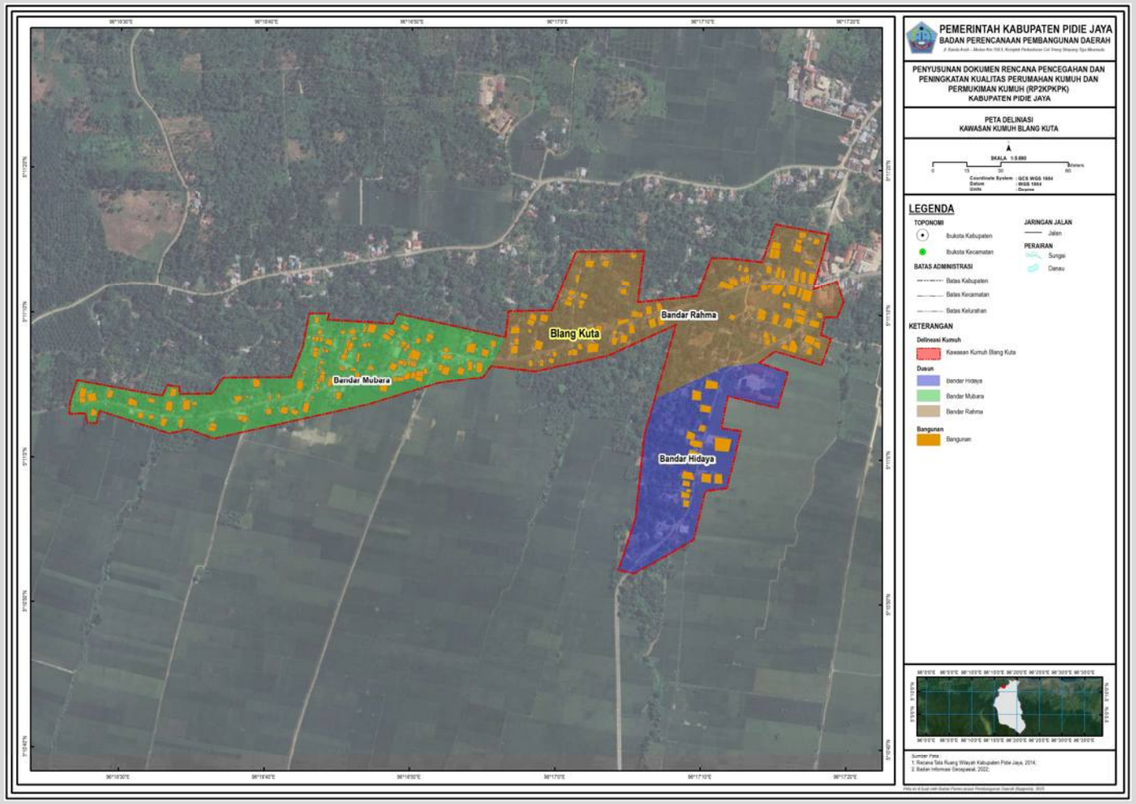


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	292,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	292
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	262



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	220,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	220
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	220

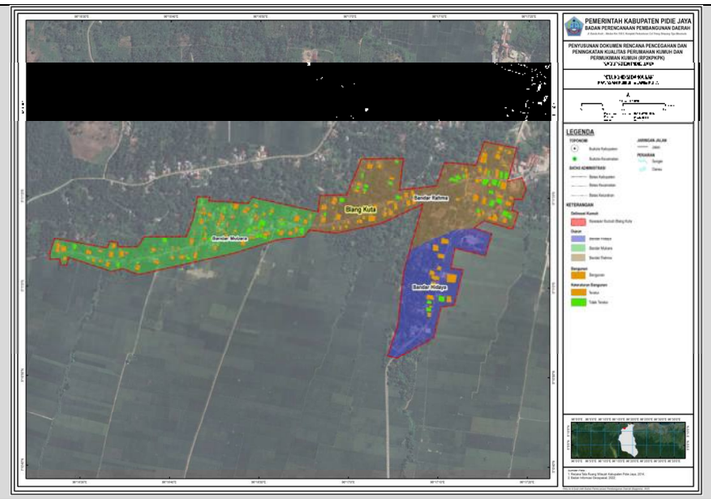
17. Profil Permukiman Kumuh Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua

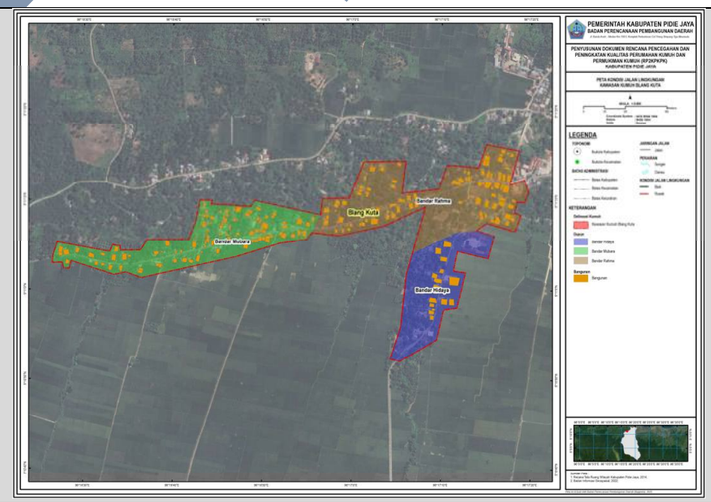


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Blang Kuta	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Blang Kuta	1	Blang Kuta	Bandar Hidayah	7,08	Kumuh Sedang
Kecamatan	Bandar Dua	2	Blang Kuta	Dusun Bandar Mubarak	10,72	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Blang Kuta	Bandar Rahmah	13,58	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	31,38					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	208,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	852,00					
Jumlah Kk	246,00					

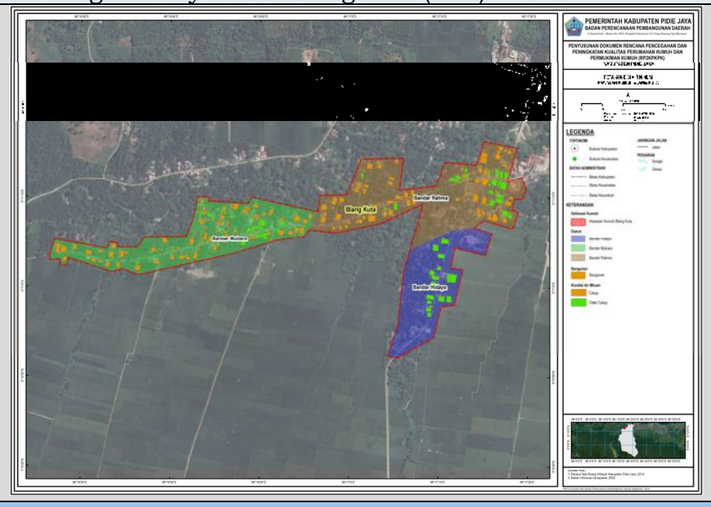
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

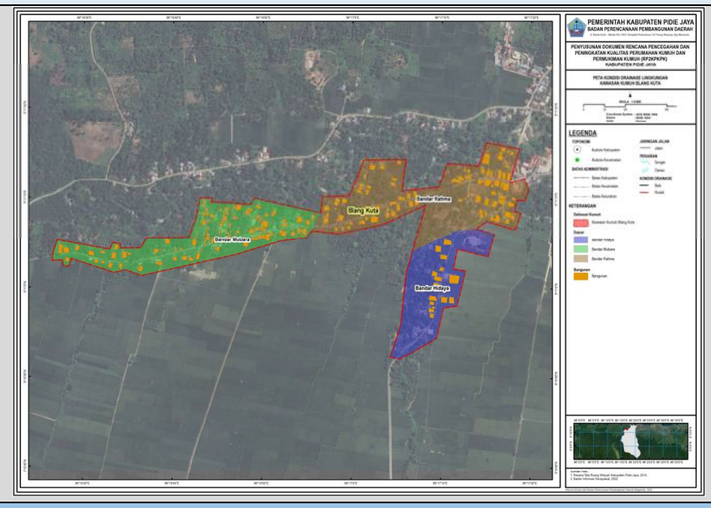




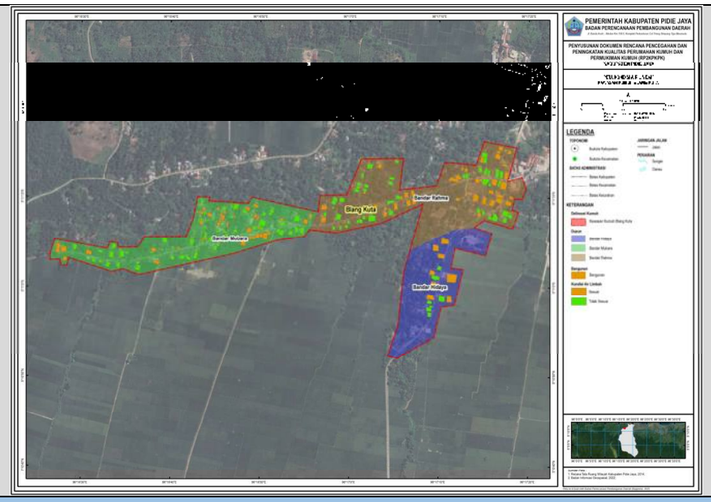


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	208	Panjang Jalan Ideal (m)	3.142,51
Jumlah RTLH (unit)	68	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.142,51
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	139	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	710,79
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	68		

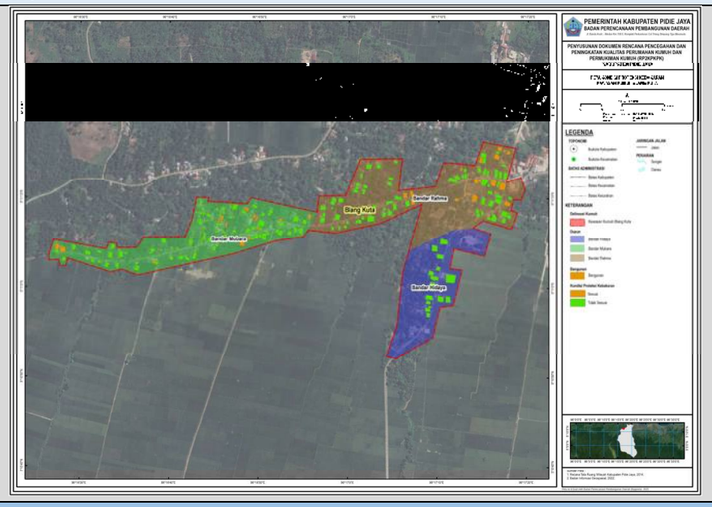




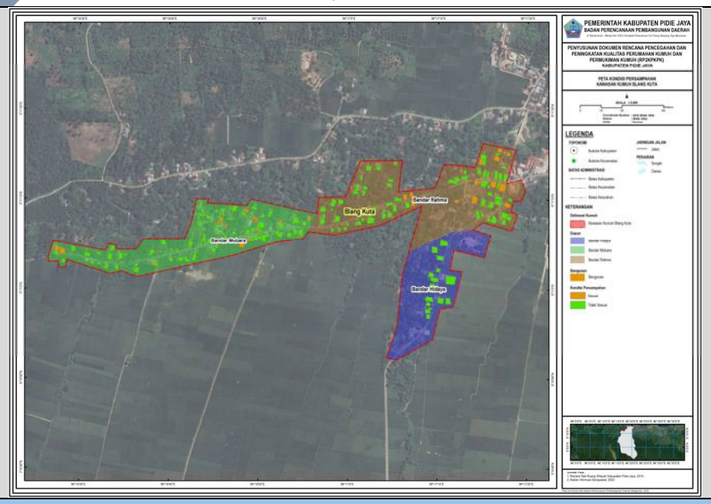
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	246	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	84	Panjang Drainase Ideal (m)	3142,51
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	160	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	3142,51
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	246,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	95
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	95

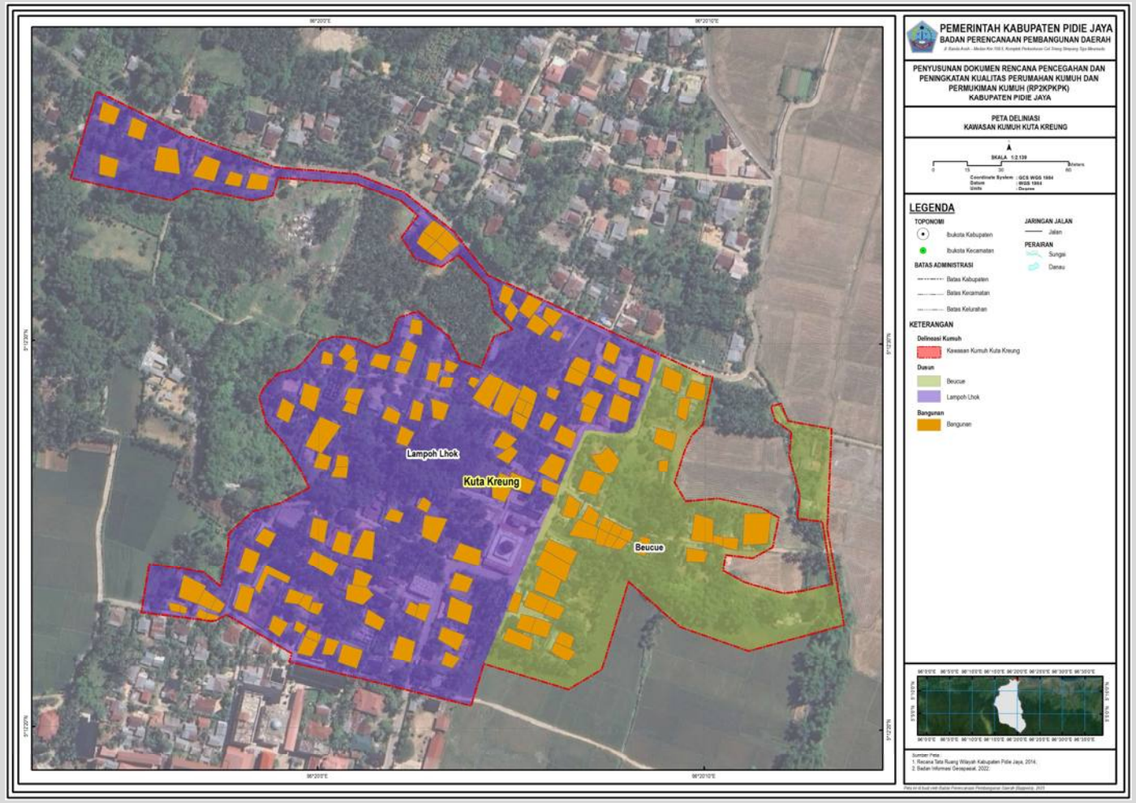


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	208,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	208
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	208



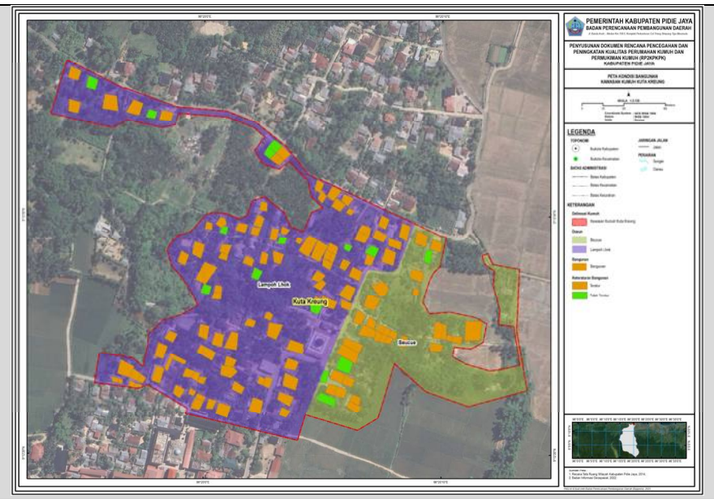
KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	246,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	246
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	225

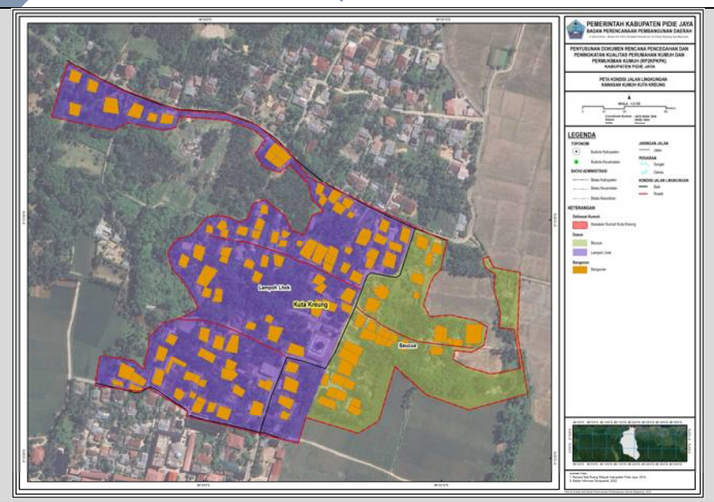
18. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua*



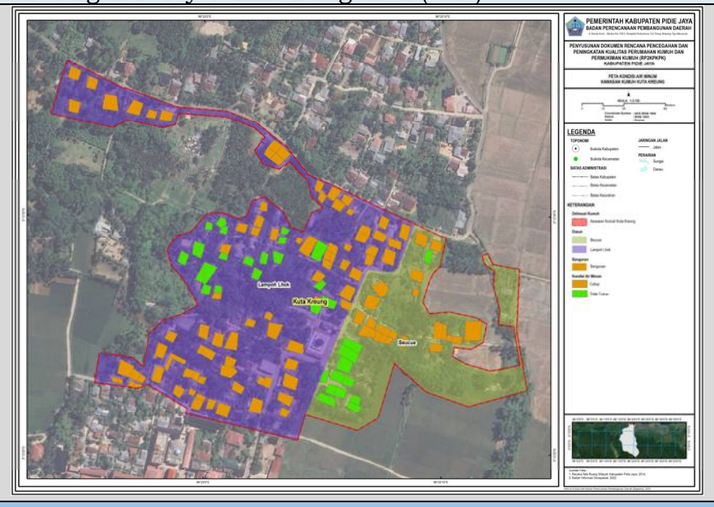
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kuta Kreung	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kuta Kreung	1	Kuta Kreung	Lampoh Lhok	7,98	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Kuta Kreung	Beuce	3,46	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	11,44					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	84,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	436,00					
Jumlah Kk	111,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

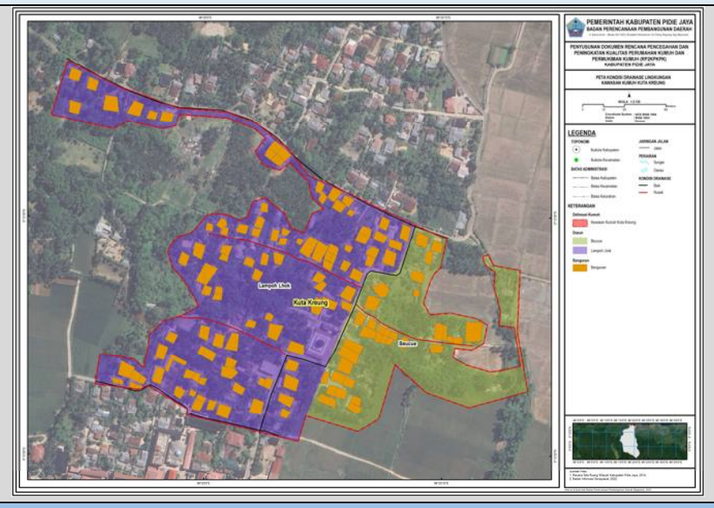




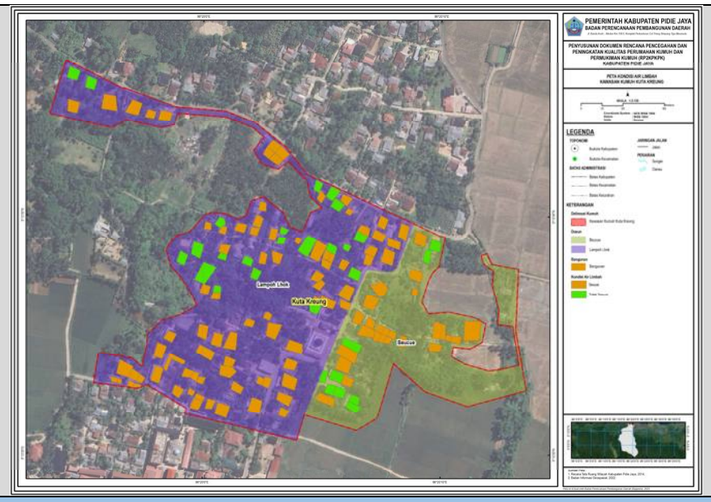


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	84	Panjang Jalan Ideal (m)	1.336,67
Jumlah RTLH (unit)	1	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.336,67
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	84	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	530,02
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	1		

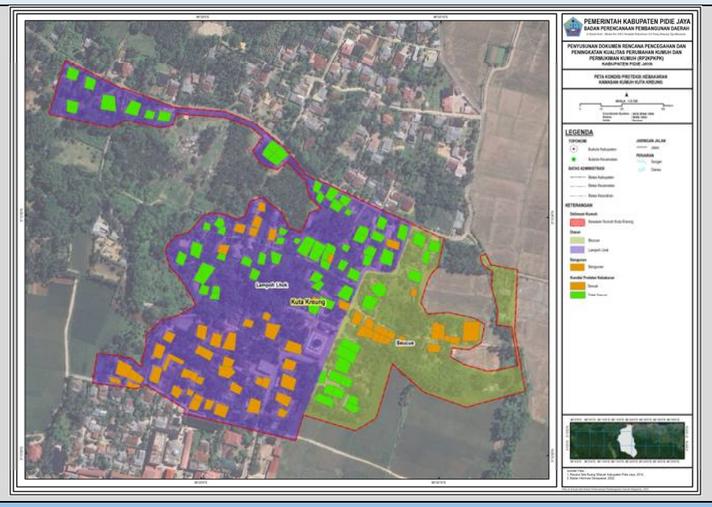




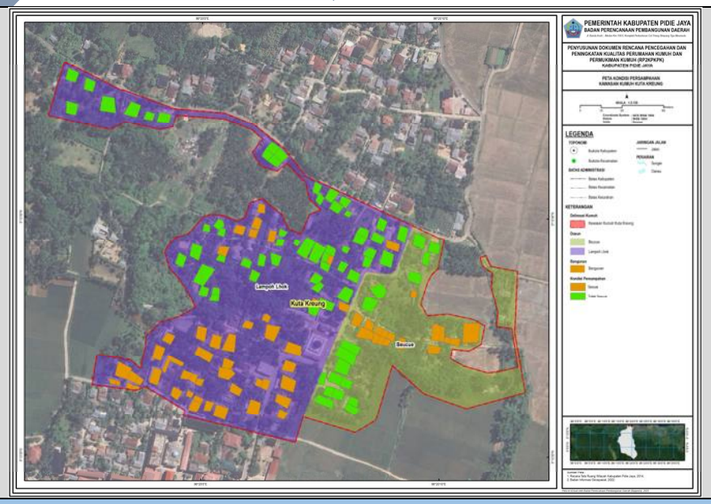
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	111	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	23	Panjang Drainase Ideal (m)	1336,67
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	44	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1336,67
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	530,02



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	111,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	38
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	38

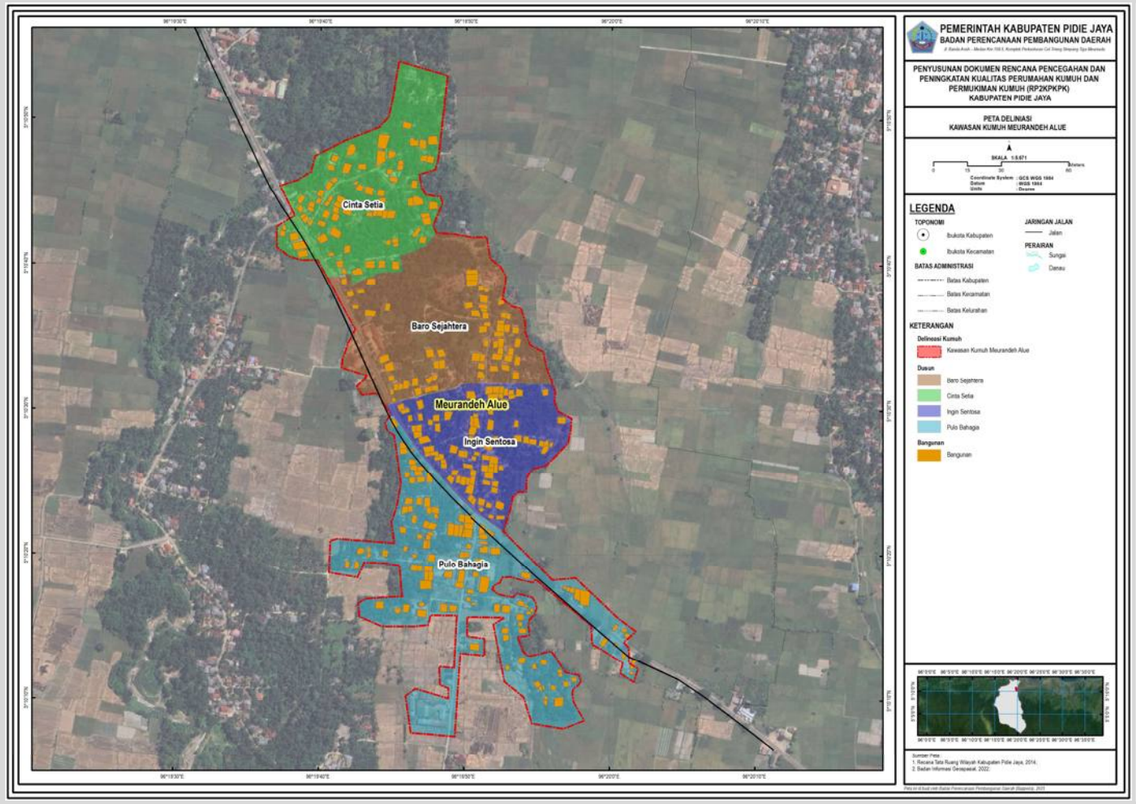


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	84,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	84
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	84



KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	111,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	111
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	105

19. Profil Permukiman Kumuh Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua

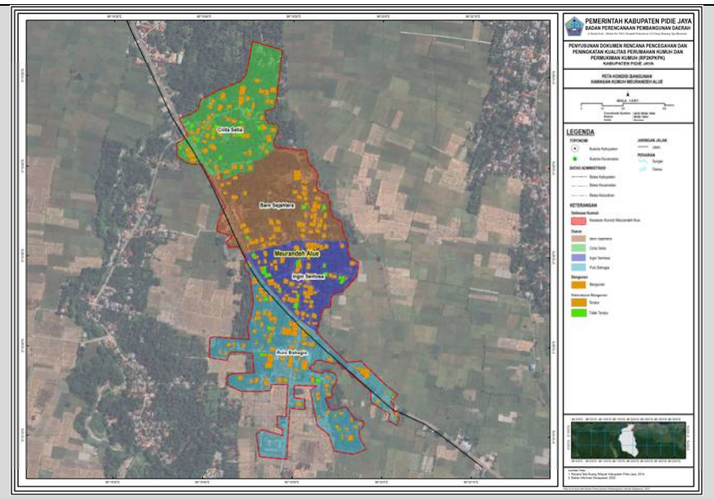


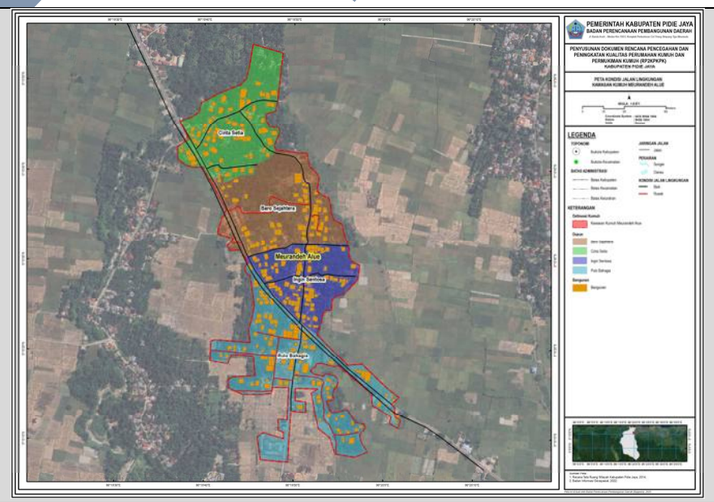
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meurandeh Alue	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meurandeh Alue	1	Meurandeh Alue	Dusun Cinta Setia	9,67	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Meurandeh Alue	Dusun Baro Sejahtera	10,78	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Meurandeh Alue	Ingin Sentosa	7,05	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Meurandeh Alue	Dusun Pulo Bahagia	13,74	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	41,24					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	338,00					
Jumlah Penduduk	1214,00					
Jumlah Kk	406,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

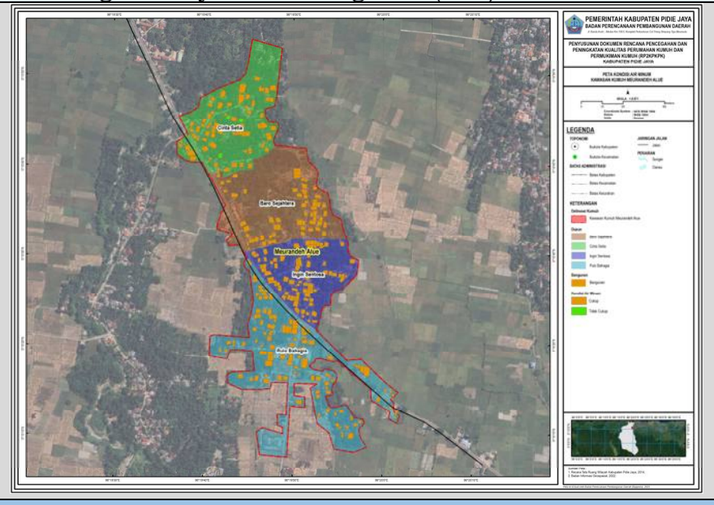


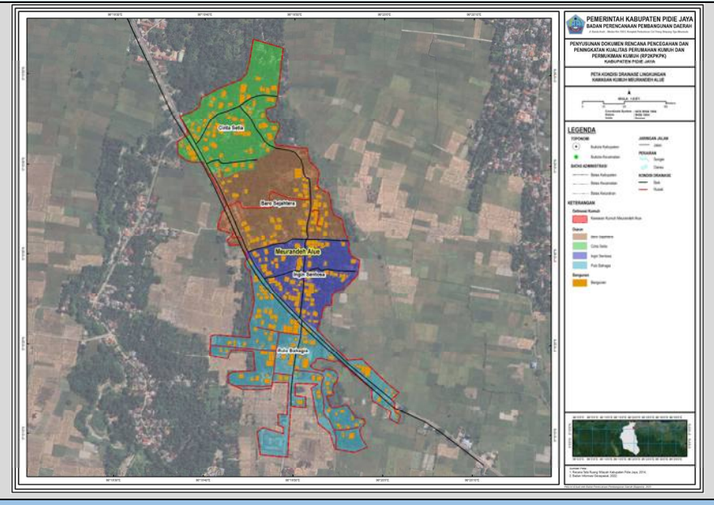


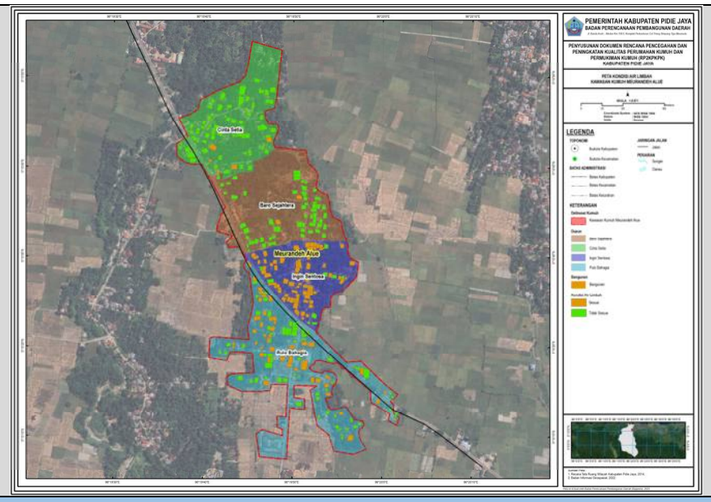


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	338	Panjang Jalan Ideal (m)	5.403,51
Jumlah RTLH (unit)	54	Panjang Jalan Eksisting (m)	5.403,51
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	11	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.745,97
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	54		

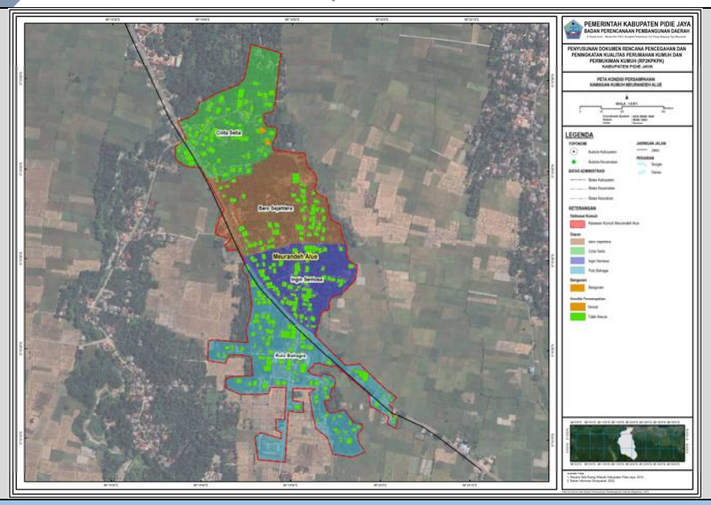




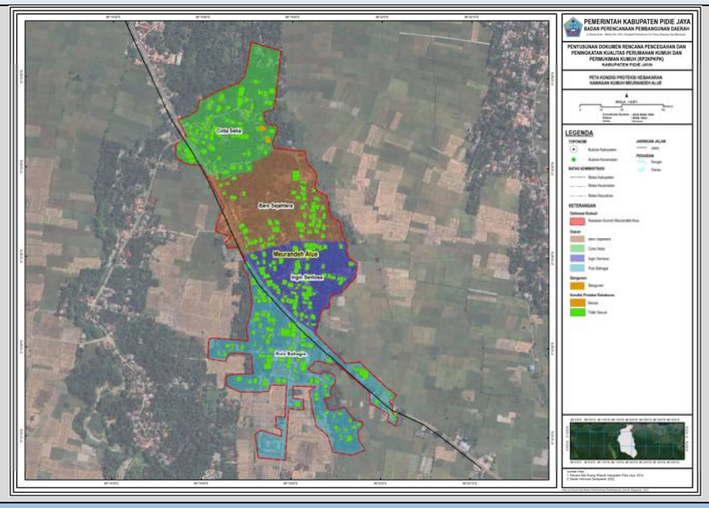
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	406	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	150	Panjang Drainase Ideal (m)	5403,51
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	3	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	5403,51
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1745,97



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	406,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	137
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	137

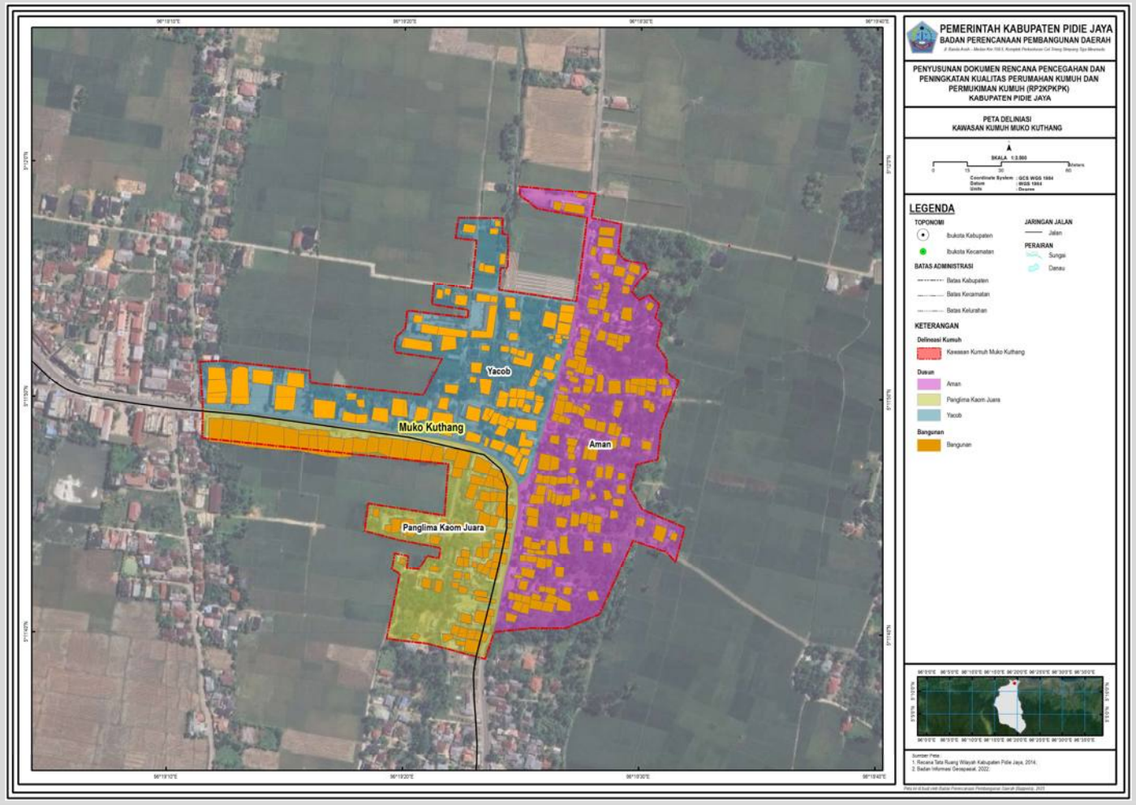


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	406,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	406
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	404



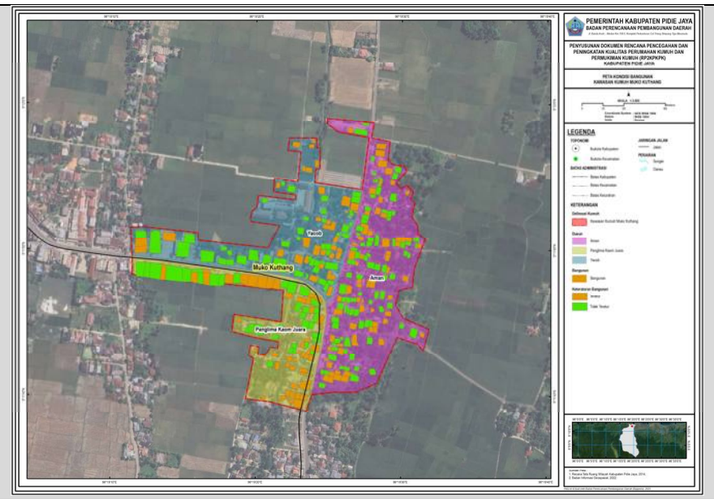
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	338,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	338
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	338

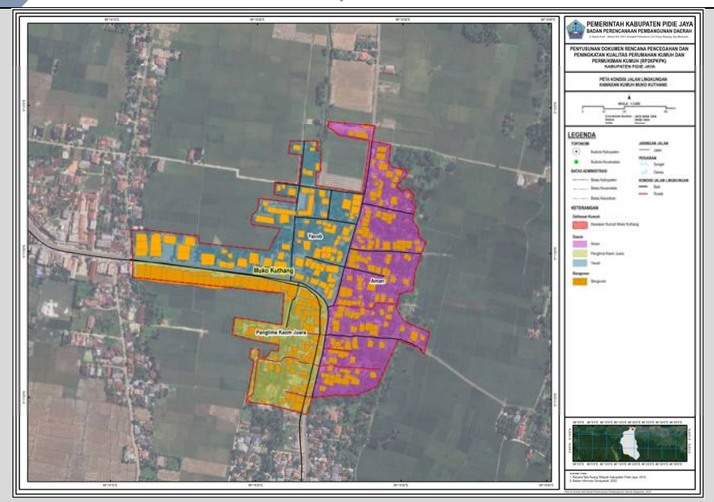
20. Profil Permukiman Kumuh Gampong Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua



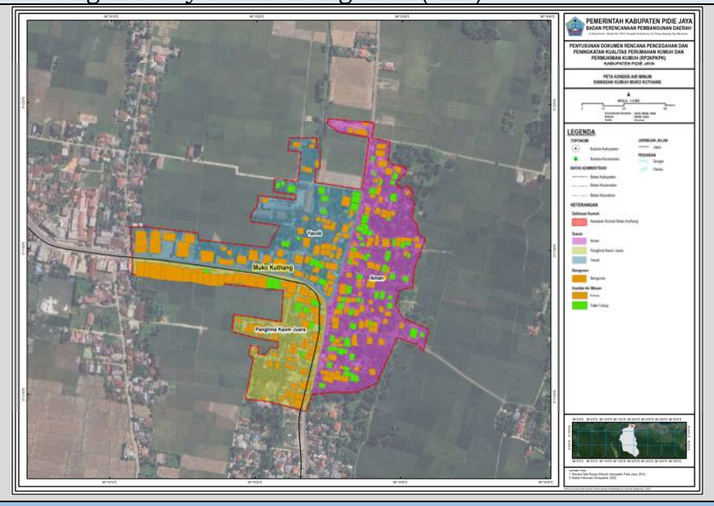
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Muko Kuthang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Muko Kuthang	1	Muko Kuthang	Dusun Aman	7,28	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Muko Kuthang	H. Yacob	5,88	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Muko Kuthang	Dusun Panglima Kaom Juara	4,41	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	17,56					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	160,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	700,00					
Jumlah Kk	187,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

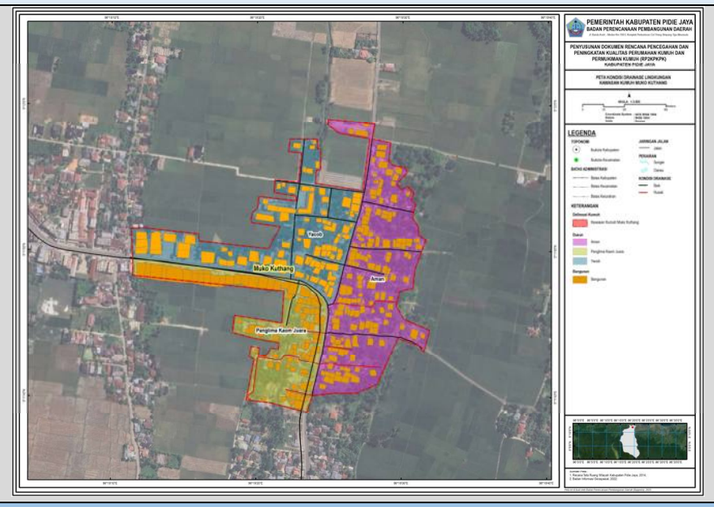




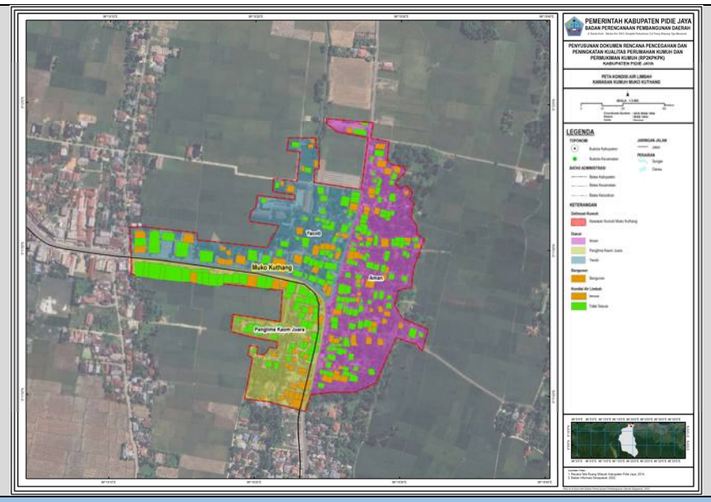


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	160	Panjang Jalan Ideal (m)	2.817,32
Jumlah RTLH (unit)	89	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.817,32
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	76	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	350,50
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	89		

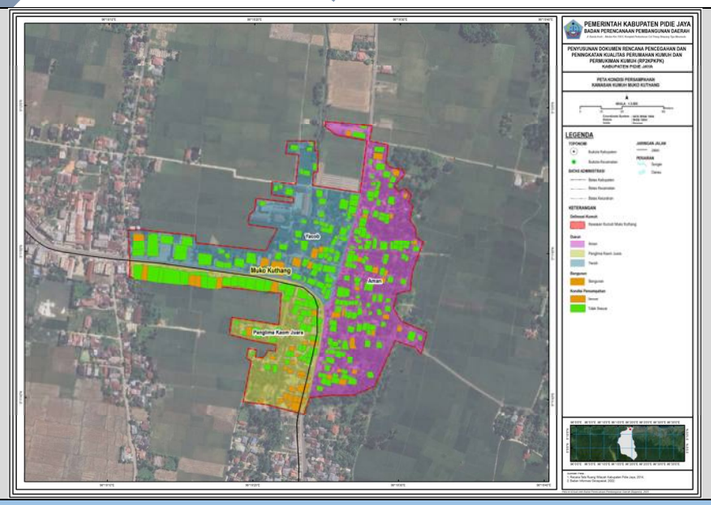




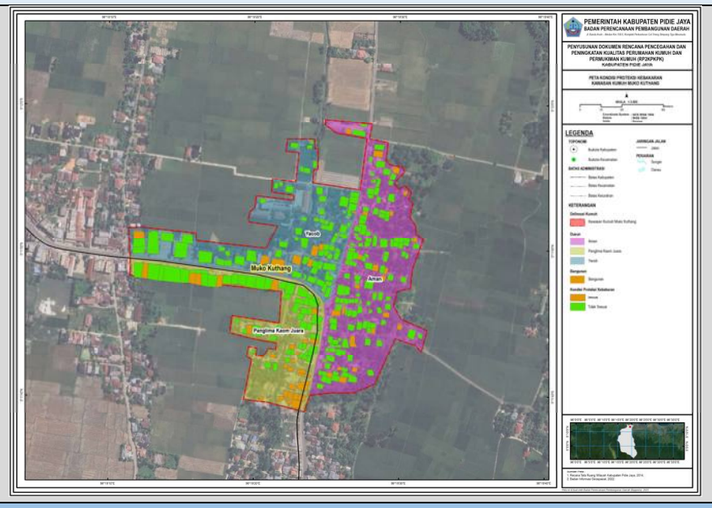
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	187	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	91	Panjang Drainase Ideal (m)	2817,32
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	44	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2817,32
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	350,50



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	187,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	49
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	49

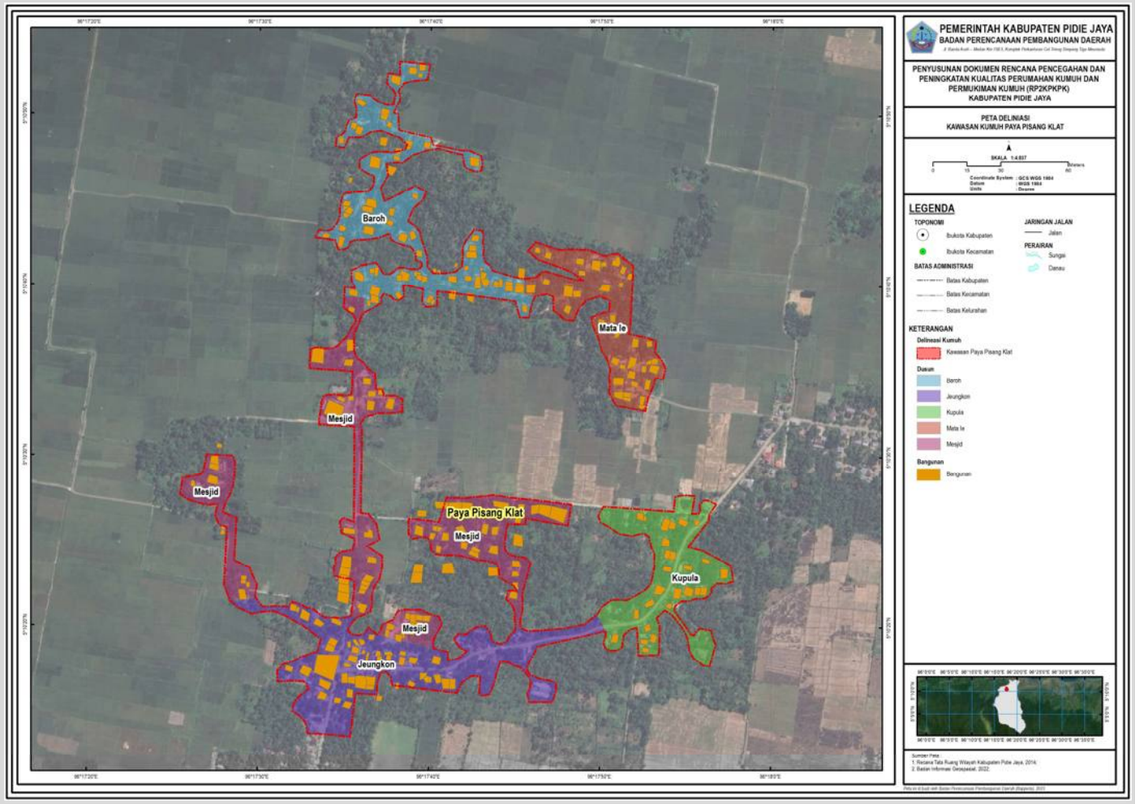


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	187,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	187
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	161



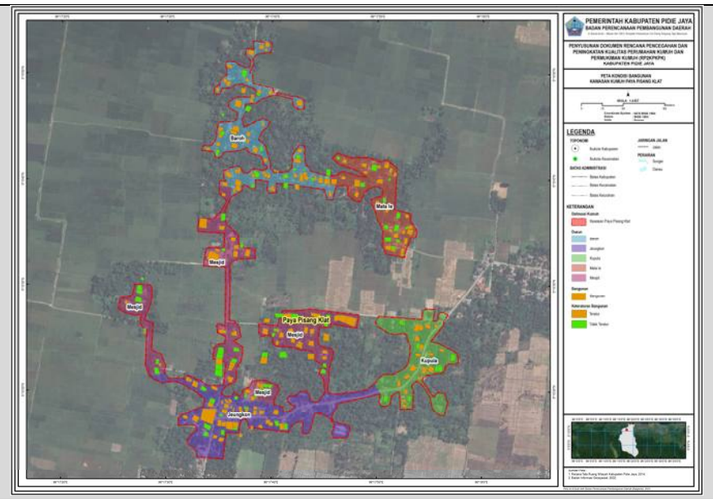
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	160,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	160
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	160

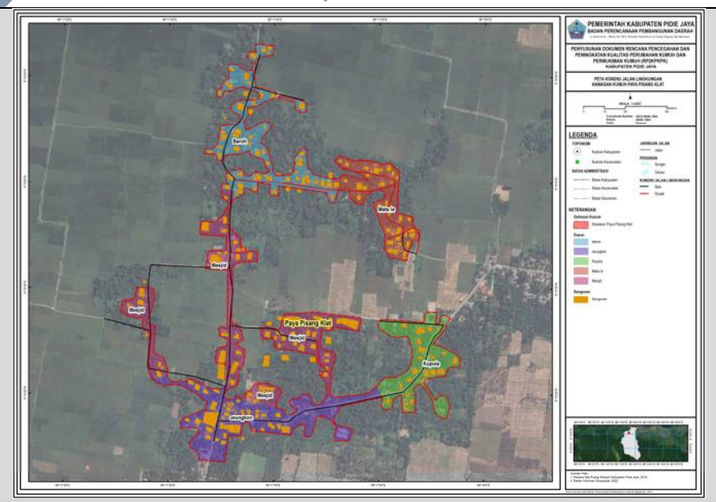
21. Profil Permukiman Kumuh Gampong Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua



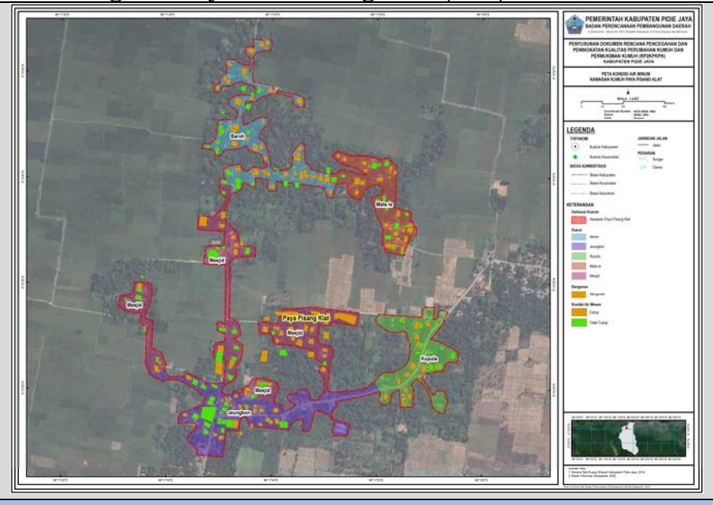
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Alur Sane	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Alur Sane	1		Meunasah Jungkon	5,38	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2		Meunasah Mesjid	6,63	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3		Meunasah Baroh	4,72	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh			Kupula	3,51	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	7,51			Mata Ie	3,09	Kumuh Ringan
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	107,00					
Jumlah Penduduk	479,00					
Jumlah Kk	118,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

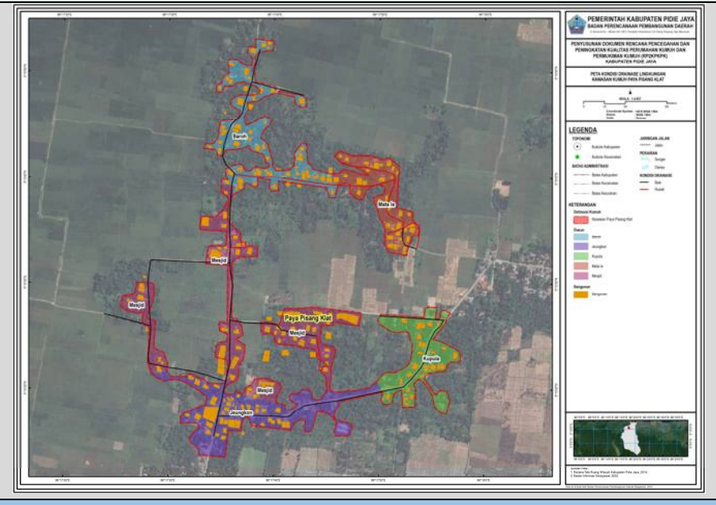




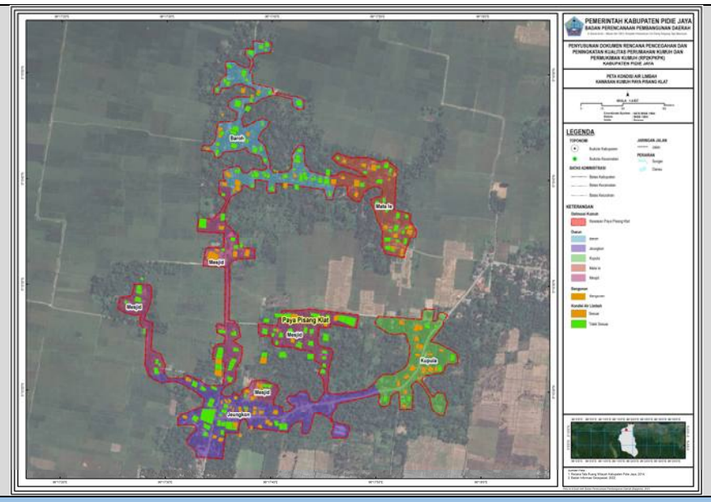


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	251	Panjang Jalan Ideal (m)	3.566,48
Jumlah RTLH (unit)	61	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.566,48
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	84	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.687,41
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	61		

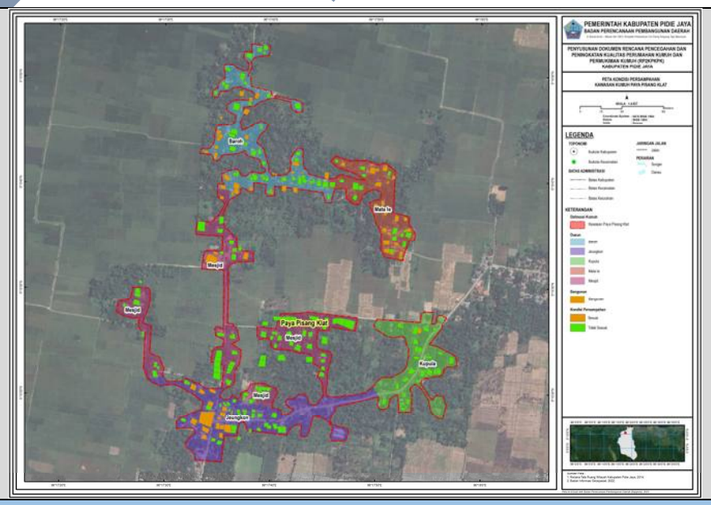




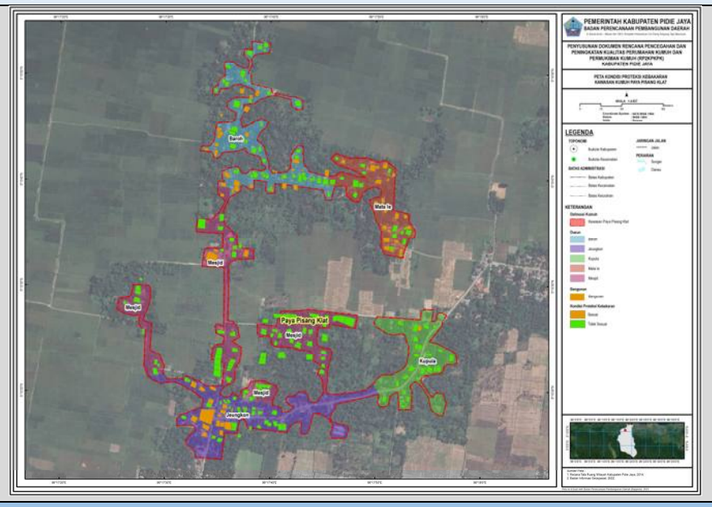
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	294	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	50	Panjang Drainase Ideal (m)	3566,48
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	127	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	3566,48
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	964,07



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	294,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	130
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	130

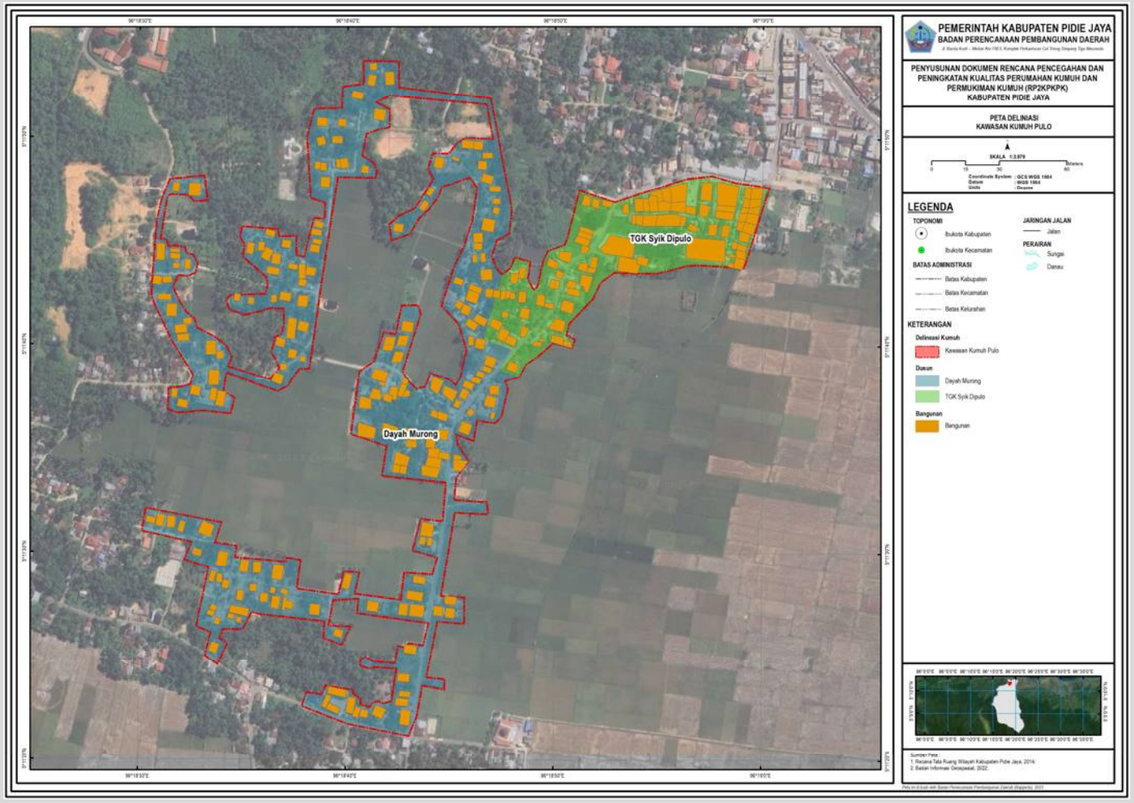


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	294,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	294
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	203



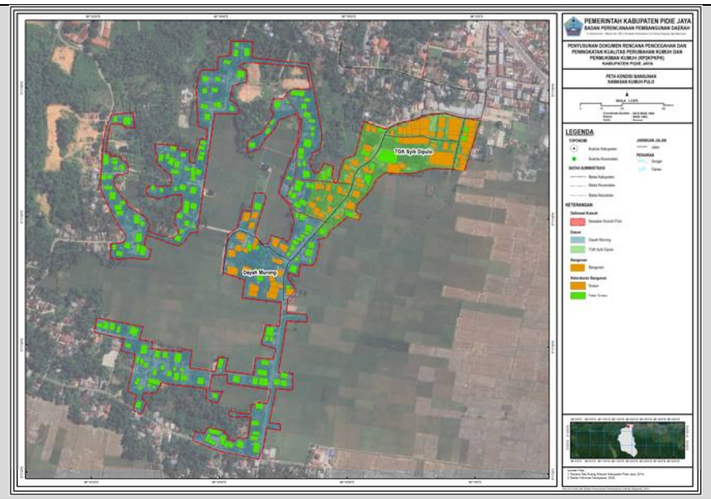
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	251,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	251
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	251

22. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua*

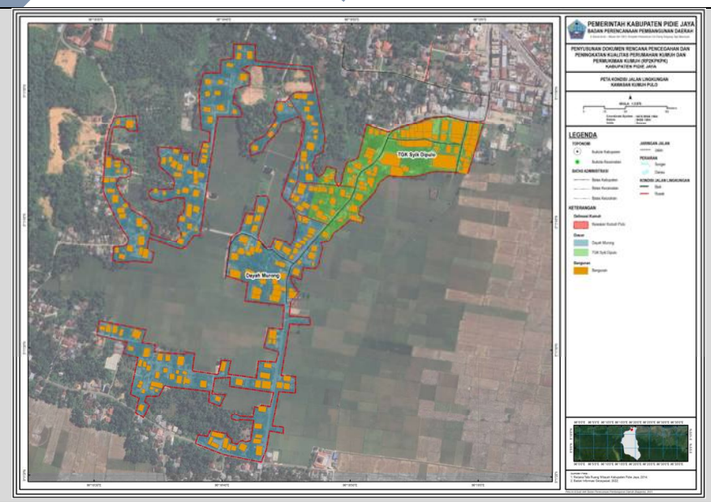


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Pulo	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Pulo	1	Pulo	Dayah Murong	15,81	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Pulo	Tgk Chik Dipulo	5,18	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	20,99					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	186,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	846,00					
Jumlah Kk	250,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

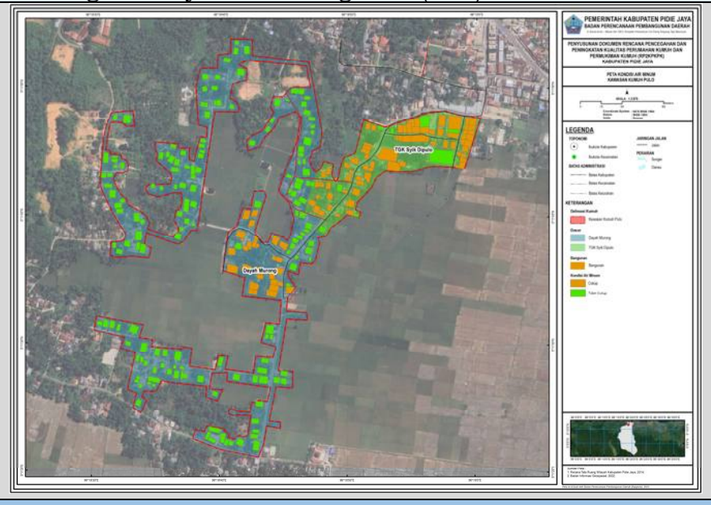




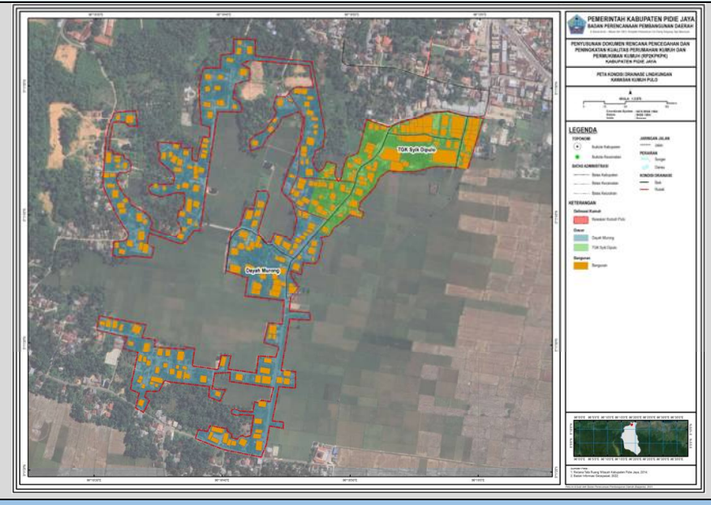
BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	186
Jumlah RTLH (unit)	13
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	51
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	13



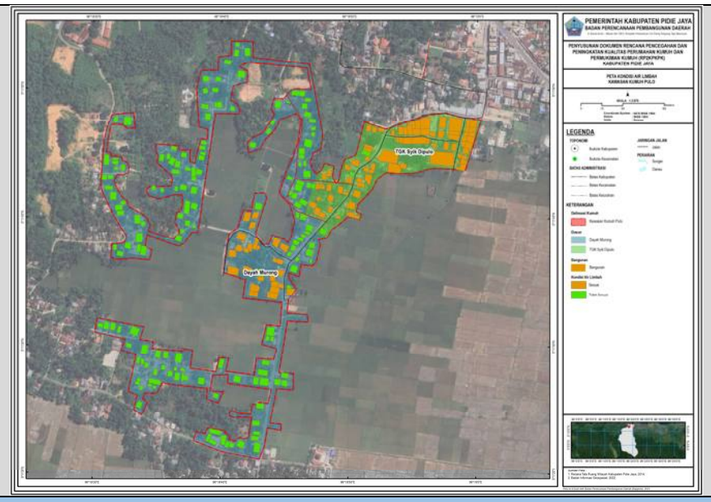
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	1.578,03
Panjang Jalan Eksisting (m)	1.578,03
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	514,66

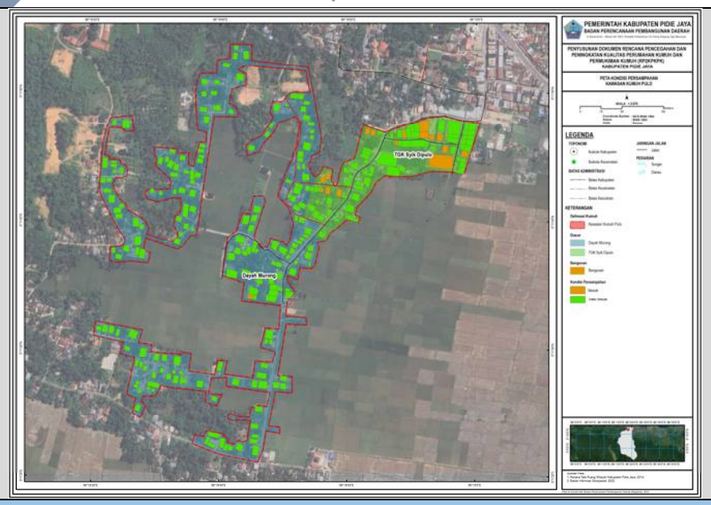


KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	250
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	22
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	19



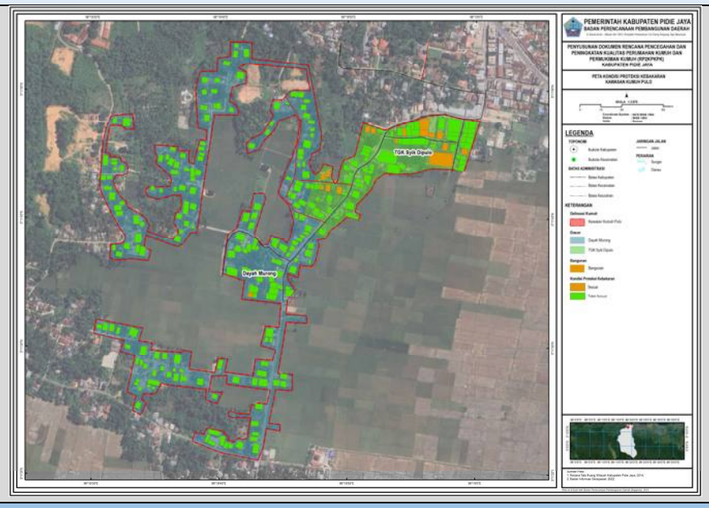
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
Panjang Drainase Ideal (m)	1578,03
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1578,03
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	514,66





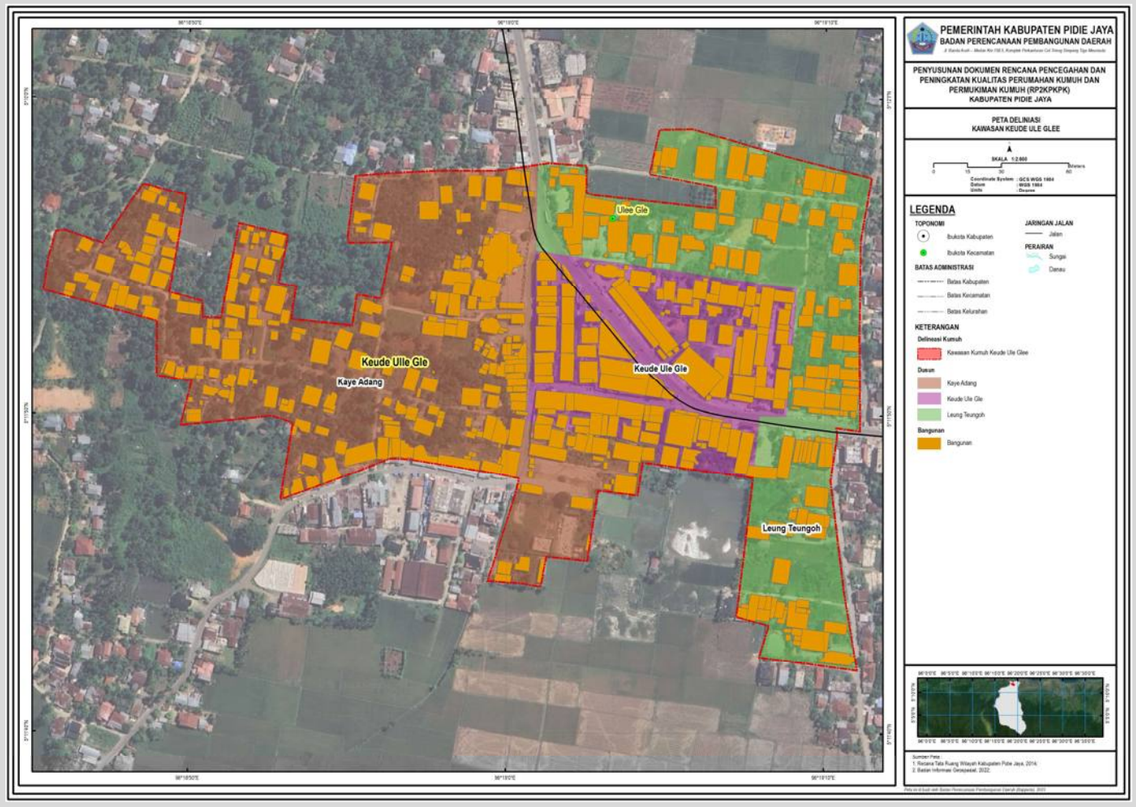
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	250,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	14
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	14

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	250,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	250
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	216



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	186,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	186
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	186

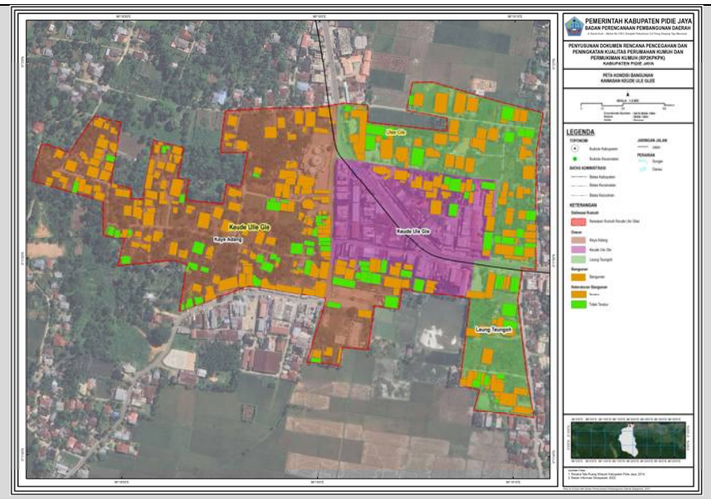
23. Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Ule Glee Kecamatan Bandar Dua



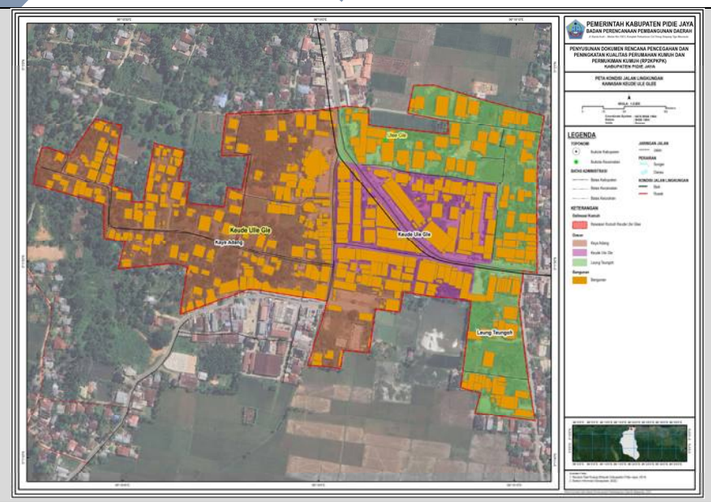
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Ule Glee	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Ule Glee	1	Keude Ule Glee	Lueng Tengoh	7,70	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Keude Ule Glee	Keude	4,60	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Keude Ule Glee	Kayee Adang	11,36	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	23,66					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	241,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1055,00					
Jumlah Kk	323,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						



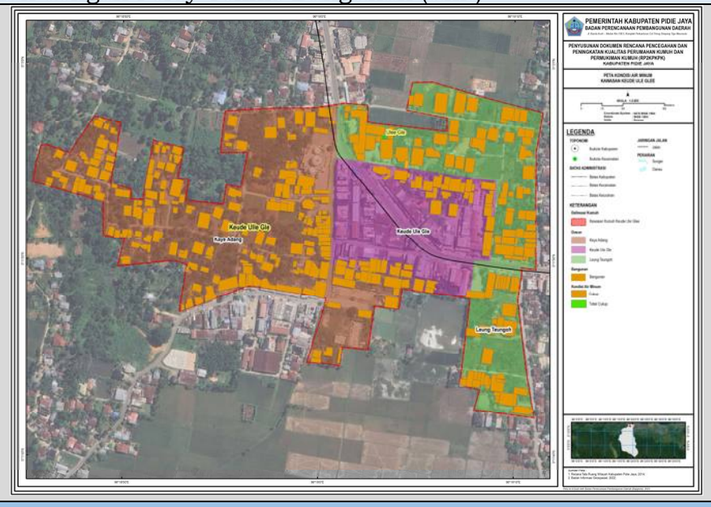


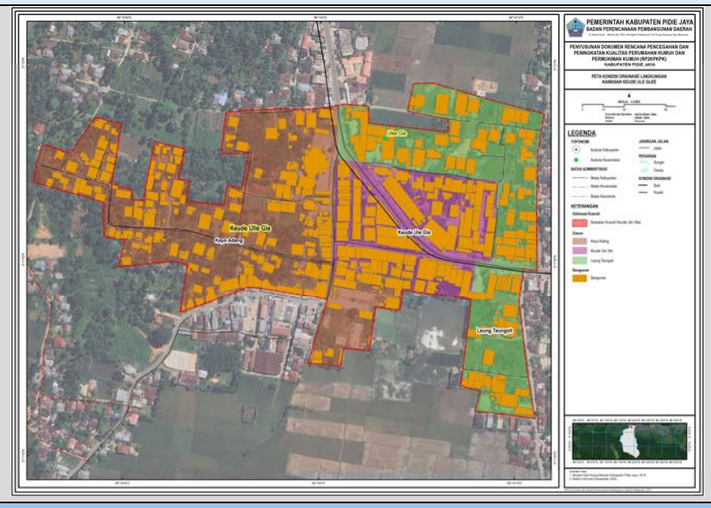
BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	241
Jumlah RTLH (unit)	28
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	104
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	28



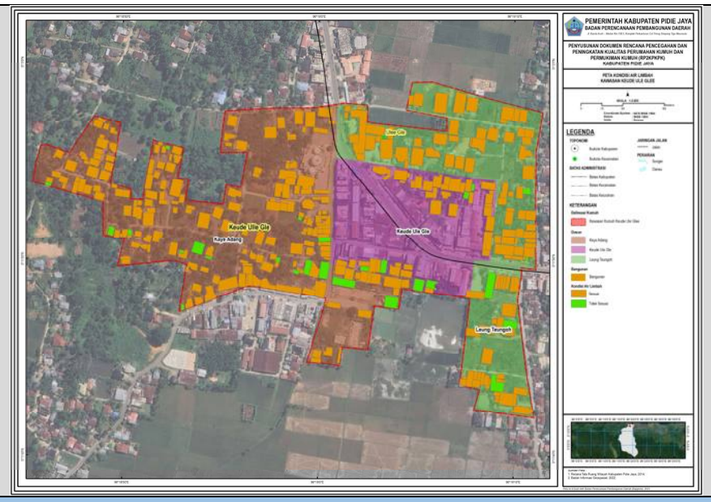
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	5.200,00
Panjang Jalan Eksisting (m)	3.200,00
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	2.000,00
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2.990,00



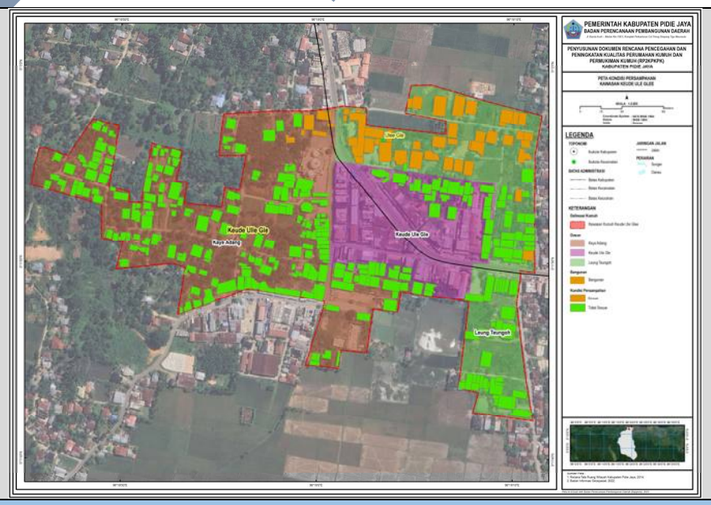
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	323
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	146
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	1



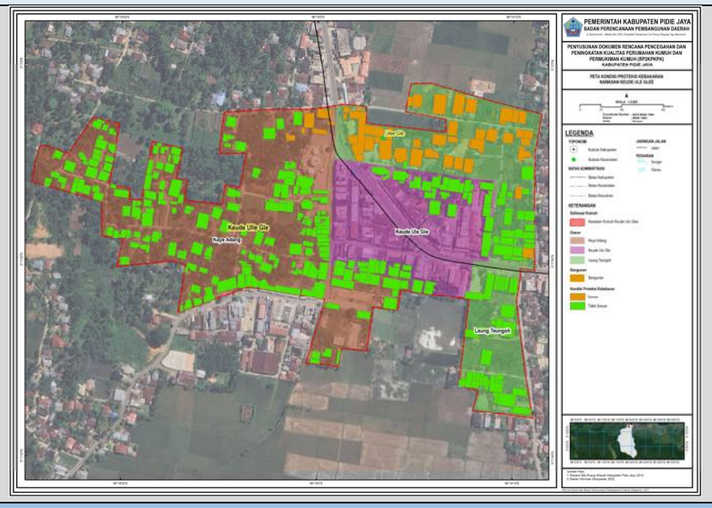
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
Panjang Drainase Ideal (m)	4110,00
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2100,00
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	2010,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1250,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	323,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	14
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	14

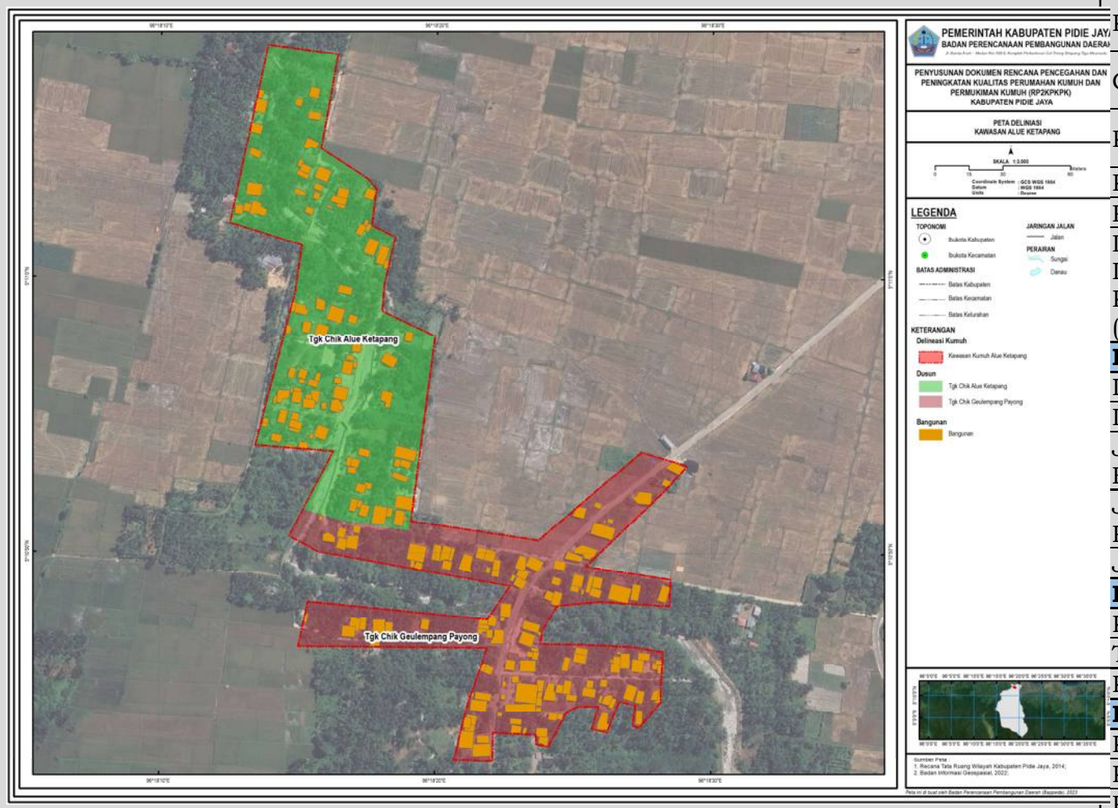


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	323,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	260
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	257



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	241,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	241
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	127

24. Profil Permukiman Kumuh Gampong Alue Ketapang Kecamatan Bandar Baru

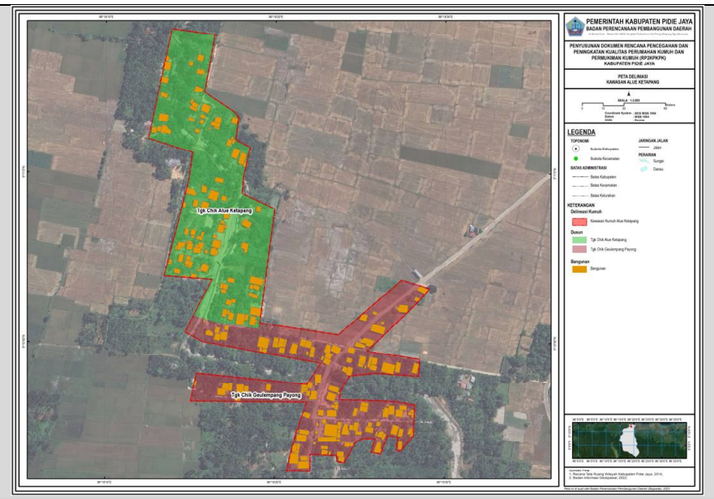


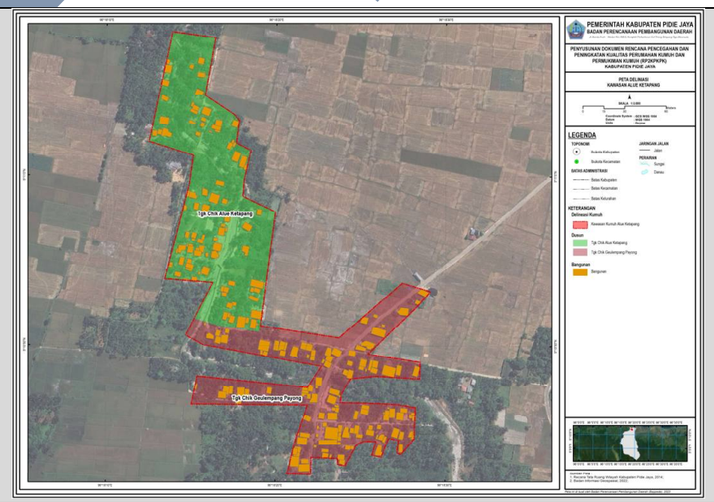
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Alue Keutapang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Alue Keutapang	1	Alue Keutapang	Tgk Chik Geulempang Payong	8,46	Kumuh Ringan
Kecamatan	Bandar Dua	2	Alue Keutapang	Tgk Chik Alue Keutapang	10,62	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	19,08					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	141,00					
Jumlah Penduduk	619,00					
Jumlah Kk	191,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

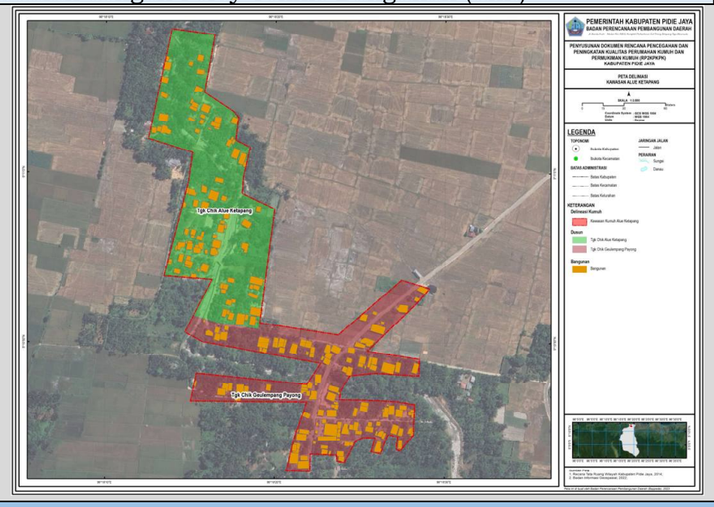


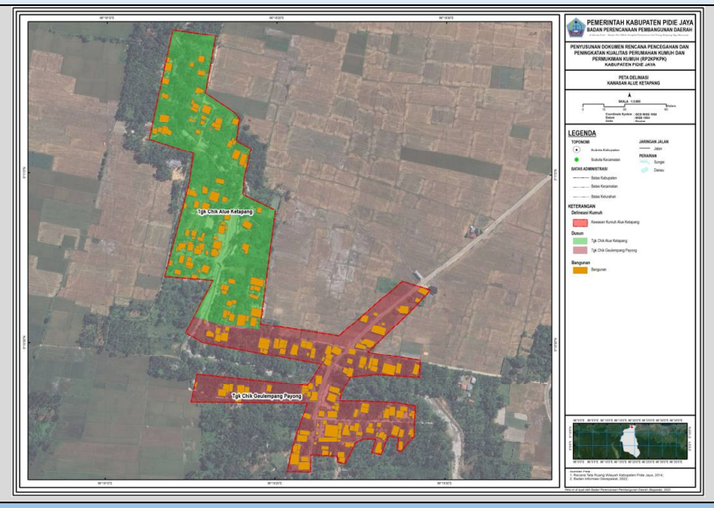


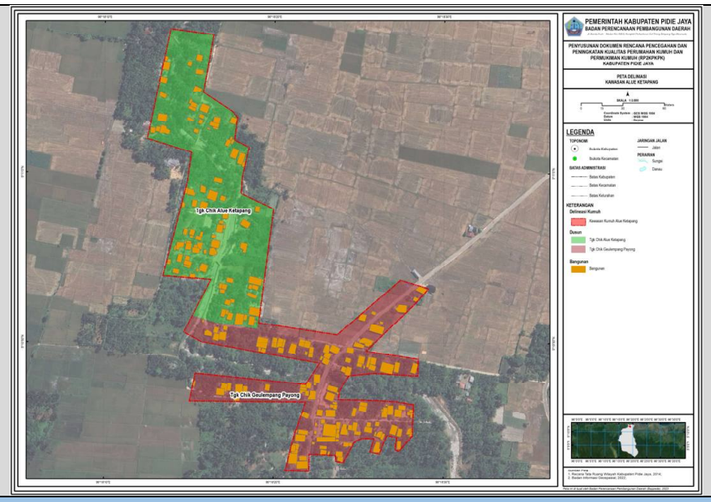


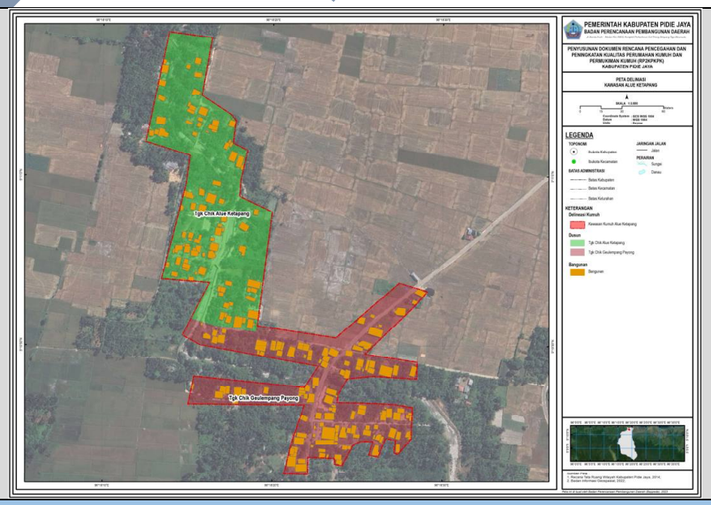
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	141	Panjang Jalan Ideal (m)	5.971,00
Jumlah RTLH (unit)	21	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.241,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	138	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	2.730,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.811,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	21		





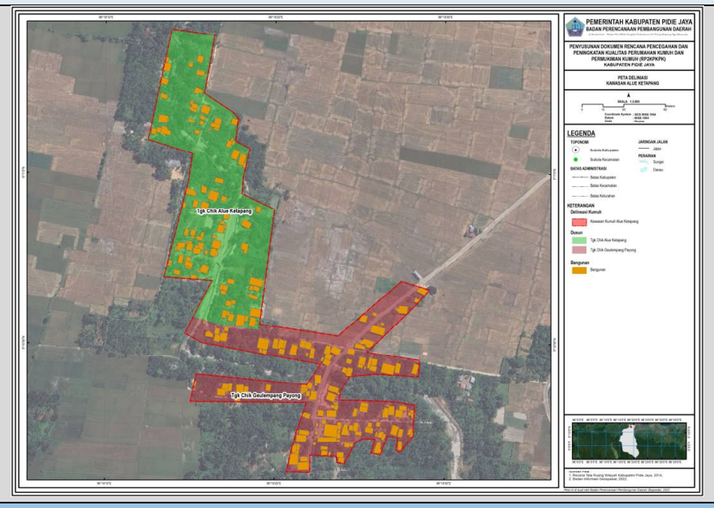
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	191	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	91	Panjang Drainase Ideal (m)	3102,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	46	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1661,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	1441,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	461,00





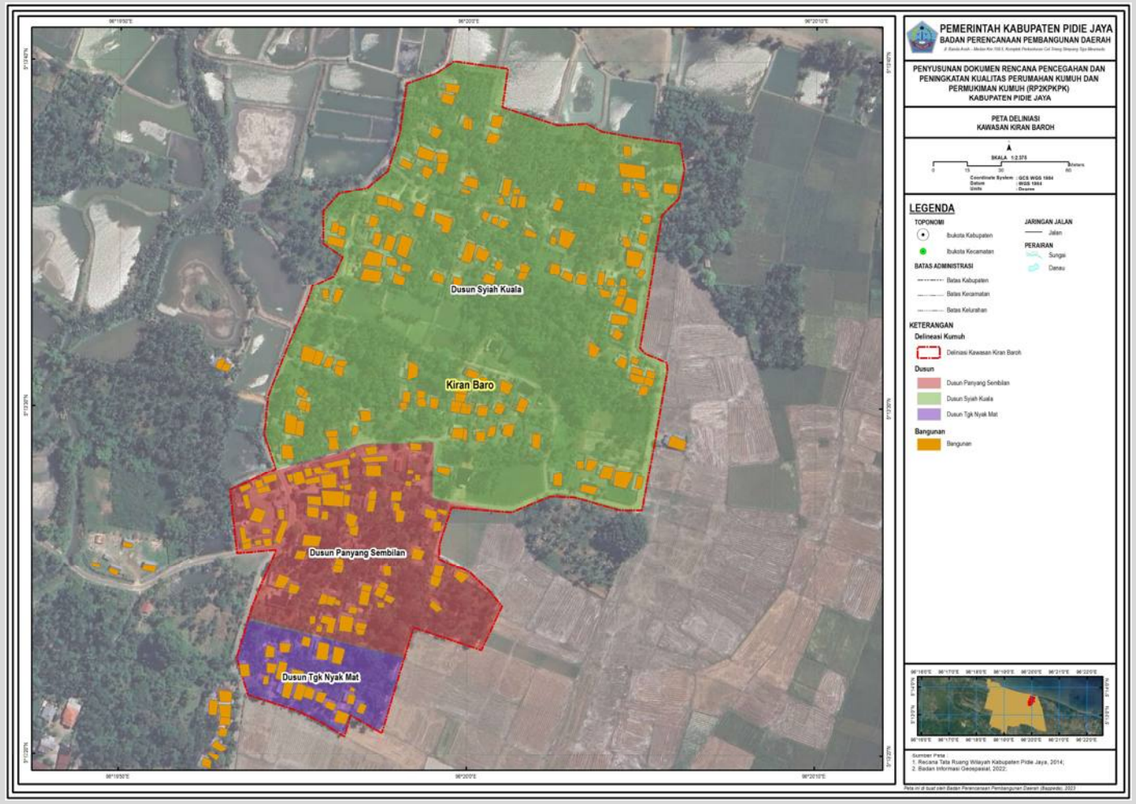
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	191,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	75
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	75

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	191,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	191
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	191



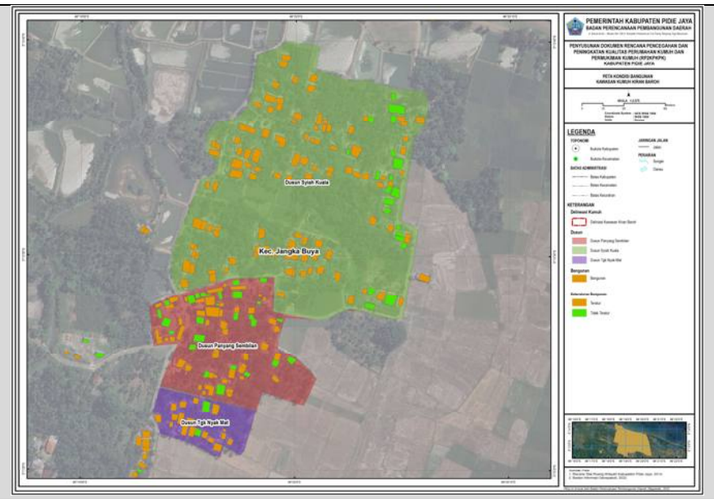
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	141,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	141

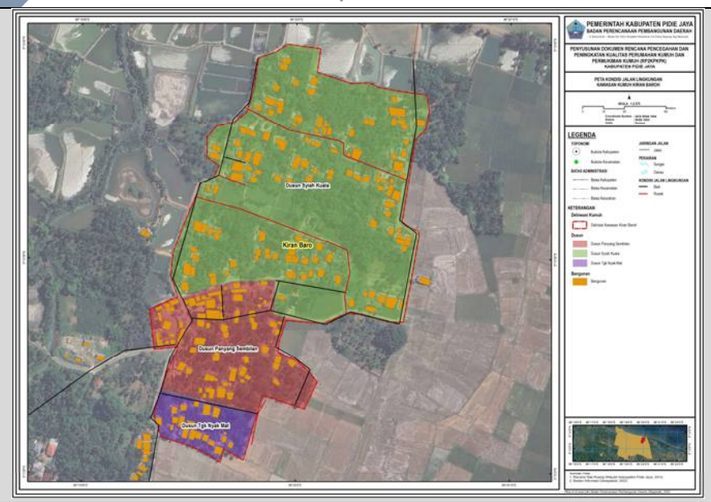
25. Profil Permukiman Kumuh Gampong Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya



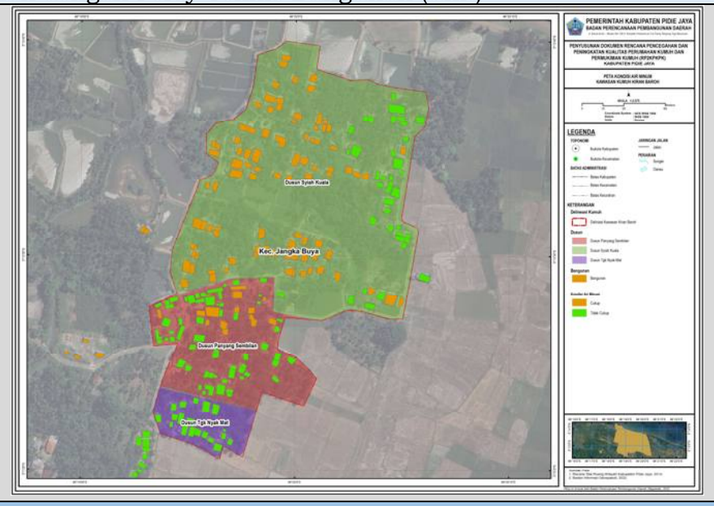
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kiran Baro	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kiran Baro	1	Kiran Baro	Syiah Kuala	10,09	Kumuh Sedang
Kecamatan	Jangka Buya	2	Kiran Baro	Tgk. Nyak Ahmat	0,98	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Kiran Baro	Tgk.Panjang Sembilan	3,05	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	14,12					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	145,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	659,00					
Jumlah Kk	179,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

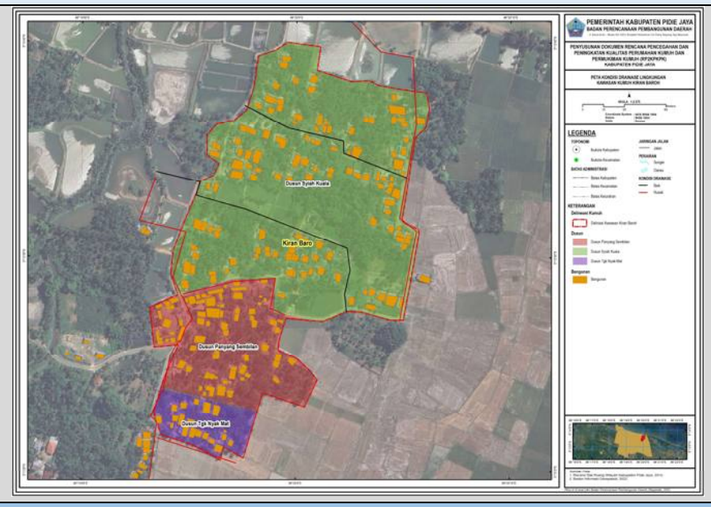




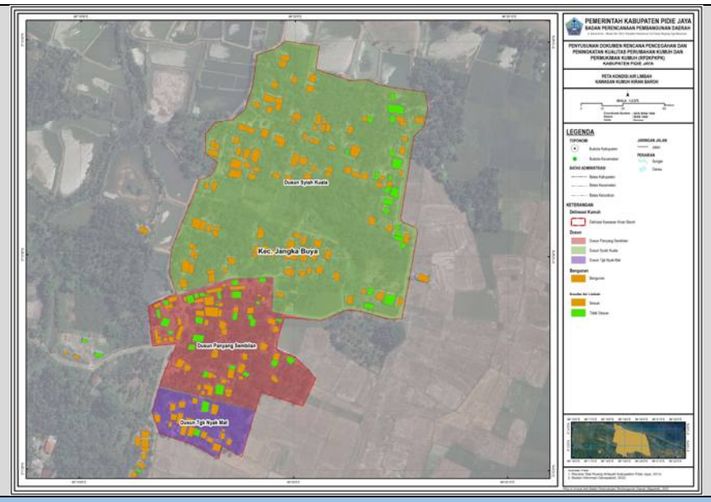


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	145	Panjang Jalan Ideal (m)	2.082,15
Jumlah RTLH (unit)	20	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.082,15
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	105	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	628,04
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	20		

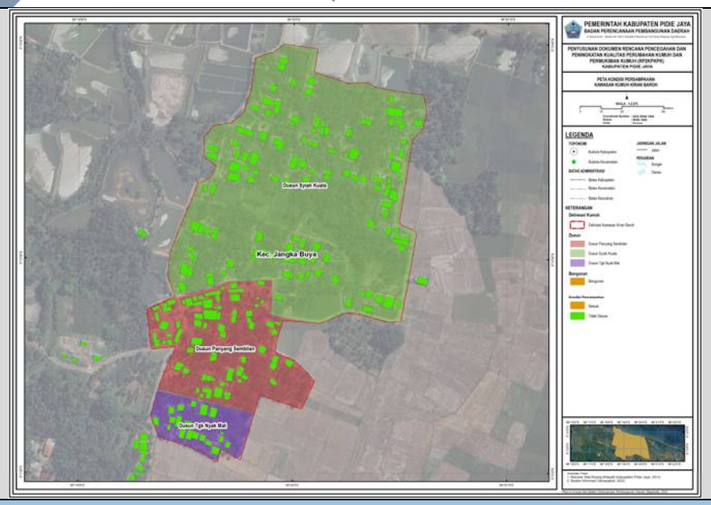




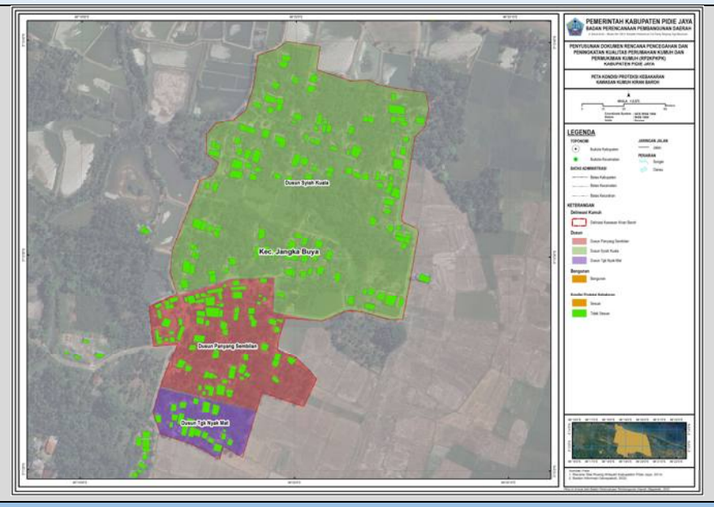
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	179	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	31	Panjang Drainase Ideal (m)	1372,38
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	150	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1372,38
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	782,54



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	86
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	86

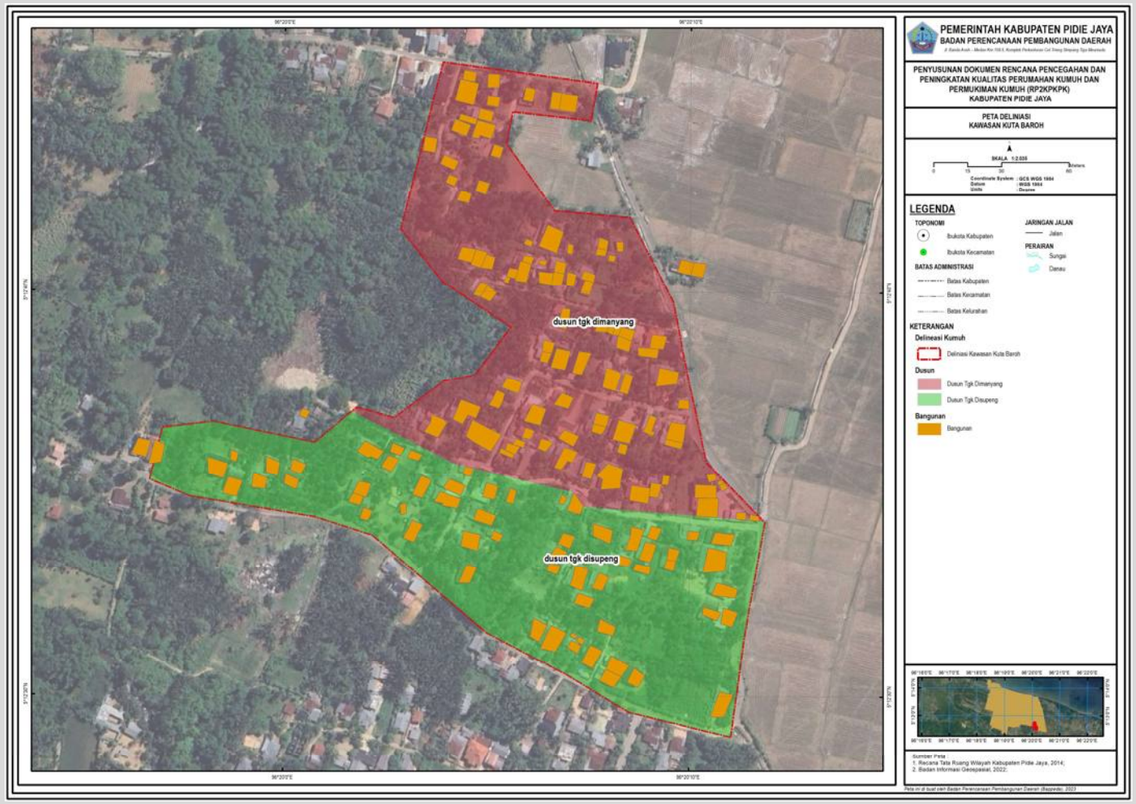


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	179
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	177



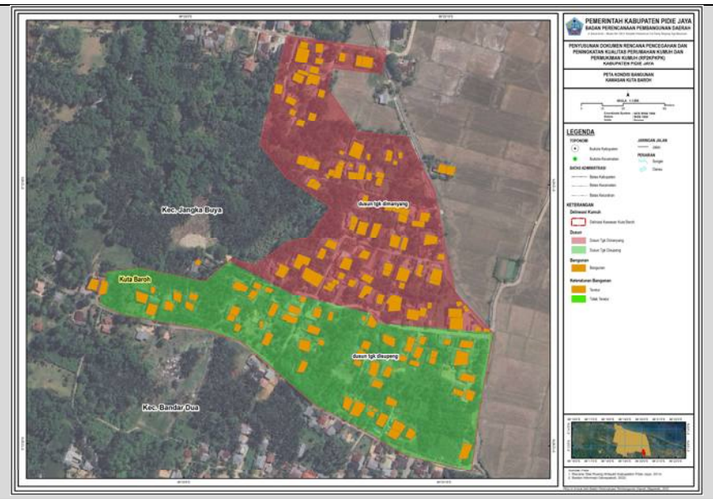
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	145,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	145
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	145

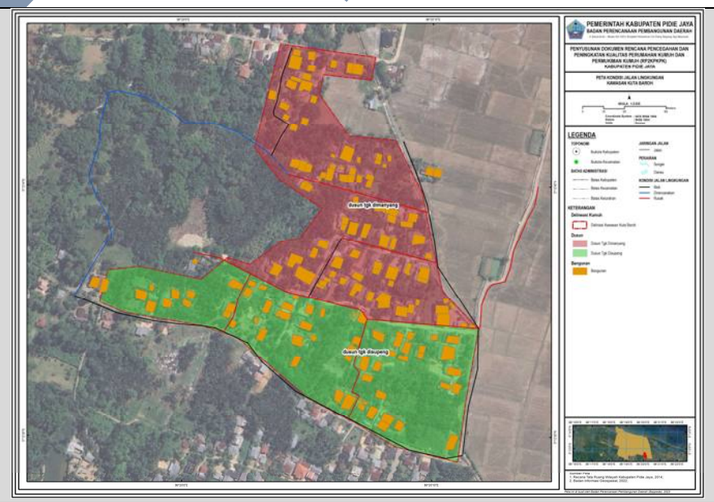
26. Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Baroh Kecamatan Jangka Buya



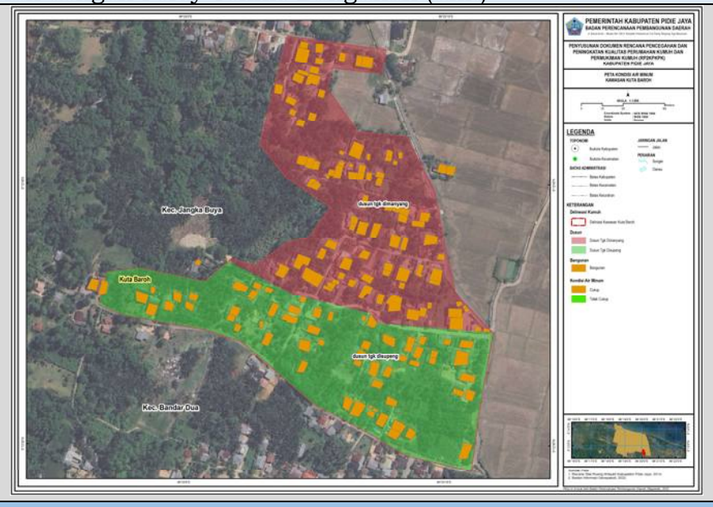
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kuta Baroh	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kuta Baroh	1	Kuta Baroh	Tgk Di Manyang	4,93	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Kuta Baroh	Tgk Di Supeng	4,81	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	9,74					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	91,00					
Jumlah Penduduk	401,00					
Jumlah Kk	103,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

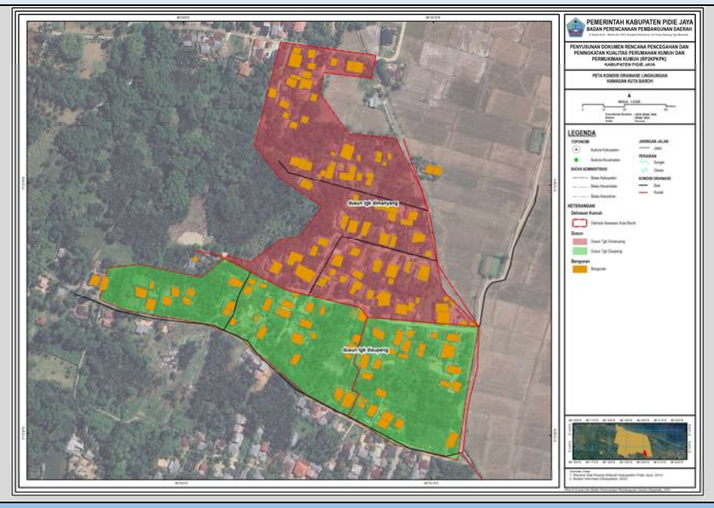




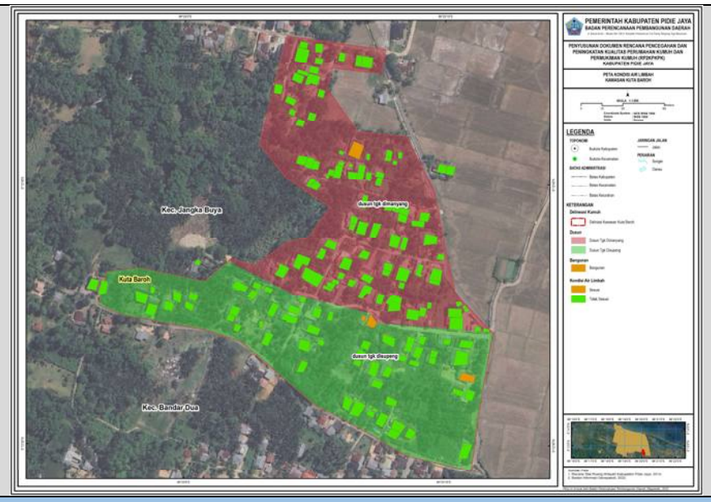


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	91	Panjang Jalan Ideal (m)	1.732,78
Jumlah RTLH (unit)	0	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.681,15
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	6	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	51,63
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.176,03
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	0		

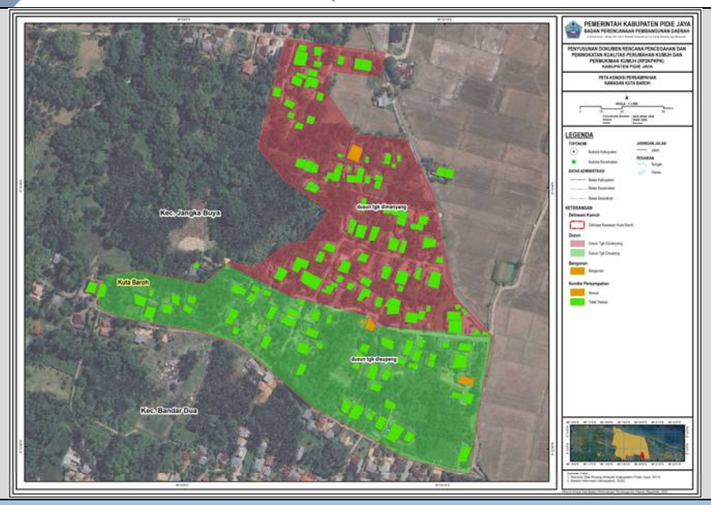




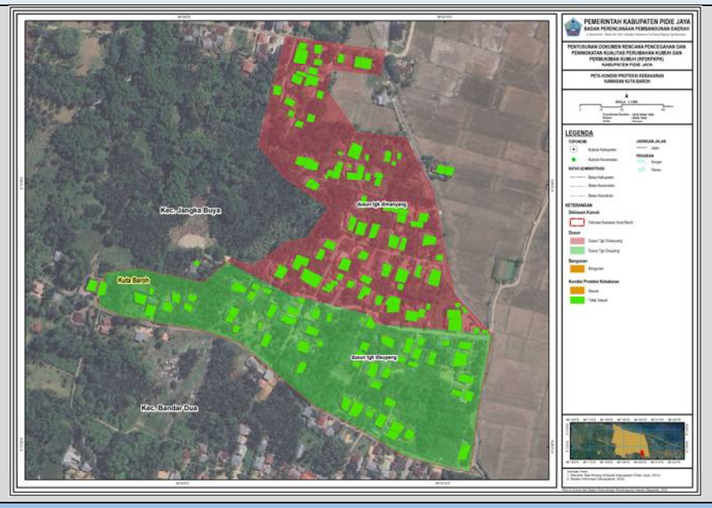
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	127	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	87	Panjang Drainase Ideal (m)	1511,05
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1511,05
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	767,30



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	127,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	24
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	24

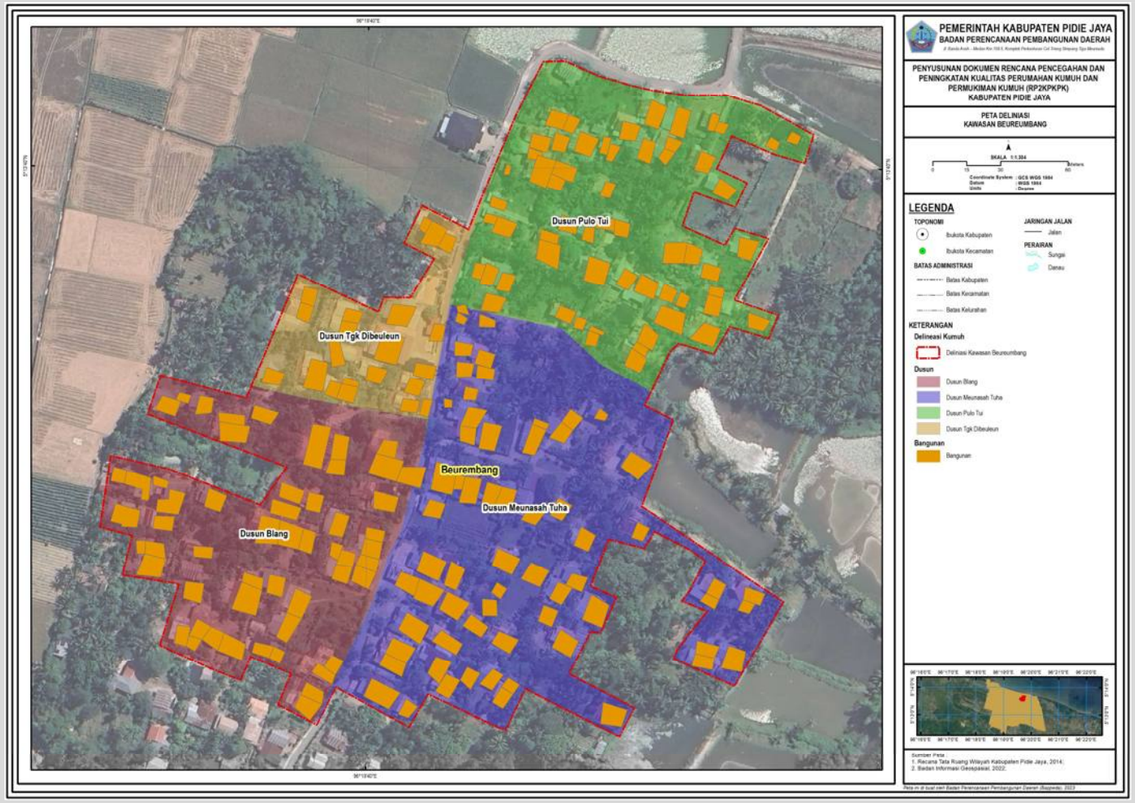


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	127,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	127
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	117



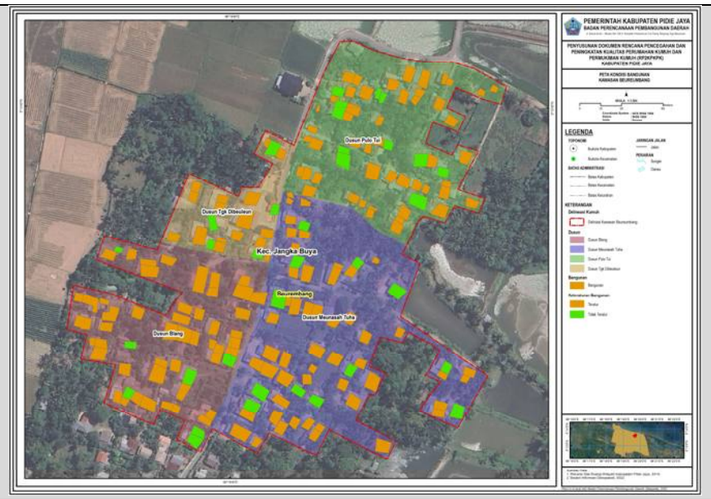
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	91,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	91
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	91

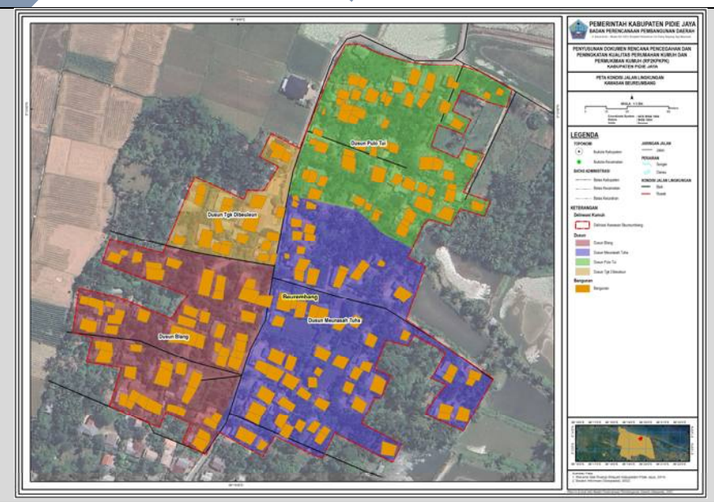
27. Profil Permukiman Kumuh Gampong Beureumbang Kecamatan Jangka Buya



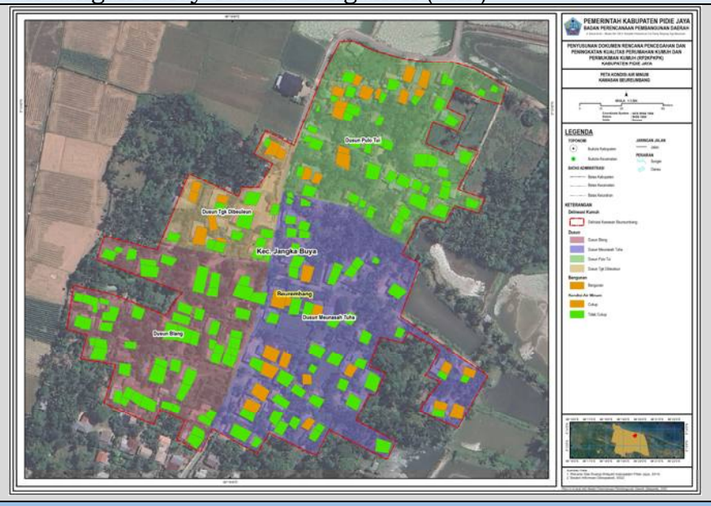
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Beureumbang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Beureumbang	1	Beureumbang	Blang	1,51	Kumuh Sedang
Kecamatan	Jangka Buya	2	Beureumbang	Cet Beuleun	0,52	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Beureumbang	Meunasah Tuha	2,31	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Beureumbang	Polotui	1,63	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	5,97					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	132,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	552,00					
Jumlah Kk	140,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

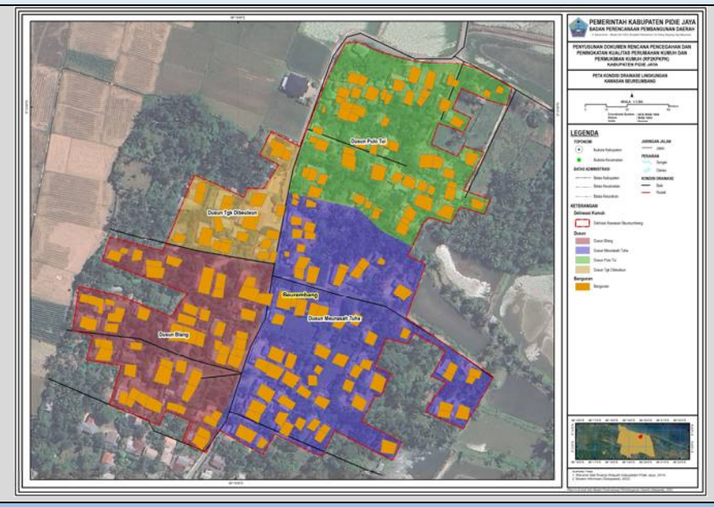




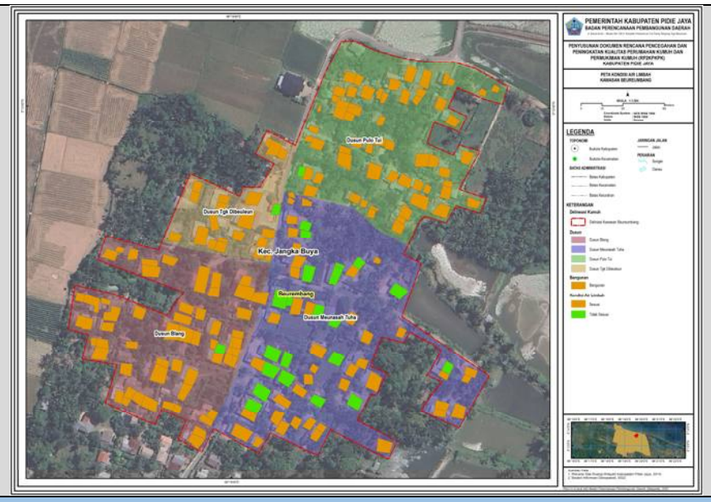


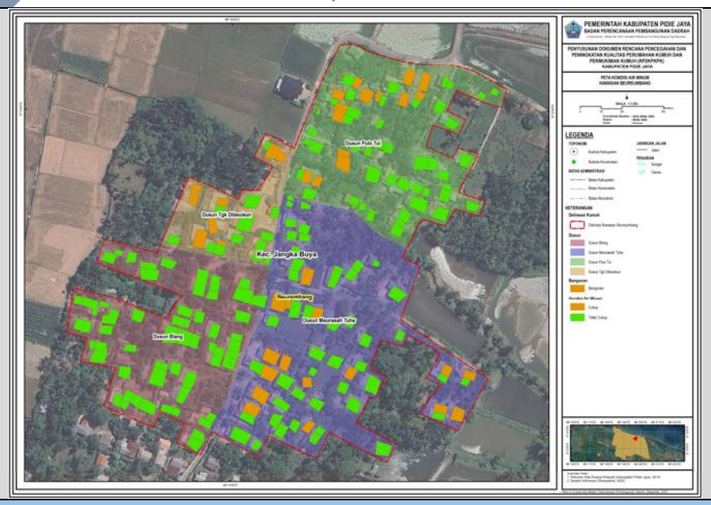
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	132	Panjang Jalan Ideal (m)	949,71
Jumlah RTLH (unit)	12	Panjang Jalan Eksisting (m)	949,71
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	102	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	688,98
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	12		





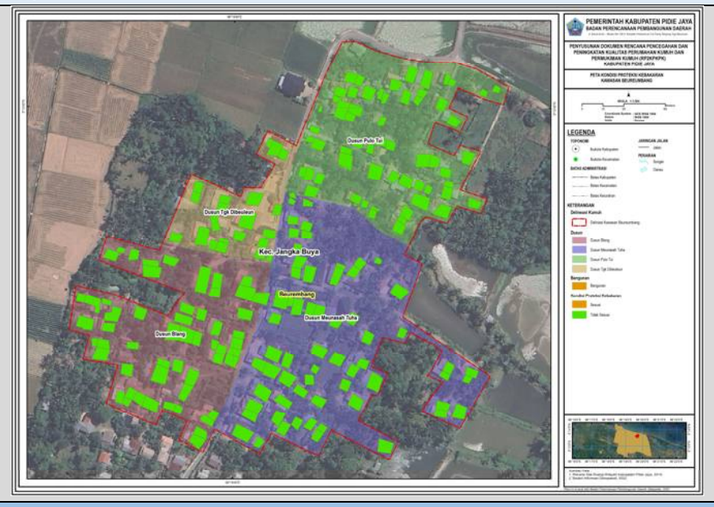
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	140	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	35	Panjang Drainase Ideal (m)	955,20
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	87	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	955,20
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	955,20





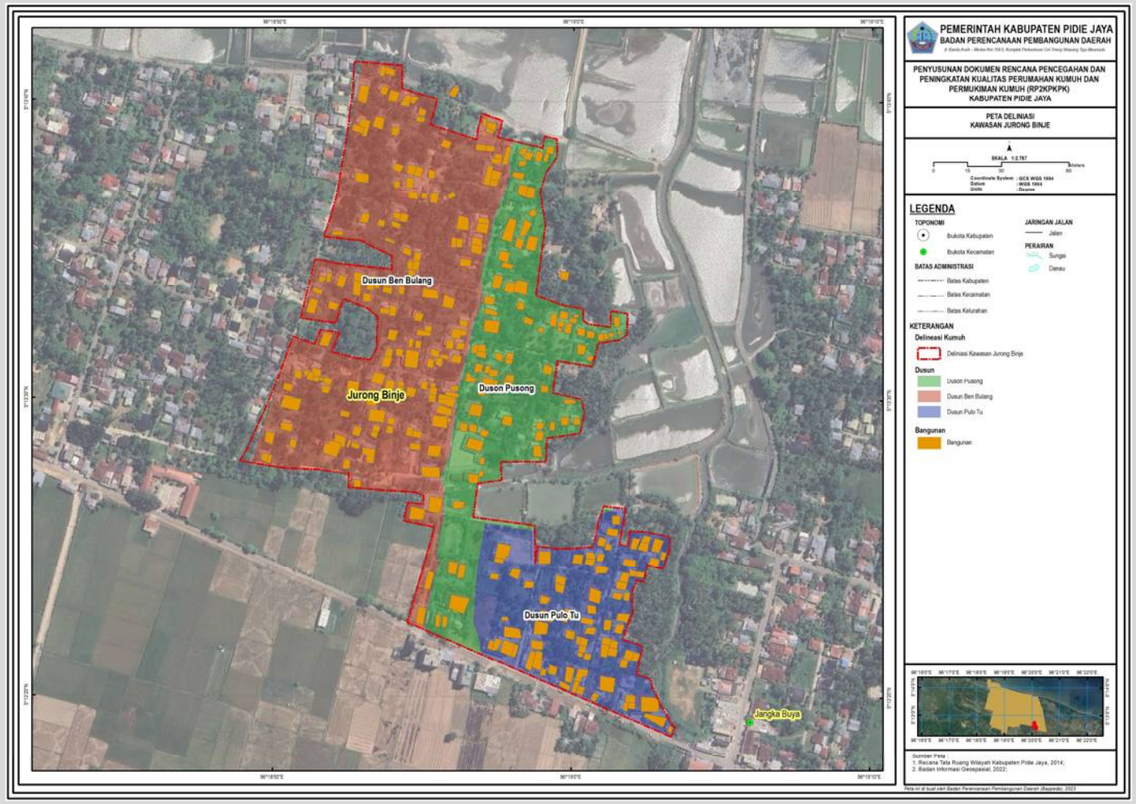
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	140,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	1
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	1

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	140,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	140
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	140



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	132,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	53
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	132

28. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya*

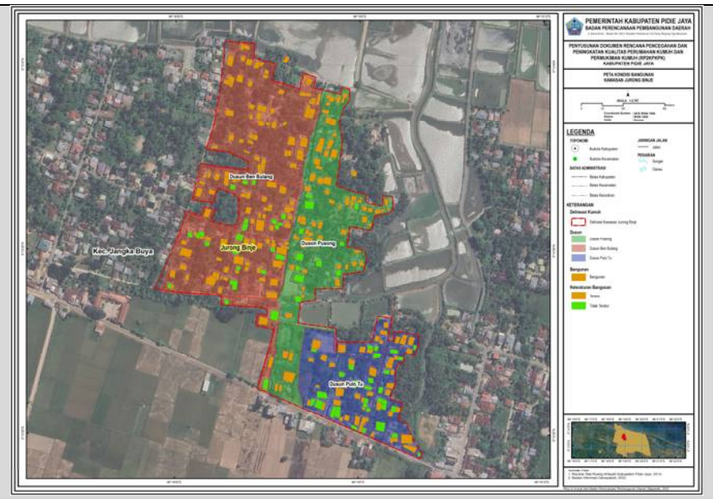


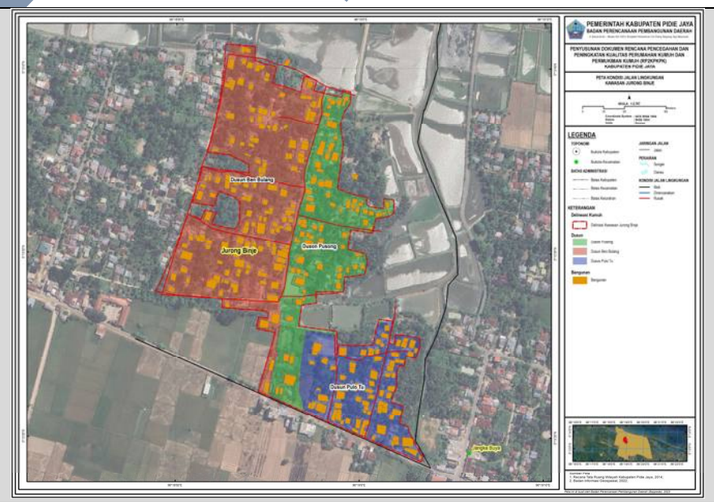
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Jurong Binje	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Jurong Binje	1	Jurong Binje	Benbulang	6,88	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Jurong Binje	Pulo Tu	2,97	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Jurong Binje	Pusong	3,57	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	13,42					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	223,00					
Jumlah Penduduk	1061,00					
Jumlah Kk	301,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

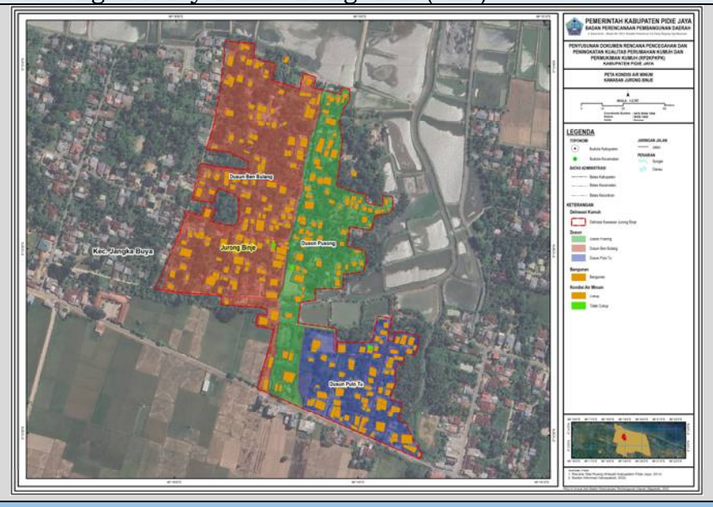


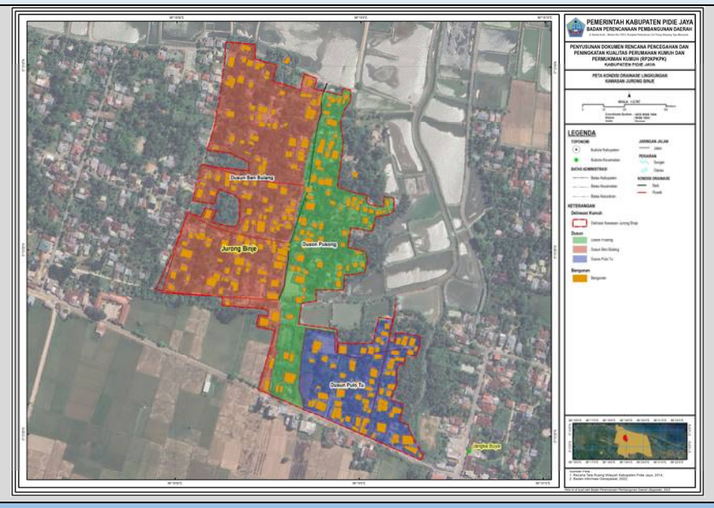




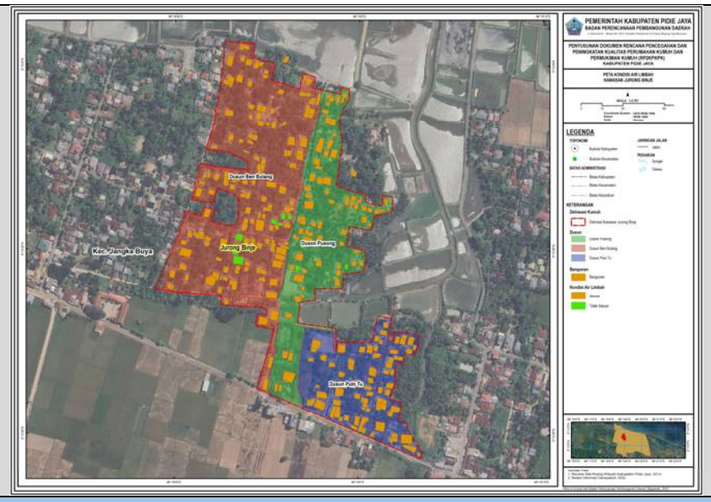


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	223	Panjang Jalan Ideal (m)	1.868,18
Jumlah RTLH (unit)	14	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.868,18
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	182	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.868,18
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	14		

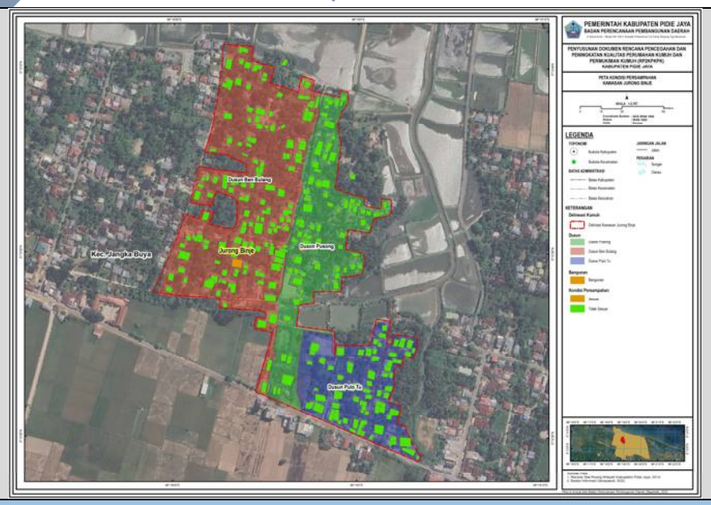




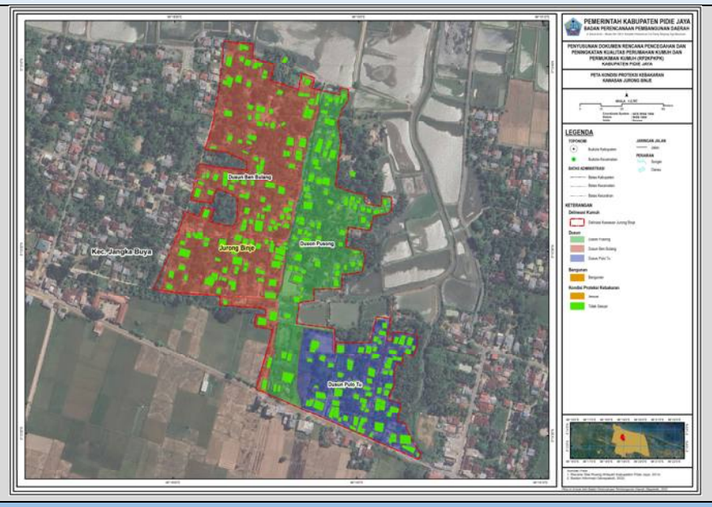
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	301	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	148	Panjang Drainase Ideal (m)	1476,16
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	4	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1476,16
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1104,87



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	301,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	8
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	8

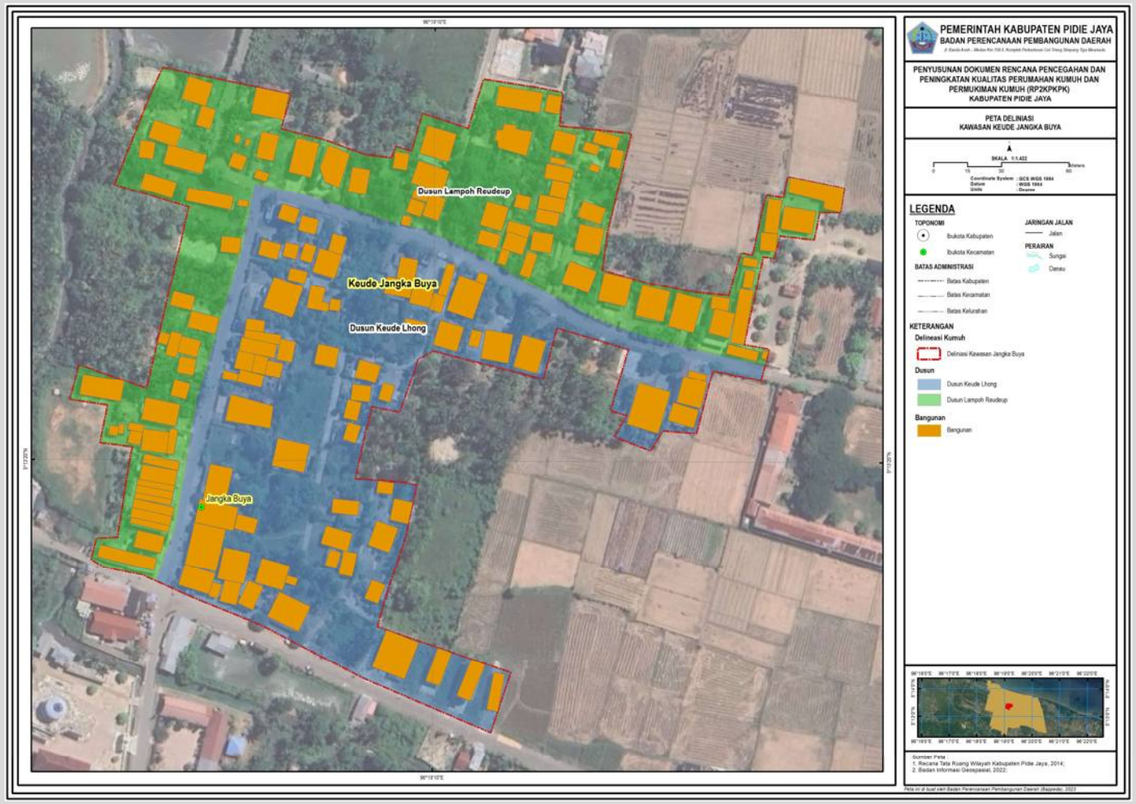


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	301,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	301
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	298



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	223,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	223

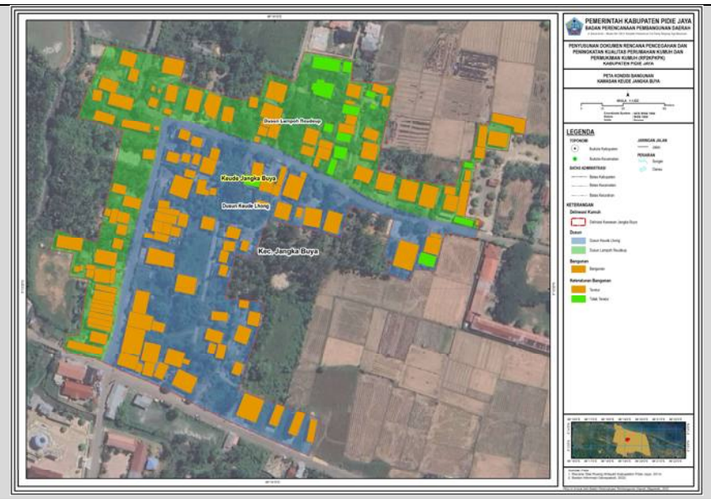
29. Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya

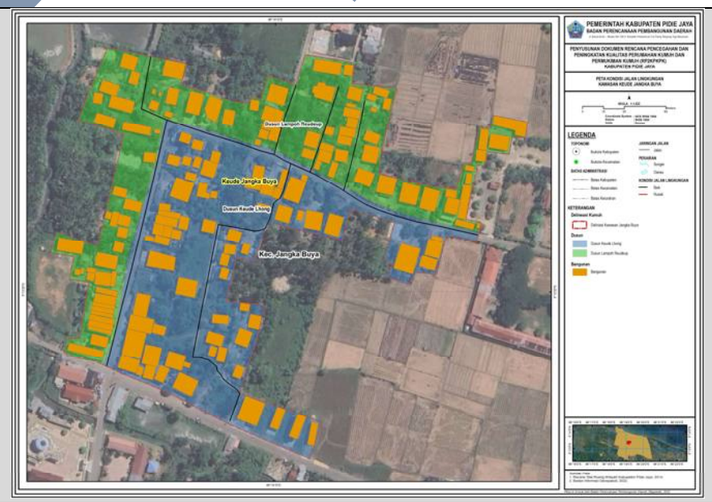


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kedeu Jangka Buya	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kedeu Jangka Buya	1	Kedeu Jangka Buya	Lampoh Reupeup	3,24	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Kedeu Jangka Buya	Keude Lhok	2,90	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,14					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	79,00					
Jumlah Penduduk	308,00					
Jumlah Kk	96,00					

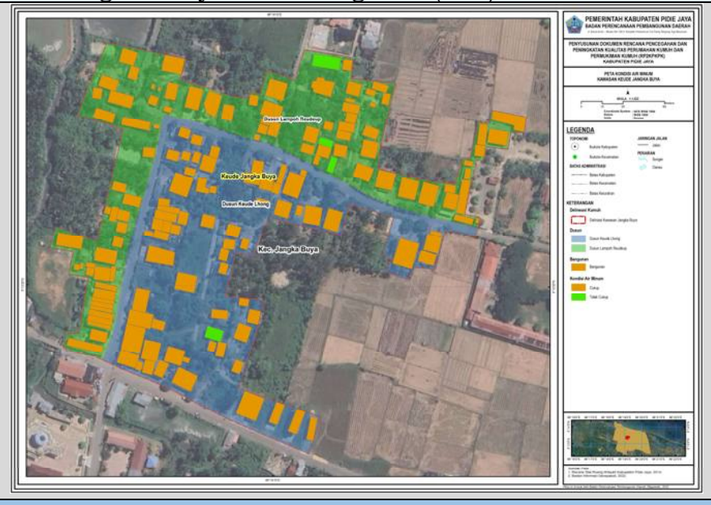
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

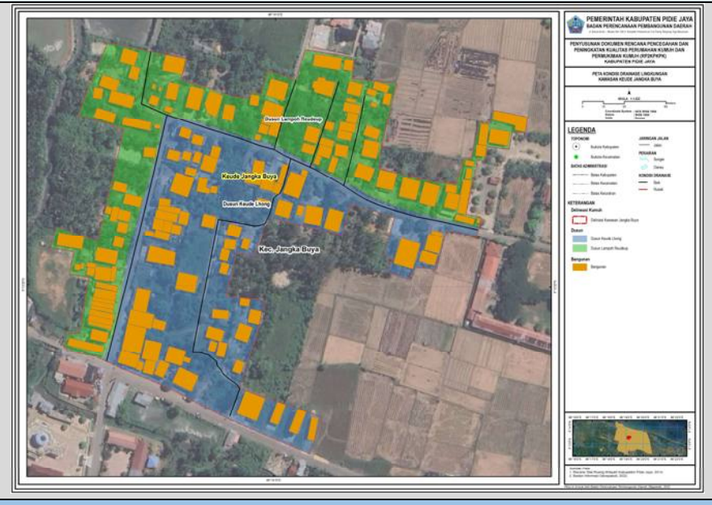




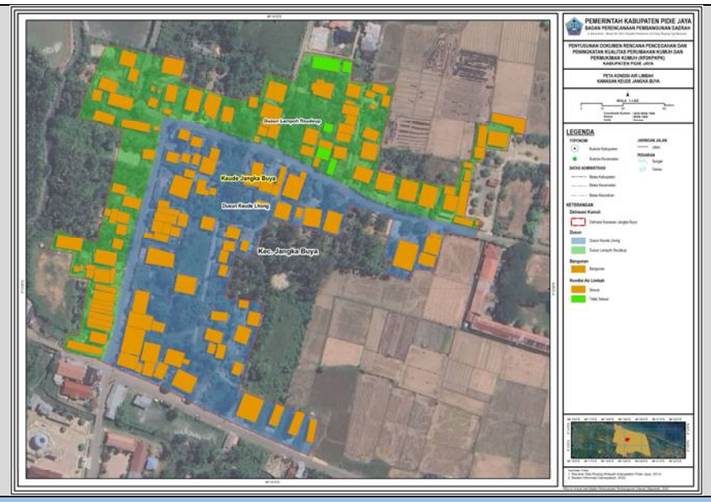


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	79	Panjang Jalan Ideal (m)	1.873,00
Jumlah RTLH (unit)	9	Panjang Jalan Eksisting (m)	883,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	53	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	1040,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	153,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	9		

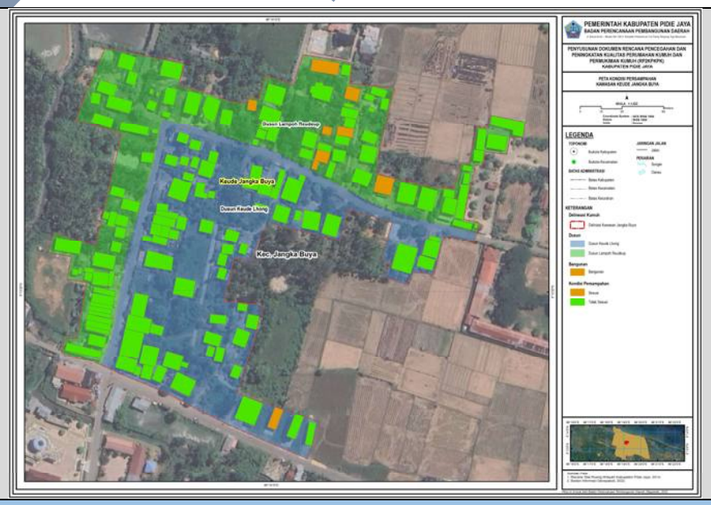




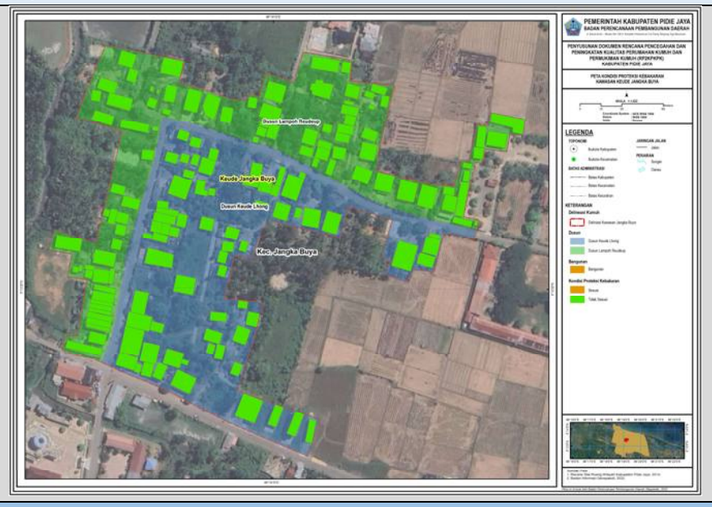
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	96	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	5	Panjang Drainase Ideal (m)	2495
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	5	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2495
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	0,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	96,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

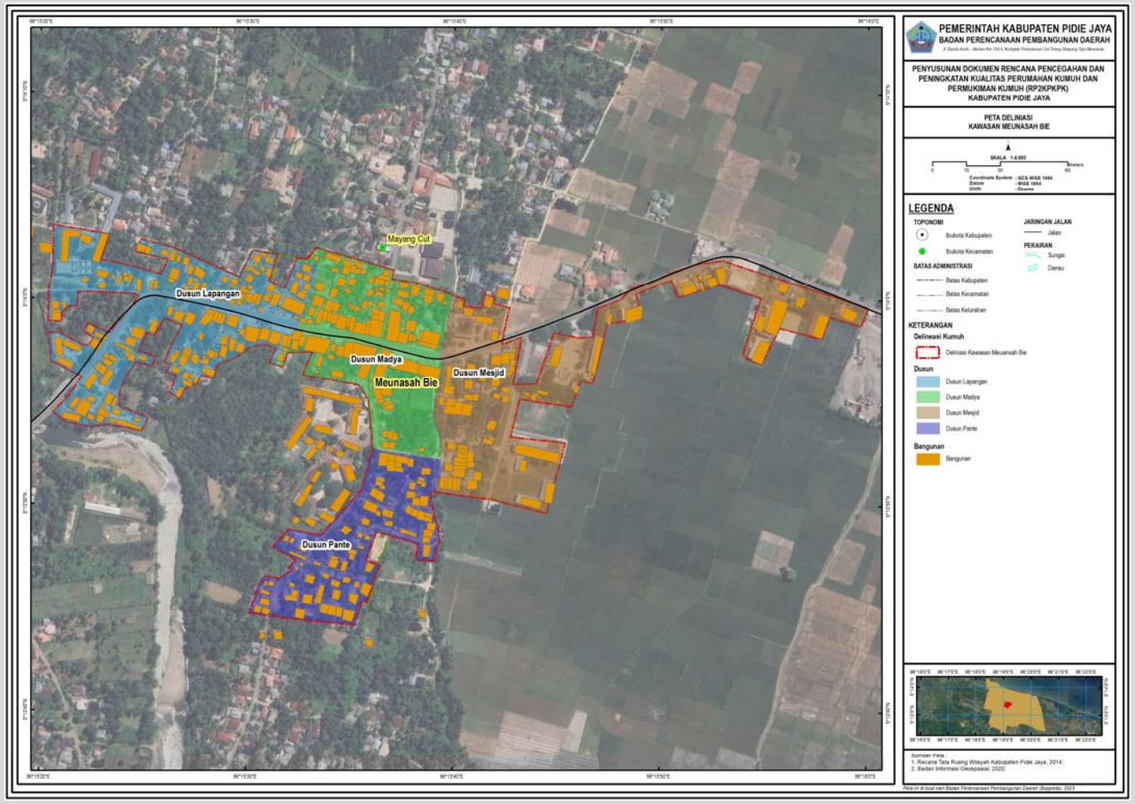


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	96,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	96
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	84



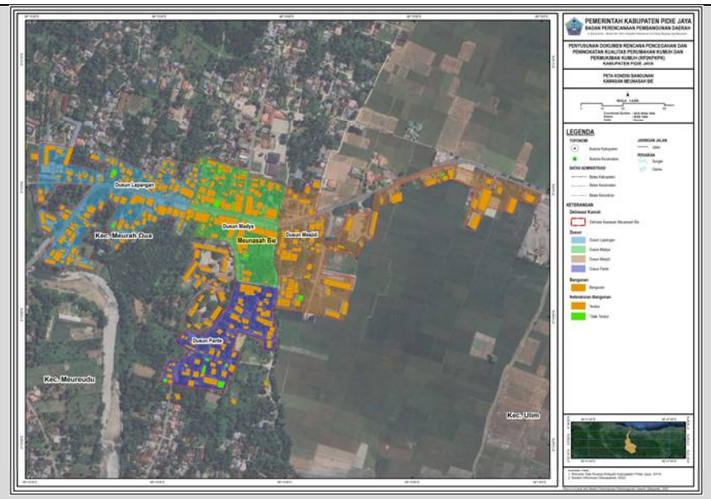
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	79
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	33
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	33

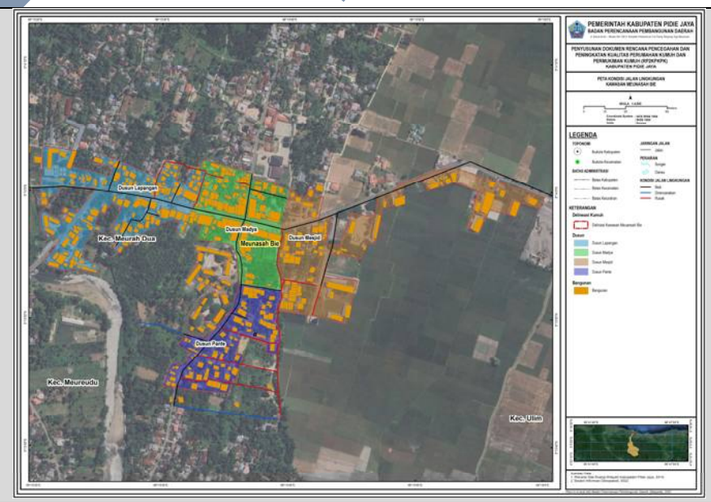
30. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua*



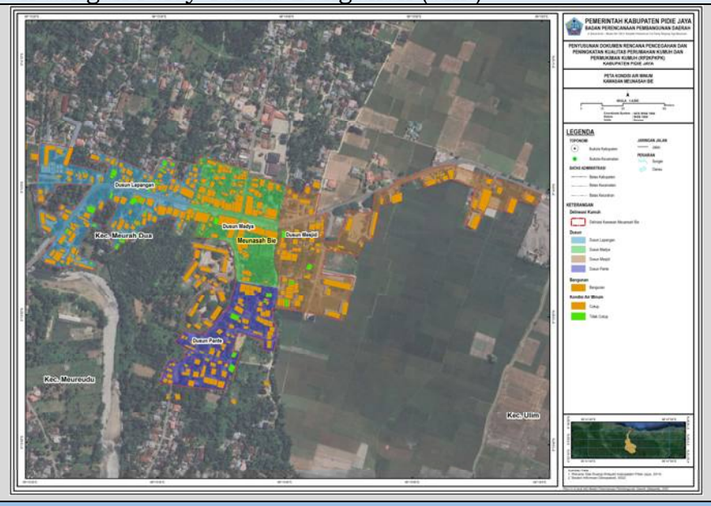
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meunasah Bie	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meunasah Bie	1	Meunasah Bie	Syiah Kuala	10,09	Kumuh Sedang
Kecamatan	Meurah Dua	2	Meunasah Bie	Tgk. Nyak Ahmat	0,98	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Meunasah Bie	Tgk.Panjang Sembilan	3,05	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	14,12					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	145,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	659,00					
Jumlah Kk	179,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

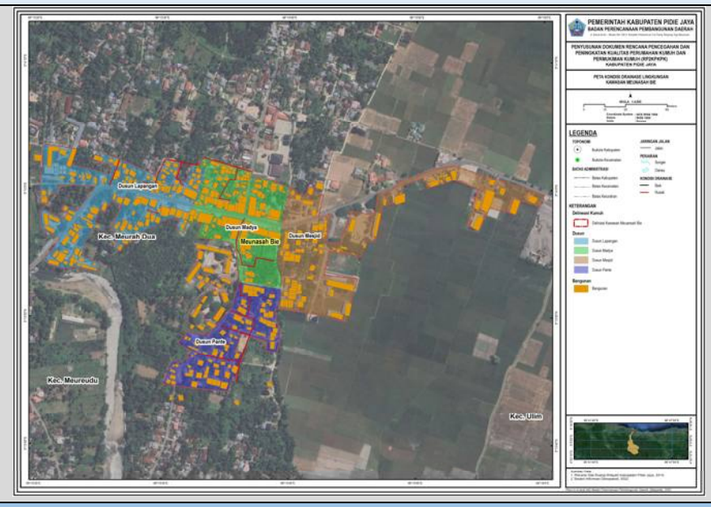




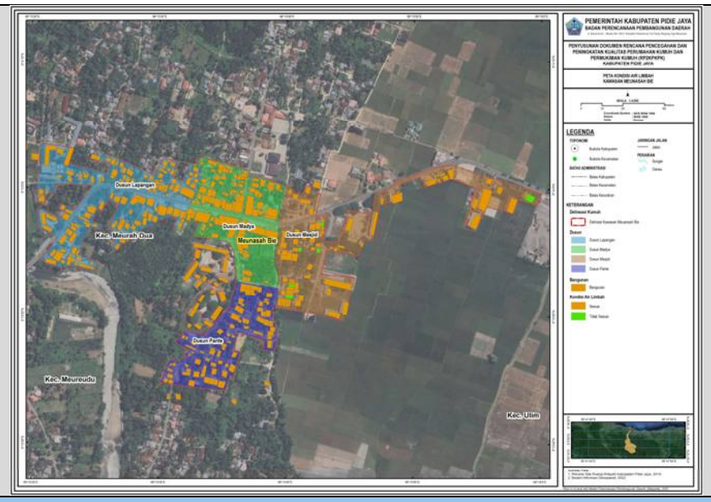


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	145	Panjang Jalan Ideal (m)	2.082,15
Jumlah RTLH (unit)	20	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.082,15
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	105	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	628,04
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	20		

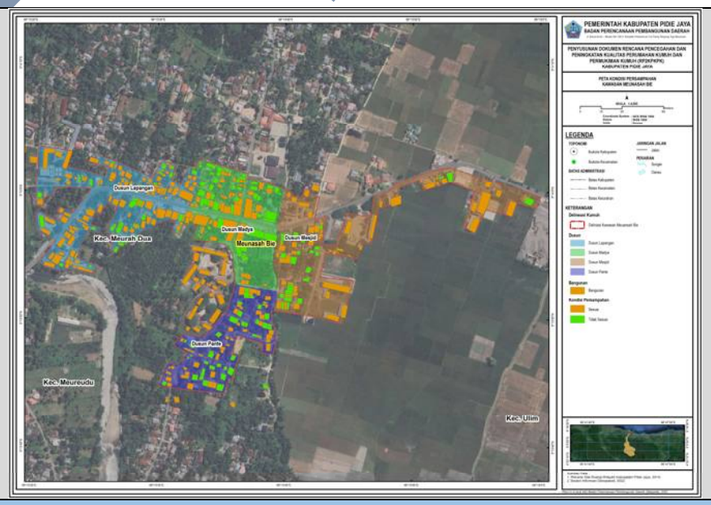




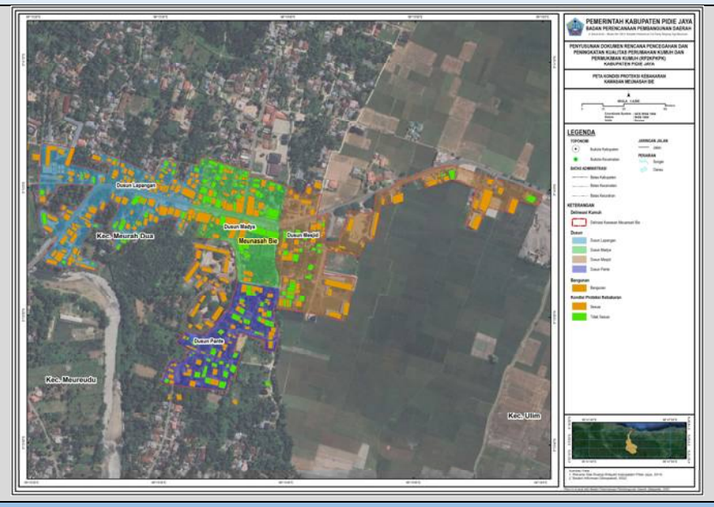
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	179	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	31	Panjang Drainase Ideal (m)	1372,38
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	150	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1372,38
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	782,54



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	86
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	86

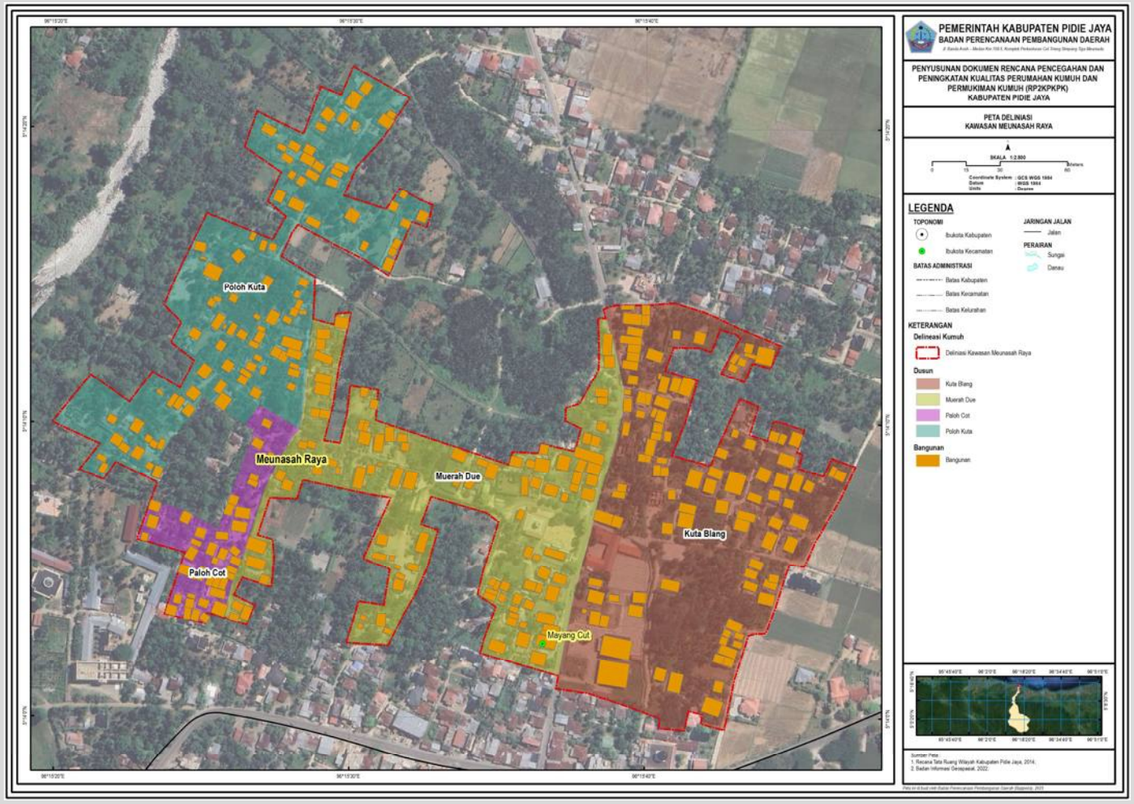


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	179
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	177



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	145,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	145
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	145

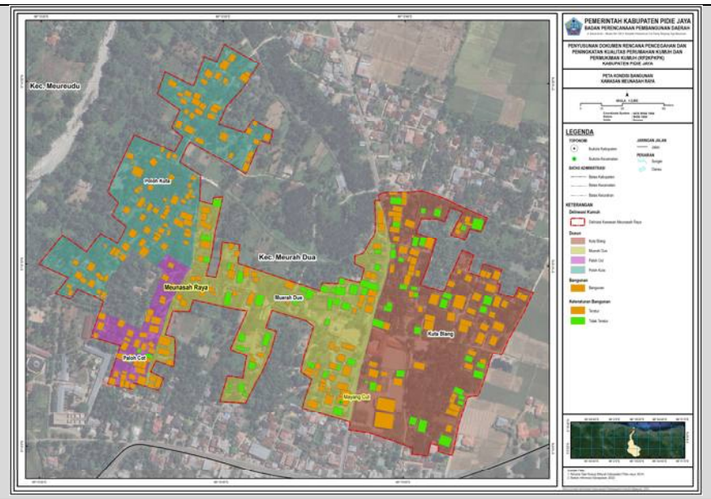
31. Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua



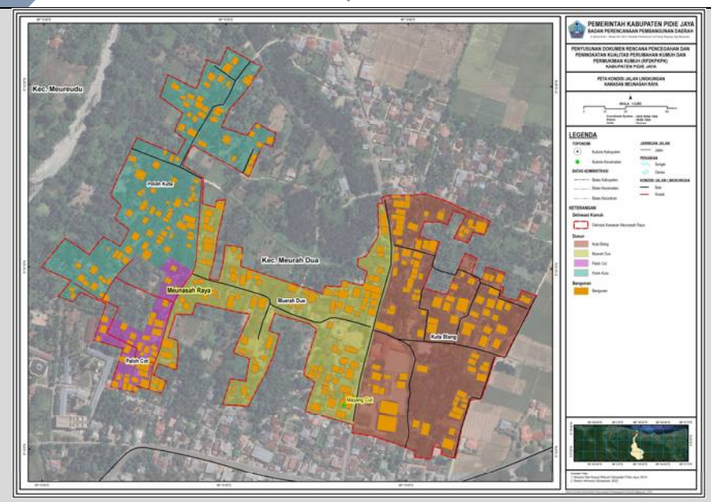
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meunasah Raya	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meunasah Raya	1	Meunasah Raya	Kuta Blang	7,52	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meurah Dua	2	Meunasah Raya	Paloh Kuta	6,21	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Meunasah Raya	Meurah Due	5,58	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	20,59					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	228,00					
Jumlah Penduduk	954,00					
Jumlah Kk	274,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

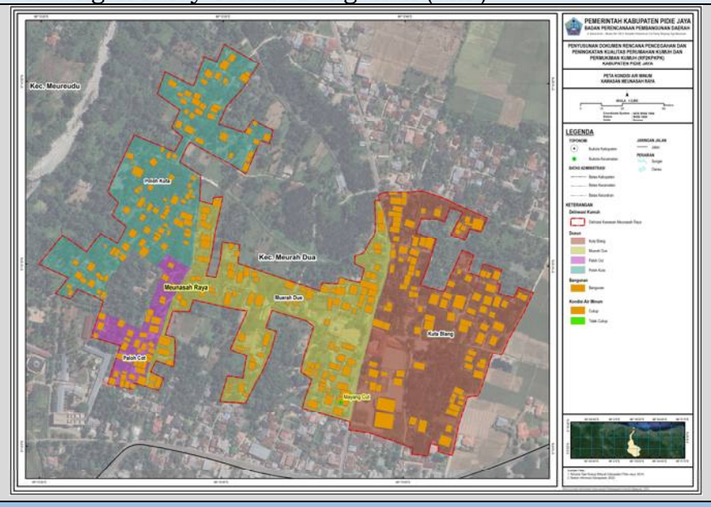




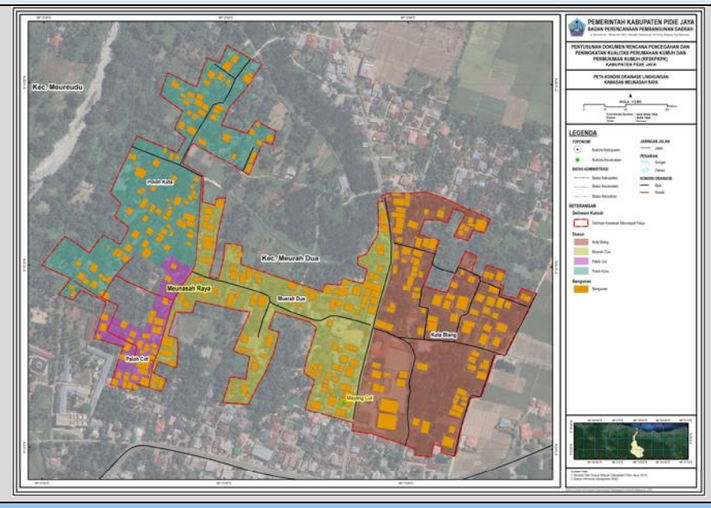
BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	228
Jumlah RTLH (unit)	65
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	59
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	65



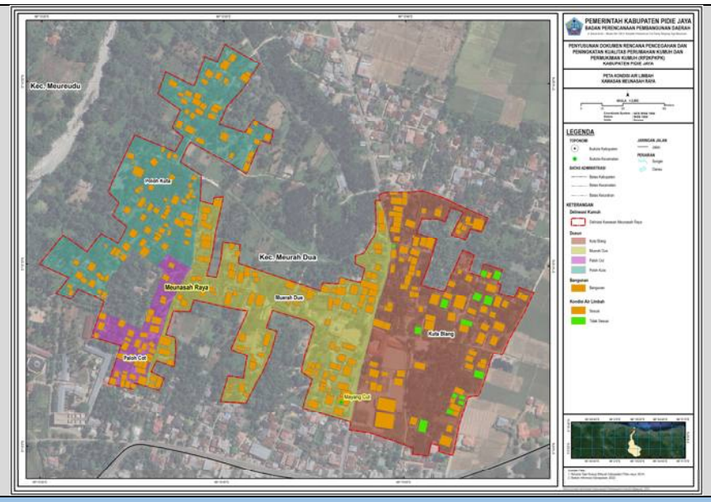
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	6.974,00
Panjang Jalan Eksisting (m)	6.094,00
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	880,00
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	4.490,00



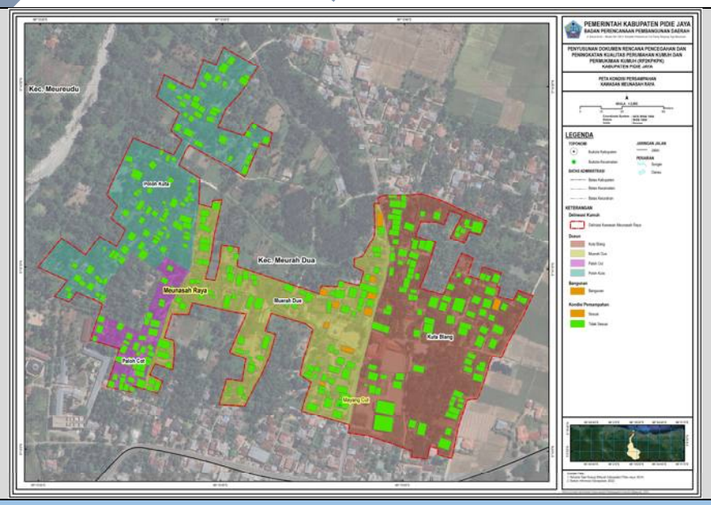
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	274
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	90
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	1



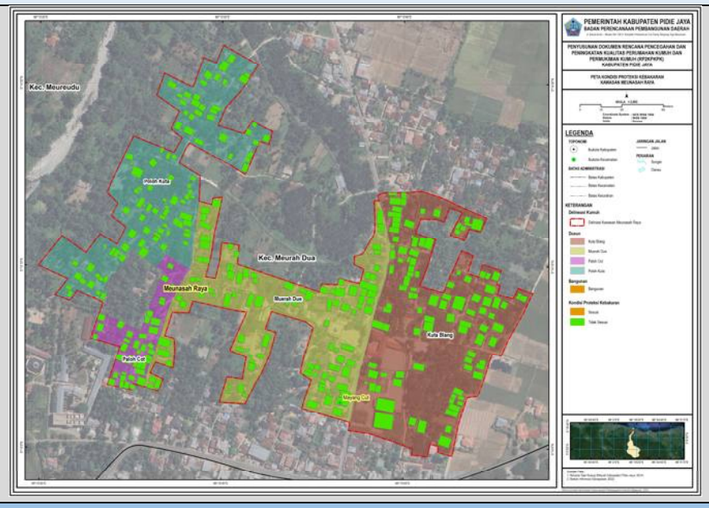
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	0,30
Panjang Drainase Ideal (m)	1796,00
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1296,00
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	767,30



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	274,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	6
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	6

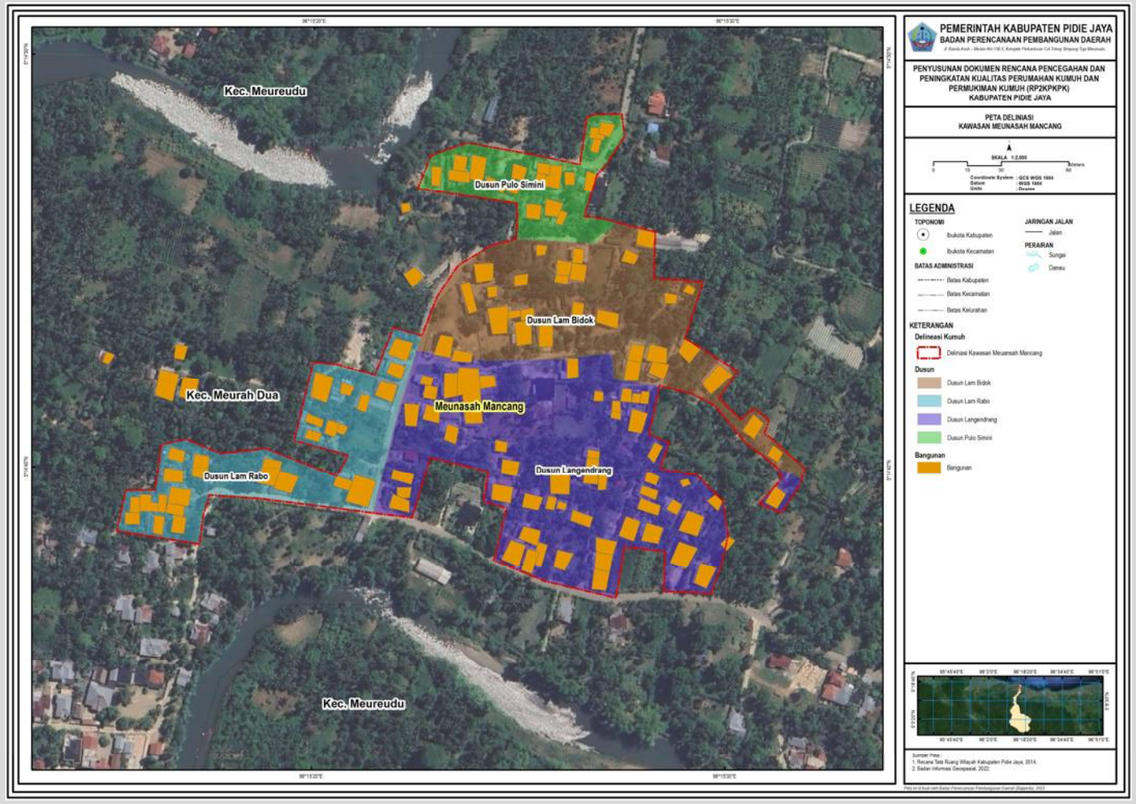


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	274,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	274
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	259



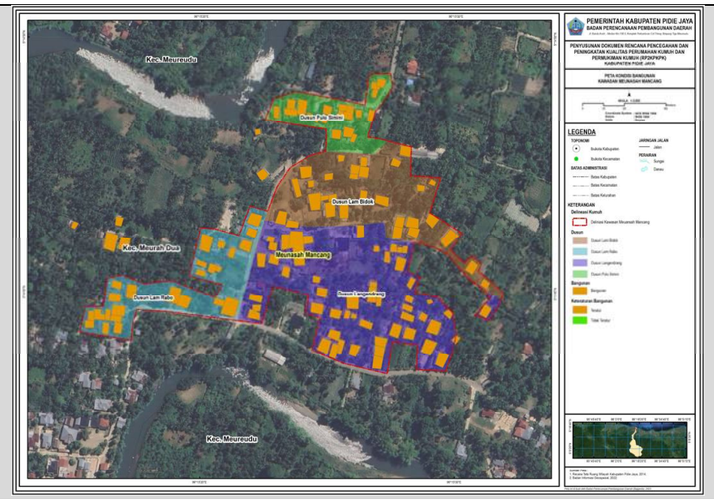
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	228,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	228

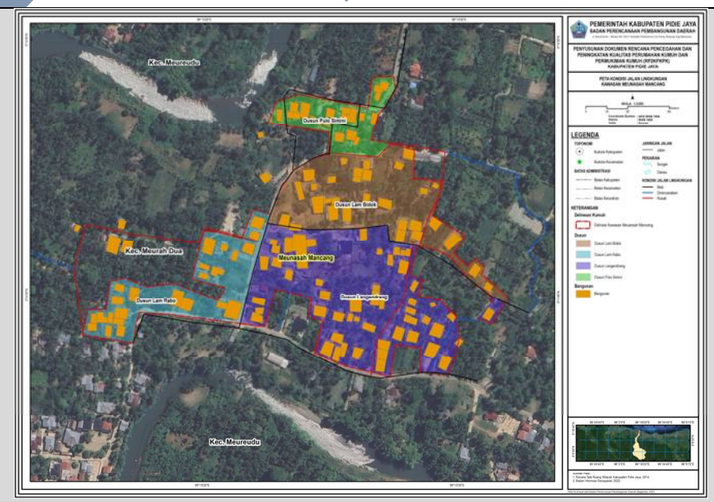
32. Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Mancang Kecamatan Meurah Dua



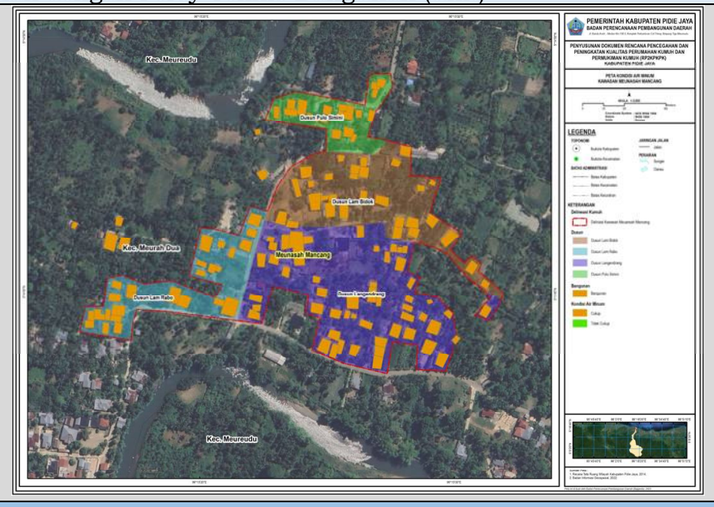
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meunasah Mancang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meunasah Mancang	1	Meunasah Mancang	Lambadok	1,95	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Meunasah Mancang	Lam Geundrang	3,00	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Meunasah Mancang	Pulo Simini	0,71	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Meunasah Mancang	Lam Rabo	1,31	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,97					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan (Unit)	102,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	484,00					
Jumlah Kk	129,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

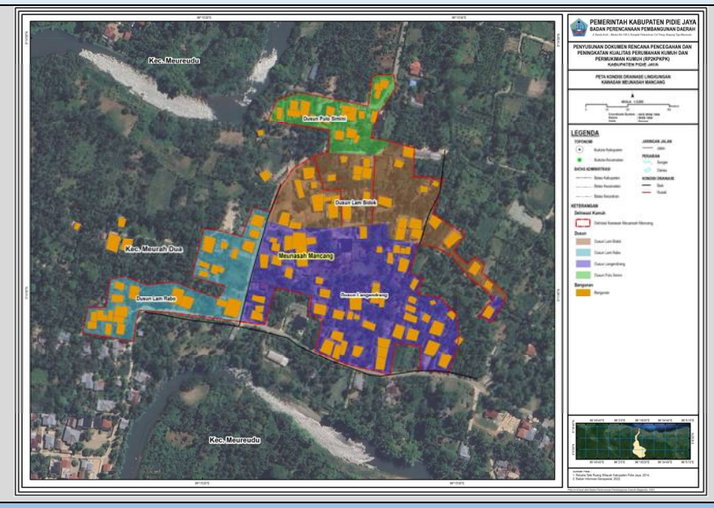




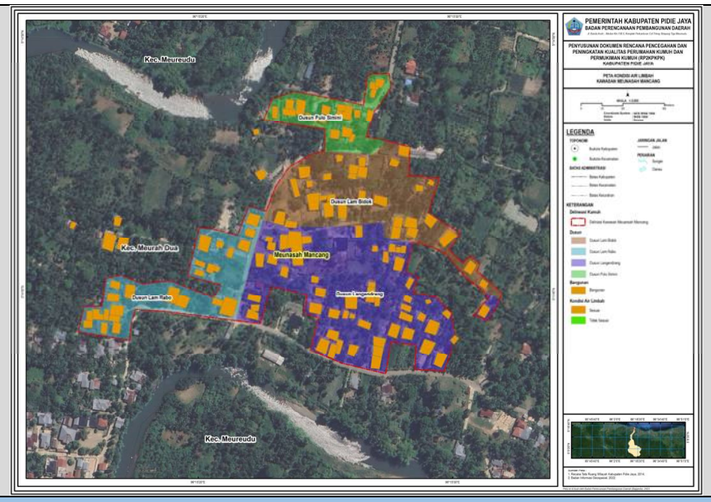


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	102	Panjang Jalan Ideal (m)	1.263,61
Jumlah RTLH (unit)	13	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.169,26
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	76	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	94,35
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	414,07
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	13		

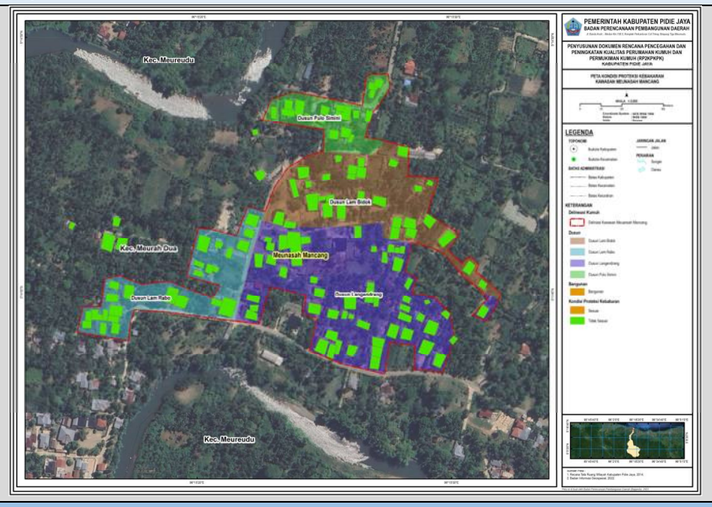




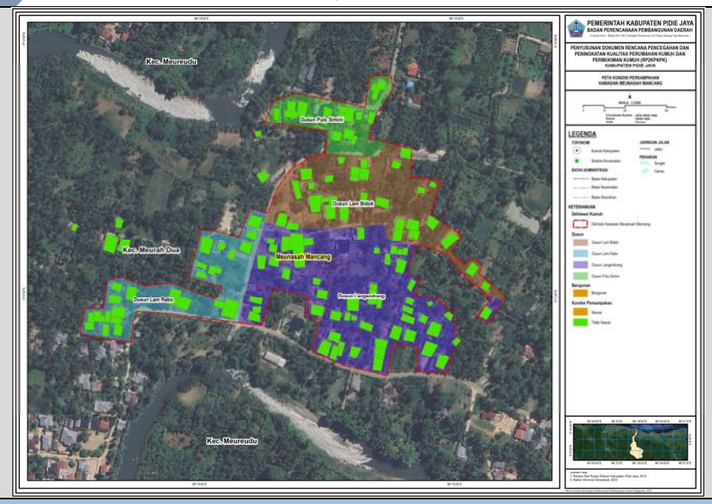
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	129	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	0	Panjang Drainase Ideal (m)	741,04
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	438,74
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	955,20



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	129,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	3
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	3

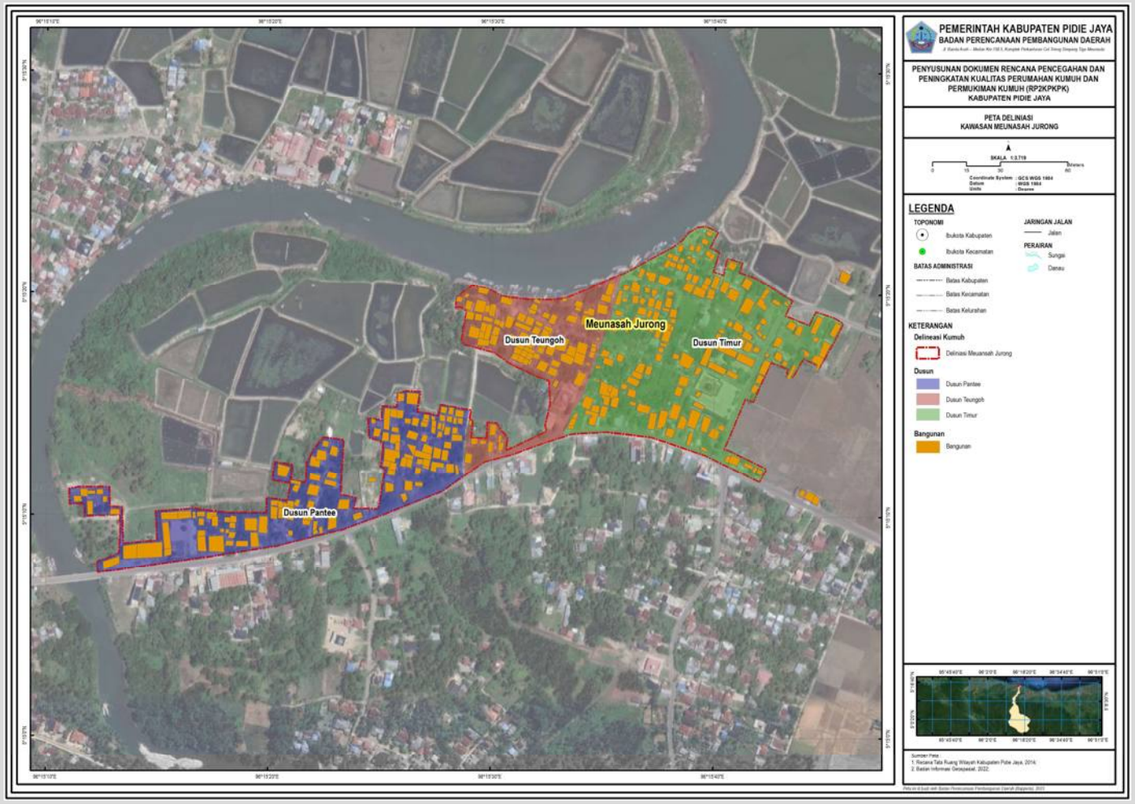


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	102,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	102



KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	129,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	129
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	129

33. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua*

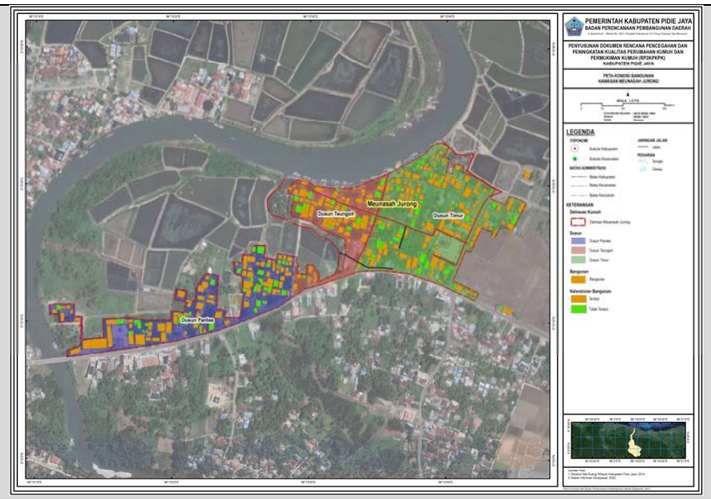


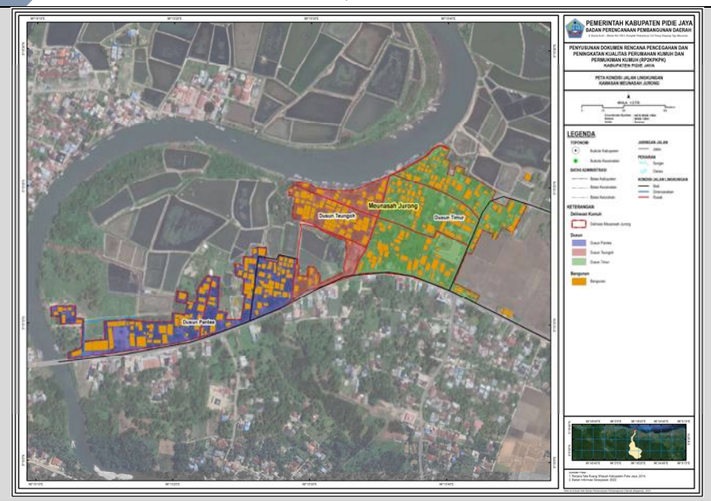
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meunasah Jurong	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meunasah Jurong	1	Meunasah Jurong	Pante	4,18	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meurah Dua	2	Meunasah Jurong	Teungoh	2,66	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Meunasah Jurong	Timur	6,59	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	13,42					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	176,00					
Jumlah Penduduk	718,00					
Jumlah Kk	214,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

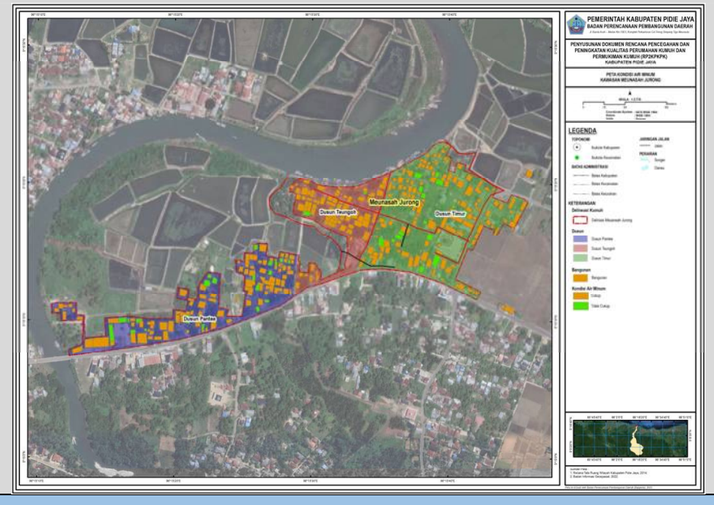


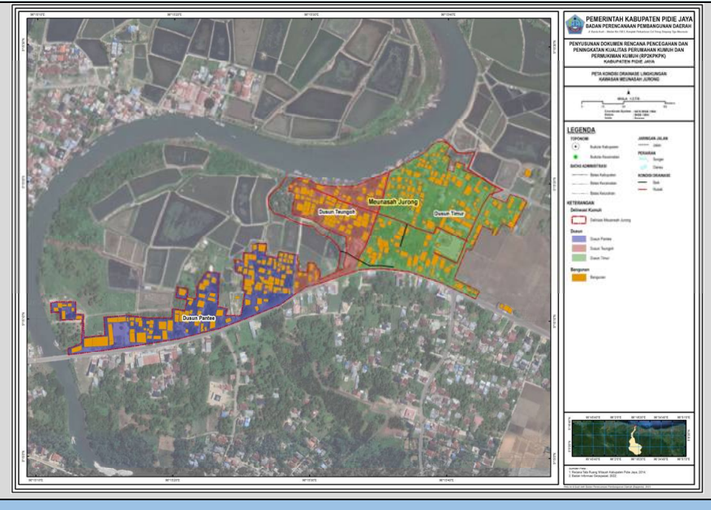




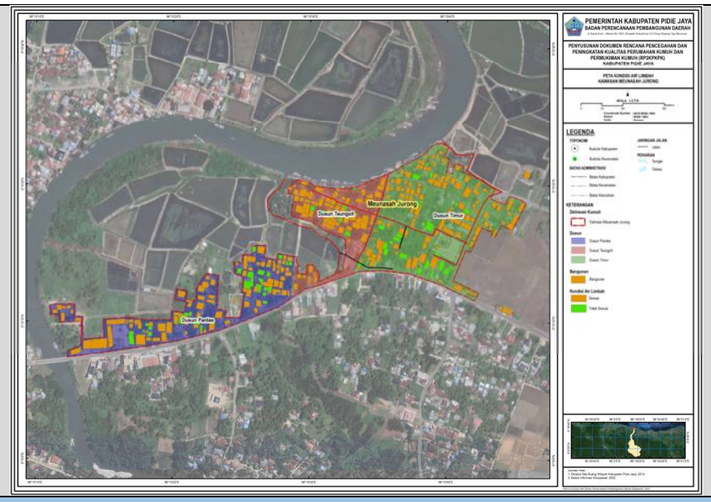


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	176	Panjang Jalan Ideal (m)	2.169,81
Jumlah RTLH (unit)	27	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.129,92
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	140	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	39,89
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.384,85
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	27		

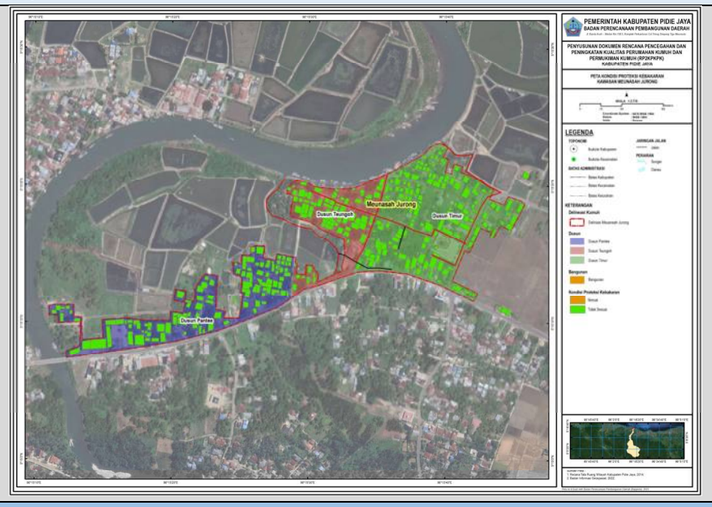




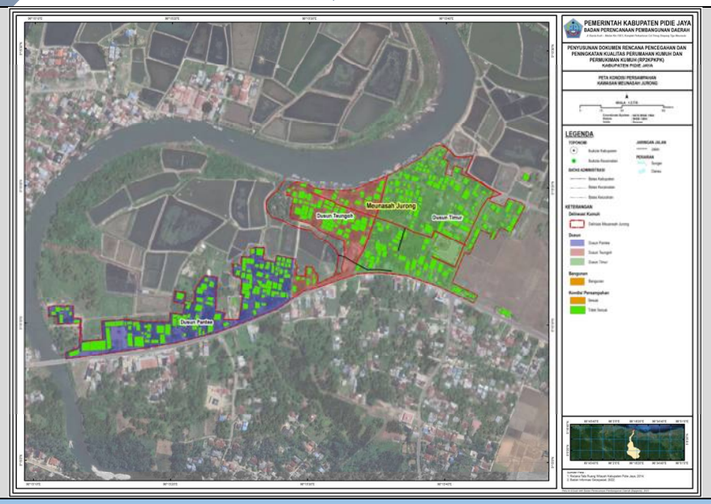
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	214	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	13	Panjang Drainase Ideal (m)	1828,93
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	22	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1288,85
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	540,08
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1119,67



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	214,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	22
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	22

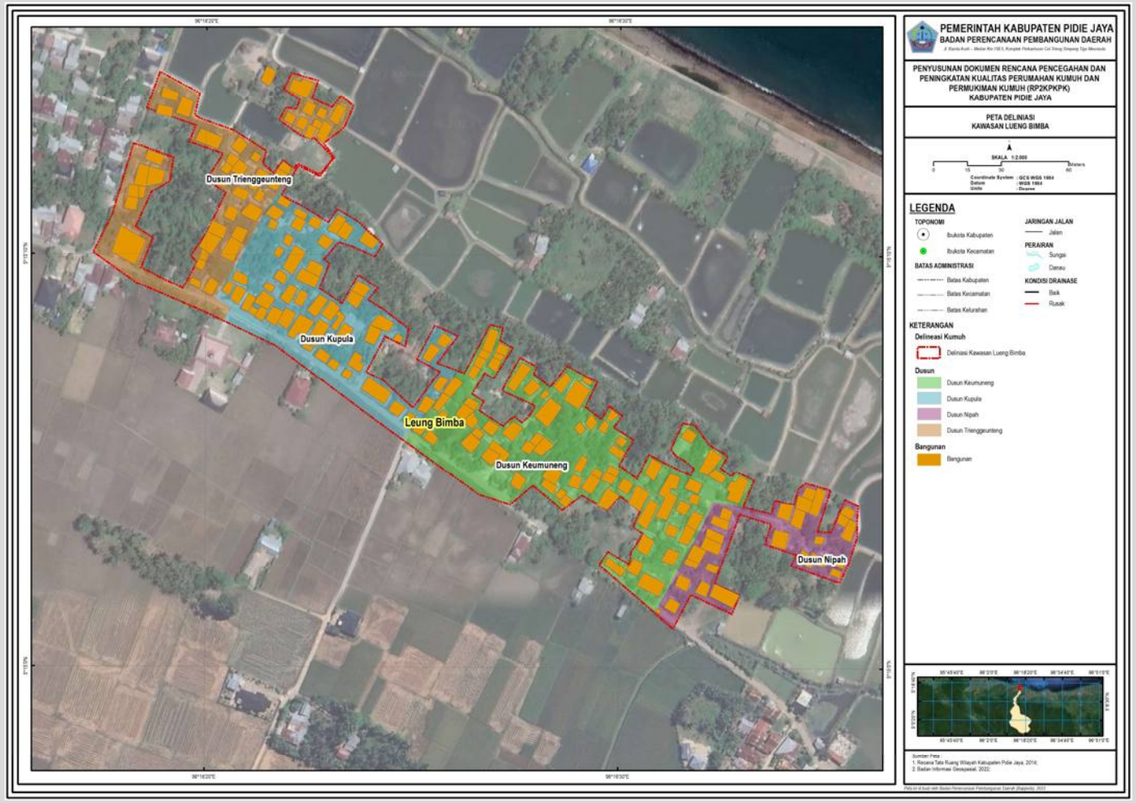


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	176,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	176



KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	214,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	214
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	214

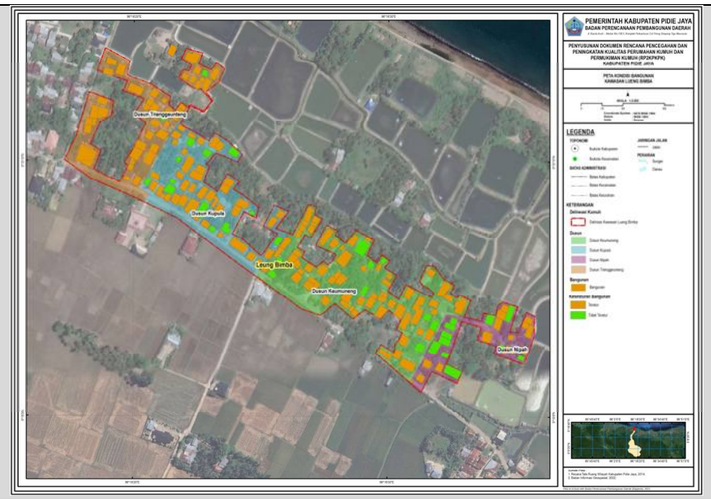
34. Profil Permukiman Kumuh Gampong Leung Bimba Kecamatan Meurah Dua



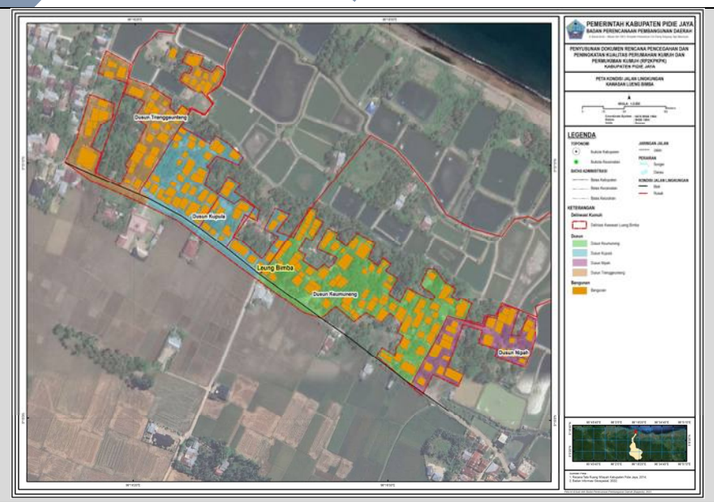
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Leung Bimba	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Leung Bimba	1	Leung Bimba	Trigeunteung	1,09	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Leung Bimba	Kupula	1,32	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Leung Bimba	Nipah	1,86	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Leung Bimba	Nipah	0,60	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	4,86					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	165,00					
Jumlah Penduduk	689,00					
Jumlah Kk	192,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

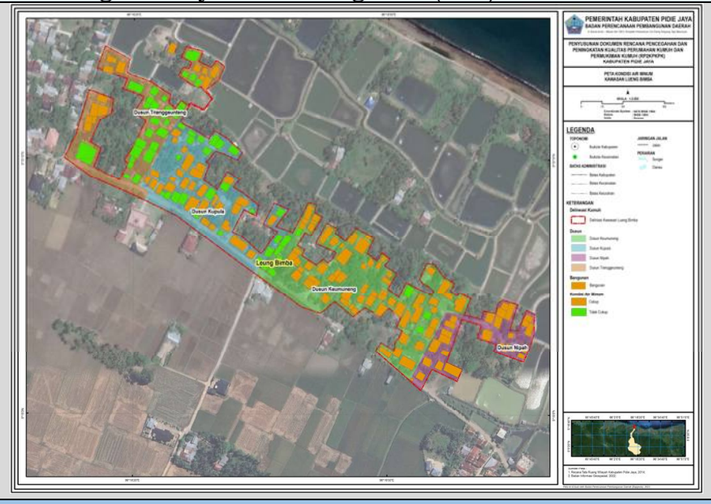




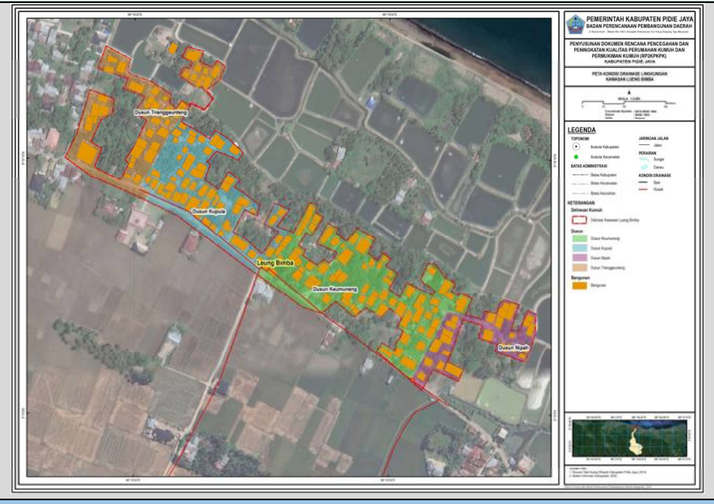
BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	165
Jumlah RTLH (unit)	4
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	85
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	4



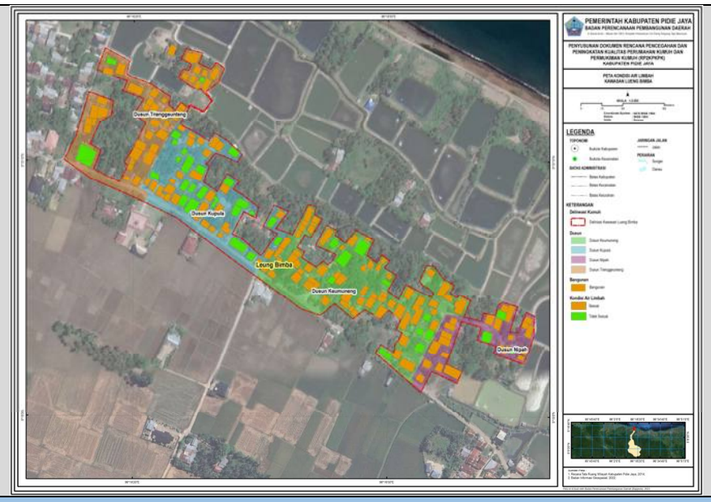
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	918,74
Panjang Jalan Eksisting (m)	918,74
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	520,06



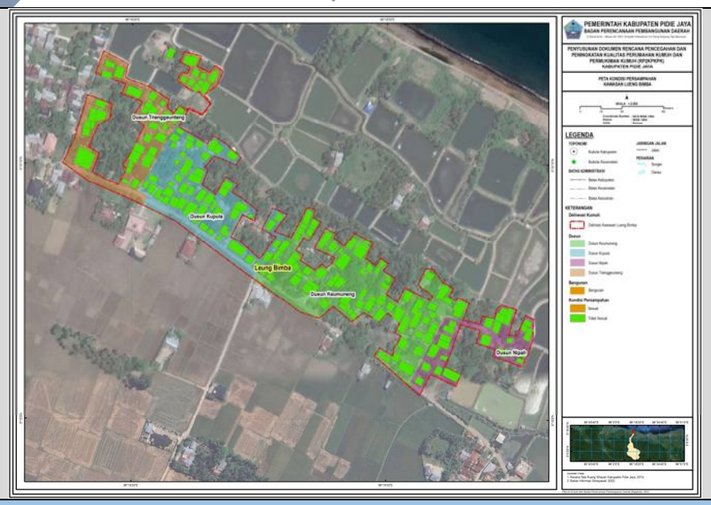
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	192
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	3
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	52



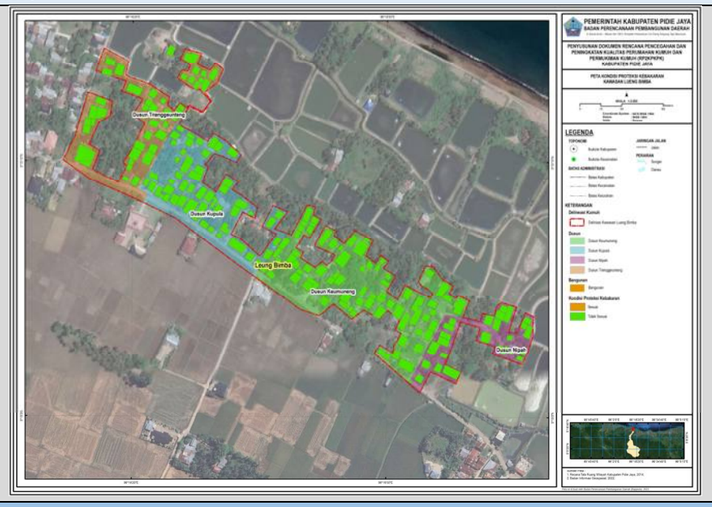
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	323,54
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	323,54
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	323,54



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	192,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	30
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	30

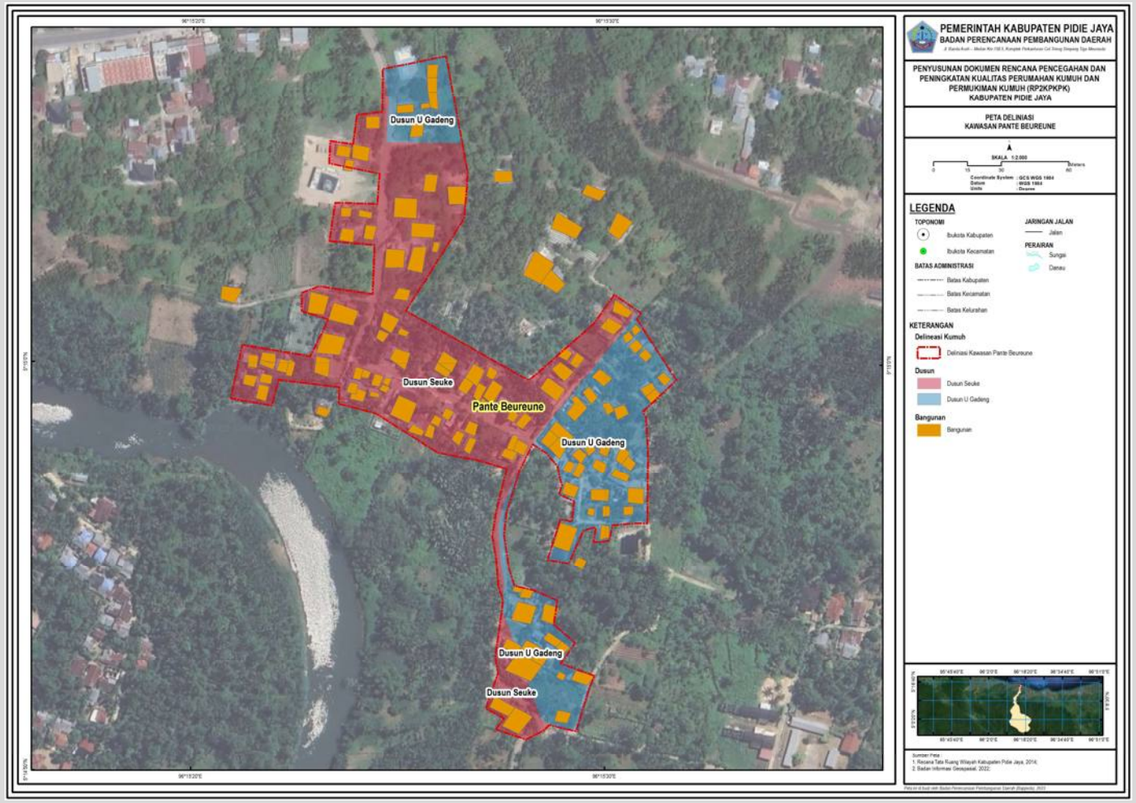


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	192,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	192
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	192



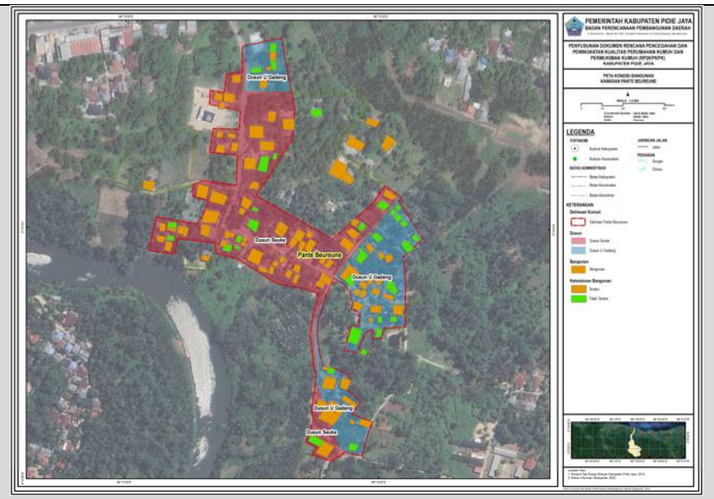
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	165,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	165

35. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Pante Beureune Kecamatan Meurah Dua*

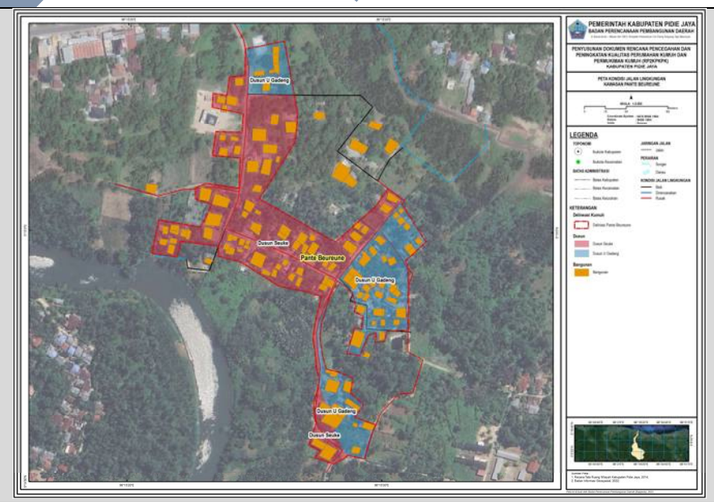


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Pante Beureune	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Pante Beureune	1	Pante Beureune	Seuke	2,99	Kumuh Ringan
Kecamatan	Jangka Buya	2	Pante Beureune	U Gadeng	1,64	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidei Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	4,63					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	91,00					
Jumlah Penduduk	425,00					
Jumlah Kk	96,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

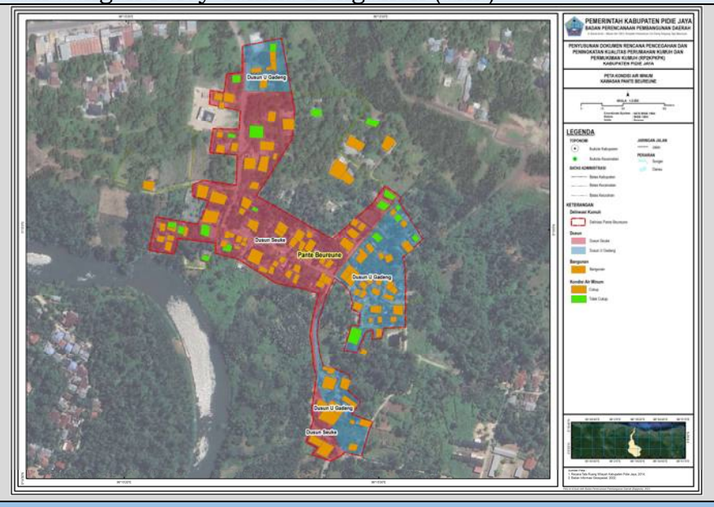




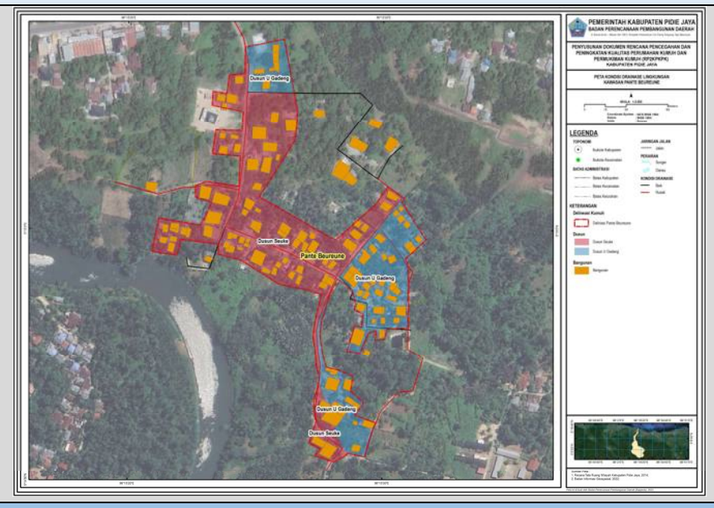
BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	91
Jumlah RTLH (unit)	2
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	81
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	2



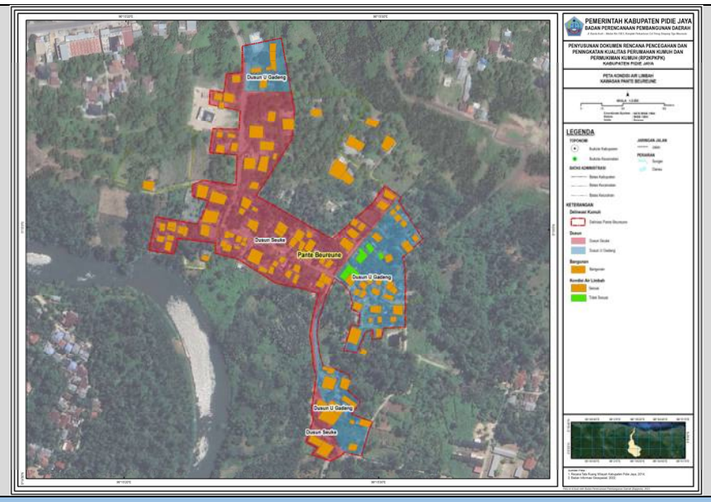
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	1.146,61
Panjang Jalan Eksisting (m)	1.146,61
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	962,20



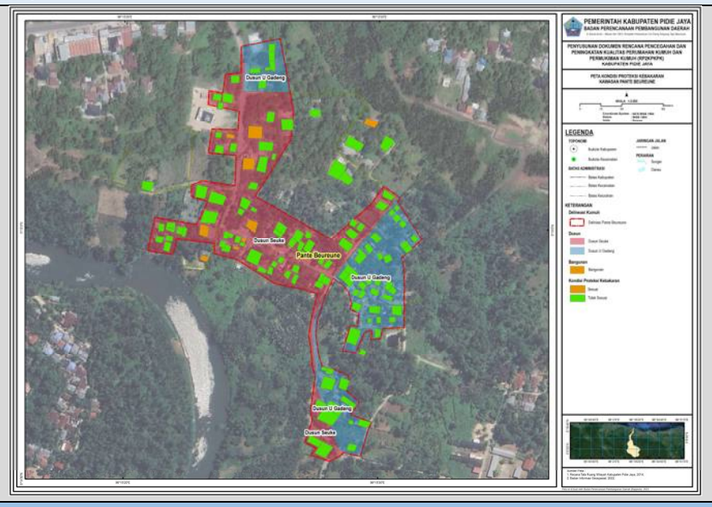
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	121
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	47
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	11



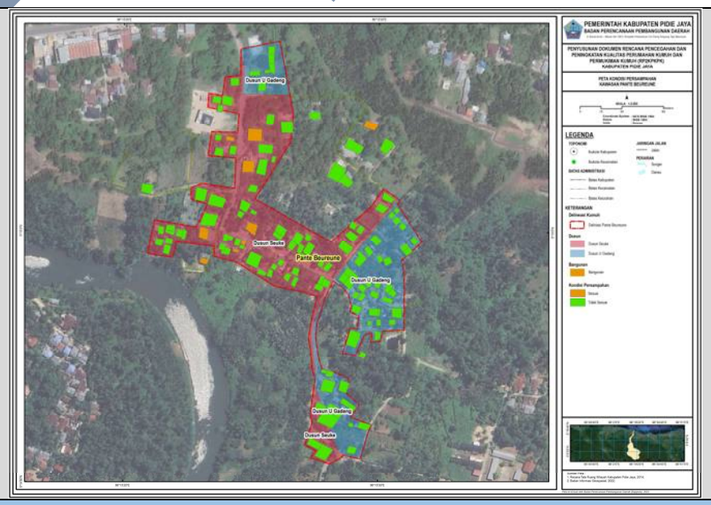
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
Panjang Drainase Ideal (m)	371,06
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	77,37
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	293,70
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	30,57



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	121,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

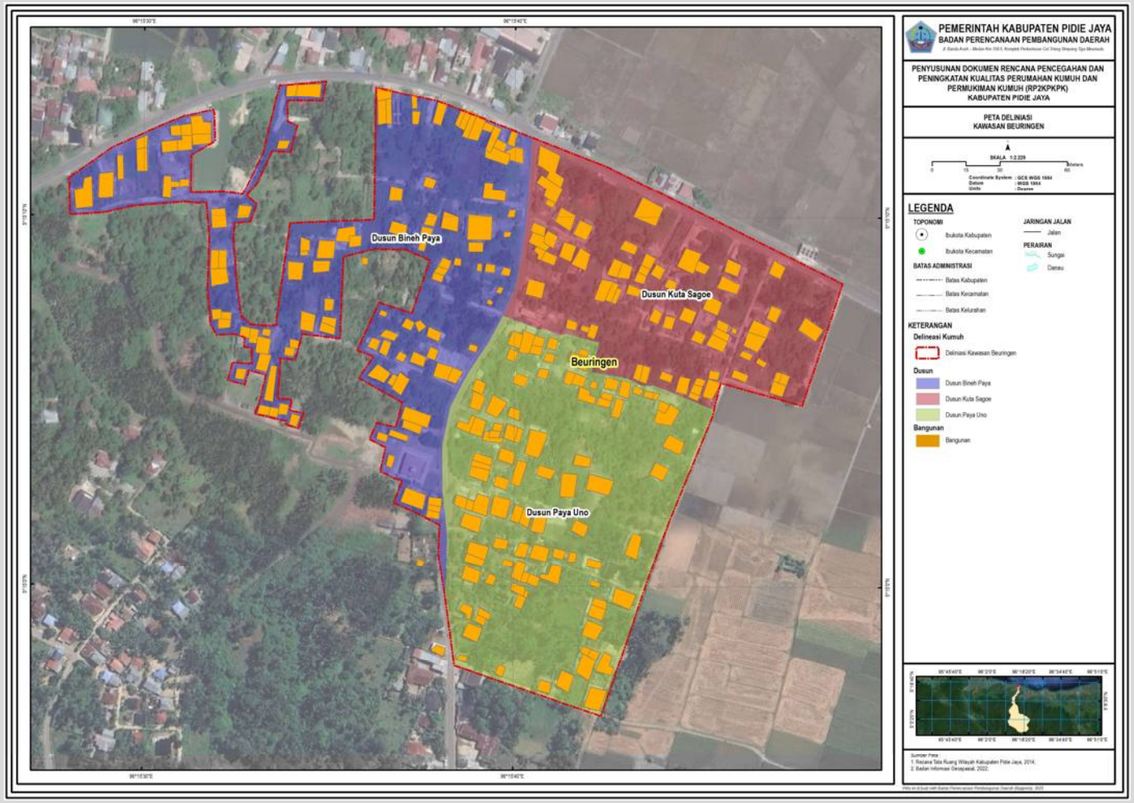


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	91,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	91



KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	121,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	121
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	115

36. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua*

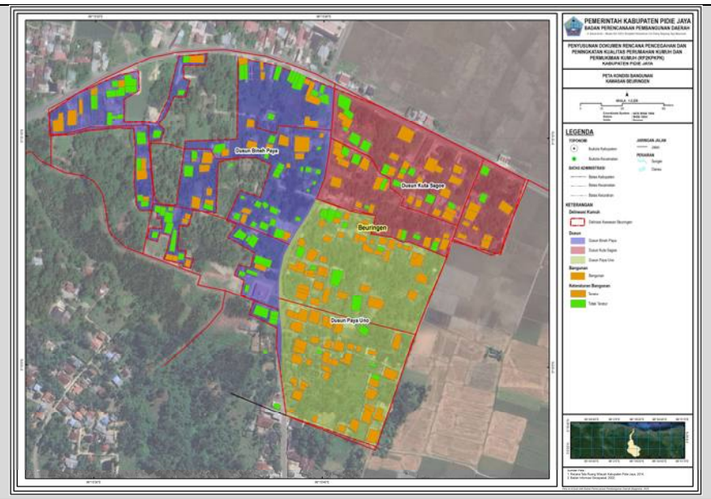


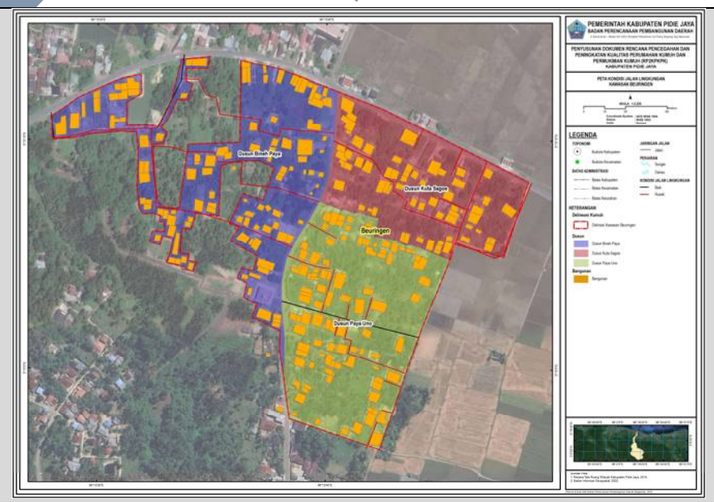
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Beuringen	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Beuringen	1	Beuringen	Bineh Paya	4,91	Kumuh Sedang
Kecamatan	Meurah Dua	2	Beuringen	Paya Unok	5,01	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidei Jaya	3	Beuringen	Kuta Sagoe	3,70	Kumuh Sedang
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	13,62					
KOORDINAT						
Latitude	5,116179					
Longitude	97,205079					
Jumlah Bangunan	204,00					
Jumlah Penduduk	845,00					
Jumlah Kk	245,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

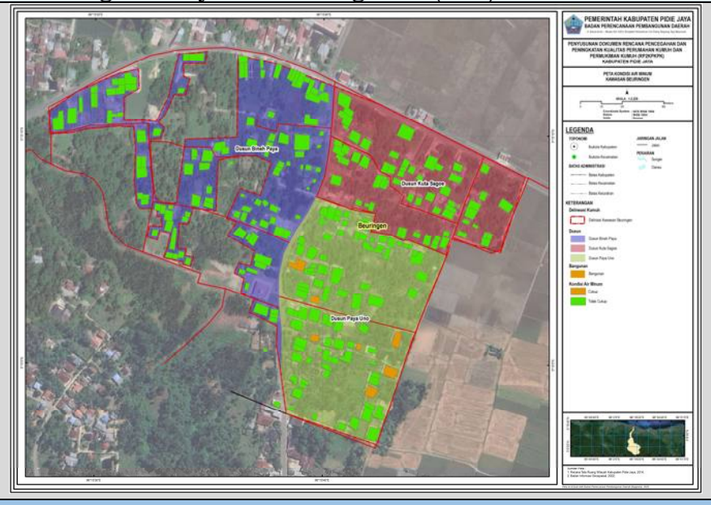
PERMASALAHAN UTAMA
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan
Proteksi Kebakaran
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan

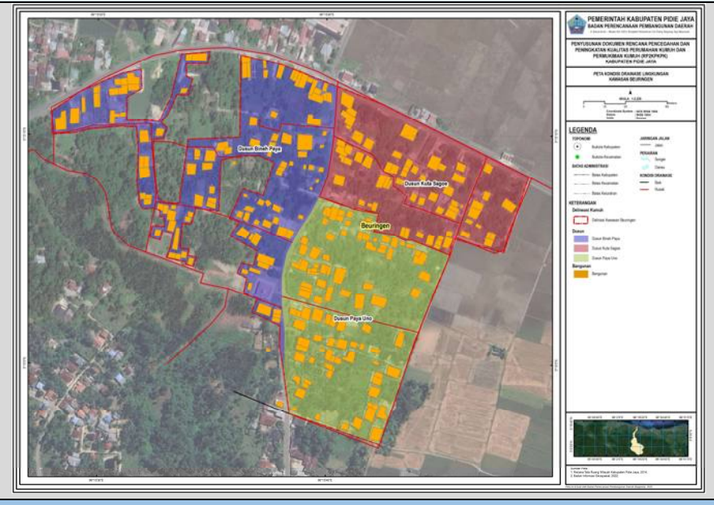




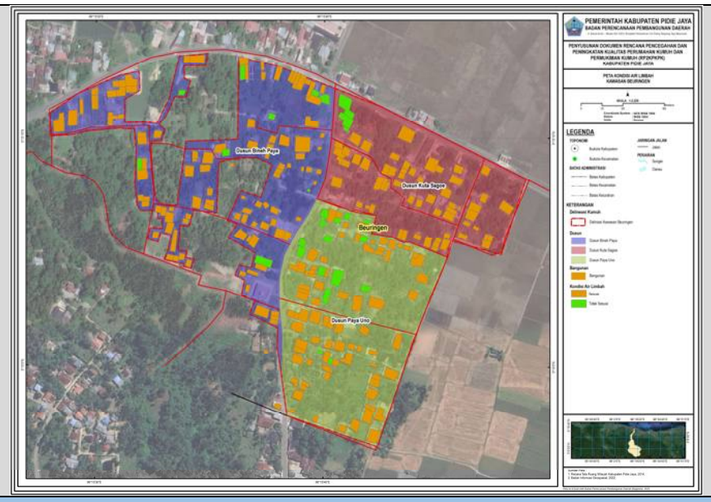


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	204	Panjang Jalan Ideal (m)	2.397,75
Jumlah RTLH (unit)	56	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.000,55
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	203	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	397,21
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.717,96
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	56		

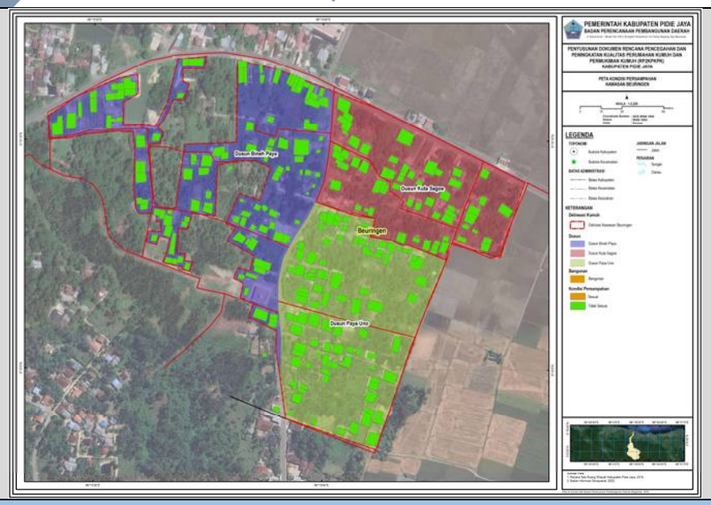




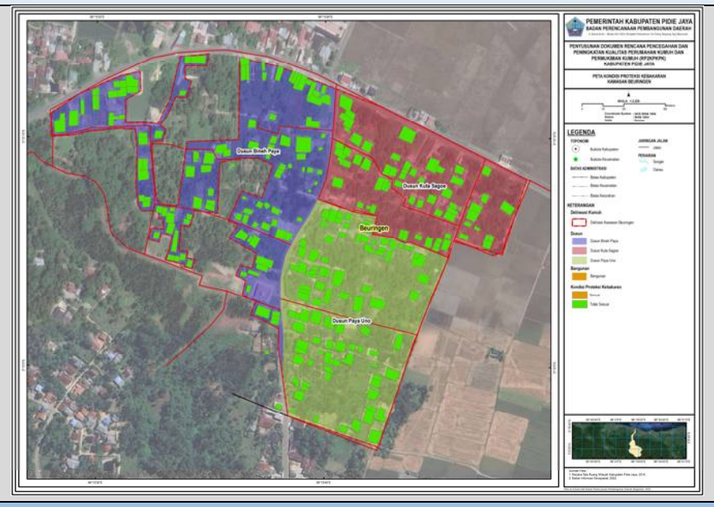
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	245	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	222	Panjang Drainase Ideal (m)	2363,03
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	236	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2065,70
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	297,34
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	2065,70



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	245,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	28
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	28

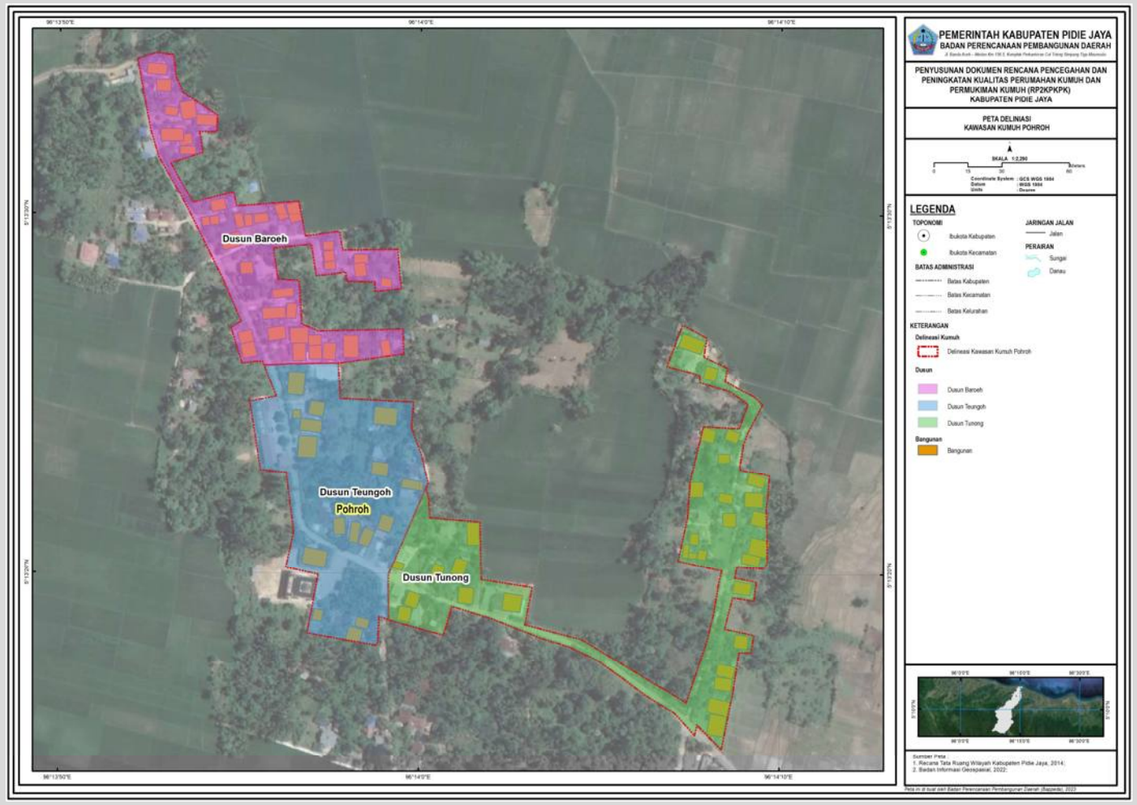


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	245,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	245
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	245



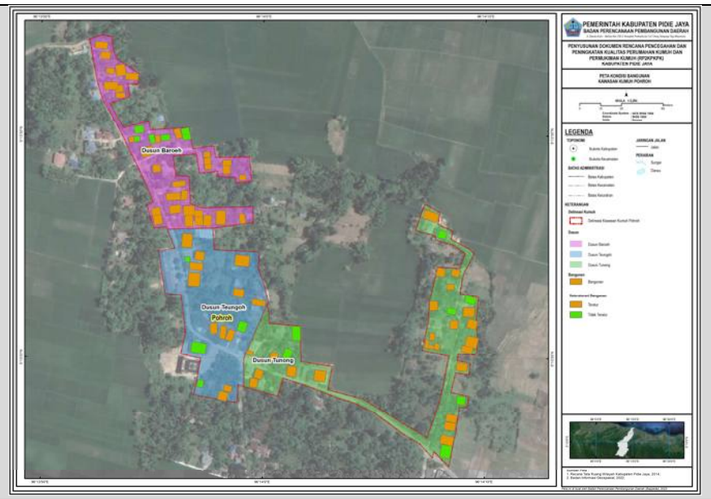
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	204,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	204

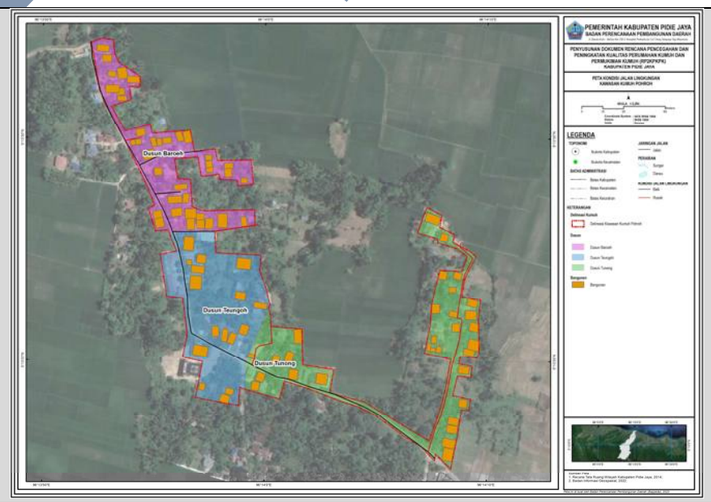
37. Profil Permukiman Kumuh Gampong Pohroh Kecamatan Meureudu



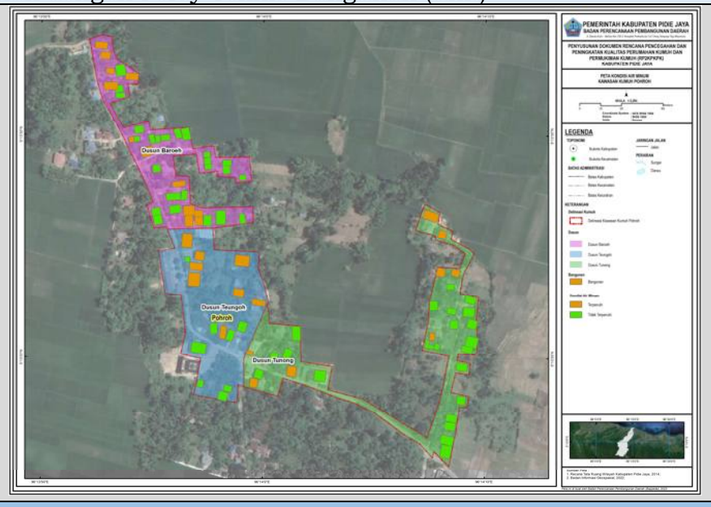
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Pohroh	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Pohroh	1	Pohroh	Baroh	1.75	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Pohroh	Dusun Tengoh	2.26	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Pohroh	Dusun Tunong	2.23	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,24					
KOORDINAT						
Latitude	5.222661					
Longitude	96.232960					
Jumlah Bangunan (Unit)	86.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	359.00					
Jumlah Kk	121.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Proteksi Kebakaran						
Kondisi Penyediaan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase						

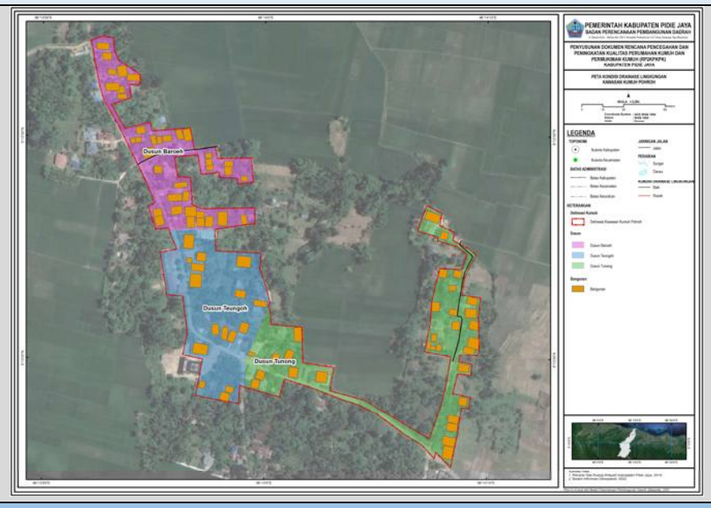




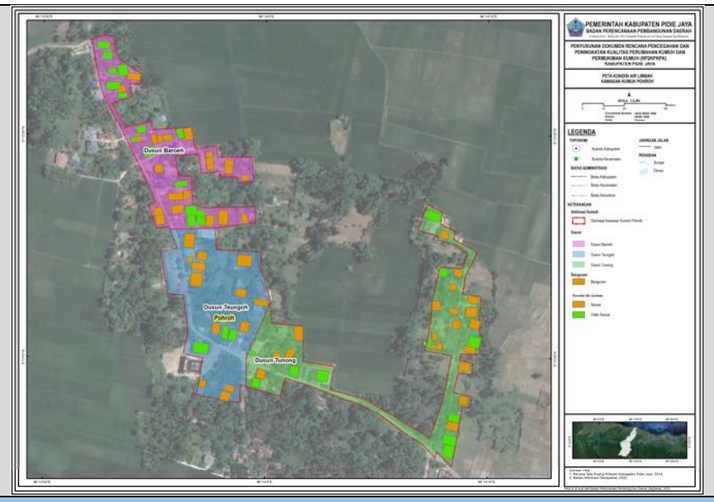


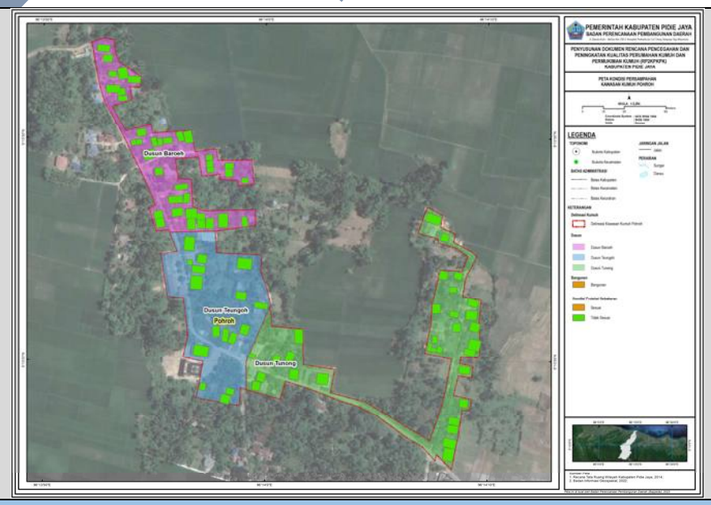
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	86	Panjang Jalan Ideal (m)	2,351.12
Jumlah RTLH (unit)	8	Panjang Jalan Eksisting (m)	2,351.12
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	0	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	923.92
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	8		





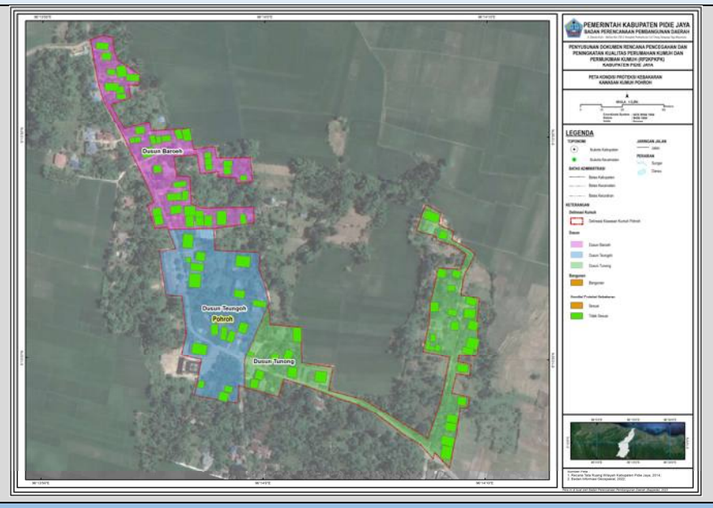
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	121	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	68	Panjang Drainase Ideal (m)	1096.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	78	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	553.63
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	542.37
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	2.43





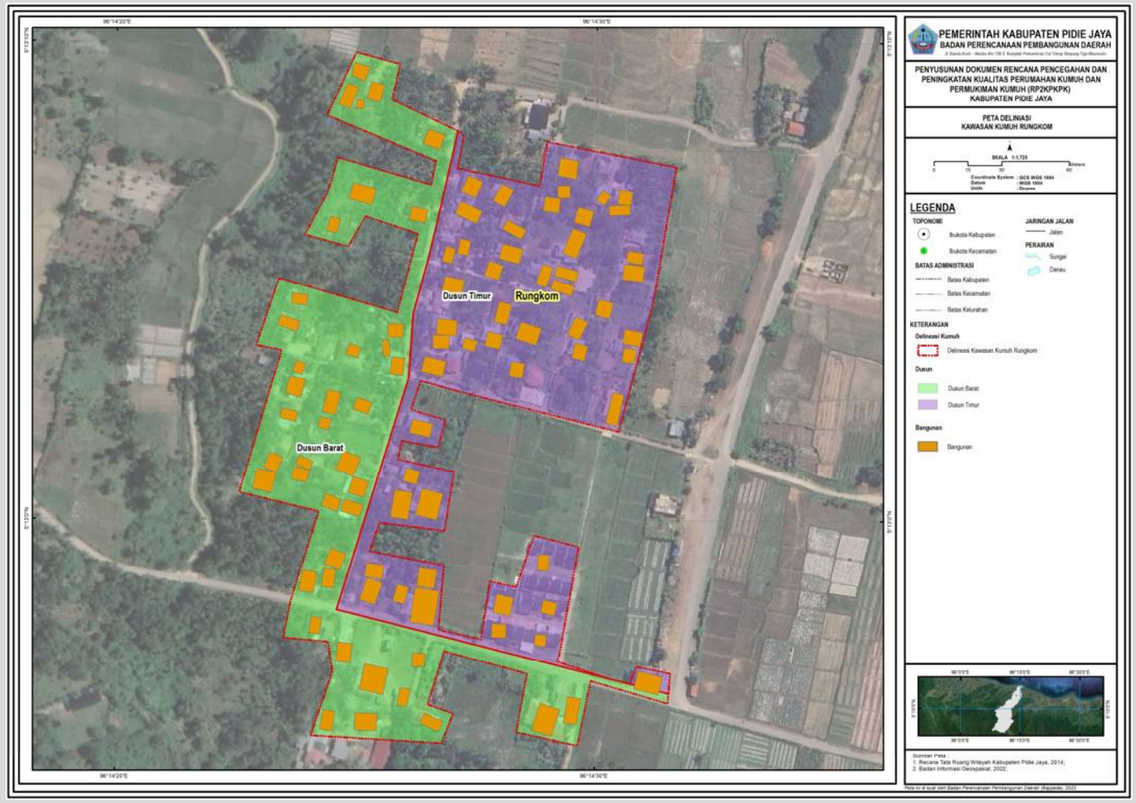
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	121.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	14
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	14

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	121.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	121
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	121



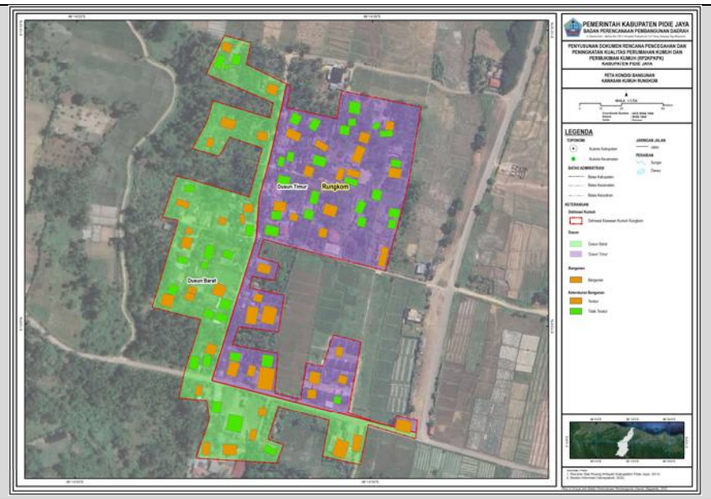
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	86.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	86
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	86

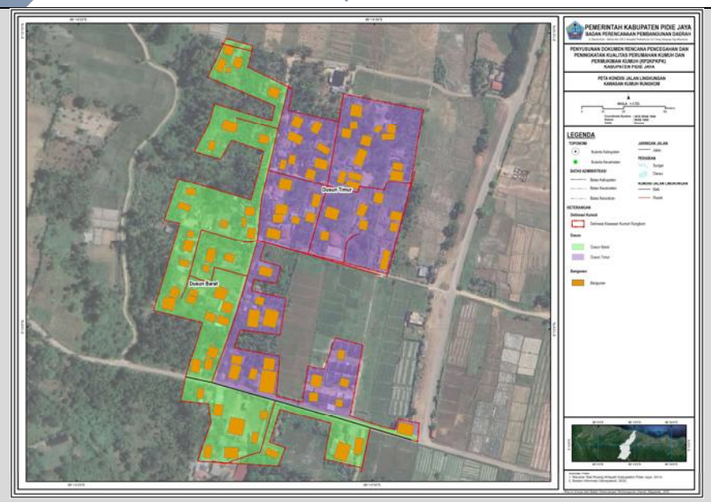
38. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu*



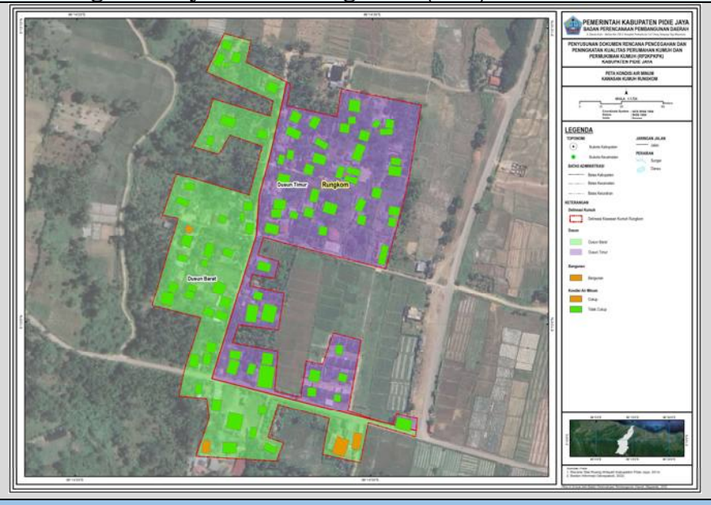
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Rungkom	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Rungkom	1	Rungkom	Dusun Timur	3.26	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Rungkom	Dusun Barat	2.90	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,16					
KOORDINAT						
Latitude	5.2178689					
Longitude	96.241318					
Jumlah Bangunan (Unit)	101.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	401.00					
Jumlah Kk	106.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Prokteksi Kebakaran						
Kondisi Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Penyediaan Air Minum						
Ketidaktersediaan Drainase						

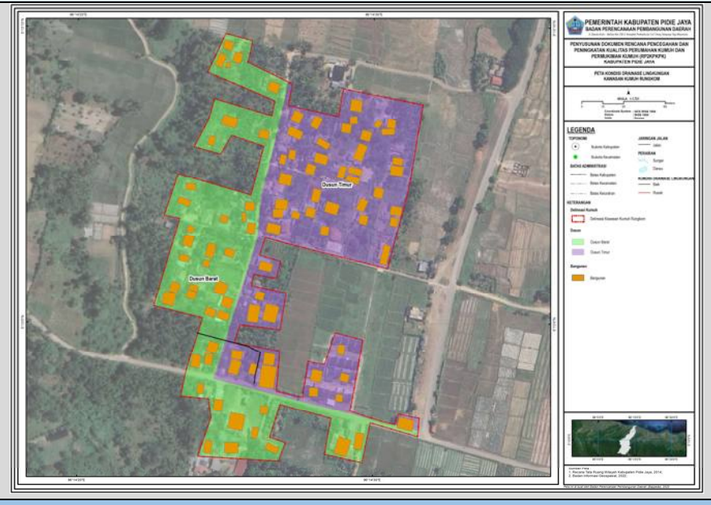




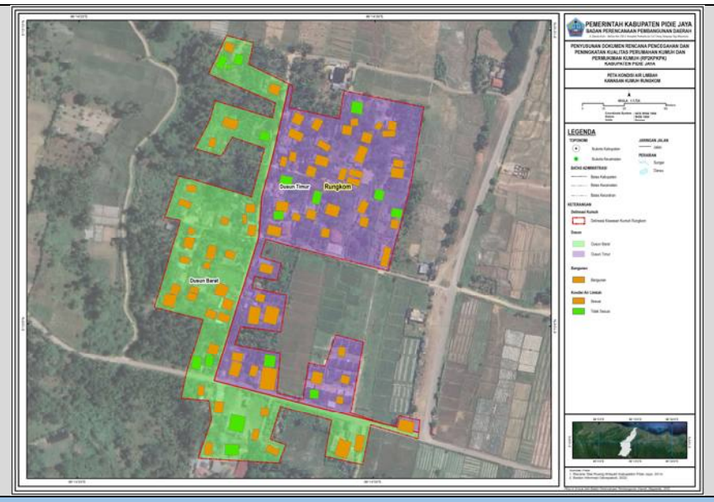


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	101	Panjang Jalan Ideal (m)	1,574.73
Jumlah RTLH (unit)	37	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,574.73
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	9	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,375.14
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	37		

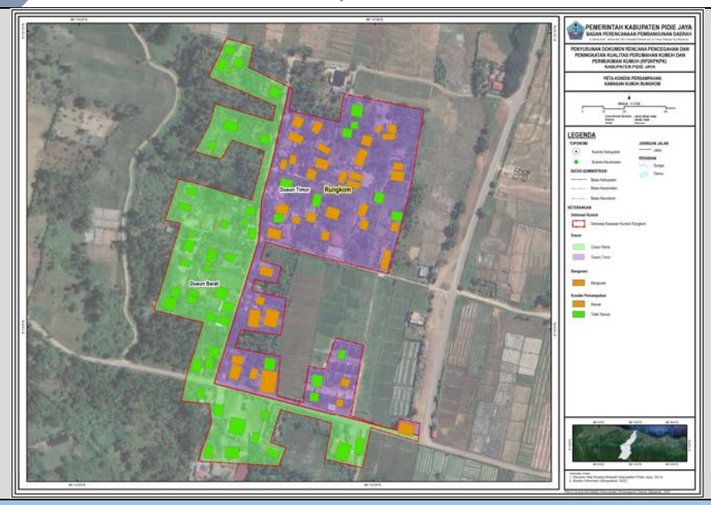




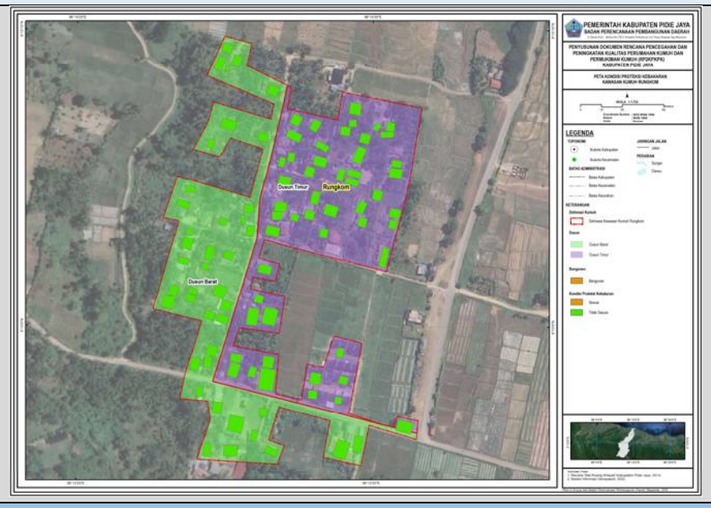
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	106	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	104	Panjang Drainase Ideal (m)	1574.73
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	102	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	101.66
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	1473.07
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	0.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	106.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	19
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	19

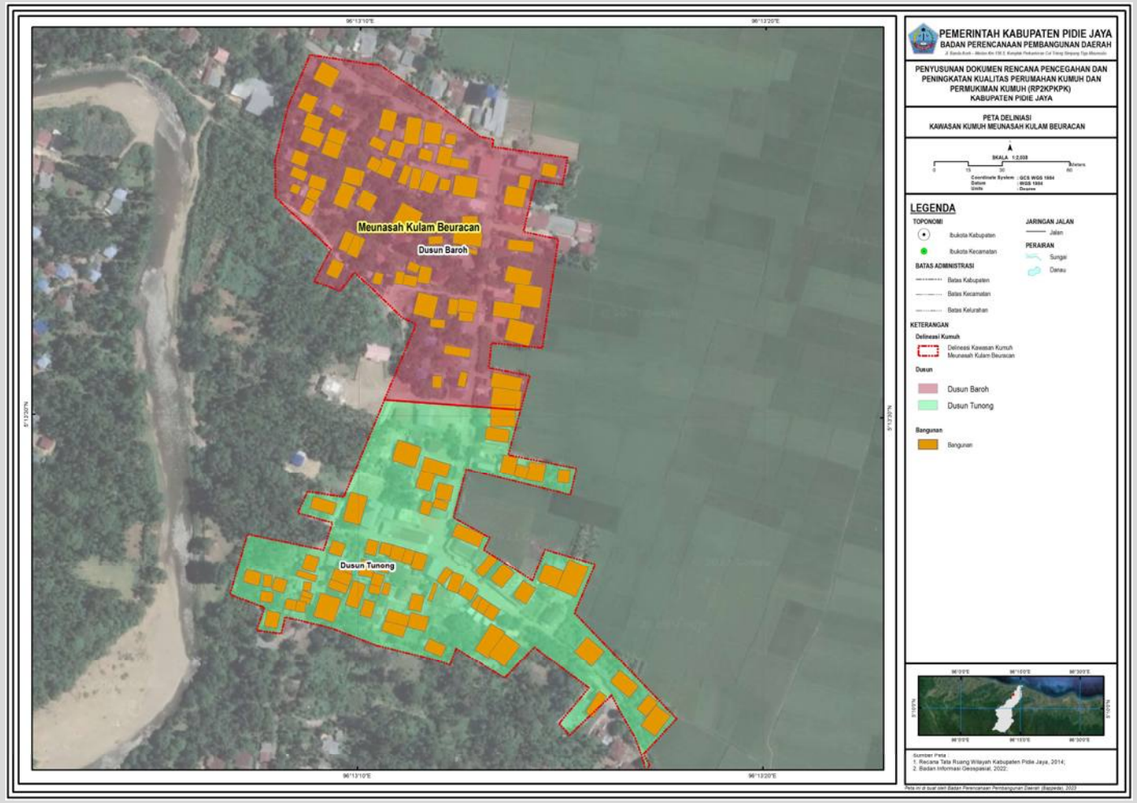


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	106.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	106
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	103



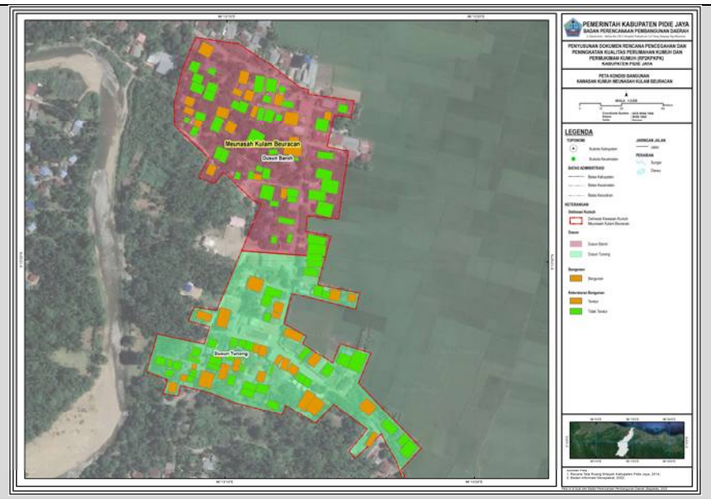
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	101.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	101
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	101

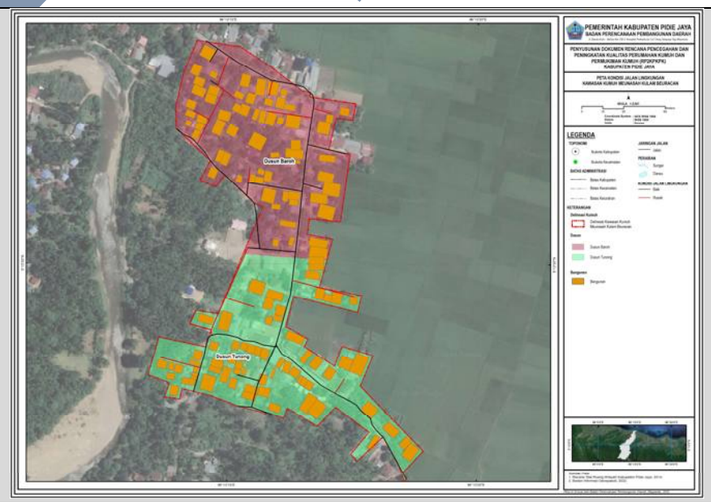
39. Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Kulam Beuracan Kecamatan Meureudu



INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Mns. Kulam Beuracan	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Mns. Kulam Beuracan	1	Mns Kulam Beuracan	Dusun Tunong	3.53	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Mns Kulam Beuracan	Dusun Baroh	3.61	Kumuh Sedang
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	7,14					
KOORDINAT						
Latitude	5.2251724					
Longitude	96.220020					
Jumlah Bangunan (Unit)	131.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	446.00					
Jumlah Kk	148.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Proteksi Kebakaran						
Kondisi Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Penyediaan Air Minum						
Kondisi Bangunan Gedung Tidak Sedir						

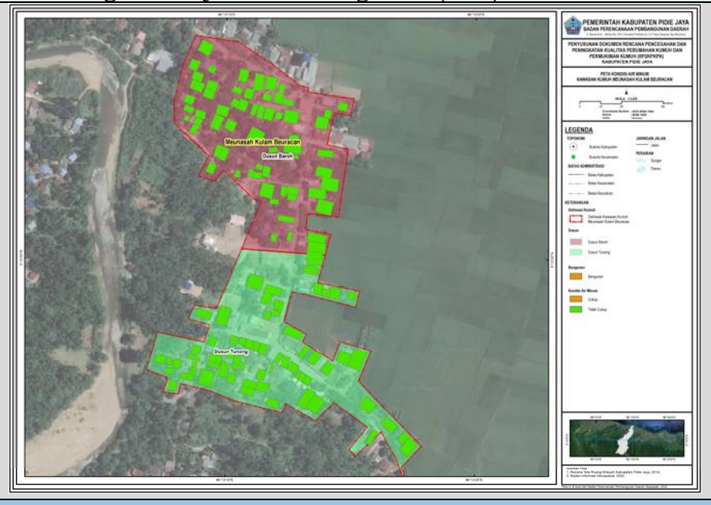


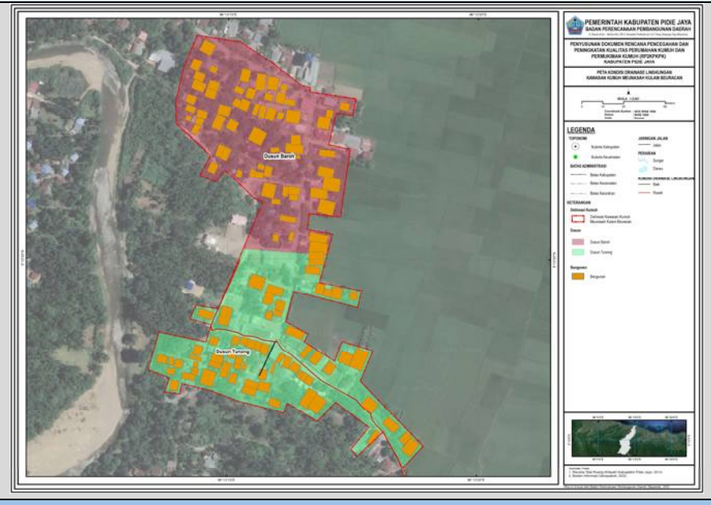




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	131
Jumlah RTLH (unit)	84
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	62
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	84

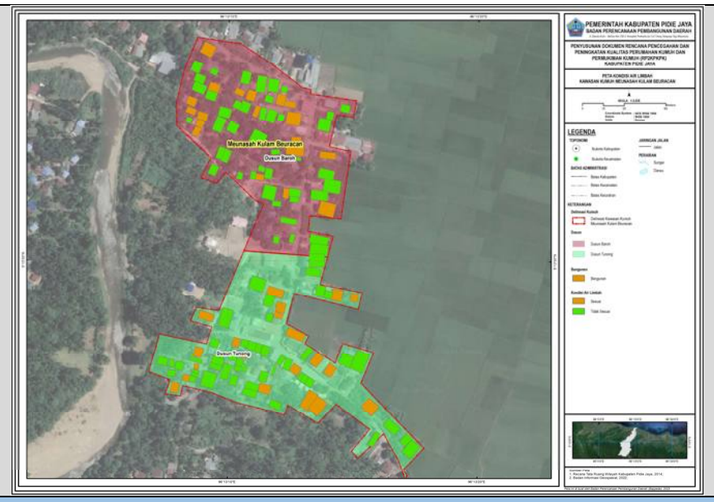
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	1,993.85
Panjang Jalan Eksisting (m)	1,993.85
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	631.60



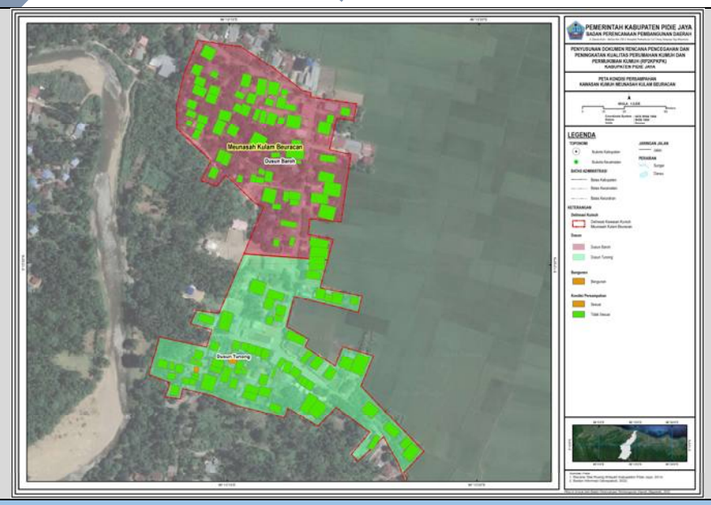


KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	148
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	146
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	148

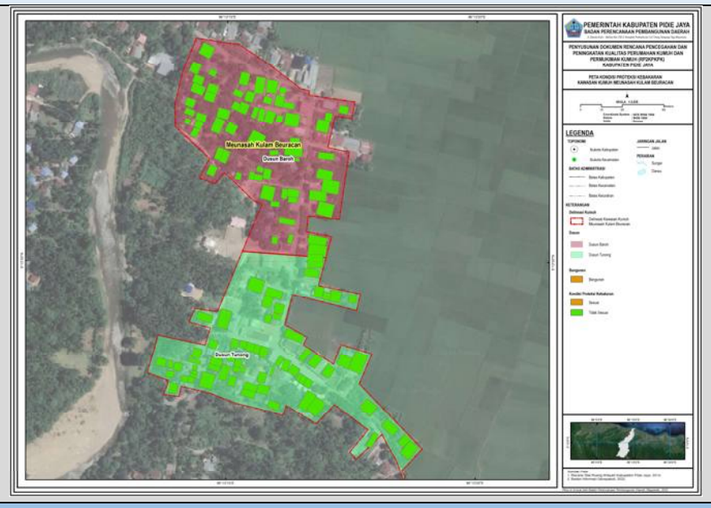
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	1165.65
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	431.56
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	734.09
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	0.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	148.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	37
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	37

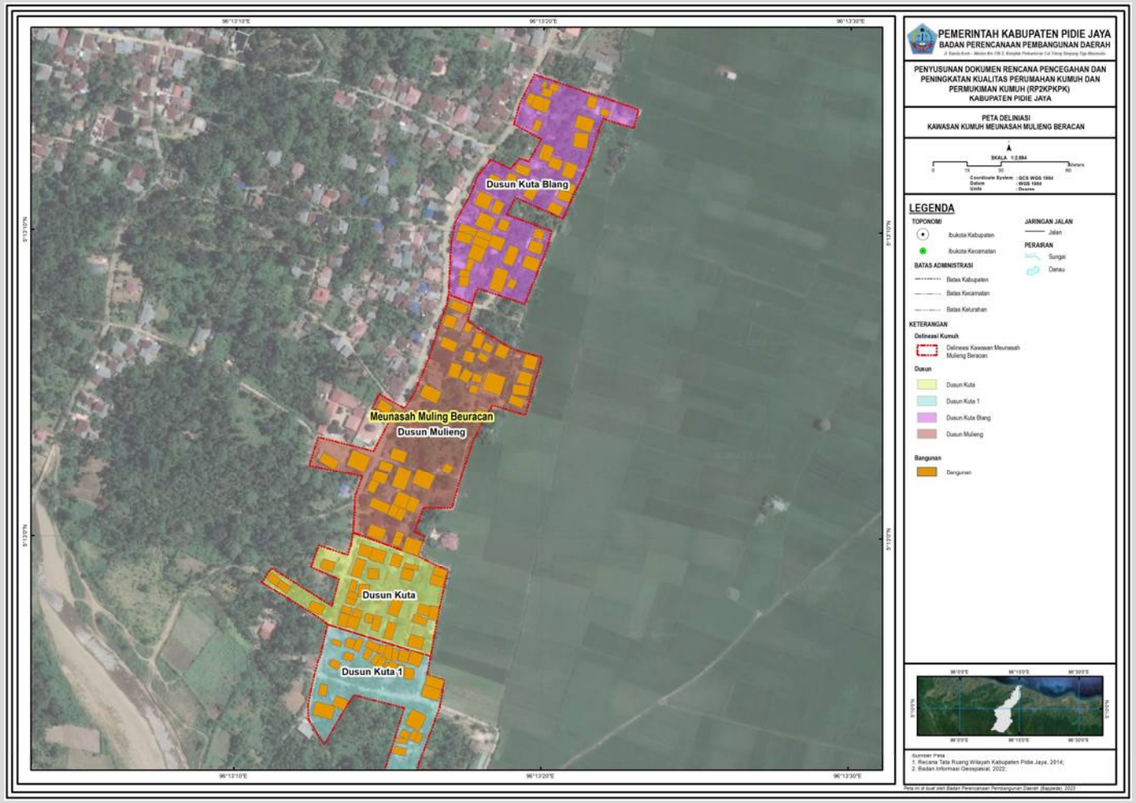


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	148.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	148
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	144



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	131.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	131
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	131

40. Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Mulieng Beuracan Kecamatan Meureudu

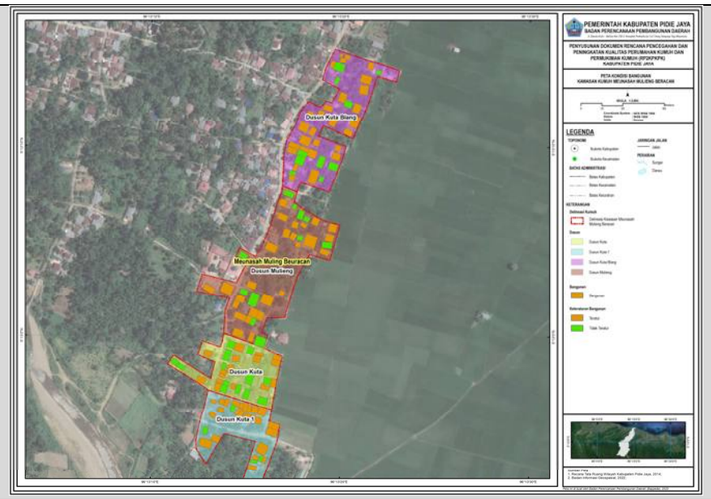


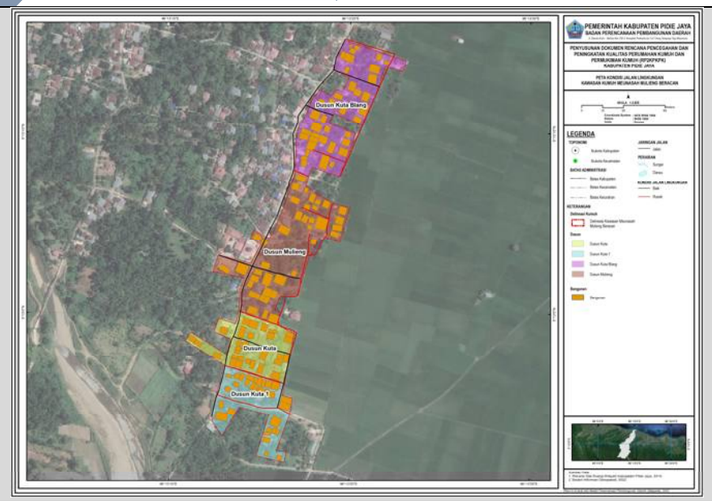
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Mns. Mulieng Beuracan	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Mns. Mulieng Beuracan	1	Mulieng	Mulieng	2.30	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Mulieng	Kuta Blang	1.87	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Mulieng	Kuta I	1.13	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Mulieng	Kuta Ii	1.17	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,48					
KOORDINAT						
Latitude	5.217583					
Longitude	96.220717					
Jumlah Bangunan	113.00					
Jumlah Penduduk	473.00					
Jumlah Kk	136.00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

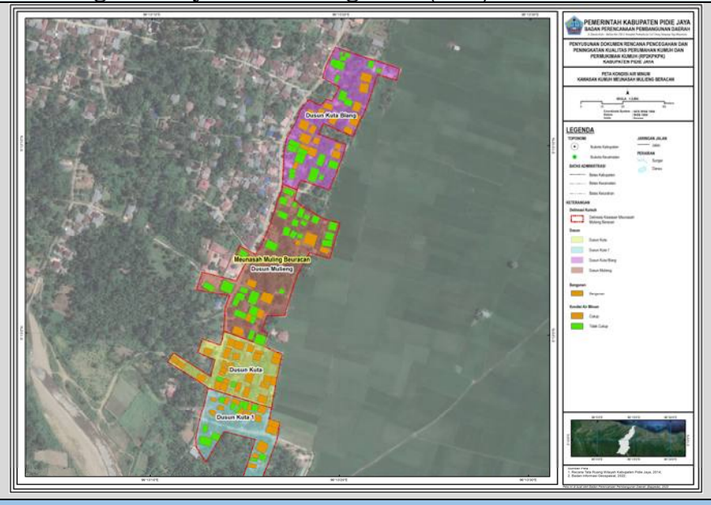
PERMASALAHAN UTAMA
Kondisi Proteksi Kebakaran
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis

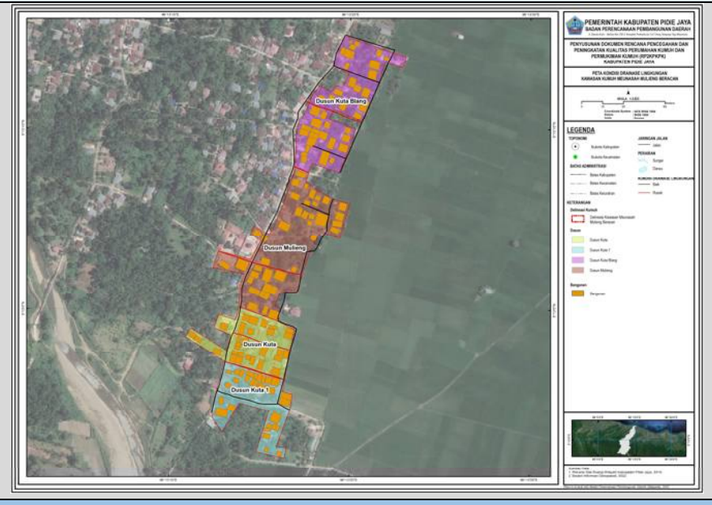




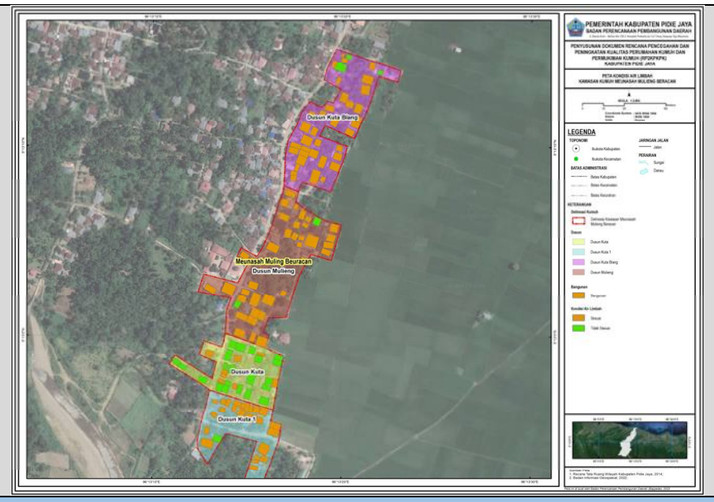


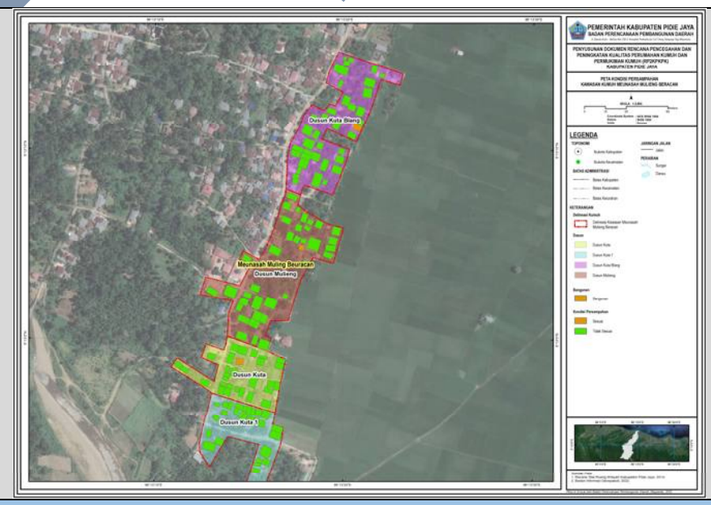
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	113	Panjang Jalan Ideal (m)	1,418.02
Jumlah RTLH (unit)	18	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,418.02
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	74	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	639.91
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	18		





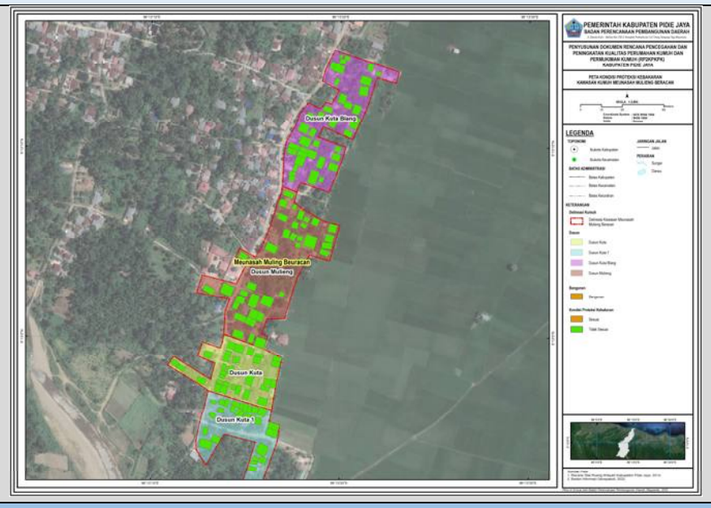
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	136	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	65	Panjang Drainase Ideal (m)	1287.31
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	107	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1287.31
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	419.70





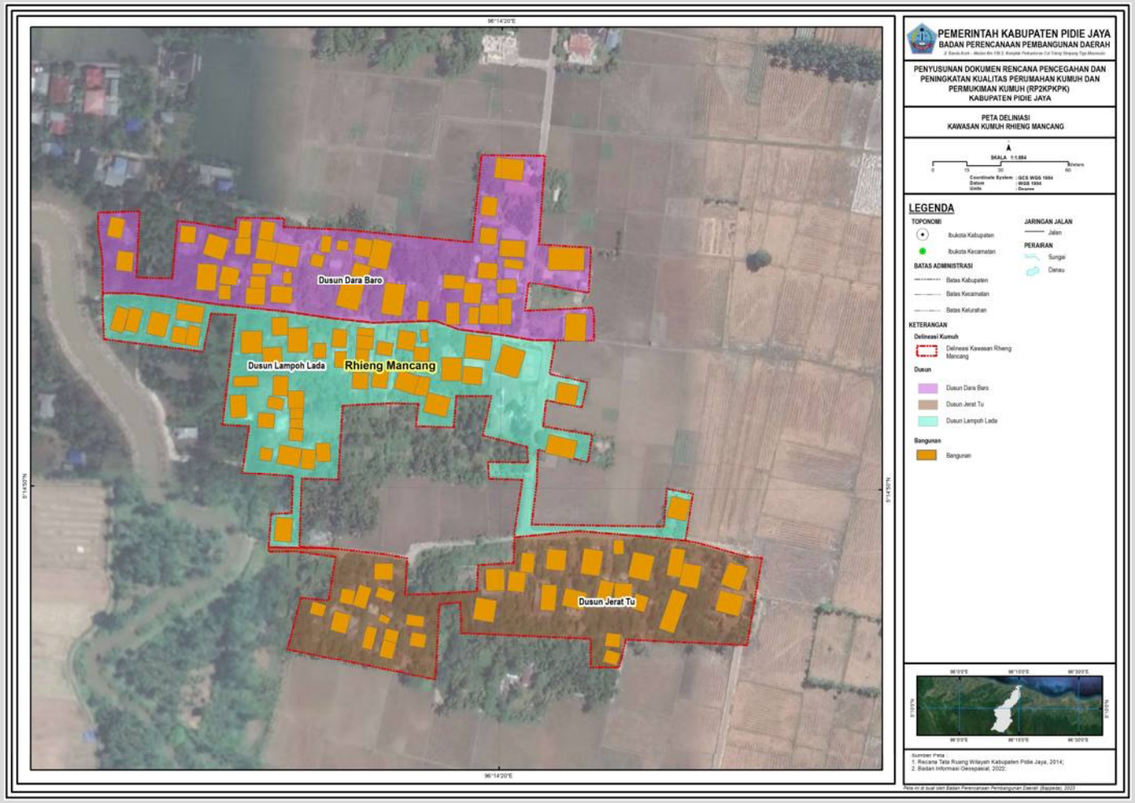
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	136.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	28
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	28

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	136.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	136
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	136



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	113.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	113
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	113

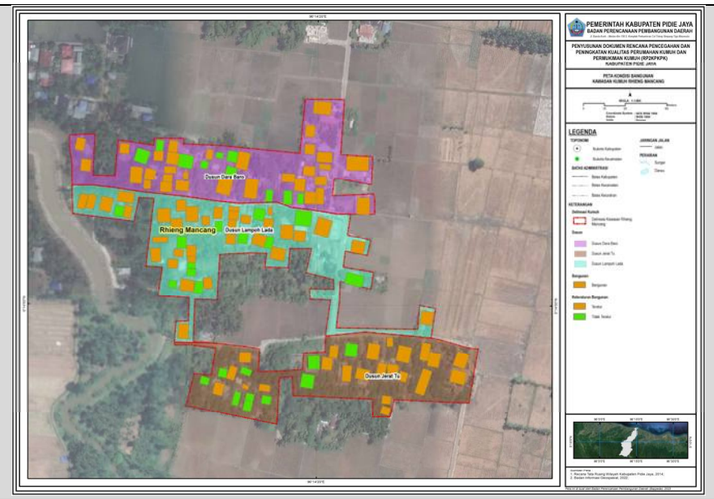
41. Profil Permukiman Kumuh Gampong Rhieng Mancang Kecamatan Meureudu

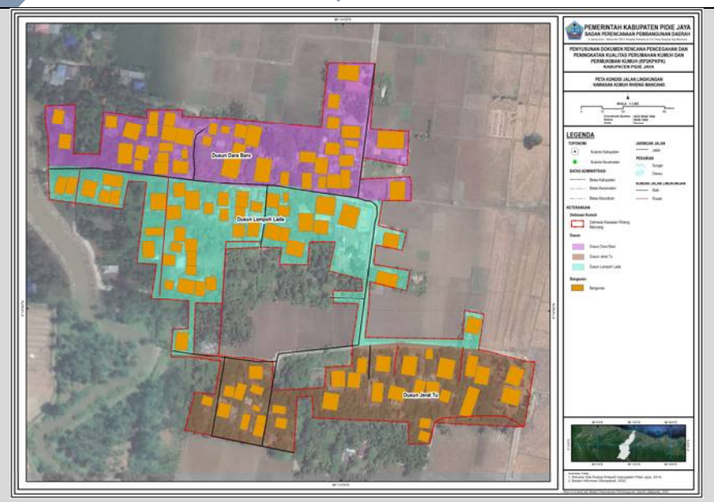


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Rhieng Mancang	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Rhieng Mancang	1	Rhieng Mancang	Dusun Dara Baroe	1.94	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Rhieng Mancang	Dusun Lampoh Lada	1.76	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Rhieng Mancang	Dusun Jerat Tu	1.66	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	5,36					
KOORDINAT						
Latitude	5.248122					
Longitude	96.237696					
Jumlah Bangunan (Unit)	107,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	479,00					
Jumlah Kk	118,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan	
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan	

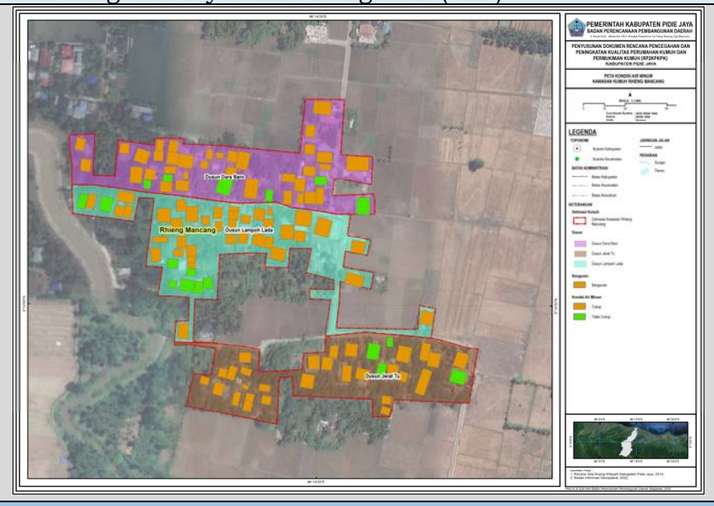


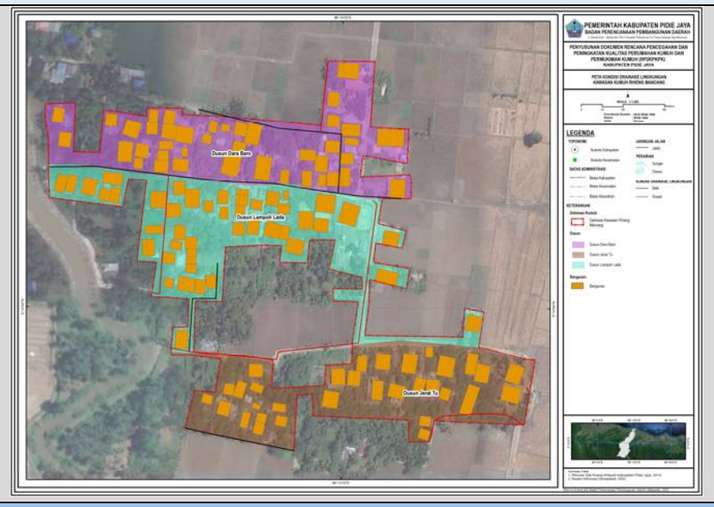




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	119
Jumlah RTLH (unit)	18
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	66
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	18

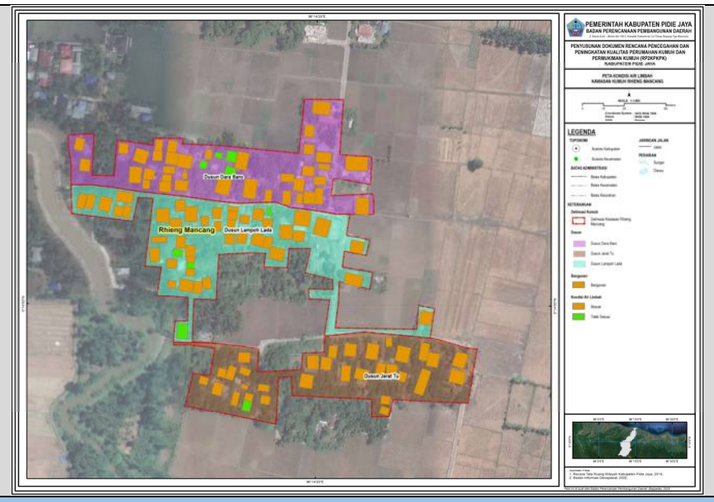
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	1,603.33
Panjang Jalan Eksisting (m)	1,603.33
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	388.56



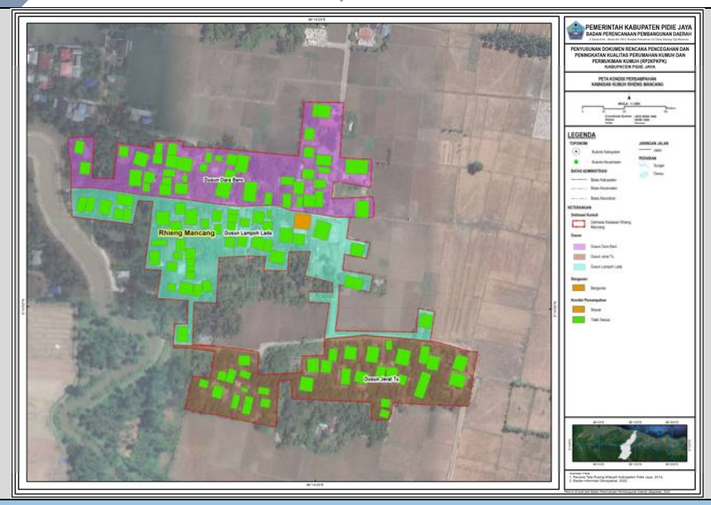


KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	136
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	6
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	20

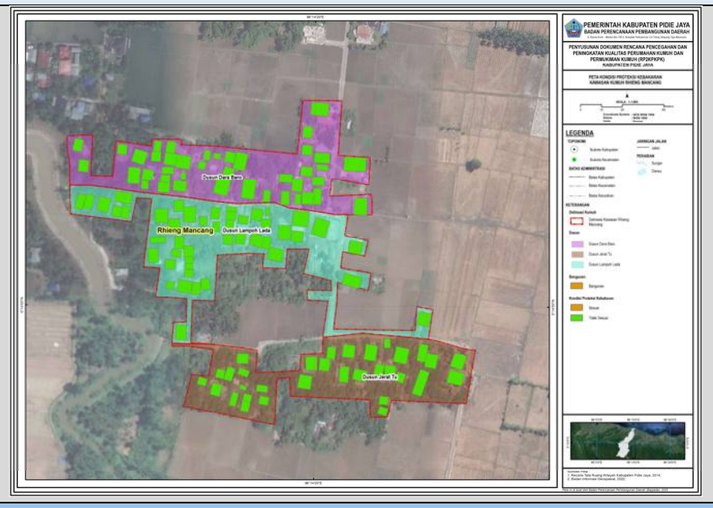
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	1481.78
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	769.52
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	712.26
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	209.68



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	136.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	9
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	9

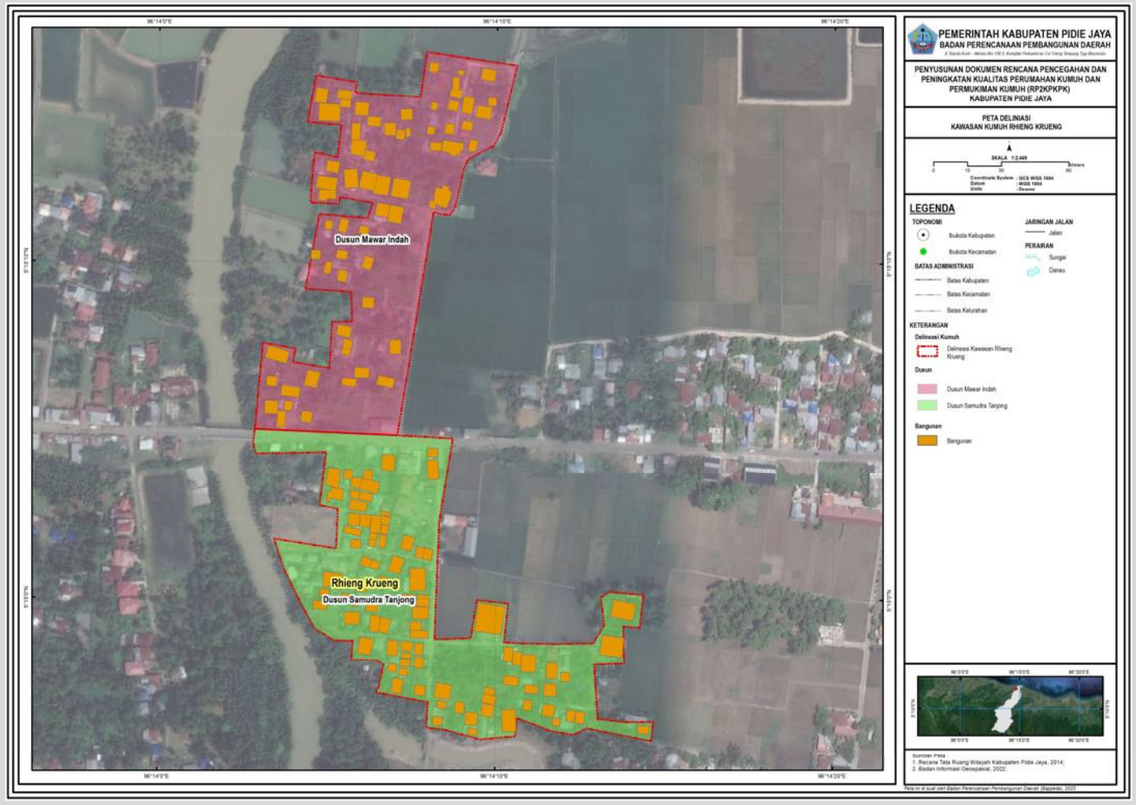


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	136.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	136
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	134



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	119.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	119
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	119

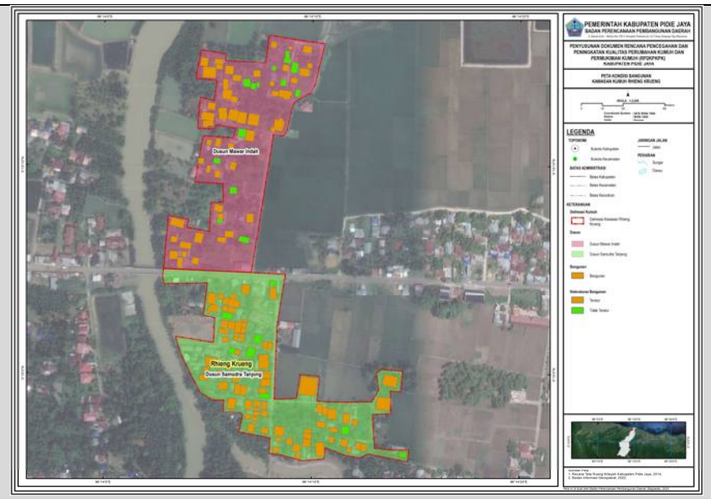
42. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Rhieng Krueng Kecamatan Meureudu*

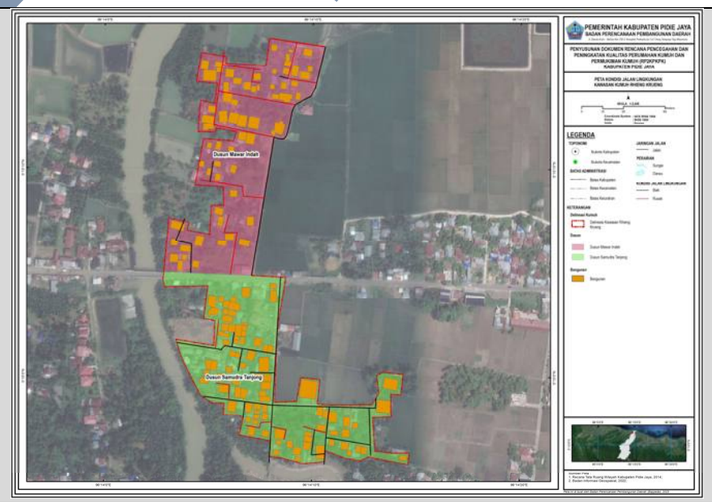


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Rhieng Krueng	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Rhieng Krueng	1	Rhieng Krueng	Samudra Tanjong	4.21	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Rhieng Krueng	Mawar Indah	3.93	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	8,14					
KOORDINAT						
Latitude	5.251589					
Longitude	96.23518					
Jumlah Bangunan (Unit)	150.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	674.00					
Jumlah Kk	182.00					

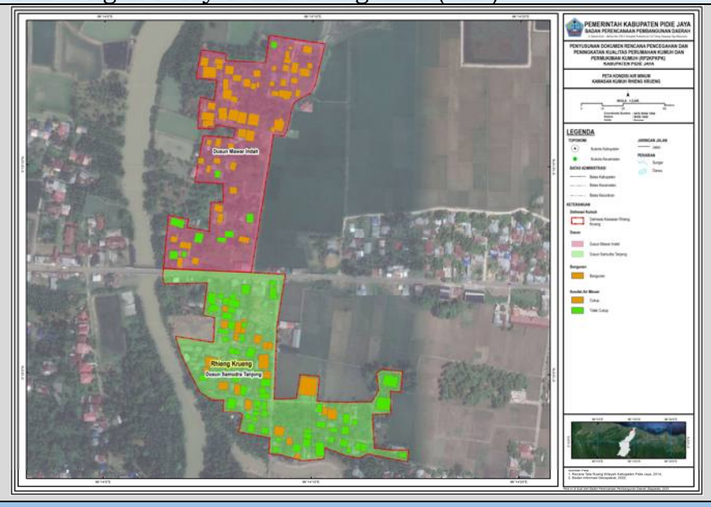
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Kondisin Pengelolaan Persampahan	
Ketidakteraturan Bangunan	
Kondisi Kualitas Konstruksi Drainase	

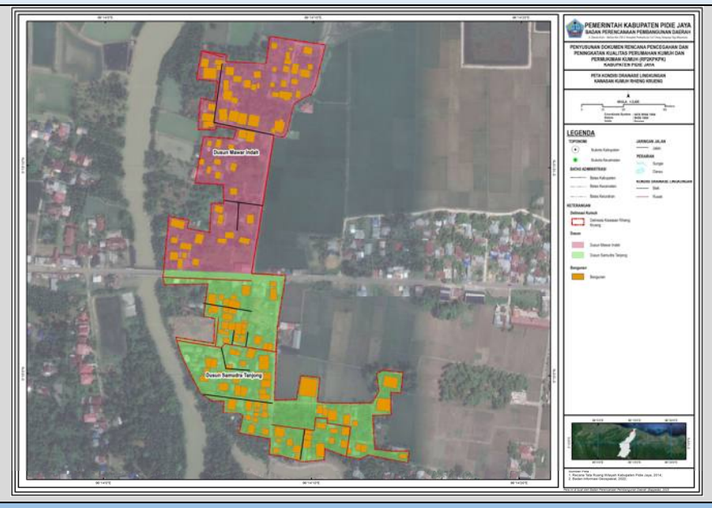




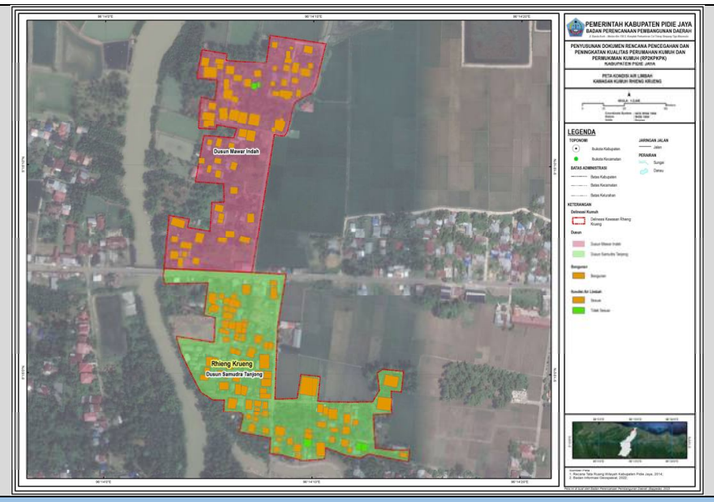


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	150	Panjang Jalan Ideal (m)	2,851.13
Jumlah RTLH (unit)	2	Panjang Jalan Eksisting (m)	2,851.13
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	121	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,170.19
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	2		

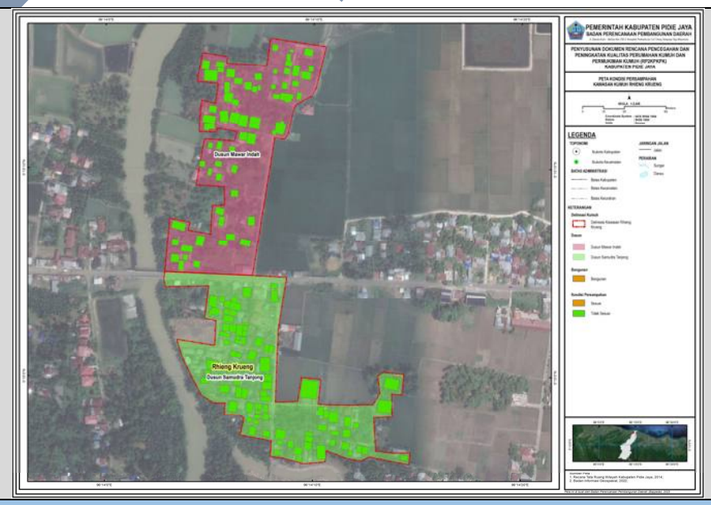




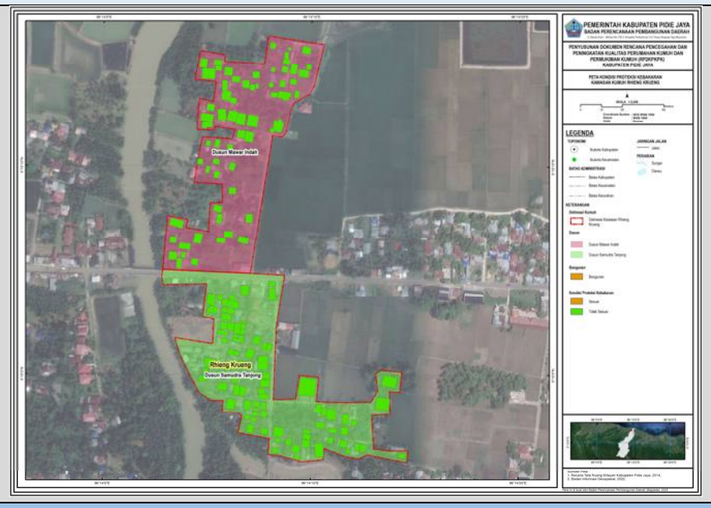
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	182	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	61	Panjang Drainase Ideal (m)	1413.65
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	87	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1413.65
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	801.90



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	182.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	4
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	4

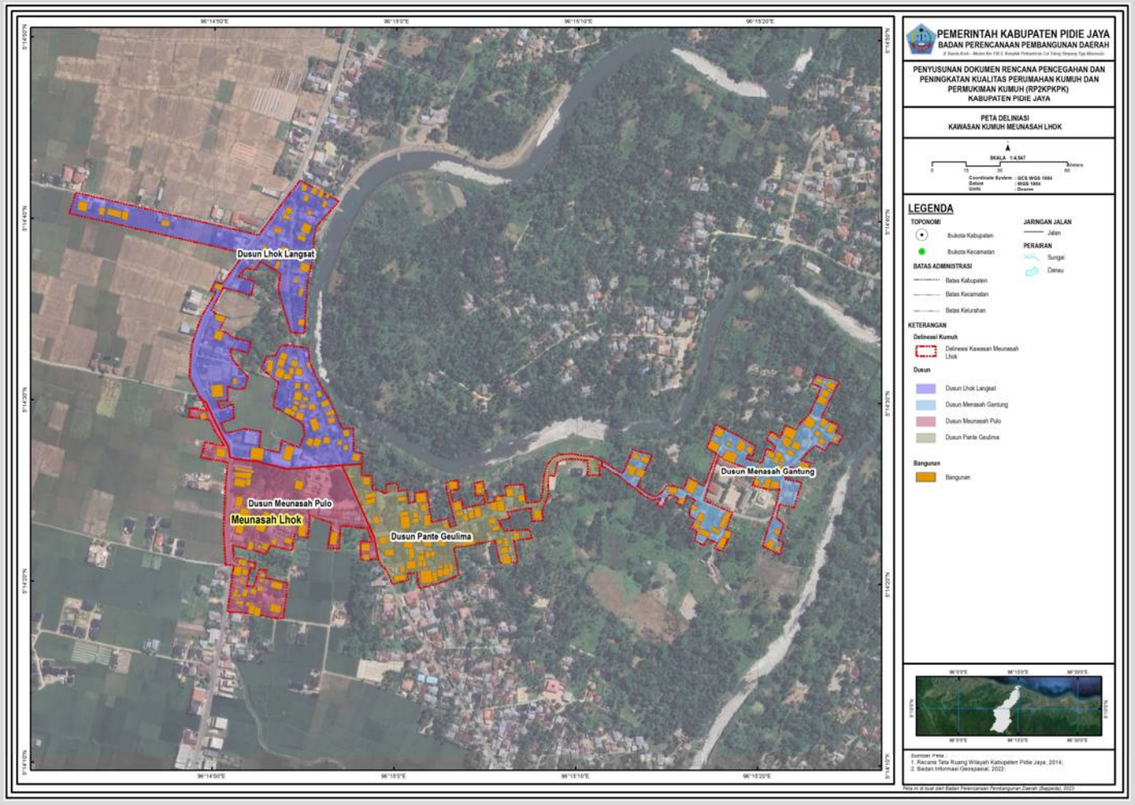


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	182.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	182
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	182



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	150.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	150
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	150

43. Profil Permukiman Kumuh Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu



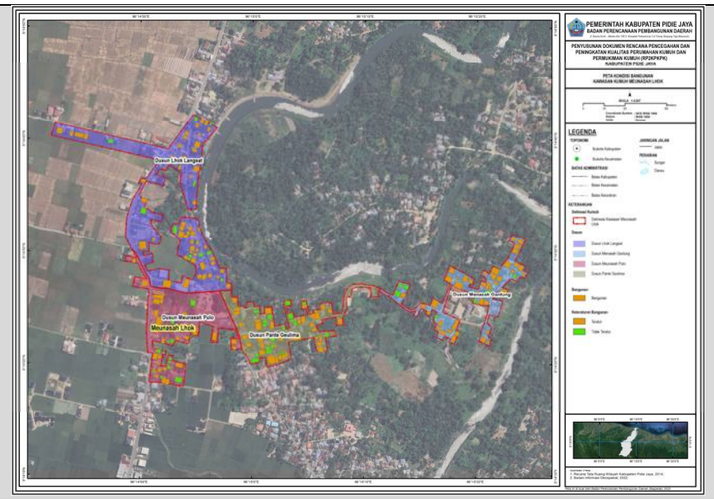
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Mns. Lhok	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Mns. Lhok	1	Meunasah Lhok	Pante Geulima	2.60	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Meunasah Lhok	Lhok Langsat	6.39	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Meunasah Lhok	Pulo	3.86	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Meunasah Lhok	Gantung	2.60	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	15,45					
KOORDINAT						
Latitude	5.2407815					
Longitude	96.249174					
Jumlah Bangunan (Unit)	222.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	981.00					
Jumlah Kk	283.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Pengelolaan Pengelolaan Persampahan						
Kondisi Ketidakteraturan Bangunan						
Proteksi Kebakaran						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

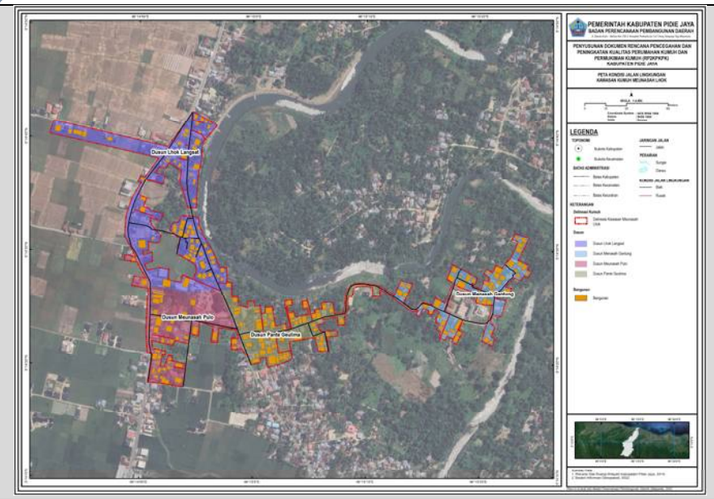




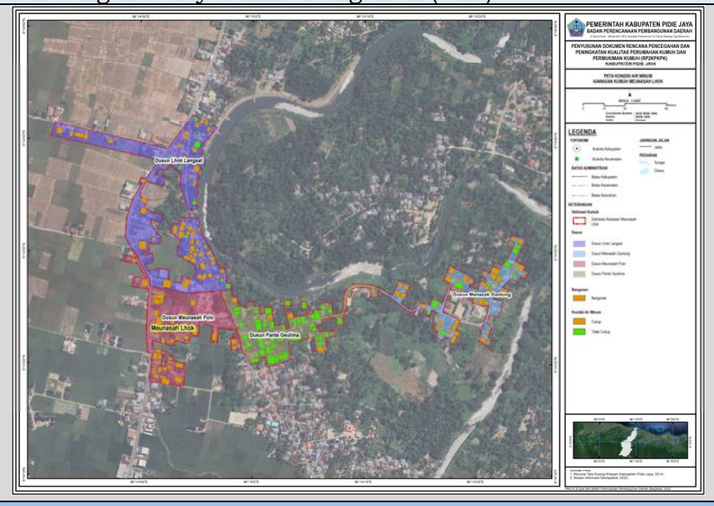


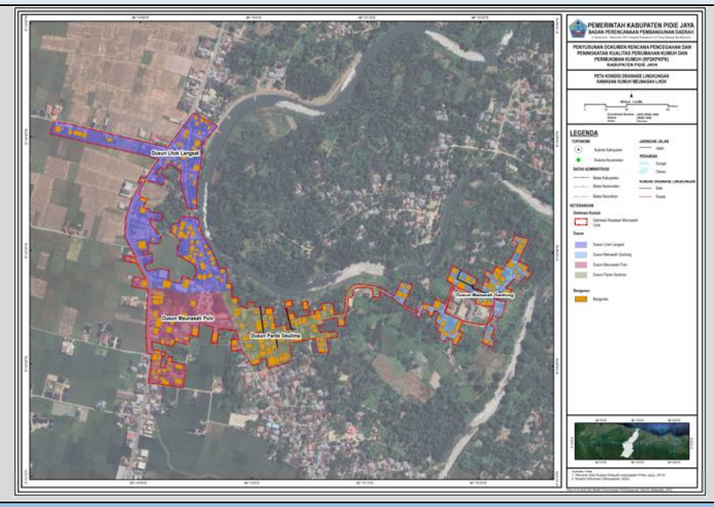




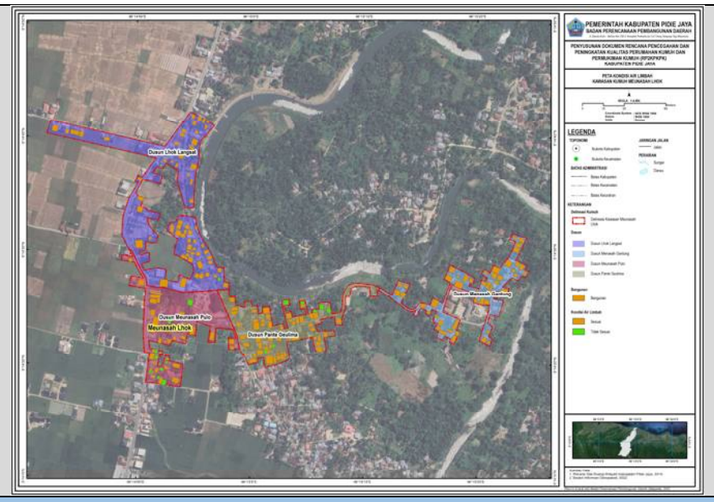


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	222	Panjang Jalan Ideal (m)	4,327.29
Jumlah RTLH (unit)	21	Panjang Jalan Eksisting (m)	4,327.29
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	82	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	961.79
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	21		

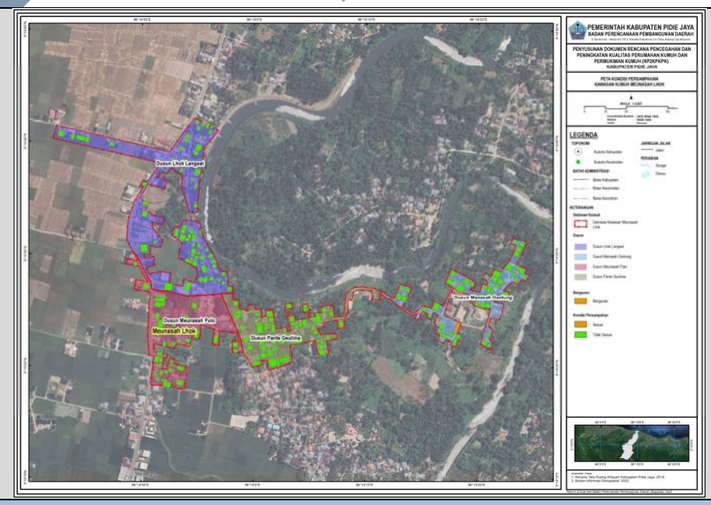




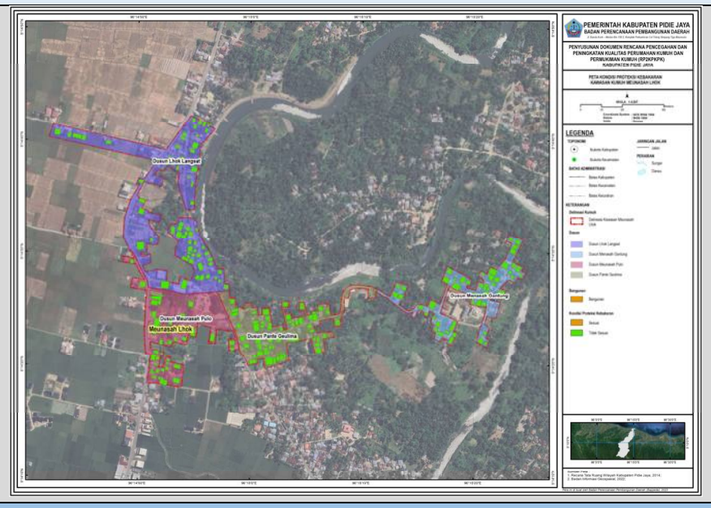
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	283	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	119	Panjang Drainase Ideal (m)	2522.65
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	106	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	620.42
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	1902.23
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	282.15



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	283.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	26
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	26

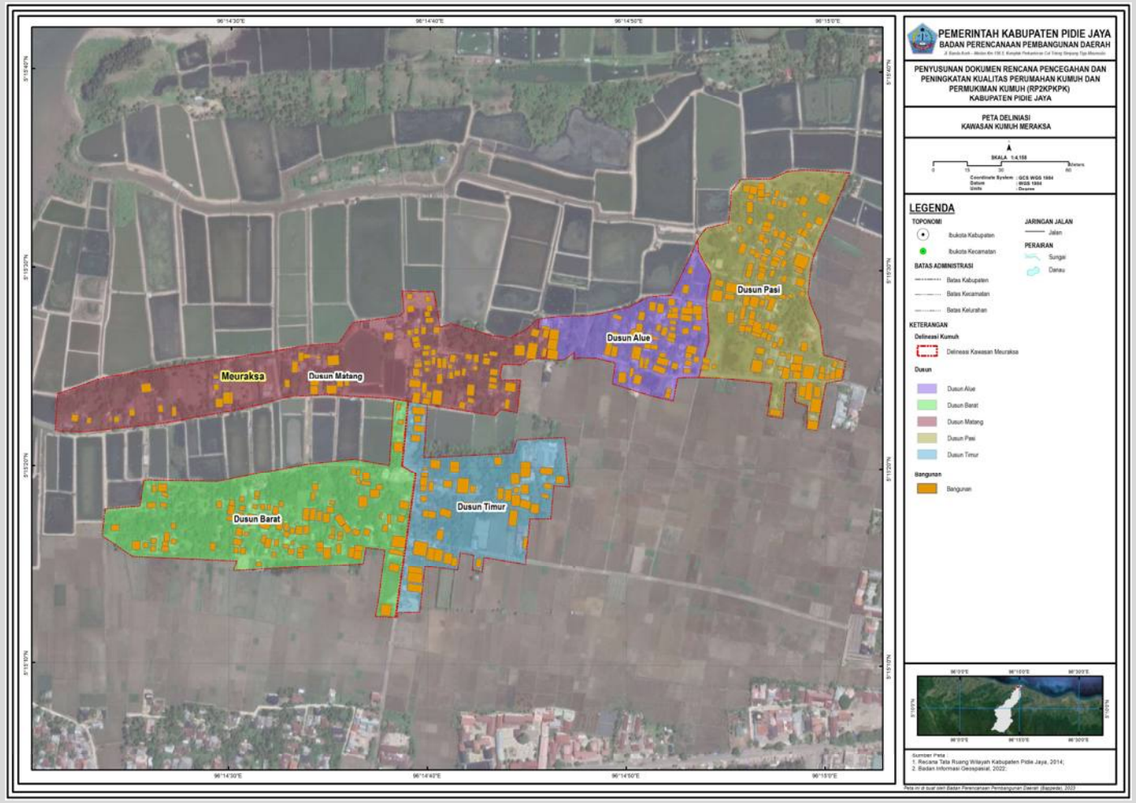


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	283.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	283
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	280



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	222.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	222
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	222

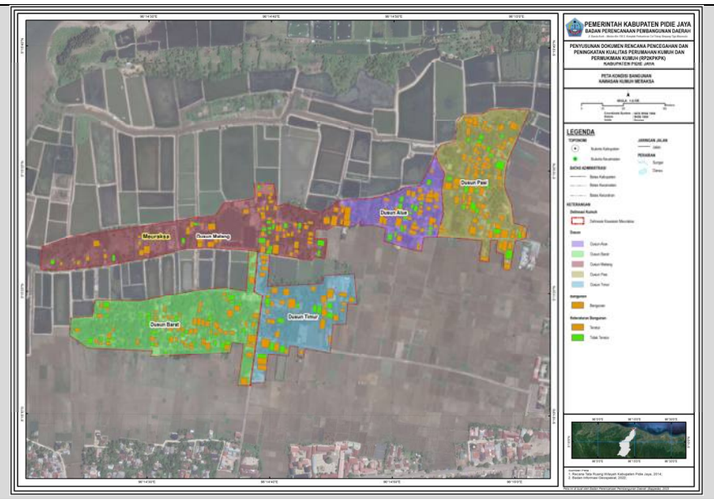
44. Profil Permukiman Kumuh Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu

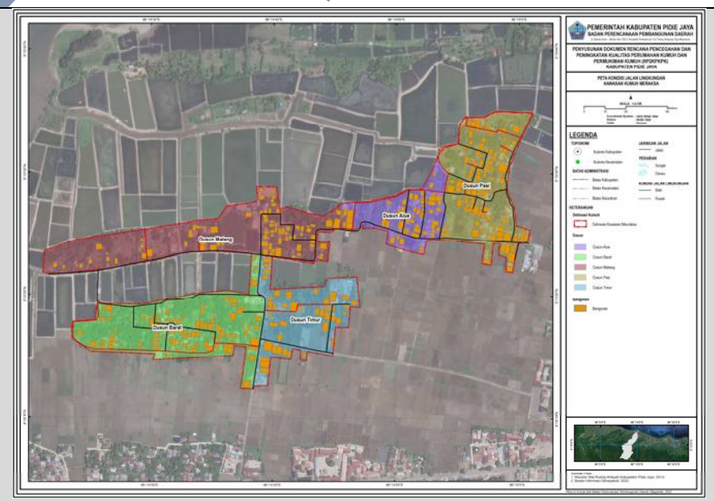


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meuraksa	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meuraksa	1	Meuraksa	Dusun Pasi	5.96	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meuraksa	2	Meuraksa	Dusun Alue	2.95	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Meuraksa	Dusun Timur	4.36	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Meuraksa	Dusun Matang	7.29	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	27,34	5	Meuraksa	Dusun Barat	6.79	Kumuh Ringan
KOORDINAT						
Latitude	5.2567672					
Longitude	96.244372					
Jumlah Bangunan (Unit)	383.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1618.00					
Jumlah Kk	478.00					

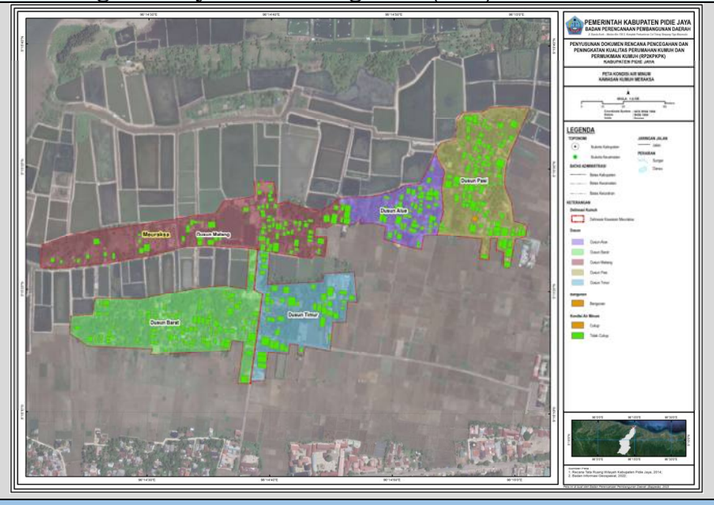
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis	

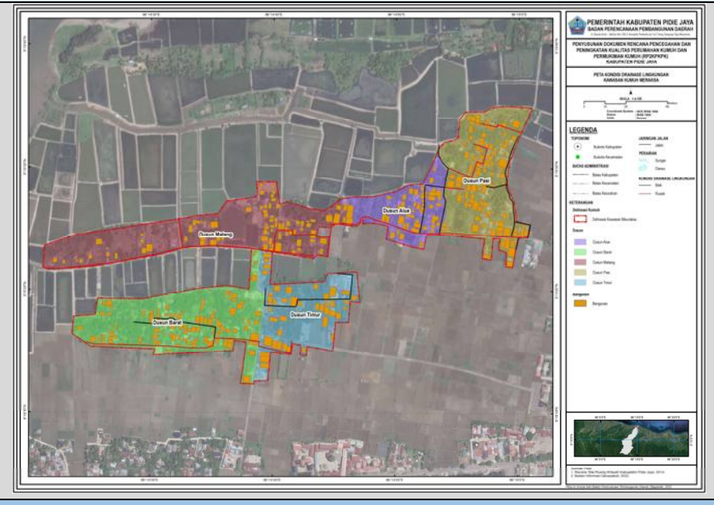




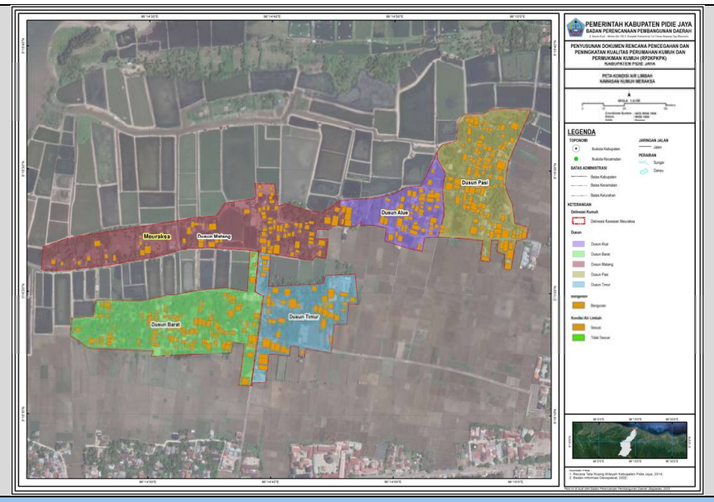


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	383	Panjang Jalan Ideal (m)	5,745.72
Jumlah RTLH (unit)	45	Panjang Jalan Eksisting (m)	5,745.72
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	293	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,701.99
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	45		

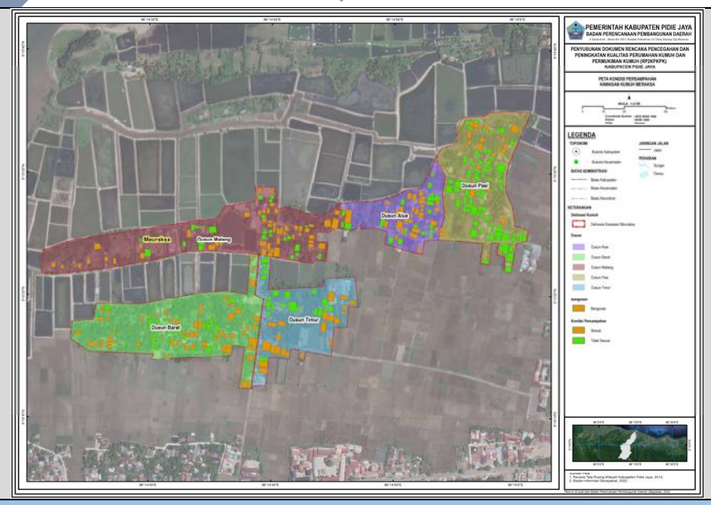




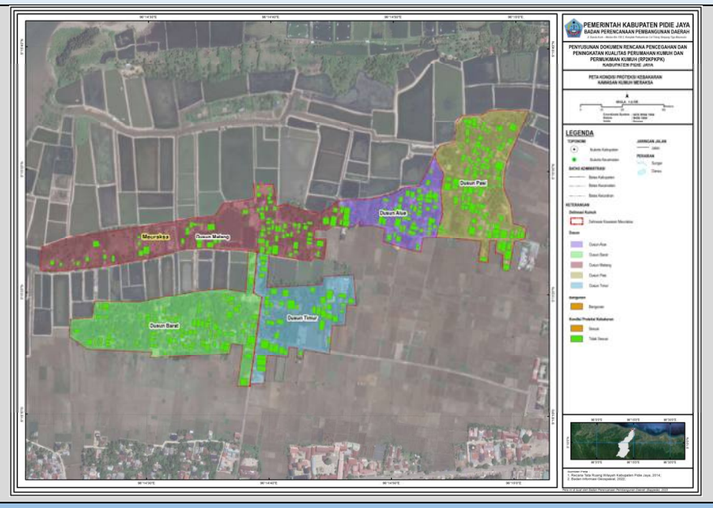
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	478	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	4	Panjang Drainase Ideal (m)	3463.60
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	477	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	3463.60
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	2086.93



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	478.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

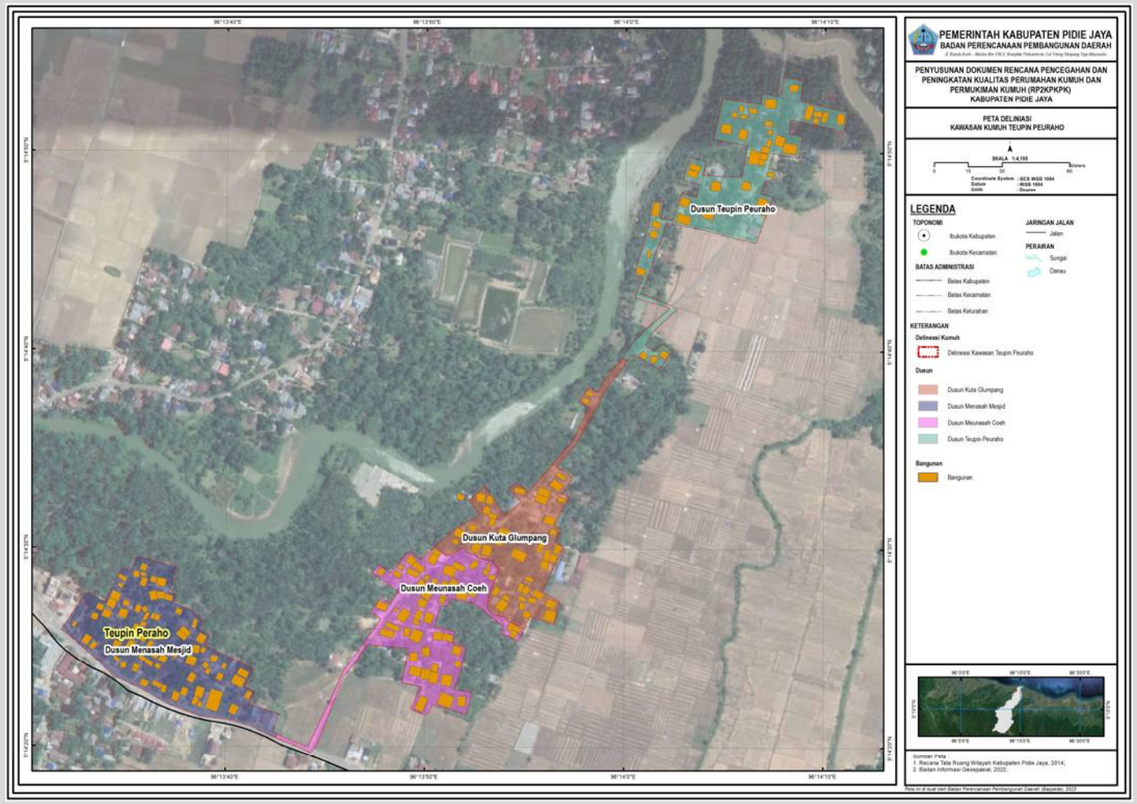


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	478.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	478
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	223



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	383.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	383
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	383

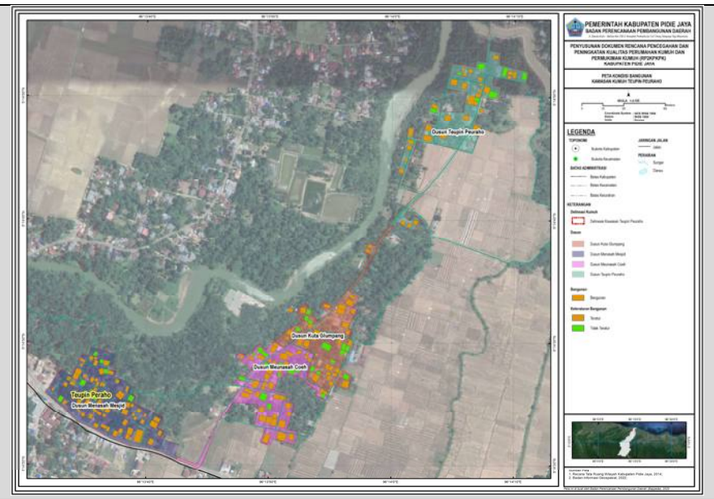
45. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu*

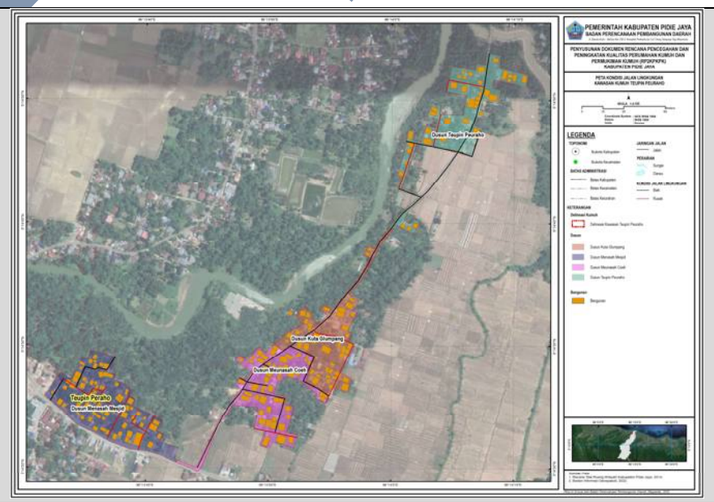


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Teupin Peuraho	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Teupin Peuraho	1	Teupin Peuraho	Kuta Glumpang	2.80	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Teupin Peuraho	Meunasah Coeh	3.04	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Teupin Peuraho	Mns. Mesjid	4.01	Kumuh Sedang
Provinsi	Aceh	4	Teupin Peuraho	Teupin Peuraho	3.24	Kumuh Sedang
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	13,09					
KOORDINAT						
Latitude	5.240580					
Longitude	96.23024					
Jumlah Bangunan (Unit)	201.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	846.00					
Jumlah Kk	256.00					

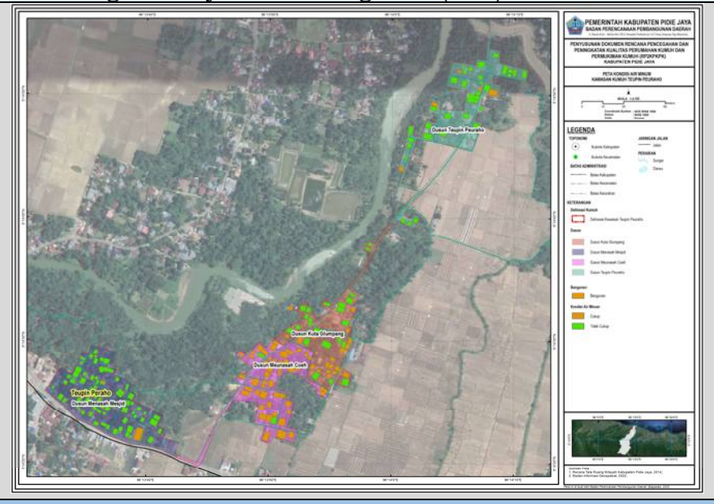
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	
Kondisi Bangunan Gedung	
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	

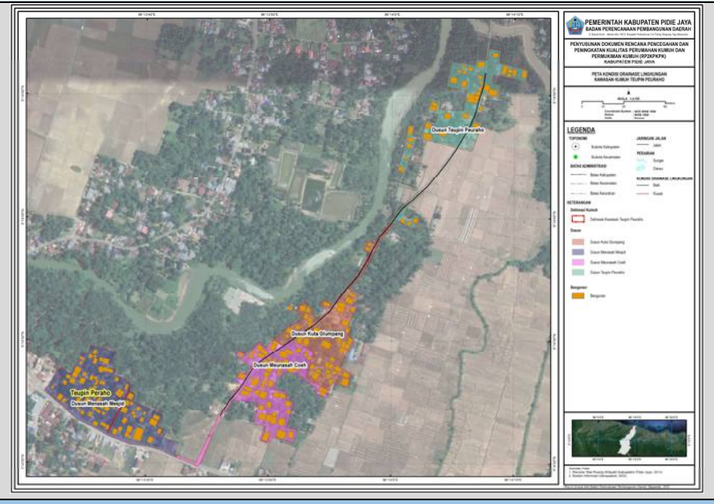




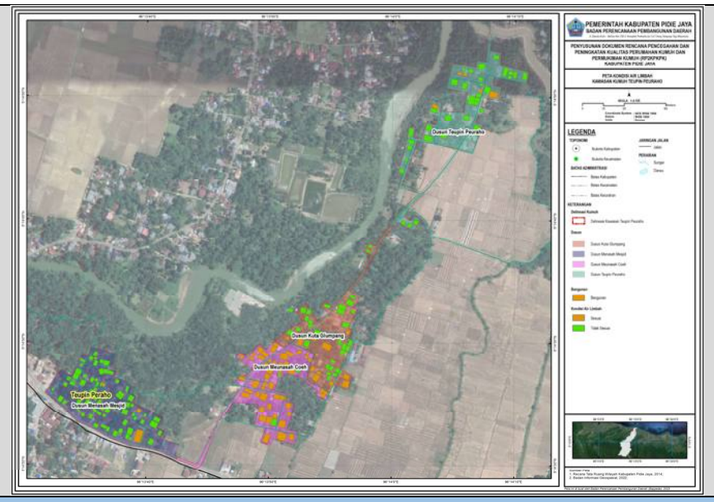


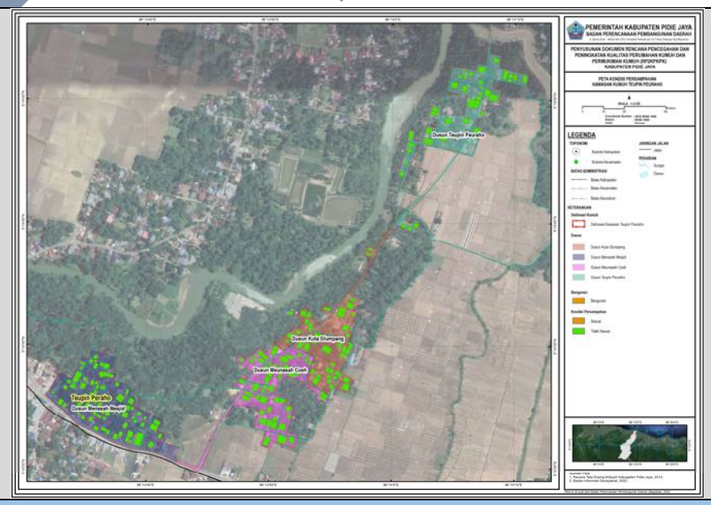
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	201	Panjang Jalan Ideal (m)	3,440.89
Jumlah RTLH (unit)	10	Panjang Jalan Eksisting (m)	3,440.89
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	150	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,140.07
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	10		





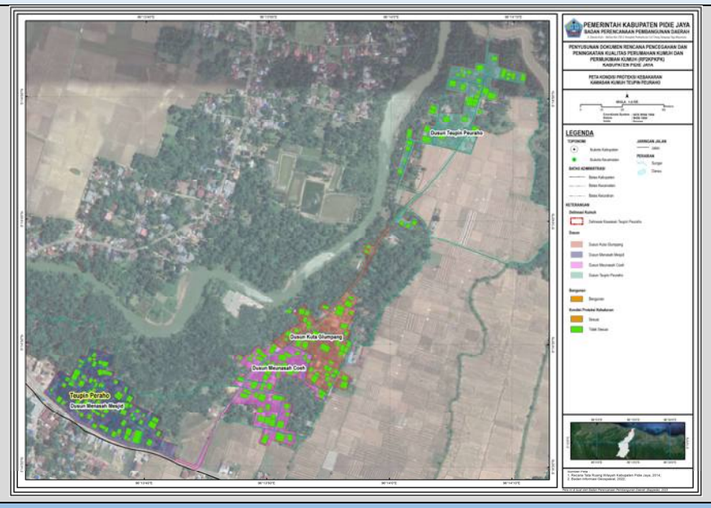
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	256	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	100	Panjang Drainase Ideal (m)	2810.61
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	184	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1082.83
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	1727.78
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	118.50





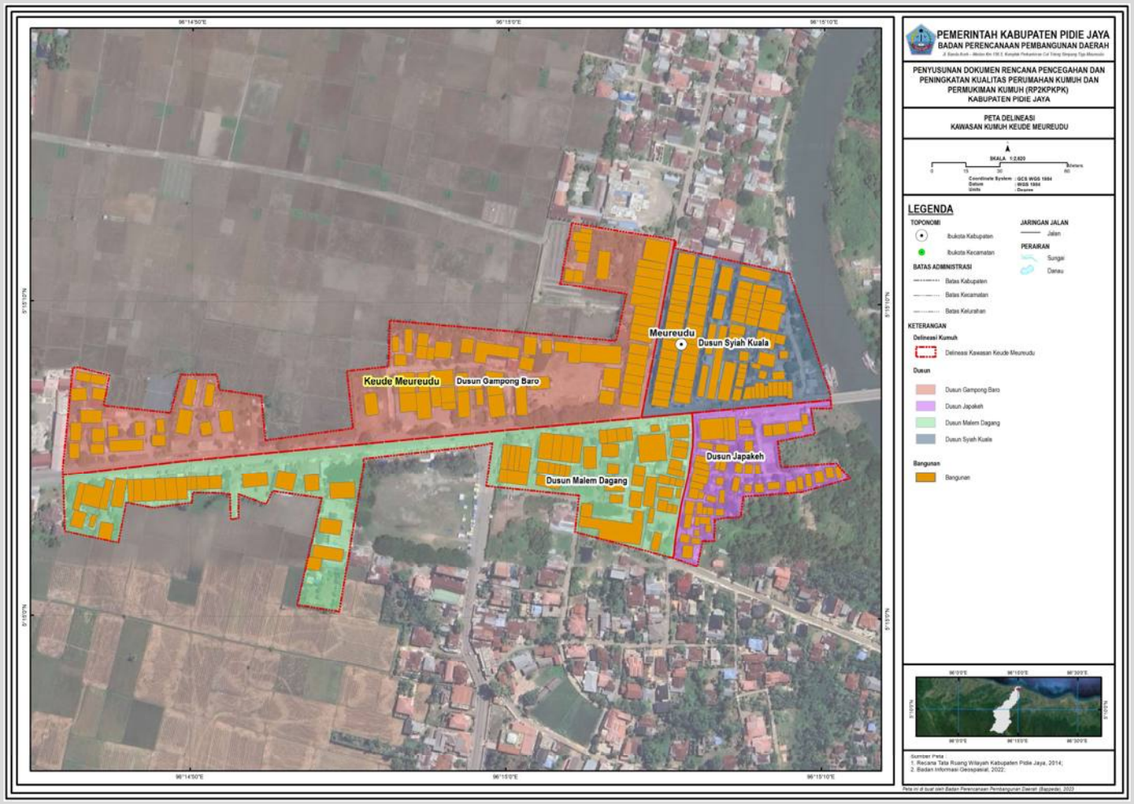
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	256.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	64
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	64

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	256.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	256
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	256



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	201.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	201
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	201

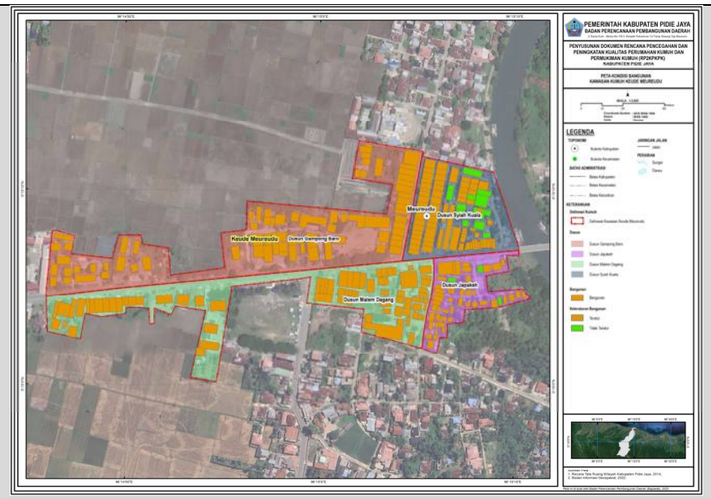
46. Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Meureudu Kecamatan Meureudu

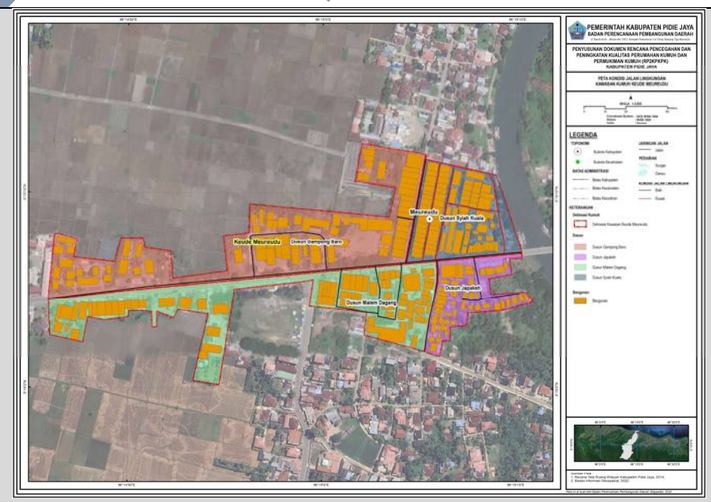


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Meureudu	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Meureudu	1	Kota Meureudu	Japakeh	1.30	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Kota Meureudu	Malem Dagang	3.40	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Kota Meureudu	Kampung Baro	4.80	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Kota Meureudu	Syiah Kuala	2.08	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	11,58					
KOORDINAT						
Latitude	5.251843					
Longitude	96.25102					
Jumlah Bangunan (Unit)	107,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	479,00					
Jumlah Kk	118,00					

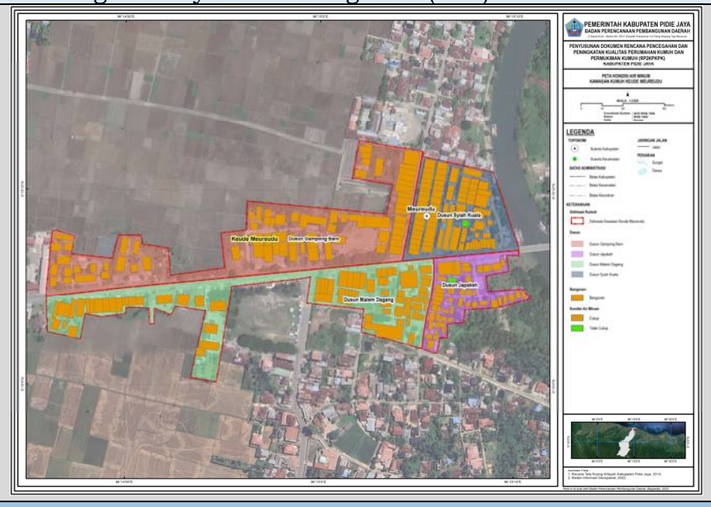
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis	

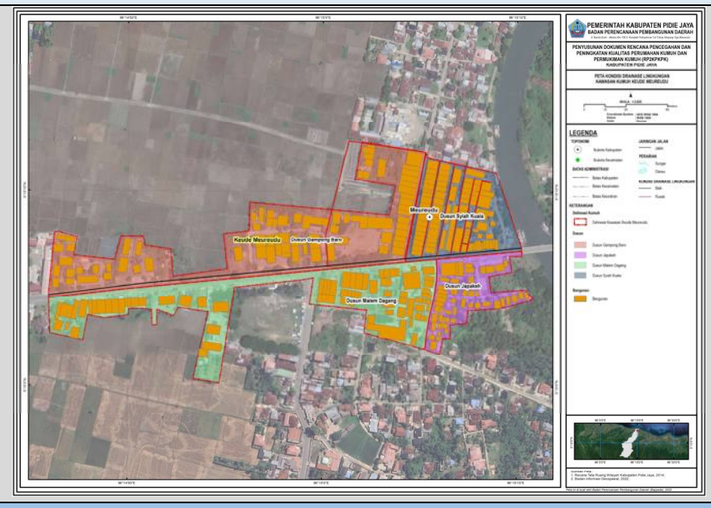




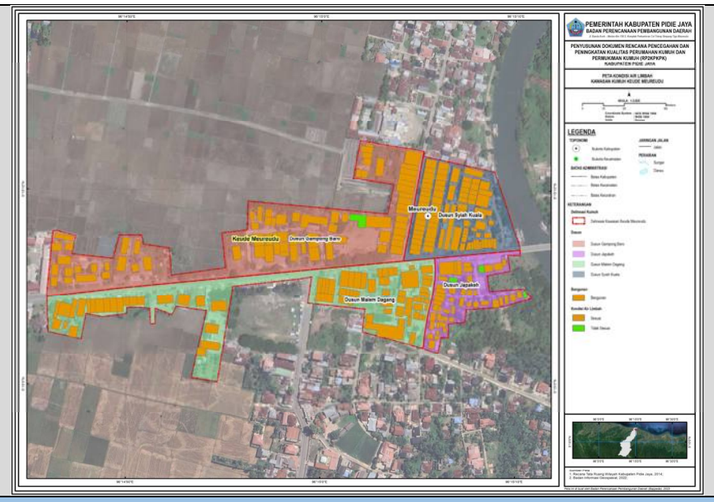


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	144	Panjang Jalan Ideal (m)	2,680.00
Jumlah RTLH (unit)	13	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,880.00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	61	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	800.00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	930.00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	13		

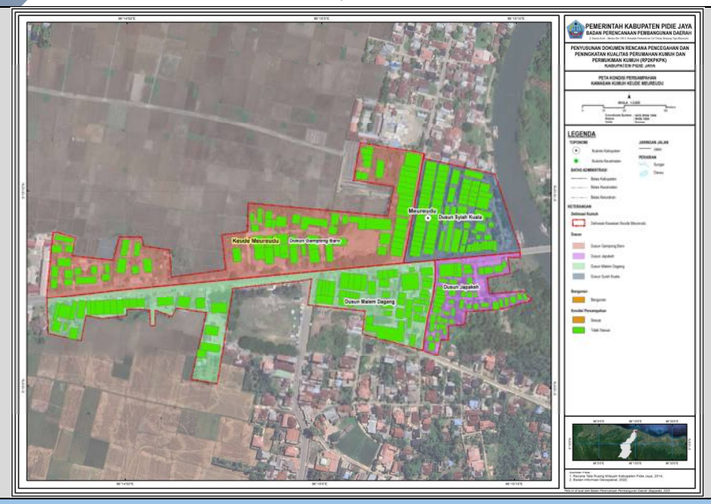




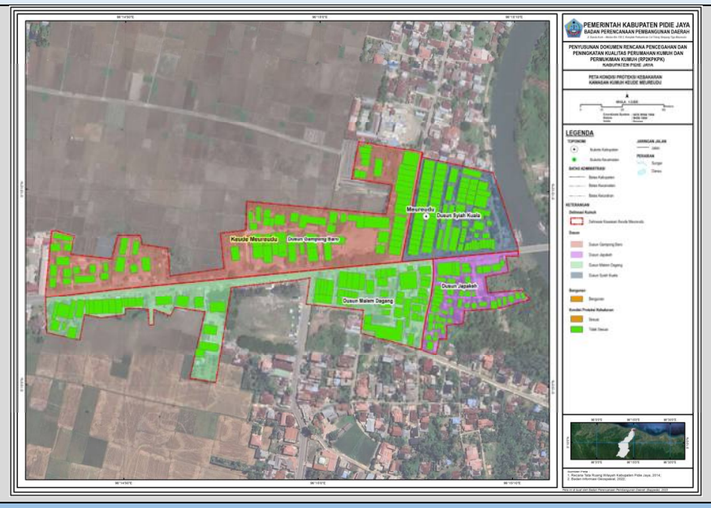
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	121	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	10	Panjang Drainase Ideal (m)	1850.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	2	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1250.00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	600.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1050.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	121.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	9
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	9

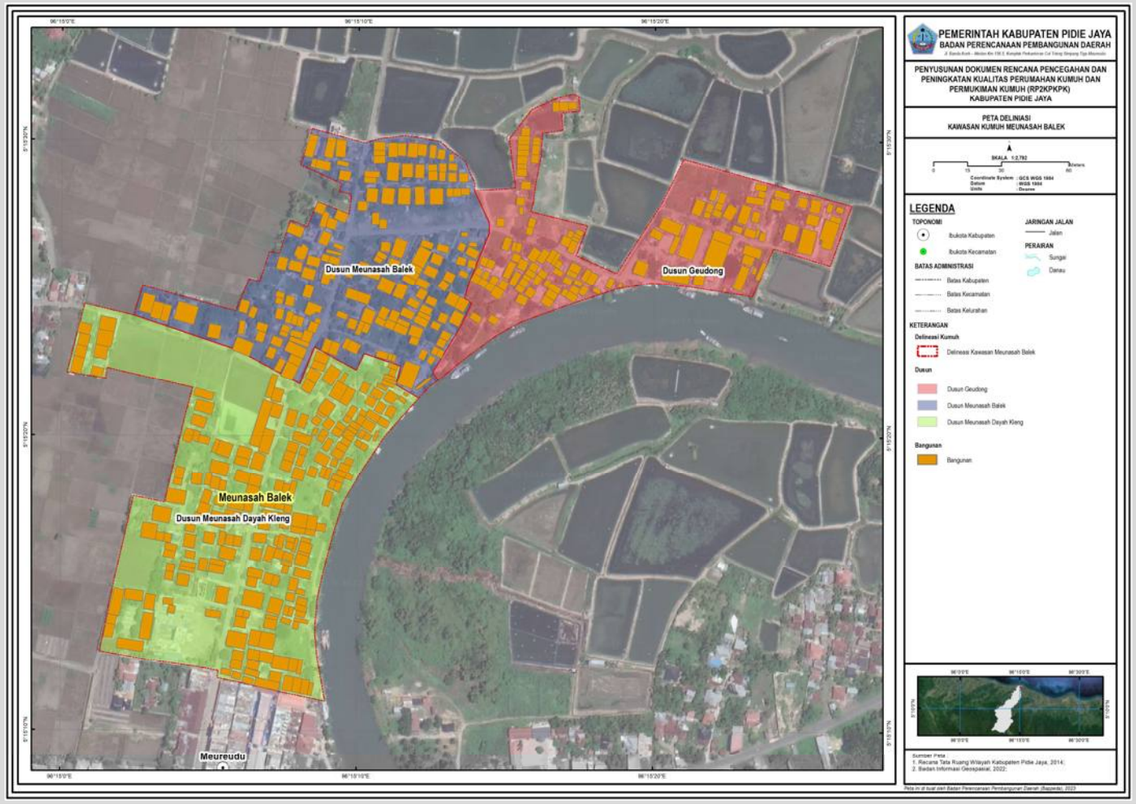


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	121.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	53
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	121



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	144.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	74
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	128

47. Profil Permukiman Kumuh Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu

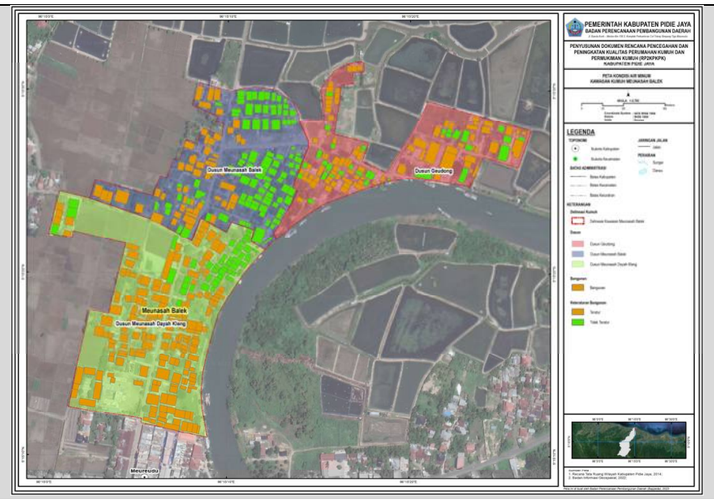


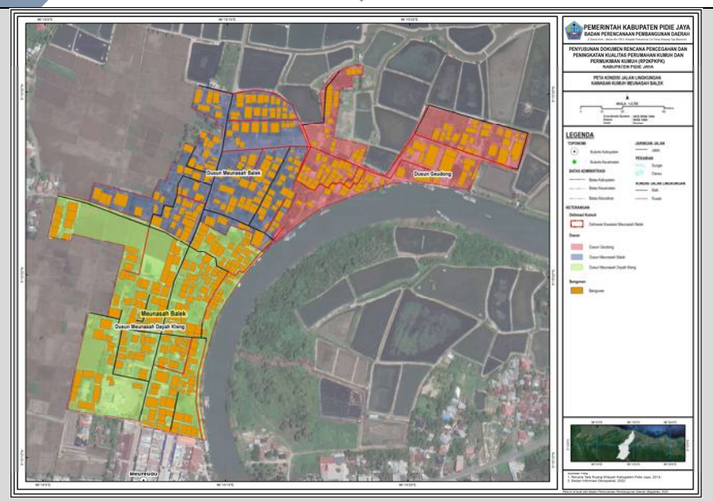
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meunasah Balek	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meunasah Balek	1	Meunasah Balek	Dayah Kleng	7.86	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Meunasah Balek	Balek	5.10	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Meunasah Balek	Dusun Gudong	3.96	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	16,92					
KOORDINAT						
Latitude	5.256488					
Longitude	96.253577					
Jumlah Bangunan (Unit)	359.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1401.00					
Jumlah Kk	445.00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

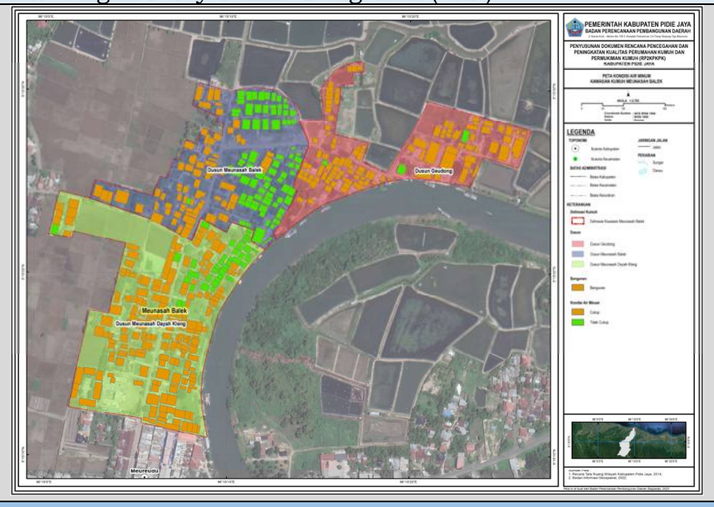
PERMASALAHAN UTAMA
Kondisi Proteksi Kebakaran
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis

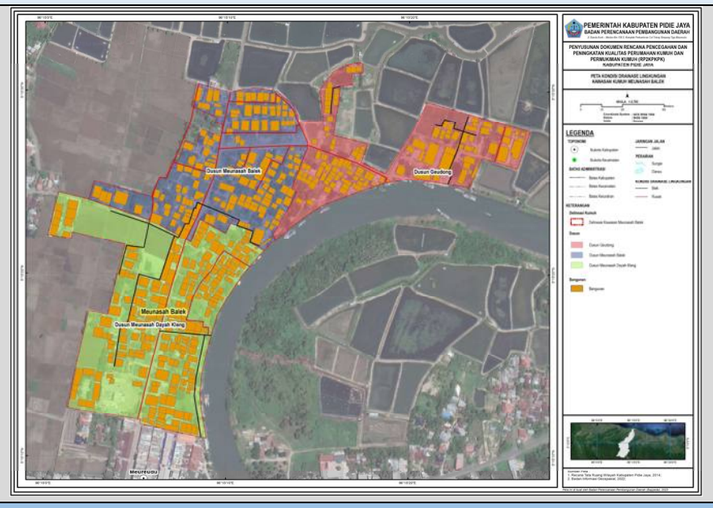




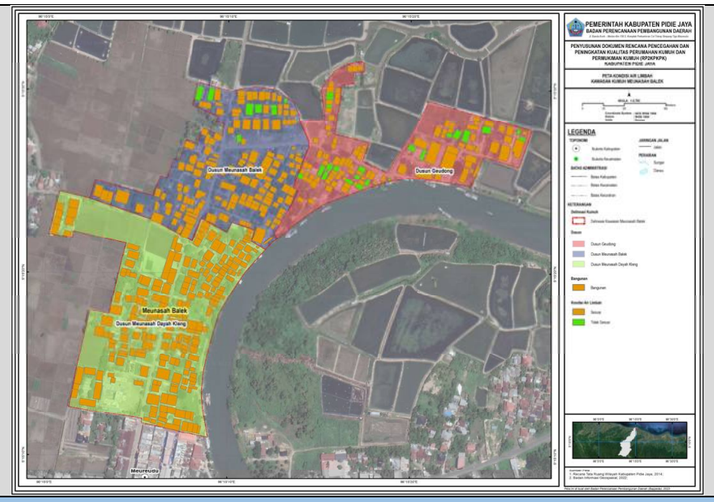


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	359	Panjang Jalan Ideal (m)	4,894.47
Jumlah RTLH (unit)	68	Panjang Jalan Eksisting (m)	4,894.47
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	289	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2,103.26
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	68		

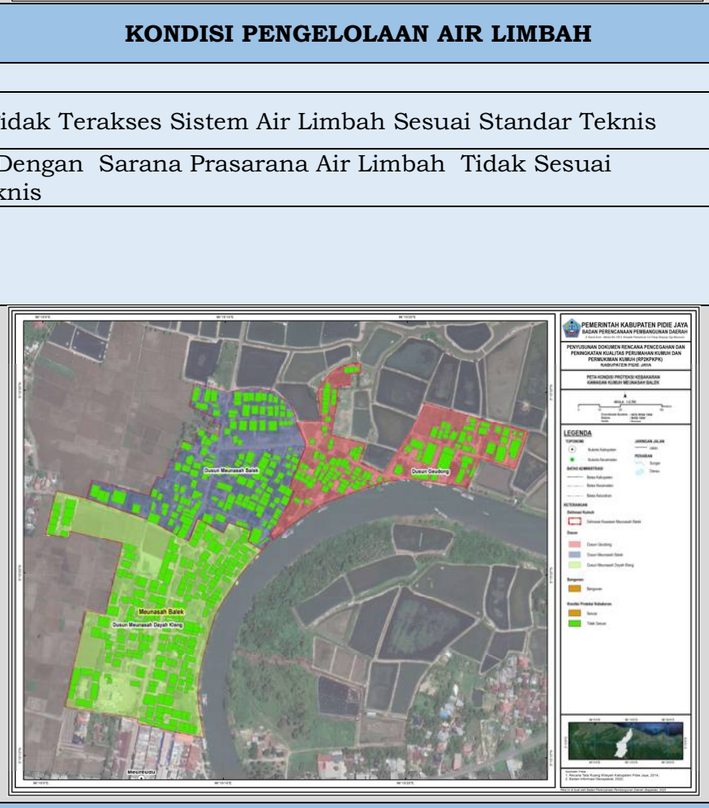




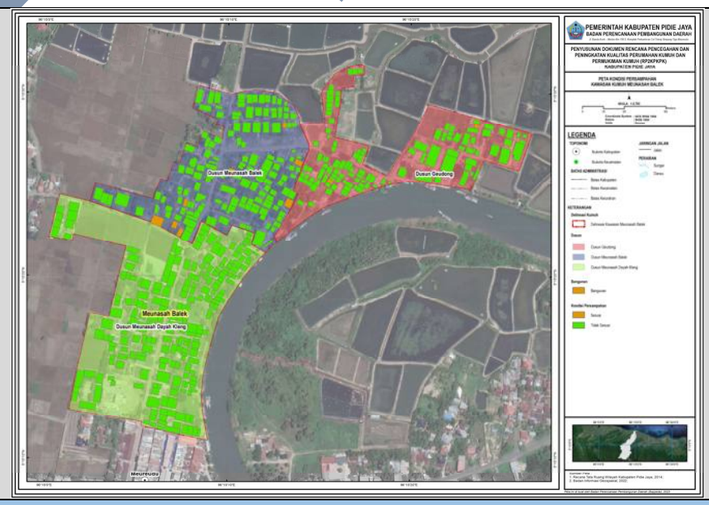
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	445	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	13	Panjang Drainase Ideal (m)	3765.58
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	162	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	3305.58
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	460.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1958.56



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	445.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	18
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	18

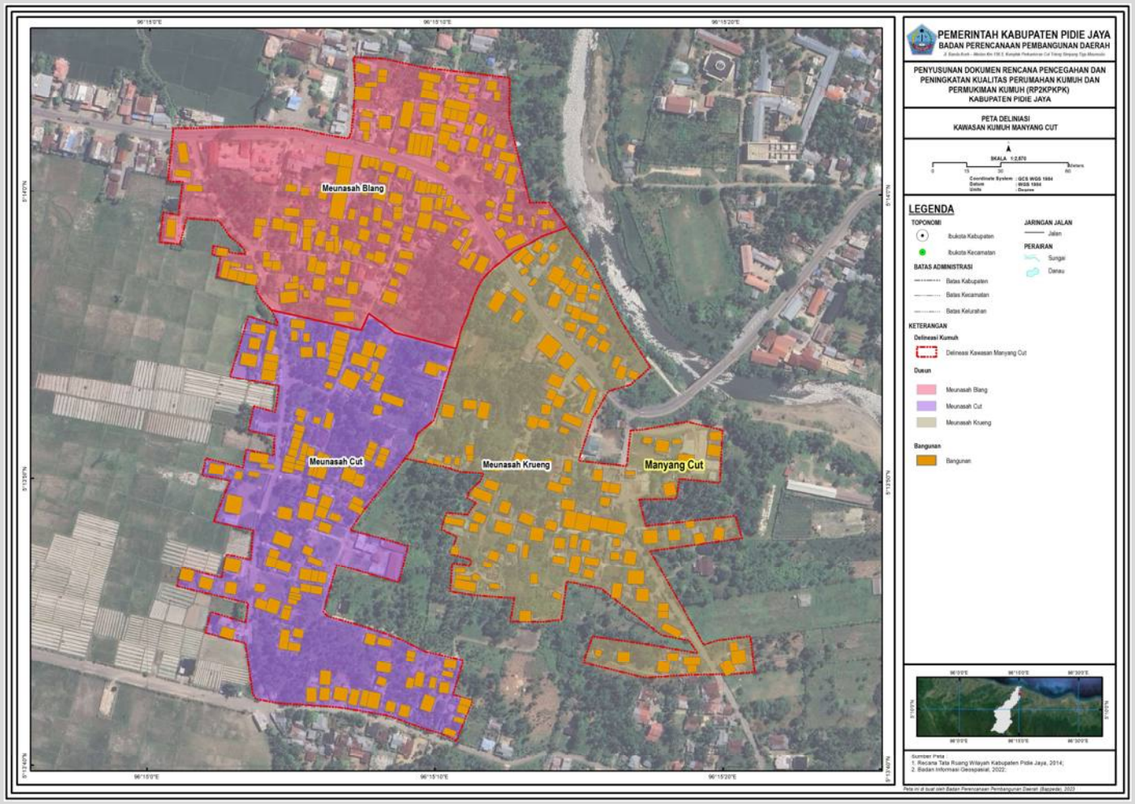


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	359.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	359
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	359



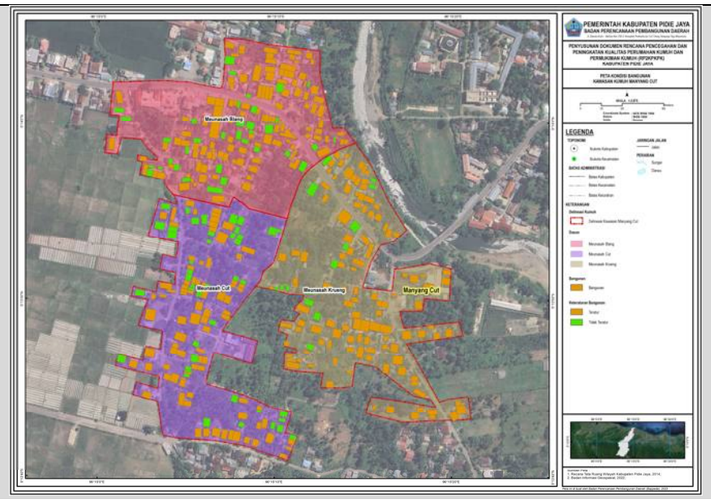
KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	445.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	445
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	423

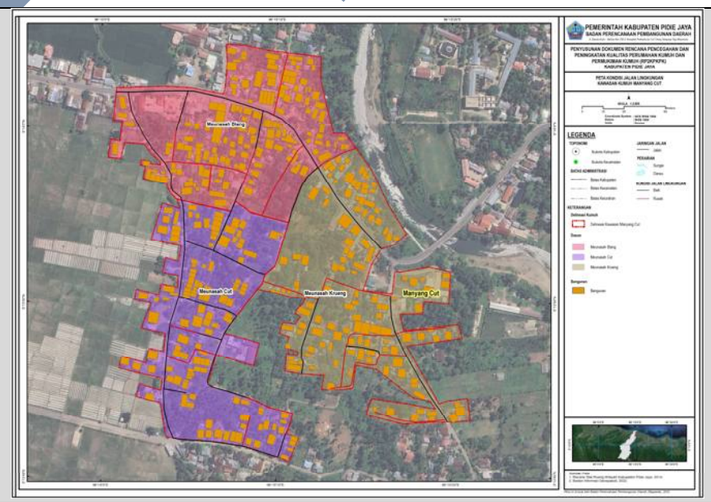
48. Profil Permukiman Kumuh Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu



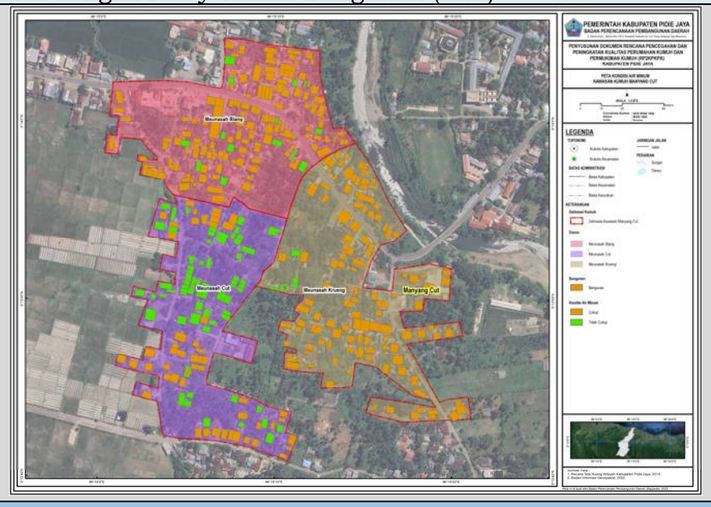
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Manyang Cut	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Manyang Cut	1	Manyang Cut	Meunasah Blang	8.20	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Manyang Cut	Meunasah Cut	8.20	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Manyang Cut	Meunasah Krueng Baroh	12.50	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	28,90					
KOORDINAT						
Latitude	5.232049					
Longitude	96.25241					
Jumlah Bangunan (Unit)	341.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1499.00					
Jumlah Kk	444.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Proteksi Kebakaran						
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis						
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis						
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis						

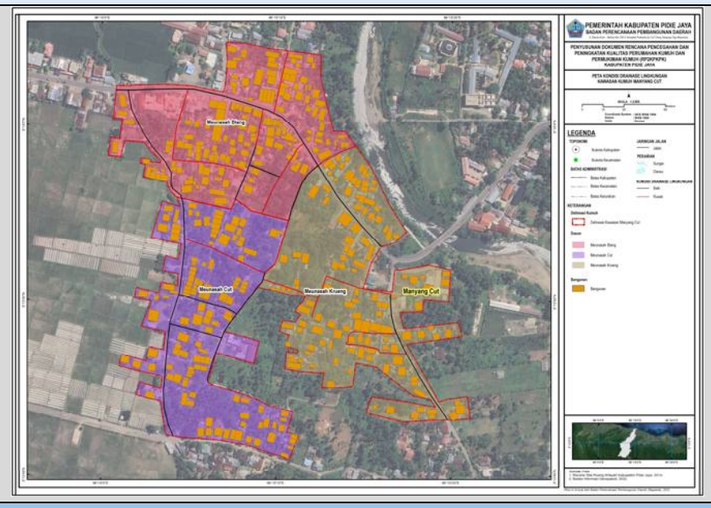




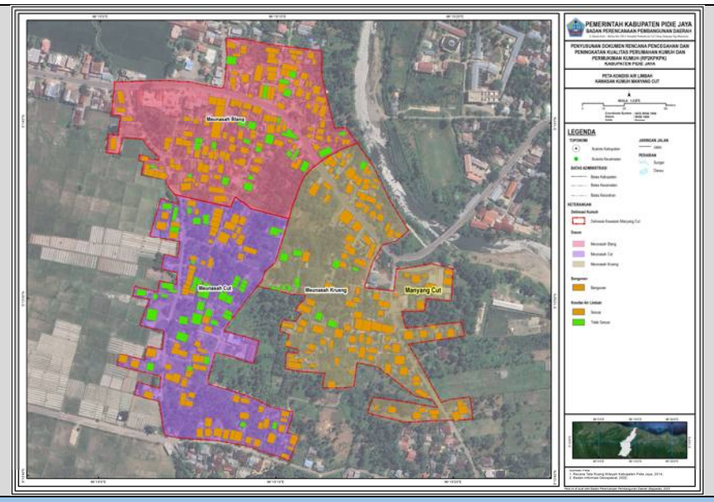


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	341	Panjang Jalan Ideal (m)	3,769.00
Jumlah RTLH (unit)	66	Panjang Jalan Eksisting (m)	2,589.00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	280	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	1,180.00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,889.00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	66		

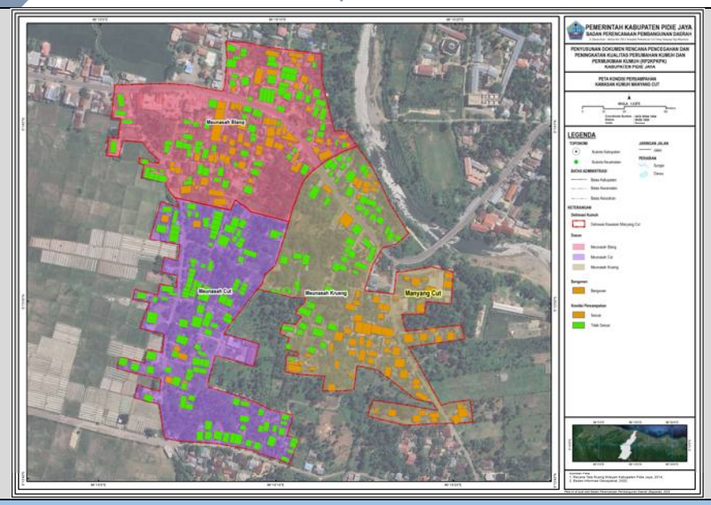




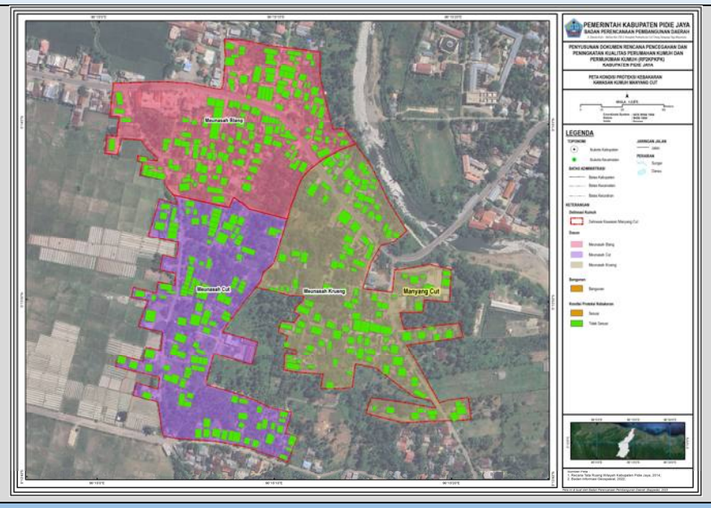
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	444	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	159	Panjang Drainase Ideal (m)	2419.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	61	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1818.00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	601.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1048.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	444.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	46
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	46

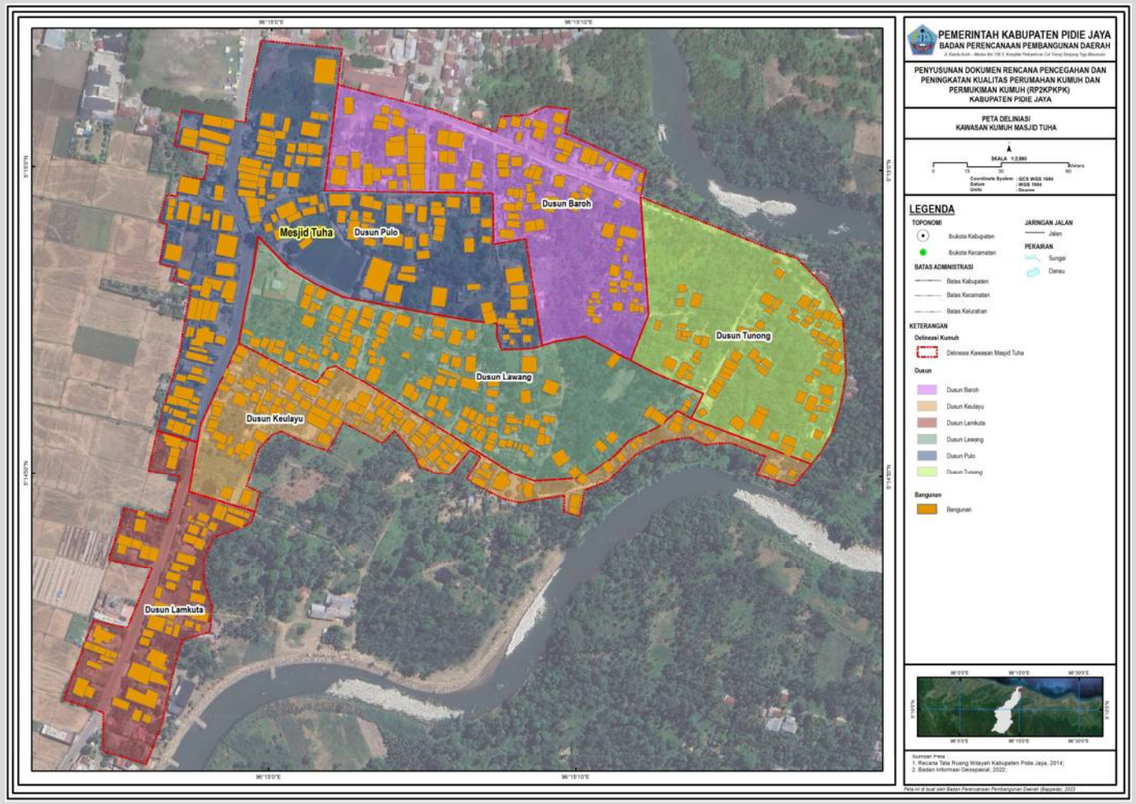


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	444.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	299
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	307



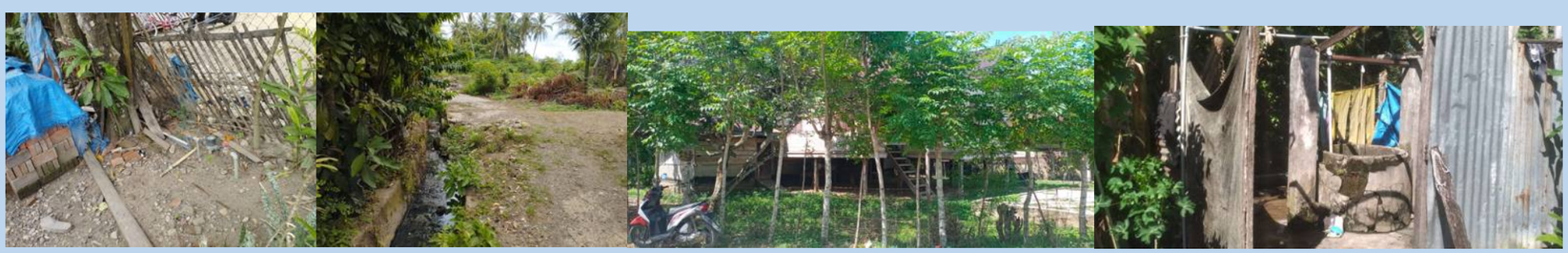
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	341.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	117
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	117

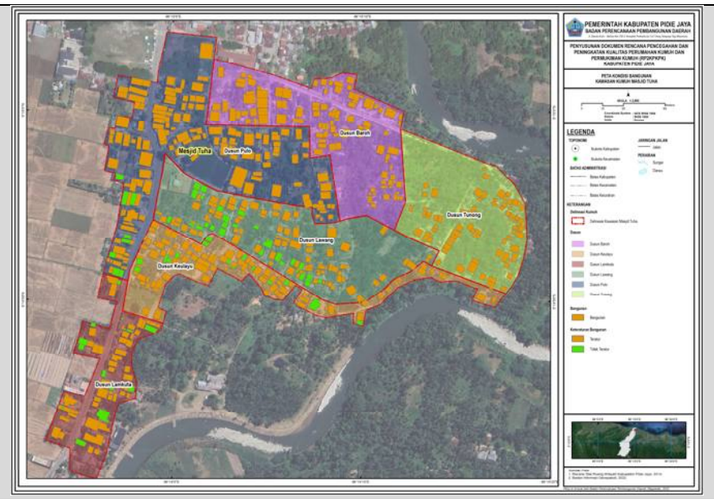
49. Profil Permukiman Kumuh Gampong Masjid Tuha Kecamatan Meureudu

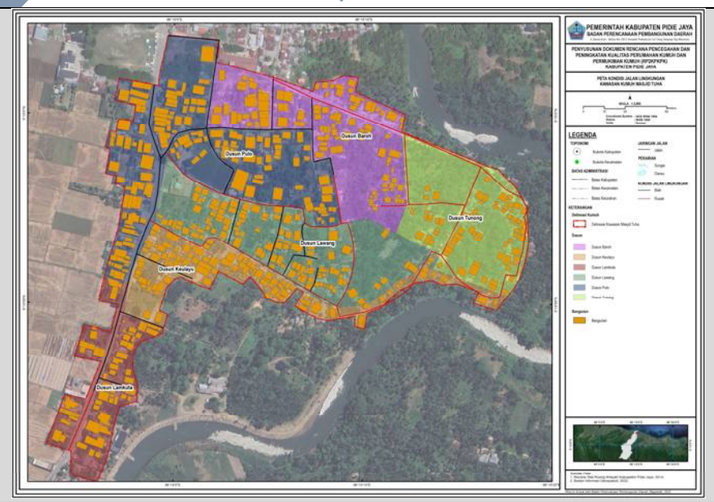


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Masjid Tuha	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Masjid Tuha	1	Mesjid Tuha	Keulayu	15.00	Kumuh Ringan
Kecamatan	Meureudu	2	Mesjid Tuha	Tunong	7.00	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Mesjid Tuha	Baroh	4.90	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Mesjid Tuha	Lamkuta	26.41	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	65,19	5	Mesjid Tuha	Lawang	4.68	Kumuh Ringan
KOORDINAT		6	Mesjid Tuha	Pulo	7.20	Kumuh Ringan
Latitude	5.2497452					
Longitude	96.250364					
Jumlah Bangunan (Unit)	379.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1141.00					
Jumlah Kk	354.00					

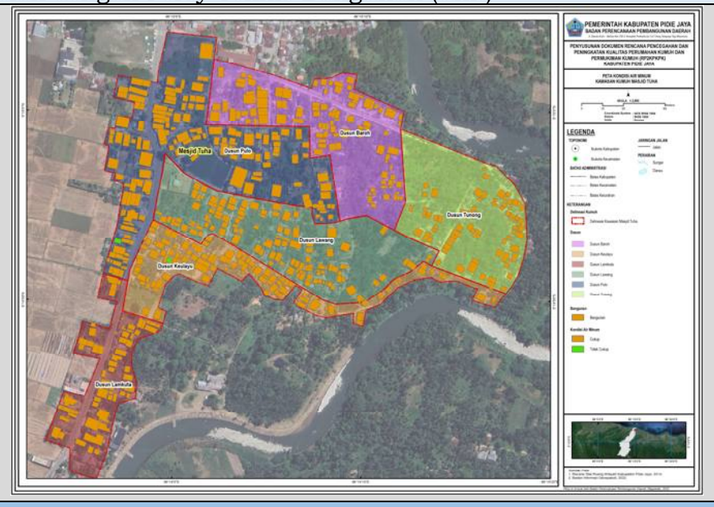
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	
Kualitas Konstruksi Drainase	
Ketidaktesediaan Akses Aman Air Minum	

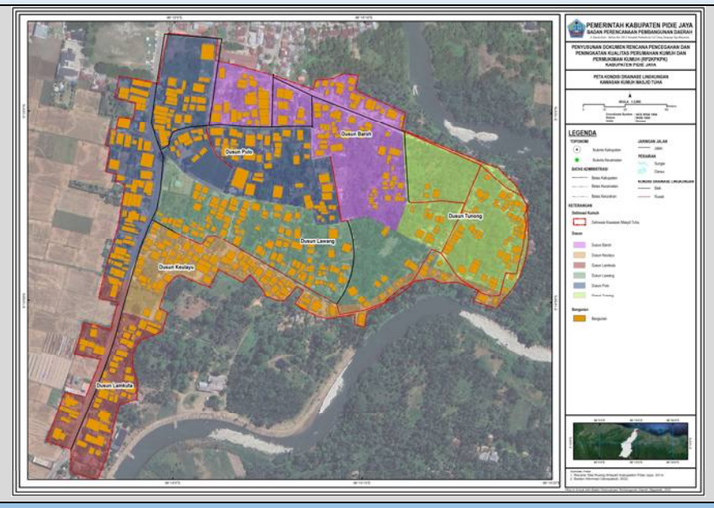




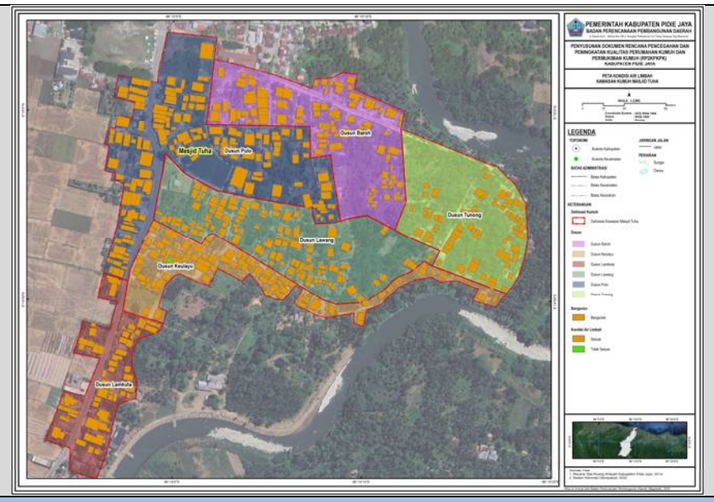


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	379	Panjang Jalan Ideal (m)	10,505.00
Jumlah RTLH (unit)	11	Panjang Jalan Eksisting (m)	8,665.00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	263	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	1,840.00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	3,475.00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	11		

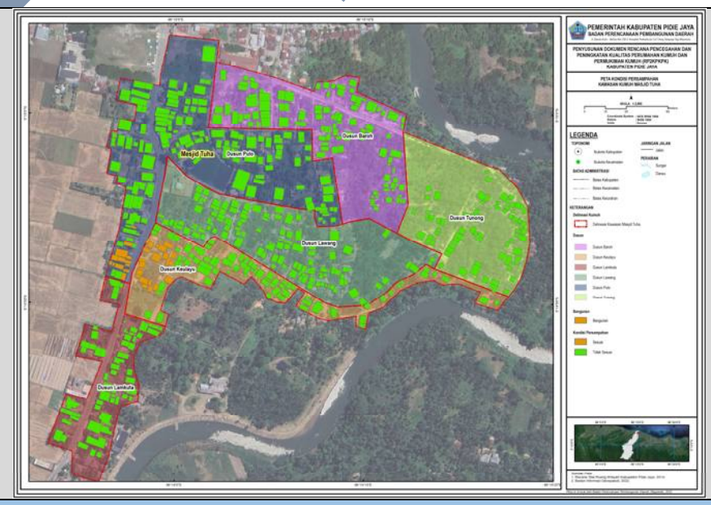




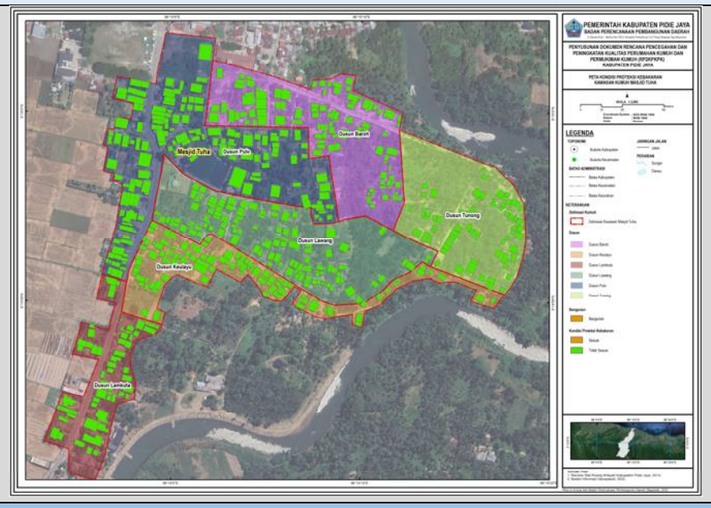
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	354	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	226	Panjang Drainase Ideal (m)	1783.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1483.00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	300.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1483.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	354.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

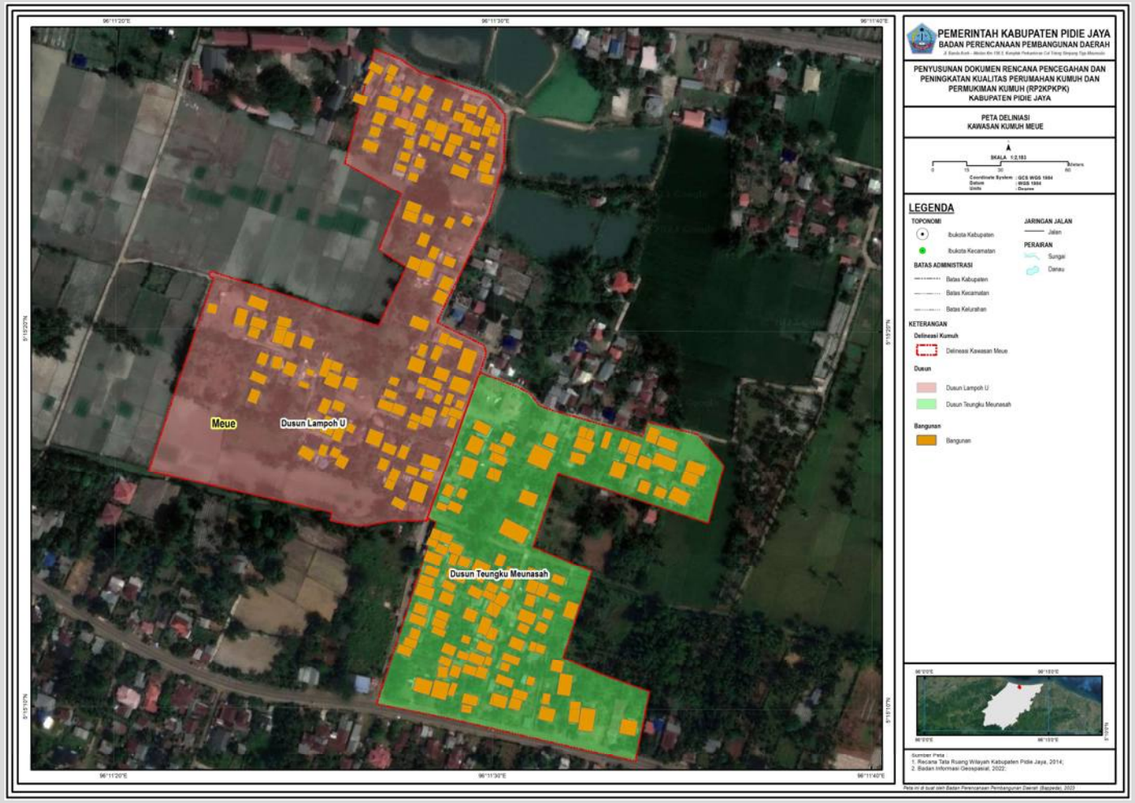


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	354.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	54
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	307



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	379.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	203
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	379

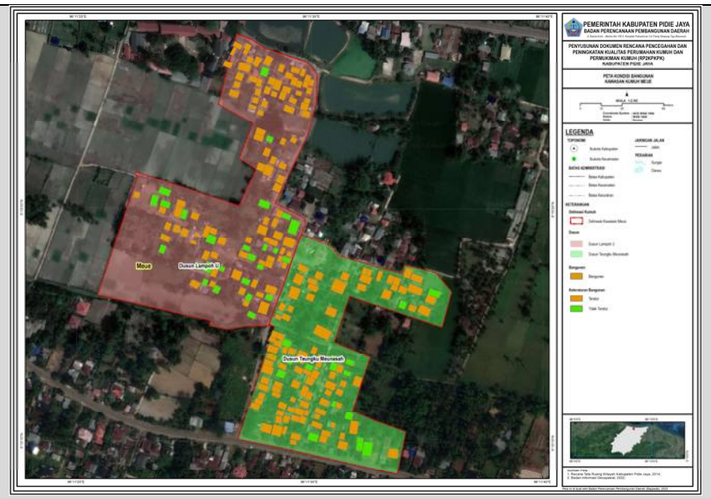
50. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng*

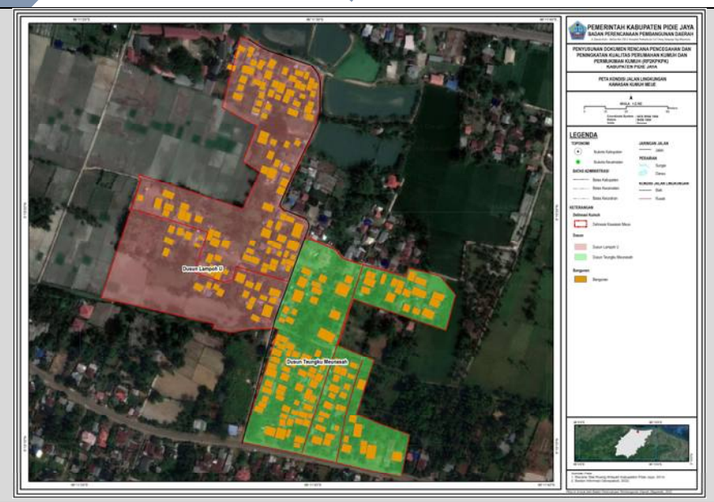


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Meue	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Meue	1	Meue	Lampoh U	5,51	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Meue	Tgk Meunasah	4,21	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	9,77					
KOORDINAT						
Latitude	5.25536385					
Longitude	96.1936291					
Jumlah Bangunan (Unit)	246,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	864,00					
Jumlah Kk	247,00					

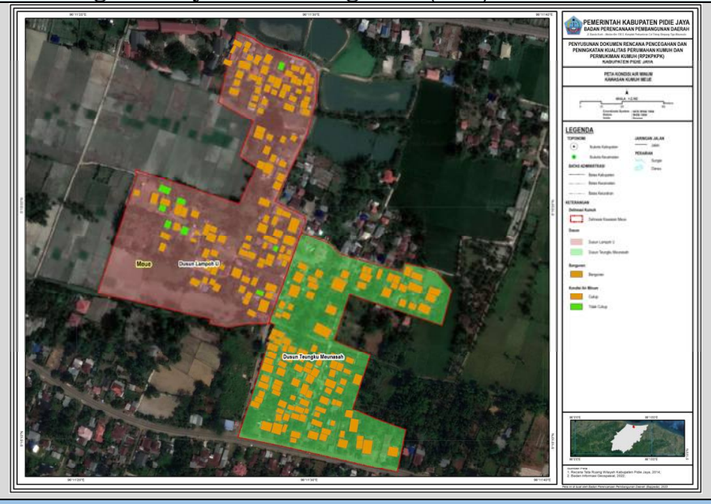
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	
Kualitas Konstruksi Drainase	
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Tidak Memadai	
Kondisi Proteksi Kebakaran	

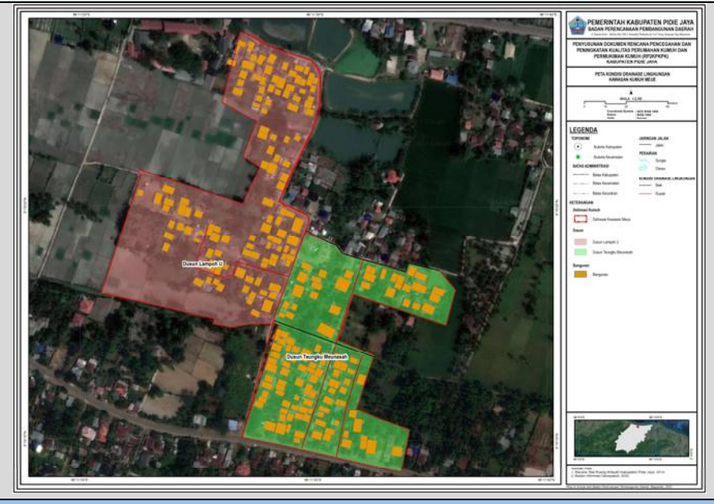




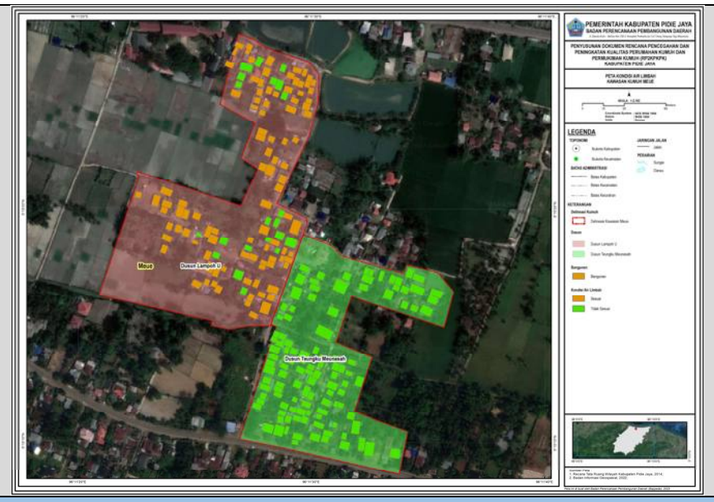


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	246	Panjang Jalan Ideal (m)	1.179,85
Jumlah RTLH (unit)	24	Panjang Jalan Eksisting (m)	1.179,85
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	106	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	828,50
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	24		

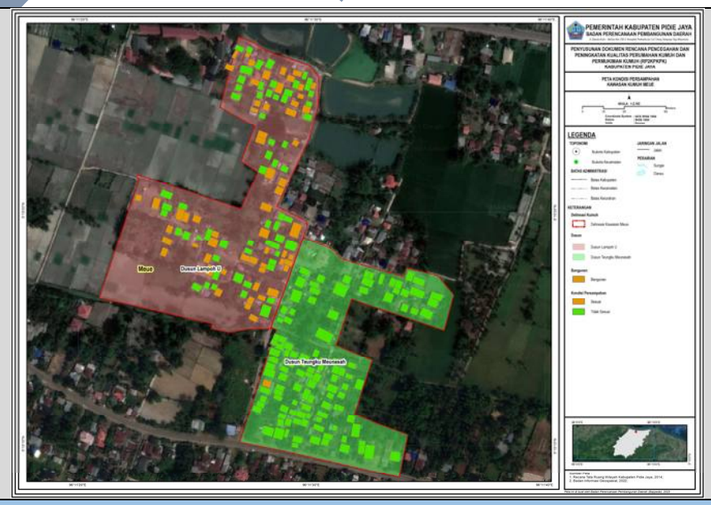




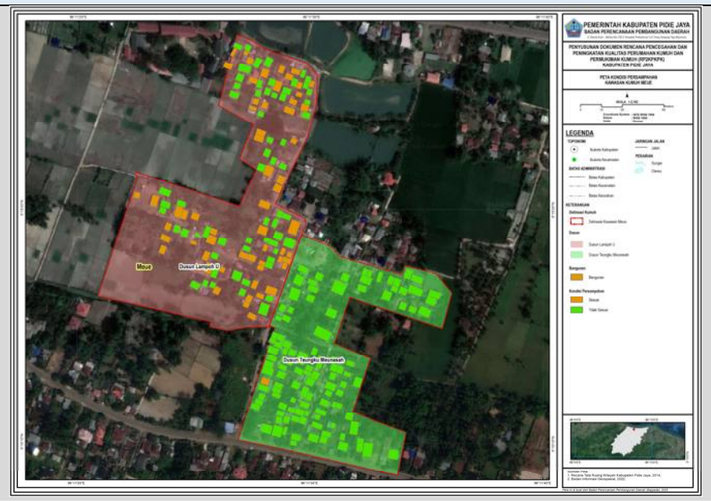
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	247	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	36	Panjang Drainase Ideal (m)	1177,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	11	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1177,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1171,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	247
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	3
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	3

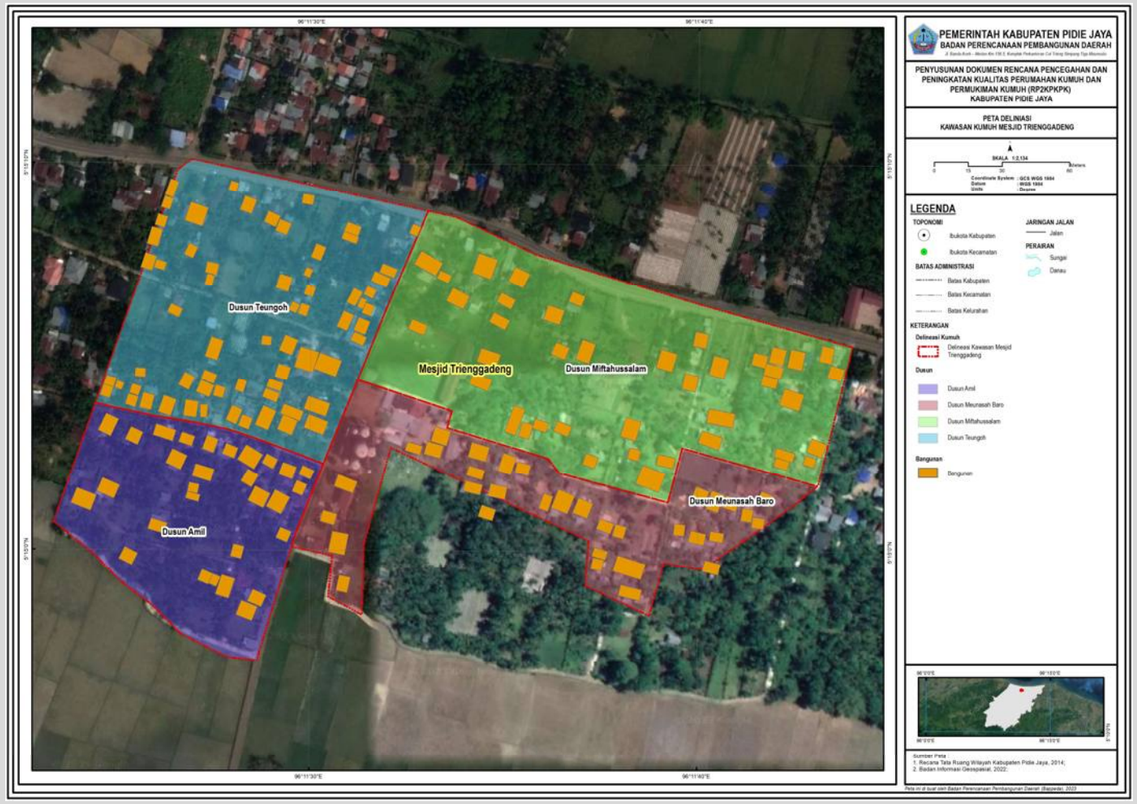


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	247 ,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	247
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	179



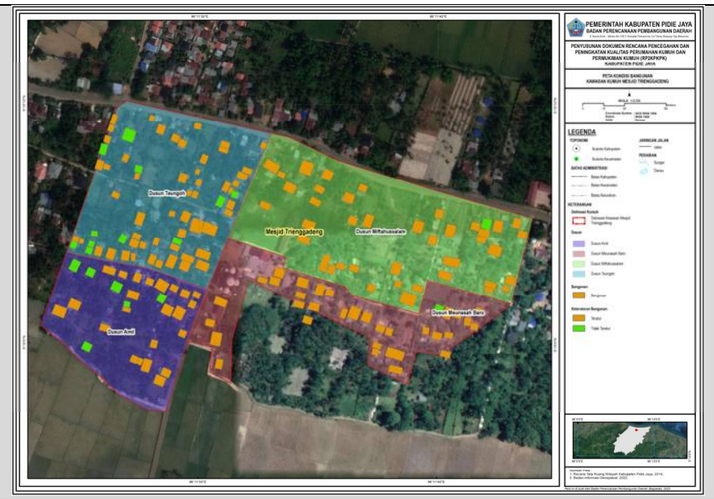
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	246,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	246

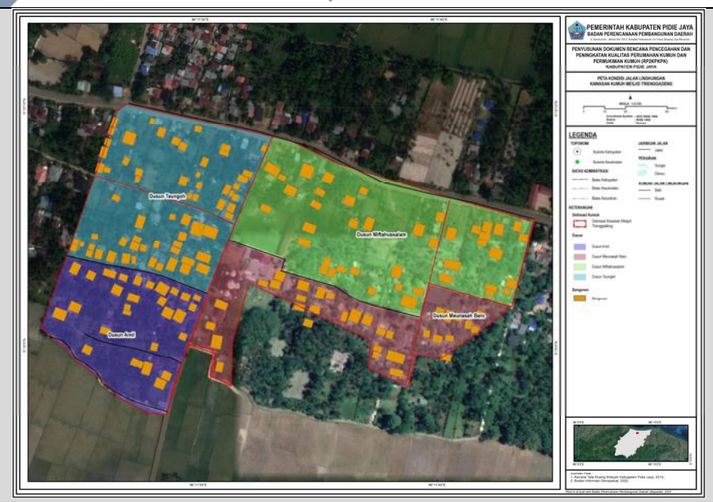
51. Profil Permukiman Kumuh Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng



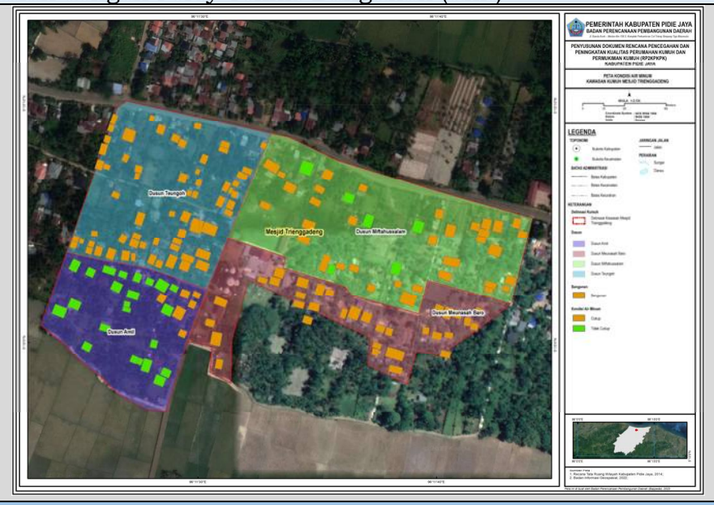
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Mesjid Trienggadeng	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Mesjid Trienggadeng	1	Mesjid Trienggadeng	Jurong Tengoh	4,01	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Mesjid Trienggadeng	Menasah Baro	2,65	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Mesjid Trienggadeng	Jurong Amil	2,69	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Mesjid Trienggadeng	Miftahussalam	5,16	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	14,51					
KOORDINAT						
Latitude	5.2502843					
Longitude	96.191718					
Jumlah Bangunan	172,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	681,00					
Jumlah Kk	227,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Tidak Memadai						
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis						
Ketidakteraturan Bangunan						
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran						

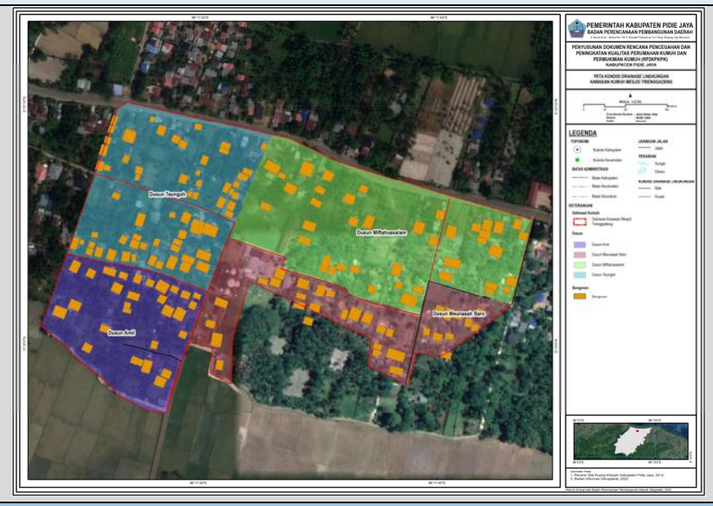




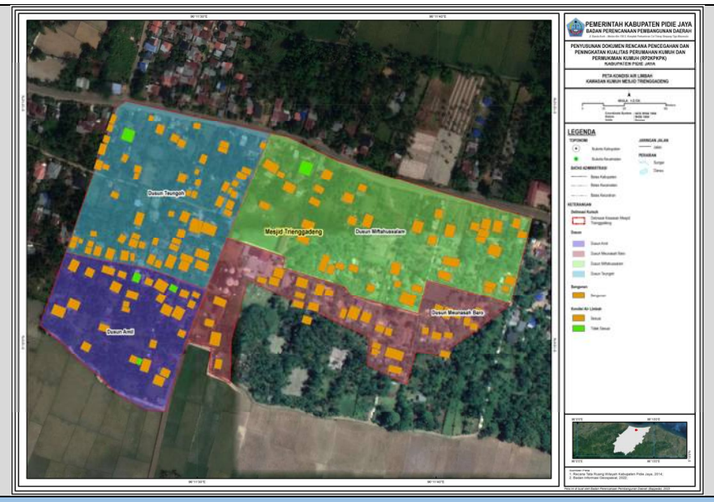


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	172	Panjang Jalan Ideal (m)	4.095,00
Jumlah RTLH (unit)	9	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.845,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	55	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	250,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2545,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	9		

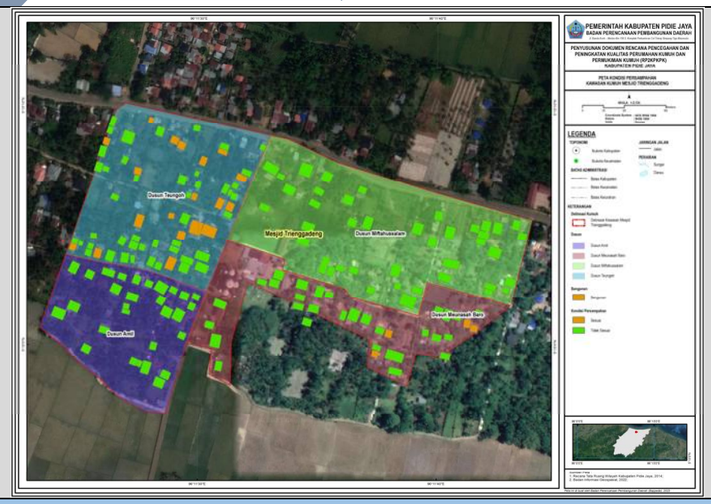




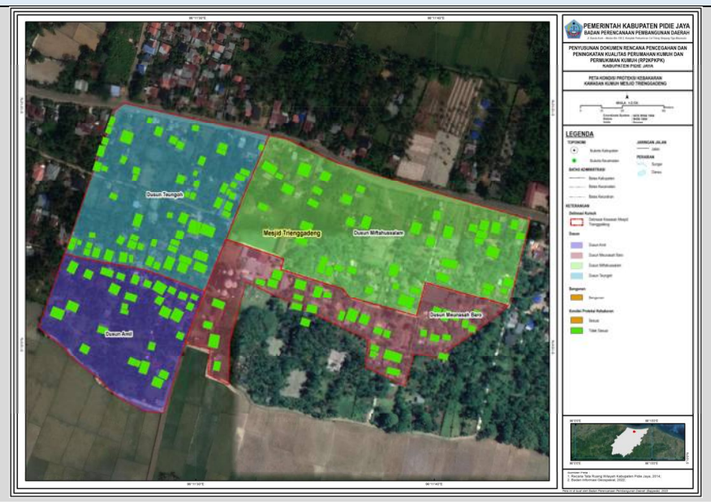
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	227	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	37	Panjang Drainase Ideal (m)	2200,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	39	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2200,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	750,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	227,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	5
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	5

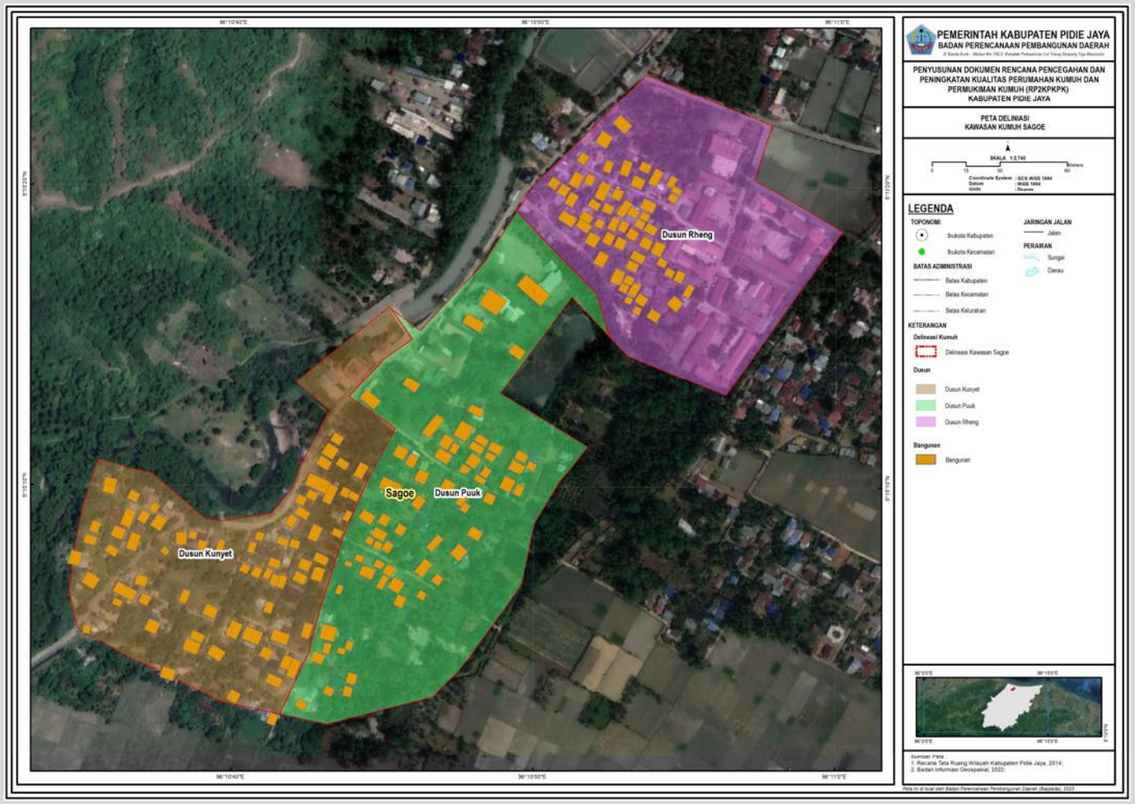


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	227,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	227
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	196



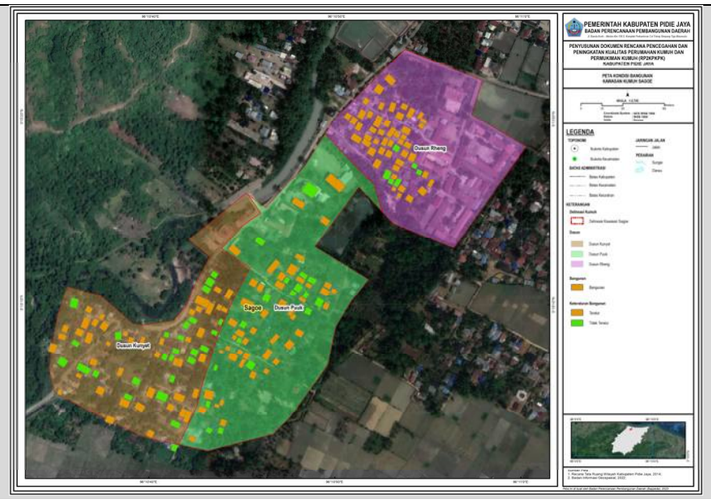
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	172,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	172

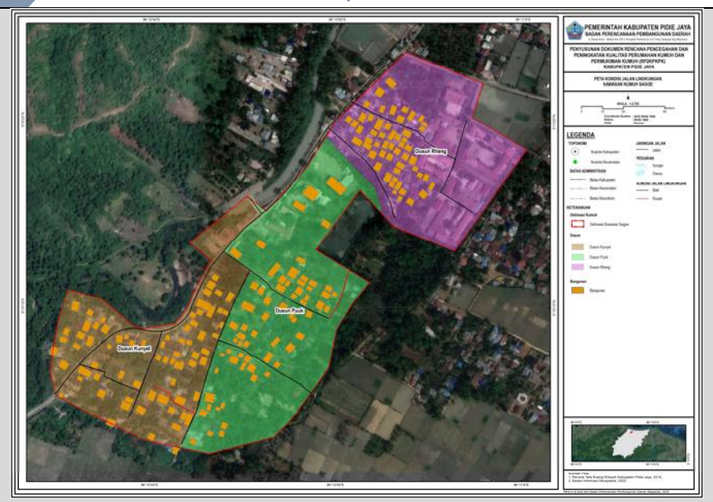
52. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng*



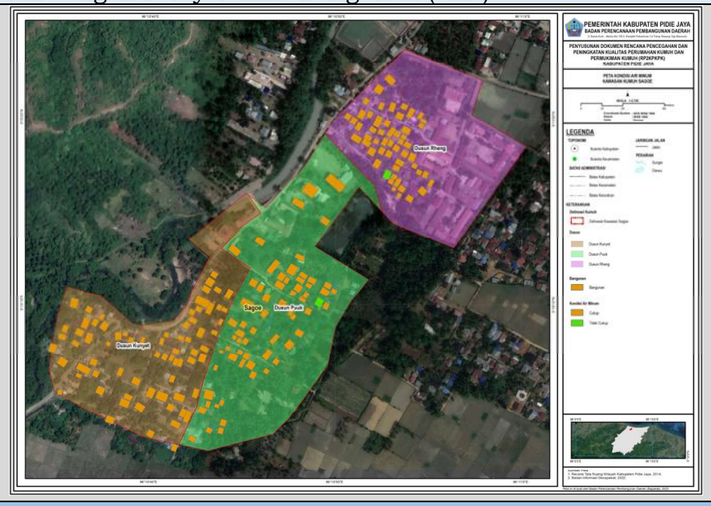
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Sagoe	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Sagoe	1	Sagoe	Dusun Kunyet	5,98	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Sagoe	Dusun Puuk	7,98	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Sagoe	Dusun Reng	6,04	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	20,00					
KOORDINAT						
Latitude	5.260088					
Longitude	96.178490					
Jumlah Bangunan (Unit)	197,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	821,00					
Jumlah Kk	255,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Proteksi Kebakaran						
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis						
Ketersediaan Akses Aman Air Minum						
Ketidakteraturan Bangunan						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

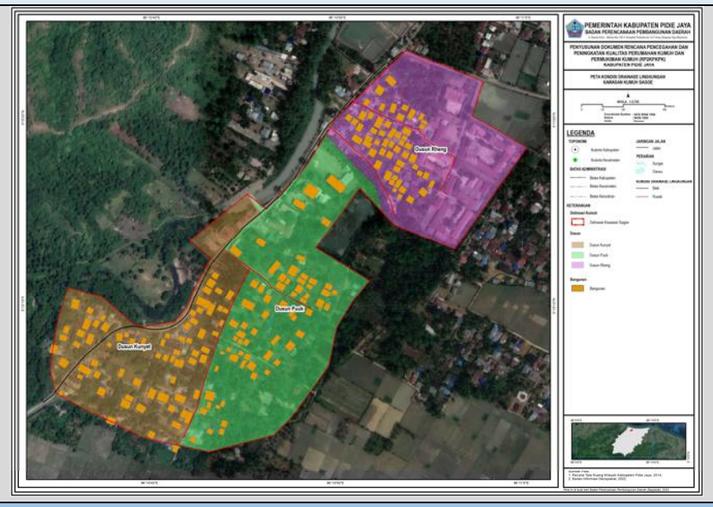




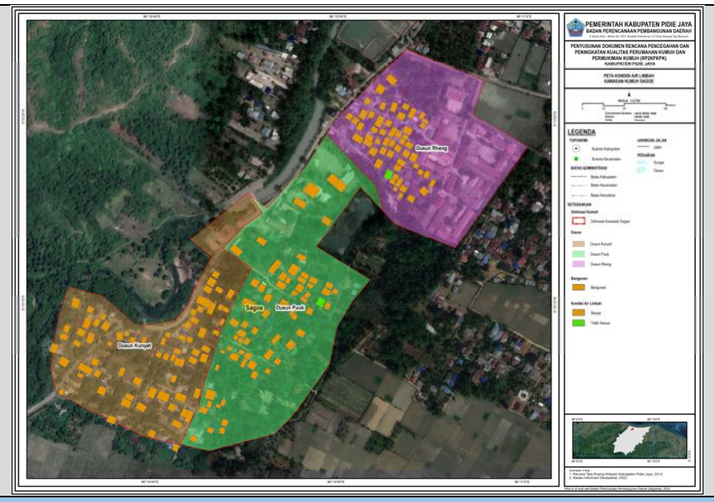


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	197	Panjang Jalan Ideal (m)	2.284,67
Jumlah RTLH (unit)	26	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.284,67
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	53	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	175,66
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	26		

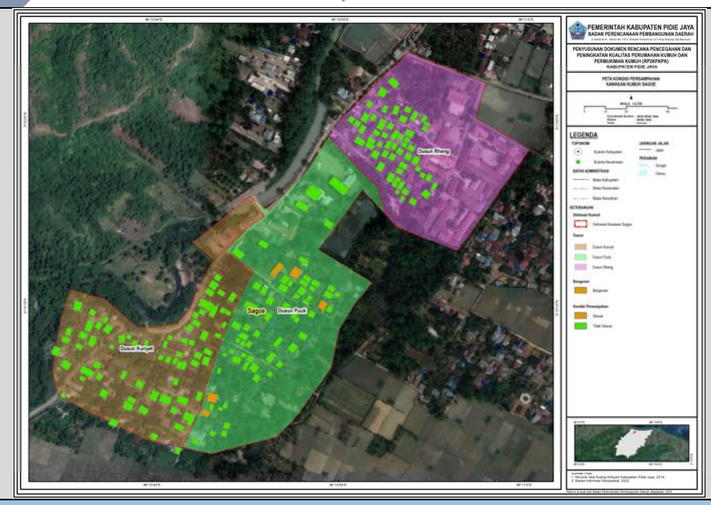




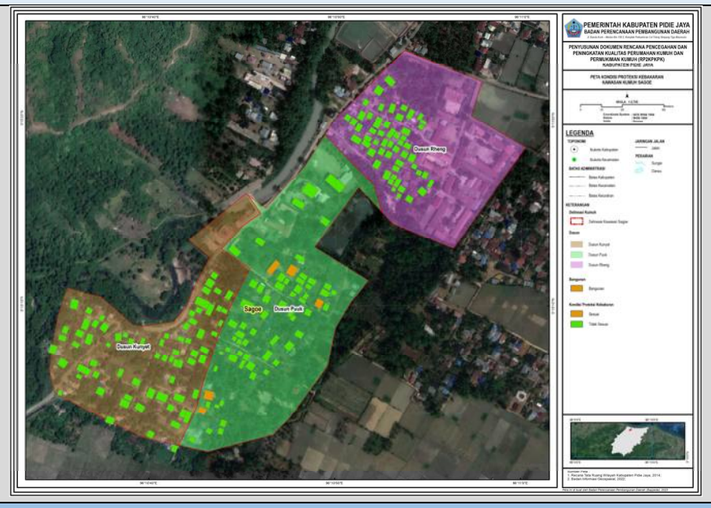
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	255	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	164	Panjang Drainase Ideal (m)	1474,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	2	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1130,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	255,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	56
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	56

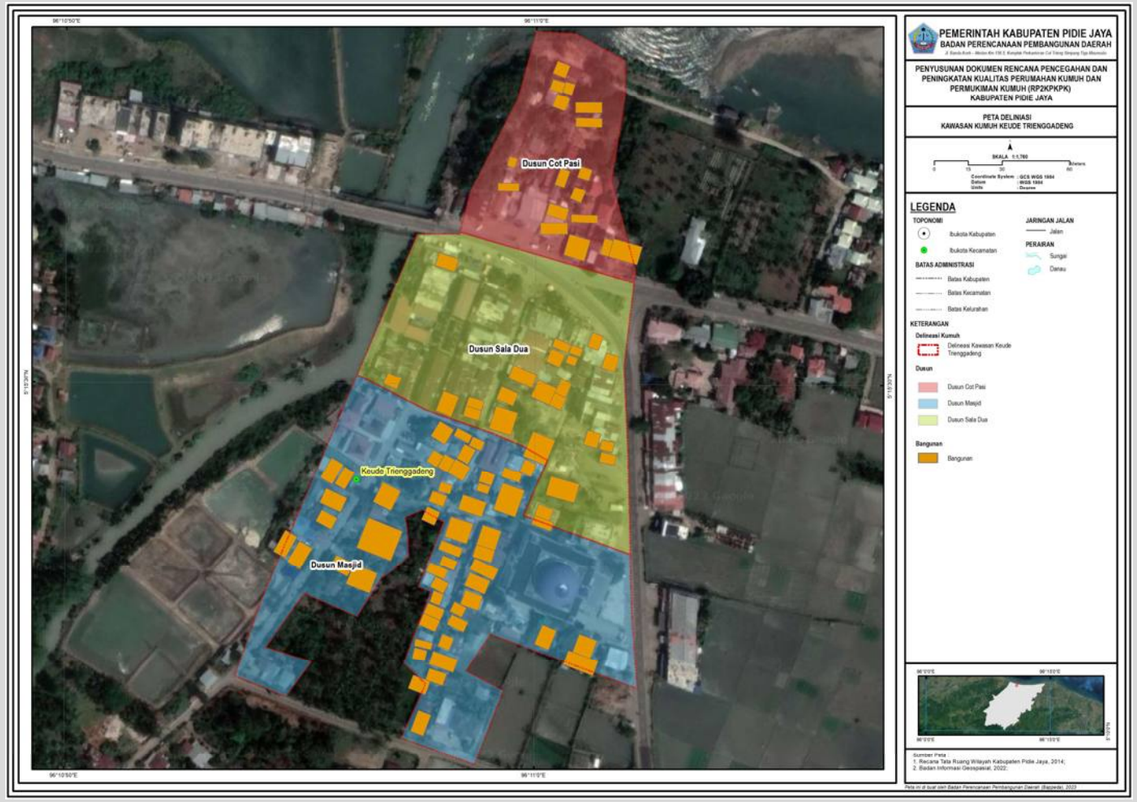


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	255,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	255
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	249



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	197,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	197

53. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng*



INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Trienggadeng	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Trienggadeng	1	Keude Trienggadeng	Dusun Mesjid	3,04	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Keude Trienggadeng	Dusun Cot Pasi	1,20	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Keude Trienggadeng	Dusun Sala Dua	2,25	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,49					
KOORDINAT						
Latitude	5.2587716					
Longitude	96.183369					
Jumlah Bangunan (Unit)	142,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	592,00					
Jumlah Kk	168,00					

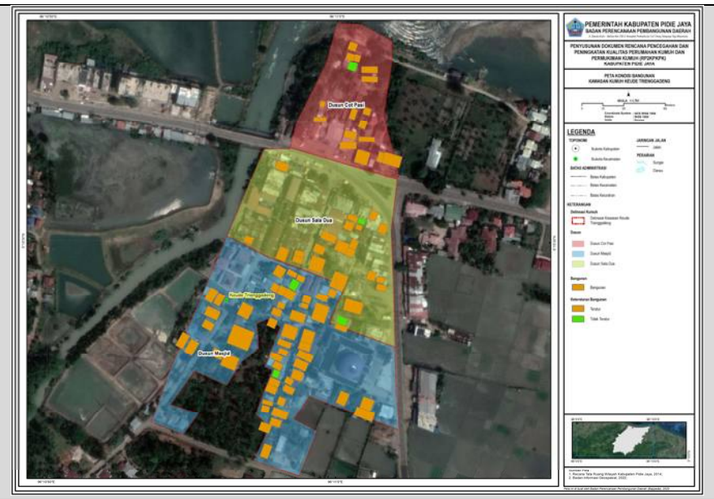
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	
Kualitas Konstruksi Drainase Tidak Memadai	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Sarana Proteksi Kebakaran	

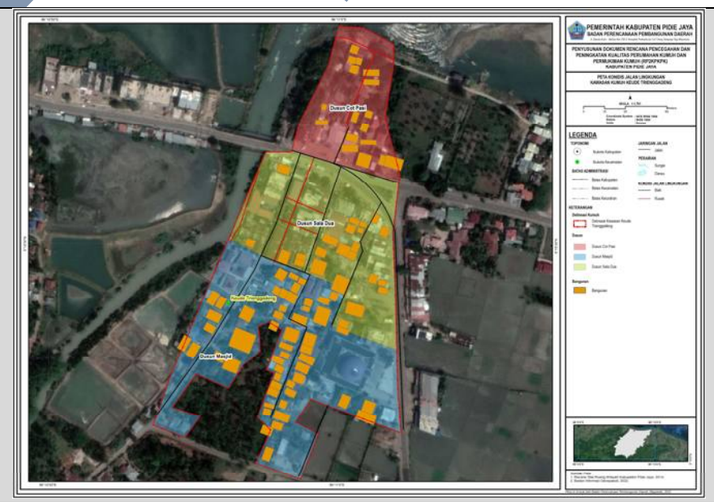






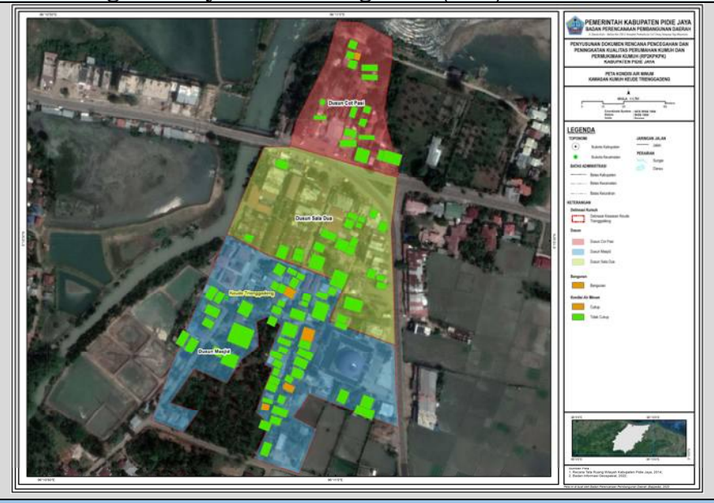


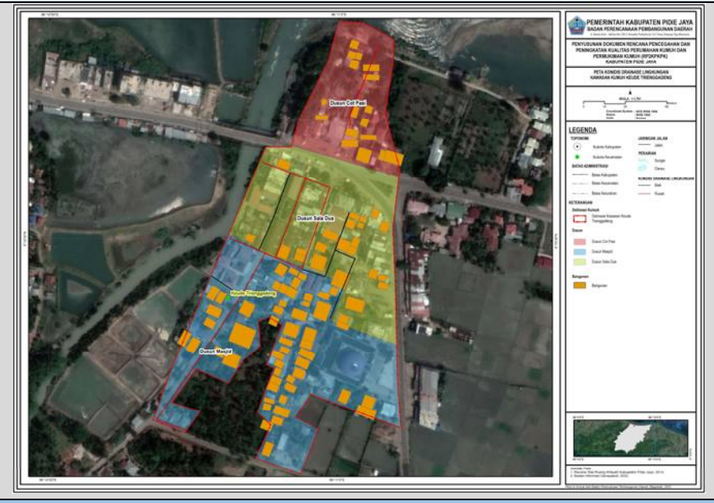




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	142
Jumlah RTLH (unit)	1
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	72
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	1

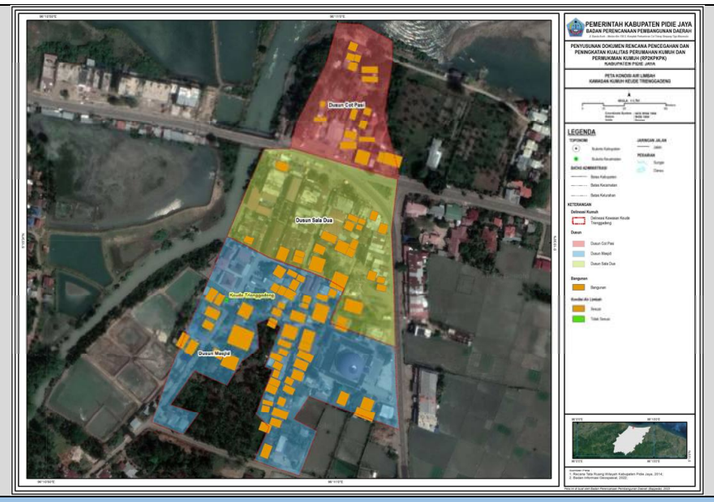
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	3.144,00
Panjang Jalan Eksisting (m)	2.500,00
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	644,00
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.173,00

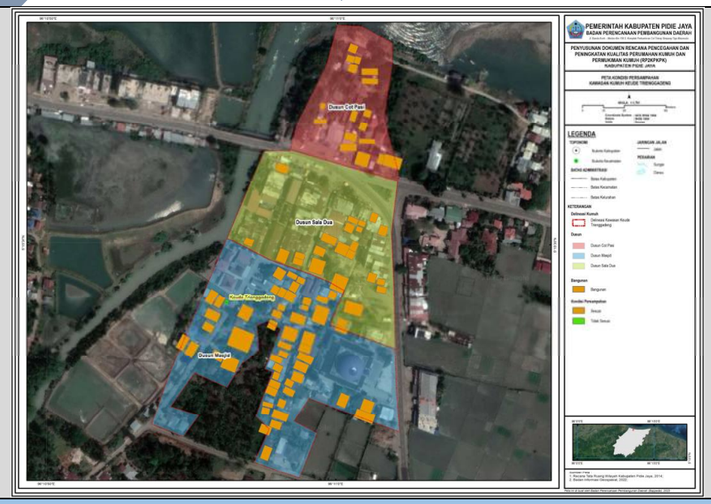




KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	168
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	55
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	149

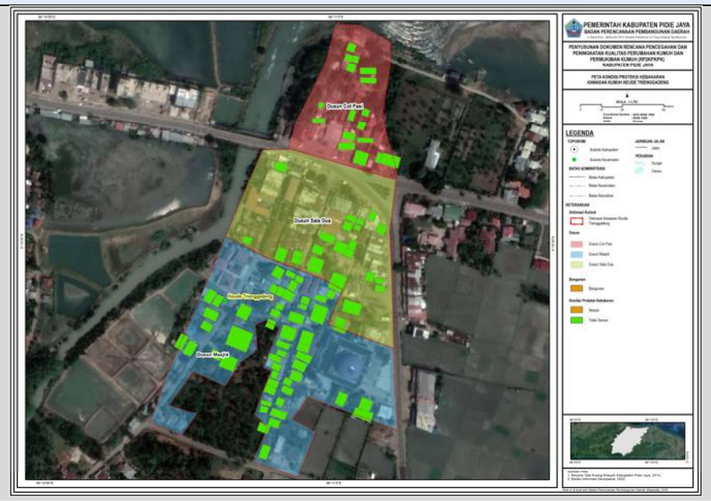
KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	1577,00
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1327,00
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	250,00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1327,00





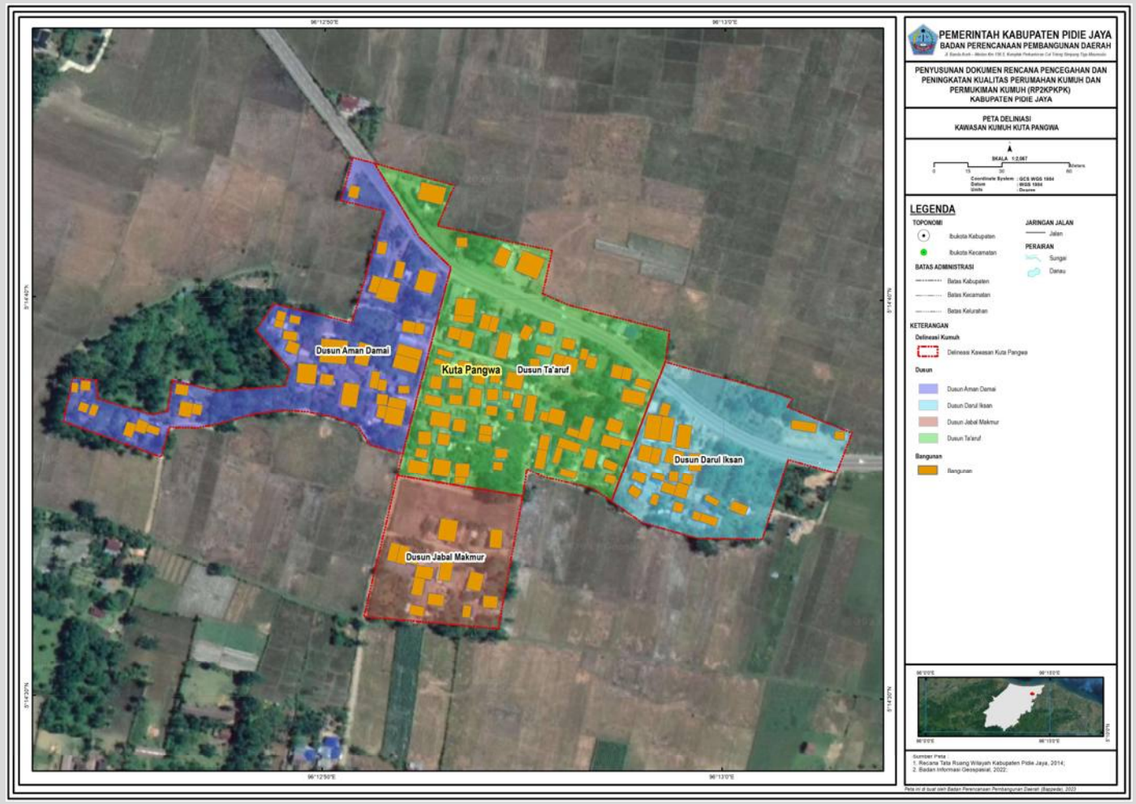
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	168,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	168,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	168
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	147



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	142,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	142

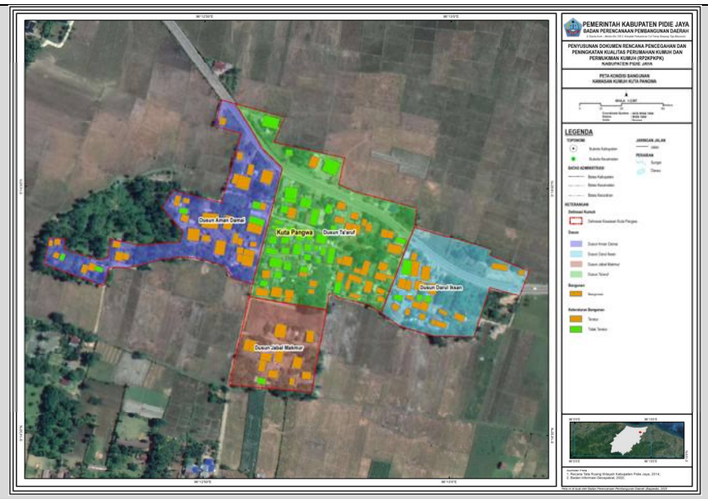
54. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng*

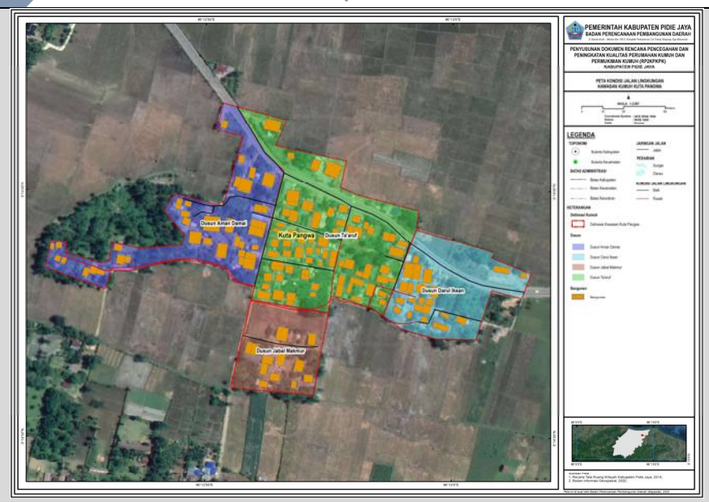


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Kuta Pangwa	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Kuta Pangwa	1	Kuta Pangwa	Darul Ikhsan	1,53	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Kuta Pangwa	Jabal Makmur	1,08	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Kuta Pangwa	Aman Damai	1,97	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Kuta Pangwa	Ta'ruf	3,01	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	7,59					
KOORDINAT						
Latitude	5.244258					
Longitude	96.215142					
Jumlah Bangunan (Unit)	181,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	589,00					
Jumlah Kk	179,00					

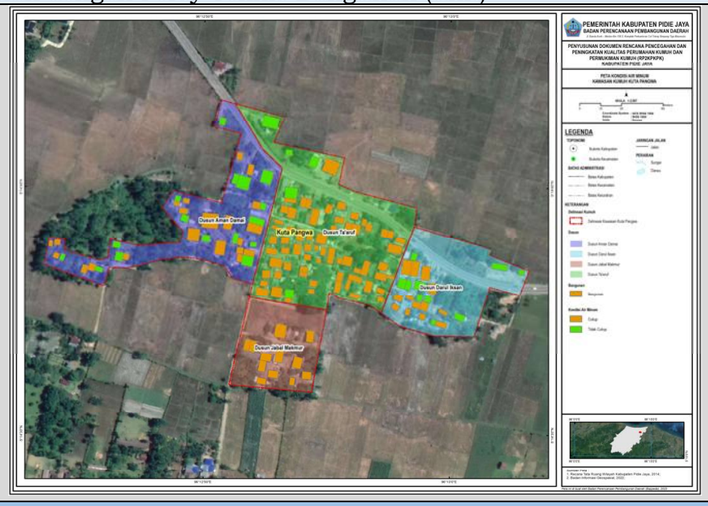
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Tidak Memadai	
Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	
Kondisi Proteksi Kebakaran	
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan	

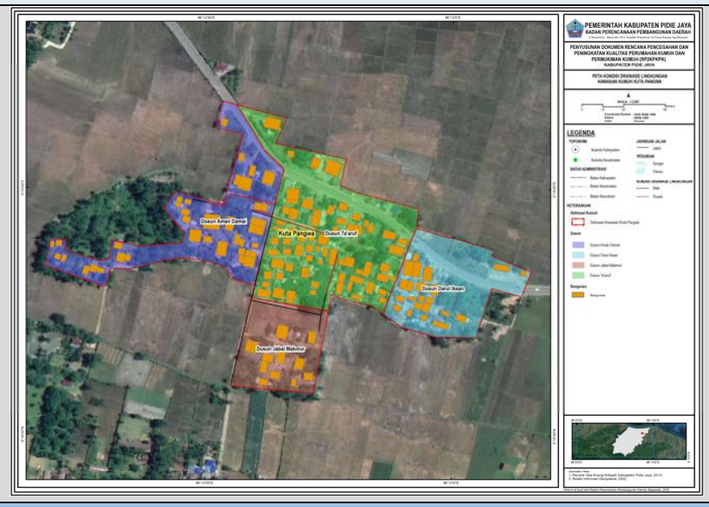




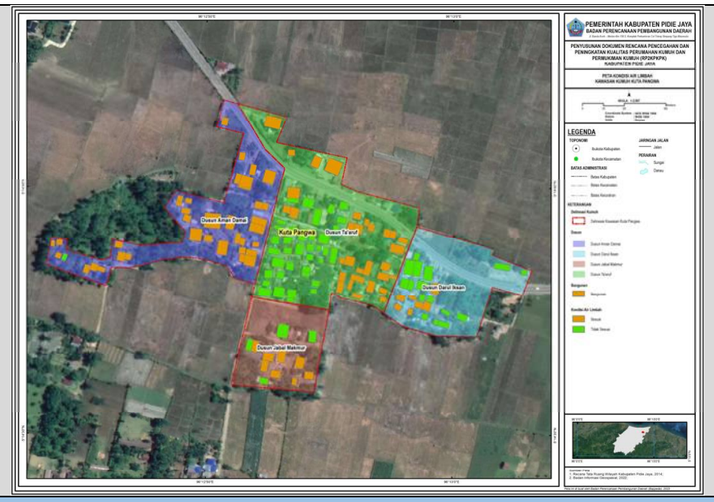


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	181	Panjang Jalan Ideal (m)	4.095,00
Jumlah RTLH (unit)	14	Panjang Jalan Eksisting (m)	3.845,00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	61	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	250,00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	3.545,00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	14		

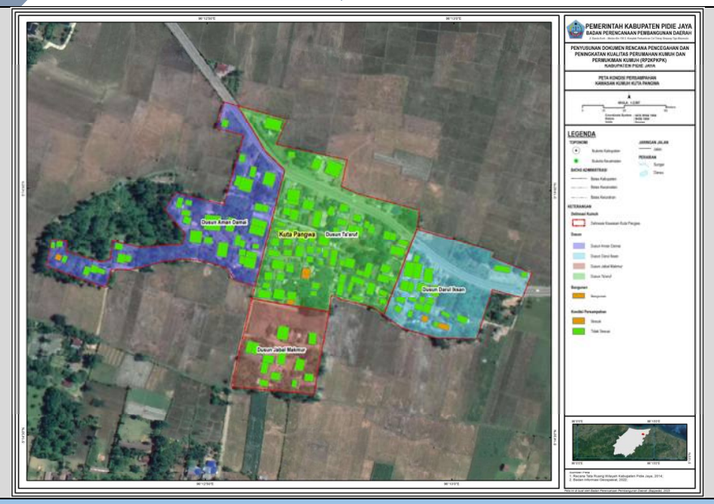




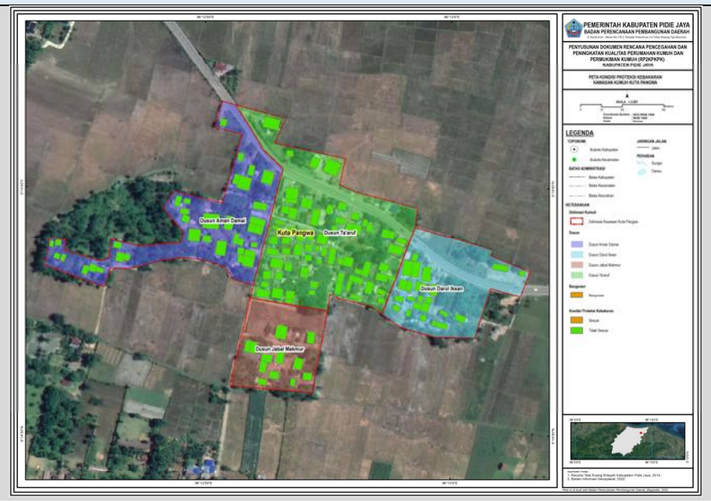
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	179	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	105	Panjang Drainase Ideal (m)	2500,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	40	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2200,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	300,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	750,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	5
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	5

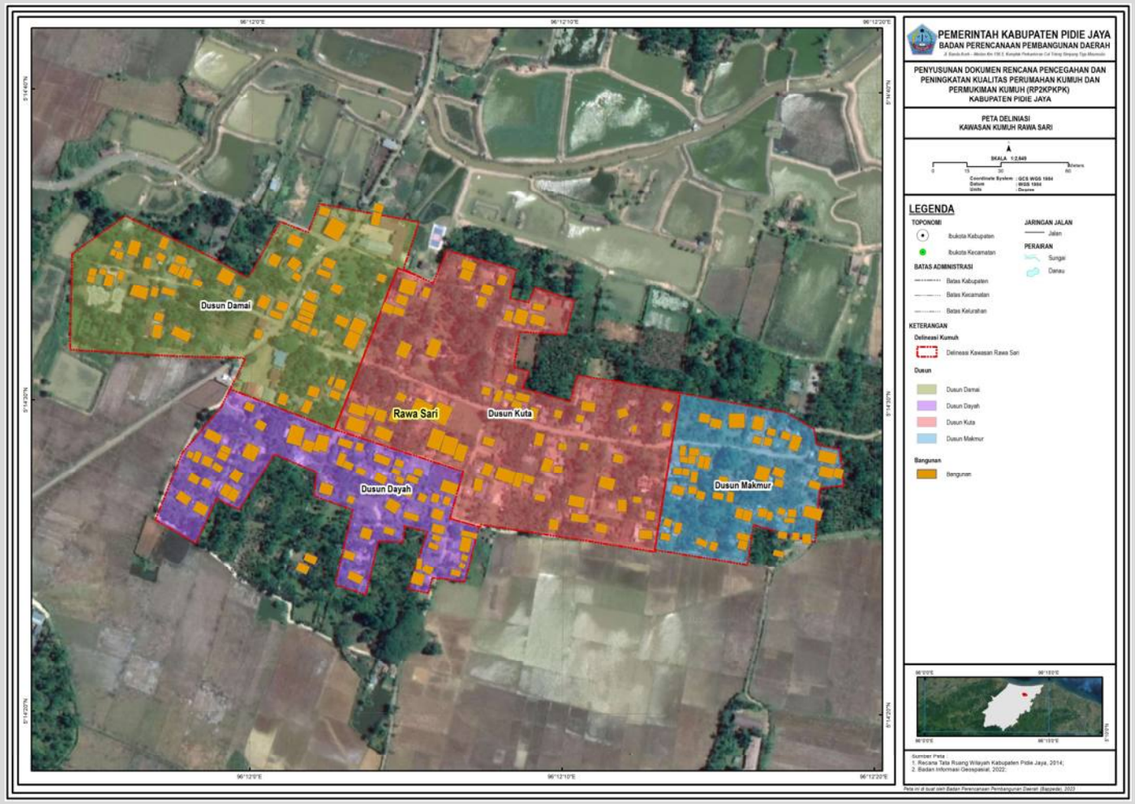


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	179,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	179
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	165



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	181,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	3
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	181

55. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Rawasari Kecamatan Trienggadeng*



INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Rawasari	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Rawasari	1	Rawasari	Dusun Damai	4,41	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Rawasari	Dusun Dayah	2,71	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Rawasari	Dusun Kuta	5,68	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Rawasari	Dusun Makmur	2,16	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	14,97					
KOORDINAT						
Latitude	5.2421539					
Longitude	96.200210					
Jumlah Bangunan (Unit)	241,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	760,00					
Jumlah Kk	295,00					

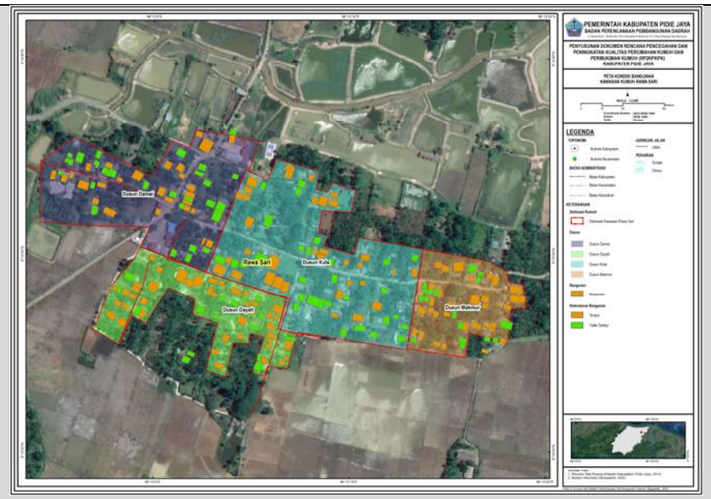
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

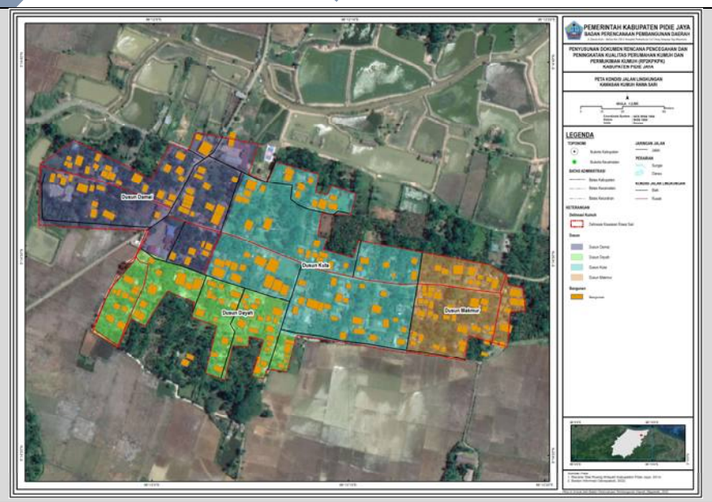
PERMASALAHAN UTAMA
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Penyediaan Air Minum
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan
Proteksi Kebakaran



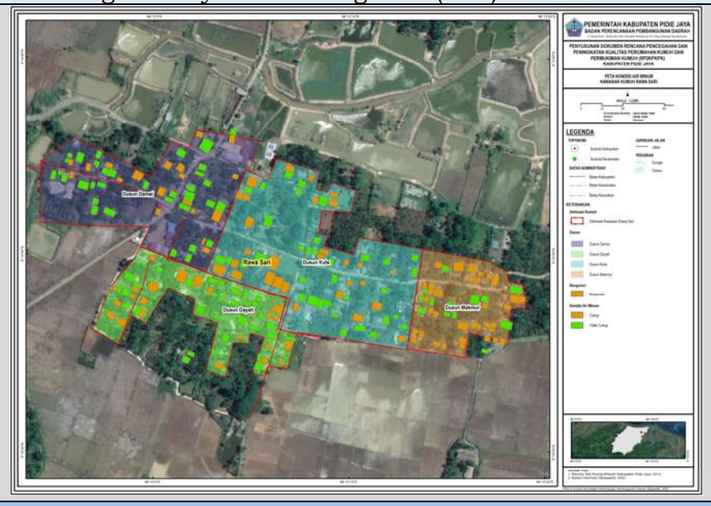


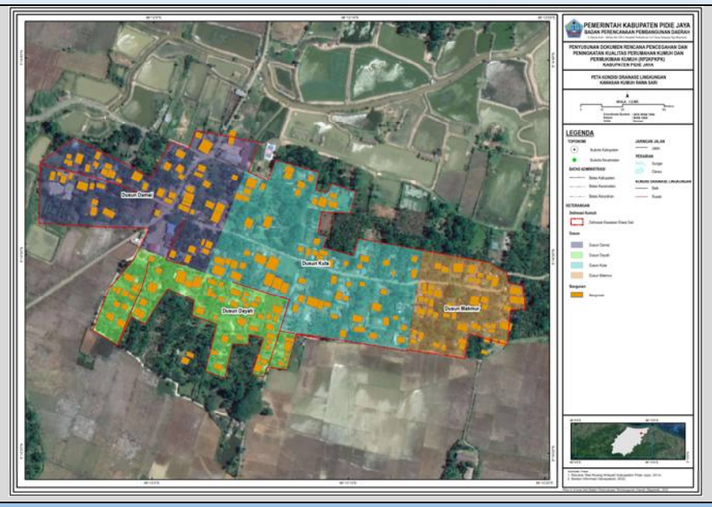


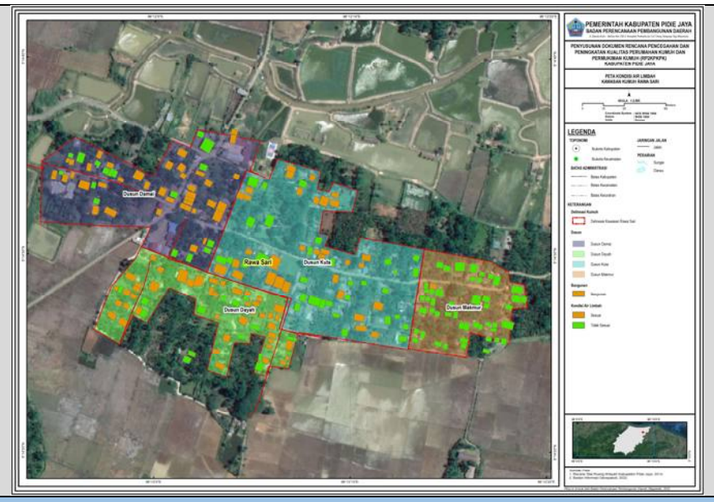


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	241	Panjang Jalan Ideal (m)	2.989,96
Jumlah RTLH (unit)	86	Panjang Jalan Eksisting (m)	2.989,96
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	67	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1.169,45
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	86		

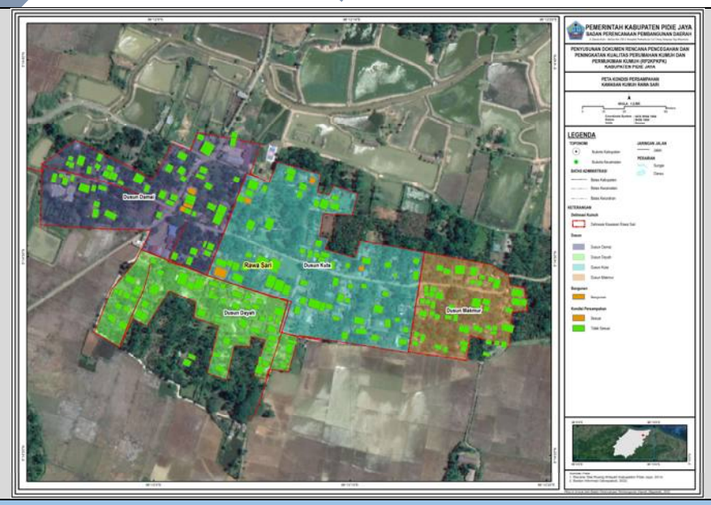




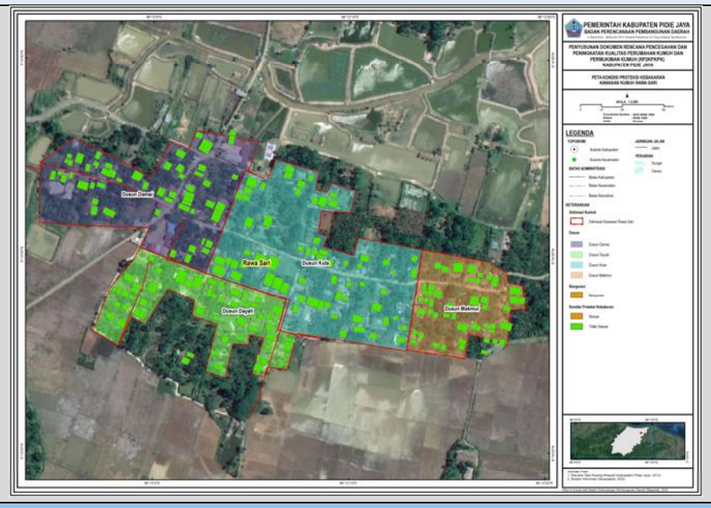
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	295	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	152	Panjang Drainase Ideal (m)	1576,81
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	156	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	645,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	931,81
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	645,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	295,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	102
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	102

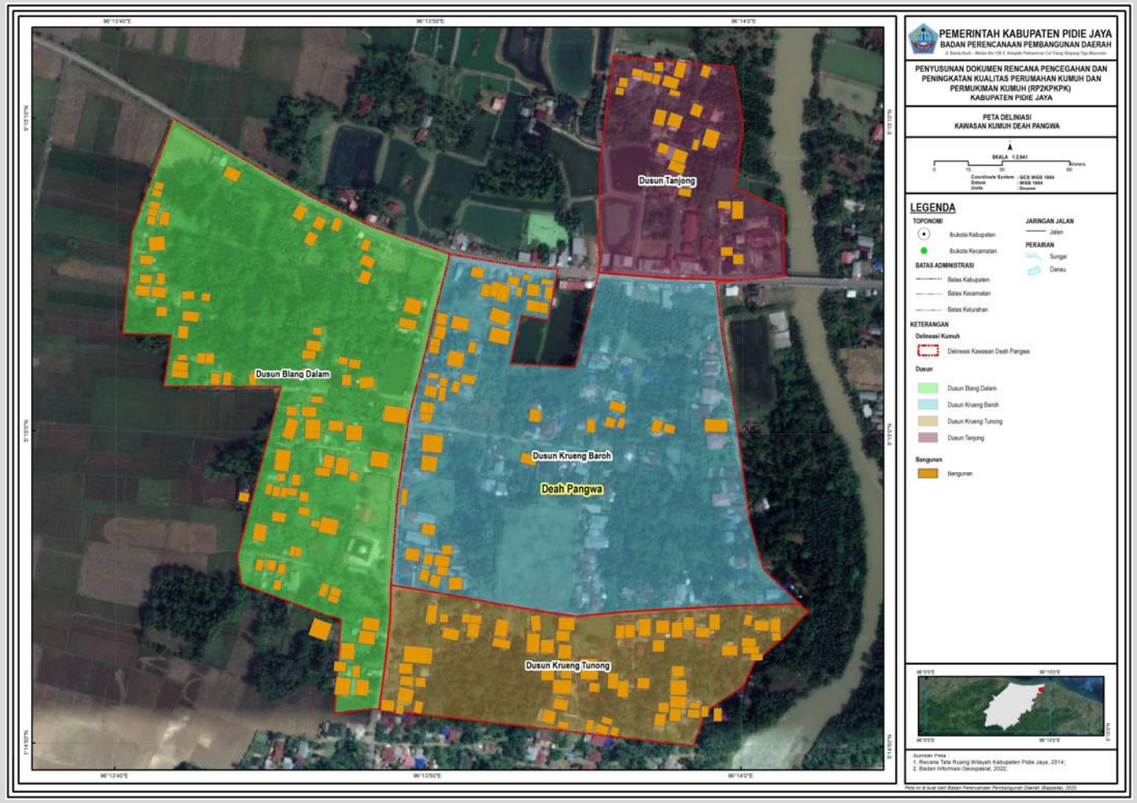


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	295,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	295
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	285

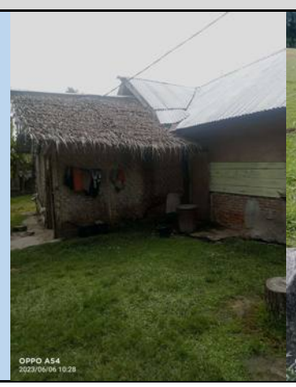


KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	241,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	241

56. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng*



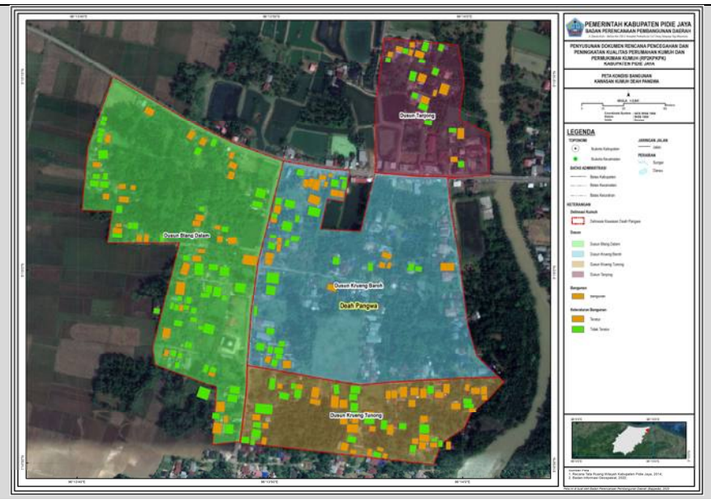
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Deah Pangwa	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Deah Pangwa	1	Deah Pangwa	Dusun Blang Dalam	9,21	Kumuh Ringan
Kecamatan	Trienggadeng	2	Deah Pangwa	Dusun Krueng Baroh	10,25	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Deah Pangwa	Dusun Krueng Tunong	4,39	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Deah Pangwa	Dusun Tanjong	3,19	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	27,04					
KOORDINAT						
Latitude	5.249727					
Longitude	96.22989					
Jumlah Bangunan (Unit)	284,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1230,00					
Jumlah Kk	342,00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Ketidakteraturan Bangunan Gedung						
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum						
Kualitas Konstruksi Drainase						
Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan						
Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan						

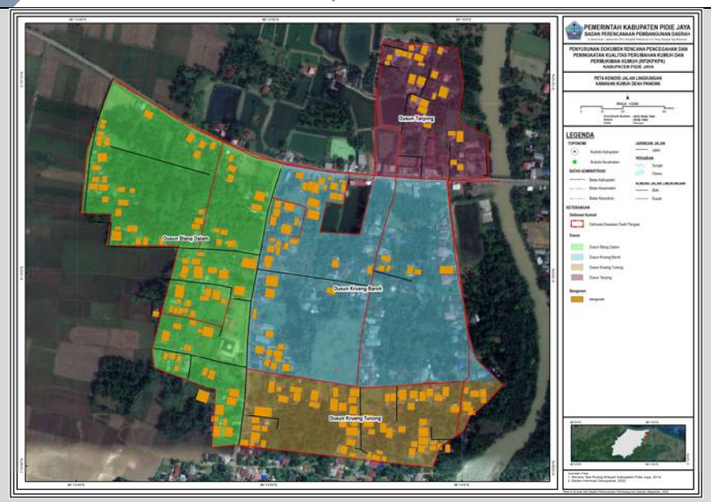




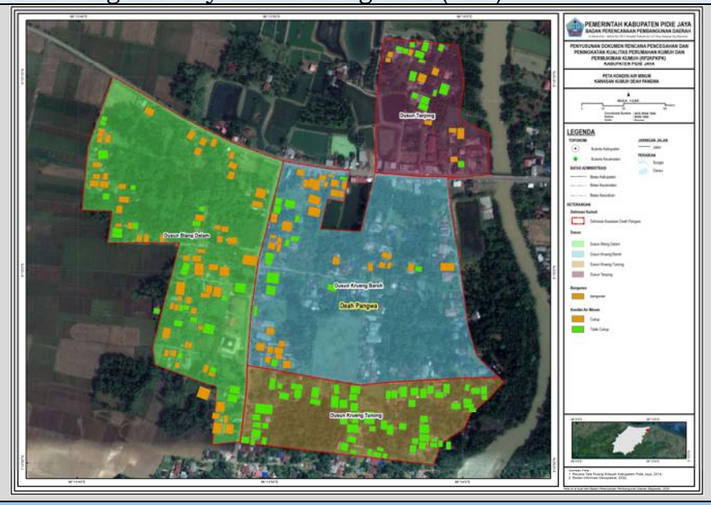


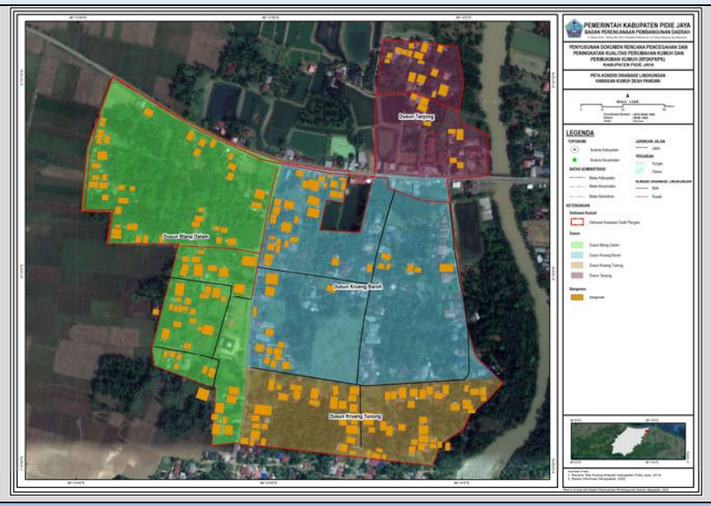




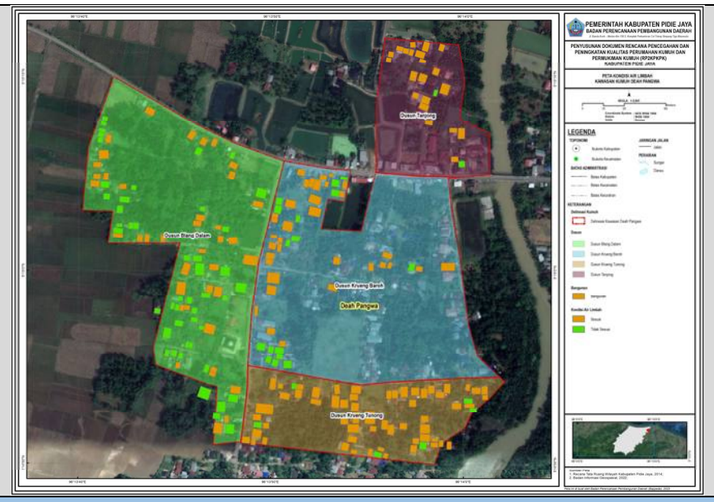


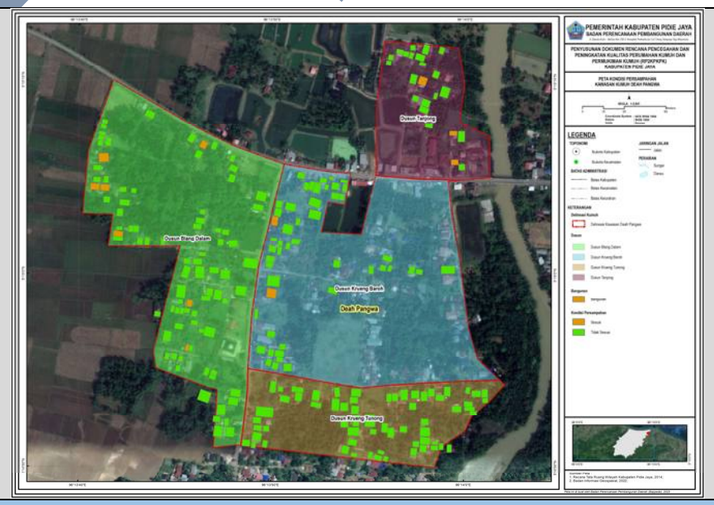
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	284	Panjang Jalan Ideal (m)	4.254,40
Jumlah RTLH (unit)	107	Panjang Jalan Eksisting (m)	4.254,40
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	143	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2.382,59
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	107		





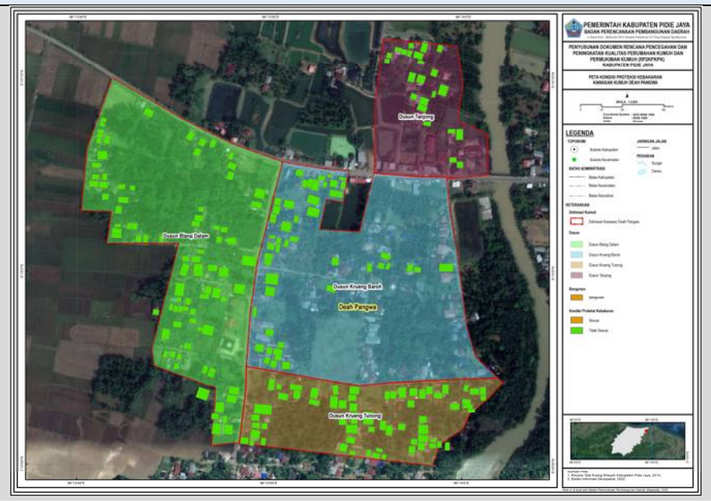
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	342	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	64	Panjang Drainase Ideal (m)	3460,11
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	195	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	2777,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	683,11
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	1118,00





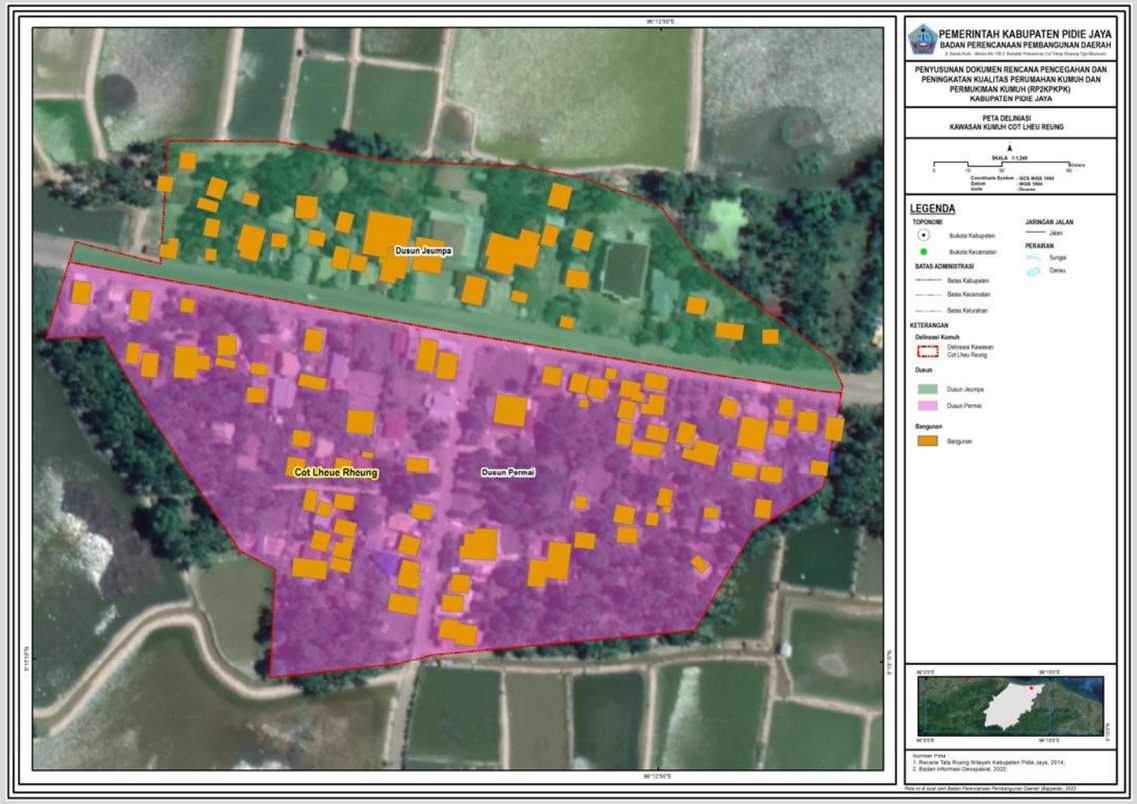
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	342,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	46
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	46

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	342,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	342
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	323



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	284,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	284

57. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Cot Lheue Rheung Kecamatan Trienggadeng*



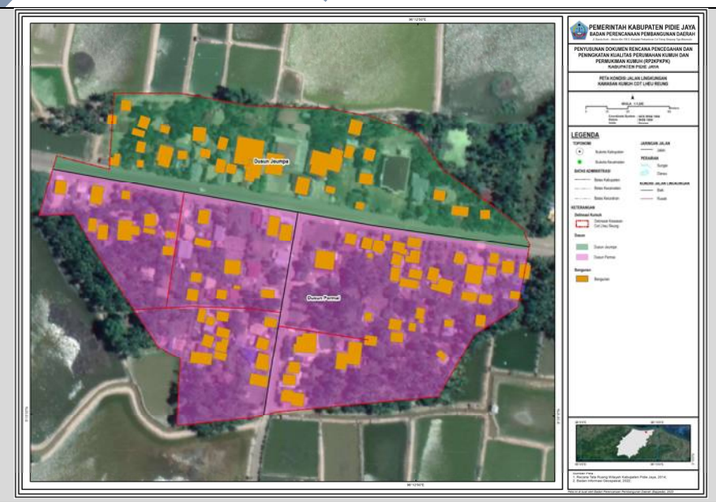
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Cot Lheue Rheung	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Cot Lheue Rheung	1	Cot Lheue Rheung	Jumpa	2,08	Kumuh Ringan
Kecamatan	Cot Lheue Rheung	2	Cot Lheue Rheung	Permai	4,05	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	6,13					
KOORDINAT						
Latitude	5.2540608					
Longitude	96.213056					
Jumlah Bangunan (Unit)	161,00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	700,00					
Jumlah Kk	205,00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

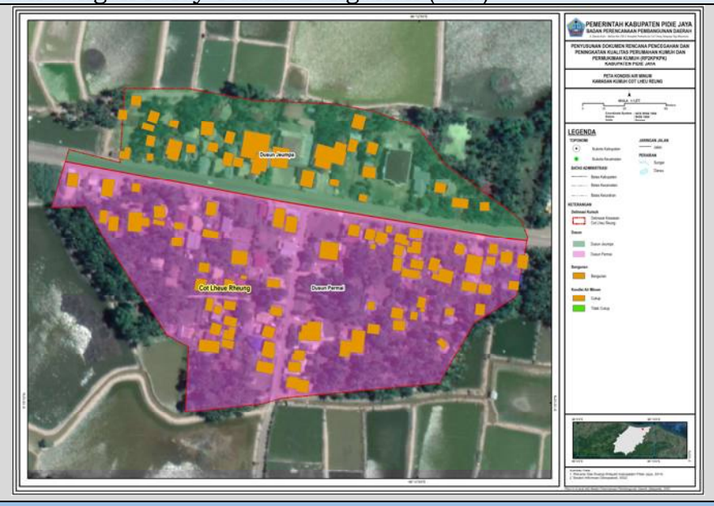
PERMASALAHAN UTAMA
Ketidakteraturan Bangunan
Kualitas Konstruksi Drainase
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis
Proteksi Kebakaran





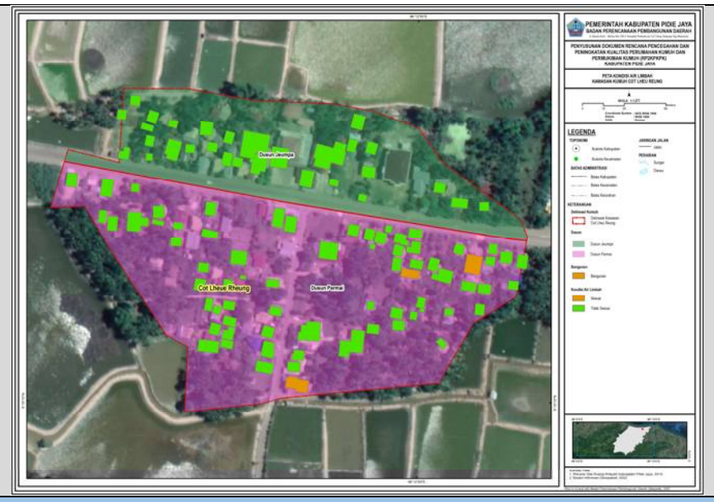


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	161	Panjang Jalan Ideal (m)	781,74
Jumlah RTLH (unit)	19	Panjang Jalan Eksisting (m)	781,74
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	162	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	266,41
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	19		

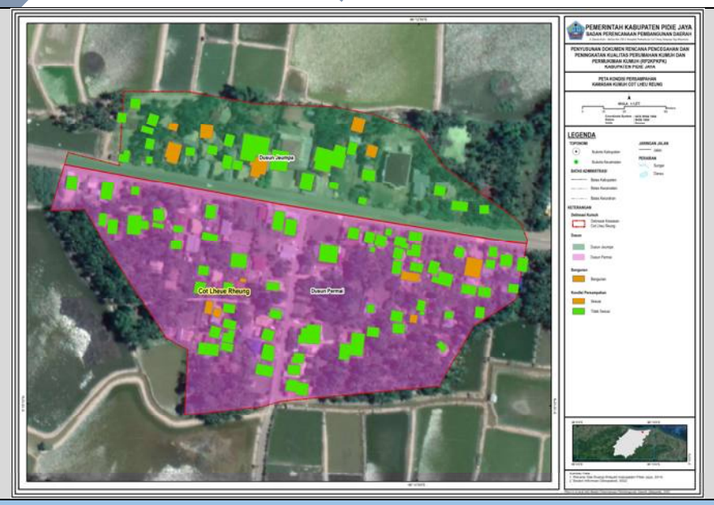




KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	205	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	8	Panjang Drainase Ideal (m)	648,00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	648,00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0,00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	495,00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	205,00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	6
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	6

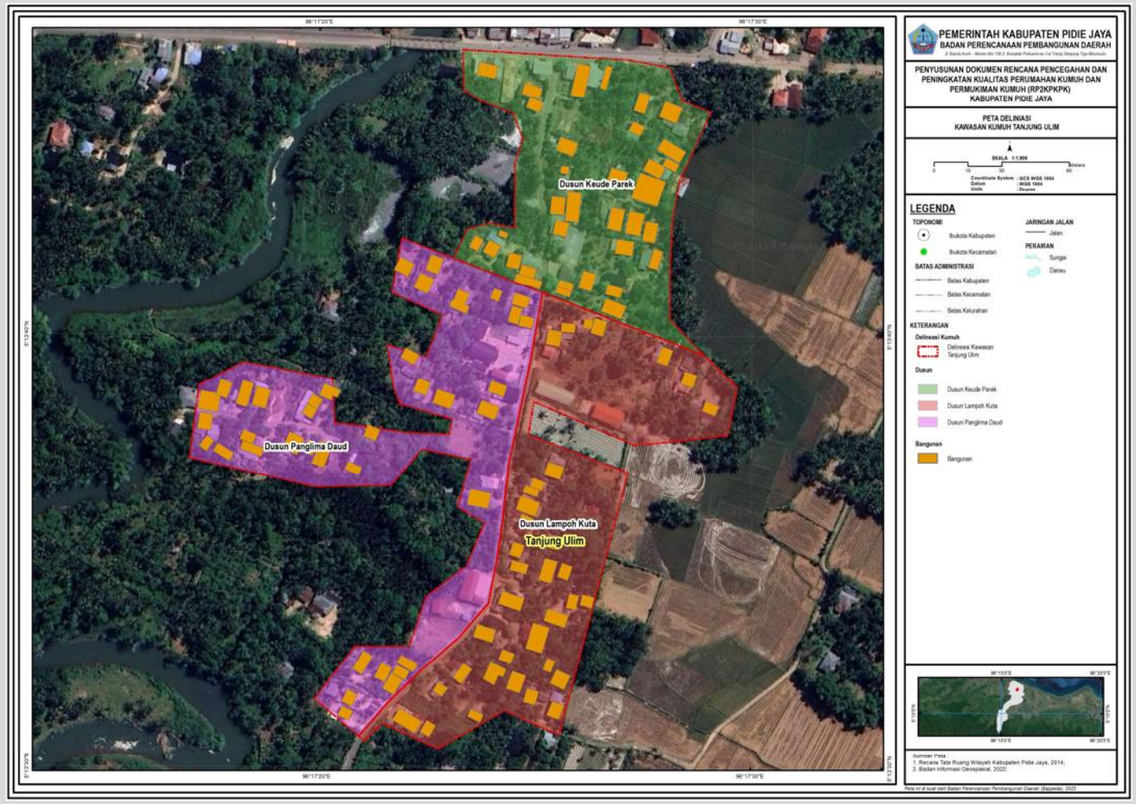


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	205,00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	205
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	179



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	161,00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	-
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	161

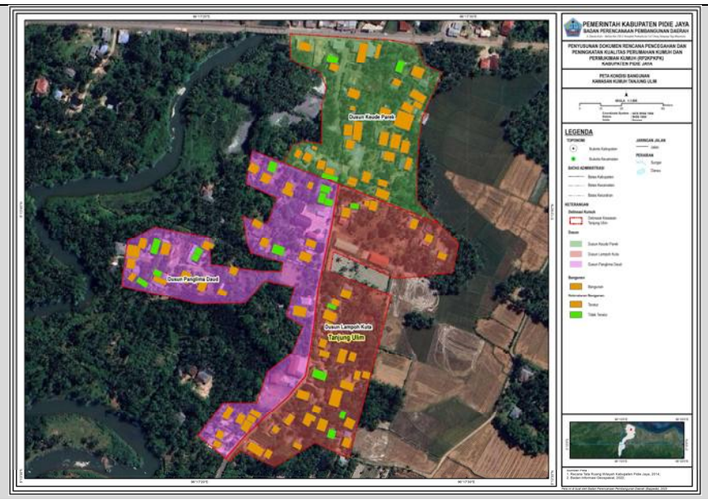
58. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Tanjong Ulim Kecamatan Ulim*



INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Tanjong Ulim	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Tanjong Ulim	1	Tanjong Ulim	Lampoh Kuta	2.90	Kumuh Ringan
Kecamatan	Ulim	2	Tanjong Ulim	Keude Parek	2.38	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Tanjong Ulim	Panglima Daud	2.75	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	8,03					
KOORDINAT						
Latitude	5.2285931					
Longitude	96.290646					
Jumlah Bangunan (Unit)	143.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	612.00					
Jumlah Kk	179.00					

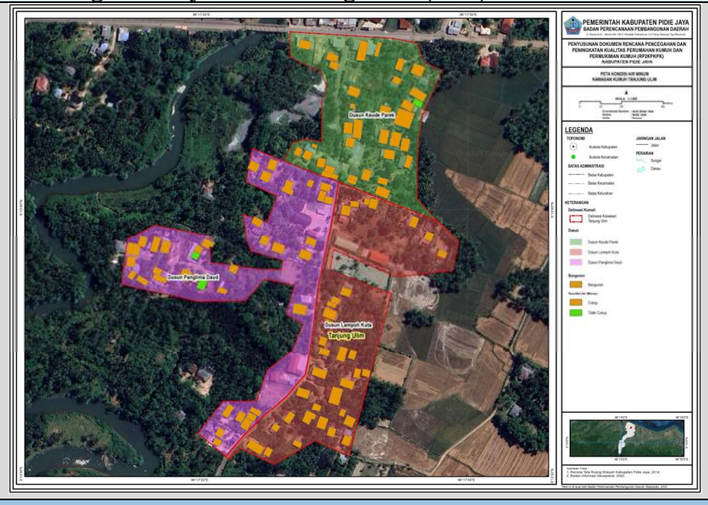
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Ketidakteraturan Bangunan Gedung	
Kualitas Konstruksi Drainase	
Ketidaktersediaan Prasarana Prokteksi Kebakaran	

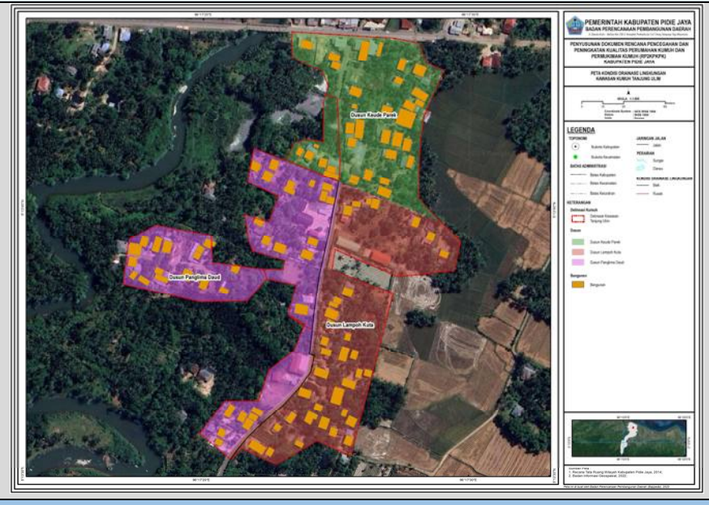




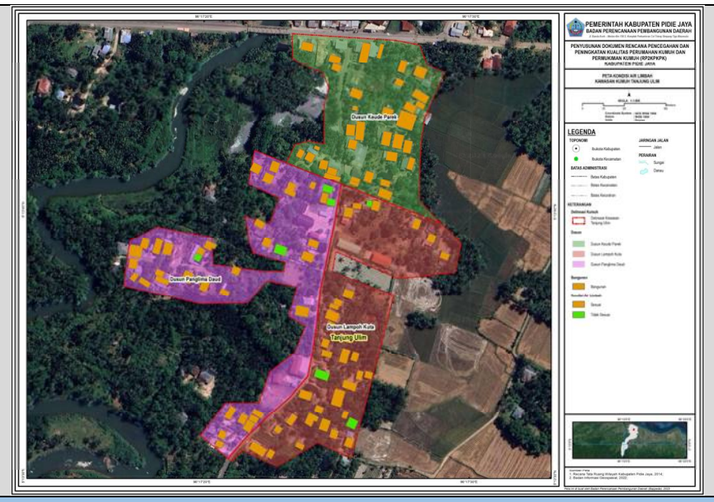


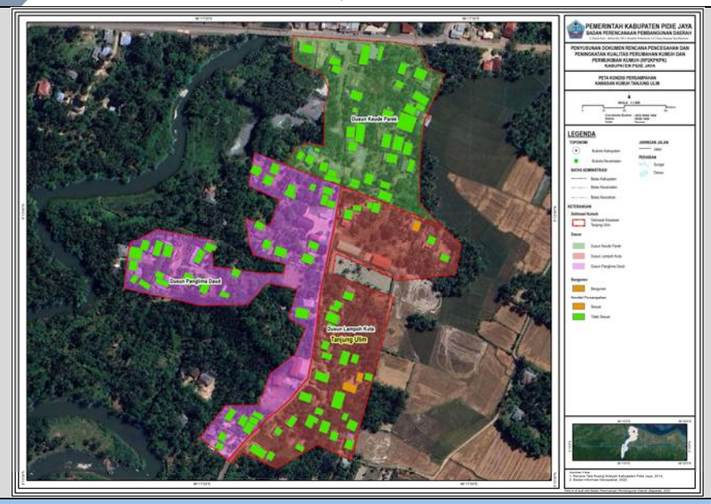
BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	143	Panjang Jalan Ideal (m)	1,112.00
Jumlah RTLH (unit)	11	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,112.00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	106	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	180.00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	11		





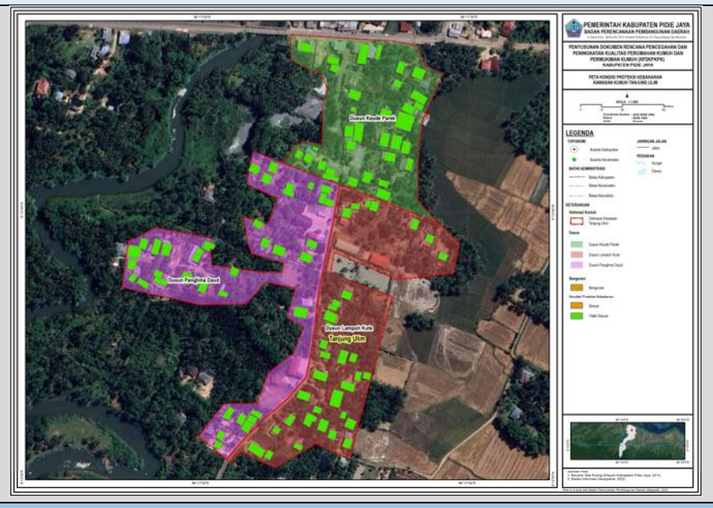
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	179	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	11	Panjang Drainase Ideal (m)	748.74
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	3	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	561.74
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	187.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	358.32





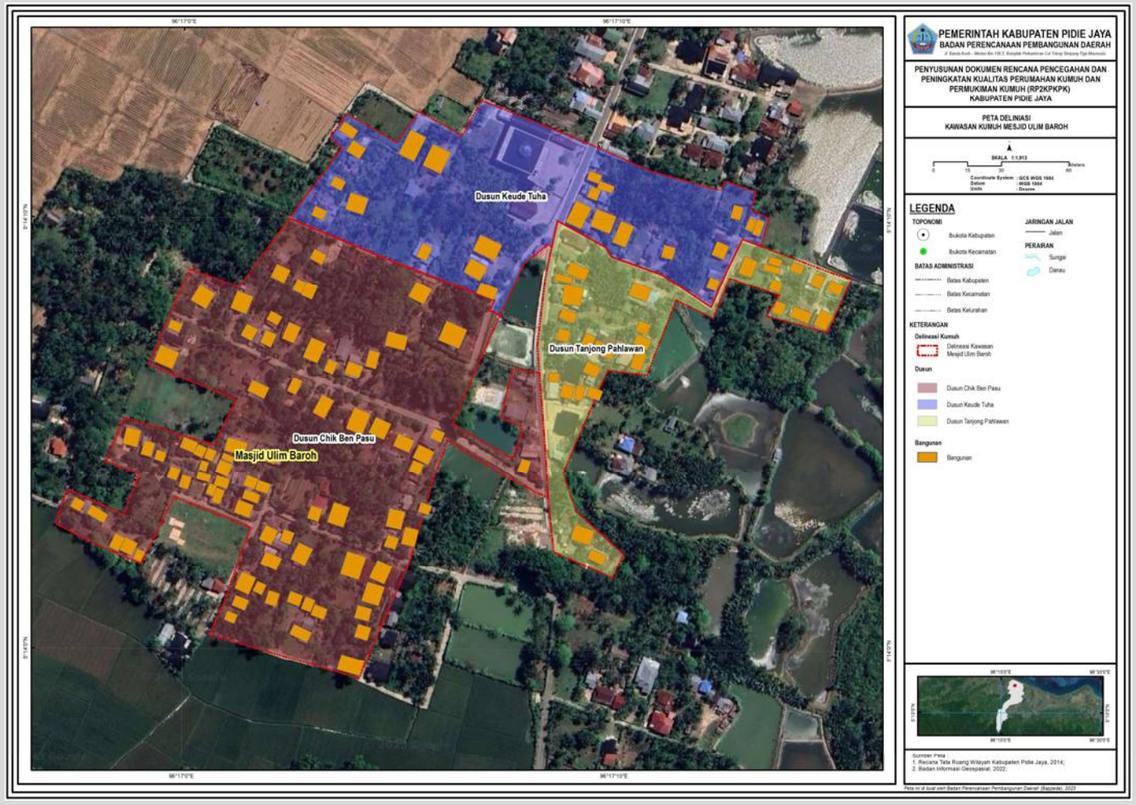
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	179.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	7
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	7

KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	179.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	179
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	174



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	143.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	143

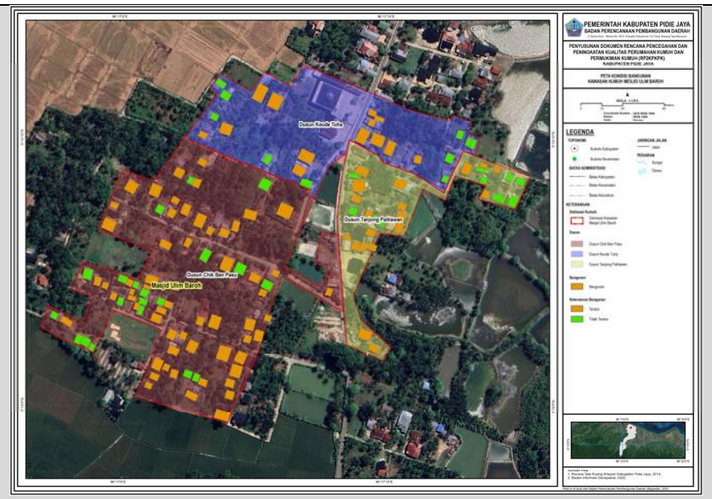
59. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Mesjid Ulim Baroh Kecamatan Ulim*



INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Mesjid Ulim Baroh	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Mesjid Ulim Baroh	1	Mesjid Ulim Baroh	Chiek Ben Pasu	5.55	Kumuh Ringan
Kecamatan	Ulim	2	Mesjid Ulim Baroh	Keudee Tuha	2.74	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Mesjid Ulim Baroh	Tanjung Pahlawan	1.50	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	9,79					
KOORDINAT						
Latitude	5.235464					
Longitude	96.28486					
Jumlah Bangunan (Unit)	173.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	788.00					
Jumlah Kk	212.00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	
Ketidakteraturan Bangunan	
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	

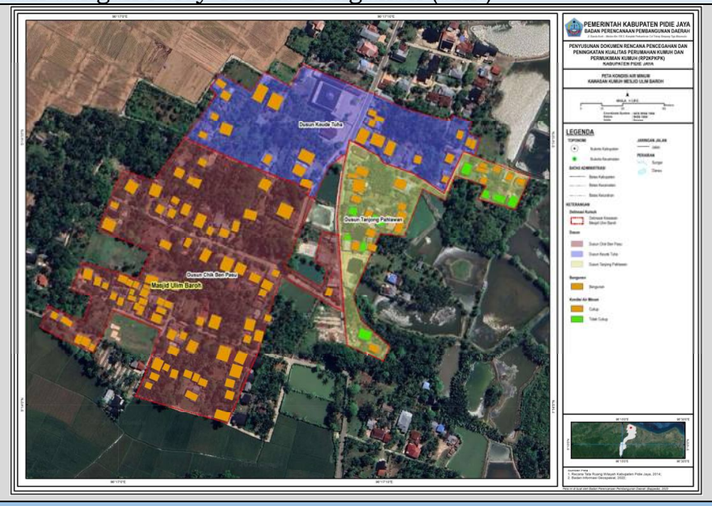


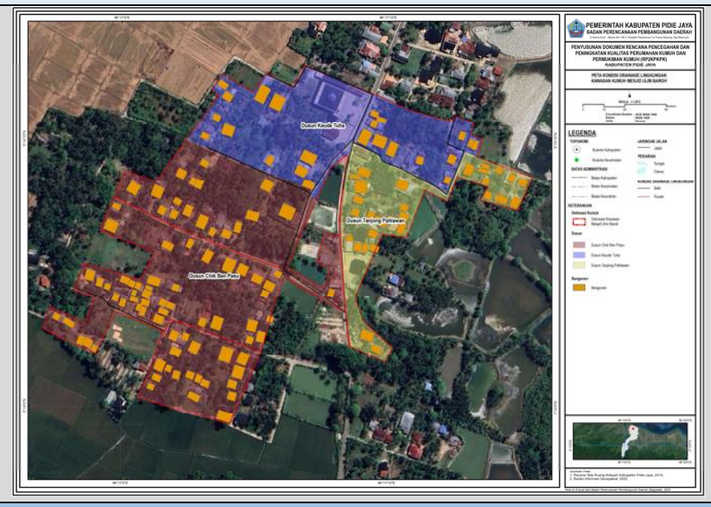




BANGUNAN	
Jumlah Bangunan (unit)	173
Jumlah RTLH (unit)	38
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	140
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	173

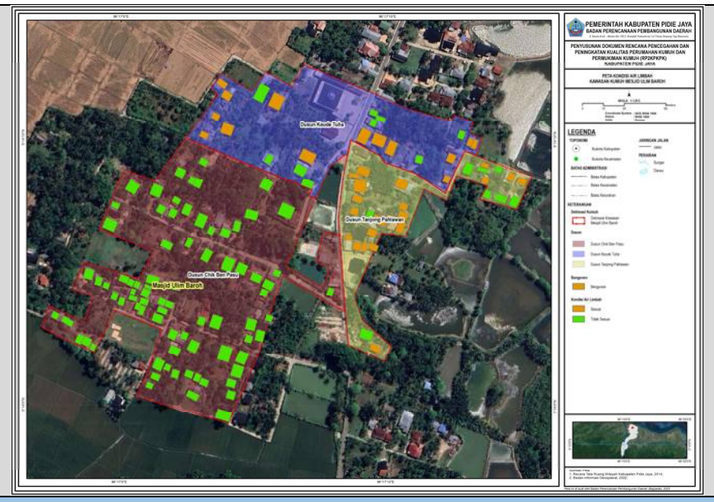
JALAN LINGKUNGAN	
Panjang Jalan Ideal (m)	2,156.00
Panjang Jalan Eksisting (m)	2,156.00
a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	881.00





KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	
Jumlah KK	212
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	20
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	23

KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
Panjang Drainase Ideal (m)	1465.00
Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1465.00
a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	501.18



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	212.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	18
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	18

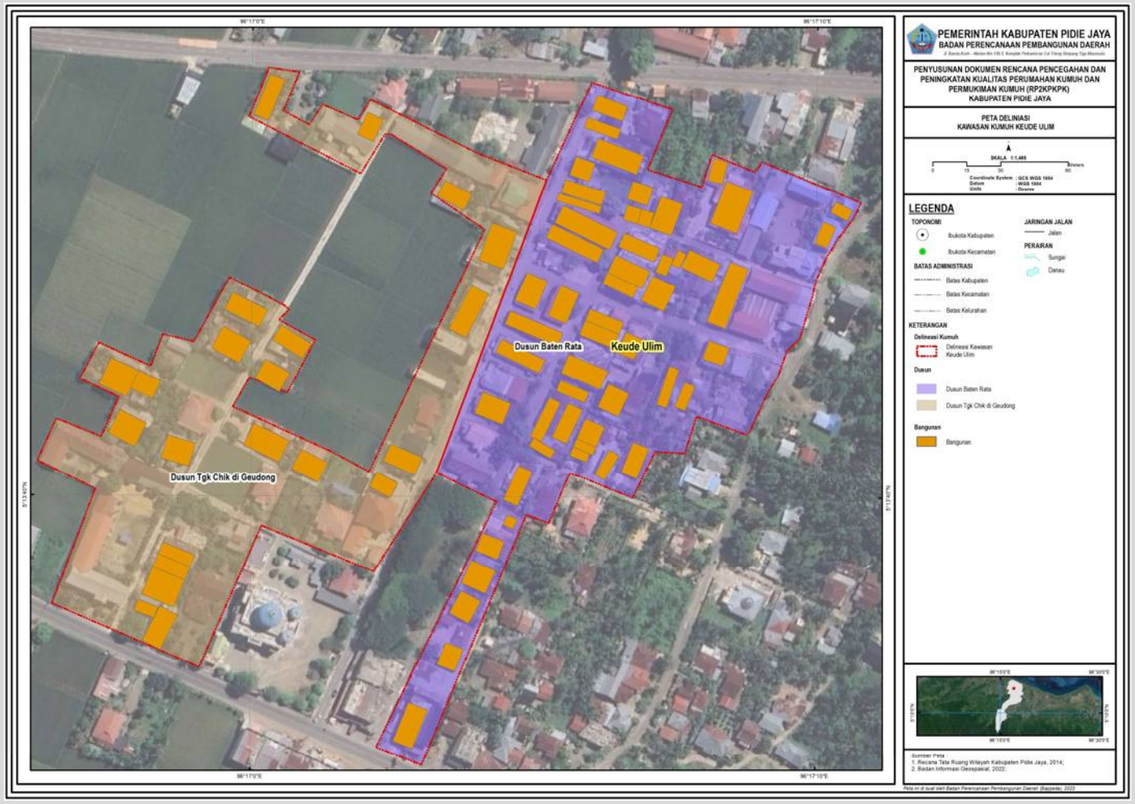


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	212.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	212
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	200



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	173.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	173

60. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Ulim Kecamatan Ulim*

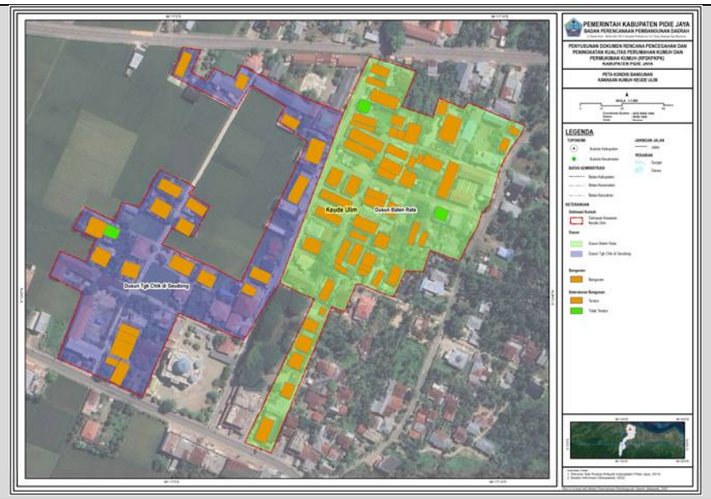


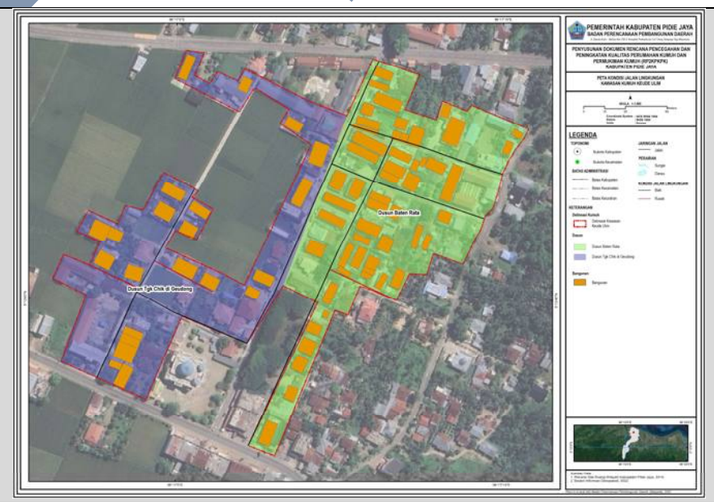
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Ulim	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Ulim	1	Keude Ulim	Baten Rata	9.37	Kumuh Ringan
Kecamatan	Ulim	2	Keude Ulim	Tgk. Di Gudong	3.38	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	12,75					
KOORDINAT						
Latitude	5.2286660					
Longitude	96.284559					
Jumlah Bangunan (Unit)	67.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	238.00					
Jumlah Kk	76.00					

KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan

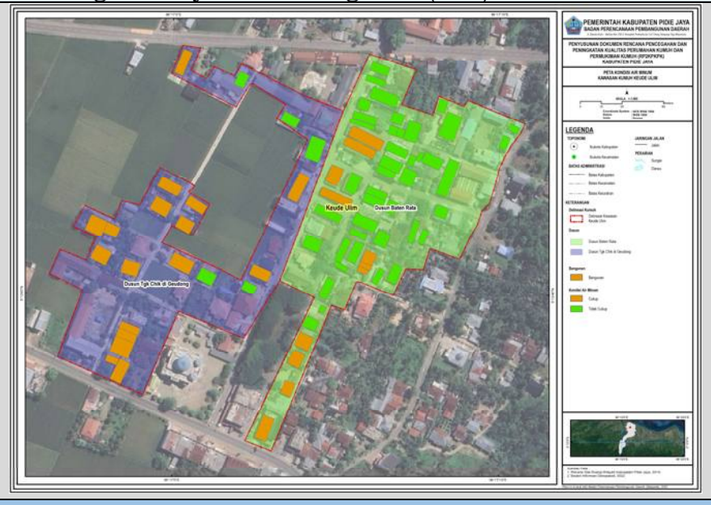
PERMASALAHAN UTAMA
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Drainase
Ketidaktersediaan Drainase

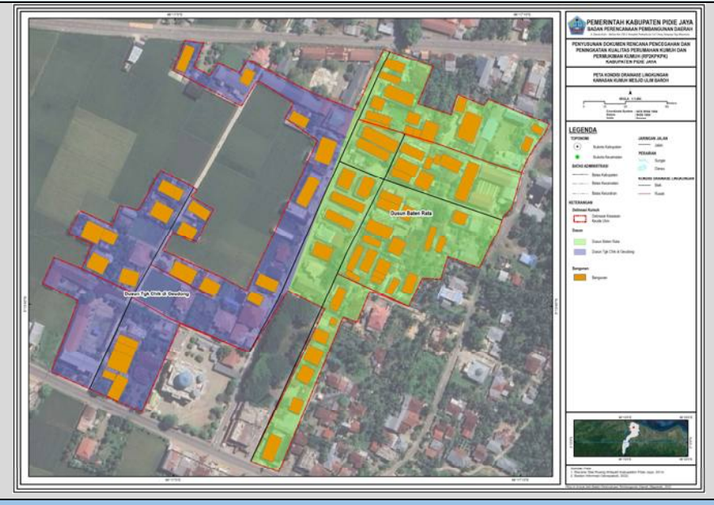




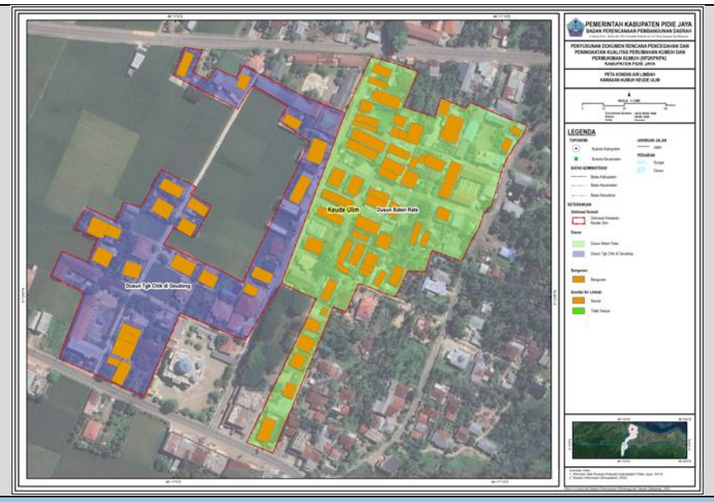


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	67	Panjang Jalan Ideal (m)	1,140.00
Jumlah RTLH (unit)	1	Panjang Jalan Eksisting (m)	550.00
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	3	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	590.00
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	260.00
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	1		

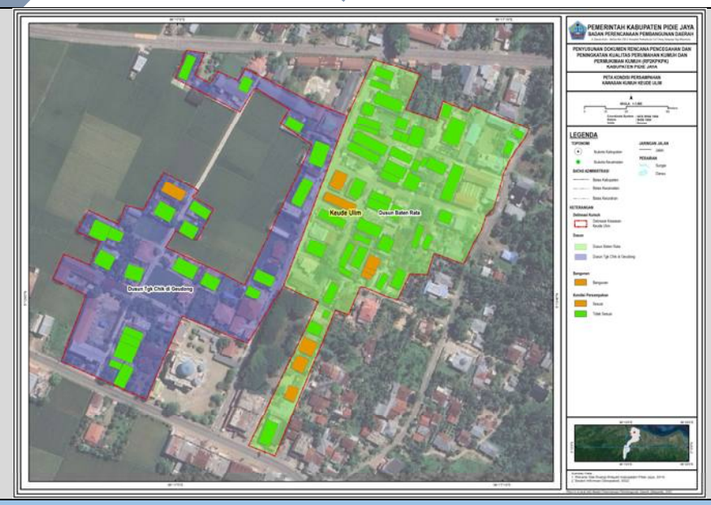




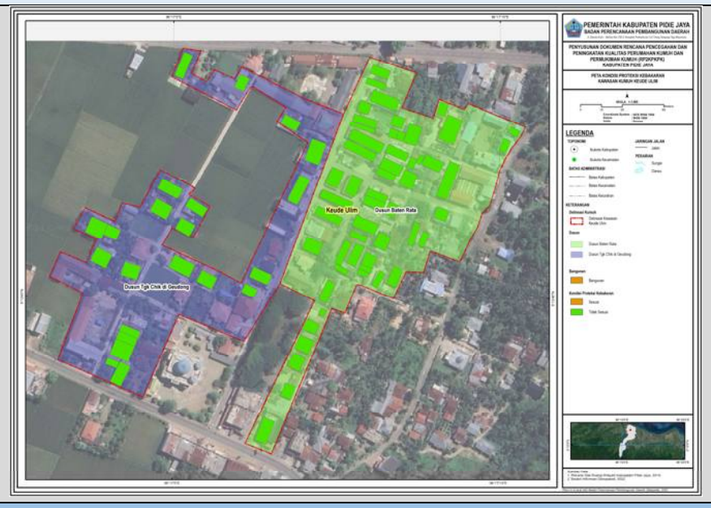
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	76	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	11	Panjang Drainase Ideal (m)	1200.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	53	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	550.00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	650.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	280.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	76.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

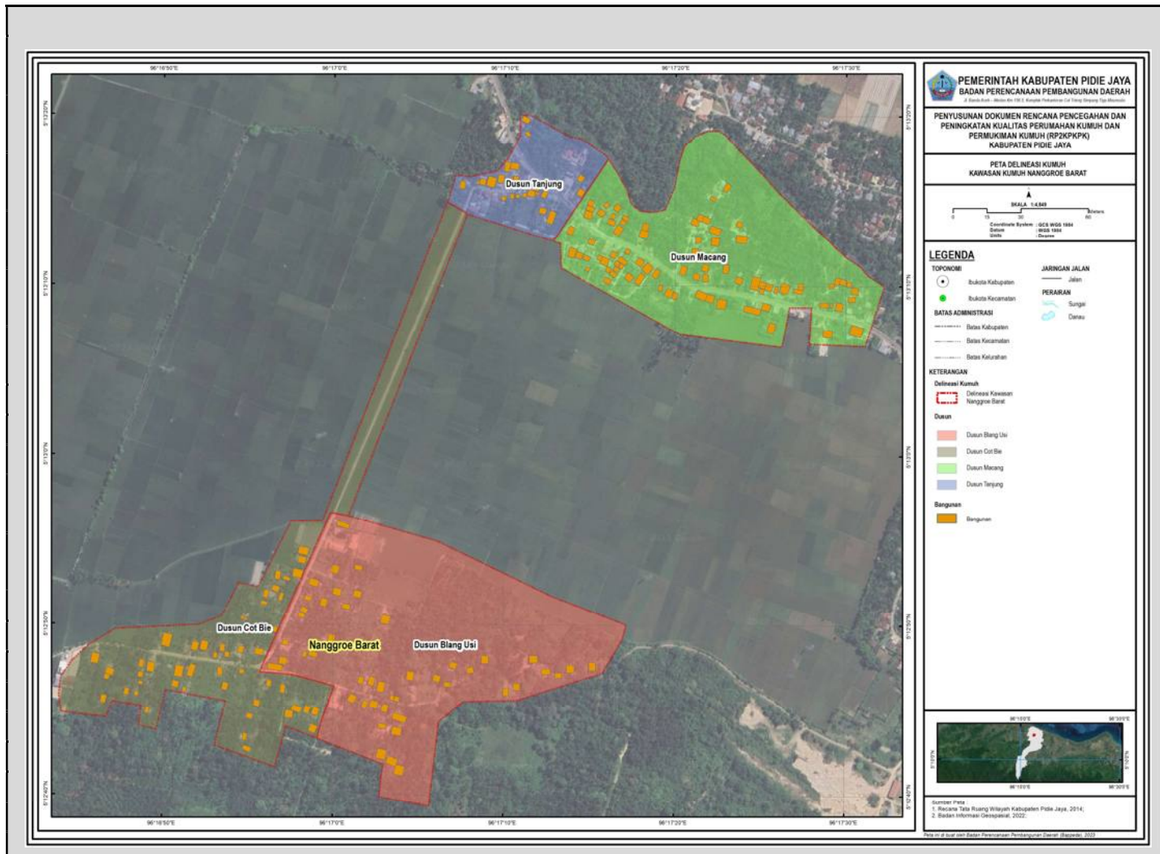


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	76.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	54
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	74



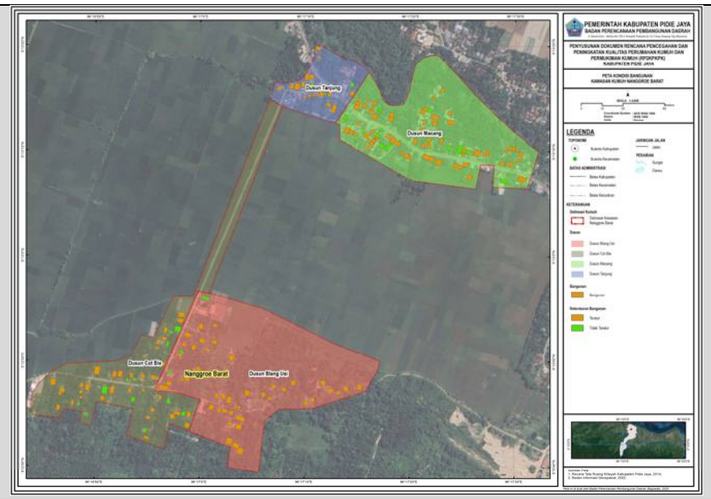
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	67.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	19

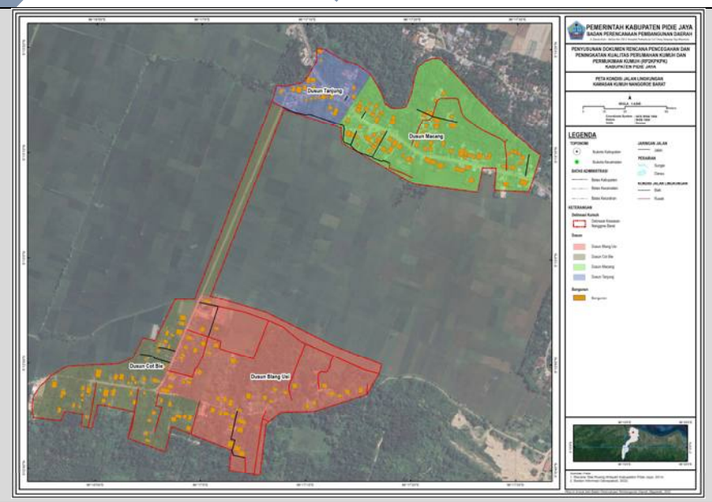
61. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Nanggroe Barat Kecamatan Ulim*



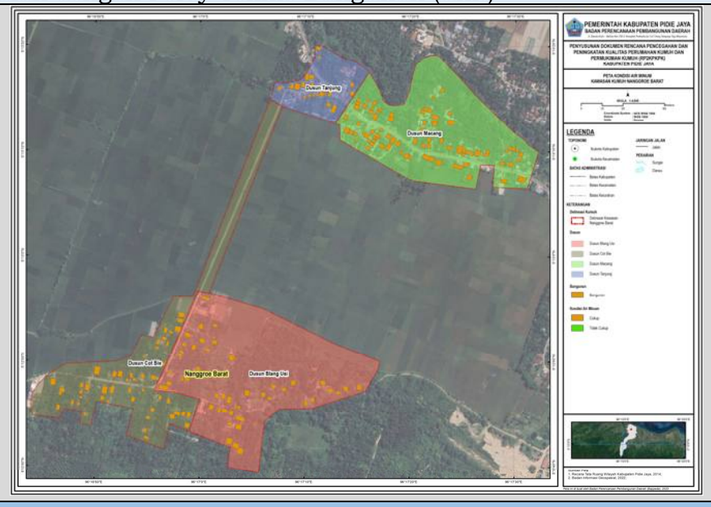
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Nanggroe Barat	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Nanggroe Barat	1	Nanggroe Barat	Dusun Blang Usi	13.18	Kumuh Ringan
Kecamatan	Ulim	2	Nanggroe Barat	Dusun Cot Bi	9.49	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Nanggroe Barat	Dusun Mancang	13.13	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Nanggroe Barat	Dusun Tanjong	2.54	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	38.35					
KOORDINAT						
Latitude	5.2208230					
Longitude	96.286809					
Jumlah Bangunan (Unit)	149.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	651.00					
Jumlah Kk	189.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Ketidakteraturan Bangunan						
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan						
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis						
Kualitas Konstruksi Drainase						

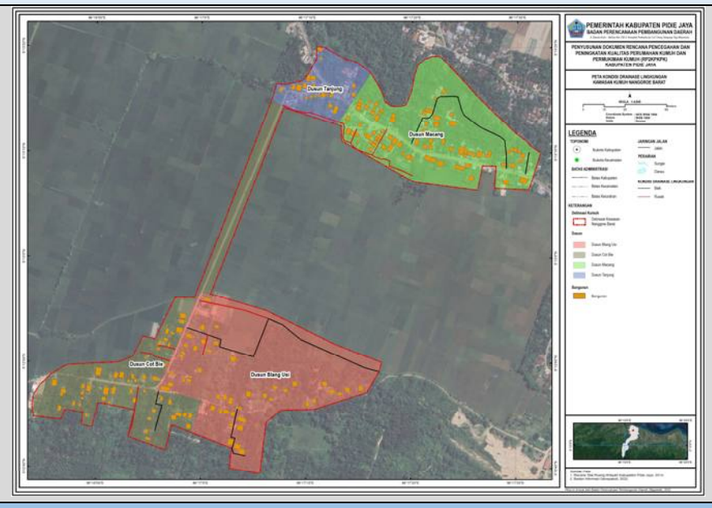




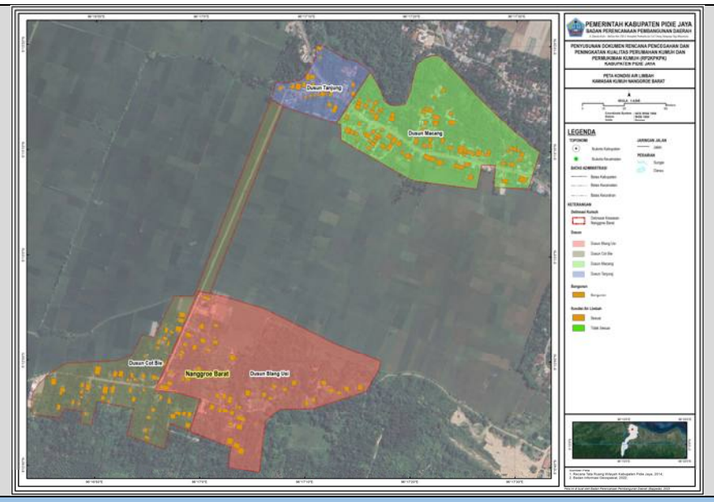


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	149	Panjang Jalan Ideal (m)	3,411.88
Jumlah RTLH (unit)	1	Panjang Jalan Eksisting (m)	3,411.88
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	140	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	2,193.53
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	1		

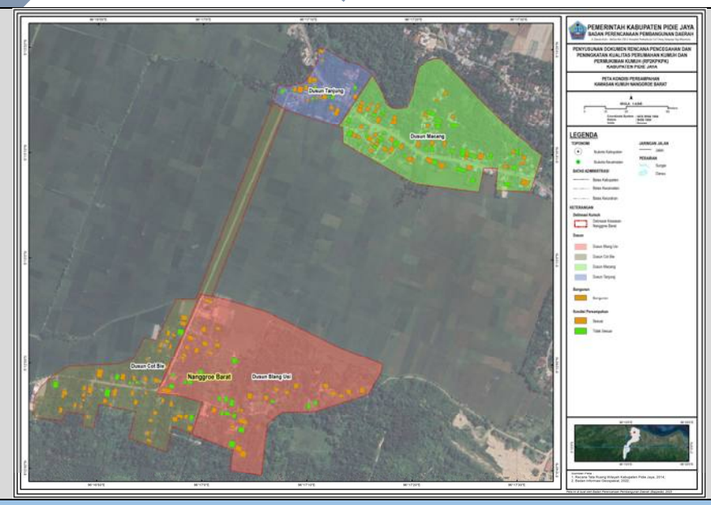




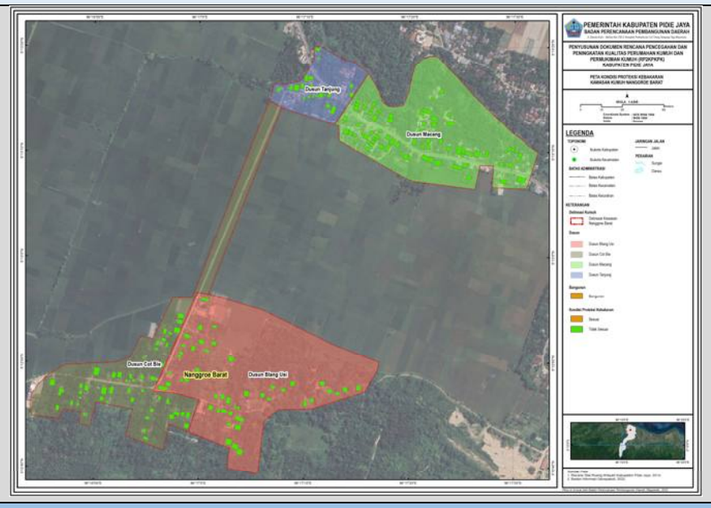
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	189	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	71	Panjang Drainase Ideal (m)	3411.88
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	3411.88
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	2193.53



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	189.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	0
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	0

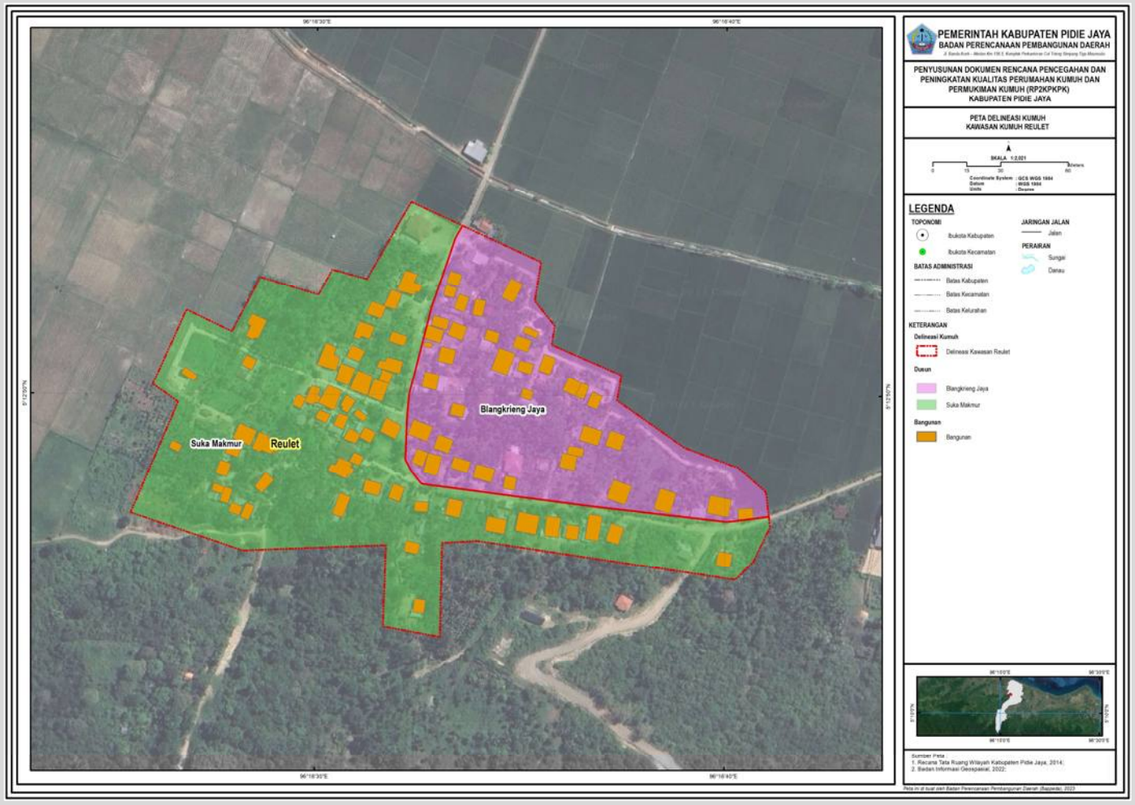


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	189.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	189
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	156



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	149.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	0
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	149

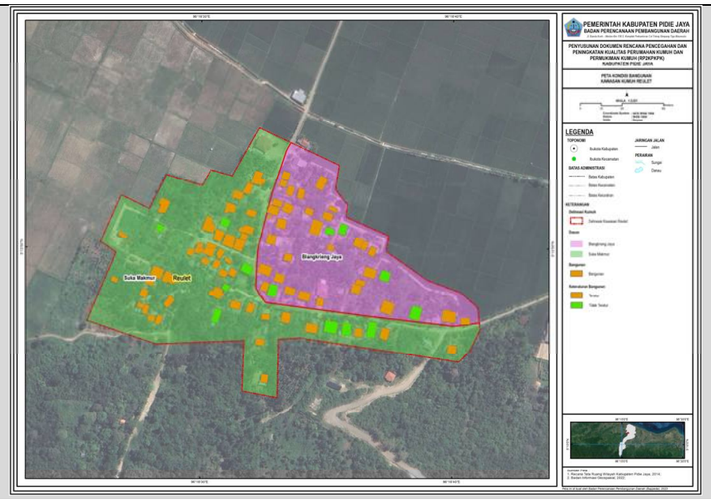
62. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Reuleut Kecamatan Ulim*

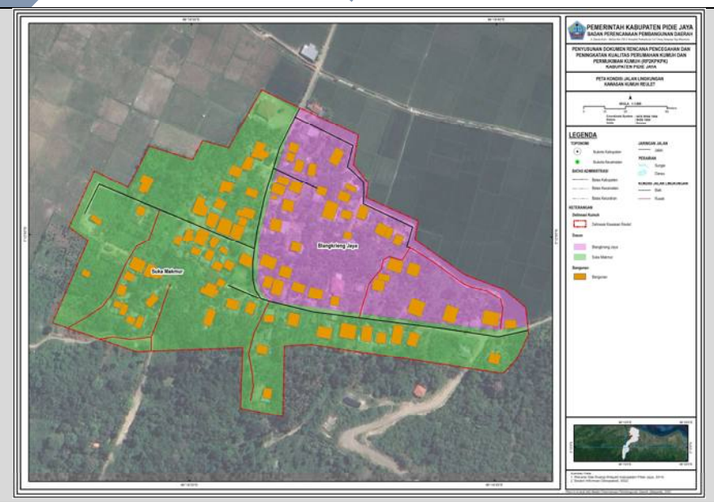


INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Reuleut	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Reuleut	1	Reuleut	Suka Makmur	5.22	Kumuh Ringan
Kecamatan	Ulim	2	Reuleut	Blangkrieng Jaya	2.93	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya					
Provinsi	Aceh					
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	8.15					
KOORDINAT						
Latitude	5.2139604					
Longitude	96.276014					
Jumlah Bangunan (Unit)	59.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	265.00					
Jumlah Kk	84.00					

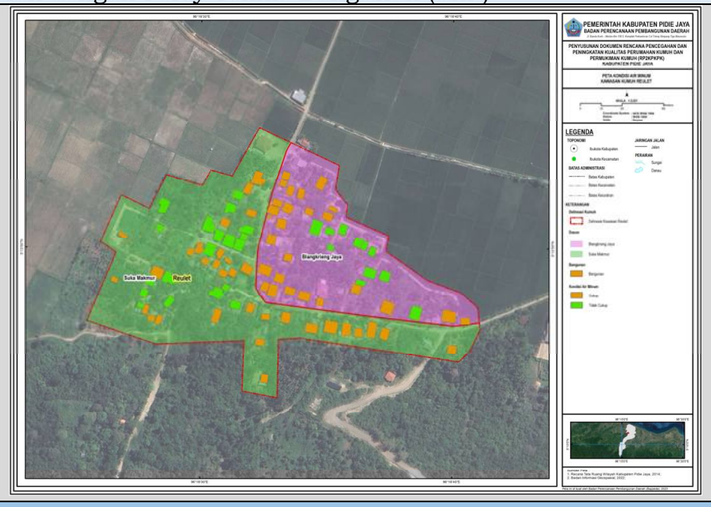
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH	
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah
Karakteristik	Permukiman Perkotaan
PERMASALAHAN UTAMA	
Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	
Tidak Tercukupinya Air Minum	
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	
Prasarana Proteksi Kebakaran	

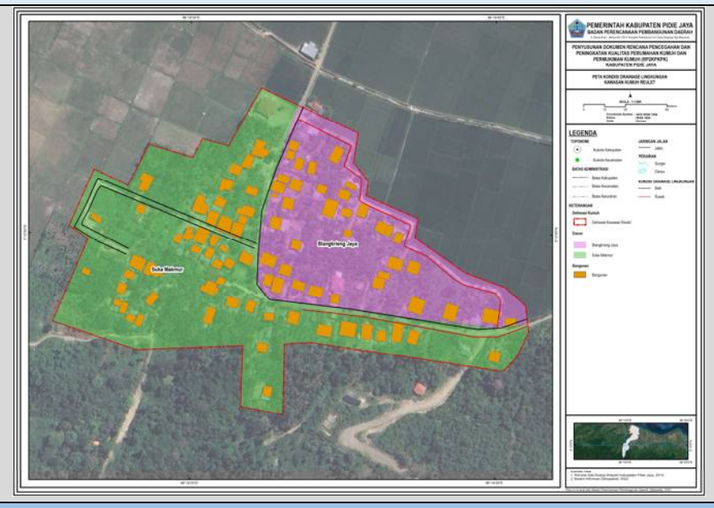




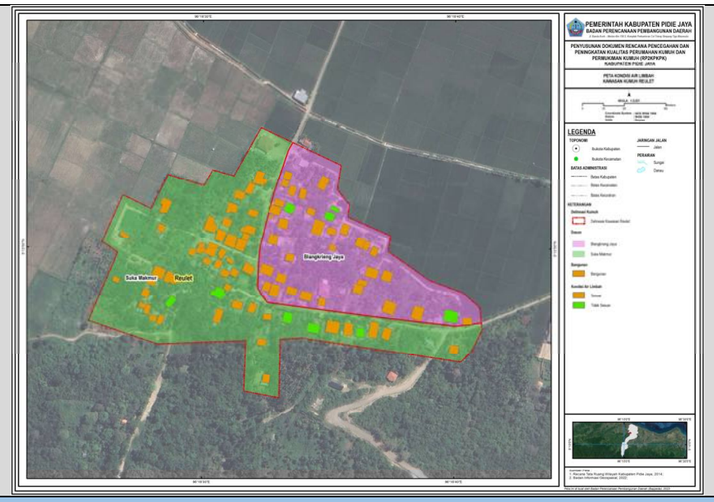


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	59	Panjang Jalan Ideal (m)	1,599.10
Jumlah RTLH (unit)	6	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,599.10
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	15	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	622.51
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	6		

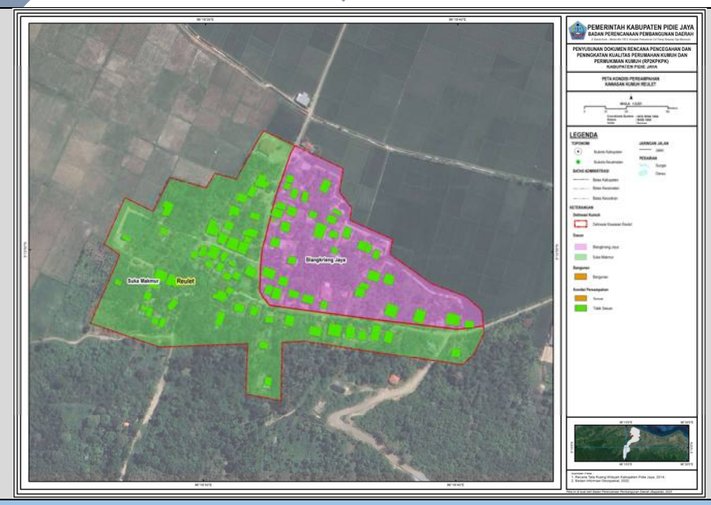




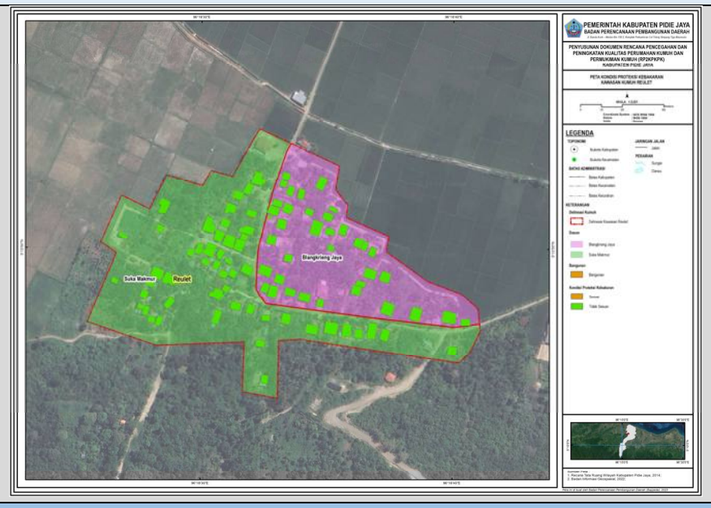
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	84	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	55	Panjang Drainase Ideal (m)	1852.00
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	44	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1852.00
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	682.00



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	84.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	31
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	31

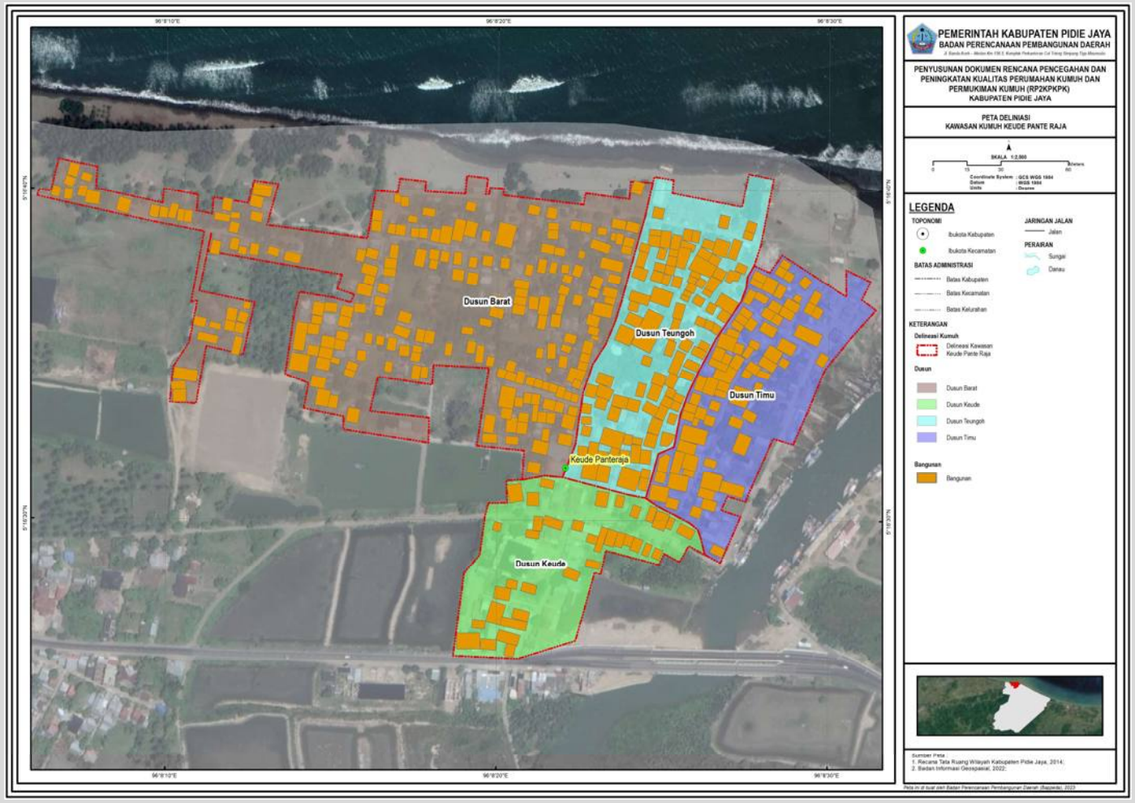


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	84.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	84
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	84



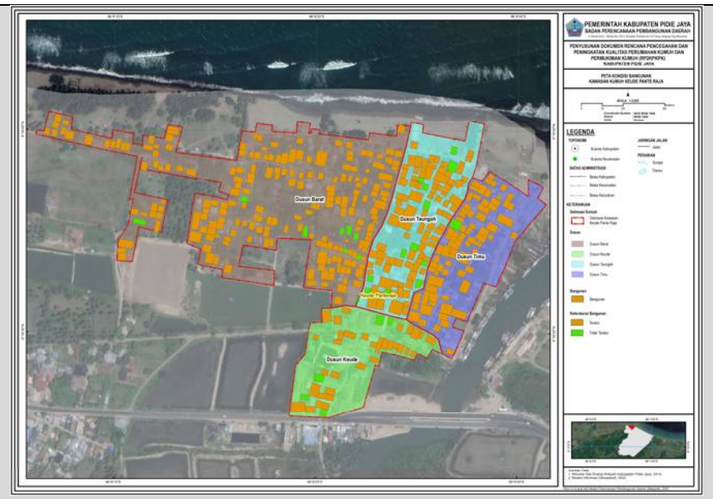
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	59.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	-11
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	59

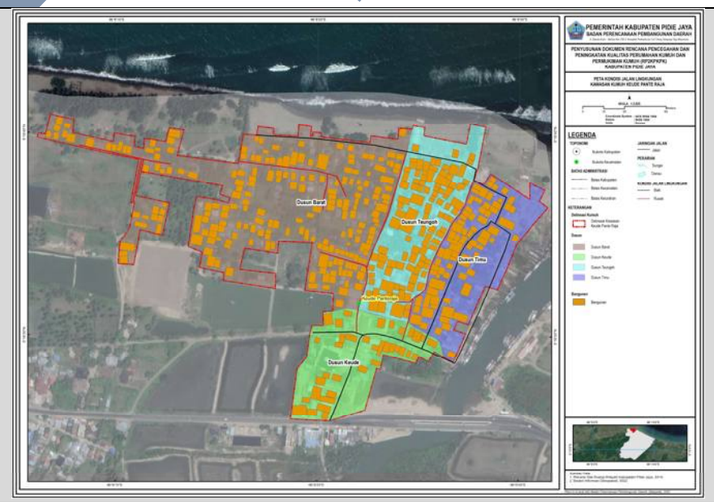
63. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Keude Pante Raja Kecamatan Pante Raja*



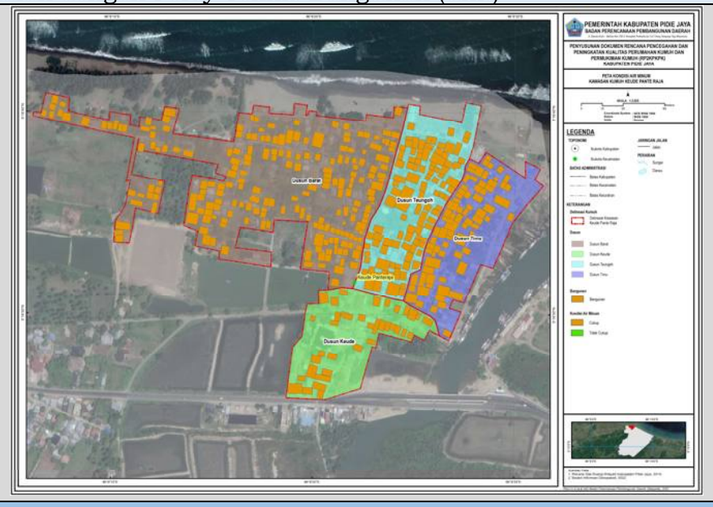
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Keude Pante Raja	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Keude Pante Raja	1	Keude Pante Raja	Barat	7.24	Kumuh Ringan
Kecamatan	Pante Raja	2	Keude Pante Raja	Keude	2.24	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Keude Pante Raja	Teungoh	2.83	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh	4	Keude Pante Raja	Timur	2.60	Kumuh Ringan
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	**14.90**					
KOORDINAT						
Latitude	5.276705					
Longitude	96.1406903					
Jumlah Bangunan (Unit)	353.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1309.00					
Jumlah Kk	376.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kondisi Proteksi Kebakaran						
Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis						
Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan						
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis						

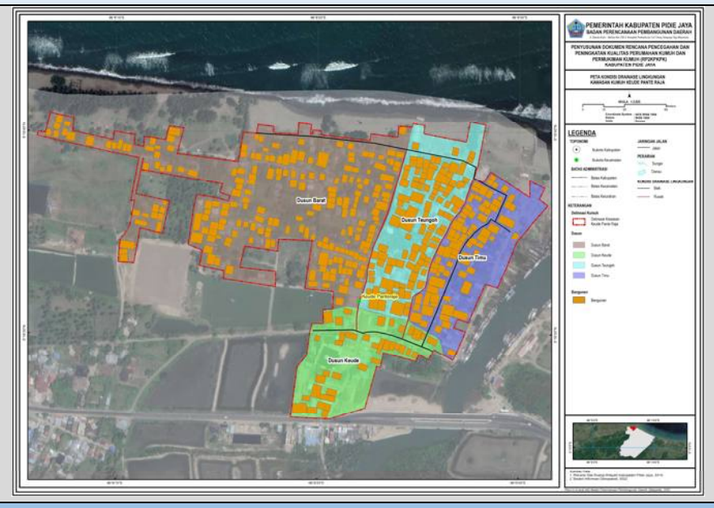




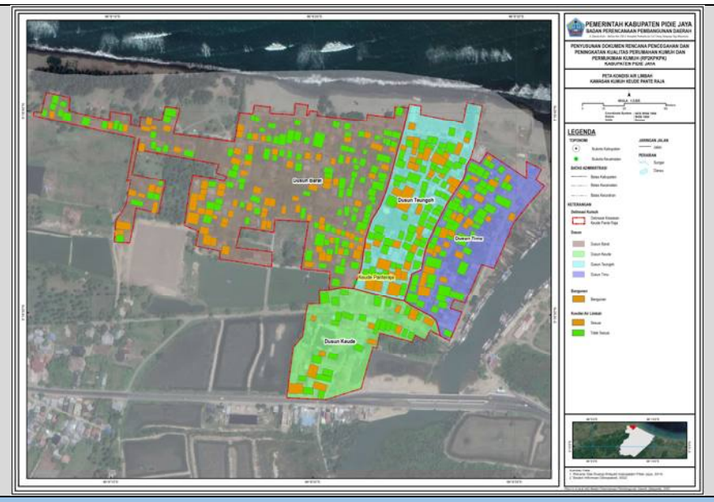


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	353	Panjang Jalan Ideal (m)	2,309.58
Jumlah RTLH (unit)	0	Panjang Jalan Eksisting (m)	2,309.58
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	197	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,171.73
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	0		

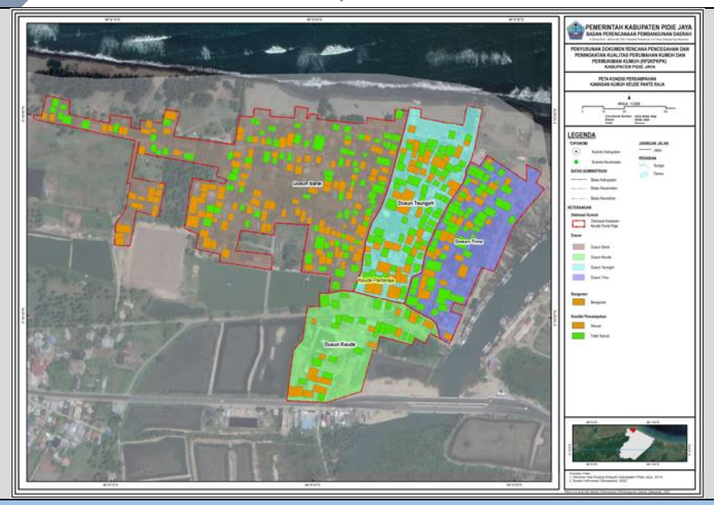




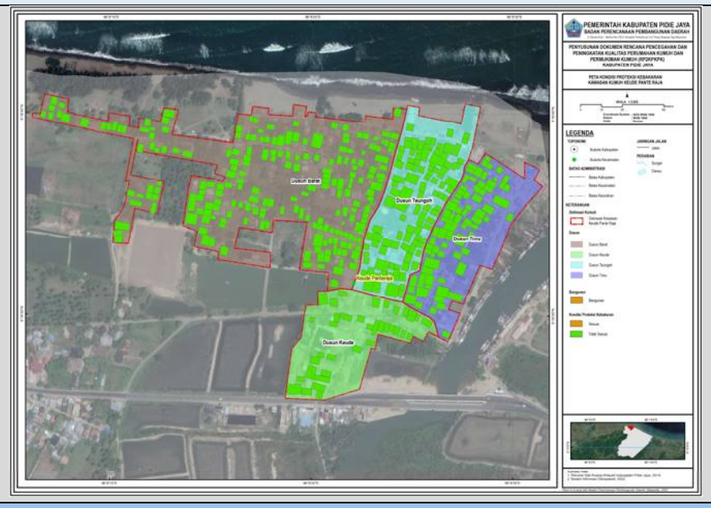
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	376	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	76	Panjang Drainase Ideal (m)	1475.08
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	0	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1475.08
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	565.85



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	376.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	14
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	14

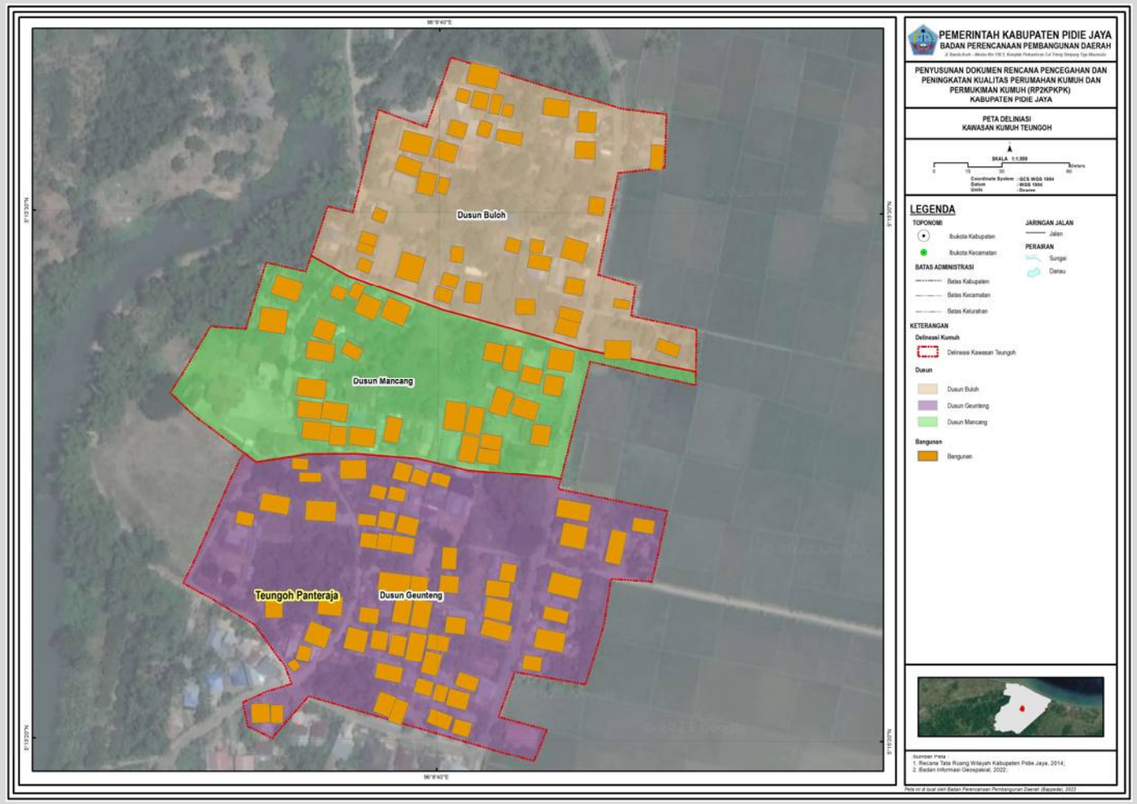


KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	376.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	376
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	307



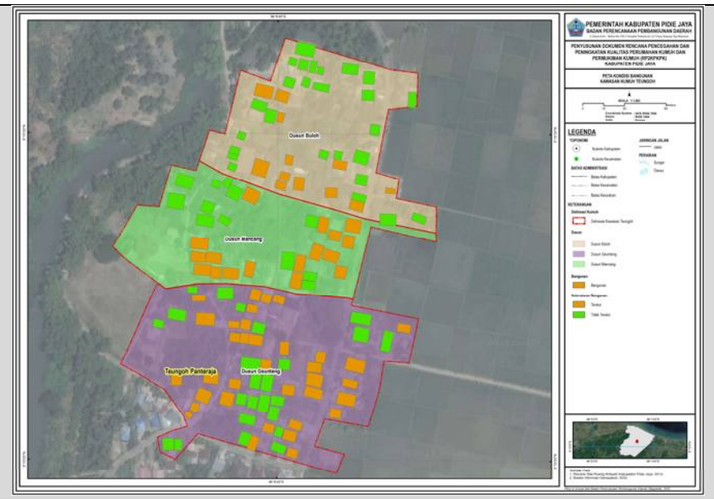
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	353.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	318
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	353

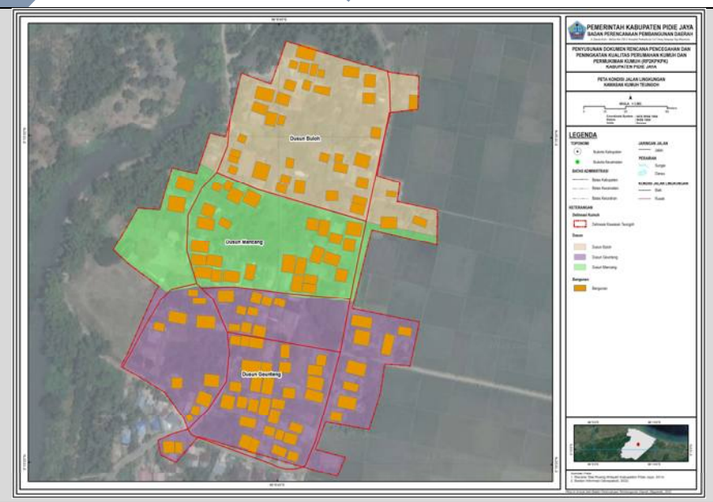
64. *Profil Permukiman Kumuh Gampong Teungoh Kecamatan Pante Raja*



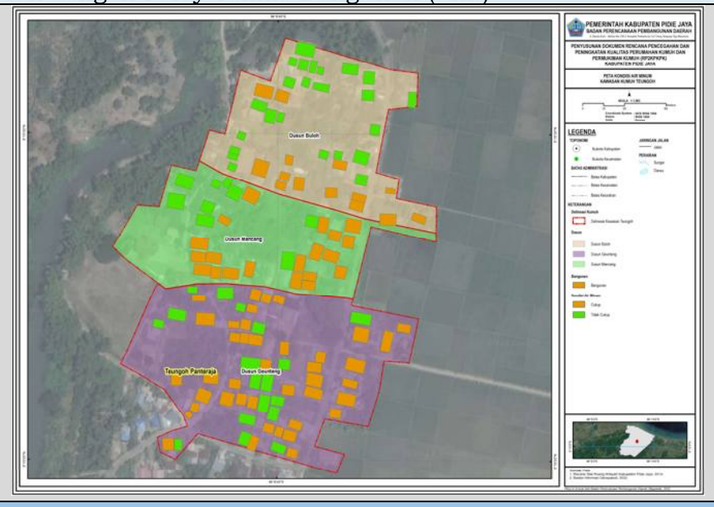
INFORMASI UMUM		SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH				
Kawasan	Teungoh	No	Gampong	Dusun	Luas Kumuh	Tingkat Kekumuhan
Gampong	Teungoh	1	Teungoh	Geunteng	3.26	Kumuh Sedang
Kecamatan	Pante Raja	2	Teungoh	Mancang	2.08	Kumuh Ringan
Kabupaten	Pidie Jaya	3	Teungoh	Buloh	2.26	Kumuh Ringan
Provinsi	Aceh				7,61	
Luas Delineasi Kumuh (Ha)	7,61					
KOORDINAT						
Latitude	5.257601					
Longitude	96.145046					
Jumlah Bangunan (Unit)	136.00					
Jumlah Penduduk (Jiwa)	584.00					
Jumlah Kk	191.00					
KATEGORI, TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAH KUMUH						
Kategori Kumuh	Kumuh Ringan					
Tipologi Kumuh	Permukiman Dataran Rendah					
Karakteristik	Permukiman Perkotaan					
PERMASALAHAN UTAMA						
Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Tidak Memadai						
Ketidakteraturaan Bangunan						
Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis						
Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Peryaratan Teknis						

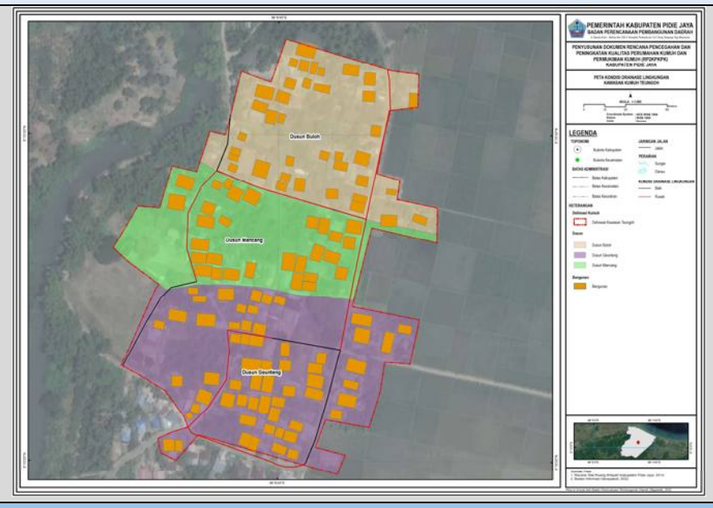




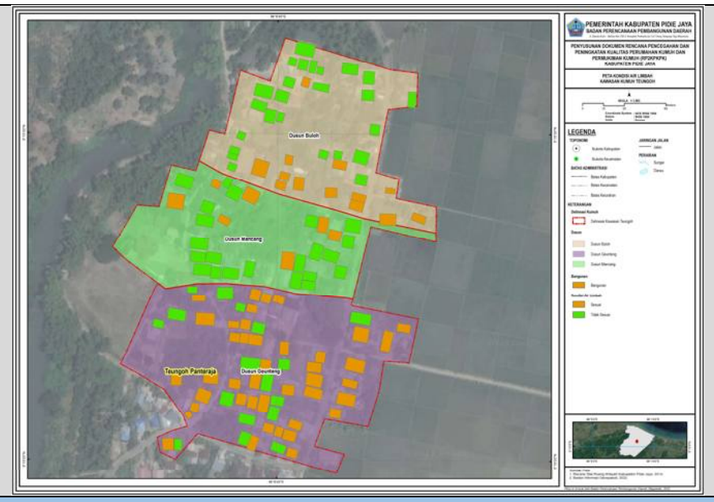


BANGUNAN		JALAN LINGKUNGAN	
Jumlah Bangunan (unit)	136	Panjang Jalan Ideal (m)	1,209.60
Jumlah RTLH (unit)	58	Panjang Jalan Eksisting (m)	1,209.60
a. Ketidakteraturan Bangunan (unit)	87	a. Rencana Pembangunan Jalan Baru (m)	-
b. Kepadatan Bangunan (unit)	0	b. Jaringan Jalan Lingkungan dalam Keadaan Rusak (m)	1,209.60
c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan (unit)	58		

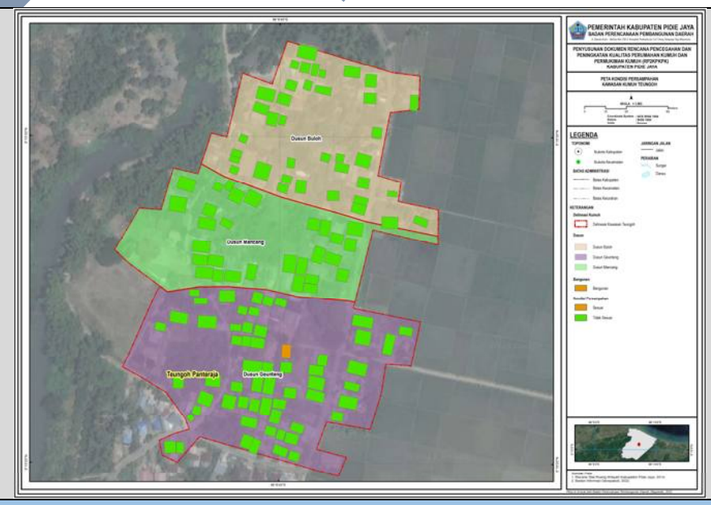




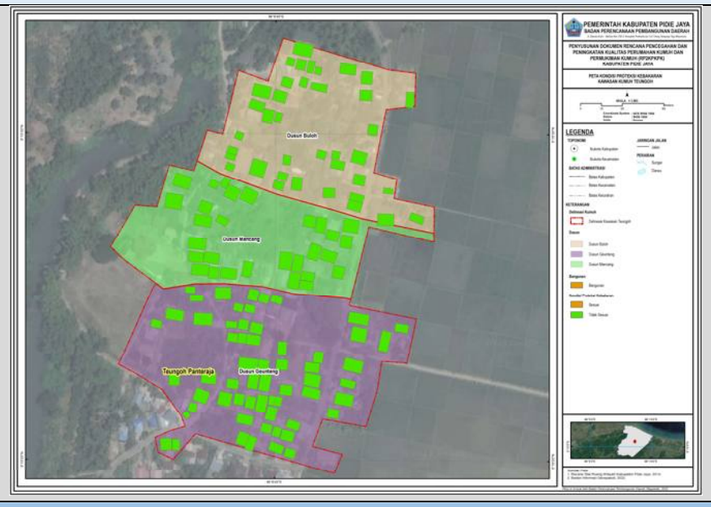
KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM		KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	
Jumlah KK	191	Luas Kawasan yang Terkena Genangan	-
a. Jumlah KK Tidak Terakses Air Minum Aman	4	Panjang Drainase Ideal (m)	1037.08
b. Jumlah KK Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum Minimalnya 60 l/det/hari	73	Panjang Saluran Drainase Eksisting (m)	1037.08
		a. Rencana Kebutuhan Drainase Baru (m)	0.00
		b. Panjang Saluran Drainase Rusak (m)	695.17



KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
Jumlah KK	191.00
a. Jumlah KK Tidak Terakses Sistem Air Limbah Sesuai Standar Teknis	99
b. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	99



KONDISI PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
Jumlah KK	191.00
a. Jumlah KK Dengan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	191
b. Jumlah KK dengan Sistem Pengolahan Sampah Tidak Sesuai Standar Teknis	191



KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	
Jumlah Bangunan (unit)	136.00
a. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Prasarana Proteksi Kebakaran	99
b. Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran	136

3.3 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Dengan Cakupan Skala Kabupaten Dan Skala Lingkungan

Pola kontribusi penanganan permukiman kumuh merupakan bagian dari proses perumusan untuk memberikan kejelasan distribusi peran dan peluang program penanganan kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh.

3.3.1 Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan kewenangan penanganan permukiman kumuh terbagi tiga yaitu:

1. Pusat menangani kawasan kumuh lebih besar dari 15 Ha;
2. Provinsi menangani kawasan kumuh 10-15 Ha;
3. Kabupaten menangani kawasan kumuh kurang dari 10 Ha.

Pola penanganan kumuh sesuai dengan Permen nomor 14 Tahun 2018 meliputi:

1. Pemugaran
   Kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umu untuk mengembalikan fungsi sebaimana semula.
2. Peremajaan
   Melalui pembongkaran dan pentaan secaramenyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum.
3. Permukiman Kembali
   Melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Hak keperdataan masyarakat terdampak;
2. Kondisi ekologis lokasi; dan
3. Kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pola penanganan kumuh sebagai berikut:

1. Dalam hal lokasi meiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
2. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah illegal, maka pola penangan yang dilakukan adalah permukiman kembali;
3. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
4. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi sedangan dengan status tanah ilega;, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
5. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
6. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah illegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali.

Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan klasifikasi kekumuhan hampir semua kawasan termasuk kategori kumuh ringan dengan status tanah legal dan illegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran.

Pemugaran dan permukiman kembali melalui beberapa tahap:

1. Pra konstruksi;
2. Konstruksi; dan
3. Pasca konstruksi.

Pemugaran tahap Pra Konstruksi melalui tahapan:

1. Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
2. Sosialisasi dan rembuk wargan pada masyarakat terdampak;
3. Pendataan masyarakat terdampak;
4. Penyusunan rencana pemugaran; dan
5. Musyawarah untuk penyepakatan.

Pemugaran tahap Konstruksi melalui tahapan:

1. Proses pelaksanaan konstruksi; dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

Pemugaran tahap Pasca Konstruksi melalui tahapan:

1. Pemanfaatan; dan
2. Pemeliharaan dan perbaikan.
3. Permukiman Kembali tahap Pra Konstruksi melalui tahapan:
4. Kajian pemanfaatan ruang dan/ atau kajian legalitas tanah;
5. Penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
6. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
7. Pendataan masyarakat terdampak;
8. Penyusunan rencana permukiman baru, rancana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali; dan
9. Musyawarah dan sikusi penyepakatan.

Permukiman Kembali tahap Konstruksi melalui tahapan:

1. Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Proses legalisasi tanah pada lokasi permukiman baru;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali;
4. Proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
5. Proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting;
6. Proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan
7. Permukiman baru;
8. Permukiman Kembali tahap Pasca Konstruksi melalui tahapan:
9. Pemanfaatan; dan
10. Pemeliharaan dan perbaikan.

Tabel 3.97 Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Pemugaran	• Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun.	• Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan.	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	• Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase.	• Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.	• Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalika n kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	• Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2	Peremajaan	• Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun. • Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung.	• Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan. • Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun	• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air bakudan unit produksi. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.	• Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T.	• Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.	• Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran. • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran.

No.	Pola Penanganan	Penanganan Fisik Infrastruktur						
		Bangunan Gedung	Jalan Lingkungan	Penyediaan Air Minum	Drainase Lingkungan	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
			belum tersambung.		jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.			
3	Pemukiman Kembali	• Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya.	• Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.	• Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.	• Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.	• Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.	• Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.	• Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

Sumber: Permen PUPR No 14 Tahun 2018

Berdasarkan tipologi kawasan kumuh sebagian besar masuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah dan hanya beberapa lokasi yang berada di tepi air. Dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah. Pola penanganan bangunan dan infrastruktur pendukung pada permukiman kumuh berdasarkan tipologi dapat dilihat di Tabel 3.97.

Tabel 3.98 Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
1	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Atas Air	Membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak atau pondasi dalam sesuai dengan karakteristik bangunan	Pondasi jalan dengan sistem cerucuk	Sistem drainas elokal dilengkapi dengan pintu air	Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat	Unit pengelolaan air limbah stempat ditempatkan: • secara floating; dan • dibawah air memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air	Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
		Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuiakan dengan ketentuan yang berlaku	Memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal	memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal	Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: • pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan/drainase di atas air, atau • pipa sambungan berada di bawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Unit perpipaan jika menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat, maka: • pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan/drainase di atas air, atau • pipa sambungan berada dibawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air	Kendaraan pemadam kebakaran moda transportasi air
		Memanfaatkan bahan bangunan khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Dilengkapi dengan bangunan: • Bronjong; • Bangunan pemecah ombak					
2	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Tepi Air	Membangun rumah dengan konsep *waterfront housing,* menjadikan kawasan oerairan sebagai halaman depan	Pondasi jalan: • pada sisi perairan dengan sistem cerucuk • pada sisi daratan dengan sistem konvesional	sistem drainase lokal: • jika permukaan daratan lebih tinggi dengan air, maka dilengkapi dengan pintu air; atau • jika permukaan daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air • memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa	Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat	Unit pengelolaan air limbah setempat ditempatkan: • secara floating memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya air; atau • dibawah air memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkn di atas air	Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
				perkerasan (kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal.				
		Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuiakan dengan ketentuan yang berlaku	Memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal		Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: • pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan/drainase di atas air, atau • pipa sambungan berada di bawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.		Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air	Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi air
		Memanfaatkan bahan bangunan khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air.	Pada jalan yang berbatasan dengan perairan dilengkapi dengan bangunan: • Bronjong • Bangunan pemecah ombak					
3	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Dataran Rendah	Menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat	pondasi jalan dengan sistem konvesional	sisten drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa	Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat	Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di baha tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas tanah	Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat
		Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah	memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah	memanfaatkan material saluran drainase: • pada tekstur tanah kerasa dan saluran tanah	Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah	unit perpipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah	Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda trasportasi darat	kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
				• pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu				transportasi darat
4	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perbukitan	Membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana	Pondasi jalan dengan sistem konvesional	sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan	Sumber air baku diusahkan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam	Unit pengelolaan air limbah setempat ditempatkan: • Secara floating memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau • Dibawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah	Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas tanah	Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat
		Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuiakan dengan ketentuan yang berlaku	memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah	memanfaatkan material saluran drainase: • pada tekstur tanah kerasa adalah saluran tanah • pada tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu • pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton	Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah	unit perpipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah	Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat	kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda trasnportasi darat
		Memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah	Dilengkapi dengan bangunan penahan longsor					

Sumber: Permen PUPR No 14 Tahun 2018

3.3.2 Pola Kolaborasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Percepatan penanganan kawasan kumuh melalui kolabirasi, baik kolaborasi stakheholder pelaku pembangunan, kolaborasi program dan kegiatan, kolaborasi penggaran serta pendanaan dan bentuk- bentuk kolaborasi lainnya.

Kolaborasi tata peran stakeholder pemerintah pusat, pemerintan provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.99 Kolaborasi Peran Stakeholder Dalam Penanganan Kumuh

Stakeholder	Peran
Pemerintah Pusat	• Kelembagaan Pokja PKP • Peran Perundangan dan Kebijakan Nasional Penanganan Kumuh • Penanganan, Monitoring, Supervisi, Pengembangan Kapasitas, dan lain-lain
Pemerintah Provinsi	• Kelembagaan Pokja PKP • Dukungan ke pemerintah Kabupaten (koordinasi, singkronisasi) • Pendanaan dan pemograman di APBD Provinsi (alokasi dana dan program penanganan kumuh dan pencegahan kumuh)
Pemerintah Kabupaten	• Peraturan Daerah Penanganan Kumuh (Perda Kumuh, Perda BG, dan lain-lain) • Kelembagaan Pokja PKP • Dokumen Strategis dan Perencanaan (Program investasi, masterplan, DED, RAB, RKS) • Pendanaan dan pemrogaman di APBD Kabupaten (alokasi dana dan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh) • Pelaksanaan kegiatan pentaan kawasan dalam penangan permukiman kumuh • Dukungan ke masyarakat (Integrasi kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dan lain-lain)
Masyarakat	• Perencanaan Partisipatif • Integrasi perencanaan ke dokumen strategi dan perencanaan • Penguatan Kelembagaan • Pelaksanaan kegiatan investasi infrastruktur peningkatan kulaitas dan pencegehan kumuh tingkat komunitas

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penetapan lokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan persyaratan:

1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan tata ruang kota/kabupaten;
2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
3. Kondisi dan kualitas prasarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
5. Kualitas bangunan
6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sementara karakteristik permukiman kumuh yang ditangani meliputi:

1. Tata letak secara keseluruhan tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan tidak sesuai lagi untuk menampung jenis kegiatan baru.
2. Aksesibilitas yang buruk, ruang kurang dan tidak dapat diperluas lagi, organisasi ruang serta hubungan fungsional yang buruk.
3. Kondisi bangunan sangat buruk dan tidak layak pakai, karena ketidakmampuan lagi melayani fungsi dengan baik.

Selanjutnya, beberapa kondisi aktual Kabupaten Pidie Jaya terkait dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya, dapat dijelaskan melalui 8 (delapan) sektor yakni permukiman, jalan/ aksesibilitas, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka publik/ hijau. Secara lebih rinci, masing-masing isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Isu dan Permasalahan Kabupaten Pidie Jaya

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kondisi Bangunan Gedung	58,44 % / 7.750 unit rumah tidak teratur
		19,29% / 2.558 unit rumah tidak sesuai dengan persyaratan teknis atau rumah tidak layak huni
		Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
		Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai kawasan permukiman.
		Membangun kesadaran masyarakat pada kawasan padat agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh.
2	Kondisi Jalan Lingkungan	8,01 % /15.197,08 meter kebutuhan akan jalan lingkungan baru
		42,86 % / 81.335,82 meter jalan lingkungan mengalami kerusakan
		Jalan antar desa masih memerlukan pengembangan / mengingat konstruksi jaringan jalan yang belum memadai di dalam permukiman.
3	Kondisi Proteksi Kebakaran	60,82 % / 8.066 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		96,62 % / 12.813 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
4	Kondisi Penyediaan Air Minum	38,45 % / 6.130 KK tidak memiliki akses aman air minum tidak berbau dan tidak berasa
		34,71 % / 5.534 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum 60 liter/orang/hari
		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Pidie Jaya
		PDAM Tirta Krueng Meureudu belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan, banyak yang beralih ke sumur Bor, sumur digali dengan pompa dan Penampungan Air hujan
5	Kondisi Drainase Lingkungan	8.30 Ha genangan di permukiman kumuh
		16,43 % / 24.051,62 meter kebutuhan drainase lingkungan baru
		44,30 % / 57.928,41 meter drainase lingkungan mengalami kerusakan
		Beberapa ruas jalan tidak dilengkapi oleh jaringan drainase baik jaringan sekunder maupun tersier di beberapa ruas Kabupaten Pidie Jaya
		Sebagian besar drainase mengalami penyumbatan atau pendangkalan (sedimentasi).
		Kondisi lahan yang berkontur menyebabkan fungsi drainase tidak maksimal
6	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	17,65 % / 2.814 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		17,65 % / 2.814 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Belum optimalnya penggunaan tangki septik aman

No	Aspek	Isu Strategis
7	Kondisi Pengelolaan Persampahan	96,29 % / 15.354 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis
		89,75 % / 14.309 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis
		Belum optimalnya kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah
		Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas

Kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah menetapkan bahwa dalam mengidentifikasi kondisi kekumuhan ada 3 (tiga) aspek utama yang harus menjadi tinjauan, yakni :

A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan;

1. Kondisi Bangunan Gedung
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Proteksi Kebakaran

B. Identifikasi Legalitas Lahan; dan

C. Identifikasi Pertimbangan Lain

Secara lebih rinci, masing-masing aspek tinjauan dalam penentuan urutan kawasan prioritas ini akan dijabarkan dengan masing-masing kriteria, indikator, parameter, nilai serta sumber data seperti yang terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; 2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observas
			51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: 4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha; 5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
		Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung 5. kenyamanan bangunan gedung 6. kemudahan bangunan gedung	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	3	Dokumen IMB, Observasi
			25% - 50% bangunan pada lokasi tidak Memenuhi persyaratan teknis	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	3	
			25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hierarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	menimbulkan genangan		25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN		Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	Format Isian, Peta RIS, Observasi
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa; 3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 4. peralatan pendukung lainnya	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
			25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa : 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observas
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	
c. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada : 1. fungsi strategis kabupaten/kota; 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ kota	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di baw ah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1. Untuk metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 2. Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiw a/Ha	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa : 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai formula penilaian tersebut di atas, maka selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Nilai	Ket	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60-80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38-59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16-37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Ilegal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6-10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1-5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
   a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
   b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
   c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
   a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15
   b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
   c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
   a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
   b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Tabel 4.4 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Bandar Baru

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru												
					Keude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kayee Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan																	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	5	5		5		5				5			5	
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	3		3				3				3				
				1							1	1			1		1
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	5													
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;	2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;														
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:														
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	3													
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	1													
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	5								5					
		1. pengendalian dampak lingkungan															

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru											
					Keude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kaye Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung														
		3. keselamatan bangunan gedung															
		4. kesehatan bangunan gedung															
		5. kenyamanan bangunan gedung	5. kenyamanan bangunan gedung	3	3		3										
		6. kemudahan bangunan gedung	6. kemudahan bangunan gedung	1							1				1		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	5													
				3													
				1			1										
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	5													
				3	3		3			3		3	3			3	
				1		1		1						1			1
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5	5					5				5	5	5	
				3			3										

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru												
					Kude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kaye Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Kude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
				1				1			1	1	1				
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	5	5					5							
				3			3								3		
				1				1			1	1	1				1
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	5													
				3													
				1													
	b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	5		5											
				3			3	3						3			
				1													
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	5					5	5		5	5		5		5
				3													
				1	1		1				1			1		1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru												
					Keude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kayee Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	5											5		
				3													
				1			1		1	1			1	1		1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	5											5		
		1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	3													
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	1			1		1	1			1	1		1	
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;															
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;															
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan															

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru												
					Keude Luengputu	Sarah Panyang	Kayee Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Luengg	Jiem Jiem	Blang Baro
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	3													
				1													
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;	1. pewadahan dan pemilahan domestik;														
		2. pengumpulan lingkungan;	2. pengumpulan lingkungan;														
		3. pengangkutan lingkungan;	3. pengangkutan lingkungan;	3		3							3				
		4. pengolahan lingkungan	4. pengolahan lingkungan	1													
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5	5		5		5	5	5	5		5	5	5
		1.pasokan air;	1.pasokan air;														
		2. jalan lingkungan;	2. jalan lingkungan;														
		3. sarana komunikasi;	3. sarana komunikasi;	3													
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	1													
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);														
		2. mobil pompa;	2. mobil pompa;														
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3													
		4. peralatan pendukung lainnya	4. peralatan pendukung lainnya	1													

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru											
					Keude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kayee Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
					42	**27**	**39**	**26**	**27**	**43**	**25**	**36**	**35**	**30**	**45**	**36**	**28**
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN																	
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :														
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	(+)		(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	(-)	(-)		(-)									
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	(+)		(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-)	(-)		(-)										
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN																	
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :														
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;	1. fungsi strategis kabupaten/kota;	5	5		5	5	5	5	5	5	5				5

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Baru												
					Keude Lueng Putu	Sarah Panyang	Kayee Jatoe	Pulo Pueb	Cut Njong	Manyang Lancok	Paru Keude	Paru Cot	Baroh Lancok	Pulo Rheng	Abah Lueng	Jiem Jiem	Blang Baro
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1		1								1	1	1	
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;														
		2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;														
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3													
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1													
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;														
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;														
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	1													
			SUBTOTAL		**15**	**11**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**11**	**11**	**11**	**15**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.5 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Bandar Dua

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Keude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Mukoh Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan															
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	5		5					5		5		
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	3			3				3			
				1	1			1		1				1	
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	5											
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;	2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;												
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:												
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	3											
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	1											
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	5											
		1. pengendalian dampak lingkungan	1. pengendalian dampak lingkungan												
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
		3. keselamatan bangunan gedung	ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum												
		4. kesehatan bangunan gedung	3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung												
		5. kenyamanan bangunan gedung	5. kenyamanan bangunan gedung	3						3					
		6. kemudahan bangunan gedung	6. kemudahan bangunan gedung	1			1								
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	5											
				3											
				1	1	1									
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	5											
				3	3										
				1		1		1			1			1	1
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5									5		
				3			3								
				1	1	1				1		1			1
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	5									5		
				3								3			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
				1				1			1				
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	5											
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan												
				3											
				1											
	b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	5											
				3											
				1		1									
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	5											
				3											
				1	1			1			1			1	1
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	5											
				3											

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
				1		1	1	1		1	1	1	1		1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	5											
		1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	3											
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	1		1	1	1		1	1	1	1		1
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:												
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;	1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;												
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan	3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan												
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	3											
				1											
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:												
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;	1. pewadahan dan pemilahan domestik;	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
		2. pengumpulan lingkungan;	2. pengumpulan lingkungan;												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
		3. pengangkutan lingkungan;	3. pengangkutan lingkungan;	3				3							
		4. pengolahan lingkungan	4. pengolahan lingkungan	1											
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1.pasokan air;	1.pasokan air;												
		2. jalan lingkungan;	2. jalan lingkungan;												
		3. sarana komunikasi;	3. sarana komunikasi;	3											
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	1											
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);												
		2. mobil pompa;	2. mobil pompa;												
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3											
		4. peralatan pendukung lainnya	4. peralatan pendukung lainnya	1											
					27	**21**	**29**	**24**	**20**	**27**	**30**	**29**	**37**	**23**	**25**
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN															
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	(+)			(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau												
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas	(-)	(-)	(-)									

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
		tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah												
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	(+)			(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-)	(-)	(-)									
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN															
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :												
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;	1. fungsi strategis kabupaten/kota;	5	5				5	5				5	5
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1		1	1	1			1	1	1		
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :												
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;												
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3											

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Bandar Dua										
					Kude Ulee Gle	Alue Keutapang	Asan Kumbang	Paya Pisang Klat	Blang Dalam	Muko Kuthang	Kuta Krueng	Blang Kuta	Alue Sane	Pulo	Meurandeh Alue
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1											
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;												
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;												
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	1											
			SUBTOTAL		**15**	**11**	**11**	**11**	**15**	**15**	**11**	**11**	**11**	**15**	**15**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.6 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Jangka Buya, Ulim, dan Meurah Dua

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Kude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Kude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Teupin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunue	Beuringen
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan																					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	5				5	5			5	5					5		5	5
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	3	3	3					3				3		3		3		
				1												1					
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	5																	
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;	2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;																		
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:																		
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	3																	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunee	Beuringen
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	1																	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: 1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung																		
		1. pengendalian dampak lingkungan		5																	
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum																			
		3. keselamatan bangunan gedung																			
		4. kesehatan bangunan gedung																			
		5. kenyamanan bangunan gedung	5. kenyamanan bangunan gedung	3																	
		6. kemudahan bangunan gedung	6. kemudahan bangunan gedung	1												1					1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	5																	
				3	3					3											
				1																	
	b. Kualitas Permukaan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi	5					5											5	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunue	Beuringen
	Jalan Lingkungan	kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman																		
				3			3	3					3			3		3	3		3
				1		1						1		1			1				
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5																	5
				3			3							3							
				1				1	1				1		1	1				1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	5		5															5
				3				3		3				3							
				1															1		
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	5																	
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan																		

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunue	Beuringen
				3																	
				1														1			
	b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	5																	
				3						3											
				1												1	1				
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	5				5											5		5
				3		3			3				3		3	3		3			
				1			1				1	1		1							
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	5																	
				3																	
				1		1								1							

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Juron g Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunue	Beuringen
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	5																	
		1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	3																	
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	1		1								1							
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5	5
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;																			
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;																			
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan																			
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	3						3											

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Teupin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunee	Beuringen
				1																	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;																			
		2. pengumpulan lingkungan;																			
		3. pengangkutan lingkungan;	3. pengangkutan lingkungan;	3																	
		4. pengolahan lingkungan	4. pengolahan lingkungan	1																	
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1.pasokan air; 2. jalan lingkungan;	5		5	5								5	5					
		1.pasokan air;																			
		2. jalan lingkungan;																			
		3. sarana komunikasi;	3. sarana komunikasi;	3																	
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	1	1			1													
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. mobil pompa;	5		5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);																			
		2. mobil pompa;																			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Kude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beurumbang	Juron g Binje	Kude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureune	Beuringen
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3																	
		4. peralatan pendukung lainnya	4. peralatan pendukung lainnya	1	1					1											
					18	**34**	**27**	**33**	**29**	**18**	**19**	**22**	**27**	**25**	**22**	**25**	**20**	**27**	**27**	**26**	**39**
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN																					
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :																		
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	(-)	(-)					(-)											
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Lueng Bimba	Pante Beureunee	Beuringen
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-)	(-)					(-)											
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN																					
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;	1. fungsi strategis kabupaten/kota;																		
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1			1														
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;																		
		2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;																		
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3																	
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1																	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Jangka Buya					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Ulim					Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meurah Dua						
					Keude Jangka Buya	Kiran Baroh	Kuta Broh	Beureumbang	Jurong Binje	Keude Ulim	Tanjong Ulim	Mesjid Ulim Baroh	Nanggroe Barat	Reulut	Meunasah Bie	Meunasah Raya	Meunasah Mancang	Meunasah Jurong/ Tepin Pukat	Leung Bimba	Pante Beureunee	Beuringen
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa																		
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;																		
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	1																	
			SUBTOTAL		**15**	**15**	**11**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.7 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Meureudu

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu												
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok/ Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahu	Rheng Krueng	Rheng Mancang
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan																	
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	5		5	5			5						5	
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	3								3		3	3		3
				1	1						1		1				
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	5													
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;	2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;														
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:														
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	3													
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	1													
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	5													

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu												
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok/Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahu	Rhieng Krueng	Rhieng Mancang
		1. pengendalian dampak lingkungan	1. pengendalian dampak lingkungan														
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum														
		3. keselamatan bangunan gedung	3. keselamatan bangunan gedung														
		4. kesehatan bangunan gedung	4. kesehatan bangunan gedung														
		5. kenyamanan bangunan gedung	5. kenyamanan bangunan gedung	3							3	3					
		6. kemudahan bangunan gedung	6. kemudahan bangunan gedung	1					1								
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	5													
				3													
				1	1					1							
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	5					5								
				3													
				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5					5		5						

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu												
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok/ Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahu	Rhieng Krueng	Rhieng Mancang
				3				3						3			
				1						1		1	1		1	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	5		5			5		5	5					
				3				3							3		
				1			1						1			1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	5													
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan														
				3													
				1													
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	5													5
				3									3		3		
				1				1									
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis	5										5			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu											
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok/ Mns Gantung	Masjid Tuha	Tuin Peurahu	Rheng Krueng	Rheng Mancang
			atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan														
				3	3	3	3									3	
				1						1		1					
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	5													
				3													
				1							1				1		
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	5													
		1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	3													
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	1							1				1		
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	5		5	5	5	5		5	5	5		5	5	5
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;															

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu												
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok / Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahu	Rhieng Krueng	Rhieng Mancang
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;														
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan	2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;														
			3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan														
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	3						3							
				1	1												
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:														
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;	1. pewadahan dan pemilahan domestik;	5	5		5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
		2. pengumpulan lingkungan;	2. pengumpulan lingkungan;														
		3. pengangkutan lingkungan;	3. pengangkutan lingkungan;	3						3							
		4. pengolahan lingkungan	4. pengolahan lingkungan	1		1											
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :														
		1.pasokan air;	1.pasokan air;	5		5	5	5	5		5	5	5		5	5	5
		2. jalan lingkungan;	2. jalan lingkungan;														
		3. sarana komunikasi;	3. sarana komunikasi;	3	3									3			

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu											
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok / Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahu	Rhieng Krueng	Rhieng Mancang
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	1						1							
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);														
		2. mobil pompa;	2. mobil pompa;														
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3													
		4. peralatan pendukung lainnya	4. peralatan pendukung lainnya	1						1							
					20	**30**	**30**	**28**	**36**	**17**	**37**	**34**	**26**	**25**	**33**	**31**	**28**
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN																	
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :														
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	(-)													
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR),	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu												
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok / Mns Gantung	Masjid Tuha	Tuping Peurahu	Rhieng Kruweng	Rhieng Mancang
		bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat														
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-)													
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN																	
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;	1. fungsi strategis kabupaten/kota;														
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1													
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;														
		2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;														
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3													
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1													

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Meureudu											
					Keude Meureudeu	Meuraksa	Meunasah Balek	Pohroh	Rungkom	Manyang Cut	Mns Kulam Beurawan	Mns Mulieng Beurawan	Mns Lhok / Mns Gantung	Masjid Tuha	Teupin Peurahoo	Rhieng Krueng	Rhieng Mancang
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa														
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;														
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	1													
			SUBTOTAL		**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.8 Penilaian Lokasi Berdasarkan Kriteria, Indikator Dan Parameter Kekumuhan Kecamatan Trienggadeng dan Panteraja

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sagoe	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan														
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan	5								5		

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
		bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	tampilan bangunan pada suatu zona;											
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	3								3	3
				1	1	1	1	1	1	1	1			
	b. Tingkat kepadatan bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;	5										
		2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;	2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;											
		3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:											
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	4. untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha;	3										
		5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha.	1										
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	5										
		1. pengendalian dampak lingkungan	1. pengendalian dampak lingkungan											
		2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di baw ah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum											
		3. keselamatan bangunan gedung												
		4. kesehatan bangunan gedung												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
			3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung											
		5. kenyamanan bangunan gedung	5. kenyamanan bangunan gedung	3								3		
		6. kemudahan bangunan gedung	6. kemudahan bangunan gedung	1						1	1			1
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	5		5								
				3										
				1										
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	5					5					5
				3	3						3			
				1				1		1		1	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	5										
				3			3		3	3				
				1				1						1
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuh	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman	5				5						

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
			tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari											
				3						3	3			
				1										
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga											
		menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	5										
				3										
				1										
	b.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	5										
				3										
				1										
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	5	5			5				5		
				3										3
				1		1	1		1	1	1		1	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	5										
				3										3
				1						1				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	5										
		1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;	3										3
		2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	1						1				
6. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;												
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;												
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago e	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
			3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan											
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	3										
				1										
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;	1. pewadahan dan pemilahan domestik;											
		2. pengumpulan lingkungan;	2. pengumpulan lingkungan;											
		3. pengangkutan lingkungan;	3. pengangkutan lingkungan;	3	3									
		4. pengolahan lingkungan	4. pengolahan lingkungan	1										
KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5									5	
		1.pasokan air;	1.pasokan air;											
		2. jalan lingkungan;	2. jalan lingkungan;											
		3. sarana komunikasi;	3. sarana komunikasi;	3										3
		4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan	1										
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);											
		2. mobil pompa;												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
			2. mobil pompa;											
		3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan	3										
		4. peralatan pendukung lainnya	4. peralatan pendukung lainnya	1										
					22	**22**	**20**	**28**	**25**	**27**	**24**	**29**	**25**	**37**
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN														
Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :											
		1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertif ikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah	(-)					(-)					
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-)					(-)					

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN														
Petimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada :	5	5	5	5	5	5	5		5		
		1. fungsi strategis kabupaten/kota;	1. fungsi strategis kabupaten/kota;											
		2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1							1		1	1
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi :	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;											
		2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;	2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;											
		3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;	3										
		4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha	1										
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;												

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Trienggadeng								Lokasi Permukiman Kumuh Kecamatan Panteraja	
					Gampong Meue	Masjid Trienggadeng	Sago	Keude Trienggadeng	Kuta Pangwa	Rawa Sari	Deah Pangwa	Cot Lheu Rheng	Keude Panteraja	Gampong Teungoh
		2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;											
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	1										
			SUBTOTAL		**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**11**	**15**	**11**	**11**

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Selanjutnya, rekapitulasi hasil penilaian, penentuan klasifikasi, dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Penilaian dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Luas Delineasi Kumuh	Skala Prioritas Kawasan
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan		Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal			
			(60-80)	(38-59)	(16-37)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	Nilai (+)	Nilai (-)			
	1	*2*	*3*			*4*	*5*			*6*		*7*	*8*	*9*
1	Keude Lueng Putu	42		V		15	V				(-)	B2	31,50	
2	Sarah Panyang	27			V	11	V			(+)		C1	8,20	
3	Kayee Jatoe	39		V		15	V				(-)	B2	24,00	
4	Pulo Pueb	26			V	15	V			(+)		C1	16,07	
5	Cut Njong	27			V	15	V			(+)		C1	10,34	
6	Manyang Lancok	43		V		15	V			(+)		B1	6,32	
7	Paru Keude	25			V	15	V			(+)		C1	55,35	
8	Paru Cot	36			V	15	V			(+)		C1	18,89	
9	Baroh Lancok	35			V	15	V			(+)		C1	19,35	
10	Pulo Rheng	30			V	11	V			(+)		C1	28,00	
11	Abah Lueng	45		V		11	V			(+)		B1	12,92	
12	Jiem Jiem	36			V	11	V			(+)		C1	15,15	
13	Blang Baro	28			V	15	V			(+)		C1	29,51	
14	Keude Ulee Gle	27			V	15	V				(-)	C2	23,66	
15	Alue Keutapang	21			V	11	V				(-)	C2	19,08	
16	Asan Kumbang	29			V	11	V			(+)		C1	9,54	
17	Paya Pisang Klat	24			V	11	V			(+)		C1	23,34	
18	Blang Dalam	20			V	15	V			(+)		C1	34,41	
19	Muko Kuthang	27			V	15	V			(+)		C1	17,56	
20	Kuta Krueng	30			V	11	V			(+)		C1	11,44	
21	Blang Kuta	29			V	11	V			(+)		C1	31,38	
22	Alue Sane	37			V	11	V			(+)		C1	21,52	
23	Pulo	23			V	15	V			(+)		C1	20,99	
24	Meurandeh Alue	25			V	15	V			(+)		C1	41,24	
25	Keude Jangka Buya	18			V	15	V				(-)	C2	6,14	
26	Kiran Baroh	34			V	15	V			(+)		C1	14,12	
27	Kuta Broh	27			V	11	V			(+)		C1	9,74	
28	Beureumbang	33			V	15	V			(+)		C1	5,97	
29	Jurong Binje	29			V	15	V			(+)		C1	13,42	
30	Keude Ulim	18			V	15	V				(-)	C2	12,75	
31	Tanjong Ulim/Keude Parek	19			V	15	V			(+)		C1	8,03	
32	Mesjid Ulim Baroh	22			V	15	V			(+)		C1	9,79	

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Luas Delineasi Kumuh	Skala Prioritas Kawasan
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan		Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal			
			(60-80)	(38-59)	(16-37)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	Nilai (+)	Nilai (-)			
	1	*2*	*3*			*4*	*5*			*6*		*7*	*8*	*9*
33	Nanggroe Barat	27			V	15	V			(+)		C1	38,35	
34	Reuleut	25			V	15	V			(+)		C1	8,15	
35	Meunasah Bie	22			V	15	V			(+)		C1	20,88	
36	Meunasah Raya	25			V	15	V			(+)		C1	20,59	
37	Meunasah Mancang	20			V	15	V			(+)		C1	6,97	
38	Meunasah Jurong/Teupin Pukat	27			V	15	V			(+)		C1	13,42	
39	Lueng Bimba	27			V	15	V			(+)		C1	4,86	
40	Pante Beureune	26			V	15	V			(+)		C1	4,63	
41	Beuringen	39		V		15	V			(+)		B1	13,62	
42	Keude Meureudeu	20			V	15	V			(+)		C1	11,58	1
43	Meuraksa	30			V	15	V			(+)		C1	27,34	
44	Meunasah Balek	30			V	15	V			(+)		C1	16,92	1
45	Pohroh	28			V	15	V			(+)		C1	6,24	
46	Rungkom	36			V	15	V			(+)		C1	6,16	
47	Manyang Cut	17			V	15	V			(+)		C1	28,90	
48	Mns Kulam Beuracan	37			V	15	V			(+)		C1	7,14	
49	Mns Mulieng Beuracan	34			V	15	V			(+)		C1	6,48	
50	Mns Lhok/Mns Gantung	26			V	15	V			(+)		C1	15,45	
51	Masjid Tuha/Dayah U Paneuk	25			V	15	V			(+)		C1	65,19	1
52	Teupin Peuraho	33			V	15	V			(+)		C1	13,09	
53	Rhieng Krueng	31			V	15	V			(+)		C1	8,14	
54	Rhieng Mancang	28			V	15	V			(+)		C1	5,36	
55	Gampong Meue	22			V	15	V			(+)		C1	9,77	
56	Masjid Trienggadeng	22			V	15	V			(+)		C1	14,51	
57	Sagoe	20			V	15	V			(+)		C1	20,00	
58	Keude Trienggadeng	28			V	15	V			(+)		C1	6,49	
59	Kuta Pangwa	25			V	15	V				(-)	C2	7,59	
60	Rawa Sari	27			V	15	V			(+)		C1	14,97	
61	Deah Pangwa	24			V	11	V			(+)		C1	27,04	
62	Cot Lheu Rheng	29			V	15	V			(+)		C1	6,13	
63	Keude Panteraja	25			V	11	V			(+)		C1	14,90	2
64	Gampong Teungoh	37			V	11	V			(+)		C1	7,61	

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Tingkat Kekumuhan			Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	Pertimbangan Lain			Legalitas Lahan		Klasifikasi	Luas Delineasi Kumuh	Skala Prioritas Kawasan
			Kumuh Berat	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan		Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal			
			(60-80)	(38-59)	(16-37)		(11-15)	(6-10)	(1-5)	Nilai (+)	Nilai (-)			
	1	*2*	*3*			*4*	*5*			*6*		*7*	*8*	*9*
TOTAL													**1088,20**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2024 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya yang sangat serius dalam penanganan secara inovatif dan dapat menggerakkan seluruh pihak untuk bersama-sama secara intensif dalam menangani permukiman kumuh, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan berbagai diskusi dan kajian implementasi upaya kolaborasi antar sektor, baik pemerintah pusat, daerah, maupun dunia usaha bersama-sama menangani permukiman kumuh sangatlah diperlukan. Maka pemerintah secara resmi meluncurkan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh untuk mengimplementasikan program kolaborasi sebagai platform dalam penanganan kumuh antar sektor pembangunan. Dalam program tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah (Pemda) akan jadi pelaku utama dalam penanganan, dimana seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana investasi akan disusun oleh Pemda. Program-program yang ada di pemerintah pusat kemudian hanya akan menjadi pendamping daerah dalam penyusunan rencana dan menjalankan program, dan program yang ada di pusat pun harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah.

Kebutuhan penanganan disusun berdasarkan permasalahan yang terjadi pada setiap sektor (bangunan, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, RTH) pada suatu kawasan.

Beberapa potensi dan strategi dalam penanganan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kabupaten Pidie Jaya

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik 3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat	• Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni. • Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni • Penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	• Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru • Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman • Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan	• Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni • Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai • Penataan pinggiran DAS • Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai		• Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas • Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai	
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal 2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 3. Konektivitas jaringan jalan belum optimal	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat	• Infrastruktur jalan yang terintegrasi di seluruh kawasan permukiman. • Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. • Rehabilitasi jalan lingkungan
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi 2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik. 3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.	Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	• Pemeliharaan sumber air bersih. • Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih • Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum • Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru	• Pengembangan sumber air baku • Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR) • Pembangunan hidran umum
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. 3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.	• Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase. • Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. • Pembangunan saluran air hujan secara terbuka di daerah kerapatan bangunan rendah. • Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.	• Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. • Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	• Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase. • Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.
5	1. Perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah. 2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.	• Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan • Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga • Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	• Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. • Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	❑ Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. ❑ Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik. 4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan.		• Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	
6	1. Belum optimalnya sinergitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional. 2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian 5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan persampahan • Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan • Meningkatkan pelayanan persampahan • Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan • penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang). • Pengadaan pengelolaan alat angkut.	• Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. • Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	• Peningkatan dan pengembangan TPA • Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan • Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	• Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana • Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat. • Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman; • Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran; • Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran	• Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran • Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran	• Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	• Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan. • Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;	• Membuat regulasi tentang RTH • Pembentukan kelembagaan pengelola RTH • Peningkatan pera stakeholder dalam pembangunan RTH	• Pendataan RTH yang ada • Pengembangan RTH Hutan Kota • Pengembangan RTH jalur hijau • Pengembangan RTH privat

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		• Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan; • Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.11 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Bandar Baru

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Bandar Baru	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	2442	Unit	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Keude Lueng Putu		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Sarah Panyang		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1123	Unit		
Kayee Jatoe	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2410	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Pulo Pueb		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18764,18	Meter		
Cut Njong	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2391	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
Manyang Lancok		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1892	KK		
Paru Keude	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
Paru Cot		b. Ketidaktersediaan Drainase	5429,112	Meter		
Baroh Lancok		e. Kualitas Konstruksi Drainase	20223,5	Meter		
Pulo Rheng	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1285	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
Abah Lueng		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	1285	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis			masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	
Jiem Jiem	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4580	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
Blang Baro		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4119	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3120	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3847	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.12 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Bandar Dua

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Bandar Dua	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	916	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Keude Ulee Gle		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Alue Keutapang		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	399	Unit		
Asan Kumbang	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4730	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Paya Pisang Klat		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10867,73	Meter		
Blang Dalam	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
Muko Kuthang		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712	KK		
Kuta Krueng	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
Blang Kuta		b. Ketidaktersediaan Drainase	3451	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Alue Sane		e. Kualitas Konstruksi Drainase	6536,877	Meter		
Pulo	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
Meurandeh Alue		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2535	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2313	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1946	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1973	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.13 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Jangka Buya

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Jangka Buya	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	448	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Keude Jangka Buya		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Kiran Baroh		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	55	Unit		
Kuta Baroh	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1091,63	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Beureumbang		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4514,237	Meter		
Jurong Binje	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	306	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	246	KK	Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	3609,907	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	119	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	843	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	816	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	322	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	624	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.14 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Meurah Dua

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Meurah Dua	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	787	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Meunasah Bie		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Meunasah Raya		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	179	Unit		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Meunasah Mancang	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1411,448	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Meunasah Jurong/Teupin Pukat		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10255,25	Meter		
Lueng Bimba	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	510	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
Pante Beureune		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	373	KK		
Beuringen	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,3	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	2772,793	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	5980,227	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	92	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	92	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1487	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1415	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1213	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.15 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Meureudu

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Meureudu	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	1750	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Keude Meureudeu		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Meuraksa		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401	Unit		
Meunasah Balek	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3820	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Pohroh		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17330,45	Meter		
Rungkom	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1081	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
Manyang Cut		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1523	KK		
Mns Kulam Beuracan	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
Mns Mulieng Beuracan		b. Ketidaktersediaan Drainase	9052,80	Meter		
Mns Lhok/Mns Gantung		e. Kualitas Konstruksi Drainase	9460,84	Meter		
Masjid Tuha/Dayah U Paneuk	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
Teupin Peuraho		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261	KK		
Rhieng Krueng	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2697	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
Rhieng Mancang		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2737	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2259	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2489	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.16 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Trienggadeng

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Trienggadeng	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	719	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Gampong Meue		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Masjid Trienggadeng		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	286	Unit		
Sagoe	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1144	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Keude Trienggadeng		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	13085,61	Meter		
Kuta Pangwa	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	621	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
Rawa Sari		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	592	KK		
Deah Pangwa	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
Cot Lheu Rheng		b. Ketidaktersediaan Drainase	2508,913	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	6841	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	223	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	223	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1918	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1723	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1624	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.17 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Panteraja

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Panteraja **Keude Panteraja** **Gampong Teungoh**	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	284	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	58	Unit		
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2381,327	Meter		
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	80	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	73	KK		
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	1261,023	Meter		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	113	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	113	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	567	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	498	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	417	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	489	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 4.17 Perumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kecamatan Ulim

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Ulim	1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	404	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi perukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.
Keude Ulim		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha		
Tanjong Ulim/Keude Parek		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	57	Unit		
Mesjid Ulim Baroh	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	590	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkunganPeningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.
Nanggroe Barat		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4137,042	Meter		
Reuleut	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	123	KK		

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	837	Meter		
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	4015,042	Meter		
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	56	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku dimasyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	56	KK		
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	718	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	688	KK		
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	554	Unit		

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh.

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kabupaten

Paradigma pembangunan yang digunakan dalam perencanaan permukiman kumuh di dasarkan pada 3 kata kunci, yaitu: tepat sasaran, inovatif dan akseleratif. Ketiga hal ini menjadi tolak ukur terhadap pencapaian tujuan penataan kawasan permukiman kumuh.

a. Tepat Sasaran

Tepat sasaran dalam arti mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan kembali kawasan prmukiman dengan terwujudnya dinamika tata ruang yang tetap mampu mewadahi aktivitas masyarakat miskin dalam lingkup penyediaan perumahan dan permukiman. Peningkatan penghidupan (*livelihood*) masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat miskin dalam penambahan nilai ekonomis. Tepat sasaran juga dapat diartikan sebagai perubahan posisi masayarakat yang semula sebagai objek pembangunan, saat ini menjadi subjek pembangunan. Perubahan perilaku masyarakat (*community behaviour*) menjadi salah satu tolak ukur terhadap pencapaian tujuan penataan kawasan permukiman.

b. Inovatif

Pengertian inovatif dilatarbelakangi atas fenomena penanganan penataan permukiman kumuh selama ini dilakukan secara kaku, normatif-reguler, dan tidak disesuaikan dengan kondisi lokal. Akibatnya banyak sekali terjadi pembangunan kawasan permukiman yang di ukur efektivitas kinerjanya hanya berdasarkan capaian administratif, kuantitatif dan berorientasi pada proyek jangka pendek dan panjang sesaat, sehingga banyak sekali permasalahan yang muncul akibat fenomena tersebut. Oleh karena itu, penting untuk segera dilakukan pendekatan yang berbasis trouble shooting secara inovatif. Dalam penangan kumuh harusnya memperhtikan kearifan lokal.

c. Akseleratif

Akseleratif dimaksudkan sebagai upaya percepatan untuks egera melakukan penanganan terhadap kawasan padat huni di wilayah permukiman kumuh yang saat ini dalam kondisi rentan terhadap ancaman bencana alam dan bencana sosial akibat tidak terpenuhi ketentuan dan persyaratan hunian.

Pendekatan perencanaan pembangunan kawasan permukiman antara lain:

1. Perencanaan permukiman yang berkelanjutan

Dalam perencanaan permukiman berkelanjutan ada 4 dasar yang menjadi fokus utama yaitu:

a. Pembangunan fisik;
b. Sosiokultir masyarakat;
c. Ekonomi masyarakata; dan
d. Ekologis lingkungan.

Melalui proses partisipatif dalam setiap tahapan penataan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat melalui proses pemetaan warga yang harus dikembangkan dalam kegiatan penilaian kebutuhan akan rumahnya yang pada akhirnya akan dirumuskan sebagai program kebutuhan pembangunan dan diwujudkan dalam bentuk program pemenuhan kebutuhan.

Kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak harus diikuti dengan kemampuan sumber daya lahan. Ketersediaan lahan untuk membangun ruang yang digunakan sebagai wadah kegiatan masyarakat perlu terkoneksi antar aktivitas. Oleh karena itu, pencermatan terhadap aspek sosiokultural masyarakat penghuni kawasan permukiman menjadi satu kegiatan yang sangat dibutuhkan.

Aspek ekonomis dalam kawasan permukiman harus diposisikan sebagai aspek penghidupan baik wilayah perkotaan maupun perdesaan, bukan sebagai kawan

marginal baik oleh masyarakata atau para pemangku kepentingan pengelolaan wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap nilai strategis ekonomi kawasan.

Aspek ekologis menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan kawasan permukiman. Aktivitas kegiatan bermukim jangan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan fenomena bencana seperti banjir atau tanah longsor.

2. Peningkatan kemapuan (*Enabling*) dan konsolidasi (*Consolidating*) aset penghidupan

Kawasan permukiman sebagai aset penghidupan merupakan akumulasi dari modal tenaga kerja dan finansial. Keberadaan permukiman yang cukup padat serta berlangsung cukup lama, disitu sisi merupakan sebuah pontesi akumulasi modal penghidupan (*livelihood capital*) yang sangat kuat, namun disisi lain juga mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Untuk itu pendekatan yang menggunakan prinsip peningkatan kemampuan (enabling) serta consolidating (penguatan dan penstrukturan ulang) menjadi dasar pertimbangan pendekatan.

Konsep *livelihood* adalah pengenalan terhadap banyak aktivitas (*multiple activities*) dimana rumah tangga memanfaatkan jaminan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Livelihood tidak hanya mengandalkan satu aktivitas saja, tetapi berbagai aktivitas sebagai usaha mengeksplorasi sumber daya agar mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya terutama berkaitan dengan dari segi ekonomi. Livelihood asset terdiri dari berbagai aset fisik, aset sumber daya manusia, aset finansial, aset lingkungan atau sumber daya alam dan aset sosial atau kelembagaan.

3. Pendekatan Struktur Keruangan yang Terintegrasi

Prinsip perencanaan kawasan permukiman dengan memperhatikan struktur keruangan yang terintegrasi. Keberadaan keragaman fungsi pemanfaatan ruang serta berbagai kepentingan menuntut sinergitas dan koordinasi elemen keruangan dalam suatu sistem struktur yang terintegrasi baik skala kabupaten atau skala kawasan.

Strategi skala kabupaten antara lain pengembangan perumahan untuk mengurangi backlog rumah, meningkatkan dan mengembangkan kawasan permukiman yang belum terlayani infrastruktur serta memperkirakan kebutuhan perumahan dimasa yang akan datang. Untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan permukiman perlu disusun kebijakan dan peraturan yang dapat menstimulasi penyediaan lahan dan rumah dimasa mendatang, disamping harus memperbaiki kualitas perumahan yang belum layak pada saat ini. Selain itu pemerintah kabupaten diharapkan dapat berinvestasi disektor infrastruktur sehingga dapat mendukung pengembangan permukiman.

Dalam pengembangan kawasan permukiman, khususnya mengenai kawasan kumuh, harus menggunakan pendekatan yang berbasis kawasan dan terintegrasi dengan layanan infrastruktur. Melalui pendekatan berbasis kawasan suatu area permukiman kumuh harus dipandang sebagai bagian dari suatu kawasan (sistem) yang lebih besar, yang harus direncanakan secara terpadu.

Dalam pengembangan infrastruktur pada permukiman kumuh penyediaan harus dikoneksikan dengan sistem prasarana dan sarana umum yang dimiliki kabupaten.



Gambar 5. 1 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Kategori kumuh di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya dari masing-masing kawasan adalah kumuh ringan dengan pola penanganan dengan pemugaran dan permukiman kembali. Sesuai dengan pendekatan dalam perencanaan kawasan permukiman dan kategori kumuh maka konsep yang diterapkan dalam penanganan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya ada dua alternatif konsep penanganan kumuh yaitu:

5.1.1 Konsep Perbaikan Kampung atau Kampung Improvement Program (KIP)

Konsep KIP ini memiliki tujuan yang jelas yaitu memperhatikan penduduk kota dan desa yang memiliki tingkat pendapatan rendah, berhubungan dengan perbaikan lingkungan permukiman termasuk didalamnya jalan, drainase, fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, dan perbaikan manajemen. Tujuan Program Perbaikan Kampung adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok pada penghuni kawasan kumuh dengan menyediakan jalan lingkungan, air minum bersih, jamban, perbaikan sarana pembuangan sampah, pembuangan air kotor serta akses pendidikan dan kesehatan;
2. Pengadaan jenis-jenis jasa guna membantu yang miskin dan yang sudah lama menderita karena kondisi yang tidak sehat;
3. Pemberian sebanyak mungkin kesempatan kepada rakyat agar dapat mencapai sumber- sumber yang ada;
4. Pengerahan potensi penduduk agar mampu berusaha sendiri dan membantu kerja sama masyarakat.

Pendekatan Program Perbaikan Kampung sifatnya lebih konfrehensif meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan aspek fisik. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan mengarahkan dalam perencanaan, implementasi, operasionalisasi dan pemeliharaan. Sasarannya adalah perbaikan prasarana fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan dalam PPK yang lebih komprehensif ini diarahkan pada tiga aktivitas pembangunan yang sering disebut TRI BINA yaitu:

1. Pembangunan pada sumbe rdaya manusia atau bina manusia termasuk didalamnnya peran dan kepemimpinan masyarakat dengan disiplin sosial;
2. Pembangunan ekonomi atau bina usaha dengan menciptakan pekerjaan dan kesempatan kerja;
3. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan lingkungan di daerah atau bina lingkungan.

5.1.2 Konsep Kota Hijau

Kota hijau merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Pengembangan kota hijau berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Dalam prosesnya upaya ini memerlukan prakarsa yang bertitik tolak dari berbagai praktek dalam penerapan nilai-nilai pembangunan perkotaan berkelanjutan.

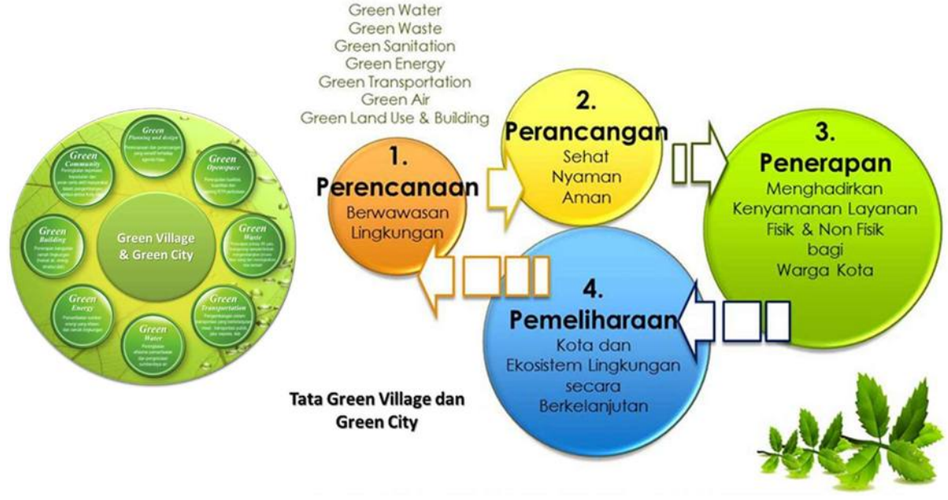
Menurut *United Nations Urban Environmental Accords*, ada tujuh atribut kota hijau, yaitu:

1. Energi meliputi: efisiensi energi, energi terbarukan dan perubahan iklim;
2. Pengurangan limbah meliputi zero waste peningkatan tanggung jawab produsen dan tanggung jawab konsumen;
3. Transportasi meliputi: transportasi umum, mobil bersih dan pengurangan kemacetan;
4. Urban Design meliputi: green building perencanaan kota dan green jobs;
5. Urban Nature meliputi: Ruang Terbuka Hijau, restorasi habitat dan konservasi cagar alam;
6. Kesehatan Lingkungan meliputi: pengurangan bahan beracun, sistem makanan sehat dan udara bersih;
7. Air meliputi: akses air bersih, konservasi air dan pengurangan limbah.

Beberapa strategi perencanaan:

Kota Hijau juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan

kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders). Dapat dikatakann pula bahwa Kota Hijau (green city) merupakan Kota yang sehat secara ekologis. Kota hijau harus dipahami sebagai kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi., mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota Hijau atau green city atau green village adalah konsep perkotaan/perdesaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. Konsep Kota Hijau dapat diterapkan di wilayah perkotaan maupun perdesaan seperti terlihat pada gambar 5.1;



Gambar 5.2 Konsep Green Village dan Green City

Kota Hijau adalah cerminan kota ramah lingkungan yang di desain dengan mepertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi dan air. Untuk mewujudkan kota hijau diharapkan dapat menerapkan standar lingkungan Kota Hijau dengan atribut green planning and design, green open space, green waste, green transportation, green water, green energy, green building, dan green community. Kota Hijau dapat menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh, yaitu dengan strategi sebagai berikut:

1. Dari aspek lokasi

Green Planning and Design (GPD) akan mengatasi persoalan ketidakteraturan bangunan dan tingginya kepadatan bangunan kota. Kota harus memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan RDTR. Hal ini sebagai acuan dalam pengembangan perumahan atau permukiman sebagai salah satu dasar desain untuk menyusun rencana aksi. GPD untuk permukiman didahului dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan kumuh yang menyediakan ruang – ruang interaksi untuk masyarakat.

2. Dari Aspek Kualitas Masyarakat

Green Community menitik beratkan pada proses penyadaran masyarakat bahwa dalam meningkatkan kualitas lingkungan maka akan memberikan dampak pada kesejahteraan, peningkatan kualitas perumahan/permukiman, dan ekonomi. Oleh karena itu masyarakat akan tergerak untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih hijau (masyarakat akan lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penerapan zero waste, penghematan energi dan air, serta membiasakan hidup bersih dan nyaman.

3. Dari Aspek Hunian Rumah

Implementasi green building, green waste, green energy, dan *green waste* pada skala *household* akan membatasi persoalan buruknya kualitas fisik hunian/rumah, menjadikan lingkungan perumahan akan berkualitas dan nyaman.

4. Dari Aspek Sarana dan Prasarana

Minimnya kuantitas pembinaan dan buruknya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh dapat diatasi dengan implementasi *green water, green waste*,

green energy dan *green transportation* pada skala kawasan. Sebagai contoh penyediaan drainase, air bersih, sanitasi, serta pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai.

Tabel 5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan rumah layak huni.	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH)	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman Permukiman Kembali bangunan yag berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman
	2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik	Rehabilitasi/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai	Penertiban IMB		Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
	3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat	Penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan	Penataan pinggiran DAS	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru			Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan.
	4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai		Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas	Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku	Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan)			Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau
			Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai					Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi
								Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH)
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan	Infrastruktur jalan yang terintegrasi diseluruh kawasan	Pemberdayaan masyarakat dalam	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Konektifitas jaringan jalan belum optimal		berkala terhadap kondisi jalan dikawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat	permukiman. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Rehabilitasi Jalan Lingkungan	perencanaan dan pengawasan			area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antar jalan.
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi	Peningkatan cakupan pelayanan seluruh lapisan masyarakat melalui penataan jaringan air bersih memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada.	Pemeliharaan sumber air bersih.	Pengembangan sumber air baku	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air;	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribus) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan
	2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik.		Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR)				
	3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa		Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem	Pembangunan hidran umum				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	ilegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.		distribusi air minum Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru				Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, 2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal. 3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung. 4. Kawasan permukiman yang tergenang. 5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah di lingkungan permukiman.	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase. Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan saluran air hujan secara terbuka di daerah kerapatan bangunan rendah. Sedangkan daerah perkotaan yang memiliki kerapatan bangunan tinggi direncanakan menggunakan saluran tertutup.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase. Integrasi sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan.	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase unuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tendon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota)
5	1. Prilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan	Meningkatnya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu,	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	sebagai tempat pembuangan limbah.		limbah sesuai teknis.				komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis.	Menyediakan akses pelayanan air limbah rumah tangga	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan				
	3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik.	Pengembangan Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)	Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).					
	4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan.							
6	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional.	Meningkatkan sarana dan prasarana layanan persampahan	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Peningkatan dan pengembangan TPA	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
	2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan.	Mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan				
	3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.	Meningkatkan pelayanan persampahan		Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.				
	4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian	Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian Fungsi Lingkungan						

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
	lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian							
	5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.,	penataan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang).						
		Pengadaan pengelolaan alat angkut.						
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Penyusunan dokumen rencana mitigasi bencana	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		Peningkatan sarpras penanggulangan bencana dan ketahanan masyarakat.	Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran					
		Rencana Pembangunan hidran-hidran air tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman;						
		Rencana Pembangunan tandon-tandon air untuk pemadam kebakaran;						
		Rencana Pembangunan pos pemadam kebakaran						
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	Pengembangan RTH sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman kota/lingkungan.	Membuat regulasi tentang RTH	Pendataan RTH yang ada	Konsep Green Open Space (RTH 30 %)	Pemugaran	Pemeriksaan berkala fungsi RTH.	Membangun ruang terbuka publik skala lingkungan, berupa taman lingkungan atau lapangan olahraga dengan distribusi yang merata sesuai skala pelayanan; Meningkatkan
		Pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;	Pembentukan kelembagaan pengelola RTH	Pengembangan RTH Hutan Kota				

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN	PENCEGAHAN	PENINGKATAN
		Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;	Peningkatan peran stakeholder dalam pembangunan RTH	Pengembangan RTH jalur hijau				kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pada ruang terbuka yang sudah ada untuk meningkatkan daya tarik dan frekuensi kunjungan masyarakat; Meningkatkan fungsi sosial ekonomi ruang terbuka publik melalui penyelenggaraan acara untuk menghidupkan ruang publik; Mengupayakan pembangunan tempat parkir umum Menambah vegetasi melalui penanaman pohon yang berfungsi ekologis dan estetika kawasan.
		Penyediaan dan pengembangan RTH sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional.		Pengembangan RTH privat				

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha;
2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors);
3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
   a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan;
   b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan;

c. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha;
d. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

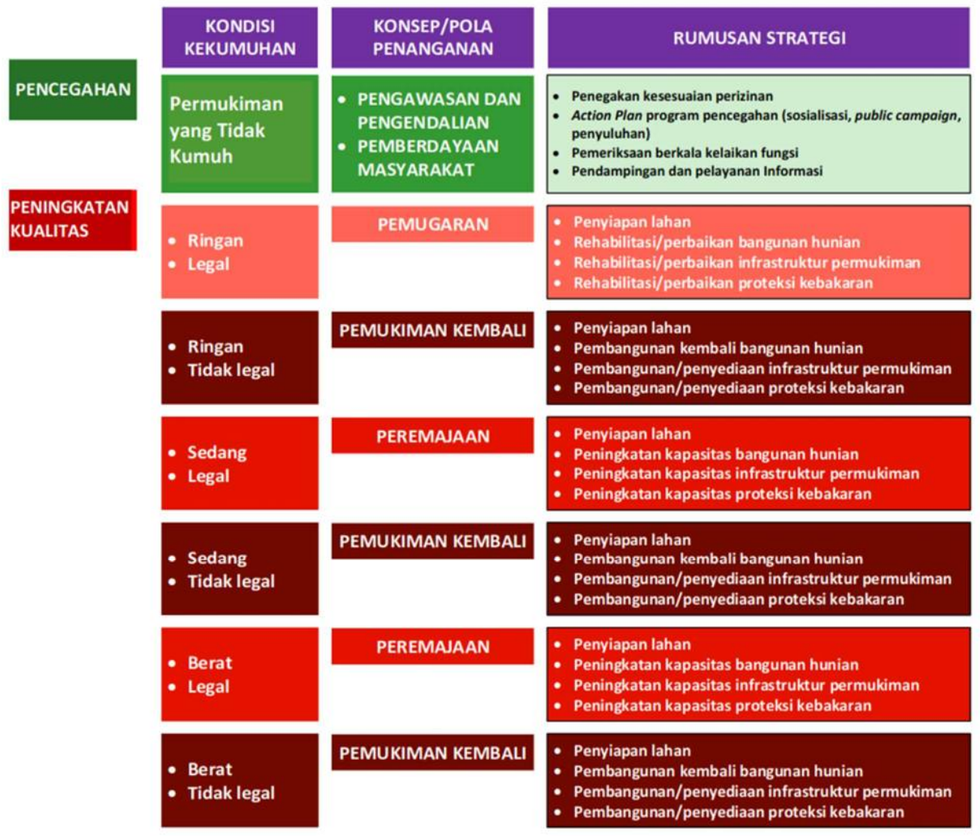
Dasar pertimbangan dalam penanganan kawasan kumuh yang menjadi prinsip dasar adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
2. Pemerintah pusat berperan sebagai pendamping daerah dan menciptakan kondisi daerah bebas kumuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan;
3. Partsipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat melalui proses partisipasi;
4. Kolaborasi dan Komprehensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu. (tidak bisa diselesaikan sendirian oleh satu pihak);
5. Terintegrasi dengan sistem kota, keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota dan keterpaduan prasarana kota;
6. Menjamin keamanan bermukim dimana perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Kunci keberhasilan penanganan kumuh antara Iain:

1. Memberdayakan partisipasi multi stakeholder dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Mengatasi kondisi eksisting seperti penanganan permukiman kumuh eksisting dan penguatan perencanaan yang dapat merespon kebutuhan pembangunan;
3. Mencegah permukiman kumuh dengan memperkuat integrasi pembangunan spasial dan sosial ekonomi;
4. Mengidentifikasi dan menangani persoalan lahan yang menjadi dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat;
5. Menguatkan institusi terkait penanganan permukiman kumuh untuk menjamin keberlanjutan penanganan.

Dalam pembuatan konsep dan strategi telah terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016, yang secara skematis dapat dilihat pada gambar 5.3;



Gambar 5.3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Sumber: SE DJCK Nomor 30/SE/DC/2020

Sedangkan untuk konsep peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya adalah Pemugaran dan Peremajaan.

Tabel 5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Bandar Baru

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Bandar Baru **1.** Keude Lueng Putu **2.** Sarah Panyang **3.** Kayee Jatoe **4.** Pulo Pueb **5.** Cut Njong **6.** Manyang Lancok **7.** Paru Keude **8.** Paru Cot **9.** Baroh Lancok **10.** Pulo Rheng **11.** Abah Lueng **12.** Jiem Jiem **13.** Blang Baro	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	2442	Unit	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang lak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Teknis Bangunan	1123	Unit						
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2410	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18764,18	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					peran serta masyarakat.	Rehabilitasi jalan lingkungan.				lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2391	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1892	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
		b. Ketidaktersediaan Drainase	5429,112	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	20223,5	Meter						
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1285	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan;
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1285	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4580	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4119	KK						
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3120	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3847	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Bandar Dua

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Bandar Dua **1.** Keude Ulee Gle **2.** Alue Keutapang **3.** Asan Kumbang **4.** Paya Pisang Klat **5.** Blang Dalam **6.** Muko Kuthang **7.** Kuta Krueng **8.** Blang Kuta **9.** Alue Sane **10.** Pulo **11.** Meurandeh Alue	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	916	Unit	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	399	Unit						
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4730	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar;
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10867,73	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.				Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi;
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					sumber air baku baru.				air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
		b. Ketidaktersediaan Drainase	3451	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	6536,877	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665	KK						
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2535	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2313	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						pelayanan persampahan.			masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1946	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1973	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Jangka Buya

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Jangka Buya **1.** Keude Jangka Buya **2.** Kiran Baroh	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	448	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan	Peningkatkan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	55	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
3. Kuta Baroh **4.** Beureumbang **5.** Jurong Binje					Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1091,63	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4514,237	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	306	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	246	KK						
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan	Pembangunan dan Peningkatan	Pengembangan sistem drainase berwawasan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait	Melakukan rehabilitasi melalui

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter	pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraa n pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan		drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	3609,907	Meter						
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak,	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	119	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	aman dan berkelanjutan.			sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	843	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	816	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	322	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	624	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Meurah Dua

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Meurah Dua **1.** Meunasah Bie **2.** Meunasah Raya **3.** Meunasah Mancang **4.** Meunasah Jurong/Teupin Pukat **5.** Lueng Bimba **6.** Pante Beureune **7.** Beuringen	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	787	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yag berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	179	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.		permukiman (pemberdayaan).			secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1411,448	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10255,25	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	510	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	373	KK						
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,3	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	2772,793	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	5980,227	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan			kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	92	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	92	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										(melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1487	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1415	KK						
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1213	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.6 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Meureudu

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Meureudu **1.** Keude Meureudeu **2.** Meuraksa **3.** Meunasah Balek **4.** Pohroh **5.** Rungkom **6.** Manyang Cut **7.** Mns Kulam Beuracan **8.** Mns Mulieng Beuracan **9.** Mns Lhok/Mns Gantung **10.** Masjid Tuha/Dayah U Paneuk **11.** Teupin Peuraho **12.** Rhieng Krueng **13.** Rhieng Mancang	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	Monitoring dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan
		b. Kepadatan Bangunan	-	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter						
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat;	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	(SR). Pembangunan hidran umum.			Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan
		b. Ketidaktersediaan Drainase	9052,80	Meter						
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	9460,84	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261	KK						
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	2697	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS.	Peningkatan dan pengembangan TPA	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan;	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dengan persyaratan Teknis			Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.			Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2737	KK						
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2259	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2489	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.7 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Panteraja

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Panteraja	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	284	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
Keude Panteraja		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
Gampong Teungoh		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	58	Unit						
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	0	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2381,327	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	80	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	73	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
		b. Ketidaktersediaan Drainase	0	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	1261,023	Meter						
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	113	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat;	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	113	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).				Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	567	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	498	KK						
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	417	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	489	Unit	Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.		dan pengawasan		kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.8 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Trienggadeng

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Trienggadeng **1.** Gampong Meue **2.** Masjid Trienggadeng **3.** Sagoe **4.** Keude Trienggadeng **5.** Kuta Pangwa **6.** Rawa Sari **7.** Deah Pangwa **8.** Cot Lheu Rheng	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	719	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur permukiman; Permukiman Kembali bangunan yag berada di kawasan lindung.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan strategis perkotaan dan perdesaan.	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi;
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	286	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					sempadan sungai.					Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1144	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan menjaga Konektivitas antara jalan.
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	13085,61	Meter						
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	621	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR).	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA);
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	592	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pembangunan hidran umum.			kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan pembiayaan pembangunan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase untuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang
		b. Ketidaktersediaan Drainase	2508,913	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	6841	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	223	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	223	KK						
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1918	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan	1723	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		yang tidak sesuai Standar Teknis				jangkauan pelayanan persampahan.			persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1624	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 5.9 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualias Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Ulim

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Kecamatan Ulim 1. Keude Ulim 2. Tanjong Ulim/ Keude Parek	1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	404	Unit	Monitoring dan pengawasan pembanguan kawasan permukiman baru. Penyiapan dan Pengembangan	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan yang layak huni. Relokasi permukiman yang berada di kawasan	Green Planning and Design (GPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kab. Dan RTH); Penertiban IMB; Pengawasan dan Pengendalian	Pemugaran bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (bedah kampung) dan infrastruktur	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan perumahan; Melakukan penataan bangunan di kawasan	Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman; Pengoptimalan SDM dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; Pengoptimalan
		b. Kepadatan Bangunan	0	Ha						
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	57	Unit						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
3. Mesjid Ulim Baroh 4. Nanggroe Barat **5.** Reuleut					infrastruktur dasar permukiman. Penyusunan dokumen teknis penataan bangunan dan lingkungan Penyediaan SDM tim pemantau dan pengawas. Penetapan regulasi daerah pelarangan pembangunan di kawasan sempadan sungai.	sempadan sungai. Penataan pinggiran DAS. Perbaikan kualitas rumah sesuai dengan standar yang berlaku.	Pembangunan Baru; Pendampingan Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan permukiman (pemberdayaan).	permukiman; Permukiman Kembali bangunan yang berada di kawasan lindung.	strategis perkotaan dan perdesaan.	kerjasama dan peran swasta dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan; Menyediakan perumahan formal dengan harga terjangkau; Membangun hunian vertikal (rumah susun) di kawasan permukiman kepadatan tinggi; Melakukan rehabilitasi (bedah rumah) untuk bangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH).
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	590	Meter	Meningkatkan monitoring dan pengawasan berkala terhadap kondisi jalan di kawasan kawasan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Rehabilitasi jalan lingkungan.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pembangunan jaringan jalan terintegrasi	Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatkan aksesibilitas dengan memastikan semua area permukiman terlayani oleh jalan lingkungan sesuai standar; Melakukan perbaikan konstruksi jalan lingkungan/jalan lokal yang mengalami kerusakan dan atau tidak sesuai dengan standar (lebar minimal 1,5 meter, permukaan diperkeras, memiliki saluran samping, tidak rusak); Melengkapi sarana prasarana pendukung jalan seperti penerangan jalan umum; Mengatur dan
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4137,042	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										menjaga Konektivitas antara jalan.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168	KK	Pemeliharaan sumber air bersih. Monitoring dan pemugaran berkala sumber dan sarana penampungan air bersih. Meningkatkan monitoring dan pengawasan keamanan sistem distribusi air minum. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber air baku baru.	Pengembangan sumber air baku. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan penambahan jumlah sambungan unit rumah (SR). Pembangunan hidran umum.	Pengamanan air baku untuk menjaga kuantitas dan kualitas.	Pembangunan SPAM Perpipaan Pembangunan SPAM non perpipaan Peningkatan Jaringan SR	Penetapan regulasi terkait SPAM; Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat; Pembinaan standar air minum yang sehat; Peningkatan kinerja keuangan dan operasional PDAM; Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih; Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air; Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah; Penguatan Pokja PKP.	Meningkatkan cakupan pelayanan (distribusi) terhadap akses air minum perpipaan dan non perpipaan; Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Instalasi Pengolahan Air (IPA); Reservoir (penampungan) air atau sumur Bor; Memanfaatkan idle capacity/kelebihan kapasitas produksi; Menyediakan program bantuan subsidi penyediaan air minum atau air bersih khusus bagi MBR.
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	123	KK						
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0	Ha	Meningkatkan monitoring dan pengawasan kawasan permukiman. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas drainase untuk menghindari genangan air hujan	Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kelembagaan Peningkatan	Pemugaran	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan; Pembinaan penyiapan resapan kavling; Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi melalui normalisasi dan perbaikan saluran drainase unuk memperlancar limpasan air dan mengurangi hambatan (sampah) agar tidak terjadi genangan; Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase seperti pelebaran saluran
		b. Ketidaktersediaan Drainase	837	Meter						
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	4015,042	Meter						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							pembiayaan pembangunan			pembangunan gorong- gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon; Peningkatan jangkauan pelayanan dengan menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung dengan saluran drainase yang hirarkinya lebih tinggi (drainase primer skala kota).
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	56	KK	Sosialisasi pentingnya tentang sistem pengolahan limbah sesuai teknis. Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Mendorong perubahan perilaku di masyarakat terkait dengan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Komunal. Penyediaan dan Pemeliharaan tangki septik individual yang layak, aman dan berkelanjutan.	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang sanitasi; Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat; Pembinaan pola sanitasi sehat; Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan rehabilitasi (perbaikan) unit pengelolaan air limbah untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis; Membangun jamban pribadi atau MCK; Komunal sesuai dengan kebutuhan; Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah on site (tanki septik pribadi/komunal) atau sistem offsite (melalui jaringan perpipaan; IPAL skala kawasan); Menerapkan sanitasi berbasis masyarakat melalui kampanye hidup bersih dan sehat serta rencana aksi perbaikan sanitasi.
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	56	KK						

Lokasi	Aspek	Kriteria	Volume	Sat	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	718	KK	Peningkatan Kesadaran masyarakat terkait PHBS. Pengurangan sampah dari sumbernya dengan menggunakan metode 3R.	Peningkatan dan pengembangan TPA Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.	Pengolahan sampah berbasis masyarakat	Pemugaran	Penetapan regulasi bidang persampahan; Pembinaan program 3R; Peningkatan pola hidup bersih; Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat; Penguatan Pokja PKP.	Melakukan pembangunan unit pengelolaan persampahan agar sesuai dengan persyaratan teknis
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	688	KK						
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Unit	Pembinaan Relawan Tanggap Bencana Kebakaran. Penyiapan regulasi penanganan bahaya kebakaran.	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan	Pemugaran	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran; Penguatan Pokja PKP.	Menyediakan sarana dan prasarana proteksi (pemadam) kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APR) dan Hydrant pada setiap unit lingkungan Meningkatkan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	554	Unit						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya diharapkan tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Tindakan pencegahan yang dilakukan meliputi pengawasan dan pengendalian oleh para stakeholder serta juga dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Tindakan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap perizinan yang telah ditetapkan (seperti: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tindakan pemberdayaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

6.1.1 Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dalam konteks permukiman kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Permukiman kumuh sering kali memiliki berbagai masalah seperti ketidaksempurnaan infrastruktur, sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Berikut adalah cara pengawasan dan pengendalian dapat diterapkan dalam peningkatan permukiman kumuh:

1. Pengawasan Permukiman Kumuh:
   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi permukiman kumuh untuk mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan mendesak penduduk setempat.
   b. Menilai infrastruktur yang ada, termasuk sanitasi, air bersih, jalan, dan fasilitas umum lainnya, untuk menentukan area-area yang membutuhkan perbaikan mendesak.
   c. Memantau faktor-faktor sosial seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kriminalitas di permukiman kumuh.

2. Pengendalian Permukiman Kumuh:
   a. Mengembangkan rencana dan strategi pengendalian yang terfokus pada perbaikan infrastruktur dasar, perumahan yang layak, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.
   b. Menerapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur pembangunan kembali atau perbaikan permukiman kumuh.
   c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan warga setempat.

Langkah-langkah seperti revitalisasi permukiman, penyediaan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan regulasi yang tepat dapat membantu dalam pengendalian dan pengawasan permukiman kumuh. Hal ini tidak hanya memperbaiki kondisi hidup penduduk, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam konteks permukiman kumuh adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan mendesak dan berkelanjutan, serta untuk memastikan perbaikan yang nyata dalam kualitas hidup penduduk yang tinggal di sana.

6.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberi kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengambil kontrol atas kehidupan dan perkembangan mereka sendiri. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat termasuk:

a. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan formal dan non-formal serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam memahami isu-isu kunci, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan daya saing.
b. Akses terhadap Informasi: Memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan, termasuk informasi tentang hak-hak mereka, layanan yang tersedia, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
c. Partisipasi dan Keterlibatan: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam tingkat lokal maupun yang lebih luas.
d. Penguatan Sosial dan Ekonomi: Mendukung pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, dan memperkuat jaringan sosial dalam komunitas.
e. Advokasi dan Pemberdayaan Politik: Mendukung masyarakat dalam memahami hak-hak mereka, mendukung advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan individu dalam upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Hal ini membantu dalam membangun komunitas yang lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang cepat atau sederhana, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam mengembangkan kapasitas dan kekuatan masyarakat untuk mengelola kehidupan mereka dengan lebih baik serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 6.1 Matriks Program Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	2024	2025	2026	2027	2028		
1	1. Besarnya kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);	Kabupaten Pidie Jaya	1. Mengendalikan dan mengawasi;	1. Sosialisasi lingkungan hunian sehat;						BAPPEDA, DPUPR	APBD
	2. Kawasan permukiman yang belum tertata dengan baik;		2. Pembangunan perumahan.	2. Sosialisasi dan pelatihan mengenai penataan bangunan dan aturan bangunan gedung;							
	3. Status lahan permukiman belum sepenuhnya memiliki sertifikat;			3. Sosialisasi dan pelatihan mengenai							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	2024	2025	2026	2027	2028		
				pengelolaan prasarana lingkungan;							
	4. Berkembangnya kegiatan perumahan di daerah sempadan sungai.			4. Pengendalian peruntukan lahan dan bangunan;							
				5. Pengendalian zona hijau disekitar kawasan permukiman;							
				6. Peningkatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan;							
				7. Pengendalian kawasan permukiman di sempadan sungai;							
				8. Penataan bangunan di sepanjang pantai dan sungai (dengan memperhatikan sempadan pantai dan sungai).							
2	1. Persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal	Kabupaten Pidie Jaya	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelayakan fungsi dalam pembangunan jalan						BAPPEDA, DPUPR	APBD
	2. Masih adanya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar										
	3. Konektifitas jaringan jalan belum optimal										
3.	1. Belum optimalnya sistem penyediaan air minum dan pengembangan air minum terlindungi;	Kabupaten Pidie Jaya	Penetapan regulasi terkait SPAM;	1. Perencanaan teknis SPAM						BAPPEDA, DPUPR, PDAM	APBD
	2. Kurangnya ketersediaan prasarana sarana sumber daya air terkait pengelolaan sumber air baku untuk air minum dan sistem jaringan distribusi yang belum baik;		Pembinaan Air Minum Berbasis Masyarakat;	2. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi							
	3. Kebocoran pipa distribusi, pemasangan sambungan pipa illegal menyebabkan hilangnya volume air bersih yang terdistribusi.		Pembinaan standar air minum yang sehat;								
			Peningkatan kinerja keuangan								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	2024	2025	2026	2027	2028		
			dan operasional PDAM;								
			Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih;								
			Peningkatan daya dukung lingkungan sumber daya air;								
			Pembinaan mengurangi eksploitasi air tanah;								
			Penguatan Pokja PKP.								
4	1. Sistem jaringan drainase belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya;	Kabupaten Pidie Jaya	Penetapan regulasi terkait drainase lingkungan;	1. Perencanaan teknis jaringan drainase;						BAPPEDA, DPUPR	APBD
	2. Persentase kondisi jaringan drainase lingkungan belum optimal;		Pembinaan penyiapan resapan kavling;	2. Pemeliharaan saluran air/drainase dari sampah dan sedimentasi;							
	3. Jaringan drainase lingkungan yang tidak saling terhubung;		Pembinaan pemeliharaan dan perbaikan drainase;	3. Perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala;							
	4. Kawasan permukiman yang tergenang;		Penguatan Pokja PKP.	4. Penyuluhan kepada masyarakat tidak membuang limbah pada saluran drainase.							
	5. Belum optimalnya fungsi drainase akibat timbunan sampah dilingkungan permukiman.										
5	1. Perilaku masyarakat yang masih menggunakan badan-badan sebagai tempat pembuangan limbah;	Kabupaten Pidie Jaya	Penetapan regulasi bidang sanitasi;	1. Perencanaan teknis prasarana air limbah						BAPPEDA, DPUPR, DINKES, DLHK	APBD
	2. Tingginya penggunaan sarana pengelolaan limbah yang belum sesuai teknis;		Pembinaan sistem sanitasi individu, komunal maupun terpusat;	2. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi.							
	3. Rendahnya pelayanan dan pengelolaan kegiatan penyehatan lingkungan sanitasi yang layak baik;		Pembinaan pola sanitasi sehat;								

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	2024	2025	2026	2027	2028		
	4. Belum optimalnya dan ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) kota, komunal, serta kawasan.		Pembinaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat;								
			Penguatan Pokja PKP.								
6	1. Belum optimalnya sinergisitas kerjasama dalam pengelolaan sampah kota secara regional;	Kabupaten Pidie Jaya	Penetapan regulasi bidang persampahan;	1. Sosialisasi ke masyarakat dengan program 4 R (Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali), Recycle (mendaur ulang), Repair (memperbaiki);						BAPPEDA, DPUPR, DLHK	APBD
	2. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan;		Pembinaan program 3R;	2. Pelatihan/pendamping an masalah pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna;							
	3. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan;		Peningkatan pola hidup bersih;	3. Sosialisasi cara pengomposan;							
	4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan serta kurang berfungsinya sistem pengawasan dan pengendalian;		Pembinaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;	4. Sosialisasi Bank Sampah.							
	5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pemilahan sampah.		Membuat publikasi dan edukasi pengelolaan kebersihan lingkungan (poster, spanduk, iklan) bagi masyarakat;								
			Penguatan Pokja PKP.								
7	Belum tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran ditingkat kawasan maupun lingkup hunian	Kabupaten Pidie Jaya	Pendampingan dan pelayanan informasi bahaya kebakaran;	1. Sosialisasi dan pelatihan mengenai mitigasi kebakaran;						BAPPEDA, DPUPR, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP	APBD
			Penguatan Pokja PKP.	2. Pembentukan organisasi Satuan Relawan kebakaran (SATLAKAR) di kawasan permukiman							

No	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya	Lokasi	Strategi	Program	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
			PENCEGAHAN	PENCEGAHAN	2024	2025	2026	2027	2028		
				(upaya proteksi kebakaran dengan sistem pemberdayaan							
8	Belum optimalnya fungsi ruang terbuka publik pada kawasan permukiman,	Kabupaten Pidie Jaya	Pemeriksaan berkala fungsi RTH.	3. Pengendalian zona hijau di sekitar kawasan permukiman						BAPPEDA, DPUPR, DLHK	APBD

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten, Skala Kawasan, dan Skala Lingkungan

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan berbasis masyarakat, berbasis skala lingkungan dan berbasis skala kawasan melalui pendekatan perencanaan partisipatif. Rencana aksi program disusun berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh yang akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program. Rencana aksi masing-masing kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 2 Rencana Aksi Pencegahan dan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Program Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan
							2024	2025	2026	2027	2028	
Aspek Kondisi Bangunan Gedung												
1	Sosialisasi Lingkungan Hunian Sehat Dan Sosialisasi Dan Pelatihan Mengenai Penataan Bangunan Dan Aturan Bangunan Gedung;	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
Aspek Kondisi Jalan Lingkungan												
2	Pengawasan Dan Pengendalian Kesesuaian Terhadap Standar Teknis Dan Kelayakan Fungsi Dalam Pembangunan Jalan	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU

No	Program Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan
							2024	2025	2026	2027	2028	
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum												
3.	Pengawasan Dan Pengendalian Kesesuaian Terhadap Standar Teknis Dan Kelayakan Fungsi Dalam Pembangunan SPAM	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, PDAM
Aspek Kondisi Drainase Lingkungan												
4	Pengawasan Dan Pengendalian Kesesuaian Terhadap Standar Teknis Dan Kelayakan Fungsi Dalam Pembangunan Drainase	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU
Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah												
5	Pengawasan Dan Pengendalian Kesesuaian Terhadap Standar Teknis Dan Kelayakan Fungsi	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH

No	Program Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan
							2024	2025	2026	2027	2028	
	Dalam Pembangunan Air Limbah	Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DINKESKB, DLH
Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan												
6	Pengawasan Dan Pengendalian Kesesuaian Terhadap Standar Teknis Dan Kelayakan Fungsi Dalam Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran												
7	Sosialisasi Dan Pelatihan Mengenai Mitigasi Kebakaran.	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD

No	Program Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan
							2024	2025	2026	2027	2028	
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, PEMADAM KEBAKARAN, SATPOL PP, BPBD
Ruang Terbuka Hijau												
8	Pengawasan Dan Pengendalian Zona Hijau Disekitar Kawasan Permukiman	Kecamatan Bandar Baru	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Bandar Dua	11	Gampong	5.000	55.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Jangka Buya	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Meurah Dua	7	Gampong	5.000	35.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Meureudu	13	Gampong	5.000	65.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Panteraja	2	Gampong	5.000	10.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Trienggadeng	8	Gampong	5.000	40.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
		Kecamatan Ulim	5	Gampong	5.000	25.000						BAPPEDA, Dinas PU, DLH
Total		**8 Kawasan**	**64**	**Gampong**	**5.000**	**2.560.000**						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya didasarkan aksi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan di daerah. Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 6. 3 Rencana Aksi Sosial Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Aspek		Program	Vol	Harga Satuan (X1000)	Total Biaya (X1000)	Indikasi Biaya Dan Rencana Implementasi					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
Sosial	1	Sosialisasi IMB	100	500	50.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Bappeda, Dinas PU
	2	Sosialisasi Rumah Sehat dan Standar Teknis	100	500	50.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinas PU, Dinkeskb
	3	Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah	100	5.000	500.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	DLH
	4	Edukasi Pengelolaan Sampah	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	DLH
	5	Sosialisasi Perilaku Bersih dan Hidup Sehat	100	9.000	900.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinkeskb
	6	Edukasi Pengolahan Air Limbah	100	9.000	900.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Dinkeskb
	7	Pelatihan Tanggap Kebakaran	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	BPBD
	8	Penyusunan Aturan Bersama Warga Tentang Penghijauan	100	10.000	1.000.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	Bappeda, DLH
	9	Subsidi MBR untuk Akses Air Minum	100	3.000	300.000	v	v	v	v	v	Masyarakat, CSR, dan APBD	PDAM

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perumusan program dan kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada masing-masing kawasan kumuh berdasarkan permasalahan yang terkait 7 indikator kumuh. Program kegiatan disusun diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan kumuh tersebar di 8 lokasi Kawasan kumuh dan 64 Gampong di wilayah perkotaan.

Tabel 7.1 Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	Peningkatan Kualitas Permukiman di Lokasi Kawasan Strategis Perkotaan	Bangunan Gedung	Program RTLH	Kawasan Permukiman Perkotaan						BP2P, Perkim Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Jalan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan dan Penyediaan Akses Jalan Lingkungan	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Air Minum	Pembangunan Jaringan Air Minum Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, PDAM.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Drainase Lingkungan	Pembangunan Jaringan Drainase	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Air Limbah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Lingkungan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, DLHK Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, Pemadam Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	Kawasan Permukiman Perkotaan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
2	Berkembangnya Kegiatan Perumahan di Daerah Sempadan Sungai	Bangunan Gedung	Pembangunan Permukiman Baru	Kawasan Sempadan Sungai						BP2P, Perkim Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.

No	Strategi Peningkatan	Aspek	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2024	2025	2026	2027	2028		
3	Semakin Mahalnya Nilai Lahan di Perkotaan untuk Perumahan yang Menyebabkan timbulnya Kawasan Kumuh Baru	Bangunan Gedung	Penyediaan Rumah Murah	Kawasan Permukiman Perkotaan						BP2P, Perkim Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
4	Rumah tidak layak huni sebanyak 19,24% / 2.582 unit di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pidie Jaya	Bangunan Gedung	Program RTLH	Seluruh Kawasan						BP2P, Perkim Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
5	Kondisi jalan lingkungan yang tidak layak di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 masih terdapat 42,93 % / 82.076,03 meter; dan Kondisi cakupan pelayanan Jalan Lingkungan 7,95 % /15.197,08 meter di kawasan permukiman kumuh.	Jalan Lingkungan	Penyediaan Jalan Lingkungan dan Perbaikan Kualitas Jalan Lingkungan	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
6	Kondisi genangan akibat limpahan air hujan dan luapan air sungai 8 hektar / 0,76 %; 44,30 % / 59.733,19 meter kualitas konstruksi drainase tidak memadai; dan 16,43 % / 22.149 meter kebutuhan drainase baru.	Drainase Lingkungan	Perbaikan Drainase dan Pembangunan Jaringan Drainase	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
7	Pengusulan IPAL dan jaringan air limbah Kabupaten Pidie Jaya kepada pihak yang berkompeten menangani masalah sanitasi. Dan 17,28 % / 2.788 KK masyarakat sesuai memiliki sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis	Air Limbah	Pembangunan Tangki Septik Individu dan Pembangunan IPAL Komunal	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
8	Sebanyak 37,27 % / 6.015 KK tidak terlayanai akses aman air minum; dan Sebanyak 36,59 % / 5.905 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum.	Air Minum	Optimalisasi IPA; Pembangunan Jaringan Pipa Baru dan Penambahan SR	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, PDAM.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
9	96,29% / 15.540 KK masyarakat tidak memiliki sistem prasarana dan sarana persampahan sesuai standar teknis; 88,31 % / 14.252 KK masyarakat tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis dan belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah.	Persampahan	Membangun TPS 3R; Membangun Tempat Sampah/Bak sampah/Container; dan Menambah Armada angkut (Drumtruck, Motor Sampah, dan Gerobak Sampah)	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, DLHK Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
10	61,29 % / 8.227 Unit masyarakat tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran; dan 96,99 % / 12.974 Unit masyarakat tidak memiliki sarana proteksi kebakaran di Kabupaten Pidie Jaya.	Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, Pemadam Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
11	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau	RTH/RTP	Pembanguan Ruang Terbuka Publik/Hijau	Seluruh Kawasan						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 7.2 Matriks Program dan Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Bangunan Gedung	Rehabilitasi Bangunan Hunian yang Tidak Teratur Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Bantuan Rehab Rumah	Seluruh Kawasan Kumuh						BP2P, Perkim Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
2	Jalan Lingkungan	Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Lingkungan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
3	Air Minum	Optimalisasi Pipa Distribusi; Penambahan Jaringan Sambungan Rumah (SR); Pembangunan Bak Penampung Air.	Optimalisasi Pemanfaatan Air Minum Sistem Perpipaan	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, PDAM.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
4	Drainase Lingkungan	Menyediakan / Membangun Jaringan Drainase Lingkungan; Memperbaiki Saluran Drainase Yang Rusak; Membangun Saluran Drainase Pada Wilayah Genangan dengan Berwawasan Lingkungan.	Memperbaiki dan Membangun Saluran Drainase	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
5	Air Limbah	Meningkatkan Akses Layanan Air Limbah bagi Masyarakat (tangka septik individu dan komunal); Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah; Membangun Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Bagi Masyarakat yang Belum Memiliki Akses Air Limbah.	Pembangunan Ipal Komunal; dan Pembangunan Tangki Septik Individu dan Komunal	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
6	Persampahan	Membangun Tempat Penampungan Sampah di Kawasan Permukiman (Tong sampah, Bak sampah, container); Menambah Armada Angkut (Gerobak Sampah dan Motor Sampah).	Membangun TPS; Menambah container; Menambah Motor Sampah/Gerobak Sampah.	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, DLHK Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
7	Proteksi Kebakaran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Penyediaan Alat Proteksi Kebakaran	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab, Pemadam Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.

No	Aspek	Strategi Peningkatan	Program Peningkatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Dinas	Sumber Pendanaan
					2022	2023	2024	2025	2026		
8	Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Publik	Pembangunan RTH/RTP Skala Lingkungan dan Kawasan	Seluruh Kawasan Kumuh						BPPW, Perkim Prov, PU Prov, DINAS PU Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

7.2 Rencana Aksi Program Peningkatan Perumahan Kumuh Skala Kabupaten dan Skala Kawasan

Rencana aksi berisikan rencana kegiatan dalam penanganan kumuh di masing-masing kawasan kumuh. Rencana kegiatan berdasarkan 7 indikator kumuh. Rencana kegiatan dalam penanganan kumuh di masing-masing kawasan secara umum dijelaskan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Rencana kegiatan pada bangunan gedung adalah rehabilitasi rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis (RTLH). Rumah yang kurang memenuhi persyaratan teknis banyak dijumpai di kawasan kumuh. Program yang direncanakan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan bangunan tidak teratur di kawasan permukiman.

b. Jaringan Jalan

Rencana kegiatan peningkatan jalan di kawasan kumuh hanya jalan lingkungan di kawasan permukiman. Untuk memudahkan aksesibilitas jalan lingkungan terintegrasi dengan jalan lokal kabupaten. Rencana kegiatan terbagi 2 yaitu:

1. Pembangunan jaringan jalan lingkungan baru;
2. Perbaikan kualitas permukaan jalan lingkungan.

c. Air Minum

Pemenuhan kebutuhan air minum layak masih menjadi persoalan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya umumnya. Sebagian masyarakat di kawasan permukiman kumuh masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak. Program kegiatan yang dikarenakan antara lain:

1. Optimalisasi IPA (penanganan skala kabupaten);
2. Pembangunan jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
3. Optimalisasi jaringan pipa distribusi (penanganan skala kabupaten dan kawasan);
4. Penambahan SR.

Dalam rencana aksi skala kawasan rencana pemenuhan kebutuhan air minum dibuat satu paket dimana pembangunan/opimalisasi jaringan distribusi dan penambahan SR dijadikan satu pekerjaan.

d. Jaringan Drainase

Jaringan Drainase merupakan persoalan utama di masing-masing kawasan kumuh. Pembangunan jaringan drainase ini harus terintegrasi antar kawasn sampai ke saluran drainase primer. Rencana peningkatan jaringan drainase terbagi 2 kegiatan yaitu:

1. Pembangunan jaringan drainase baru; dan
2. Perbaikan kualitas konstruksi drainase.

e. Air Limbah

Akses sanitasi layak di Kabupaten Pidie Jaya masih rendah, sehingga masih perlu upaya peningkatan akses layanan air limbah bagi masyarakat. Rencana kegiatan peningkatan layanan air limbah antara lain:

1. Pembangunan IPAL komunal
2. Pembangunan Tangki Septik

f. Persampahan

Persampahan merupakan sektor yang menyumbang kekumuhan terbesar di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang ada menyebabkan sistem pengelolaan sampah belum optimal. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Program di bidang persampahan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan TPS 3R; diprioritaskan bagi wilayah yang jauh dari lokasi TPA sehingga ada pengolahan sementara sebelum diangkut ke TPA;
2. Pembangunan TPS;
3. Pembuatan Bak Sampah/Tong Sampah;
4. Menambah alat angkut (dumtruk, motor sampah, atau gerobak sampah)
5. Menambah kontainer.

g. Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Pidie Jaya baru melayani wilayah perkotaan, untuk wilayah lainnya diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL). Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

1. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. SKKL berupa Satuan Organisasi Satlakar, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan program pelatihan;
2. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

Tabel 7.3 Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru				31,5 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	377,00	Unit	25.000,00	9.425.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	259,00	Unit	50.000,00	12.950.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	950,00	Meter	2.000,00	1.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	3.565,00	Meter	1.000,00	3.565.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	462,00	KK	2.000,00	924.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	5,00	Unit	500.000,00	2.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	300,00	Meter	1.500,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.150,00	Meter	1.000,00	1.150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	17,00	KK	5.000,00	85.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	462,00	KK	500,00	231.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	8,00	Unit	100.000,00	800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	392,00	Unit	1.000,00	392.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					34.872.000,00						
2	Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru				8,20 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	96,00	Unit	25.000,00	2.400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	4,00	Unit	50.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	823,07	Meter	1.000,00	823.072,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	2.381,11	Meter	1.500,00	3.571.668,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	21,00	KK	5.000,00	105.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	109,00	KK	500,00	54.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	150,00	Unit	1.000,00	150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.504.240,00						
3	Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru				24 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	368,00	Unit	25.000,00	9.200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	233,00	Unit	50.000,00	11.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	1.050,00	Meter	2.000,00	2.100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	2.850,00	Meter	1.000,00	2.850.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	301,00	KK	2.000,00	602.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	3,00	Unit	500.000,00	1.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	1.900,00	Meter	1.500,00	2.850.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.400,00	Meter	1.000,00	1.400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	205,00	KK	5.000,00	1.025.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	445,00	KK	500,00	222.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	390,00	Unit	1.000,00	390.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.537.500,00						
4	Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru				16,07 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	86,00	Unit	25.000,00	2.150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	76,00	Unit	50.000,00	3.800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	548,28	Meter	1.000,00	548.275,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	142,00	KK	2.000,00	284.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	87,00	KK	500.000,00	43.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.257,88	Meter	1.000,00	1.257.877,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	70,00	KK	5.000,00	350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	283,00	KK	500,00	141.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	349,00	Unit	1.000,00	349.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					53.380.652,00						
5	Cut Njong Kecamatan Bandar Baru				10,34 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	186,00	Unit	25.000,00	4.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	13,00	Unit	50.000,00	650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	6,00	KK	2.000,00	12.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.607,83	Meter	1.000,00	1.607.830,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	106,00	KK	5.000,00	530.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	244,00	KK	500,00	122.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	186,00	Unit	1.000,00	186.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.157.830,00						

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
6	Manyang Lancok Kecamatan Bandar Baru				6,32 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	94,00	Unit	25.000,00	2.350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	871,86	Meter	1.000,00	871.860,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	187,00	KK	2.000,00	374.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.079,35	Meter	1.000,00	1.079.353,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	88,00	KK	5.000,00	440.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	187,00	KK	500,00	93.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	149,00	Unit	1.000,00	149.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					6.657.713,00						
7	Paru Keude Kecamatan Bandar Baru				55,35 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	409,00	Unit	25.000,00	10.225.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	387,00	Unit	50.000,00	19.350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	708,00	KK	2.000,00	1.416.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan Bak Penampung Air	3,00	Unit	500.000,00	1.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	3.061,96	Meter	1.000,00	3.061.960,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	347,00	KK	5.000,00	1.735.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	3,00	Unit	500.000,00	1.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	1.389,00	KK	500,00	694.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	10,00	Unit	100.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	989,00	Unit	1.000,00	989.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					41.471.460,00						
8	Paru Cot Kecamatan Bandar Baru				18,89 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	89,00	Unit	25.000,00	2.225.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	387,00	Unit	50.000,00	19.350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.851,29	Meter	1.000,00	1.851.293,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	62,00	KK	2.000,00	124.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.812,52	Meter	1.000,00	1.812.516,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	2,00	KK	5.000,00	10.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	207,00	KK	500,00	103.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	186,00	Unit	1.000,00	186.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					27.062.309,00						
9	Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru				19,35 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	337,00	Unit	25.000,00	8.425.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	33,00	Unit	50.000,00	1.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	2.668,07	Meter	1.000,00	2.668.066,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	162,00	KK	2.000,00	324.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	4.388,49	Meter	1.000,00	4.388.488,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	152,00	KK	5.000,00	760.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	KK	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	495,00	KK	500,00	247.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	392,00	Unit	1.000,00	392.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					20.755.054,00						
10	Pulo Rheng Kecamatan Bandar Baru				28 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	53,00	Unit	25.000,00	1.325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	3,00	Unit	50.000,00	150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	410,00	Meter	2.000,00	820.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	805,00	Meter	1.000,00	805.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	93,00	KK	2.000,00	186.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	648,00	Meter	1.500,00	972.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	333,00	Meter	1.000,00	333.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	41,00	KK	5.000,00	205.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	107,00	KK	500,00	53.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	15,00	Unit	1.000,00	15.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					6.064.500,00						
11	Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru				12,92 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	59,00	Unit	25.000,00	1.475.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	34,00	Unit	50.000,00	1.700.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	376,91	Meter	1.000,00	376.906,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	109,00	KK	2.000,00	218.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	760,02	Meter	1.000,00	760.015,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	113,00	KK	5.000,00	565.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	117,00	KK	500,00	58.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	117,00	Unit	1.000,00	117.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					6.470.421,00						
12	Jiem Jiem Kecamatan Bandar Baru				15,15 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	127,00	Unit	25.000,00	3.175.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	9,00	Unit	50.000,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.460,41	Meter	1.000,00	1.460.414,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	146,00	KK	2.000,00	292.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	200,00	Meter	1.500,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	635,48	Meter	1.000,00	635.475,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	58,00	KK	5.000,00	290.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	152,00	KK	500,00	76.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	130,00	Unit	1.000,00	130.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					7.608.889,00						

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
13	Blang Baro Kecamatan Bandar Baru				29,51 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	161,00	Unit	25.000,00	4.025.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	70,00	Unit	50.000,00	3.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	2.944,29	Meter	1.000,00	2.944.289,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	13,00	KK	2.000,00	26.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2.736,98	Meter	1.000,00	2.736.982,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	65,00	KK	5.000,00	325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	383,00	KK	500,00	191.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	KK	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	324,00	Unit	1.000,00	324.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.577.482,00						
1	Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua				23,66 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	104,00	Unit	25.000,00	2.600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	28,00	Unit	50.000,00	1.400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	2.000,00	Meter	2.000,00	4.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	2.990,00	Meter	1.000,00	2.990.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	146,00	KK	2.000,00	292.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	2.010,00	Meter	1.500,00	3.015.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.250,00	Meter	1.000,00	1.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	14,00	KK	5.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	260,00	KK	500,00	130.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	241,00	Unit	1.000,00	241.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					17.988.000,00						
2	Alue Keutapang Kecamatan Bandar Dua				19,08 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	138,00	Unit	25.000,00	3.450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	21,00	Unit	50.000,00	1.050.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	2.730,00	Meter	2.000,00	5.460.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Jalan Lingkungan	1.811,00	Meter	1.000,00	1.811.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	91,00	KK	2.000,00	182.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	1.441,00	Meter	1.500,00	2.161.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	461,00	Meter	1.000,00	461.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	75,00	KK	5.000,00	375.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	191,00	KK	500,00	95.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	141,00	Unit	1.000,00	141.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					16.687.000,00						
3	Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua				9,54 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	47,00	Unit	25.000,00	1.175.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	36,00	Unit	50.000,00	1.800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	265,55	Meter	1.000,00	265.545,64						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	55,00	KK	2.000,00	110.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	265,55	Meter	1.000,00	265.545,64						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	33,00	KK	5.000,00	165.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	103,00	KK	500,00	51.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	90,00	Unit	1.000,00	90.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					5.122.591,28						
4	Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua				23,34 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	84,00	Unit	25.000,00	2.100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	61,00	Unit	50.000,00	3.050.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.687,41	Meter	1.000,00	1.687.410,62						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	50,00	KK	2.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	964,07	Meter	1.000,00	964.071,69						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	130,00	KK	5.000,00	650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	294,00	KK	500,00	147.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	251,00	Unit	1.000,00	251.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					11.349.482,30						
5	Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua				34,41 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	21,00	Unit	25.000,00	525.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	12,00	Unit	50.000,00	600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	261,83	Meter	1.000,00	261.829,24						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	66,00	KK	2.000,00	132.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	261,83	Meter	1.000,00	261.829,24						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	1,00	KK	5.000,00	5.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	292,00	KK	500,00	146.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	220,00	Unit	1.000,00	220.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	Total					4.051.658,48						
6	Muko Kuthang Kecamatan Bandar Dua				17,56 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	76,00	Unit	25.000,00	1.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	89,00	Unit	50.000,00	4.450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	350,50	Meter	1.000,00	350.503,58						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	91,00	KK	2.000,00	182.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	350,50	Meter	1.000,00	350.503,58						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	49,00	KK	5.000,00	245.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	187,00	KK	500,00	93.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	160,00	Unit	1.000,00	160.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.031.507,16						
7	Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua				11,44 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	84,00	Unit	25.000,00	2.100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,00	Unit	50.000,00	50.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	530,02	Meter	1.000,00	530.024,25						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	23,00	KK	2.000,00	46.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	530,02	Meter	1.000,00	530.024,25						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	38,00	KK	5.000,00	190.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	111,00	KK	500,00	55.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	84,00	Unit	1.000,00	84.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.785.548,50						
8	Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua				31,38 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	139,00	Unit	25.000,00	3.475.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,00	Unit	50.000,00	50.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	710,79	Meter	1.000,00	710.794,59						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	84,00	KK	2.000,00	168.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan Bak Penampung Air	3,00	Unit	500.000,00	1.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	193,28	Meter	1.000,00	193.276,85						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	95,00	KK	5.000,00	475.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	KK	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	246,00	Unit	500,00	123.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	208,00	Unit	1.000,00	208.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.403.071,44						
9	Alue Sane Kecamatan Bandar Dua				21,52 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	161,00	Unit	25.000,00	4.025.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	16,00	Unit	50.000,00	800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	195,00	KK	2.000,00	390.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	3,00	Unit	500.000,00	1.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	79,00	KK	5.000,00	395.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	195,00	KK	500,00	97.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	168,00	Unit	1.000,00	168.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.275.500,00						
10	Pulo Kecamatan Bandar Baru				20,99 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	51,00	Unit	25.000,00	1.275.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	13,00	Unit	50.000,00	650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	514,66	Meter	1.000,00	514.656,03						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	22,00	KK	2.000,00	44.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	514,66	Meter	1.000,00	514.656,03						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	14,00	KK	5.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	250,00	KK	500,00	125.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	KK	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	186,00	Unit	1.000,00	186.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.779.312,07						
11	Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua				41,24 ha							

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	11,00	Unit	25.000,00	275.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	54,00	Unit	50.000,00	2.700.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.745,97	Meter	1.000,00	1.745.969,46						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	150,00	KK	2.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.745,97	Meter	1.000,00	1.745.969,46						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	137,00	KK	5.000,00	685.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	406,00	KK	500,00	203.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	8,00	Unit	100.000,00	800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	338,00	Unit	1.000,00	338.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					10.292.938,93						
1	Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya				6,14 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	53,00	Unit	25.000,00	1.325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	9,00	Unit	50.000,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	1040,00	Meter	2.000,00	2.080.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Jalan Lingkungan	153,00	Meter	1.000,00	153.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	5,00	KK	2.000,00	10.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	96,00	KK	500,00	48.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	1,00	Unit	100.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	33,00	Unit	1.000,00	33.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
						4699000						
2	Kiran Baroh Kecamatan Jangka Buya				14,12 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	105,00	Unit	25.000,00	2.625.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	20,00	Unit	50.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	628,04	Meter	1.000,00	628.036,34						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	31,00	KK	2.000,00	62.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	782,54	Meter	1.000,00	782.537,31						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	86,00	KK	5.000,00	430.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	179,00	KK	500,00	89.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	145,00	Unit	1.000,00	145.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
						7.562.073,65						
3	Kuta Baroh Kecamatan Jangka Buya				9,74 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	6,00	Unit	25.000,00	150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	51,63	Meter	2.000,00	103.260,92						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	1.176,03	Meter	1.000,00	1.176.033,73						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	87,00	KK	2.000,00	174.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	767,30	Meter	1.000,00	767.300,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	24,00	KK	5.000,00	120.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	127,00	KK	500,00	63.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	91,00	Unit	1.000,00	91.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
						3.345.094,65						
4	Beureumbang Kecamatan Jangka Buya				5,97 ha							

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	102,00	Unit	25.000,00	2.550.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	12,00	Unit	50.000,00	600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	688,98	Meter	1.000,00	688.984,29						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	35,00	KK	2.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	955,20	Meter	1.000,00	955.198,57						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	1,00	KK	5.000,00	5.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	140,00	KK	500,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	53,00	Unit	1.000,00	53.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
						6.192.182,86						
5	Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya				13,42 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	182,00	Unit	25.000,00	4.550.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	14,00	Unit	50.000,00	700.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.868,18	Meter	1.000,00	1.868.183,05						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	148,00	KK	2.000,00	296.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.104,87	Meter	1.000,00	1.104.871,59						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	8,00	KK	5.000,00	40.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	301,00	KK	500,00	150.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	223,00	Unit	1.000,00	223.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
						10.332.554,64						
1	Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua				20,88 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	143,00	Unit	25.000,00	3.575.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	12,00	Unit	50.000,00	600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	766,10	Meter	1.000,00	766.103,85						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	135,00	KK	2.000,00	270.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	839,38	Meter	1.500,00	1.259.067,68						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.144,75	Meter	1.000,00	1.144.750,56						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	3,00	KK	5.000,00	15.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	312,00	KK	500,00	156.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	247,00	Unit	1.000,00	247.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.532.922,09						
2	Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua				20,59 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	59,00	Unit	25.000,00	1.475.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	65,00	Unit	50.000,00	3.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	880,00	Meter	2.000,00	1.760.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	4.490,00	Meter	1.000,00	4.490.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	90,00	KK	2.000,00	180.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	500,00	Meter	1.500,00	750.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.296,00	Meter	1.000,00	1.296.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	6,00	KK	5.000,00	30.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	274,00	KK	500,00	137.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	228,00	Unit	1.000,00	228.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					15.096.000,00						
3	Meunasah Mancang Kecamatan Meurah Dua				6,97 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	76,00	Unit	25.000,00	1.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	13,00	Unit	50.000,00	650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	94,35	Meter	2.000,00	188.703,69						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	414,07	Meter	1.000,00	414.069,31						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	302,29	Meter	1.500,00	453.439,53						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	3,00	KK	5.000,00	15.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	129,00	KK	500,00	64.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	102,00	Unit	1.000,00	102.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.487.712,53						
4	Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua				13,42 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	140,00	Unit	25.000,00	3.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	27,00	Unit	50.000,00	1.350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	39,89	Meter	2.000,00	79.775,25						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	1.384,85	Meter	1.000,00	1.384.847,22						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	13,00	KK	2.000,00	26.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	540,08	Meter	1.500,00	810.126,73						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.119,67	Meter	1.000,00	1.119.665,05						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	22,00	KK	5.000,00	110.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	214,00	KK	500,00	107.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	176,00	Unit	1.000,00	176.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					10.063.414,25						
5	Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua				4,86 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	85,00	Unit	25.000,00	2.125.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	4,00	Unit	50.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	520,06	Meter	1.000,00	520.064,30						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	3,00	KK	2.000,00	6.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	323,54	Meter	1.000,00	323.542,75						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	30,00	KK	5.000,00	150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	192,00	KK	500,00	96.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	165,00	Unit	1.000,00	165.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.985.607,05						
6	Pante Beureune Kecamatan Meurah Dua				4,63 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	81,00	Unit	25.000,00	2.025.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	2,00	Unit	50.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	962,20	Meter	1.000,00	962.199,97						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	47,00	KK	2.000,00	94.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	293,70	Meter	1.500,00	440.547,21						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	30,57	Meter	1.000,00	30.573,31						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	121,00	KK	500,00	60.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	91,00	Unit	1.000,00	91.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					4.503.820,49						
7	Bueringen Kecamatan Meurah Dua				13,62 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	203,00	Unit	25.000,00	5.075.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	56,00	Unit	50.000,00	2.800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	397,21	Meter	2.000,00	794.416,21						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	1.717,96	Meter	1.000,00	1.717.964,75						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	222,00	KK	2.000,00	444.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	297,34	Meter	1.500,00	446.008,28						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2.065,70	Meter	1.000,00	2.065.695,67						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	28,00	KK	5.000,00	140.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	245,00	KK	500,00	122.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	204,00	Unit	1.000,00	204.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					15.709.584,91						
1	Keude Meureudu Kecamatan Meureudu				11,58 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	61,00	Unit	25.000,00	1.525.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	13,00	Unit	50.000,00	650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	800,00	Meter	2.000,00	1.600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	930,00	Meter	1.000,00	930.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Jalan Inspeksi Pinggir Sungai	650,00	Meter	2.000,00	1.300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	10,00	KK	2.000,00	20.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	600,00	Meter	1.500,00	900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.050,00	Meter	1.000,00	1.050.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	9,00	KK	5.000,00	45.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	53,00	KK	500,00	26.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	128,00	Unit	1.000,00	128.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	8. RTH/RTP	Penataan Kawasan Pinggir Sungai	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan RTP	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	Total					19.374.500,00						
2	Meuraksa Kecamatan Meureudu				27,34 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	293,00	Unit	25.000,00	7.325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	45,00	Unit	50.000,00	2.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.701,99	Meter	1.000,00	1.701.991,30						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	4,00	KK	2.000,00	8.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	4,00	Unit	500.000,00	2.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2.086,93	Meter	1.000,00	2.086.928,46						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	478,00	KK	500,00	239.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	383,00	Unit	1.000,00	383.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					16.393.919,75						
3	Meunasah Balek Kecamatan Meureudu				16,92 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	289,00	Unit	25.000,00	7.225.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	68,00	Unit	50.000,00	3.400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	2.103,26	Meter	1.000,00	2.103.264,33						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan Jalan Inspeksi Pinggir Sungai	650,00	Meter	2.000,00	1.300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	13,00	KK	2.000,00	26.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	460,00	Meter	1.500,00	690.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.958,56	Meter	1.000,00	1.958.557,95						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Perbaikan Tanggul Pinggir Sungai	650,00	Meter	5.000,00	3.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	18,00	KK	5.000,00	90.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	445,00	KK	500,00	222.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	359,00	Unit	1.000,00	359.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	8. RTH/RTP	Penataan Kawasan Pinggir Sungai	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan RTP	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					32.624.322,28						
4	Pohroh Kecamatan Meureudu				6,24 ha							

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	8,00	Unit	50.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	923,92	Meter	1.000,00	923.924,17						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	68,00	KK	2.000,00	136.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	542,37	Meter	1.500,00	813.556,26						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2,43	Meter	1.000,00	2.428,71						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	14,00	KK	5.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	121,00	KK	500,00	60.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	86,00	Unit	1.000,00	86.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					3.692.409,14						
5	Rungkom Kecamatan Meureudu				6,16 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	9,00	Unit	25.000,00	225.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	37,00	Unit	50.000,00	1.850.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.375,14	Meter	1.000,00	1.375.142,96						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	104,00	KK	2.000,00	208.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	1.473,07	Meter	1.500,00	2.209.603,21						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	19,00	KK	5.000,00	95.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	106,00	KK	500,00	53.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	101,00	Unit	1.000,00	101.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					7.316.746,17						
6	Manyang Cut Kecamatan Meureudu				28,90 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	280,00	Unit	25.000,00	7.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	66,00	Unit	50.000,00	3.300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	1.180,00	Meter	2.000,00	2.360.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	1.889,00	Meter	1.000,00	1.889.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	159,00	KK	2.000,00	318.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	601,00	Meter	1.500,00	901.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.048,00	Meter	1.000,00	1.048.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	46,00	KK	5.000,00	230.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	299,00	KK	500,00	149.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	KK	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	117,00	Unit	1.000,00	117.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					18.813.000,00						
7	Mns Kulam Beuracan Kecamatan Meureudu				7,14 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	62,00	Unit	25.000,00	1.550.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	84,00	Unit	50.000,00	4.200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	631,60	Meter	1.000,00	631.602,15						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	146,00	KK	2.000,00	292.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	KK	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	734,09	Meter	1.500,00	1.101.139,87						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	37,00	KK	5.000,00	185.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	148,00	KK	500,00	74.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	KK	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	131,00	Unit	1.000,00	131.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.864.742,02						
8	Mns Muling Beuracan Kecamatan Meureudu				6,48 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	74,00	Unit	25.000,00	1.850.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	84,00	Unit	50.000,00	4.200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	639,91	Meter	1.000,00	639.906,72						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	65,00	KK	2.000,00	130.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	419,70	Meter	1.000,00	419.701,21						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	28,00	KK	5.000,00	140.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	136,00	KK	500,00	68.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	113,00	Unit	1.000,00	113.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.760.607,93						
9	Mns Lhok/Mns Gantung Kecamatan Meureudu				27,34 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	293,00	Unit	25.000,00	7.325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	45,00	Unit	50.000,00	2.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.701,99	Meter	1.000,00	1.701.991,30						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	4,00	KK	2.000,00	8.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	4,00	Unit	500.000,00	2.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2.086,93	Meter	1.000,00	2.086.928,46						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	478,00	KK	500,00	239.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	383,00	Unit	1.000,00	383.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					16.393.919,75						
10	Mesjid Tuha/Dayah U Paneuk				65,19 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	263,00	Unit	25.000,00	6.575.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	11,00	Unit	50.000,00	550.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	1.840,00	Meter	2.000,00	3.680.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	3.475,00	Meter	1.000,00	3.475.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Jalan Inspeksi Pinggir Sungai	1.850,00	Meter	2.000,00	3.700.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	226,00	KK	2.000,00	452.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	300,00	Meter	1.500,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.483,00	Meter	1.000,00	1.483.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Tanggul Pinggir Sungai	1.250,00	Meter	5.000,00	6.250.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	54,00	KK	500,00	27.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	379,00	Unit	1.000,00	379.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	8. RTH/RTP	Penataan Kawasan Pinggir Sungai	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan RTP	1,00	LS	5.000.000,00	5.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					27.421.000,00						
11	Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu				13,09 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	150,00	Unit	25.000,00	3.750.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	10,00	Unit	50.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.140,07	Meter	1.000,00	1.140.071,04						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	100,00	KK	2.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	1.727,78	Meter	1.500,00	2.591.668,95						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	118,50	Meter	1.000,00	118.501,32						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	64,00	KK	5.000,00	320.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	256,00	KK	500,00	128.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	Unit	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	201,00	Unit	1.000,00	201.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					10.949.241,30						
12	Rhieng Krueng Kecamatan Meureudu				8,14 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	121,00	Unit	25.000,00	3.025.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	2,00	Unit	50.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.170,19	Meter	1.000,00	1.170.194,48						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	61,00	KK	2.000,00	122.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	801,90	Meter	1.000,00	801.896,40						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	4,00	KK	5.000,00	20.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	182,00	KK	500,00	91.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	150,00	Unit	1.000,00	150.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					6.780.090,88						
13	Rhieng Mancang Kecamatan Meureudu				5,36 ha							

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	66,00	Unit	25.000,00	1.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	18,00	Unit	50.000,00	900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	388,56	Meter	1.000,00	388.563,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	6,00	KK	2.000,00	12.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	712,26	Meter	1.500,00	1.068.390,06						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	209,68	Meter	1.000,00	209.679,96						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	9,00	KK	5.000,00	45.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	136,00	KK	500,00	68.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	KK	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	119,00	Unit	1.000,00	119.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					5.660.633,03						
1	Keude Panteraja Kecamatan Panteraja				14,90 ha							
	1. 1Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	197,00	Unit	25.000,00	4.925.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.171,73	Meter	1.000,00	1.171.730,32						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	76,00	KK	2.000,00	152.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	565,85	Meter	1.000,00	565.853,27						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	14,00	KK	5.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	376,00	KK	500,00	188.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	5,00	KK	100.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	353,00	Unit	1.000,00	353.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	8. RTH/RTP	Penataan Pinggir Sungai dan Pinggir Pantai	1,00	LS	7.000.000,00	7.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Sentra Ikan Asin	1,00	LS	3.000.000,00	3.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					18.425.583,59						
2	Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja				7,61 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	87,00	Unit	25.000,00	2.175.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	58,00	Unit	50.000,00	2.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.209,60	Meter	1.000,00	1.209.596,92						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	4,00	KK	2.000,00	8.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	695,17	Meter	1.000,00	695.170,01						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	99,00	KK	5.000,00	495.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	KK	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	191,00	KK	500,00	95.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	KK	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	136,00	Unit	1.000,00	136.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.914.266,93						
1	Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng				9,77 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	106,00	Unit	25.000,00	2.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	24,00	Unit	50.000,00	1.200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	828,50	Meter	1.000,00	828.501,85						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	36,00	KK	2.000,00	72.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.171,00	Meter	1.000,00	1.171.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	3,00	KK	5.000,00	15.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	247,00	KK	500,00	123.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	2,00	Unit	100.000,00	200.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	246,00	Unit	1.000,00	246.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					7.506.001,85						
2	Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng				14,51 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	55,00	Unit	25.000,00	1.375.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	9,00	Unit	50.000,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	250,00	Meter	2.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	3.545,00	Meter	1.000,00	3.545.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	37,00	KK	2.000,00	74.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	750,00	Meter	1.000,00	750.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	5,00	KK	5.000,00	25.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	227,00	KK	500,00	113.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	172,00	Unit	1.000,00	172.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.404.500,00						
3	Sagoe Kecamatan Trienggadeng				20,00 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	53,00	Unit	25.000,00	1.325.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	26,00	Unit	50.000,00	1.300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	175,66	Meter	1.000,00	175.660,35						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	164,00	KK	2.000,00	328.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	344,00	Meter	1.500,00	516.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	585,00	Meter	1.000,00	585.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	56,00	KK	5.000,00	280.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	255,00	KK	500,00	127.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	197,00	Unit	1.000,00	197.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					6.234.160,35						
4	Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng											6,49
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	72,00	Unit	25.000,00	1.800.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,00	Unit	50.000,00	50.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	644,00	Meter	2.000,00	1.288.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	1.173,00	Meter	1.000,00	1.173.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	55,00	KK	2.000,00	110.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	250,00	Meter	1.500,00	375.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.327,00	Meter	1.000,00	1.327.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	168,00	KK	500,00	84.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	142,00	Unit	1.000,00	142.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					7.649.000,00						
5	Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng				7,59 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	61,00	Unit	25.000,00	1.525.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	14,00	Unit	50.000,00	700.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	250,00	Meter	2.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	3.545,00	Meter	1.000,00	3.545.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	105,00	KK	2.000,00	210.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	300,00	Meter	1.500,00	450.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	750,00	Meter	1.000,00	750.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	5,00	KK	5.000,00	25.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	179,00	KK	500,00	89.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	1,00	Unit	100.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	181,00	Unit	1.000,00	181.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.075.500,00						
6	Rawa Sari Kecamatan Trienggadeng				7,61 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	67,00	Unit	25.000,00	1.675.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	86,00	Unit	50.000,00	4.300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.169,45	Meter	1.000,00	1.169.449,97						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	152,00	KK	2.000,00	304.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	931,81	Meter	1.500,00	1.397.711,19						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	645,00	Meter	1.000,00	645.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	102,00	KK	5.000,00	510.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	295,00	KK	500,00	147.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	241,00	Unit	1.000,00	241.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					12.289.661,16						
7	Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng				27,04 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	143,00	Unit	25.000,00	3.575.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	107,00	Unit	50.000,00	5.350.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	2.382,59	Meter	1.000,00	2.382.586,17						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	64,00	KK	2.000,00	128.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	2,00	Unit	500.000,00	1.000.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	683,11	Meter	1.500,00	1.024.658,63						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	1.118,00	Meter	1.000,00	1.118.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	46,00	KK	5.000,00	230.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	342,00	KK	500,00	171.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	6,00	Unit	100.000,00	600.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	284,00	Unit	1.000,00	284.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					16.363.244,80						

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
8	Cot Lheu Rheng Kecamatan Trienggadeng				6,13 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	87,00	Unit	25.000,00	2.175.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	58,00	Unit	50.000,00	2.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	1.209,60	Meter	1.000,00	1.209.596,92						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	4,00	KK	2.000,00	8.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	695,17	Meter	1.000,00	695.170,01						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	99,00	KK	5.000,00	495.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	191,00	KK	500,00	95.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	136,00	Unit	1.000,00	136.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					9.014.266,93						
1	Keude Ulim Kecamatan Ulim				12,75 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	3,00	Unit	25.000,00	75.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,00	Unit	50.000,00	50.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	590,00	Meter	2.000,00	1.180.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jalan Lingkungan	260,00	Meter	1.000,00	260.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	11,00	KK	2.000,00	22.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	650,00	Meter	1.500,00	975.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	280,00	Meter	1.000,00	280.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	54,00	KK	500,00	27.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	1,00	Unit	100.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	19,00	Unit	1.000,00	19.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					12.502.266,93						
2	Tanjong Ulim/Keude Parek Kecamatan Ulim				8,03 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	106,00	Unit	25.000,00	2.650.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	11,00	Unit	50.000,00	550.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	180,00	Meter	1.000,00	180.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	11,00	KK	2.000,00	22.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Lingkungan	187,00	Meter	1.500,00	280.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	358,32	Meter	1.000,00	358.323,73						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	7,00	KK	5.000,00	35.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	179,00	KK	500,00	89.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	143,00	Unit	1.000,00	143.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					5.608.323,73						
3	Masjid Ulim Baroh Kecamatan Ulim				9,79 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	140,00	Unit	25.000,00	3.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	38,00	Unit	50.000,00	1.900.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	881,00	Meter	1.000,00	881.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	20,00	KK	2.000,00	40.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	501,18	Meter	1.000,00	501.184,20						APBN, APBD Prov, APBD Kab.

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	18,00	KK	5.000,00	90.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	212,00	KK	500,00	106.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	4,00	Unit	100.000,00	400.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	173,00	Unit	1.000,00	173.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.591.184,20						
4	Naggroe Barat Kecamatan Ulim				38,35 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	140,00	Unit	25.000,00	3.500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,00	Unit	50.000,00	50.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	2.193,53	Meter	1.000,00	2.193.533,63						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	71,00	KK	2.000,00	142.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	2.193,53	Meter	1.000,00	2.193.533,63						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampah an	Pengadaan Tempat Sampah 3R	189,00	KK	500,00	94.500,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	3,00	Unit	100.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	149,00	Unit	1.000,00	149.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					8.622.567,25						

NO	ASPEK	PROGRAM			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN
		KEGIATAN	VOL	SAT	X1000	X1000	2024	2025	2026	2027	2028	
5	Reuleut Kecamatan Ulim				8,15 ha							
	1. Kondisi Bangunan Gedung	Penataan Bangunan	15,00	Unit	25.000,00	375.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	6,00	Unit	50.000,00	300.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	2. Kondisi Jalan Lingkungan	Rehab Jalan Lingkungan	622,51	Meter	1.000,00	622.508,04						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan Jaringan SR	55,00	KK	2.000,00	110.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan Bak Penampung Air	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	4. Kondisi Drainase Lingkungan	Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	682,00	Meter	1.000,00	682.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan MCK	31,00	KK	5.000,00	155.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pembangunan IPAL Komunal	1,00	Unit	500.000,00	500.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah 3R	84,00	KK	500,00	42.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	1,00	Unit	100.000,00	100.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	70,00	Unit	1.000,00	70.000,00						APBN, APBD Prov, APBD Kab.
	Total					3.456.508,04						

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

7.3 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Memorandum Program Pembangunan infrastruktur perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya di dasarkan atas rencana aksi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan di daerah. Memorandum program berisikan sumber pendanaan dan pelaksanaan program jangka waktu perencanaan selama 5 tahun. Memorandum program pembangunan infrastruktur perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat di Tabel 7.4;

Tabel 7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pidie Jaya

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
Penataan Bangunan	Kec. Bandar Baru	2.442,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Bandar Dua	916,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Jangka Buya	448,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Meurah Dua	787,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Meureudu	1.961,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Panteraja	284,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Trienggadeng	719,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Ulim	404,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Kec. Bandar Baru	1.123,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Bandar Dua	399,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Jangka Buya	55,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Meurah Dua	179,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Meureudu	425,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Panteraja	58,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Trienggadeng	286,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
	Kec. Ulim	286,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BP2P, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB.
2. Kondisi Jalan Lingkungan										
Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	Kec. Bandar Baru	2.410,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
	Kec. Bandar Dua	4.730,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Jangka Buya	1.091,63	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meurah Dua	1.411,45	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meureudu	3.820,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Trienggadeng	1.144,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Ulim	590,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
Rehab Jalan Lingkungan	Kec. Bandar Baru	18.764,18	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Bandar Dua	10.867,73	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Jangka Buya	4.514,24	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meurah Dua	10.255,25	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meureudu	18.070,65	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Panteraja	2.381,33	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Trienggadeng	13.085,61	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Ulim	4.137,04	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum										
Peningkatan Jaringan SR	Kec. Bandar Baru	2.391,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
	Kec. Bandar Dua	973,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Jangka Buya	306,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Meurah Dua	510,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Meureudu	966,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Panteraja	80,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Trienggadeng	621,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
	Kec. Ulim	168,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
Pembangunan Bak Penampung Air	Pidie Jaya	87,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, PDAM
4. Kondisi Drainase Lingkungan										
Pembangunan Drainase Lingkungan	Kec. Bandar Baru	5.429,11	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Bandar Dua	3.451,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meurah Dua	2.772,79	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meureudu	7.150,57	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Trienggadeng	2.508,91	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Ulim	837,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
Rehab Jaringan Drainase Lingkungan	Kec. Bandar Baru	20.223,50	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
	Kec. Bandar Dua	6.536,88	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Jangka Buya	3.609,91	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meurah Dua	5.980,23	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Meureudu	11.265,62	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Panteraja	1.261,02	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Trienggadeng	6.841,00	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
	Kec. Ulim	4.015,04	Meter						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, BPJN, PERKIM PROV, PU PROV, DPUKAB.
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah										
Pembangunan MCK	Kec. Bandar Baru	1.285,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Bandar Dua	665,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Jangka Buya	119,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Meurah Dua	92,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Meureudu	235,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Panteraja	113,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Trienggadeng	223,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
	Kec. Ulim	56,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
Pembangunan IPAL Komunal	Pidie Jaya	64,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB, DINKES
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan										
Pengadaan Tempat Sampah 3R	Kec. Bandar Baru	4.580,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Bandar Dua	2.535,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Jangka Buya	843,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Meurah Dua	1.487,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Meureudu	2.892,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Panteraja	567,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Trienggadeng	1.918,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
	Kec. Ulim	718,00	KK						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
Pengadaan Alat Pengangkut Sampah	Pidie Jaya	224,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, DLHK KAB
7. Kondisi Proteksi Kebakaran										
Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Kec. Bandar Baru	3.847,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Bandar Dua	1.973,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Jangka Buya	624,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Meurah Dua	1.213,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Meureudu	2.650,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD

PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOL	SAT	Indikasi Biaya dan Tahun Implementasi (Rp)					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2024	2024	2024	2024	2024		
1. Kondisi Bangunan Gedung										
	Kec. Panteraja	489,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Trienggadeng	1.624,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD
	Kec. Ulim	554,00	Unit						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	BPPW, PERKIM PROV, PU PROV, DPU KAB, BPBD

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

7.4 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Berdasarkan hasil analisa pembobotan sebagian besar kawasan kumuh masuk dalam kategori 3 yaitu kumuh ringan dan tanah legal. Dalam penentuan kawasan prioritas berdasarkan hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya terdapat 2 Kawasan kumuh prioritas. Kawasan kumuh prioritas dapat dilihat pada Tabel 7.5;

Tabel 7.5 Kawasan Kumuh Prioritas

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Klasifikasi	Luas Delineasi Kumuh	Skala Prioritas Kawasan
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Keude Lueng Putu	42	B2	31,50	
2	Sarah Panyang	27	C1	8,20	
3	Kayee Jatoe	39	B2	24,00	
4	Pulo Pueb	26	C1	16,07	
5	Cut Njong	27	C1	10,34	
6	Manyang Lancok	43	B1	6,32	
7	Paru Keude	25	C1	55,35	
8	Paru Cot	36	C1	18,89	
9	Baroh Lancok	35	C1	19,35	
10	Pulo Rheng	30	C1	28,00	
11	Abah Lueng	45	B1	12,92	
12	Jiem Jiem	36	C1	15,15	
13	Blang Baro	28	C1	29,51	
14	Keude Ulee Gle	27	C2	23,66	
15	Alue Keutapang	21	C2	19,08	
16	Asan Kumbang	29	C1	9,54	
17	Paya Pisang Klat	24	C1	23,34	
18	Blang Dalam	20	C1	34,41	
19	Muko Kuthang	27	C1	17,56	
20	Kuta Krueng	30	C1	11,44	
21	Blang Kuta	29	C1	31,38	
22	Alue Sane	37	C1	21,52	
23	Pulo	23	C1	20,99	
24	Meurandeh Alue	25	C1	41,24	
25	Keude Jangka Buya	18	C2	6,14	
26	Kiran Baroh	34	C1	14,12	
27	Kuta Baroh	27	C1	9,74	
28	Beureumbang	33	C1	5,97	
29	Jurong Binje	29	C1	13,42	
30	Keude Ulim	18	C2	12,75	
31	Tanjong Ulim/Keude Parek	19	C1	8,03	
32	Mesjid Ulim Baroh	22	C1	9,79	
33	Nanggroe Barat	27	C1	38,35	
34	Reuleut	25	C1	8,15	
35	Meunasah Bie	22	C1	20,88	

No	Kampung	Jumlah Nilai Penilaian Kriteria dan Indikator Kekumuhan	Klasifikasi	Luas Delineasi Kumuh	Skala Prioritas Kawasan
36	Meunasah Raya	25	C1	20,59	
37	Meunasah Mancang	20	C1	6,97	
38	Meunasah Jurong/Teupin Pukat	27	C1	13,42	
39	Lueng Bimba	27	C1	4,86	
40	Pante Beureune	26	C1	4,63	
41	Beuringen	39	B1	13,62	
42	Keude Meureudeu	20	C1	11,58	1
43	Meuraksa	30	C1	27,34	
44	Meunasah Balek	30	C1	16,92	1
45	Pohroh	28	C1	6,24	
46	Rungkom	36	C1	6,16	
47	Manyang Cut	17	C1	28,90	
48	Mns Kulam Beuracan	37	C1	7,14	
49	Mns Mulieng Beuracan	34	C1	6,48	
50	Mns Lhok/Mns Gantung	26	C1	15,45	
51	Masjid Tuha/Dayah U Paneuk	25	C1	65,19	1
52	Teupin Peuraho	33	C1	13,09	
53	Rhieng Krueng	31	C1	8,14	
54	Rhieng Mancang	28	C1	5,36	
55	Gampong Meue	22	C1	9,77	
56	Masjid Trienggadeng	22	C1	14,51	
57	Sagoe	20	C1	20,00	
58	Keude Trienggadeng	28	C1	6,49	
59	Kuta Pangwa	25	C2	7,59	
60	Rawa Sari	27	C1	14,97	
61	Deah Pangwa	24	C1	27,04	
62	Cot Lheu Rheng	29	C1	6,13	
63	Keude Panteraja	25	C1	14,90	2
64	Gampong Teungoh	37	C1	7,61	
TOTAL				**1088,20**	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

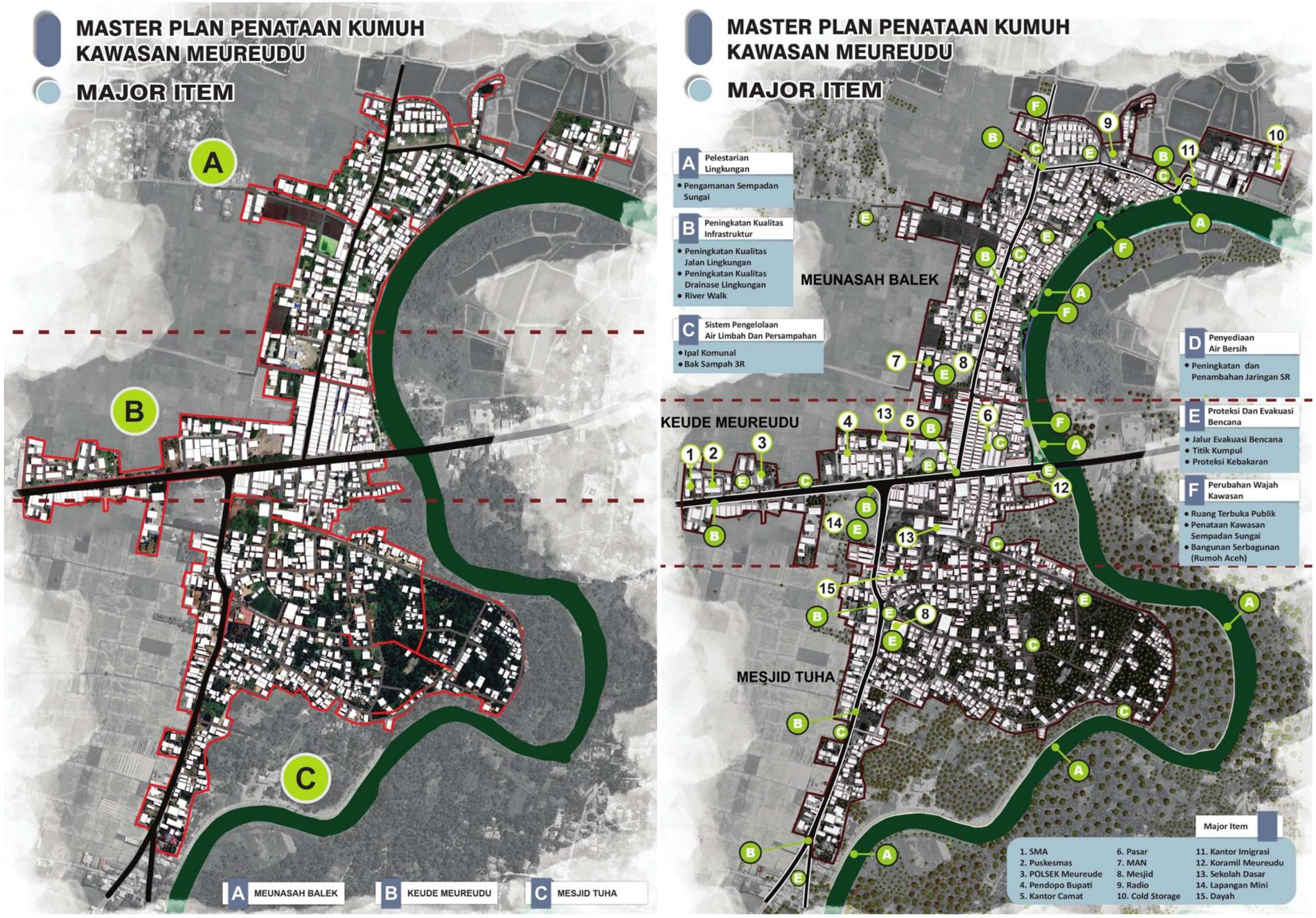
7.5 Konsep Desain Kawasan Prioritas

Penataan kawasan permukiman Kawasan Keude Meureudu dan Kawasan Panteraja berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur permukiman yang juga dapat bernilai lebih terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Konsep yang diterapkan pada perencanaan ini adalah Kampung Improvement Program (KIP) dan Green City. Konsep Perbaikan Kampung (PPK) atau Kampong Improvement Program (KIP) memiliki tujuan yang jelas yaitu memperhatikan penduduk kota dan desa yang memiliki tingkat pendapatan rendah, berhubungan dengan perbaikan lingkungan permukiman termasuk didalamya jalan, drainase, fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, dan perbaikan manajemen.

Sedangkan Kota hijau merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Pengembangan kota hijau berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Dari ke dua konsep ini rencana kegiatan pada kawasan prioritas sesuai dengan 7 indikator penanganan kumuh antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan rumah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
2. Peningkatan jalan lingkungan;
3. Pembangunan jalan baru;
4. Optimalisasi jaringan pipa distribusi air;
5. Penambahan SR;
6. Normalisasi dan pembangunan jaringan drainase;
7. Pembangunan tangki septic dan IPAL komunal;
8. Pengadaan tempat sampah;
9. Pengadaan motor sampah;
10. Pengadaan container;
11. TPS 3R;
12. Pembangunan Bak Penampung Air;
13. Prasarana dan sarana proteksi kebakaran;
14. Penataan kawasan pinggir sungai;
15. Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik.

7.5.1 Kawasan Meureudu



Gambar 7. 1 Masterplan Kawasan Meureudu
Sumber: Masterplan Kawasan Meureudu, 2023

A PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEMPADAN SUNGAI



- Ruang Penyangga Antara Ekosistem Sungai dan Daratan
- Berfungsi Agar Kegiatan Manusia dan Sungai Tidak Saling Terganggu





B PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE





A PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEATBELT PINGGIR SUNGAI

- Melindungi Sungai Dari Gerusan, Erosi dan Pencemaran
- Memiliki Nilai Properti Keindahan Lanskap Yang Tinggi





B PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

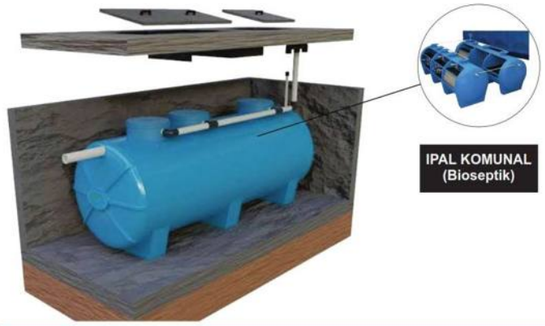
PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE

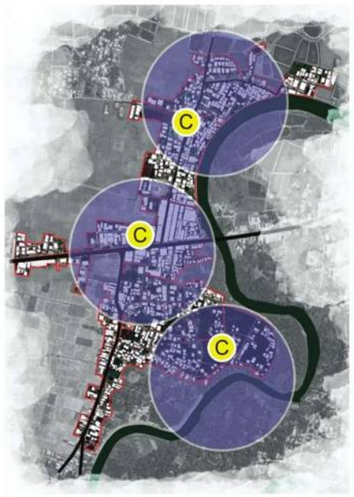




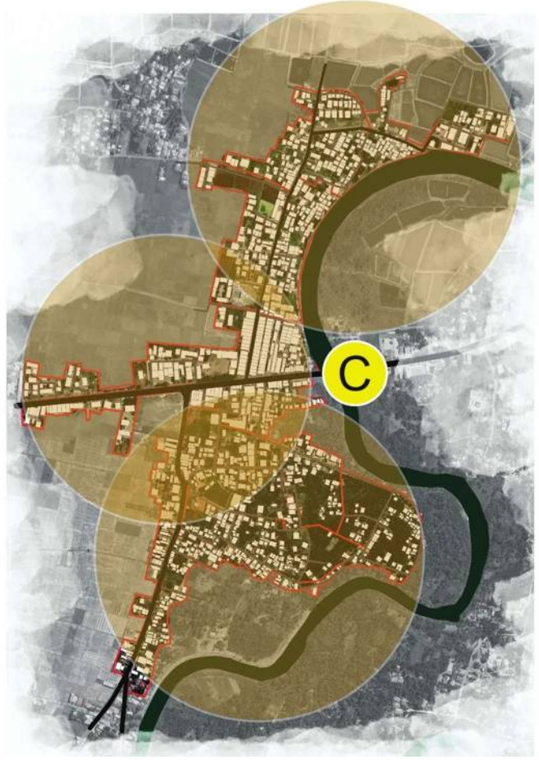
C PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

IPAL KOMUNAL TERINTEGRASI RTP





1. Pemanfaatan IPAL fabrikasi mengurangi resiko mal-konstruksi
2. Sistem distribusi menyesuaikan dengan blok rumah atau arah kontur
3. Potensi kerja sama: PUPR, DLHK, DINKES



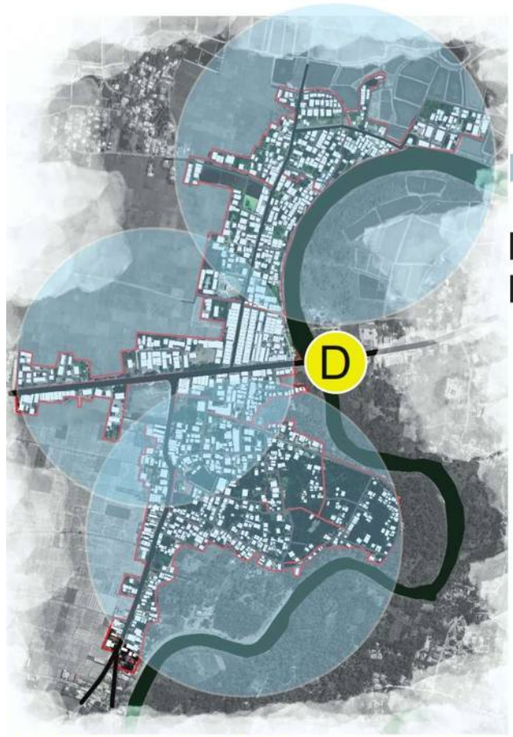
C PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

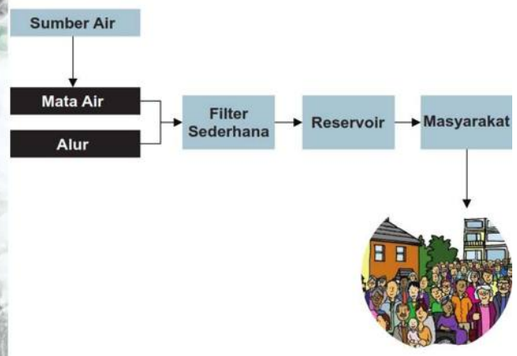
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



D PENYEDIAAN AIR BERSIH

PENINGKATAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN SR





LINGKUNGAN MEUREUDU



E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

JALUR EVAKUASI BENCANA





E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

PROTEKSI KEBAKARAN





E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

TITIK KUMPUL



Lapangan Terbuka



Tempat Ibadah



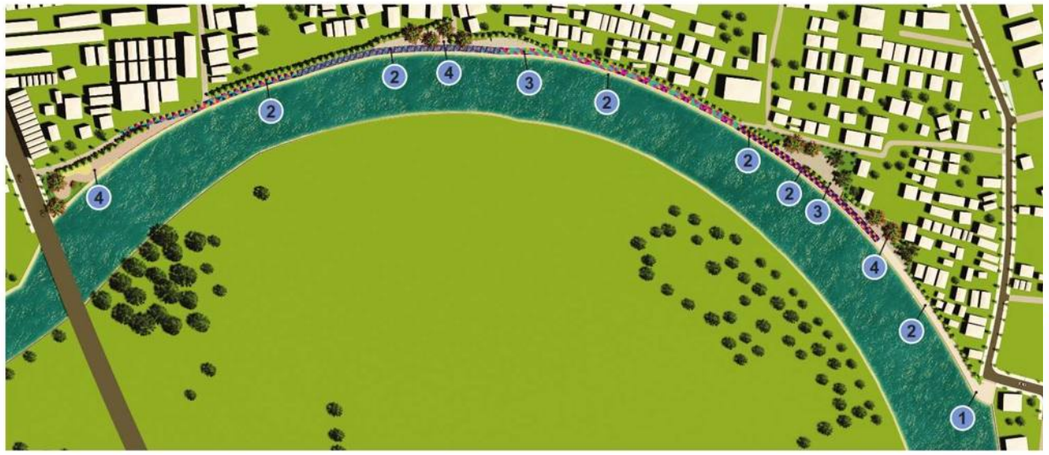
F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RUANG TERBUKA PUBLIK



F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI



1. Viewing Deck 2. River Walk 3. Parkir Roda Dua 4.Taman 5. Rumoh Aceh

F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

VIEWING DECK



F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RIVER WALK

















F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RIVER WALK










F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

BANGUNAN SERBAGUNA (RUMOH ACEH)







7.5.2 Kawasan Panteraja





Gambar 7. 2 Masterplan Desain Kawasan Panteraja
Sumber: Masterplan Kawasan Meureudu, 2023

2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

● PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE



Bangunan Hunian

Peningkatan Jalan

Peningkatan Kualitas Jalan

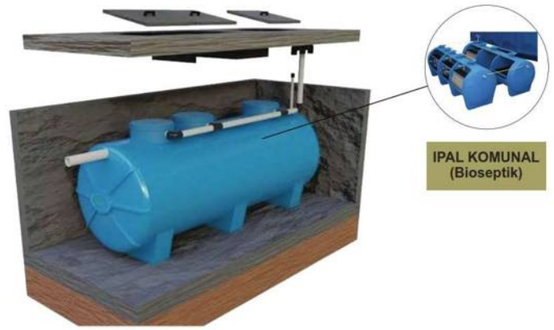


Peningkatan Kualitas Drainase

River Walk

3 PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

● IPAL KOMUNAL TERINTEGRASI RTP



IPAL KOMUNAL (Bioseptik)

1. Pemanfaatan IPAL fabrikasi mengurangi resiko mal-konstruksi
2. Sistem distribusi menyesuaikan dengan blok rumah atau arah kontur
3. Potensi kerja sama: PUPR, DLHK, DINKES



2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

● PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE



Rabat Beton



3 PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

● PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

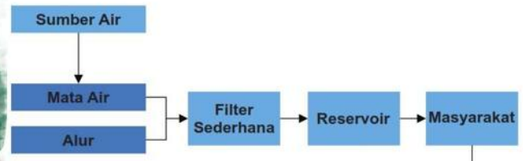




4 PENYEDIAAN AIR BERSIH

- PENINGKATAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN SR







LINGKUNGAN PANTE RAJA



5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- JALUR EVAKUASI BENCANA



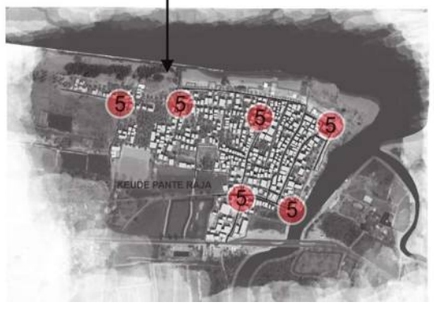




5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- PROTEKSI KEBAKARAN





5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- TITIK KUMPUL



Lapangan Terbuka



Tempat Ibadah



6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI



1. Parkiran 2. Food Court 3. Playground 4.Plaza
5. Balai Nelayan 6. TPI 7. Dermaga 8. Pantai 9. Penjemuran Ikan
10. Kamar Mandi 11. Parkir Nelayan

6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

1 PARKIRAN



6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

2 FOOD COURT





3 PLAYGROUND





4 PLAZA









6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

5 BALAI NELAYAN





6 TPI





6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

9 PENJEMURAN IKAN





10 KAMAR MANDI





7 DERMAGA





8 PANTAI





11 PARKIRAN NELAYAN



7.6 Rencana Aksi Masyarakat Community Action Plan (CAP)

Community Action Plan (CAP) telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan tindak komunitas juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dapat digunakan pada program penataan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman yang layak huni. Buku panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), menjelaskan bahwa rencana tindak komunitas atau community action plan (CAP) merupakan tindakan masyarakat secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka (Kementerian Perumahan Rakyat, 2011:10).

Elemen kunci dari pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh adalah workshop berbasis komunitas yang aktif dan intens, dilaksanakan selama dua hingga lima hari tergantung dengan tujuan workshop tersebut. Massachusetts Institute of Technology/MIT (2001), menjelaskan dalam pelaksanaan workshop CAP minimal membutuhkan persiapan, bahan dan pelatihan. Hal terpenting lainnya ialah komunitas harus termotivasi dan moderator/fasilitator memiliki kepercayaan diri, dapat memimpin dalam memastikan kepada peserta bahwa proses identifikasi masalah, penentuan lokasi dipilih, dan beberapa bahan berhasil dikumpulkan serta menghasilkan draft keputusan CAP yang dipublikasikan dengan baik.

Secara praktik di lapangan, pelaksanaan CAP terbagi atas tiga bagian tahapan besar berdasarkan UN Habitat (2006:4-31), antara lain:

1. Tahan Persiapan (Prepatory phase), menjelaskan apa yang harus dilakukan selama tahapan awal penataan kawasan kumuh yang terdiri dari sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial dan pengembangan kelembagaan;
2. Pemetaan Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Mapping), berisi kegiatan awal dalam merumuskan rencana aksi masyarakat dan terdiri dari mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya, memprioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya, memverifikasi penerima manfaat, memverifikasi dan mengukur tanah masyarakat, dan membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru;
3. Persetujuan CAP dan peta tata lokasi baru (Approval of CAP and New Layout Map), menjelaskan tahapan dalam mendapatkan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana aksi masyarakat yang terdiri dari persetujuan sosial dari CAP dan peta tata lokasi baru serta administrasi pengesahan CAP. Persetujuan sosial CAP dan peta tata lokasi baru, ini merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian CAP yaitu mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana tindak komunitas untuk penataan kawasan kumuh oleh seluruh tingkatan masyarakat. Draft peta kawasan kumuh yang baru, hasil dari workshop CAP dan draft CAP dipresentasikan serta dilakukan uji publik bersama seluruh peserta dan warga yang telah terverifikasi untuk menempati permukiman baru yang telah ditentukan. Ini dilakukan agar warga menjadi sadar atas rencana tindak komunitas dan peta tata lokasi permukiman baru sehingga mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi rencana tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Penyediaan Tanah merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Sedangkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Pidie Jaya akan dilaksanakan dengan pola Pemugaran dan Peremajaan.

8.1 Pola Penyediaan Tanah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara.
2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah.
3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemiliki tanah.
4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah.
5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

8.2 Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

8.2.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

8.2.2 Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
b. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

8.2.3 Rencana Penyediaan Tanah

Pengadaan atau penyediaan tanah dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) akan dilaksanakan/disediakan minimal 1 tahun sebelum program kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan.

Adapun penjabaran mengenai pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara.
   - Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman;
   - Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi;
   - Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan;
   - Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu pemberian hak atas tanah adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), dimana yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

2. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat;
   - Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:
     a. Antar pemegang hak atas tanah;
     b. Antar pemegang tanah negara; atau
     c. Antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuan;

- Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas;
- Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret atau rumah susun.

Manfaat konsolidasi tanah antara lain:

a. Memenuhi kebutuhan lingkungan yang teratur, tertib dan sehat;
b. Keuntungan estetika/keindahan *view* yang lebih baik kepada pemilik tanah;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan (membangun tanpa menggurus);
d. Menghindari akses – akses yang mungkin timbul dalam proses penataan dan penyediaan tanah;
   a) Mempercepat pertumbuhan wilayah;
   b) Menertibkan administrasi pertanahan;
   c) Menghemat biaya pemerintah;
   d) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah;
   e) Meningkatkan harga properti peserta;
   f) Susunan organisasi pelaksana konsolidasi tanah, termasuk keikutsertaan wakil peserta secara aktif dalam tim pelaksana.

3. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;
   - Peralihan hak atas dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;
   - Pelepasan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenang;

- Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus;
   - Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daeah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.

5. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan;
   - Ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Pengadaan tanah
   - Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman diperuntukan pembangungan rumah umum, rumah khusus dan penataan permukiman kumuh;

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

8.2.4 Ketentuan Penyusunan Dokumen Penyediaan Tanah dan Permukiman Kembali

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali atau disebut LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) dibagi dalam dua kategori sesuai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

a. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan
b. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP, sedangkan untuk kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak dilengkapi dengan dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan)

Jenis-jenis kebutuhan dokumen tersebut adalah:

a. LARAP Komprehensif atau LARAP Lengkap mencakup seluruh unsur- unsur yang diuraikan pada bagian pokok-pokok pembahasan;
b. LARAP Sederhana meliputi pembahasan yang lebih sederhana yang meliputi pokok-pokok pembahasan yang tercantum pada dokumen LARAP Lengkap dengan tanpa mencakup unsur-unsur pada pokok pembahasan, seperti di bawah ini:
   1) Kajian sosio- ekonomi;
   2) Kajian analisis hukum;
   3) Seleksi lokasi dan persiapan relokasi;
   4) Perumahan, infrastruktur dan pelayanan sosial;
   5) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

6) Proses partisipatif dalam persiapan pengadaan tanah dan pemukiman kembali

c. RPL (Rencana Penyiapan Lahan) adalah dokumen yang disusun mencakup proses pengadaan tanah dengan tidak terdapat pemindahan atau relokasi bangunan hunian atau aset lain dari WTP, seperti pemindahan tempat usaha. Dokumen RPL disusun mencakup unsur- unsur seperti dalam LARAP Sederhana, seperti berikut:
   1) Uraian kegiatan;
   2) Pendataan warga terdampak dan aset terdampak;
   3) Penilaian aset dan skema kompensasi;
   4) Proses konsultasi;
   5) Mekanisme penyampaian keluhan;
   6) Pembiayaan;
   7) Pemantauan dan evaluasi;
   8) Rencana kerja penyiapan lahan; dan
   9) Jadwal pelaksanaan.

8.2.5 Pelaku dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaku dalam proses pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali adalah:

a. Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP, dinas/instansi terkait)
   1) Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program penanganan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan;
   2) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali;
   3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali; dan
   4) Memantau dan evaluasi kemajuan pelaksanaan pengadaan tanah dan atau permukiman kembali.

b. Tim Konsultan LARAP yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota
   1) Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan proses perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali;
   2) Melakukan kajian aspek sosial ekonomi dan aspek hukum terhadap warga terdampak dan aset-aset yang terdampak;
   3) Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali; dan
   4) Bertanggung jawab atas seluruh proses dan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali.

c. Tim Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota
   1) Tim Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi proses sosialisasi dan diskusi masyarakat dengan pemerintah kabupaten/kota; dan
   2) Tim Pemberdayaan Masyarakat membantu Tim Pengadaan Tanah untuk melakukan pendataan warga dan aset terdampak.

d. Tim Penilai Independen
   1) Bertanggung jawab atas penilaian kerugian yang dialami oleh WTP; dan
   2) Melakukan penilaian independen atas aset-aset WTP sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilaksanakan melalui tahapan:

1) Persiapan;
   a. Kegiatan
      1) Identifikasi kegiatan di lokasi perencanaan penataan kawasan;
      2) Penentuan komponen kegiatan /infrastruktur yang memerlukan pengadaan tanah;
      3) Sosialisasi rencana penataan kawasan kepada seluruh warga;
      4) Pembentukan panitia pengadaan tanah pemerintah daerah yang melibatkan instansi terkait, warga dan tokoh masyarakat;
      5) Penunjukan Penilai Publik;
      6) Panitia menyusun Rencana Kerja:

a) Rencana pendanaan pelaksanaan;
b) Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
c) Rencana kerja pelaksanaan/ToR Konsultan penyusunan LARAP;
d) Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksanaan; dan
e) Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan.

7) Penyediaan tempat pengungkapan/media bagi warga.

b. Pelaku

1) Pemerintah daerah/Pokja PKP; dan
2) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat Setempat.

2) Sosialisasi awal

a. Kegiatan

1. Mensosialisasikan langsung kepada warga rencana penataan kawasan konsep rencana penataan kawasan;
   a. Jenis jenis rencana kegiatan penataan kawasan;
   b. Potensi-potensi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi; dan
   c. Rancangan batas-batas kebutuhan pengadaan tanah.
   d. Membuat Berita Acara Sosialisasi.

b. Pelaku

1. Pemerintah daerah/Pokja PKP;
2. Panitia Pengadaan Tanah; dan
3. Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

3) Pendataan;

a. Kegiatan

1) Pengukuran dan Pemetaan

Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, meliputi:

a) Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
b) Pengukuran bidang per bidang;
c) Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
d) Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.

2) Sensus terhadap warga, aset terkena proyek:

a) Nama pemilik, pekerjaan dan alamat pihak yang berhak;
b) Bukti kepemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, tanaman dan benda lain berkaitan dengan tanah; dan
c) Jenis penggunaan tanah dan dokumennya.

Jika tidak memiliki kekuasaan atas tanah dengan surat bukti kepemilikan tanah, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah" Perka BPN No.5/2012 pasal 16 ayat 2b.

3) Luas tanah/bangunan eksisting;

a) Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari kegiatan;
b) Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya);
c) Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari kegiatan;
d) Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut;
e) Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
f) Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB);
g) Tanaman/pohon yang terkena proyek kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); dan
h) Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya untuk memperolehnya.

4) Penilaian Aset Terdampak

Penilaian aset terdampak dilakukan oleh Tim Penilai yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Penilai melakukan penilaian atas besarnya nilai kerugian yang meliputi:

a) Tanah;
b) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c) Bangunan;
d) Tanaman;
e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
f) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Hasil penilaian tim penilai dijadikan bahan rembuk bernegosiasi dengan warga terdampak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

b. Pelaku:

1) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah;
2) Tim Penilai Independen;
3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

4) Rembuk dan konsultasi;

a. Kegiatan

1) Melakukan rembuk dengan warga terdampak dengan tema terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk mendapatkan berbagai kesepakatan. Pelaksanaan rembuk dilakukan secara berulang-ulang sampai ada kesepakatan bersama, meliputi:

a) Konsultasi dengan warga terdampak tentang pilihan bentuk pemberian kompensasi atas pengadaan tanah dan asset terdampak. Bentuk ganti kerugian dapat berupa:

i. Uang;
ii. Tanah pengganti;
iii. Pemukiman kembali; atau
iv. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b) Rembuk penetapan bentuk ganti kerugian dan kompensasi atas tanah dan aset terdampak sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai independen.

c) Rembuk dan konsultasi opsi pemindahan warga terdampak (lokasi, jenis hak atas bangunan dan tanah, seperti hibah, HGB, hak milik, subsidi sewa dan lain-lain).

d) Rembuk tata cara pemindahan dan penetapan lokasi pemindahan warga

e) Rembuk penentuan pilihan pemberian bantuan atau kompensasi untuk peningkatan penghidupan warga terdampak, dll.

2) Setiap hasil rembuk dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen yang dilengkapi dengan daftar hadir serta didokumentasikan dengan baik. Dalam Berita Acara harus memuat hal-hal yang disepakati dan belum disepakati.

3) Seluruh hasil rembuk dan konsultasi harus diungkapkan melalui media warga yang ada supaya seluruh warga dapat mengetahui.

b. Pelaku

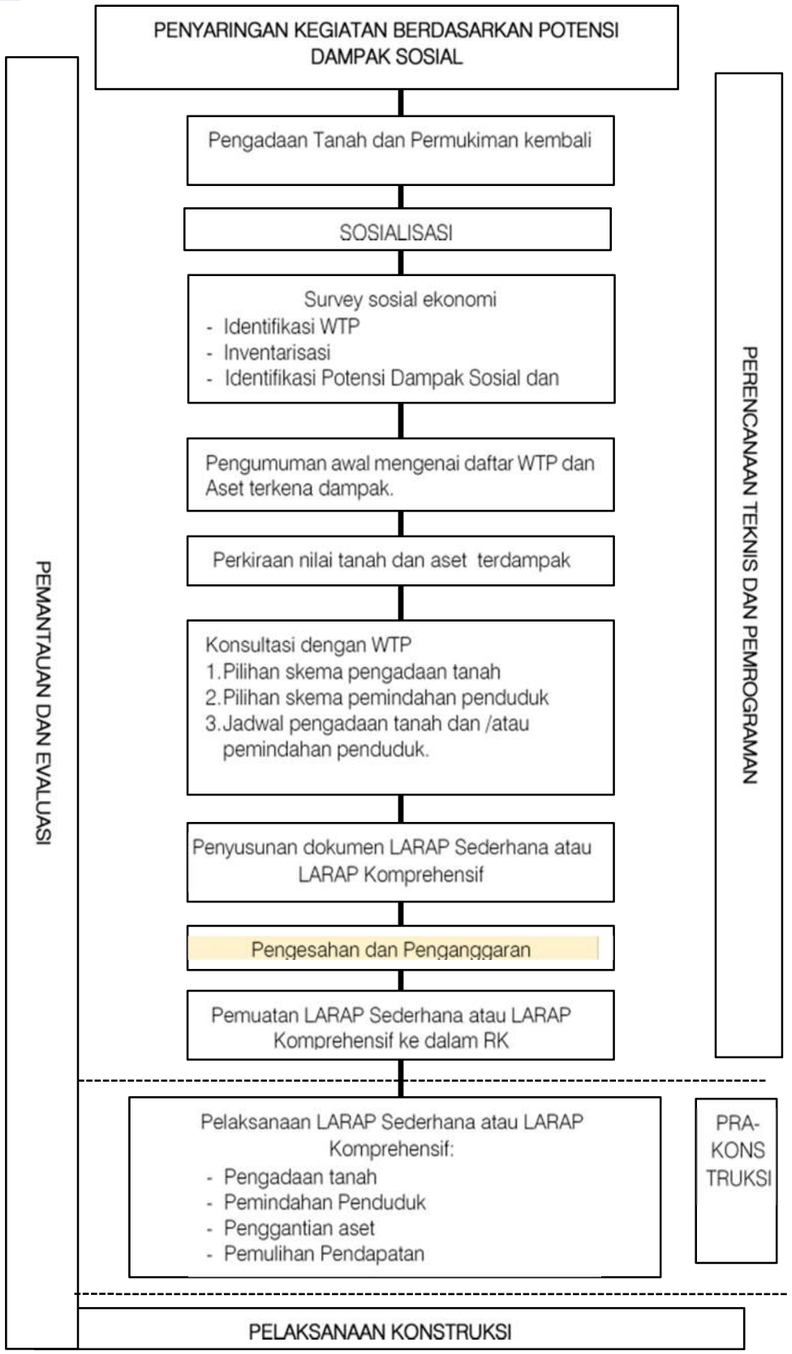
1) Pemerintah daerah / Pokja PKP;
2) Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah;
3) Konsultan Penyusun LARAP; dan
4) Difasilitasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat.

5) Penyusunan dokumen LARAP;

Penyusunan dokumen LARAP dilakukan setelah memperoleh hasil atau keluaran dari pelaksanaan proses tahapan di atas. Tim penyusun dokumen LARAP atau RPL telah mengikut proses pendataan, sosialisasi dan rembuk serta konsultasi dengan warga dan para pihak terkait. Dokumen LARAP atau RPL yang disusun mencakup proses kegiatan perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman warga terdampak. Pembahasan dokumen LARAP disusun secara sistematis. Dokumen LARAP mencakup pembahasan proses

pelaksanaan, permasalahan dan penanganannya serta kesepakatan dengan warga terdampak. Pokok-pokok pembahasan dalam LARAP menyesuaikan dengan permasalahan yang ditemui dari setiap lokasi perencanaan, seperti contoh dibawah ini:

I. Pendahuluan;
II. Gambaran Umum Perencanaan;
III. Konsep, Visi dan Rencana Penataan Kawasan;
IV. Kajian Warga Terdampak Proyek;
V. Kajian Legalitas Tanah;
VI. Kegiatan Rembuk dan Konsultasi Publik;
VII. Pengaduan, Keluhan dan Pengungkapan;
VIII. Penilaian Asset
IX. Rencana Pemindahan Sementara;
X. Pemantauan dan Pelaporan;
XI. Rencana Pembangunan dan Pemukiman Kembali.



Gambar 8. 1 Bagan Penyusunan Larap
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

6) Pelaksanaan LARAP

Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan LARAP telah diuraikan dan disepakati dalam rencana kerja LARAP. Ketersediaan anggaran APBD pemerintah kabupaten/kota dan sumber anggaran lain untuk mendanai rencana kerja LARAP disiapkan sesuai jadwal waktu yang disepakati dalam dokumen LARAP. Proses perencanaan teknis dan pelaksanaan infrastruktur penataan kawasan disusun dengan menyesuaikan pada rencana kerja LARAP.

Lokasi dan luasan pengadaan tanah akan mempengaruhi desain teknis, demikian juga dengan waktu pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan konstruksi:

a. Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum pengelola kegiatan melakukan kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk relokasi (jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas;
b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk perencanaan program dan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, misalnya: program/kegiatan pemulihan penghidupan WTP yang terganggu akibat adanya kegiatan. Bappeda membantu Pengelola Kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dengan instansi terkait termasuk memastikan dimasukkannya kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam program-program instansi terkait tersebut dan anggaran yang cukup disediakan dalam program-program instansi terkait tersebut.
d. Tim Pemantau Program berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan LARAP sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pemantauan Kegiatan Proyek. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tentang pelaksanaan LARAP harus menjadi bagian dari Laporan Triwulan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

7) Pemantauan pelaksanaan LARAP

Pelaksanaan rencana kerja LARAP harus dilakukan pemantauan olah para pihak terkait untuk memastikan rencana kerja LARAP dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan dampak buruk kepada program terutama kepada warga terdampak yang direlokasi maupun yang tidak direlokasi. Pemantauan dilakukan pada setiap proses pelaksanaan rencana kerja LARAP yang mencakup proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali atau relokasi dan pasca pengadaan tanah dan relokasi.

a. Proses pengadaan tanah dan relokasi
   1) Dilakukan selama proses pengadaan tanah dan relokasi dilakukan,
   2) Nilai ganti kerugian yang diterima mengacu pada penilaian Tim Penilai Independen; dan
   3) Pemindahan warga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan yang dijanjikan.
b. Pasca pengadaan tanah dan relokasi
   1) Dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan;
   2) Kondisi sosial ekonomi WTP mencakup data kependudukan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran warga di lokasi baru;
   3) Kualitas hunian dan permukiman warga yang direlokasi mencakup 7 indikator kumuh; dan
   4) Bantuan program pemulihan penghidupan WTP yang dijanjikan.
c. Pelaku:
   1) Pemerintah kabupaten/kota (Pokja PKP/dinas terkait);
   2) Balai PPW dan Satker Provinsi.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 Identifikasi Kebutuhan Program Penanganan dan Investasi

Pola Kebutuhan program penanganan dan investasi penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan hasil verifikasi semua kawasan kumuh termasuk dalam kategori kumuh ringan dan tidak kumuh. Model penanganan kumuh yang sesuai adalah pemugaran dengan kondisi kumuh ringan dan lahan legal serta sesuai tata ruang.

Karakteristik kebutuhan program penanganan kumuh didasarkan atas tahapan program penanganan yaitu:

1. Tahap Pra Konstruksi;
2. Tahap Konstruksi; dan
3. Tahap Pasca Konstruksi.

Identifikasi kebutuhan program penanganan dapat dilihat pada tabel 9.1

Tabel 9.1 Karakteristik Kebutuhan Program Penanganan

Tahapan Program	Kelompok Program	Rincian Program	Karakteristik Program
Tahap Pra Konstruksi	Persiapan Masyarakat	Sosialisasi Penataan dan Pendampingan Masyarakat.	1. Melibatkan pemerintah dan masyarakat sekitar; 2. Kewajiban pemerintah untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat terhadap akses hunian yang layak; 3. Bersifat non-cost recovery.
	Persiapan Lahan	Konsolidasi lahan, prakonstruksi dan pematangan lahan	Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Tahap Konstruksi	Pembangunan Rumah Tinggal	1. Perbaikan RTLH; 2. Pembangunan Rumah Susun.	1. Melibatkan Pmerintah dan Pengembang / swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada pengembalian modal.
	Perbaikan Infrastruktur Jaringan Jalan	1. Pengembangan dan pentaan jalan lingkungan, sebagaI buffer antara kawasan; 2. Pengembangan akses pada setiap kluster permukiman swadaya dan integrasi dengan jaringan infrastruktur.	1. Melibatkan Pemerintah dan Pengembang / swasta; 2. Bersifat non-cost recovery.
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum	Pembangunan jaringan distribusi air minum	1. Melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada ….pengembalian modal.
	Pembangunan Jaringan Drainase	Perencanaan Teknis Drainase Kawasan dan Pembuatan dan peningkatan jaringan drainase	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.
	Pembangunan Jaringan Air Limbah	Pembuatan instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.
	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	1. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan; 2. Pemilahan sampah (organik dan non organik); 3. Sosialisasi program persampahan dengan konsep 3R; 4. Pelatihan/pendampingan masalah pengelolaan sampah ….dengan teknologi tepat guna; 5. Sosialisasi cara pengomposan.	1. Melibatkan pemerintah, dan pegembang / swasta; 2. Bersifat cost recovery / berorientasi minimal pada ….pengembalian modal.
	Pembangunan Proteksi Kebakaran	Penyediaan sarana proteksi kebakaran	1. Melibatkan Pemerintah dan masyarakat. 2. Bersifat non-cost recovery.

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

9.2 Rancangan Skema Pembiayaan Penataan Kawasan Kumuh

Sumber – sumber pembiyaan dalam pembangunan kawasan kumuh ada dua sumber yaitu:

1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
   a. Pendanaan Reguler
      1) APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten;
      2) APBN dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
      3) APBN transfer daerah (DAU/DAK/DBH)
   b. Pendanaan Non Reguler
      1) Hibah APBN;
      2) Hibah APBD;
      3) Pinjaman APBN/APBD (pendampingan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain);
      4) Obligasi daerah;
      5) Obligasi infrastruktur; dan
      6) Obilgasi negara syariah.

2. Non Pemerintah/Pembiyaan Linnya
   a. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
      1) Penugasan BUMN;
      2) Private Finance Initiative (PFI);
      3) Performance Based Annuity Scheme (PBAS);
      4) Pembiayaan Strategis (Strategic Funding);
      5) Availability Payment;
      6) Viability Gap Fund (VGF);
      7) Efek Beragun Aset (Asset Backed Security);
      8) Sale and Lease back.
   b. Swasta/Sektor Private
      1) Coorporate Social Responsibility (CSR);
      2) Infrastruktur swasta (Private Infrastructure).
   c. Kerjasama Bilateral
      1) Pinjaman dan Hibah Luar Negerin (PHLN).
   d. Kersama Masyarakat
      1) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Apapun karakteristik dari masing-masing sumber pembiayaan dan prasyaratnya serta kegiatan yang sesuai di danai dapat dilihat pada tabel 9.2 dan 9.3.

Sedangkan kebutuhan skeman pembiayaan penataan kawasan kumuh melalui skema perbaikan kampung didasarkan 7 indikator dalam penanganan kumuh, yaitu sebagai berikut

a) Program Bangunan Gedung;
b) Program Jalan Lingkungan;
c) Program Air Minum;
d) Program Jaringan Drainase;
e) Program Air Limbah;
f) Program Persampahan; dan
g) Program Proteksi Kebakaran.

Kebutuhan skema pembiayaan yang sesuai dengan program penanganan kumuh dapat dilihat pada tabel 9.4.

Karakteristik pembiayaan dengan swasta berdasarkan pertimbangan utama dunia usaha dalam melakukan kerjsama adalah nilai finansial dan nilai ekonomis.

a) Nilai finansial adalah batas minimal nilai ekonomi yang menguntungkan bagi dunia usaha yang ditunjukan dengan jamian nilai RR yang diberikan oleh pemerintah terhadap investasi yang diberikan oleh dunia usaha;
b) Nilai ekonomi adalah nilai manfaat yang diberikan kepada masyarakat akibat dari investasi yang dilakukan. Nilai ekonomis ditunjukkan dengan keberadaan yanag mengakses investasi tersebut.

Tabel 9.2 Karakteristik Sumber Pembiayaan

Sumber dan Skeman Pembiayaan	Karakteristik dan Prasyarat	Kegiatan yang Sesuai
Pembiayaan Pemerintah		
APBN	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional	Semua kegiatan yang menjadi urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintah (misal: fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi strategis nasional, fasilitas dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh)
APBN - Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telas dideligasikan. Memenuhi readiness criteria yang telas ditetapkan: (1) Memiliki SK Kumuh; (2) Telah melakukan verifikasi data kumuh; (3) Telah menyusun Dokumen RP2KPKPK; dst	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telah dideligasikan.
APBN - transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH)	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional melalui program KOTAKU memenuhi persyaratan : (1) Mendukung kegiatan strategis dan prioritas 0% kawasan kumuh; (2) Sesuai dengan kewenangan pusat.	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional yang telas dideligasikan.
APBN - Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan pusat/nasional.	Semua kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung 100-0-100.
APBD Provinsi	Sesuai dengan pengalokasian dan kewenangan provinsi.	Semua kegiatan memungkinkan selama menjadi kewenangan provinsi.
Obligasi Daerah	Pemerintah melakukan investasi dengan menerbitkan surat obligasi yang dapat dibeli oleh WNI dan WNA. Pembelian obligasi ini nantinya menjadi bentuk investasi yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek invetasi.	Proyek investasi di bidang infrastruktur yang menghasilkan penerimaan (misal: jalan tol, perumahan, pengelolaan persampahan, dan air minum).
Pembiayaan dari Sumber Lain (Non Pemerintah)		
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)	Merupakan kegiatan yang diusulkan oleh pemda. Prioritas : Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Pemerintah harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga Pengusul.	Kegiatan yang sesuai dengan bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
Penugasan BUMN	Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN (seperti penugasan PT Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyetaraan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah.	Semua kegiatan yang didapat ditugaskan kepada BUMN (sangat tergantung pada jenis usaha yang diusahakan BUMN).
Infrastruktur Swasta (*Private Infrastructure*)	Pembangunan infrastruktur diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan kepemilikan aset pada swasta.	Kegiatan infrastruktur yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menjadi kewenangan negara.
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat melalui pembiayaan pemerintah dan non pemerintah.	Kegiatan infrastruktur yang berada di lingkungan masyarakat tinggal dan tidak membutuhkan investasi yang besar untuk pendanaannya (perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase lingkungan, sanitasi berbasis masyarakat dan pengelolaan persampahan lingkungan)

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 9.3 Skema Pembiayaan Berdasarkan Nilai Ekonomi

	Nilai Finansial Rendah	Nilai Finansial Sedang	Nilai Finansial Tinggi
Nilai Ekonomis Rendah	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan lingkungan, pengelolaan air limbah terpusat dan setempat, pengelolaan persampahan, dan infrastruktur perumahan rakyat yang diperuntukan untuk kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses. (contoh MBR dan kelompok marginal lain)*	**Memungkinkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) Dengan Intervensi jaminan Kestabilan Konsumen** *Pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah terpusat dan setempat*	**Memungkinkan KPS Dengan Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Infrastruktur perumahan rakyat untuk MBR*
Nilai Ekonomis Sedang	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan kolektor dan jalan lokal*	**Penyediaan oleh BUMD/BUMN, memungkinkan KPS dengn Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Air minum untuk non rumah tangga*	**Penyediaan Melalui KPS/PPP (*Public Private Partnership*)** Air minum untuk non rumah tangga
Nilai Ekonomis Tinggi	**Penyediaan oleh Pemerintah** *Jalan arteri (terutama jalan tol)*	**Memungkinkan KPS dengan Intervensi Jaminan Kestabilan Konsumen** *Air minum untuk rumah tangga umum, jalan lokal untuk kawasan elit*	**Penyediaan oleh Dunia Usaha, namun Aset dimiliki Pemerintah** *Pelabuhan, bandara, infrastruktur perumahan rakyat untuk non MBR*

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 9.4 Skema Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
Bangunan Gedung			
Sosialisasi Penataan	Penanganan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah		
Sosialisasi Rumah Sehat	Lahan milik masyarakat		
Perbaikan RTLH	RTLH memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan pada kawasan; RTLH berada dalam kawasan Ring 1 BUMN.	APBN - Transfer ke daerah (Bantuan Stimulan perumahan swadaya - Kementerian PUPR) CSR BUMN	Perlu melibatkan BKM kelurahan lokasi RTLH Membutuhkan penawaran kerjasama dari Pemda
Jalan Lingkungan			
Pengembangan dan Penataan Jalan Lingkungan, sebagai Buffer antara kawasan	Infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh < 10 Ha)	APBD Kabupaten	Butuh dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan
	Infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha) Berada pada kawasan strategis provinsi	APBD Provinsi	
	infrastruktur permukiman kumuh disediakan oleh pemerintah (luas kawasan kumuh >15 Ha) Berada pada kawasan strategis nasional	PBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan APBN - transfer ke daerah (Program Kotaku, dan lain-lain)	
Pengembangan akses pada setiap klaster permukiman swadaya dan integrasi jaringan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur pendukung permukiman untuk menarik investasi dari pihak swasta	APBD Kabupaten	Adanya program penataan kumuh yang bekerja sama dengan swasta/badan usaha
Air Minum			
Perencanaan Teknis SPAM		APBD Kabupaten/APBD Provinsi	

Struktur Program	Skenario/Kondisi Kawasan	Skeman yang Sesuai	Implikasi Penerapan
Pembuatan dan Peningkatan SPAM	Kawasan yang terhubung dengan saluran penyediaan air minum lintas daerah provinsi Kawasan yang terhubung dengan salurah penyediaan air minum kepentingan strategis nasional	PBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem pengelolaan air minum lintas daerah kabupaten/kota	APBD Provinsi	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem penyediaan air minum perkotaan	APBD Kabupaten / PDAM	
Jaringan Drainase			
Perencanaan Teknis Drainase Kawasan		APBD Kabupaten	
Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase	Kawasan yang terhubung dengan saluran drainase lintas daerah provinsi Kawasan drainase yang terhubung dengan sistem drainase kepentingan strategis nasional	APBN - dekonsentrasi dan tugas perbantuan	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota	APBD Provinsi	
	Kawasan yang terhubung dengan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	APBD Kabupaten	
Air Limbah			
Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kawasan tanpa akses pada jaringan perpipaan air limbah	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	
	Kawasan dengan akses pada jaringan perpipaan pengelolaan air limbah	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	
Persampahan			
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan	Belum memiliki sistem pengelolaan persampahan	APBD Kabupaten	
	Potensial diterapkan pengelolaan persampah dengan pola 3R (bank sampah, pusat daur ulang sampah plastik, dan lain-lain)	APBN/APBD Provinsi/KPBU	
Pemilahan sampah (organik dan non organik)	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	CSR	Adanya program rintisan terkait pengelolaan persampahan melalui kerja sama dengan skema CSR
Sosialisasi program persampahn dengan konsep 3R	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	APBD Kabupaten	
Pelatihan/pendmapingan masalag pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna	Potensial diterapkan pengelolaan persampahan dengan pola 3R	APBD Kabupaten/Hibah/Swadaya masyarakat	Perlibatan BKM dalam pelaksanaan program dan perlibatan pemerintah daerah
Sosialisasi Cara Pengomposan	Kawasan memiliki BKM yang berdaya dan mandiri	APBD Kabupaten/Hibah/Swadaya masyarakat	Perlibatan BKM dalam pelaksanaan program
Proteksi Kebakaran			
Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kawasan permukiman kumuh	APBD Kabupaten/CSR	

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB X

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam upaya mewujudkan kabupaten/kota untuk semua, diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembanguan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana prasarana dasar penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan terhadap permukiman informal.
b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan *New Urban Agenda* (NUA), UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang-undangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi, dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan. Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing-masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik mejabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan setiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia.

10.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan, dan pengelolaan sebagaimana yang ditunjuk pada gambar berikut:



Gambar 10. 1 Proses peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menurut UU N0 1 Tahun 2011
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

Selain itu, UU No. 1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan persan masyarakat. Terkait ini, masing – masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitas dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk didalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagai mana yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 10. 2 Struktur pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat
Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

Untuk lebih jelas mengenai peran dan fungsi dari masing-masing stakeholder dalam penanganan kumuh, maka akan dipejelas pada bahasan berikut ini:

10.1.1 Partisipasi masyarakat

Berdasarkan pada materi UU Nomor 1 Tahun 2011, keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik, tetapi juga meliputi keseluruhan proses, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Hak masyarakat diatur secara jelas dalam pasal 129 UU Nomor 1 Tahun 2011 bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman setiap orang berhak:

1. Menempati, menikmati, serta memiliki atau memperoleh rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
2. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Sementara kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 130, yang pada dasarnya mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk:

1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman.
2. Turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan kepentingan umum.
3. Menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.
4. Mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Secara tegas keterlibatan masyarakat disebutkan pada beberapa kegiatan yaitu:

1. Kegiatan perencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Terkait konsolidasi tanah dalam banyak literatur dikatakan bahwa kendala terbesar pembangunan perumahan adalah keterbatasan tanah yang diakibatkan oleh mahalnya harga tanah, bukti kepemilikan tanah yang belum teradministrasi dengan baik, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang.

10.1.2 Peran Pemerintah

Tiga tipe kewajiban bagi negara, yaitu kewajiban menghargai (*to respect*), kewajiban melindungi (*to protect*), dan kewajiban memenuhi (*to fulfill*).

1. *Pertama,* kewajiban menghargai. Kewajiban ini mengharuskan negara tidak mengganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas rumah, misalnya tidak membatasi akses kepada siapapun.
2. *Kedua,* kewajiban melindungi. Mengadopsi regulasi yang efektif dan mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun keberadaan hak atas rumah. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusahaan dan institusi yang di bawah kendali pemerintah.
3. *Ketiga,* kewajiban memenuhi fasilitas, promosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas rumah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tugas di antaranya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah kabupaten/kota secara tegas juga mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanaakan pembinaan mempunyai wewenang di antaranya:

1. Menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang layak, sehat dan aman.
2. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.
3. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional.
5. Melaksanaakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.

Kewajiban lainnya dari pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi MBR. Untuk itu, pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun kemudahan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:

1. Subsidi perolehan rumah;
2. Stimulan rumah swadaya;
3. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
4. Perizinan;
5. Asuransi dan penjaminan;
6. Penyediaan tanah;
7. Sertifikasi tanah dan;
8. Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan serta bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara tegas juga disebutkan melibatkan masyarakat atau dengan memfasilitasi masyarakat yaitu:

1. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
2. Peremajaan;
3. Penetapan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali;
4. Memfasilitasi pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya;
5. Memberikan pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

10.1.3 Keterlibatan Dunia Usaha

Secara umum keterlibatan dunia usaha beragam, dimulai mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan

industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Selain itu, ketika menjadi badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, diwajibkan mewujudkan dengan hunian berimbang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.

Dalam proses penyiapan pembangunan perumahan, dimungkinkan kegiatan konsolidasi tanah dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

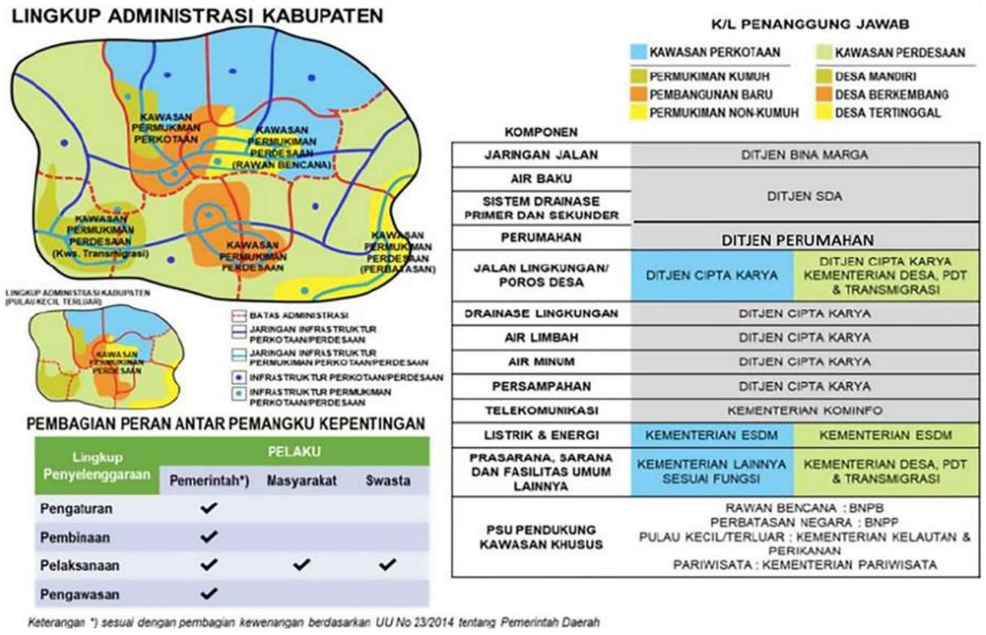
Kerjasama dengan badan hukum dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi penggarap tanah negara atau pemegang hak atas tanah dapat bersama-sama meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan khususnya penyediaan rumah bagi MBR adalah ketersediaan dan murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk itu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber daya, dana kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Tabel 10. 1 Peran para pelaku dalam pembangunan yang berkelanjutan sesuai prinsip NUA dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

PELAKU KEPENTINGAN		PERAN
Pemerintah	Pemerintah Pusat	✓ Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDG's. ✓ Mengkoordinasikan pemerintah daerah ✓ Untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah. ✓ Mendorong terwujudnya kerja sama multipihak dan multilevel pemerintahan untuk mewujudkan NUA.
	Pemerintah Provinsi	✓ Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota. ✓ Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah.
	Pemerintah Kabupaten/Kota	✓ Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ✓ Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD. ✓ Mendorong kerja sama dengan badan usaha.
Non Pemerintah	Swasta	✓ Menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV). ✓ Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan.
	Akademisi	✓ Menyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan.
	Komunitas/ Organisasi Masyarakat	✓ Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota. ✓ Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
	Media	✓ Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

Sumber: *New Urban Agenda*, 2016

Sistem pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer perumahan atau pembiayaan sekunder perumahan. Untuk itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan konstruksi, perolehan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharaan dan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

Gambar 10. 3 Skema peran antar pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas dapat dilihat dalam ilustrasi Gambar 10.3.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. 2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Kawasan Permukiman	✓ Penetapan sistem kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih.	✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai dengan dibawah 15 hektar	✓ Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. ✓ Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.
3	Permukiman	• Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. • Penyelenggaraan infrastruktur pada permukaan dikawasan	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No.23/2014

10.2 Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran dan bentuk keterlibatan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 10. 3 Peran dan bentuk keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Dokumen RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
Tim Teknis Penyusun RP2KPKPK yang merupakan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP), terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten/Kota Perumusan RP2KPKPK	• Merumuskan RP2KPKPK • Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK • Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	TUGAS • Menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; • Melaksanakan penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan panduan; • Menghasilkan RP2KPKPK yang dapat diimplementasikan; • Publikasi dokumen RP2KPKPK kepada masyarakat; • Menindaklanjuti output RP2KPKPK; dan • Menyusun dan legalisasi peraturan Kepala Daerah (Perbup/perwal) WEWENANG • Melaksanakan peninjauan kembali terhadap RP2KPKPK berdasarkan ketentuan yang tercantum; • Melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan RP2KPKPK
Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Pokja PKP, Perbankan, Perguruan Tinggi/Akademisi, BUMN/BUMD, Asosiasi Pengembang	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi	• Memberikan masukan teknis terkait dengan dokumen RP2KPKPK

PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN WEWENANG
Perumahan, Asosiasi Profesi, Forum Masyarakat dan Pelaku Program Air Minum dan Kumuh.			
Kelembagaan masyarakat	Sebagai mitra Pokja PKP dalam penyusunan RP2KPKPK	Berpartisipasi dalam kegiatan survey dan wawancara	TUGAS • Membantu Pokja PKP dalam koordinasi dan sinkronisasi data permukiman kumuh; • Memberikan input dalam pola penanganan permukiman kumuh; • Melakukan perencanaan partisipatif. WEWENANG • Memberikan masukan dan pendapat terkait dengan komponen pembangunan.

Sumber: SE DJCK Nomor 30 Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN

BASELINE NUMERIK

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kabupaten Pidie Jaya



1. NUMERIK KABUPATEN PIDIE JAYA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	1.088,20	Ha
Jumlah Bangunan	13.261	Unit
Jumlah Penduduk	53.503	Jiwa
Jumlah KK	15.943	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	7.750,00	Unit	58,44%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2.558,00	Unit	19,29%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				19,48%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	15.197,08	Meter	8,01%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	81.335,82	Meter	42,86%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,43%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6.130,00	KK	38,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	5.534,00	KK	34,71%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				36,58%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,30	Ha	0,76%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	24.051,62	Meter	17,96%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	57.928,41	Meter	43,27%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,42%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	15.345,00	KK	96,25%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	14.309,00	KK	89,75%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	8.066,00	Unit	60,82%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	12.813,00	Unit	96,62%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				78,72%	
			TOTAL NILAI		25
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,66%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

KEC. BANDAR BARU

Luas SK	275,60	Ha
Luas Verifikasi	275,60	Ha
Jumlah Bangunan	3.847	Unit
Jumlah Penduduk	14.978	Jiwa
Jumlah KK	4.580	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
2.442,00	Unit	63,48%	3
-	Ha	0,00%	0
1.123,00	Unit	29,19%	1
		30,89%	
2.410,00	Meter	5,58%	0
18.764,18	Meter	43,42%	1
		21,71%	
2.391,00	KK	52,21%	3
1.892,00	KK	41,31%	1
		46,76%	
8,00	Ha	2,90%	0
5.429,11	Meter	0,00%	0
20.223,50	Meter	61,37%	3
		20,46%	
1.285,00	KK	28,06%	1
1.285,00	KK	28,06%	1
		28,06%	
4.580,00	KK	100,00%	5
4.119,00	KK	89,93%	5
		94,97%	
3.120,00	Unit	81,10%	5
3.847,00	Unit	100,00%	5
		90,55%	
	TOTAL NILAI		34
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,63%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

KEC. BANDAR DUA

Luas SK	254,16	Ha
Luas Verifikasi	254,16	Ha
Jumlah Bangunan	2.087	Unit
Jumlah Penduduk	8.851	Jiwa
Jumlah KK	2.598	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
916,00	Unit	43,89%	1
-	Ha	0,00%	0
399,00	Unit	19,12%	0
		14,63%	
4.730,00	Meter	13,42%	0
10.867,73	Meter	30,84%	1
		15,42%	
973,00	KK	37,45%	1
712,00	KK	27,41%	1
		32,43%	
-	Ha	0,00%	0
3.451,00	Meter	11,03%	0
6.536,88	Meter	20,90%	0
		0,00%	
665,00	KK	25,60%	1
665,00	KK	25,60%	1
		25,60%	
2.535,00	KK	97,58%	5
2.313,00	KK	89,03%	5
		93,30%	
1.946,00	Unit	93,24%	5
1.973,00	Unit	94,54%	5
		93,89%	
	TOTAL NILAI		26
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,32%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

KEC. JANGKA BUYA

Luas SK	49,39	Ha
Luas Verifikasi	49,39	Ha
Jumlah Bangunan	670	Unit
Jumlah Penduduk	2.554	Jiwa
Jumlah KK	843	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
448,00	Unit	66,87%	3
-	Ha	0,00%	0
55,00	Unit	8,21%	0
		22,29%	
1.091,63	Meter	12,83%	0
4.514,24	Meter	53,07%	3
		26,54%	
306,00	KK	36,30%	1
246,00	KK	29,18%	1
		32,74%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
3.609,91	Meter	46,22%	1
		15,41%	
119,00	KK	14,12%	0
119,00	KK	14,12%	0
		0,00%	
843,00	KK	100,00%	5
816,00	KK	96,80%	5
		98,40%	
322,00	Unit	48,06%	1
624,00	Unit	93,13%	5
		70,60%	
	TOTAL NILAI		25
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,00%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	1.088,20	Ha
Jumlah Bangunan	13.261	Unit
Jumlah Penduduk	53.503	Jiwa
Jumlah KK	15.943	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	7.750,00	Unit	58,44%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2.558,00	Unit	19,29%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				19,48%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	15.197,08	Meter	8,01%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	81.335,82	Meter	42,86%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,43%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6.130,00	KK	38,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	5.534,00	KK	34,71%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				36,58%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,30	Ha	0,76%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	24.051,62	Meter	17,96%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	57.928,41	Meter	43,27%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,42%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	15.345,00	KK	96,25%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	14.309,00	KK	89,75%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	8.066,00	Unit	60,82%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	12.813,00	Unit	96,62%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				78,72%	
			TOTAL NILAI		25
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,66%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

KEC. MEURAH DUA

Luas SK	84,98	Ha
Luas Verifikasi	84,98	Ha
Jumlah Bangunan	1.213	Unit
Jumlah Penduduk	5.269	Jiwa
Jumlah KK	1.487	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
787,00	Unit	64,88%	3
-	Ha	0,00%	0
179,00	Unit	14,76%	0
		21,63%	
1.411,45	Meter	7,09%	0
10.255,25	Meter	51,53%	3
		25,76%	
510,00	KK	34,30%	1
373,00	KK	25,08%	1
		29,69%	
0,30	Ha	0,35%	0
2.772,79	Meter	29,47%	1
5.980,23	Meter	63,57%	3
		31,01%	
92,00	KK	6,19%	0
92,00	KK	6,19%	0
		0,00%	
1.487,00	KK	100,00%	5
1.415,00	KK	95,16%	5
		97,58%	
-	Unit	0,00%	0
1.213,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
	TOTAL NILAI		27
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		36,52%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

KEC. MEUREUDU

Luas SK	217,99	Ha
Luas Verifikasi	217,99	Ha
Jumlah Bangunan	2.729	Unit
Jumlah Penduduk	10.740	Jiwa
Jumlah KK	3.210	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1.750,00	Unit	64,13%	3
-	Ha	0,00%	0
401,00	Unit	14,69%	0
		21,38%	
3.820,00	Meter	8,10%	0
17.330,45	Meter	36,75%	1
		18,38%	
1.081,00	KK	33,68%	1
1.523,00	KK	47,45%	1
		40,56%	
-	Ha	0,00%	0
9.052,80	Meter	0,00%	0
9.460,84	Meter	35,52%	1
		11,84%	
261,00	KK	8,13%	0
261,00	KK	8,13%	0
		0,00%	
2.697,00	KK	84,02%	5
2.737,00	KK	85,26%	5
		84,64%	
2.259,00	Unit	82,78%	5
2.489,00	Unit	91,21%	5
		86,99%	
	TOTAL NILAI		27
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,68%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

KEC. PANTERAJA

	22,51	Ha
	22,51	Ha
	489	Unit
	1.893	Jiwa
	567	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
284,00	Unit	58,08%	3
-	Ha	0,00%	0
58,00	Unit	11,86%	0
		19,36%	
-	Meter	0,00%	0
2.381,33	Meter	67,67%	3
		33,83%	
80,00	KK	14,11%	0
73,00	KK	12,87%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
1.261,02	Meter	50,20%	1
		16,73%	
113,00	KK	19,93%	0
113,00	KK	19,93%	0
		0,00%	
567,00	KK	100,00%	5
498,00	KK	87,83%	5
		62,61%	
417,00	Unit	85,28%	5
489,00	Unit	100,00%	5
		92,64%	
	TOTAL NILAI		27
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		32,17%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	1.088,20	Ha
Jumlah Bangunan	13.261	Unit
Jumlah Penduduk	53.503	Jiwa
Jumlah KK	15.943	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	7.750,00	Unit	58,44%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2.558,00	Unit	19,29%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				19,48%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	15.197,08	Meter	8,01%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	81.335,82	Meter	42,86%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,43%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6.130,00	KK	38,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	5.534,00	KK	34,71%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				36,58%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,30	Ha	0,76%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	24.051,62	Meter	17,96%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	57.928,41	Meter	43,27%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,42%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2.814,00	KK	17,65%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	15.345,00	KK	96,25%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	14.309,00	KK	89,75%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	8.066,00	Unit	60,82%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	12.813,00	Unit	96,62%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				78,72%	
				TOTAL NILAI	25
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37,66%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

KEC. TRIENGGADENG

106,49	Ha
106,49	Ha
1.624	Unit
6.237	Jiwa
1.918	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
719,00	Unit	44,27%	1
-	Ha	0,00%	0
286,00	Unit	17,61%	0
		14,76%	
1.144,00	Meter	5,01%	0
13.085,61	Meter	57,33%	3
		28,67%	
621,00	KK	32,38%	1
592,00	KK	30,87%	1
		31,62%	
-	Ha	0,00%	0
2.508,91	Meter	0,00%	0
6.841,00	Meter	46,81%	1
		15,60%	
223,00	KK	11,63%	0
223,00	KK	11,63%	0
		0,00%	
1.918,00	KK	100,00%	5
1.723,00	KK	89,83%	5
		94,92%	
2,00	Unit	0,12%	0
1.624,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
	TOTAL NILAI		22
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		33,65%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

KEC. ULIM

77,07	Ha
77,07	Ha
602	Unit
2.554	Jiwa
740	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
404,00	Unit	67,11%	3
-	Ha	0,00%	0
286,00	Unit	47,51%	1
		38,21%	
590,00	Meter	6,26%	0
4.137,04	Meter	43,92%	1
		21,96%	
168,00	KK	22,70%	0
123,00	KK	16,62%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
837,00	Meter	9,65%	0
4.015,04	Meter	46,27%	1
		15,42%	
56,00	KK	7,57%	0
56,00	KK	7,57%	0
		0,00%	
718,00	KK	97,03%	5
688,00	KK	92,97%	5
		95,00%	
-	Unit	0,00%	0
554,00	Unit	92,03%	5
		46,01%	
	TOTAL NILAI		21
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		30,94%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

2. NUMERIK KECAMATAN BANDAR BARU

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	275,60	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	3.847	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	14.978	Jiwa
		Jumlah KK	4.580	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2.442,00	Unit	63,48%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.123,00	Unit	29,19%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				30,89%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.410,00	Meter	5,58%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18.764,18	Meter	43,42%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.391,00	KK	52,21%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.892,00	KK	41,31%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				46,76%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,00	Ha	2,90%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5.429,11	Meter	16,48%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	20.223,50	Meter	61,37%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,46%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28,06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4.580,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4.119,00	KK	89,93%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,97%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.120,00	Unit	81,10%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.847,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				90,55%	
				TOTAL NILAI	34
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	47,63%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

- 60-80 KUMUH BERAT
- 38-59 KUMUH SEDANG
- 16-37 KUMUH RINGAN
- <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Keude Lueng Putu

Luas SK	31,50	Ha
Luas Verifikasi	31,50	Ha
Jumlah Bangunan	392	Unit
Jumlah Penduduk	1.625	Jiwa
Jumlah KK	462	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
377,00	Unit	96,17%	5
-	Ha	0,00%	0
259,00	Unit	66,07%	3
		54,08%	
950,00	Meter	18,57%	0
3.565,00	Meter	69,70%	3
		34,85%	
462,00	KK	100,00%	5
455,00	KK	98,48%	5
		99,24%	
5,00	Ha	15,87%	0
300,00	Meter	0,00%	0
1.150,00	Meter	42,91%	1
		14,30%	
17,00	KK	3,68%	0
17,00	KK	3,68%	0
		0,00%	
462,00	KK	100,00%	5
462,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
319,00	Unit	81,38%	5
392,00	Unit	100,00%	5
		90,69%	
		TOTAL NILAI	42
		TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	56,17%
		KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

Sarah Panyang

Luas SK	8,20	Ha
Luas Verifikasi	8,20	Ha
Jumlah Bangunan	150	Unit
Jumlah Penduduk	476	Jiwa
Jumlah KK	109	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
96,00	Unit	64,00%	3
-	Ha	0,00%	0
4,00	Unit	2,67%	0
		21,33%	
-	Meter	0,00%	0
823,07	Meter	40,29%	1
		20,14%	
-	KK	0,00%	0
8,00	KK	7,34%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
2.381,11	Meter	100,00%	5
-	Meter	0,00%	0
		33,33%	
21,00	KK	19,27%	0
21,00	KK	19,27%	0
		0,00%	
109,00	KK	100,00%	5
63,00	KK	57,80%	3
		78,90%	
150,00	Unit	100,00%	5
150,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
		TOTAL NILAI	27
		TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	36,24%
		KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

Kayee Jatoe

Luas SK	24,00	Ha
Luas Verifikasi	24,00	Ha
Jumlah Bangunan	390	Unit
Jumlah Penduduk	745	Jiwa
Jumlah KK	445	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
368,00	Unit	94,36%	5
-	Ha	0,00%	0
233,00	Unit	59,74%	3
		51,37%	
1.050,00	Meter	21,65%	0
2.850,00	Meter	58,76%	3
		29,38%	
301,00	KK	67,64%	3
322,00	KK	72,36%	3
		70,00%	
3,00	Ha	12,50%	0
1.900,00	Meter	51,35%	3
1.400,00	Meter	37,84%	1
		29,73%	
205,00	KK	46,07%	1
205,00	KK	46,07%	1
		46,07%	
445,00	KK	100,00%	5
386,00	KK	86,74%	5
		93,37%	
-	Unit	0,00%	0
390,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
		TOTAL NILAI	38
		TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	52,85%
		KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	275,60	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	3.847	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	14.978	Jiwa
		Jumlah KK	4.580	KK

Pulo Pueb		Cut Njong		Manyang Lancok	
Luas SK	16,07 Ha	Luas SK	10,34 Ha		6,32 Ha
Luas Verifikasi	16,07 Ha	Luas Verifikasi	10,34 Ha		6,32 Ha
Jumlah Bangunan	349 Unit	Jumlah Bangunan	186 Unit		149 Unit
Jumlah Penduduk	896 Jiwa	Jumlah Penduduk	491 Jiwa		458 Jiwa
Jumlah KK	283 KK	Jumlah KK	244 KK		187 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2.442,00	Unit	63,48%	3	86,00	Unit	24,64%	0	186,00	Unit	100,00%	5	94,00	Unit	63,09%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.123,00	Unit	29,19%	1	76,00	Unit	21,78%	0	13,00	Unit	6,99%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				30,89%				0,00%				33,33%				21,03%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.410,00	Meter	5,58%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18.764,18	Meter	43,42%	1	548,28	Meter	28,02%	1	-	Meter	0,00%	0	871,86	Meter	65,56%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,71%				14,01%				0,00%				32,78%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.391,00	KK	52,21%	3	142,00	KK	50,18%	1	6,00	KK	2,46%	0	187,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.892,00	KK	41,31%	1	87,00	KK	30,74%	1	1,00	KK	0,41%	0	185,00	KK	98,93%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				46,76%				40,46%				0,00%				99,47%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,00	Ha	2,90%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5.429,11	Meter	16,48%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	20.223,50	Meter	61,37%	3	1.257,88	Meter	60,92%	3	1.607,83	Meter	76,50%	5	1.079,35	Meter	91,50%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,46%				20,31%				25,50%				30,50%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1	70,00	KK	24,73%	0	106,00	KK	43,44%	1	88,00	KK	47,06%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1	70,00	KK	24,73%	0	106,00	KK	43,44%	1	88,00	KK	47,06%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28,06%				0,00%				43,44%				47,06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4.580,00	KK	100,00%	5	283,00	KK	100,00%	5	244,00	KK	100,00%	5	187,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4.119,00	KK	89,93%	5	263,00	KK	92,93%	5	244,00	KK	100,00%	5	187,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,97%				96,47%				100,00%				66,67%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.120,00	Unit	81,10%	5	349,00	Unit	100,00%	5	-	Unit	0,00%	0	149,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.847,00	Unit	100,00%	5	349,00	Unit	100,00%	5	186,00	Unit	100,00%	5	149,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				90,55%				100,00%				50,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		34		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		43
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,63%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,75%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		36,04%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		56,79%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	275,60	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	3.847	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	14.978	Jiwa
		Jumlah KK	4.580	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2.442,00	Unit	63,48%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.123,00	Unit	29,19%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				30,89%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.410,00	Meter	5,58%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18.764,18	Meter	43,42%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.391,00	KK	52,21%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.892,00	KK	41,31%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				46,76%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,00	Ha	2,90%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5.429,11	Meter	16,48%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	20.223,50	Meter	61,37%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,46%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28,06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4.580,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4.119,00	KK	89,93%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,97%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.120,00	Unit	81,10%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.847,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				90,55%	
		TOTAL NILAI			34
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			47,63%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Paru Keude

	55,35	Ha
	55,35	Ha
	989	Unit
	4.414	Jiwa
	1.389	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
409,00	Unit	41,35%	1
-	Ha	0,00%	0
387,00	Unit	39,13%	1
		26,83%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
708,00	KK	50,97%	1
416,00	KK	29,95%	1
		40,46%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
3.061,96	Meter	50,51%	1
		16,84%	
347,00	KK	24,98%	0
347,00	KK	24,98%	0
		0,00%	
1.389,00	KK	100,00%	5
1.286,00	KK	92,58%	5
		96,29%	
989,00	Unit	100,00%	5
989,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		25
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,06%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Paru Cot

	18,89	Ha
	18,89	Ha
	186	Unit
	745	Jiwa
	207	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
89,00	Unit	47,85%	1
-	Ha	0,00%	0
387,00	Unit	208,06%	5
		85,30%	
-	Meter	0,00%	0
1.851,29	Meter	64,98%	3
		32,49%	
62,00	KK	29,95%	1
75,00	KK	36,23%	1
		33,09%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
1.812,52	Meter	84,11%	5
		28,04%	
2,00	KK	0,97%	0
2,00	KK	0,97%	0
		0,00%	
207,00	KK	100,00%	5
207,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
186,00	Unit	100,00%	5
186,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		36
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		54,13%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Baroh Lancok

	19,35	Ha
	19,35	Ha
	392	Unit
	1.635	Jiwa
	495	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
337,00	Unit	85,97%	5
-	Ha	0,00%	0
33,00	Unit	8,42%	0
		28,66%	
-	Meter	0,00%	0
2.668,07	Meter	57,89%	3
		28,94%	
162,00	KK	32,73%	1
174,00	KK	35,15%	1
		33,94%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
4.388,49	Meter	94,70%	5
		31,57%	
152,00	KK	30,71%	1
152,00	KK	30,71%	1
		30,71%	
495,00	KK	100,00%	5
269,00	KK	54,34%	3
		77,17%	
392,00	Unit	100,00%	5
392,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		35
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,28%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	275,60	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	3.847	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	14.978	Jiwa
		Jumlah KK	4.580	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2.442,00	Unit	63,48%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.123,00	Unit	29,19%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				30,89%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.410,00	Meter	5,58%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18.764,18	Meter	43,42%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.391,00	KK	52,21%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.892,00	KK	41,31%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				46,76%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,00	Ha	2,90%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5.429,11	Meter	16,48%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	20.223,50	Meter	61,37%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,46%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.285,00	KK	28,06%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				28,06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4.580,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4.119,00	KK	89,93%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,97%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.120,00	Unit	81,10%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.847,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				90,55%	
			TOTAL NILAI		34
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,63%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Pulo Rheng

	28,00	Ha	
	28,00	Ha	
	93	Unit	
	340	Jiwa	
	107	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
53,00	Unit	56,99%	3
-	Ha	0,00%	0
3,00	Unit	3,23%	0
		19,00%	
410,00	Meter	21,91%	0
805,00	Meter	43,03%	1
		21,51%	
93,00	KK	86,92%	5
3,00	KK	2,80%	0
		43,46%	
-	Ha	0,00%	0
648,00	Meter	66,06%	3
333,00	Meter	33,94%	1
		33,33%	
41,00	KK	38,32%	1
41,00	KK	38,32%	1
		38,32%	
107,00	KK	100,00%	5
101,00	KK	94,39%	5
		97,20%	
15,00	Unit	16,13%	0
93,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
	TOTAL NILAI		30
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,26%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Abah Lueng

	12,92	Ha	
	12,92	Ha	
	117	Unit	
	409	Jiwa	
	117	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
59,00	Unit	50,43%	1
-	Ha	0,00%	0
34,00	Unit	29,06%	1
		26,50%	
-	Meter	0,00%	0
376,91	Meter	13,32%	0
		0,00%	
109,00	KK	93,16%	5
66,00	KK	56,41%	3
		74,79%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
760,02	Meter	76,82%	5
		25,61%	
113,00	KK	96,58%	5
113,00	KK	96,58%	5
		96,58%	
117,00	KK	100,00%	5
116,00	KK	99,15%	5
		99,57%	
117,00	Unit	100,00%	5
117,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		45
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		60,43%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Jiem Jiem

	15,15	Ha	
	15,15	Ha	
	130	Unit	
	581	Jiwa	
	152	KK	

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
127,00	Unit	97,69%	5
-	Ha	0,00%	0
9,00	Unit	6,92%	0
		32,56%	
-	Meter	0,00%	0
1.460,41	Meter	69,32%	3
		34,66%	
146,00	KK	96,05%	5
-	KK	0,00%	0
		48,03%	
-	Ha	0,00%	0
200,00	Meter	15,53%	0
635,48	Meter	49,34%	1
		16,45%	
58,00	KK	38,16%	1
58,00	KK	38,16%	1
		38,16%	
152,00	KK	100,00%	5
152,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
130,00	Unit	100,00%	5
130,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		36
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		52,84%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**275,60**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**3.847**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**14.978**	Jiwa
		Jumlah KK	**4.580**	KK

Blang Baro		
29,51	Ha	
29,51	Ha	
324	Unit	
1.399	Jiwa	
383	KK	

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	2.442,00	Unit	63,48%	**3**	161,00	Unit	49,69%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1.123,00	Unit	29,19%	**1**	70,00	Unit	21,60%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**30,89%**				**16,56%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.410,00	Meter	5,58%	**0**	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	18.764,18	Meter	43,42%	**1**	2.944,29	Meter	44,94%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**21,71%**				**22,47%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.391,00	KK	52,21%	**3**	13,00	KK	3,39%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.892,00	KK	41,31%	**1**	100,00	KK	26,11%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**46,76%**				**13,05%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	8,00	Ha	2,90%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5.429,11	Meter	16,48%	**0**	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	20.223,50	Meter	61,37%	**3**	2.736,98	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**20,46%**				**33,33%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1.285,00	KK	28,06%	**1**	65,00	KK	16,97%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1.285,00	KK	28,06%	**1**	65,00	KK	16,97%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**28,06%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	4.580,00	KK	100,00%	**5**	383,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	4.119,00	KK	89,93%	**5**	383,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**94,97%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3.120,00	Unit	81,10%	**5**	324,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3.847,00	Unit	100,00%	**5**	324,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**90,55%**				**100,00%**	
				TOTAL NILAI	**34**			**TOTAL NILAI**	**28**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**47,63%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**40,77%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE LUENG PUTU

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	31,50	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	392	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	1.625	Jiwa
		Jumlah KK	462	KK

MON SAGAU		
Luas SK	10,80	Ha
Luas Verifikasi	10,80	Ha
Jumlah Bangunan	73	Unit
Jumlah Penduduk	340	Jiwa
Jumlah KK	86	KK

KEUDE		
Luas SK	10,10	Ha
Luas Verifikasi	10,10	Ha
Jumlah Bangunan	170	Unit
Jumlah Penduduk	693	Jiwa
Jumlah KK	212	KK

BLANG GAPU		
Luas SK	10,60	Ha
Luas Verifikasi	10,60	Ha
Jumlah Bangunan	149	Unit
Jumlah Penduduk	-	Jiwa
Jumlah KK	164	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				MON SAGAU				KEUDE				BLANG GAPU			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	377,00	Unit	96,17%	5	73,00	Unit	100,00%	5	169,00	Unit	99,41%	5	135,00	Unit	90,60%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	259,00	Unit	66,07%	3	16,00	Unit	21,92%	0	169,00	Unit	99,41%	5	74,00	Unit	49,66%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				54,08%				33,33%				66,27%				46,76%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	950,00	Meter	18,57%	0	-	Meter	0,00%	0	600,00	Meter	35,29%	1	350,00	Meter	22,58%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.565,00	Meter	69,70%	3	1.665,00	Meter	89,28%	5	1.000,00	Meter	58,82%	3	900,00	Meter	58,06%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				34,85%				44,64%				47,06%				29,03%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	462,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	212,00	KK	100,00%	5	164,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	455,00	KK	98,48%	5	83,00	KK	96,51%	5	212,00	KK	100,00%	5	160,00	KK	97,56%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				99,24%				98,26%				100,00%				98,78%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	5,00	Ha	15,87%	0	-	Ha	0,00%	0	2,00	Ha	19,80%	0	3,00	Ha	28,30%	1
	b. Ketidaktersediaan Drainase	300,00	Meter	11,19%	0	300,00	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.150,00	Meter	42,91%	1	450,00	Meter	29,03%	1	-	Meter	0,00%	0	700,00	Meter	70,00%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,30%				9,68%				0,00%				32,77%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	17,00	KK	3,68%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	17,00	KK	10,37%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	17,00	KK	3,68%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	17,00	KK	10,37%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	462,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	212,00	KK	100,00%	5	164,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	462,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	212,00	KK	100,00%	5	164,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	319,00	Unit	81,38%	5	-	Unit	0,00%	0	170,00	Unit	100,00%	5	149,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	392,00	Unit	100,00%	5	73,00	Unit	100,00%	5	170,00	Unit	100,00%	5	149,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				90,69%				50,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI			42	TOTAL NILAI			36	TOTAL NILAI			44	TOTAL NILAI			43
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			56,17%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			47,99%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			59,05%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			58,19%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK SARAH PANYANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**8,20**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**150**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**476**	Jiwa
		Jumlah KK	**109**	KK

SARAH PANYANG

Luas SK	**3,10**	Ha
Luas Verifikasi	**3,10**	Ha
Jumlah Bangunan	**47**	Unit
Jumlah Penduduk	**236**	Jiwa
Jumlah KK	**53**	KK

DUSUN LHOK DUEK

Luas SK	**5,10**	Ha
Luas Verifikasi	**5,10**	Ha
Jumlah Bangunan	**103**	Unit
Jumlah Penduduk	**240**	Jiwa
Jumlah KK	**56**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	96,00	Unit	64,00%	**3**	42,00	Unit	89,36%	5	54,00	Unit	52,43%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	4,00	Unit	2,67%	**0**	4,00	Unit	8,51%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**21,33%**				**29,79%**				**17,48%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	823,07	Meter	40,29%	**1**	698,36	Meter	100,00%	5	124,71	Meter	9,27%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**20,14%**				**50,00%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	8,00	KK	7,34%	**0**	8,00	KK	15,09%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.381,11	Meter	100,00%	**5**	1.045,45	Meter	0,00%	0	1.335,66	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**33,33%**				**0,00%**				**33,33%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	21,00	KK	19,27%	**0**	20,00	KK	37,74%	1	1,00	KK	1,79%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	21,00	KK	19,27%	**0**	20,00	KK	37,74%	1	1,00	KK	1,79%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**37,74%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	109,00	KK	100,00%	**5**	53,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	63,00	KK	57,80%	**3**	42,00	KK	79,25%	5	21,00	KK	37,50%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**78,90%**				**89,62%**				**68,75%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	150,00	Unit	100,00%	**5**	47,00	Unit	100,00%	5	103,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	150,00	Unit	100,00%	**5**	47,00	Unit	100,00%	5	103,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
				TOTAL NILAI	**27**			**TOTAL NILAI**	**32**			**TOTAL NILAI**	**24**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**36,24%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**43,88%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**31,37%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK KAYEE JATOE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	24,00	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	390	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	1.509	Jiwa
		Jumlah KK	445	KK

BLANG DAYAH			
Luas SK	10,00	Ha	
Luas Verifikasi	10,00	Ha	
Jumlah Bangunan	122	Unit	
Jumlah Penduduk	472	Jiwa	
Jumlah KK	131	KK	

DAYAH CUT			
Luas SK	3,60	Ha	
Luas Verifikasi	3,60	Ha	
Jumlah Bangunan	66	Unit	
Jumlah Penduduk	288	Jiwa	
Jumlah KK	85	KK	

TEUNGOH			
Luas SK	5,10	Ha	
Luas Verifikasi	5,10	Ha	
Jumlah Bangunan	86	Unit	
Jumlah Penduduk	-	Jiwa	
Jumlah KK	110	KK	

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BLANG DAYAH				DAYAH CUT				TEUNGOH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	368,00	Unit	94,36%	5	118,00	Unit	96,72%	5	48,00	Unit	72,73%	3	86,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	233,00	Unit	59,74%	3	96,00	Unit	78,69%	5	35,00	Unit	53,03%	3	29,00	Unit	33,72%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				51,37%				58,47%				41,92%				44,57%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.050,00	Meter	21,65%	0	350,00	Meter	25,93%	1	100,00	Meter	9,09%	0	300,00	Meter	23,08%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.850,00	Meter	58,76%	3	650,00	Meter	48,15%	1	900,00	Meter	81,82%	5	800,00	Meter	61,54%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				29,38%				37,04%				40,91%				30,77%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301,00	KK	67,64%	3	94,00	KK	71,76%	3	77,00	KK	90,59%	5	105,00	KK	95,45%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	322,00	KK	72,36%	3	130,00	KK	99,24%	5	62,00	KK	72,94%	3	18,00	KK	16,36%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				70,00%				85,50%				81,76%				47,73%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3,00	Ha	12,50%	0	-	Ha	0,00%	0	3,00	Ha	83,33%	5	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.900,00	Meter	51,35%	3	600,00	Meter	0,00%	0	500,00	Meter	52,63%	3	400,00	Meter	40,00%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.400,00	Meter	37,84%	1	450,00	Meter	39,13%	1	350,00	Meter	36,84%	1	500,00	Meter	50,00%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,73%				13,04%				57,60%				30,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	205,00	KK	46,07%	1	95,00	KK	72,52%	3	11,00	KK	12,94%	0	28,00	KK	25,45%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	205,00	KK	46,07%	1	95,00	KK	72,52%	3	11,00	KK	12,94%	0	28,00	KK	25,45%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				46,07%				72,52%				0,00%				25,45%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	445,00	KK	100,00%	5	131,00	KK	100,00%	5	85,00	KK	100,00%	5	110,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	386,00	KK	86,74%	5	131,00	KK	100,00%	5	38,00	KK	44,71%	1	103,00	KK	93,64%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,37%				100,00%				72,35%				96,82%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	390,00	Unit	100,00%	5	122,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	86,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI	38			TOTAL NILAI	42			TOTAL NILAI	39			TOTAL NILAI	33	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	52,85%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	59,51%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49,22%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	46,48%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**24,00**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**390**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**1.509**	Jiwa
		Jumlah KK	**445**	KK

GEUNTENG

Luas SK	**5,30**	Ha
Luas Verifikasi	**5,30**	Ha
Jumlah Bangunan	**116**	Unit
Jumlah Penduduk	**391**	Jiwa
Jumlah KK	**119**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	368,00	Unit	94,36%	5	116,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	233,00	Unit	59,74%	3	73,00	Unit	62,93%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				51,37%				54,31%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.050,00	Meter	21,65%	0	300,00	Meter	27,27%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.850,00	Meter	58,76%	3	500,00	Meter	45,45%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				29,38%				36,36%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	301,00	KK	67,64%	3	25,00	KK	21,01%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	322,00	KK	72,36%	3	112,00	KK	94,12%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				70,00%				47,06%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	3,00	Ha	12,50%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.900,00	Meter	51,35%	3	400,00	Meter	66,67%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.400,00	Meter	37,84%	1	100,00	Meter	16,67%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,73%				22,22%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	205,00	KK	46,07%	1	71,00	KK	59,66%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	205,00	KK	46,07%	1	71,00	KK	59,66%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				46,07%				59,66%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	445,00	KK	100,00%	5	119,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	386,00	KK	86,74%	5	114,00	KK	95,80%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,37%				97,90%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	390,00	Unit	100,00%	5	116,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	**38**			**TOTAL NILAI**	**39**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH SEDANG**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH SEDANG**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**52,85%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**52,50%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK PULO PUEB

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**16,07**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**349**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**896**	Jiwa
		Jumlah KK	**283**	KK

DUSUN GAYO		
Luas SK	**4,30**	Ha
Luas Verifikasi	**4,30**	Ha
Jumlah Bangunan	**64**	Unit
Jumlah Penduduk	**317**	Jiwa
Jumlah KK	**95**	KK

DUSUN KUTHANG		
Luas SK	**6,07**	Ha
Luas Verifikasi	**6,07**	Ha
Jumlah Bangunan	**201**	Unit
Jumlah Penduduk	**219**	Jiwa
Jumlah KK	**74**	KK

DUSUN TEUNGOH		
Luas SK	**5,70**	Ha
Luas Verifikasi	**5,70**	Ha
Jumlah Bangunan	**84**	Unit
Jumlah Penduduk	**360**	Jiwa
Jumlah KK	**114**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN GAYO				DUSUN KUTHANG				DUSUN TEUNGOH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	86,00	Unit	24,64%	**0**	13,00	Unit	20,31%	0	32,00	Unit	15,92%	0	41,00	Unit	48,81%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	76,00	Unit	21,78%	**0**	39,00	Unit	60,94%	3	14,00	Unit	6,97%	0	23,00	Unit	27,38%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**0,00%**				**20,31%**				**0,00%**				**25,40%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	548,28	Meter	28,02%	**1**	321,58	Meter	70,28%	3	226,69	Meter	19,68%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**14,01%**				**35,14%**				**0,00%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	142,00	KK	50,18%	**1**	46,00	KK	48,42%	1	34,00	KK	45,95%	1	62,00	KK	54,39%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	87,00	KK	30,74%	**1**	13,00	KK	13,68%	0	29,00	KK	39,19%	1	45,00	KK	39,47%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**40,46%**				**24,21%**				**42,57%**				**46,93%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.257,88	Meter	60,92%	**3**	362,82	Meter	73,86%	3	294,46	Meter	35,70%	1	600,60	Meter	80,20%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**20,31%**				**24,62%**				**11,90%**				**26,73%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	70,00	KK	24,73%	**0**	22,00	KK	23,16%	0	16,00	KK	21,62%	0	32,00	KK	28,07%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	70,00	KK	24,73%	**0**	22,00	KK	23,16%	0	16,00	KK	21,62%	0	32,00	KK	28,07%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**28,07%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	283,00	KK	100,00%	**5**	95,00	KK	100,00%	5	74,00	KK	100,00%	5	114,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	263,00	KK	92,93%	**5**	81,00	KK	85,26%	5	68,00	KK	91,89%	5	114,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**96,47%**				**92,63%**				**95,95%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	349,00	Unit	100,00%	**5**	64,00	Unit	100,00%	5	201,00	Unit	100,00%	5	84,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	349,00	Unit	100,00%	**5**	64,00	Unit	100,00%	5	201,00	Unit	100,00%	5	84,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
		TOTAL NILAI			**26**		**TOTAL NILAI**		**30**		**TOTAL NILAI**		**23**		**TOTAL NILAI**		**33**
		TINGKAT KEKUMUHAN			**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			**38,75%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**42,42%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**35,77%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**46,73%**
		KONTRIBUSI PENANGANAN			**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK CUT NJONG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**10,34**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**186**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**491**	Jiwa
		Jumlah KK	**244**	KK

DUSUN CUT		
Luas SK	**5,50**	Ha
Luas Verifikasi	**5,50**	Ha
Jumlah Bangunan	**112**	Unit
Jumlah Penduduk	**171**	Jiwa
Jumlah KK	**151**	KK

DUSUN RAYA		
Luas SK	**4,84**	Ha
Luas Verifikasi	**4,84**	Ha
Jumlah Bangunan	**74**	Unit
Jumlah Penduduk	**320**	Jiwa
Jumlah KK	**93**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	186,00	Unit	100,00%	**5**	112,00	Unit	100,00%	5	74,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	6,99%	**0**	2,00	Unit	1,79%	0	11,00	Unit	14,86%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**33,33%**				**33,33%**				**33,33%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6,00	KK	2,46%	**0**	1,00	KK	0,66%	0	5,00	KK	5,38%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,00	KK	0,41%	**0**	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,08%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.607,83	Meter	76,50%	**5**	1.184,01	Meter	84,39%	5	423,82	Meter	60,65%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**25,50%**				**28,13%**				**20,22%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	106,00	KK	43,44%	**1**	60,00	KK	39,74%	1	46,00	KK	49,46%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	106,00	KK	43,44%	**1**	60,00	KK	39,74%	1	46,00	KK	49,46%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**43,44%**				**39,74%**				**49,46%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	244,00	KK	100,00%	**5**	151,00	KK	100,00%	5	93,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	244,00	KK	100,00%	**5**	151,00	KK	100,00%	5	93,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	186,00	Unit	100,00%	**5**	112,00	Unit	100,00%	5	74,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**				**50,00%**	
				TOTAL NILAI	**27**			**TOTAL NILAI**	**27**			**TOTAL NILAI**	**25**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**36,04%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**35,89%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**36,14%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

f. NUMERIK MANYANG LANCOK

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	6,32	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	149	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	458	Jiwa
		Jumlah KK	187	KK

DUSUN LHOK DAMA		
Luas SK	2,63	Ha
Luas Verifikasi	2,63	Ha
Jumlah Bangunan	46	Unit
Jumlah Penduduk	142	Jiwa
Jumlah KK	56	KK

DUSUN MAK SAED		
Luas SK	1,67	Ha
Luas Verifikasi	1,67	Ha
Jumlah Bangunan	40	Unit
Jumlah Penduduk	144	Jiwa
Jumlah KK	49	KK

DUSUN MUSLEM		
Luas SK	2,02	Ha
Luas Verifikasi	2,02	Ha
Jumlah Bangunan	63	Unit
Jumlah Penduduk	-	Jiwa
Jumlah KK	82	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	94,00	Unit	63,09%	3	29,00	Unit	63,04%	3	15,00	Unit	37,50%	1	50,00	Unit	79,37%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,03%				21,01%				12,50%				26,46%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	871,86	Meter	65,56%	3	-	Meter	0,00%	0	378,12	Meter	82,07%	5	493,75	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,78%				0,00%				41,04%				50,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	187,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	185,00	KK	98,93%	5	56,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	80,00	KK	97,56%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				99,47%				100,00%				100,00%				98,78%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.079,35	Meter	91,50%	5	485,28	Meter	82,87%	5	296,48	Meter	100,00%	5	297,59	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				30,50%				27,62%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	88,00	KK	47,06%	1	17,00	KK	30,36%	1	18,00	KK	36,73%	1	53,00	KK	64,63%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	88,00	KK	47,06%	1	17,00	KK	30,36%	1	18,00	KK	36,73%	1	53,00	KK	64,63%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				47,06%				30,36%				36,73%				64,63%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	187,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	187,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	149,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5	63,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	149,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5	63,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		43		TOTAL NILAI		40		TOTAL NILAI		43		TOTAL NILAI		51
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		61,55%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		54,14%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		60,51%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		67,60%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

g. NUMERIK PARU KEUDE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	55,35	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	989	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	4.414	Jiwa
		Jumlah KK	1.389	KK

DUSUN BARO		
Luas SK	22,18	Ha
Luas Verifikasi	22,18	Ha
Jumlah Bangunan	358	Unit
Jumlah Penduduk	1.748	Jiwa
Jumlah KK	525	KK

DUSUN KEURANJI		
Luas SK	21,79	Ha
Luas Verifikasi	21,79	Ha
Jumlah Bangunan	422	Unit
Jumlah Penduduk	1.814	Jiwa
Jumlah KK	574	KK

DUSUN SIMPANG		
Luas SK	11,38	Ha
Luas Verifikasi	11,38	Ha
Jumlah Bangunan	209	Unit
Jumlah Penduduk	852	Jiwa
Jumlah KK	290	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BARO				DUSUN KEURANJI				DUSUN SIMPANG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	409,00	Unit	41,35%	1	75,00	Unit	20,95%	0	206,00	Unit	48,82%	1	128,00	Unit	61,24%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	387,00	Unit	39,13%	1	215,00	Unit	60,06%	3	116,00	Unit	27,49%	1	56,00	Unit	26,79%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,83%				20,02%				25,43%				29,35%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	708,00	KK	50,97%	1	261,00	KK	49,71%	1	314,00	KK	54,70%	3	133,00	KK	45,86%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	416,00	KK	29,95%	1	75,00	KK	14,29%	0	224,00	KK	39,02%	1	117,00	KK	40,34%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,46%				24,86%				46,86%				43,10%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3.061,96	Meter	50,51%	1	1.147,58	Meter	36,46%	1	1.232,10	Meter	55,20%	3	682,28	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				16,84%				12,15%				18,40%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	347,00	KK	24,98%	0	117,00	KK	22,29%	0	164,00	KK	28,57%	1	66,00	KK	22,76%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	347,00	KK	24,98%	0	117,00	KK	22,29%	0	164,00	KK	28,57%	1	66,00	KK	22,76%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				28,57%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.389,00	KK	100,00%	5	525,00	KK	100,00%	5	574,00	KK	100,00%	5	290,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.286,00	KK	92,58%	5	445,00	KK	84,76%	5	574,00	KK	100,00%	5	267,00	KK	92,07%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				96,29%				92,38%				100,00%				96,03%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	989,00	Unit	100,00%	5	358,00	Unit	100,00%	5	422,00	Unit	100,00%	5	209,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	989,00	Unit	100,00%	5	358,00	Unit	100,00%	5	422,00	Unit	100,00%	5	209,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	31			TOTAL NILAI	31	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	40,06%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,63%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	45,61%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	43,12%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

h. NUMERIK PARU COT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**18,89**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**186**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**745**	Jiwa
		Jumlah KK	**207**	KK

DUSUN KEUDE SIBLAH

Luas SK	**5,69**	Ha
Luas Verifikasi	**5,69**	Ha
Jumlah Bangunan	**85**	Unit
Jumlah Penduduk	**366**	Jiwa
Jumlah KK	**104**	KK

DUSUN PAIMAN HASAN

Luas SK	**13,20**	Ha
Luas Verifikasi	**13,20**	Ha
Jumlah Bangunan	**101**	Unit
Jumlah Penduduk	**379**	Jiwa
Jumlah KK	**103**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	89,00	Unit	47,85%	1	75,00	Unit	88,24%	5	14,00	Unit	13,86%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2,00	Unit	1,08%	0	-	Unit	0,00%	0	2,00	Unit	1,98%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				15,95%				29,41%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.851,29	Meter	64,98%	3	565,10	Meter	60,34%	3	1.286,20	Meter	67,25%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,49%				30,17%				33,62%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	62,00	KK	29,95%	1	59,00	KK	56,73%	3	3,00	KK	2,91%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	75,00	KK	36,23%	1	75,00	KK	72,12%	3	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				33,09%				64,42%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.812,52	Meter	84,11%	5	316,44	Meter	48,04%	1	1.496,08	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				28,04%				16,01%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	2,00	KK	0,97%	0	2,00	KK	1,92%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	2,00	KK	0,97%	0	2,00	KK	1,92%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	207,00	KK	100,00%	5	104,00	KK	100,00%	5	103,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	207,00	KK	100,00%	5	104,00	KK	100,00%	5	103,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	186,00	Unit	100,00%	5	85,00	Unit	100,00%	5	101,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	186,00	Unit	100,00%	5	85,00	Unit	100,00%	5	101,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		28
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		44,22%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		48,57%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,14%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

i. NUMERIK BAROH LANCOK

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	19,35	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	392	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	1.635	Jiwa
		Jumlah KK	495	KK

BALE ANGEN		
Luas SK	4,94	Ha
Luas Verifikasi	4,94	Ha
Jumlah Bangunan	110	Unit
Jumlah Penduduk	451	Jiwa
Jumlah KK	135	KK

MONBHO		
Luas SK	5,43	Ha
Luas Verifikasi	5,43	Ha
Jumlah Bangunan	138	Unit
Jumlah Penduduk	583	Jiwa
Jumlah KK	179	KK

MON DAROE		
Luas SK	8,98	Ha
Luas Verifikasi	8,98	Ha
Jumlah Bangunan	144	Unit
Jumlah Penduduk	601	Jiwa
Jumlah KK	181	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BALE ANGEN				MONBHO				MON DAROE			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	337,00	Unit	85,97%	5	97,00	Unit	88,18%	5	102,00	Unit	73,91%	3	138,00	Unit	95,83%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	33,00	Unit	8,42%	0	13,00	Unit	11,82%	0	17,00	Unit	12,32%	0	3,00	Unit	2,08%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				28,66%				29,39%				24,64%				31,94%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.668,07	Meter	57,89%	3	507,21	Meter	44,49%	1	1.204,62	Meter	81,47%	5	956,24	Meter	48,05%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,94%				22,24%				40,73%				24,02%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	162,00	KK	32,73%	1	90,00	KK	66,67%	3	36,00	KK	20,11%	0	36,00	KK	19,89%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	174,00	KK	35,15%	1	99,00	KK	73,33%	3	32,00	KK	17,88%	0	43,00	KK	23,76%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				33,94%				70,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	4.388,49	Meter	94,70%	5	1.246,16	Meter	100,00%	5	1.049,05	Meter	100,00%	5	2.093,28	Meter	89,49%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				31,57%				33,33%				33,33%				29,83%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	152,00	KK	30,71%	1	8,00	KK	5,93%	0	79,00	KK	44,13%	1	65,00	KK	35,91%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	152,00	KK	30,71%	1	8,00	KK	5,93%	0	79,00	KK	44,13%	1	65,00	KK	35,91%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				30,71%				0,00%				44,13%				35,91%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	495,00	KK	100,00%	5	135,00	KK	100,00%	5	179,00	KK	100,00%	5	181,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	269,00	KK	54,34%	3	116,00	KK	85,93%	5	25,00	KK	13,97%	0	128,00	KK	70,72%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				77,17%				92,96%				50,00%				85,36%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	392,00	Unit	100,00%	5	110,00	Unit	100,00%	5	138,00	Unit	100,00%	5	144,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	392,00	Unit	100,00%	5	110,00	Unit	100,00%	5	138,00	Unit	100,00%	5	144,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		37		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		31
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,28%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		49,70%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,83%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,87%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

j. NUMERIK PULO RHENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**28,00**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	**93**	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	**340**	Jiwa
		Jumlah KK	**107**	KK

BAROH

Luas SK	**13,00**	Ha
Luas Verifikasi	**13,00**	Ha
Jumlah Bangunan	**33**	Unit
Jumlah Penduduk	**132**	Jiwa
Jumlah KK	**43**	KK

TUNONG

Luas SK	**15,00**	Ha
Luas Verifikasi	**15,00**	Ha
Jumlah Bangunan	**60**	Unit
Jumlah Penduduk	**208**	Jiwa
Jumlah KK	**64**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	53,00	Unit	56,99%	**3**	29,00	Unit	87,88%	5	24,00	Unit	40,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	3,00	Unit	3,23%	**0**	-	Unit	0,00%	0	3,00	Unit	5,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**19,00%**				**29,29%**				**13,33%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	410,00	Meter	21,91%	**0**	240,00	Meter	30,85%	1	170,00	Meter	15,55%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	805,00	Meter	43,03%	**1**	240,00	Meter	30,85%	1	565,00	Meter	51,69%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**21,51%**				**30,85%**				**25,85%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	93,00	KK	86,92%	**5**	40,00	KK	93,02%	5	53,00	KK	82,81%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3,00	KK	2,80%	**0**	3,00	KK	6,98%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**43,46%**				**46,51%**				**41,41%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	648,00	Meter	66,06%	**3**	-	Meter	0,00%	0	648,00	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	333,00	Meter	33,94%	**1**	333,00	Meter	100,00%	5	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**33,33%**				**33,33%**				**33,33%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	41,00	KK	38,32%	**1**	16,00	KK	37,21%	1	25,00	KK	39,06%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	41,00	KK	38,32%	**1**	16,00	KK	37,21%	1	25,00	KK	39,06%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**38,32%**				**37,21%**				**39,06%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	107,00	KK	100,00%	**5**	43,00	KK	100,00%	5	64,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	101,00	KK	94,39%	**5**	37,00	KK	86,05%	5	64,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**97,20%**				**93,02%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	15,00	Unit	16,13%	**0**	-	Unit	0,00%	0	15,00	Unit	25,00%	1
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	93,00	Unit	100,00%	**5**	33,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**				**62,50%**	
				TOTAL NILAI	**30**			**TOTAL NILAI**	**34**			**TOTAL NILAI**	**32**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**43,26%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**45,75%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**45,07%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

k. NUMERIK ABAH LUENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	9,62	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	117	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	409	Jiwa
		Jumlah KK	117	KK

DUSUN ALUE PISANG		
Luas SK	1,64	Ha
Luas Verifikasi	1,64	Ha
Jumlah Bangunan	23	Unit
Jumlah Penduduk	76	Jiwa
Jumlah KK	23	KK

DUSUN PANTEI BREUH		
Luas SK	2,43	Ha
Luas Verifikasi	2,43	Ha
Jumlah Bangunan	29	Unit
Jumlah Penduduk	74	Jiwa
Jumlah KK	29	KK

DUSUN TRAN BARAT		
Luas SK	5,55	Ha
Luas Verifikasi	5,55	Ha
Jumlah Bangunan	65	Unit
Jumlah Penduduk	259	Jiwa
Jumlah KK	65	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	59,00	Unit	50,43%	1	15,00	Unit	65,22%	3	14,00	Unit	48,28%	1	30,00	Unit	46,15%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	34,00	Unit	29,06%	1	7,00	Unit	30,43%	1	6,00	Unit	20,69%	0	21,00	Unit	32,31%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,50%				31,88%				16,09%				26,15%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	376,91	Meter	13,32%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	376,91	Meter	41,42%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				20,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	109,00	KK	93,16%	5	18,00	KK	78,26%	5	29,00	KK	100,00%	5	62,00	KK	95,38%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	66,00	KK	56,41%	3	1,00	KK	4,35%	0	15,00	KK	51,72%	3	50,00	KK	76,92%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				74,79%				39,13%				75,86%				86,15%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	760,02	Meter	76,82%	5	240,00	Meter	100,00%	5	520,02	Meter	100,00%	5	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				25,61%				33,33%				33,33%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	113,00	KK	96,58%	5	20,00	KK	86,96%	5	29,00	KK	100,00%	5	64,00	KK	98,46%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	113,00	KK	96,58%	5	20,00	KK	86,96%	5	29,00	KK	100,00%	5	64,00	KK	98,46%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				96,58%				86,96%				100,00%				98,46%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	117,00	KK	100,00%	5	23,00	KK	100,00%	5	29,00	KK	100,00%	5	65,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	116,00	KK	99,15%	5	22,00	KK	95,65%	5	29,00	KK	100,00%	5	65,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,57%				97,83%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	117,00	Unit	100,00%	5	23,00	Unit	100,00%	5	29,00	Unit	100,00%	5	65,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	117,00	Unit	100,00%	5	23,00	Unit	100,00%	5	29,00	Unit	100,00%	5	65,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	45			TOTAL NILAI	44			TOTAL NILAI	44			TOTAL NILAI	43	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	60,43%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	55,59%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	60,76%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	61,64%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

1. NUMERIK JIEM JIEM

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	15,15	Ha
Kecamatan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Bangunan**	130	Unit
Kawasan	**: BANDAR BARU**	**Jumlah Penduduk**	581	Jiwa
		Jumlah KK	152	KK

BAROH		
Luas SK	4,49	Ha
Luas Verifikasi	4,49	Ha
Jumlah Bangunan	74	Unit
Jumlah Penduduk	345	Jiwa
Jumlah KK	86	KK

TUNONG		
Luas SK	10,66	Ha
Luas Verifikasi	10,66	Ha
Jumlah Bangunan	56	Unit
Jumlah Penduduk	236	Jiwa
Jumlah KK	66	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	127,00	Unit	97,69%	5	73,00	Unit	98,65%	5	54,00	Unit	96,43%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	6,92%	0	1,00	Unit	1,35%	0	8,00	Unit	14,29%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				32,56%				32,88%				32,14%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.460,41	Meter	69,32%	3	289,76	Meter	52,59%	3	1.170,66	Meter	75,24%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				34,66%				26,29%				37,62%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	146,00	KK	96,05%	5	85,00	KK	98,84%	5	61,00	KK	92,42%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				48,03%				49,42%				46,21%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	200,00	Meter	15,53%	0	-	Meter	0,00%	0	200,00	Meter	86,03%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	635,48	Meter	49,34%	1	603,00	Meter	57,13%	3	32,48	Meter	13,97%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				16,45%				19,04%				28,68%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	58,00	KK	38,16%	1	36,00	KK	41,86%	1	22,00	KK	33,33%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	58,00	KK	38,16%	1	36,00	KK	41,86%	1	22,00	KK	33,33%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				38,16%				41,86%				33,33%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	152,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	152,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	130,00	Unit	100,00%	5	74,00	Unit	100,00%	5	56,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	130,00	Unit	100,00%	5	74,00	Unit	100,00%	5	56,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		36		TOTAL NILAI		38		TOTAL NILAI		40
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		52,84%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		52,79%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		54,00%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

m. NUMERIK BLANG BARO

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	29,51	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	324	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	1.399	Jiwa
		Jumlah KK	383	KK

BARAT		
Luas SK	11,08	Ha
Luas Verifikasi	11,08	Ha
Jumlah Bangunan	116	Unit
Jumlah Penduduk	457	Jiwa
Jumlah KK	132	KK

BLANG SUNONG		
Luas SK	10,46	Ha
Luas Verifikasi	10,46	Ha
Jumlah Bangunan	120	Unit
Jumlah Penduduk	591	Jiwa
Jumlah KK	152	KK

DUSUN TEUNGOH		
Luas SK	7,97	Ha
Luas Verifikasi	7,97	Ha
Jumlah Bangunan	88	Unit
Jumlah Penduduk	351	Jiwa
Jumlah KK	99	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BARAT				BLANG SUNONG				DUSUN TEUNGOH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	161,00	Unit	49,69%	1	111,00	Unit	95,69%	5	48,00	Unit	40,00%	1	2,00	Unit	2,27%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	70,00	Unit	21,60%	0	23,00	Unit	19,83%	0	30,00	Unit	25,00%	1	17,00	Unit	19,32%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				16,56%				31,90%				21,67%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.944,29	Meter	44,94%	1	1.401,00	Meter	55,09%	3	357,24	Meter	15,54%	0	1.186,05	Meter	69,35%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				22,47%				27,55%				0,00%				34,67%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	13,00	KK	3,39%	0	-	KK	0,00%	0	11,00	KK	7,24%	0	2,00	KK	2,02%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100,00	KK	26,11%	1	1,00	KK	0,76%	0	-	KK	0,00%	0	99,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				13,05%				0,00%				0,00%				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.736,98	Meter	100,00%	5	1.098,71	Meter	100,00%	5	413,21	Meter	100,00%	5	1.225,06	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	65,00	KK	16,97%	0	34,00	KK	25,76%	1	26,00	KK	17,11%	0	5,00	KK	5,05%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	65,00	KK	16,97%	0	34,00	KK	25,76%	1	26,00	KK	17,11%	0	5,00	KK	5,05%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				25,76%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	383,00	KK	100,00%	5	132,00	KK	100,00%	5	152,00	KK	100,00%	5	99,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	383,00	KK	100,00%	5	132,00	KK	100,00%	5	152,00	KK	100,00%	5	99,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	324,00	Unit	100,00%	5	116,00	Unit	100,00%	5	120,00	Unit	100,00%	5	88,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	324,00	Unit	100,00%	5	116,00	Unit	100,00%	5	120,00	Unit	100,00%	5	88,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		33
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,77%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,50%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		36,43%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,43%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

3. NUMERIK KECAMATAN BANDAR DUA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	254,16	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	2.087	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	8.851	Jiwa
		Jumlah KK	2.598	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	916,00	Unit	43,89%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	399,00	Unit	19,12%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,63%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4.730,00	Meter	13,42%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.867,73	Meter	30,84%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				15,42%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973,00	KK	37,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712,00	KK	27,41%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32,43%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	3.451,00	Meter	11,03%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.536,88	Meter	20,90%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665,00	KK	25,60%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665,00	KK	25,60%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,60%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.535,00	KK	97,58%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.313,00	KK	89,03%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,30%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.946,00	Unit	93,24%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.973,00	Unit	94,54%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				93,89%	
		TOTAL NILAI			26
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			39,32%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Keude Ulee Gle

Luas SK	23,66	Ha
Luas Verifikasi	23,66	Ha
Jumlah Bangunan	241	Unit
Jumlah Penduduk	1.055	Jiwa
Jumlah KK	323	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
104,00	Unit	43,15%	1
-	Ha	0,00%	0
28,00	Unit	11,62%	0
		14,38%	
2.000,00	Meter	38,46%	1
2.990,00	Meter	57,50%	3
		47,98%	
146,00	KK	45,20%	1
1,00	KK	0,31%	0
		22,60%	
-	Ha	0,00%	0
2.010,00	Meter	0,00%	0
1.250,00	Meter	30,41%	1
		10,14%	
14,00	KK	4,33%	0
14,00	KK	4,33%	0
		0,00%	
260,00	KK	80,50%	5
257,00	KK	79,57%	5
		80,03%	
241,00	Unit	100,00%	5
241,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
TOTAL NILAI			27
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			39,30%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

Alue Keutapang

Luas SK	19,08	Ha
Luas Verifikasi	19,08	Ha
Jumlah Bangunan	141	Unit
Jumlah Penduduk	619	Jiwa
Jumlah KK	191	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
138,00	Unit	97,87%	5
-	Ha	0,00%	0
21,00	Unit	14,89%	0
		32,62%	
2.730,00	Meter	45,72%	1
1.811,00	Meter	30,33%	1
		38,03%	
91,00	KK	47,64%	1
46,00	KK	24,08%	0
		23,82%	
-	Ha	0,00%	0
1.441,00	Meter	46,45%	1
461,00	Meter	14,86%	0
		15,48%	
75,00	KK	39,27%	1
75,00	KK	39,27%	1
		39,27%	
191,00	KK	100,00%	5
191,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
-	Unit	0,00%	0
		0,00%	
TOTAL NILAI			21
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			35,60%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

Asan Kumbang

Luas SK	9,54	Ha
Luas Verifikasi	9,54	Ha
Jumlah Bangunan	90	Unit
Jumlah Penduduk	852	Jiwa
Jumlah KK	103	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
47,00	Unit	52,22%	3
-	Ha	0,00%	0
36,00	Unit	40,00%	1
		30,74%	
-	Meter	0,00%	0
265,55	Meter	23,16%	0
		0,00%	
55,00	KK	53,40%	3
16,00	KK	15,53%	0
		26,70%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
265,55	Meter	23,16%	0
		0,00%	
33,00	KK	32,04%	1
33,00	KK	32,04%	1
		32,04%	
103,00	KK	100,00%	5
94,00	KK	91,26%	5
		95,63%	
90,00	Unit	100,00%	5
90,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
TOTAL NILAI			29
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			40,73%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	254,16	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	2.087	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	8.851	Jiwa
		Jumlah KK	2.598	KK

Paya Pisang Klat		Blang Dalam		Muko Kuthang	
Luas SK	23,34 Ha	Luas SK	34,41 Ha		17,56 Ha
Luas Verifikasi	23,34 Ha	Luas Verifikasi	34,41 Ha		17,56 Ha
Jumlah Bangunan	251 Unit	Jumlah Bangunan	220 Unit		160 Unit
Jumlah Penduduk	1.034 Jiwa	Jumlah Penduduk	973 Jiwa		700 Jiwa
Jumlah KK	294 KK	Jumlah KK	292 KK		187 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	916,00	Unit	43,89%	1	84,00	Unit	33,47%	1	21,00	Unit	9,55%	0	76,00	Unit	47,50%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	399,00	Unit	19,12%	0	61,00	Unit	24,30%	0	12,00	Unit	5,45%	0	89,00	Unit	55,63%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,63%				11,16%				0,00%				34,38%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4.730,00	Meter	13,42%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.867,73	Meter	30,84%	1	1.687,41	Meter	47,31%	1	261,83	Meter	8,73%	0	350,50	Meter	12,44%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				15,42%				23,66%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973,00	KK	37,45%	1	50,00	KK	17,01%	0	66,00	KK	22,60%	0	91,00	KK	48,66%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712,00	KK	27,41%	1	127,00	KK	43,20%	1	57,00	KK	19,52%	0	44,00	KK	23,53%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32,43%				21,60%				0,00%				24,33%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	3.451,00	Meter	11,03%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.536,88	Meter	20,90%	0	964,07	Meter	27,03%	1	261,83	Meter	8,73%	0	350,50	Meter	12,44%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				9,01%				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665,00	KK	25,60%	1	130,00	KK	44,22%	1	1,00	KK	0,34%	0	49,00	KK	26,20%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665,00	KK	25,60%	1	130,00	KK	44,22%	1	1,00	KK	0,34%	0	49,00	KK	26,20%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,60%				44,22%				0,00%				26,20%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.535,00	KK	97,58%	5	294,00	KK	100,00%	5	292,00	KK	100,00%	5	187,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.313,00	KK	89,03%	5	203,00	KK	69,05%	3	262,00	KK	89,73%	5	161,00	KK	86,10%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,30%				84,52%				94,86%				62,03%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.946,00	Unit	93,24%	5	251,00	Unit	100,00%	5	220,00	Unit	100,00%	5	160,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.973,00	Unit	94,54%	5	251,00	Unit	100,00%	5	220,00	Unit	100,00%	5	160,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				93,89%				100,00%				100,00%				100,00%	
				TOTAL NILAI	26			TOTAL NILAI	24			TOTAL NILAI	20			TOTAL NILAI	27
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,32%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	42,02%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	27,84%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,28%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**254,16**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**2.087**	Unit
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**8.851**	Jiwa
		Jumlah KK	**2.598**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	916,00	Unit	43,89%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	399,00	Unit	19,12%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,63%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4.730,00	Meter	13,42%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.867,73	Meter	30,84%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				15,42%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973,00	KK	37,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712,00	KK	27,41%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32,43%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	3.451,00	Meter	11,03%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.536,88	Meter	20,90%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665,00	KK	25,60%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665,00	KK	25,60%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,60%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.535,00	KK	97,58%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.313,00	KK	89,03%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,30%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.946,00	Unit	93,24%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.973,00	Unit	94,54%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				93,89%	
			TOTAL NILAI		26
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,32%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Kuta Krueng

11,44	Ha
11,44	Ha
84	Unit
436	Jiwa
111	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
84,00	Unit	100,00%	5
-	Ha	0,00%	0
1,00	Unit	1,19%	0
		33,33%	
-	Meter	0,00%	0
530,02	Meter	39,65%	1
		19,83%	
23,00	KK	20,72%	0
44,00	KK	39,64%	1
		19,82%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
530,02	Meter	39,65%	1
		13,22%	
38,00	KK	34,23%	1
38,00	KK	34,23%	1
		34,23%	
111,00	KK	100,00%	5
105,00	KK	94,59%	5
		97,30%	
84,00	Unit	100,00%	5
84,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		30
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,39%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Blang Kuta

31,38	Ha
31,38	Ha
208	Unit
852	Jiwa
246	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
139,00	Unit	66,83%	3
-	Ha	0,00%	0
1,00	Unit	0,48%	0
		22,28%	
-	Meter	0,00%	0
710,79	Meter	22,62%	0
		0,00%	
84,00	KK	34,15%	1
160,00	KK	65,04%	3
		49,59%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
193,28	Meter	6,15%	0
		0,00%	
95,00	KK	38,62%	1
95,00	KK	38,62%	1
		38,62%	
246,00	KK	100,00%	5
225,00	KK	91,46%	5
		95,73%	
208,00	Unit	100,00%	5
208,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		29
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,75%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Alue Sane

21,52	Ha
21,52	Ha
168	Unit
710	Jiwa
195	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
161,00	Unit	95,83%	5
-	Ha	0,00%	0
16,00	Unit	9,52%	0
		31,94%	
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
195,00	KK	100,00%	5
195,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
		0,00%	
79,00	KK	40,51%	1
79,00	KK	40,51%	1
		40,51%	
195,00	KK	100,00%	5
195,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
168,00	Unit	100,00%	5
168,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		37
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		53,21%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha			
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**254,16**	Ha		**20,99**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**2.087**	Unit		**20,99**	Ha
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**8.851**	Jiwa		**186**	Unit
		Jumlah KK	**2.598**	KK		**846**	Jiwa
						250	KK

ASPEK	**KRITERIA**	**KONDISI AWAL (BASELINE)**				**KONDISI AWAL (BASELINE)**				**KONDISI AWAL (BASELINE)**			
		NUMERIK	**SATUAN**	**PROSEN (%)**	**NILAI**	**NUMERIK**	**SAT.**	**PROSEN (%)**	**NILAI**	**NUMERIK**	**SAT.**	**PROSEN (%)**	**NILAI**
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	916,00	Unit	43,89%	1	51,00	Unit	27,42%	1	11,00	Unit	3,25%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	399,00	Unit	19,12%	0	13,00	Unit	6,99%	0	54,00	Unit	15,98%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**14,63%**				**9,14%**				**0,00%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4.730,00	Meter	13,42%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.867,73	Meter	30,84%	1	514,66	Meter	32,61%	1	1.745,97	Meter	32,31%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**15,42%**				**16,31%**				**16,16%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	973,00	KK	37,45%	1	22,00	KK	8,80%	0	150,00	KK	36,95%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	712,00	KK	27,41%	1	19,00	KK	7,60%	0	3,00	KK	0,74%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**32,43%**				**0,00%**				**18,47%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	3.451,00	Meter	11,03%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.536,88	Meter	20,90%	0	514,66	Meter	32,61%	1	1.745,97	Meter	32,31%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**0,00%**				**10,87%**				**10,77%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	665,00	KK	25,60%	1	14,00	KK	5,60%	0	137,00	KK	33,74%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	665,00	KK	25,60%	1	14,00	KK	5,60%	0	137,00	KK	33,74%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**25,60%**				**0,00%**				**33,74%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.535,00	KK	97,58%	5	250,00	KK	100,00%	5	406,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.313,00	KK	89,03%	5	216,00	KK	86,40%	5	404,00	KK	99,51%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**93,30%**				**93,20%**				**99,75%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.946,00	Unit	93,24%	5	186,00	Unit	100,00%	5	338,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.973,00	Unit	94,54%	5	186,00	Unit	100,00%	5	338,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**93,89%**				**100,00%**				**100,00%**	
				TOTAL NILAI	**26**			**TOTAL NILAI**	**23**			**TOTAL NILAI**	**25**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**39,32%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**32,79%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**39,84%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE ULEE GLE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	23,66	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	241	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	1.055	Jiwa
		Jumlah KK	323	KK

LUENG TENGOH		
Luas SK	7,70	Ha
Luas Verifikasi	7,70	Ha
Jumlah Bangunan	77	Unit
Jumlah Penduduk	345	Jiwa
Jumlah KK	103	KK

KEUDE		
Luas SK	4,60	Ha
Luas Verifikasi	4,60	Ha
Jumlah Bangunan	50	Unit
Jumlah Penduduk	212	Jiwa
Jumlah KK	63	KK

KAYEE ADANG		
Luas SK	11,36	Ha
Luas Verifikasi	11,36	Ha
Jumlah Bangunan	114	Unit
Jumlah Penduduk	498	Jiwa
Jumlah KK	157	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				LUENG TENGOH				KEUDE				KAYEE ADANG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	104,00	Unit	43,15%	1	4,00	Unit	5,19%	0	49,00	Unit	98,00%	5	51,00	Unit	44,74%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	28,00	Unit	11,62%	0	4,00	Unit	5,19%	0	-	Unit	0,00%	0	24,00	Unit	21,05%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,38%				0,00%				32,67%				14,91%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.000,00	Meter	38,46%	1	-	Meter	0,00%	0	200,00	Meter	33,33%	1	1.800,00	Meter	58,06%	3
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.990,00	Meter	57,50%	3	1.500,00	Meter	100,00%	5	250,00	Meter	41,67%	1	1.240,00	Meter	40,00%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				47,98%				50,00%				37,50%				49,03%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	146,00	KK	45,20%	1	4,00	KK	3,88%	0	-	KK	0,00%	0	142,00	KK	90,45%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,00	KK	0,31%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,59%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				22,60%				0,00%				0,00%				45,22%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.010,00	Meter	48,91%	1	-	Meter	0,00%	0	250,00	Meter	62,50%	3	1.760,00	Meter	64,94%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.250,00	Meter	30,41%	1	950,00	Meter	95,00%	5	150,00	Meter	37,50%	1	150,00	Meter	5,54%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				26,44%				31,67%				33,33%				21,65%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14,00	KK	4,33%	0	1,00	KK	0,97%	0	-	KK	0,00%	0	13,00	KK	8,28%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	14,00	KK	4,33%	0	1,00	KK	0,97%	0	-	KK	0,00%	0	13,00	KK	8,28%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	260,00	KK	80,50%	5	103,00	KK	100,00%	5	-	KK	0,00%	0	157,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	257,00	KK	79,57%	5	103,00	KK	100,00%	5	-	KK	0,00%	0	154,00	KK	98,09%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				80,03%				100,00%				0,00%				99,04%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	241,00	Unit	100,00%	5	77,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5	114,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	127,00	Unit	52,70%	3	77,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5	114,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				76,35%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		21		TOTAL NILAI		33	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,25%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,24%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,07%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,12%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK ALUE KEUTAPANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**19,08**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**141**	Unit
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**619**	Jiwa
		Jumlah KK	**191**	KK

DUSUN TGK CHIK GEULEMPANG PAYONG

Luas SK	**8,46**	Ha
Luas Verifikasi	**8,46**	Ha
Jumlah Bangunan	**60**	Unit
Jumlah Penduduk	**250**	Jiwa
Jumlah KK	**78**	KK

TGK CHIK ALUE KEUTAPANG

Luas SK	**10,62**	Ha
Luas Verifikasi	**10,62**	Ha
Jumlah Bangunan	**81**	Unit
Jumlah Penduduk	**369**	Jiwa
Jumlah KK	**113**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	138,00	Unit	97,87%	5	59,00	Unit	98,33%	5	79,00	Unit	97,53%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	21,00	Unit	14,89%	0	14,00	Unit	23,33%	0	7,00	Unit	8,64%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				32,62%				32,78%				32,51%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2.730,00	Meter	45,72%	1	2.000,00	Meter	50,00%	1	730,00	Meter	37,04%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.811,00	Meter	30,33%	1	1.100,00	Meter	27,50%	1	711,00	Meter	36,07%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				38,03%				38,75%				36,56%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	91,00	KK	47,64%	1	16,00	KK	20,51%	0	75,00	KK	66,37%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	46,00	KK	24,08%	0	39,00	KK	50,00%	1	7,00	KK	6,19%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				23,82%				25,00%				33,19%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.441,00	Meter	46,45%	1	1.200,00	Meter	0,00%	0	241,00	Meter	18,51%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	461,00	Meter	14,86%	0	100,00	Meter	5,56%	0	361,00	Meter	27,73%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,48%				0,00%				9,24%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	75,00	KK	39,27%	1	41,00	KK	52,56%	3	34,00	KK	30,09%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	75,00	KK	39,27%	1	41,00	KK	52,56%	3	34,00	KK	30,09%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				39,27%				52,56%				30,09%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	191,00	KK	100,00%	5	78,00	KK	100,00%	5	113,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	191,00	KK	100,00%	5	78,00	KK	100,00%	5	113,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	141,00	Unit	100,00%	5	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				0,00%				0,00%	
				TOTAL NILAI	26			TOTAL NILAI	24			TOTAL NILAI	23
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	42,75%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,58%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,51%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK ASAN KUMBANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**9,54**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**90**	Unit
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**412**	Jiwa
		Jumlah KK	**103**	KK

DUSUN MULIA		
Luas SK	**2,60**	Ha
Luas Verifikasi	**2,60**	Ha
Jumlah Bangunan	**31**	Unit
Jumlah Penduduk	**137**	Jiwa
Jumlah KK	**32**	KK

DUSUN SEJAHTERA		
Luas SK	**6,94**	Ha
Luas Verifikasi	**6,94**	Ha
Jumlah Bangunan	**59**	Unit
Jumlah Penduduk	**275**	Jiwa
Jumlah KK	**71**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	47,00	Unit	52,22%	**3**	14,00	Unit	45,16%	1	33,00	Unit	55,93%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	36,00	Unit	40,00%	**1**	13,00	Unit	41,94%	1	23,00	Unit	38,98%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**30,74%**				**29,03%**				**31,64%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	265,55	Meter	23,16%	**0**	-	Meter	0,00%	0	265,55	Meter	35,02%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**0,00%**				**0,00%**				**17,51%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	55,00	KK	53,40%	**3**	13,00	KK	40,63%	1	42,00	KK	59,15%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	16,00	KK	15,53%	**0**	8,00	KK	25,00%	1	8,00	KK	11,27%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**26,70%**				**32,81%**				**29,58%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	265,55	Meter	23,16%	**0**	-	Meter	0,00%	0	265,55	Meter	35,02%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**0,00%**				**0,00%**				**11,67%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	33,00	KK	32,04%	**1**	14,00	KK	43,75%	1	19,00	KK	26,76%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	33,00	KK	32,04%	**1**	14,00	KK	43,75%	1	19,00	KK	26,76%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**32,04%**				**43,75%**				**26,76%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	103,00	KK	100,00%	**5**	32,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	94,00	KK	91,26%	**5**	28,00	KK	87,50%	5	66,00	KK	92,96%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**95,63%**				**93,75%**				**96,48%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	90,00	Unit	100,00%	**5**	31,00	Unit	100,00%	5	59,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	90,00	Unit	100,00%	**5**	31,00	Unit	100,00%	5	59,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**29**		**TOTAL NILAI**		**26**		**TOTAL NILAI**		**31**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**40,73%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**42,76%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**44,81%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK PAYA PISANG KLAT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	23,34	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	251	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	1.034	Jiwa
		Jumlah KK	294	KK

DUSUN MEUNASAH JUNGKON		
Luas SK	5,38	Ha
Luas Verifikasi	5,38	Ha
Jumlah Bangunan	46	Unit
Jumlah Penduduk	171	Jiwa
Jumlah KK	54	KK

DUSUN MEUNASAH MESJID		
Luas SK	6,63	Ha
Luas Verifikasi	6,63	Ha
Jumlah Bangunan	66	Unit
Jumlah Penduduk	288	Jiwa
Jumlah KK	82	KK

DUSUN MEUNASAH BAROH		
Luas SK	4,72	Ha
Luas Verifikasi	4,72	Ha
Jumlah Bangunan	44	Unit
Jumlah Penduduk	182	Jiwa
Jumlah KK	51	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN MEUNASAH JUNGKON				DUSUN MEUNASAH MESJID				DUSUN MEUNASAH BAROH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	84,00	Unit	33,47%	1	7,00	Unit	15,22%	0	20,00	Unit	30,30%	1	24,00	Unit	54,55%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	61,00	Unit	24,30%	0	17,00	Unit	36,96%	1	23,00	Unit	34,85%	1	6,00	Unit	13,64%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				11,16%				12,32%				21,72%				18,18%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.687,41	Meter	47,31%	1	656,59	Meter	100,00%	5	123,85	Meter	10,89%	0	302,70	Meter	44,33%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				23,66%				50,00%				0,00%				22,16%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	50,00	KK	17,01%	0	1,00	KK	1,85%	0	11,00	KK	13,41%	0	17,00	KK	33,33%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	127,00	KK	43,20%	1	54,00	KK	100,00%	5	39,00	KK	47,56%	1	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				21,60%				50,00%				23,78%				16,67%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	964,07	Meter	27,03%	1	-	Meter	0,00%	0	123,85	Meter	10,89%	0	302,70	Meter	44,33%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				9,01%				0,00%				0,00%				14,78%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	130,00	KK	44,22%	1	22,00	KK	40,74%	1	41,00	KK	50,00%	1	31,00	KK	60,78%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	130,00	KK	44,22%	1	22,00	KK	40,74%	1	41,00	KK	50,00%	1	31,00	KK	60,78%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				44,22%				40,74%				50,00%				60,78%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	294,00	KK	100,00%	5	54,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	203,00	KK	69,05%	3	1,00	KK	1,85%	0	78,00	KK	95,12%	5	49,00	KK	96,08%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,52%				50,00%				97,56%				98,04%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	251,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	251,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI		24		TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		32	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		42,02%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,29%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,87%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,23%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	23,34	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	251	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	1.034	Jiwa
		Jumlah KK	294	KK

DUSUN KUPULA

Luas SK	3,51	Ha
Luas Verifikasi	3,51	Ha
Jumlah Bangunan	58	Unit
Jumlah Penduduk	238	Jiwa
Jumlah KK	60	KK

DUSUN MATA IE

Luas SK	3,09	Ha
Luas Verifikasi	3,09	Ha
Jumlah Bangunan	37	Unit
Jumlah Penduduk	155	Jiwa
Jumlah KK	47	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	84,00	Unit	33,47%	1	5,00	Unit	8,62%	0	28,00	Unit	75,68%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	61,00	Unit	24,30%	0	7,00	Unit	12,07%	0	8,00	Unit	21,62%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				11,16%				0,00%				25,23%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.687,41	Meter	47,31%	1	-	Meter	0,00%	0	604,27	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				23,66%				0,00%				50,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	50,00	KK	17,01%	0	1,00	KK	1,67%	0	20,00	KK	42,55%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	127,00	KK	43,20%	1	16,00	KK	26,67%	1	18,00	KK	38,30%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				21,60%				13,33%				40,43%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	964,07	Meter	27,03%	1	-	Meter	0,00%	0	537,52	Meter	88,95%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				9,01%				0,00%				29,65%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	130,00	KK	44,22%	1	12,00	KK	20,00%	0	24,00	KK	51,06%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	130,00	KK	44,22%	1	12,00	KK	20,00%	0	24,00	KK	51,06%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				44,22%				0,00%				51,06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	294,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	203,00	KK	69,05%	3	60,00	KK	100,00%	5	15,00	KK	31,91%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,52%				100,00%				65,96%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	251,00	Unit	100,00%	5	58,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	251,00	Unit	100,00%	5	58,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
				TOTAL NILAI	24			TOTAL NILAI	21			TOTAL NILAI	37
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	42,02%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	30,48%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	51,76%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK BLANG DALAM

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	34,41	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	220	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	973	Jiwa
		Jumlah KK	292	KK

TGK. DI BAYU		
Luas SK	5,84	Ha
Luas Verifikasi	5,84	Ha
Jumlah Bangunan	54	Unit
Jumlah Penduduk	238	Jiwa
Jumlah KK	67	KK

DUSUN TGK. DI GEUMOK		
Luas SK	22,64	Ha
Luas Verifikasi	22,64	Ha
Jumlah Bangunan	104	Unit
Jumlah Penduduk	479	Jiwa
Jumlah KK	144	KK

DUSUN TGK. DI PULO		
Luas SK	5,93	Ha
Luas Verifikasi	5,93	Ha
Jumlah Bangunan	62	Unit
Jumlah Penduduk	256	Jiwa
Jumlah KK	81	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				TGK. DI BAYU				DUSUN TGK. DI GEUMOK				DUSUN TGK. DI PULO			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	21,00	Unit	9,55%	0	4,00	Unit	7,41%	0	13,00	Unit	12,50%	0	4,00	Unit	6,45%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	5,45%	0	4,00	Unit	7,41%	0	8,00	Unit	7,69%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	261,83	Meter	8,73%	0	261,83	Meter	33,92%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				16,96%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	66,00	KK	22,60%	0	17,00	KK	25,37%	1	46,00	KK	31,94%	1	3,00	KK	3,70%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	57,00	KK	19,52%	0	10,00	KK	14,93%	0	46,00	KK	31,94%	1	1,00	KK	1,23%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				12,69%				31,94%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	261,83	Meter	8,73%	0	261,83	Meter	33,92%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				11,31%				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,00	KK	0,34%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,23%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1,00	KK	0,34%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,23%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	292,00	KK	100,00%	5	67,00	KK	100,00%	5	144,00	KK	100,00%	5	81,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	262,00	KK	89,73%	5	52,00	KK	77,61%	5	141,00	KK	97,92%	5	69,00	KK	85,19%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,86%				88,81%				98,96%				92,59%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	220,00	Unit	100,00%	5	54,00	Unit	100,00%	5	104,00	Unit	100,00%	5	62,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	220,00	Unit	100,00%	5	54,00	Unit	100,00%	5	104,00	Unit	100,00%	5	62,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	20			TOTAL NILAI	23			TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	20	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	27,84%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,82%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,99%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	27,51%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

f. NUMERIK MUKO KUTHANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	17,56	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	160	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	700	Jiwa
		Jumlah KK	187	KK

DUSUN AMAN		
Luas SK	7,28	Ha
Luas Verifikasi	7,28	Ha
Jumlah Bangunan	33	Unit
Jumlah Penduduk	175	Jiwa
Jumlah KK	49	KK

H. YACOB		
Luas SK	5,88	Ha
Luas Verifikasi	5,88	Ha
Jumlah Bangunan	85	Unit
Jumlah Penduduk	344	Jiwa
Jumlah KK	94	KK

DUSUN PANGLIMA KAOM JUARA		
Luas SK	4,41	Ha
Luas Verifikasi	4,41	Ha
Jumlah Bangunan	42	Unit
Jumlah Penduduk	181	Jiwa
Jumlah KK	44	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN AMAN				H. YACOB				DUSUN PANGLIMA KAOM JUARA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76,00	Unit	47,50%	1	24,00	Unit	72,73%	3	38,00	Unit	44,71%	1	14,00	Unit	33,33%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	89,00	Unit	55,63%	3	17,00	Unit	51,52%	3	51,00	Unit	60,00%	3	21,00	Unit	50,00%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				34,38%				41,41%				34,90%				27,78%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	350,50	Meter	12,44%	0	350,50	Meter	23,43%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	91,00	KK	48,66%	1	24,00	KK	48,98%	1	58,00	KK	61,70%	3	9,00	KK	20,45%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	44,00	KK	23,53%	0	19,00	KK	38,78%	1	18,00	KK	19,15%	0	7,00	KK	15,91%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				24,33%				43,88%				30,85%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	350,50	Meter	12,44%	0	350,50	Meter	23,43%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	49,00	KK	26,20%	1	11,00	KK	22,45%	0	28,00	KK	29,79%	1	10,00	KK	22,73%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	49,00	KK	26,20%	1	11,00	KK	22,45%	0	28,00	KK	29,79%	1	10,00	KK	22,73%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				26,20%				0,00%				29,79%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	187,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	94,00	KK	100,00%	5	44,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	161,00	KK	86,10%	5	41,00	KK	83,67%	5	84,00	KK	89,36%	5	36,00	KK	81,82%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,05%				91,84%				94,68%				90,91%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	160,00	Unit	100,00%	5	33,00	Unit	100,00%	5	85,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	160,00	Unit	100,00%	5	33,00	Unit	100,00%	5	85,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	28			TOTAL NILAI	29			TOTAL NILAI	22	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,71%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,59%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	41,46%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,24%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

g. NUMERIK KUTA KRUENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**11,44**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**84**	Unit
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**436**	Jiwa
		Jumlah KK	**111**	KK

LAMPOH LHOK

Luas SK	**7,98**	Ha
Luas Verifikasi	**7,98**	Ha
Jumlah Bangunan	**34**	Unit
Jumlah Penduduk	**219**	Jiwa
Jumlah KK	**46**	KK

BEUCE

Luas SK	**3,46**	Ha
Luas Verifikasi	**3,46**	Ha
Jumlah Bangunan	**50**	Unit
Jumlah Penduduk	**217**	Jiwa
Jumlah KK	**65**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	84,00	Unit	100,00%	**5**	34,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,00	Unit	1,19%	**0**	-	Unit	0,00%	0	1,00	Unit	2,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**33,33%**				**33,33%**				**33,33%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	530,02	Meter	39,65%	**1**	362,99	Meter	39,65%	1	167,04	Meter	39,65%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**19,83%**				**19,83%**				**19,82%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	23,00	KK	20,72%	**0**	7,00	KK	15,22%	0	16,00	KK	24,62%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	44,00	KK	39,64%	**1**	1,00	KK	2,17%	0	43,00	KK	66,15%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**19,82%**				**0,00%**				**33,08%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	530,02	Meter	39,65%	**1**	362,99	Meter	39,65%	1	167,04	Meter	39,65%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**13,22%**				**13,22%**				**13,22%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	38,00	KK	34,23%	**1**	12,00	KK	26,09%	1	26,00	KK	40,00%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	38,00	KK	34,23%	**1**	12,00	KK	26,09%	1	26,00	KK	40,00%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**34,23%**				**26,09%**				**40,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	111,00	KK	100,00%	**5**	46,00	KK	100,00%	5	65,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	105,00	KK	94,59%	**5**	44,00	KK	95,65%	5	61,00	KK	93,85%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**97,30%**				**97,83%**				**96,92%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	84,00	Unit	100,00%	**5**	34,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	84,00	Unit	100,00%	**5**	34,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**30**		**TOTAL NILAI**		**29**		**TOTAL NILAI**		**32**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**45,39%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**41,47%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**48,05%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

h. NUMERIK BLANG KUTA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	31,38	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	208	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	852	Jiwa
		Jumlah KK	246	KK

BANDAR HIDAYAH		
Luas SK	7,08	Ha
Luas Verifikasi	7,08	Ha
Jumlah Bangunan	16	Unit
Jumlah Penduduk	58	Jiwa
Jumlah KK	16	KK

DUSUN BANDAR MUBARAK		
Luas SK	10,72	Ha
Luas Verifikasi	10,72	Ha
Jumlah Bangunan	103	Unit
Jumlah Penduduk	458	Jiwa
Jumlah KK	126	KK

BANDAR RAHMAH		
Luas SK	13,58	Ha
Luas Verifikasi	13,58	Ha
Jumlah Bangunan	89	Unit
Jumlah Penduduk	336	Jiwa
Jumlah KK	104	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BANDAR HIDAYAH				DUSUN BANDAR MUBARAK				BANDAR RAHMAH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	139,00	Unit	66,83%	3	14,00	Unit	87,50%	5	94,00	Unit	91,26%	5	31,00	Unit	34,83%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	68,00	Unit	32,69%	1	1,00	Unit	6,25%	0	49,00	Unit	47,57%	1	18,00	Unit	20,22%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				33,17%				29,17%				46,28%				11,61%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	710,79	Meter	22,62%	0	661,17	Meter	100,00%	5	49,63	Meter	3,54%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				50,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	84,00	KK	34,15%	1	8,00	KK	50,00%	1	56,00	KK	44,44%	1	20,00	KK	19,23%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	160,00	KK	65,04%	3	16,00	KK	100,00%	5	119,00	KK	94,44%	5	25,00	KK	24,04%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				49,59%				75,00%				69,44%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	193,28	Meter	6,15%	0	143,65	Meter	21,73%	0	49,63	Meter	3,54%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	95,00	KK	38,62%	1	16,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	42,06%	1	26,00	KK	25,00%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	95,00	KK	38,62%	1	16,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	42,06%	1	26,00	KK	25,00%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				38,62%				100,00%				42,06%				25,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	246,00	KK	100,00%	5	16,00	KK	100,00%	5	126,00	KK	100,00%	5	104,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	225,00	KK	91,46%	5	16,00	KK	100,00%	5	123,00	KK	97,62%	5	86,00	KK	82,69%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				95,73%				100,00%				98,81%				91,35%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	208,00	Unit	100,00%	5	16,00	Unit	100,00%	5	103,00	Unit	100,00%	5	89,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	208,00	Unit	100,00%	5	16,00	Unit	100,00%	5	103,00	Unit	100,00%	5	89,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		46		TOTAL NILAI		34		TOTAL NILAI		23	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,30%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		64,88%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		50,94%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		32,57%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

i. NUMERIK ALUE SANE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	21,52	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	168	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	710	Jiwa
		Jumlah KK	195	KK

DUSUN AMAN		
Luas SK	9,75	Ha
Luas Verifikasi	9,75	Ha
Jumlah Bangunan	40	Unit
Jumlah Penduduk	187	Jiwa
Jumlah KK	53	KK

DUSUN JATI		
Luas SK	7,44	Ha
Luas Verifikasi	7,44	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	215	Jiwa
Jumlah KK	51	KK

DUSUN MULIA		
Luas SK	4,32	Ha
Luas Verifikasi	4,32	Ha
Jumlah Bangunan	77	Unit
Jumlah Penduduk	308	Jiwa
Jumlah KK	91	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN AMAN				DUSUN JATI				DUSUN MULIA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	161,00	Unit	95,83%	5	38,00	Unit	95,00%	5	48,00	Unit	94,12%	5	75,00	Unit	97,40%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	16,00	Unit	9,52%	0	5,00	Unit	12,50%	0	9,00	Unit	17,65%	0	2,00	Unit	2,60%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				31,94%				31,67%				31,37%				32,47%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	195,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	91,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	91,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	79,00	KK	40,51%	1	23,00	KK	43,40%	1	41,00	KK	80,39%	5	15,00	KK	16,48%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	79,00	KK	40,51%	1	23,00	KK	43,40%	1	41,00	KK	80,39%	5	15,00	KK	16,48%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				40,51%				43,40%				80,39%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	195,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	91,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	195,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	91,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	168,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	77,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	168,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	77,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		37		TOTAL NILAI		37		TOTAL NILAI		45		TOTAL NILAI		35
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		53,21%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		53,58%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		58,82%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,50%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

j. NUMERIK PULO

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**20,99**	Ha
Kecamatan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Bangunan**	**186**	Unit
Kawasan	**: BANDAR DUA**	**Jumlah Penduduk**	**846**	Jiwa
		Jumlah KK	**250**	KK

DAYAH MURONG		
Luas SK	**15,81**	Ha
Luas Verifikasi	**15,81**	Ha
Jumlah Bangunan	**52**	Unit
Jumlah Penduduk	**228**	Jiwa
Jumlah KK	**71**	KK

TGK CHIK DIPULO		
Luas SK	**5,18**	Ha
Luas Verifikasi	**5,18**	Ha
Jumlah Bangunan	**134**	Unit
Jumlah Penduduk	**618**	Jiwa
Jumlah KK	**179**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DAYAH MURONG				TGK CHIK DIPULO			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	51,00	Unit	27,42%	1	22,00	Unit	42,31%	1	29,00	Unit	21,64%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	6,99%	0	5,00	Unit	9,62%	0	8,00	Unit	5,97%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				9,14%				14,10%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	514,66	Meter	32,61%	1	379,58	Meter	48,44%	1	135,08	Meter	17,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,31%				24,22%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	22,00	KK	8,80%	0	5,00	KK	7,04%	0	17,00	KK	9,50%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	19,00	KK	7,60%	0	4,00	KK	5,63%	0	15,00	KK	8,38%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	514,66	Meter	32,61%	1	379,58	Meter	48,44%	1	135,08	Meter	17,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,87%				16,15%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14,00	KK	5,60%	0	6,00	KK	8,45%	0	8,00	KK	4,47%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	14,00	KK	5,60%	0	6,00	KK	8,45%	0	8,00	KK	4,47%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	250,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5	179,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	216,00	KK	86,40%	5	60,00	KK	84,51%	5	156,00	KK	87,15%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,20%				92,25%				93,58%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	186,00	Unit	100,00%	5	52,00	Unit	100,00%	5	134,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	186,00	Unit	100,00%	5	52,00	Unit	100,00%	5	134,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
				TOTAL NILAI	**23**			**TOTAL NILAI**	**23**			**TOTAL NILAI**	**20**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**32,79%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**35,25%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**27,65%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

k. NUMERIK MEURANDEH ALUE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	41,24	Ha
Kecamatan	: BANDAR DUA	Jumlah Bangunan	338	Unit
Kawasan	: BANDAR DUA	Jumlah Penduduk	1.214	Jiwa
		Jumlah KK	406	KK

DUSUN CINTA SETIA		
Luas SK	9,67	Ha
Luas Verifikasi	9,67	Ha
Jumlah Bangunan	75	Unit
Jumlah Penduduk	280	Jiwa
Jumlah KK	82	KK

DUSUN BARO SEJAHTERA		
Luas SK	10,78	Ha
Luas Verifikasi	10,78	Ha
Jumlah Bangunan	60	Unit
Jumlah Penduduk	264	Jiwa
Jumlah KK	83	KK

INGIN SENTOSA		
Luas SK	7,05	Ha
Luas Verifikasi	7,05	Ha
Jumlah Bangunan	86	Unit
Jumlah Penduduk	306	Jiwa
Jumlah KK	98	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN CINTA SETIA				DUSUN BARO SEJAHTERA				INGIN SENTOSA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	11,00	Unit	3,25%	0	(9,00)	Unit	-12,00%	0	-	Unit	0,00%	0	3,00	Unit	3,49%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	54,00	Unit	15,98%	0	1,00	Unit	1,33%	0	2,00	Unit	3,33%	0	51,00	Unit	59,30%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%				0,00%				0,00%				19,77%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.745,97	Meter	32,31%	1	-	Meter	0,00%	0	496,75	Meter	39,89%	1	36,80	Meter	3,52%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,16%				0,00%				19,95%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	150,00	KK	36,95%	1	81,00	KK	98,78%	5	57,00	KK	68,67%	3	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3,00	KK	0,74%	0	3,00	KK	3,66%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				18,47%				49,39%				34,34%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.745,97	Meter	32,31%	1	-	Meter	0,00%	0	496,75	Meter	39,89%	1	36,80	Meter	3,52%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,77%				0,00%				13,30%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	137,00	KK	33,74%	1	43,00	KK	52,44%	3	74,00	KK	89,16%	5	(58,00)	KK	-59,18%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	137,00	KK	33,74%	1	43,00	KK	52,44%	3	74,00	KK	89,16%	5	(58,00)	KK	-59,18%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				33,74%				52,44%				89,16%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	406,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5	83,00	KK	100,00%	5	98,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	404,00	KK	99,51%	5	80,00	KK	97,56%	5	83,00	KK	100,00%	5	98,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,75%				98,78%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	338,00	Unit	100,00%	5	75,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5	86,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	338,00	Unit	100,00%	5	75,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5	86,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		23	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,84%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		42,94%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		50,96%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,40%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: BANDAR DUA
Kawasan	: BANDAR DUA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	41,24	Ha
Jumlah Bangunan	338	Unit
Jumlah Penduduk	1.214	Jiwa
Jumlah KK	406	KK

DUSUN PULO BAHAGIA

Luas SK	13,74	Ha
Luas Verifikasi	13,74	Ha
Jumlah Bangunan	117	Unit
Jumlah Penduduk	364	Jiwa
Jumlah KK	143	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	11,00	Unit	3,25%	0	17,00	Unit	14,53%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	54,00	Unit	15,98%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.745,97	Meter	32,31%	1	1.212,43	Meter	55,62%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,16%				27,81%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	150,00	KK	36,95%	1	12,00	KK	8,39%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3,00	KK	0,74%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				18,47%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.745,97	Meter	32,31%	1	1.212,43	Meter	55,62%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,77%				18,54%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	137,00	KK	33,74%	1	78,00	KK	54,55%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	137,00	KK	33,74%	1	78,00	KK	54,55%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				33,74%				54,55%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	406,00	KK	100,00%	5	143,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	404,00	KK	99,51%	5	143,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,75%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	338,00	Unit	100,00%	5	117,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	338,00	Unit	100,00%	5	117,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		32
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,84%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		42,99%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

4. NUMERIK KECAMATAN JANGKA BUYA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	49,39	Ha
Kecamatan	: JANGKA BUYA	Jumlah Bangunan	670	Unit
Kawasan	: JANGKA BUYA	Jumlah Penduduk	2.981	Jiwa
		Jumlah KK	843	KK

Keude Jangka Buya				
Luas SK	6,14	Ha		
Luas Verifikasi	6,14	Ha		
Jumlah Bangunan	79	Unit		
Jumlah Penduduk	308	Jiwa		
Jumlah KK	96	KK		

Kiran Baroh				
Luas SK	14,12	Ha		
Luas Verifikasi	14,12	Ha		
Jumlah Bangunan	145	Unit		
Jumlah Penduduk	659	Jiwa		
Jumlah KK	179	KK		

Kuta Baroh				
Luas SK	9,74	Ha		
Luas Verifikasi	9,74	Ha		
Jumlah Bangunan	91	Unit		
Jumlah Penduduk	401	Jiwa		
Jumlah KK	127	KK		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	448,00	Unit	66,87%	3	53,00	Unit	67,09%	3	105,00	Unit	72,41%	3	6,00	Unit	6,59%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	55,00	Unit	8,21%	0	9,00	Unit	11,39%	0	20,00	Unit	13,79%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				22,29%				22,36%				24,14%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.091,63	Meter	12,83%	0	1.040,00	Meter	55,53%	3	-	Meter	0,00%	0	51,63	Meter	2,98%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.514,24	Meter	53,07%	3	153,00	Meter	8,17%	0	628,04	Meter	30,16%	1	1.176,03	Meter	67,87%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				26,54%				27,76%				15,08%				33,93%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	306,00	KK	36,30%	1	5,00	KK	5,21%	0	31,00	KK	17,32%	0	87,00	KK	68,50%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	246,00	KK	29,18%	1	5,00	KK	5,21%	0	150,00	KK	83,80%	5	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32,74%				0,00%				41,90%				34,25%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3.609,91	Meter	46,22%	1	-	Meter	0,00%	0	782,54	Meter	57,02%	3	767,30	Meter	50,78%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,41%				0,00%				19,01%				16,93%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119,00	KK	14,12%	0	-	KK	0,00%	0	86,00	KK	48,04%	1	24,00	KK	18,90%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	119,00	KK	14,12%	0	-	KK	0,00%	0	86,00	KK	48,04%	1	24,00	KK	18,90%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				48,04%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	843,00	KK	100,00%	5	96,00	KK	100,00%	5	179,00	KK	100,00%	5	127,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	816,00	KK	96,80%	5	84,00	KK	87,50%	5	177,00	KK	98,88%	5	117,00	KK	92,13%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,40%				93,75%				99,44%				96,06%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	322,00	Unit	48,06%	1	33,00	Unit	41,77%	1	145,00	Unit	100,00%	5	91,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	624,00	Unit	93,13%	5	33,00	Unit	41,77%	1	145,00	Unit	100,00%	5	91,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				70,60%				41,77%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		34		TOTAL NILAI		27
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,00%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		26,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		49,66%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,17%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**49,39**	Ha
Kecamatan	**: JANGKA BUYA**	**Jumlah Bangunan**	**670**	Unit
Kawasan	**: JANGKA BUYA**	**Jumlah Penduduk**	**2.981**	Jiwa
		Jumlah KK	**843**	KK

Beureumbang		
Luas SK	**5,97**	Ha
Luas Verifikasi	**5,97**	Ha
Jumlah Bangunan	**132**	Unit
Jumlah Penduduk	**552**	Jiwa
Jumlah KK	**140**	KK

Jurong Binje		
Luas SK	**13,42**	Ha
Luas Verifikasi	**13,42**	Ha
Jumlah Bangunan	**223**	Unit
Jumlah Penduduk	**1.061**	Jiwa
Jumlah KK	**301**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	448,00	Unit	66,87%	3	102,00	Unit	77,27%	5	182,00	Unit	81,61%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	55,00	Unit	8,21%	0	12,00	Unit	9,09%	0	14,00	Unit	6,28%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**22,29%**				**25,76%**				**27,20%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.091,63	Meter	12,83%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.514,24	Meter	53,07%	3	688,98	Meter	72,55%	3	1.868,18	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**26,54%**				**36,27%**				**50,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	306,00	KK	36,30%	1	35,00	KK	25,00%	1	148,00	KK	49,17%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	246,00	KK	29,18%	1	87,00	KK	62,14%	3	4,00	KK	1,33%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**32,74%**				**43,57%**				**24,58%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	3.609,91	Meter	46,22%	1	955,20	Meter	100,00%	5	1.104,87	Meter	74,85%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**15,41%**				**33,33%**				**24,95%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119,00	KK	14,12%	0	1,00	KK	0,71%	0	8,00	KK	2,66%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	119,00	KK	14,12%	0	1,00	KK	0,71%	0	8,00	KK	2,66%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	843,00	KK	100,00%	5	140,00	KK	100,00%	5	301,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	816,00	KK	96,80%	5	140,00	KK	100,00%	5	298,00	KK	99,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**98,40%**				**100,00%**				**99,50%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	322,00	Unit	48,06%	1	53,00	Unit	40,15%	1	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	624,00	Unit	93,13%	5	132,00	Unit	100,00%	5	223,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**70,60%**				**70,08%**				**50,00%**	
				TOTAL NILAI	**25**			**TOTAL NILAI**	**33**			**TOTAL NILAI**	**29**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**38,00%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**44,14%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**39,46%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE JANGKA BUYA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**6,14**	Ha
Kecamatan	**: JANGKA BUAYA**	**Jumlah Bangunan**	**79**	Unit
Kawasan	**: JANGKA BUAYA**	**Jumlah Penduduk**	**308**	Jiwa
		Jumlah KK	**96**	KK

LAMPOH REUPEUP		
Luas SK	**3,24**	Ha
Luas Verifikasi	**3,24**	Ha
Jumlah Bangunan	**46**	Unit
Jumlah Penduduk	**174**	Jiwa
Jumlah KK	**56**	KK

KEUDE LHOK		
Luas SK	**2,90**	Ha
Luas Verifikasi	**2,90**	Ha
Jumlah Bangunan	**33**	Unit
Jumlah Penduduk	**134**	Jiwa
Jumlah KK	**40**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	53,00	Unit	67,09%	**3**	35,00	Unit	76,09%	5	18,00	Unit	54,55%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	11,39%	**0**	-	Unit	0,00%	0	9,00	Unit	27,27%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**22,36%**				**25,36%**				**27,27%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.040,00	Meter	55,53%	**3**	630,00	Meter	54,78%	3	410,00	Meter	56,71%	3
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	153,00	Meter	8,17%	**0**	128,00	Meter	11,13%	0	25,00	Meter	3,46%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**27,76%**				**27,39%**				**28,35%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	5,00	KK	5,21%	**0**	-	KK	0,00%	0	5,00	KK	12,50%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	5,00	KK	5,21%	**0**	1,00	KK	1,79%	0	4,00	KK	10,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	96,00	KK	100,00%	**5**	56,00	KK	100,00%	5	40,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	84,00	KK	87,50%	**5**	54,00	KK	96,43%	5	30,00	KK	75,00%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**93,75%**				**98,21%**				**87,50%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	33,00	Unit	41,77%	**1**	-	Unit	0,00%	0	33,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	33,00	Unit	41,77%	**1**	-	Unit	0,00%	0	33,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**41,77%**				**0,00%**				**100,00%**	
				TOTAL NILAI	**18**			**TOTAL NILAI**	**18**			**TOTAL NILAI**	**25**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**26,52%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**21,57%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**34,73%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK KIRAN BAROH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	14,12	Ha
Kecamatan	: JANGKA BUYA	Jumlah Bangunan	145	Unit
Kawasan	: JANGKA BUYA	Jumlah Penduduk	659	Jiwa
		Jumlah KK	179	KK

DUSUN SYIAH KUALA		
Luas SK	10,09	Ha
Luas Verifikasi	10,09	Ha
Jumlah Bangunan	66	Unit
Jumlah Penduduk	295	Jiwa
Jumlah KK	75	KK

TGK. NYAK AHMAT		
Luas SK	0,98	Ha
Luas Verifikasi	0,98	Ha
Jumlah Bangunan	19	Unit
Jumlah Penduduk	99	Jiwa
Jumlah KK	28	KK

TGK.PANJANG SEMBILAN		
Luas SK	3,05	Ha
Luas Verifikasi	3,05	Ha
Jumlah Bangunan	60	Unit
Jumlah Penduduk	265	Jiwa
Jumlah KK	76	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN SYIAH KUALA				TGK. NYAK AHMAT				TGK.PANJANG SEMBILAN			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	105,00	Unit	72,41%	3	42,00	Unit	63,64%	3	18,00	Unit	94,74%	5	45,00	Unit	75,00%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	20,00	Unit	13,79%	0	2,00	Unit	3,03%	0	4,00	Unit	21,05%	0	14,00	Unit	23,33%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,14%				21,21%				31,58%				25,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	628,04	Meter	30,16%	1	628,04	Meter	41,71%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				15,08%				20,86%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	31,00	KK	17,32%	0	-	KK	0,00%	0	6,00	KK	21,43%	0	25,00	KK	32,89%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	150,00	KK	83,80%	5	75,00	KK	100,00%	5	13,00	KK	46,43%	1	62,00	KK	81,58%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				41,90%				50,00%				23,21%				57,24%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	782,54	Meter	57,02%	3	470,61	Meter	44,38%	1	42,87	Meter	100,00%	5	269,06	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				19,01%				14,79%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	86,00	KK	48,04%	1	60,00	KK	80,00%	5	16,00	KK	57,14%	3	10,00	KK	13,16%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	86,00	KK	48,04%	1	60,00	KK	80,00%	5	16,00	KK	57,14%	3	10,00	KK	13,16%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				48,04%				80,00%				57,14%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	179,00	KK	100,00%	5	75,00	KK	100,00%	5	28,00	KK	100,00%	5	76,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	177,00	KK	98,88%	5	75,00	KK	100,00%	5	28,00	KK	100,00%	5	74,00	KK	97,37%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,44%				100,00%				100,00%				98,68%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	145,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	19,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	145,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	19,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	34			TOTAL NILAI	40			TOTAL NILAI	37			TOTAL NILAI	34	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49,66%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	55,27%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49,32%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	44,89%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK KUTA BROH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**9,74**	Ha
Kecamatan	**: JANGKA BUYA**	**Jumlah Bangunan**	**91**	Unit
Kawasan	**: JANGKA BUYA**	**Jumlah Penduduk**	**401**	Jiwa
		Jumlah KK	**127**	KK

TGK DI MANYANG		
Luas SK	**4,93**	Ha
Luas Verifikasi	**4,93**	Ha
Jumlah Bangunan	**45**	Unit
Jumlah Penduduk	**200**	Jiwa
Jumlah KK	**63**	KK

TGK DI SUPENG		
Luas SK	**4,81**	Ha
Luas Verifikasi	**4,81**	Ha
Jumlah Bangunan	**46**	Unit
Jumlah Penduduk	**201**	Jiwa
Jumlah KK	**64**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	6,00	Unit	6,59%	**0**	2,00	Unit	4,44%	0	4,00	Unit	8,70%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	51,63	Meter	2,98%	**0**	51,63	Meter	5,64%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.176,03	Meter	67,87%	**3**	628,30	Meter	68,61%	3	547,73	Meter	67,04%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**33,93%**				**34,31%**				**33,52%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	87,00	KK	68,50%	**3**	49,00	KK	77,78%	5	38,00	KK	59,38%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**34,25%**				**38,89%**				**29,69%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	767,30	Meter	50,78%	**1**	343,44	Meter	46,19%	1	423,86	Meter	55,23%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**16,93%**				**15,40%**				**18,41%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	24,00	KK	18,90%	**0**	12,00	KK	19,05%	0	12,00	KK	18,75%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	24,00	KK	18,90%	**0**	12,00	KK	19,05%	0	12,00	KK	18,75%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	127,00	KK	100,00%	**5**	63,00	KK	100,00%	5	64,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	117,00	KK	92,13%	**5**	63,00	KK	100,00%	5	54,00	KK	84,38%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**96,06%**				**100,00%**				**92,19%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	91,00	Unit	100,00%	**5**	45,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	91,00	Unit	100,00%	**5**	45,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**27**		**TOTAL NILAI**		**29**		**TOTAL NILAI**		**29**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**40,17%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**41,23%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**39,11%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK BEUREUMBANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	5,97	Ha
Kecamatan	: JANGKA BUYA	Jumlah Bangunan	132	Unit
Kawasan	: JANGKA BUYA	Jumlah Penduduk	552	Jiwa
		Jumlah KK	140	KK

DUSUN BLANG		
Luas SK	1,51	Ha
Luas Verifikasi	1,51	Ha
Jumlah Bangunan	36	Unit
Jumlah Penduduk	123	Jiwa
Jumlah KK	36	KK

DUSUN CET BEULEUN		
Luas SK	0,52	Ha
Luas Verifikasi	0,52	Ha
Jumlah Bangunan	17	Unit
Jumlah Penduduk	70	Jiwa
Jumlah KK	17	KK

DUSUN MEUNASAH TUHA		
Luas SK	2,31	Ha
Luas Verifikasi	2,31	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	174	Jiwa
Jumlah KK	42	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BLANG				DUSUN CET BEULEUN				DUSUN MEUNASAH TUHA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	102,00	Unit	77,27%	5	27,00	Unit	75,00%	3	17,00	Unit	100,00%	5	28,00	Unit	68,29%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	9,09%	0	4,00	Unit	11,11%	0	2,00	Unit	11,76%	0	4,00	Unit	9,76%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				25,76%				25,00%				33,33%				22,76%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	688,98	Meter	72,55%	3	276,17	Meter	96,58%	5	-	Meter	0,00%	0	276,91	Meter	66,51%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				36,27%				48,29%				0,00%				33,26%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	35,00	KK	25,00%	1	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	7,14%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	87,00	KK	62,14%	3	36,00	KK	100,00%	5	3,00	KK	17,65%	0	23,00	KK	54,76%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				43,57%				50,00%				0,00%				27,38%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	955,20	Meter	100,00%	5	171,56	Meter	100,00%	5	124,16	Meter	100,00%	5	525,74	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,00	KK	0,71%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,38%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1,00	KK	0,71%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,38%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	140,00	KK	100,00%	5	36,00	KK	100,00%	5	17,00	KK	100,00%	5	42,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	140,00	KK	100,00%	5	36,00	KK	100,00%	5	17,00	KK	100,00%	5	42,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	53,00	Unit	40,15%	1	36,00	Unit	100,00%	5	17,00	Unit	100,00%	5	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	132,00	Unit	100,00%	5	36,00	Unit	100,00%	5	17,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				70,08%				100,00%				100,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI			33	TOTAL NILAI			38	TOTAL NILAI			30	TOTAL NILAI			29
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			44,14%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			50,95%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			38,10%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			38,10%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: JANGKA BUYA
Kawasan	: JANGKA BUYA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	5,97	Ha
Jumlah Bangunan	132	Unit
Jumlah Penduduk	552	Jiwa
Jumlah KK	140	KK

DUSUN POLOTUI

Luas SK	1,63	Ha
Luas Verifikasi	1,63	Ha
Jumlah Bangunan	38	Unit
Jumlah Penduduk	185	Jiwa
Jumlah KK	45	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	102,00	Unit	77,27%	5	30,00	Unit	78,95%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	9,09%	0	2,00	Unit	5,26%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				25,76%				26,32%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	688,98	Meter	72,55%	3	135,91	Meter	84,57%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				36,27%				42,28%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	35,00	KK	25,00%	1	32,00	KK	71,11%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	87,00	KK	62,14%	3	25,00	KK	55,56%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				43,57%				63,33%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	955,20	Meter	100,00%	5	133,75	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,00	KK	0,71%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1,00	KK	0,71%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	140,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	140,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	53,00	Unit	40,15%	1	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	132,00	Unit	100,00%	5	38,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				70,08%				50,00%	
				TOTAL NILAI	33			TOTAL NILAI	36
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	44,14%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	45,04%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK JURONG BINJE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	13,42	Ha
Kecamatan	: JANGKA BUYA	Jumlah Bangunan	223	Unit
Kawasan	: JANGKA BUYA	Jumlah Penduduk	1.061	Jiwa
		Jumlah KK	301	KK

BENBULANG		
Luas SK	6,88	Ha
Luas Verifikasi	6,88	Ha
Jumlah Bangunan	108	Unit
Jumlah Penduduk	516	Jiwa
Jumlah KK	144	KK

PULO TU		
Luas SK	2,97	Ha
Luas Verifikasi	2,97	Ha
Jumlah Bangunan	58	Unit
Jumlah Penduduk	295	Jiwa
Jumlah KK	82	KK

PUSONG		
Luas SK	3,57	Ha
Luas Verifikasi	3,57	Ha
Jumlah Bangunan	57	Unit
Jumlah Penduduk	250	Jiwa
Jumlah KK	75	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BENBULANG				PULO TU				PUSONG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	182,00	Unit	81,61%	5	84,00	Unit	77,78%	5	58,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	70,18%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	14,00	Unit	6,28%	0	6,00	Unit	5,56%	0	5,00	Unit	8,62%	0	3,00	Unit	5,26%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				27,20%				25,93%				33,33%				23,39%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.868,18	Meter	100,00%	5	984,66	Meter	100,00%	5	453,14	Meter	100,00%	5	430,38	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	148,00	KK	49,17%	1	132,00	KK	91,67%	5	3,00	KK	3,66%	0	13,00	KK	17,33%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	4,00	KK	1,33%	0	1,00	KK	0,69%	0	3,00	KK	3,66%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				24,58%				45,83%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.104,87	Meter	74,85%	3	568,97	Meter	88,26%	5	533,25	Meter	100,00%	5	2,65	Meter	0,89%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				24,95%				29,42%				33,33%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	8,00	KK	2,66%	0	1,00	KK	0,69%	0	2,00	KK	2,44%	0	5,00	KK	6,67%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	8,00	KK	2,66%	0	1,00	KK	0,69%	0	2,00	KK	2,44%	0	5,00	KK	6,67%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	301,00	KK	100,00%	5	144,00	KK	100,00%	5	82,00	KK	100,00%	5	75,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	298,00	KK	99,00%	5	144,00	KK	100,00%	5	79,00	KK	96,34%	5	75,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,50%				100,00%				98,17%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	223,00	Unit	100,00%	5	108,00	Unit	100,00%	5	58,00	Unit	100,00%	5	57,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI			29	TOTAL NILAI			35	TOTAL NILAI			30	TOTAL NILAI			23
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			39,46%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			43,03%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			37,83%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			31,91%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

5. NUMERIK KECAMATAN ULIM

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	77,07	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	602	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	2.554	Jiwa
		Jumlah KK	740	KK

Keude Ulim				
Luas SK	12,75	Ha		
Luas Verifikasi	12,75	Ha		
Jumlah Bangunan	67	Unit		
Jumlah Penduduk	238	Jiwa		
Jumlah KK	76	KK		

Tanjong Ulim/Keude Parek				
Luas SK	8,03	Ha		
Luas Verifikasi	8,03	Ha		
Jumlah Bangunan	143	Unit		
Jumlah Penduduk	612	Jiwa		
Jumlah KK	179	KK		

Mesjid Ulim Baroh				
Luas SK	9,79	Ha		
Luas Verifikasi	9,79	Ha		
Jumlah Bangunan	173	Unit		
Jumlah Penduduk	788	Jiwa		
Jumlah KK	212	KK		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	404,00	Unit	67,11%	3	3,00	Unit	4,48%	0	106,00	Unit	74,13%	3	140,00	Unit	80,92%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	57,00	Unit	9,47%	0	1,00	Unit	1,49%	0	11,00	Unit	7,69%	0	38,00	Unit	21,97%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				22,37%				0,00%				24,71%				26,97%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	590,00	Meter	6,26%	0	590,00	Meter	51,75%	3	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.137,04	Meter	43,92%	1	260,00	Meter	22,81%	0	180,00	Meter	16,19%	0	881,00	Meter	40,86%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,96%				25,88%				0,00%				20,43%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168,00	KK	22,70%	0	11,00	KK	14,47%	0	11,00	KK	6,15%	0	20,00	KK	9,43%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	123,00	KK	16,62%	0	53,00	KK	69,74%	3	3,00	KK	1,68%	0	23,00	KK	10,85%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				34,87%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	837,00	Meter	9,65%	0	650,00	Meter	54,17%	3	187,00	Meter	24,98%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	4.015,04	Meter	46,27%	1	280,00	Meter	23,33%	0	358,32	Meter	47,86%	1	501,18	Meter	34,21%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,42%				18,06%				15,95%				11,40%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	56,00	KK	7,57%	0	-	KK	0,00%	0	7,00	KK	3,91%	0	18,00	KK	8,49%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	56,00	KK	7,57%	0	-	KK	0,00%	0	7,00	KK	3,91%	0	18,00	KK	8,49%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	718,00	KK	97,03%	5	54,00	KK	71,05%	3	179,00	KK	100,00%	5	212,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	688,00	KK	92,97%	5	74,00	KK	97,37%	5	174,00	KK	97,21%	5	200,00	KK	94,34%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				95,00%				84,21%				98,60%				97,17%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	554,00	Unit	92,03%	5	19,00	Unit	28,36%	1	143,00	Unit	100,00%	5	173,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				46,01%				14,18%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		20		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		19		TOTAL NILAI		22
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		28,68%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		25,31%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		27,04%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,43%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	77,07	Ha
Kecamatan	: BANDAR BARU	Jumlah Bangunan	602	Unit
Kawasan	: BANDAR BARU	Jumlah Penduduk	2.554	Jiwa
		Jumlah KK	740	KK

Nanggroe Barat		
Luas SK	38,35	Ha
Luas Verifikasi	38,35	Ha
Jumlah Bangunan	149	Unit
Jumlah Penduduk	651	Jiwa
Jumlah KK	189	KK

Reuleut		
Luas SK	8,15	Ha
Luas Verifikasi	8,15	Ha
Jumlah Bangunan	70	Unit
Jumlah Penduduk	265	Jiwa
Jumlah KK	84	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	404,00	Unit	67,11%	3	140,00	Unit	93,96%	5	15,00	Unit	21,43%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	57,00	Unit	9,47%	0	1,00	Unit	0,67%	0	6,00	Unit	8,57%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				22,37%				31,32%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	590,00	Meter	6,26%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.137,04	Meter	43,92%	1	2.193,53	Meter	64,29%	3	622,51	Meter	38,93%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,96%				32,15%				19,46%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168,00	KK	22,70%	0	71,00	KK	37,57%	1	55,00	KK	65,48%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	123,00	KK	16,62%	0	-	KK	0,00%	0	44,00	KK	52,38%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				18,78%				58,93%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	837,00	Meter	9,65%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	4.015,04	Meter	46,27%	1	2.193,53	Meter	64,29%	3	682,00	Meter	36,83%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,42%				21,43%				12,28%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	56,00	KK	7,57%	0	-	KK	0,00%	0	31,00	KK	36,90%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	56,00	KK	7,57%	0	-	KK	0,00%	0	31,00	KK	36,90%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				36,90%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	718,00	KK	97,03%	5	189,00	KK	100,00%	5	84,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	688,00	KK	92,97%	5	156,00	KK	82,54%	5	84,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				95,00%				91,27%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	554,00	Unit	92,03%	5	149,00	Unit	100,00%	5	70,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				46,01%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	20			TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	25
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	28,68%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,99%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,65%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE ULIM

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**12,75**	Ha
Kecamatan	**: ULIM**	**Jumlah Bangunan**	**67**	Unit
Kawasan	**: ULIM**	**Jumlah Penduduk**	**238**	Jiwa
		Jumlah KK	**76**	KK

BATEN RATA

Luas SK	**9,37**	Ha
Luas Verifikasi	**9,37**	Ha
Jumlah Bangunan	**48**	Unit
Jumlah Penduduk	**152**	Jiwa
Jumlah KK	**54**	KK

TGK. DI GUDONG

Luas SK	**3,38**	Ha
Luas Verifikasi	**3,38**	Ha
Jumlah Bangunan	**19**	Unit
Jumlah Penduduk	**86**	Jiwa
Jumlah KK	**22**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	3,00	Unit	4,48%	**0**	3,00	Unit	6,25%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,00	Unit	1,49%	**0**	-	Unit	0,00%	0	1,00	Unit	5,26%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	590,00	Meter	51,75%	**3**	590,00	Meter	66,29%	3	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	260,00	Meter	22,81%	**0**	10,00	Meter	1,12%	0	250,00	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**25,88%**				**33,15%**				**50,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	11,00	KK	14,47%	**0**	11,00	KK	20,37%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	53,00	KK	69,74%	**3**	53,00	KK	98,15%	5	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**34,87%**				**49,07%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	650,00	Meter	54,17%	**3**	500,00	Meter	0,00%	0	150,00	Meter	33,33%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	280,00	Meter	23,33%	**0**	130,00	Meter	17,33%	0	150,00	Meter	33,33%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**18,06%**				**0,00%**				**22,22%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	**0**	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	54,00	KK	71,05%	**3**	54,00	KK	100,00%	5	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	74,00	KK	97,37%	**5**	54,00	KK	100,00%	5	20,00	KK	90,91%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**84,21%**				**100,00%**				**45,45%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	19,00	Unit	28,36%	**1**	-	Unit	0,00%	0	19,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**14,18%**				**0,00%**				**50,00%**	
				TOTAL NILAI	**18**			**TOTAL NILAI**	**18**			**TOTAL NILAI**	**17**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**25,31%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**26,03%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**23,95%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK TANJONG ULIM/KEUDE PAREK

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	8,03	Ha
Kecamatan	: ULIM	Jumlah Bangunan	143	Unit
Kawasan	: ULIM	Jumlah Penduduk	612	Jiwa
		Jumlah KK	179	KK

LAMPOH KUTA		
Luas SK	2,90	Ha
Luas Verifikasi	2,90	Ha
Jumlah Bangunan	48	Unit
Jumlah Penduduk	201	Jiwa
Jumlah KK	56	KK

KEUDE PAREK		
Luas SK	2,38	Ha
Luas Verifikasi	2,38	Ha
Jumlah Bangunan	46	Unit
Jumlah Penduduk	196	Jiwa
Jumlah KK	57	KK

PANGLIMA DAUD		
Luas SK	2,75	Ha
Luas Verifikasi	2,75	Ha
Jumlah Bangunan	49	Unit
Jumlah Penduduk	215	Jiwa
Jumlah KK	66	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				LAMPOH KUTA				KEUDE PAREK				PANGLIMA DAUD			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	106,00	Unit	74,13%	3	42,00	Unit	87,50%	5	16,00	Unit	34,78%	1	48,00	Unit	97,96%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	11,00	Unit	7,69%	0	6,00	Unit	12,50%	0	1,00	Unit	2,17%	0	4,00	Unit	8,16%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,71%				29,17%				11,59%				32,65%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	180,00	Meter	16,19%	0	-	Meter	0,00%	0	180,00	Meter	51,43%	3	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				25,71%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	11,00	KK	6,15%	0	6,00	KK	10,71%	0	2,00	KK	3,51%	0	3,00	KK	4,55%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	3,00	KK	1,68%	0	1,00	KK	1,79%	0	2,00	KK	3,51%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	187,00	Meter	24,98%	0	-	Meter	0,00%	0	187,00	Meter	53,43%	3	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	358,32	Meter	47,86%	1	160,45	Meter	100,00%	5	163,00	Meter	46,57%	1	34,87	Meter	14,63%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,95%				33,33%				33,33%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	7,00	KK	3,91%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	5,26%	0	4,00	KK	6,06%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	7,00	KK	3,91%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	5,26%	0	4,00	KK	6,06%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	179,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5	57,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	174,00	KK	97,21%	5	56,00	KK	100,00%	5	52,00	KK	91,23%	5	66,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,60%				100,00%				95,61%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	143,00	Unit	100,00%	5	48,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	49,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	19			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	23			TOTAL NILAI	20
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	27,04%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	30,36%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	30,89%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	26,09%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK MESJID ULIM BAROH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	9,79	Ha
Kecamatan	: ULIM	Jumlah Bangunan	173	Unit
Kawasan	: ULIM	Jumlah Penduduk	788	Jiwa
		Jumlah KK	212	KK

DUSUN CHIEK BEN PASU		
Luas SK	5,55	Ha
Luas Verifikasi	5,55	Ha
Jumlah Bangunan	82	Unit
Jumlah Penduduk	392	Jiwa
Jumlah KK	103	KK

DUSUN KEUDEE TUHA		
Luas SK	2,74	Ha
Luas Verifikasi	2,74	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	204	Jiwa
Jumlah KK	60	KK

TANJUNG PAHLAWAN		
Luas SK	1,50	Ha
Luas Verifikasi	1,50	Ha
Jumlah Bangunan	40	Unit
Jumlah Penduduk	192	Jiwa
Jumlah KK	49	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN CHIEK BEN PASU				DUSUN KEUDEE TUHA				TANJUNG PAHLAWAN			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	140,00	Unit	80,92%	5	80,00	Unit	97,56%	5	32,00	Unit	62,75%	3	28,00	Unit	70,00%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	38,00	Unit	21,97%	0	2,00	Unit	2,44%	0	12,00	Unit	23,53%	0	24,00	Unit	60,00%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,97%				32,52%				20,92%				43,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	881,00	Meter	40,86%	1	402,00	Meter	31,38%	1	270,00	Meter	57,32%	3	209,00	Meter	51,73%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				20,43%				15,69%				28,66%				25,87%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	20,00	KK	9,43%	0	6,00	KK	5,83%	0	8,00	KK	13,33%	0	6,00	KK	12,24%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	23,00	KK	10,85%	0	-	KK	0,00%	0	12,00	KK	20,00%	0	11,00	KK	22,45%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	501,18	Meter	34,21%	1	437,63	Meter	52,25%	3	-	Meter	0,00%	0	63,56	Meter	32,34%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				11,40%				17,42%				0,00%				10,78%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	18,00	KK	8,49%	0	10,00	KK	9,71%	0	1,00	KK	1,67%	0	7,00	KK	14,29%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	18,00	KK	8,49%	0	10,00	KK	9,71%	0	1,00	KK	1,67%	0	7,00	KK	14,29%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	212,00	KK	100,00%	5	103,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	200,00	KK	94,34%	5	103,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	85,00%	5	46,00	KK	93,88%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,17%				100,00%				92,50%				96,94%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	173,00	Unit	100,00%	5	82,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI			22	TOTAL NILAI			24	TOTAL NILAI			21	TOTAL NILAI			25
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			29,43%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			30,80%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			27,44%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			32,42%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK NANGGROE BARAT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	38,35	Ha
Kecamatan	: ULIM	Jumlah Bangunan	149	Unit
Kawasan	: ULIM	Jumlah Penduduk	651	Jiwa
		Jumlah KK	189	KK

DUSUN BLANG USI		
Luas SK	13,18	Ha
Luas Verifikasi	13,18	Ha
Jumlah Bangunan	43	Unit
Jumlah Penduduk	155	Jiwa
Jumlah KK	47	KK

DUSUN COT BI		
Luas SK	9,49	Ha
Luas Verifikasi	9,49	Ha
Jumlah Bangunan	35	Unit
Jumlah Penduduk	149	Jiwa
Jumlah KK	49	KK

DUSUN MANCANG		
Luas SK	13,13	Ha
Luas Verifikasi	13,13	Ha
Jumlah Bangunan	34	Unit
Jumlah Penduduk	173	Jiwa
Jumlah KK	47	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BLANG USI				DUSUN COT BI				DUSUN MANCANG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	140,00	Unit	93,96%	5	41,00	Unit	95,35%	5	35,00	Unit	100,00%	5	29,00	Unit	85,29%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,00	Unit	0,67%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				31,32%				31,78%				33,33%				28,43%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.193,53	Meter	64,29%	3	1.067,93	Meter	76,09%	5	537,57	Meter	79,35%	5	519,48	Meter	48,38%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,15%				38,05%				39,68%				24,19%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	71,00	KK	37,57%	1	2,00	KK	4,26%	0	49,00	KK	100,00%	5	19,00	KK	40,43%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				18,78%				0,00%				50,00%				20,21%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.193,53	Meter	64,29%	3	1.067,93	Meter	76,09%	5	537,57	Meter	79,35%	5	519,48	Meter	48,38%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				21,43%				25,36%				26,45%				16,13%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	189,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	156,00	KK	82,54%	5	14,00	KK	29,79%	1	49,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				91,27%				64,89%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	149,00	Unit	100,00%	5	43,00	Unit	100,00%	5	35,00	Unit	100,00%	5	34,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		23
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,99%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		30,01%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		42,78%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,14%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: ULIM**
Kawasan	**: ULIM**

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	38,35	Ha
Jumlah Bangunan	149	Unit
Jumlah Penduduk	651	Jiwa
Jumlah KK	189	KK

DUSUN TANJONG

Luas SK	2,54	Ha
Luas Verifikasi	2,54	Ha
Jumlah Bangunan	37	Unit
Jumlah Penduduk	174	Jiwa
Jumlah KK	46	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	140,00	Unit	93,96%	5	35,00	Unit	94,59%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,00	Unit	0,67%	0	1,00	Unit	2,70%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				31,32%				31,53%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.193,53	Meter	64,29%	3	68,55	Meter	26,66%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,15%				13,33%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	71,00	KK	37,57%	1	1,00	KK	2,17%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				18,78%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.193,53	Meter	64,29%	3	68,55	Meter	26,66%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				21,43%				8,89%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	189,00	KK	100,00%	5	46,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	156,00	KK	82,54%	5	46,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				91,27%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	149,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		22
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,99%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,11%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK REULEUT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**8,15**	Ha
Kecamatan	**: ULIM**	**Jumlah Bangunan**	**70**	Unit
Kawasan	**: ULIM**	**Jumlah Penduduk**	**265**	Jiwa
		Jumlah KK	**84**	KK

DUSUN SUKA MAKMUR		
Luas SK	**5,22**	Ha
Luas Verifikasi	**5,22**	Ha
Jumlah Bangunan	**37**	Unit
Jumlah Penduduk	**150**	Jiwa
Jumlah KK	**48**	KK

DUSUN BLANGKRIENG JAYA		
Luas SK	**2,93**	Ha
Luas Verifikasi	**2,93**	Ha
Jumlah Bangunan	**33**	Unit
Jumlah Penduduk	**115**	Jiwa
Jumlah KK	**36**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	15,00	Unit	21,43%	**0**	10,00	Unit	27,03%	1	5,00	Unit	15,15%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	6,00	Unit	8,57%	**0**	3,00	Unit	8,11%	0	3,00	Unit	9,09%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**0,00%**				**9,01%**				**0,00%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	622,51	Meter	38,93%	**1**	385,30	Meter	61,64%	3	237,21	Meter	24,35%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**19,46%**				**30,82%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	55,00	KK	65,48%	**3**	42,00	KK	87,50%	5	13,00	KK	36,11%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	44,00	KK	52,38%	**3**	30,00	KK	62,50%	3	14,00	KK	38,89%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**58,93%**				**75,00%**				**37,50%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	682,00	Meter	36,83%	**1**	334,00	Meter	37,66%	1	348,00	Meter	36,06%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**12,28%**				**12,55%**				**12,02%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	31,00	KK	36,90%	**1**	15,00	KK	31,25%	1	16,00	KK	44,44%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	31,00	KK	36,90%	**1**	15,00	KK	31,25%	1	16,00	KK	44,44%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**36,90%**				**31,25%**				**44,44%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	84,00	KK	100,00%	**5**	48,00	KK	100,00%	5	36,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	84,00	KK	100,00%	**5**	48,00	KK	100,00%	5	36,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	70,00	Unit	100,00%	**5**	37,00	Unit	100,00%	5	33,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**				**50,00%**	
				TOTAL NILAI	**25**			**TOTAL NILAI**	**30**			**TOTAL NILAI**	**20**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**39,65%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**44,09%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**34,85%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

6. KECAMATAN MEURAH DUA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	84,98	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	1.213	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	5.269	Jiwa
		Jumlah KK	1.487	KK

Meunasah Bie				
Luas SK	20,88	Ha		
Luas Verifikasi	20,88	Ha		
Jumlah Bangunan	247	Unit		
Jumlah Penduduk	1.154	Jiwa		
Jumlah KK	312	KK		

Meunasah Raya				
Luas SK	20,59	Ha		
Luas Verifikasi	20,59	Ha		
Jumlah Bangunan	228	Unit		
Jumlah Penduduk	954	Jiwa		
Jumlah KK	274	KK		

Meunasah Mancang				
Luas SK	6,97	Ha		
Luas Verifikasi	6,97	Ha		
Jumlah Bangunan	102	Unit		
Jumlah Penduduk	484	Jiwa		
Jumlah KK	129	KK		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	787,00	Unit	64,88%	3	143,00	Unit	57,89%	3	59,00	Unit	25,88%	1	76,00	Unit	74,51%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	179,00	Unit	14,76%	0	12,00	Unit	4,86%	0	65,00	Unit	28,51%	1	13,00	Unit	12,75%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,63%				19,30%				18,13%				24,84%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.411,45	Meter	7,09%	0	-	Meter	0,00%	0	880,00	Meter	12,62%	0	94,35	Meter	7,47%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.255,25	Meter	51,53%	3	766,10	Meter	15,22%	0	4.490,00	Meter	64,38%	3	414,07	Meter	32,77%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				25,76%				0,00%				32,19%				16,38%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	510,00	KK	34,30%	1	135,00	KK	43,27%	1	90,00	KK	32,85%	1	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	373,00	KK	25,08%	1	51,00	KK	16,35%	0	1,00	KK	0,36%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				29,69%				21,63%				16,42%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,30	Ha	0,35%	0	-	Ha	0,00%	0	0,30	Ha	1,46%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.772,79	Meter	29,47%	1	839,38	Meter	0,00%	0	500,00	Meter	27,84%	1	302,29	Meter	40,79%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	5.980,23	Meter	63,57%	3	1.144,75	Meter	57,70%	3	1.296,00	Meter	72,16%	3	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				31,01%				19,23%				33,33%				13,60%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	92,00	KK	6,19%	0	3,00	KK	0,96%	0	6,00	KK	2,19%	0	3,00	KK	2,33%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	92,00	KK	6,19%	0	3,00	KK	0,96%	0	6,00	KK	2,19%	0	3,00	KK	2,33%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.487,00	KK	100,00%	5	312,00	KK	100,00%	5	274,00	KK	100,00%	5	129,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.415,00	KK	95,16%	5	261,00	KK	83,65%	5	259,00	KK	94,53%	5	129,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,58%				91,83%				97,26%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.213,00	Unit	100,00%	5	247,00	Unit	100,00%	5	228,00	Unit	100,00%	5	102,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		22		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		20
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		36,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		28,86%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,33%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,26%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	84,98	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	1.213	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	5.269	Jiwa
		Jumlah KK	1.487	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	787,00	Unit	64,88%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	179,00	Unit	14,76%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,63%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.411,45	Meter	7,09%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.255,25	Meter	51,53%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				25,76%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	510,00	KK	34,30%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	373,00	KK	25,08%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				29,69%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,30	Ha	0,35%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.772,79	Meter	29,47%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	5.980,23	Meter	63,57%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				31,01%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	92,00	KK	6,19%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	92,00	KK	6,19%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.487,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.415,00	KK	95,16%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,58%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.213,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%	
	TOTAL NILAI				27
	TINGKAT KEKUMUHAN				KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL				36,52%
	KONTRIBUSI PENANGANAN				0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Meunasah Jurong/Teupin Pukat

Luas SK	13,42	Ha
Luas Verifikasi	13,42	Ha
Jumlah Bangunan	176	Unit
Jumlah Penduduk	718	Jiwa
Jumlah KK	214	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
140,00	Unit	79,55%	5
-	Ha	0,00%	0
27,00	Unit	15,34%	0
		26,52%	
39,89	Meter	1,84%	0
1.384,85	Meter	63,82%	3
		31,91%	
13,00	KK	6,07%	0
22,00	KK	10,28%	0
		0,00%	
-	Ha	0,00%	0
540,08	Meter	29,53%	1
1.119,67	Meter	61,22%	3
		30,25%	
22,00	KK	10,28%	0
22,00	KK	10,28%	0
		0,00%	
214,00	KK	100,00%	5
214,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
176,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			27
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			34,10%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

Lueng Bimba

Luas SK	4,86	Ha
Luas Verifikasi	4,86	Ha
Jumlah Bangunan	165	Unit
Jumlah Penduduk	689	Jiwa
Jumlah KK	192	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
85,00	Unit	51,52%	3
-	Ha	0,00%	0
4,00	Unit	2,42%	0
		17,17%	
-	Meter	0,00%	0
520,06	Meter	56,61%	3
		28,30%	
3,00	KK	1,56%	0
52,00	KK	27,08%	1
		13,54%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
323,54	Meter	100,00%	5
		33,33%	
30,00	KK	15,63%	0
30,00	KK	15,63%	0
		0,00%	
192,00	KK	100,00%	5
192,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
-	Unit	0,00%	0
165,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			27
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			34,62%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

Pante Beureune

	4,63	Ha
	4,63	Ha
	91	Unit
	425	Jiwa
	121	KK

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
81,00	Unit	89,01%	5
-	Ha	0,00%	0
2,00	Unit	2,20%	0
		29,67%	
-	Meter	0,00%	0
962,20	Meter	83,92%	5
		41,96%	
47,00	KK	38,84%	1
11,00	KK	9,09%	0
		19,42%	
-	Ha	0,00%	0
293,70	Meter	0,00%	0
30,57	Meter	8,24%	0
		0,00%	
-	KK	0,00%	0
-	KK	0,00%	0
		0,00%	
121,00	KK	100,00%	5
115,00	KK	95,04%	5
		65,01%	
-	Unit	0,00%	0
91,00	Unit	100,00%	5
		50,00%	
TOTAL NILAI			26
TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			29,44%
KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

					Beuringen	
Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha	**13,62**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**84,98**	Ha	**13,62**	Ha
Kecamatan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Bangunan**	**1.213**	Unit	**204**	Unit
Kawasan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Penduduk**	**5.269**	Jiwa	**845**	Jiwa
		Jumlah KK	**1.487**	KK	**245**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	787,00	Unit	64,88%	3	203,00	Unit	99,51%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	179,00	Unit	14,76%	0	56,00	Unit	27,45%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**21,63%**				**42,32%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.411,45	Meter	7,09%	0	397,21	Meter	16,57%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	10.255,25	Meter	51,53%	3	1.717,96	Meter	71,65%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**25,76%**				**35,82%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	510,00	KK	34,30%	1	222,00	KK	90,61%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	373,00	KK	25,08%	1	236,00	KK	96,33%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**29,69%**				**93,47%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,30	Ha	0,35%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.772,79	Meter	29,47%	1	297,34	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	5.980,23	Meter	63,57%	3	2.065,70	Meter	87,42%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**31,01%**				**29,14%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	92,00	KK	6,19%	0	28,00	KK	11,43%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	92,00	KK	6,19%	0	28,00	KK	11,43%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.487,00	KK	100,00%	5	245,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.415,00	KK	95,16%	5	245,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**97,58%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.213,00	Unit	100,00%	5	204,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**	
			TOTAL NILAI		**27**		**TOTAL NILAI**		**39**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH SEDANG**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**36,52%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**50,11%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK MEUNASAH BIE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	20,88	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	247	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	1.154	Jiwa
		Jumlah KK	312	KK

DUSUN LAPANGAN

Luas SK	6,11	Ha
Luas Verifikasi	6,11	Ha
Jumlah Bangunan	82	Unit
Jumlah Penduduk	402	Jiwa
Jumlah KK	112	KK

DUSUN MADYA

Luas SK	4,66	Ha
Luas Verifikasi	4,66	Ha
Jumlah Bangunan	57	Unit
Jumlah Penduduk	267	Jiwa
Jumlah KK	70	KK

DUSUN MESJID

Luas SK	6,62	Ha
Luas Verifikasi	6,62	Ha
Jumlah Bangunan	47	Unit
Jumlah Penduduk	198	Jiwa
Jumlah KK	53	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN LAPANGAN				DUSUN MADYA				DUSUN MESJID			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	143,00	Unit	57,89%	3	22,00	Unit	26,83%	1	37,00	Unit	64,91%	3	45,00	Unit	95,74%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	4,86%	0	1,00	Unit	1,22%	0	6,00	Unit	10,53%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				19,30%				8,94%				21,64%				31,91%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	766,10	Meter	15,22%	0	335,63	Meter	21,22%	0	430,48	Meter	25,23%	1	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				12,62%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	135,00	KK	43,27%	1	63,00	KK	56,25%	3	1,00	KK	1,43%	0	36,00	KK	67,92%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51,00	KK	16,35%	0	51,00	KK	45,54%	1	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				21,63%				50,89%				0,00%				33,96%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	839,38	Meter	42,30%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	839,38	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.144,75	Meter	57,70%	3	259,91	Meter	100,00%	5	465,88	Meter	100,00%	5	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,00	KK	0,96%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,89%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3,00	KK	0,96%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,89%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	312,00	KK	100,00%	5	112,00	KK	100,00%	5	70,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	261,00	KK	83,65%	5	61,00	KK	54,46%	3	70,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				91,83%				77,23%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	247,00	Unit	100,00%	5	82,00	Unit	100,00%	5	57,00	Unit	100,00%	5	47,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		23		TOTAL NILAI		23		TOTAL NILAI		24		TOTAL NILAI		28	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		30,87%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,49%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,08%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,60%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: MEURAH DUA
Kawasan	: MEURAH DUA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	20,88	Ha
Jumlah Bangunan	247	Unit
Jumlah Penduduk	1.154	Jiwa
Jumlah KK	312	KK

DUSUN PANTEE

Luas SK	3,50	Ha
Luas Verifikasi	3,50	Ha
Jumlah Bangunan	61	Unit
Jumlah Penduduk	287	Jiwa
Jumlah KK	77	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	143,00	Unit	57,89%	3	39,00	Unit	63,93%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	12,00	Unit	4,86%	0	5,00	Unit	8,20%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				19,30%				21,31%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	766,10	Meter	15,22%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	135,00	KK	43,27%	1	35,00	KK	45,45%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	51,00	KK	16,35%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				21,63%				22,73%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	839,38	Meter	42,30%	1	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.144,75	Meter	57,70%	3	418,96	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,00	KK	0,96%	0	2,00	KK	2,60%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3,00	KK	0,96%	0	2,00	KK	2,60%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	312,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	261,00	KK	83,65%	5	77,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				91,83%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	247,00	Unit	100,00%	5	61,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	23			TOTAL NILAI	24
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	30,87%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,48%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK MEUNASAH RAYA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	20,59	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	228	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	954	Jiwa
		Jumlah KK	274	KK

KUTA BLANG		
Luas SK	7,52	Ha
Luas Verifikasi	7,52	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	228	Jiwa
Jumlah KK	60	KK

PALOH KUTA		
Luas SK	6,21	Ha
Luas Verifikasi	6,21	Ha
Jumlah Bangunan	59	Unit
Jumlah Penduduk	229	Jiwa
Jumlah KK	68	KK

MEURAH DUE		
Luas SK	5,58	Ha
Luas Verifikasi	5,58	Ha
Jumlah Bangunan	65	Unit
Jumlah Penduduk	267	Jiwa
Jumlah KK	72	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KUTA BLANG				PALOH KUTA				MEURAH DUE			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	59,00	Unit	25,88%	1	31,00	Unit	60,78%	3	16,00	Unit	27,12%	1	10,00	Unit	15,38%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	65,00	Unit	28,51%	1	12,00	Unit	23,53%	0	20,00	Unit	33,90%	1	29,00	Unit	44,62%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,13%				20,26%				20,34%				14,87%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	880,00	Meter	12,62%	0	240,00	Meter	11,40%	0	220,00	Meter	11,76%	0	240,00	Meter	12,45%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.490,00	Meter	64,38%	3	1.425,00	Meter	67,70%	3	1.547,00	Meter	82,68%	5	1.090,00	Meter	56,54%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,19%				33,85%				41,34%				28,27%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	90,00	KK	32,85%	1	28,00	KK	46,67%	1	10,00	KK	14,71%	0	25,00	KK	34,72%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,00	KK	0,36%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,39%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				16,42%				23,33%				0,00%				17,36%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,30	Ha	1,46%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	500,00	Meter	27,84%	1	-	Meter	0,00%	0	500,00	Meter	50,00%	1	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.296,00	Meter	72,16%	3	333,00	Meter	100,00%	5	500,00	Meter	50,00%	1	333,00	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	6,00	KK	2,19%	0	4,00	KK	6,67%	0	1,00	KK	1,47%	0	1,00	KK	1,39%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6,00	KK	2,19%	0	4,00	KK	6,67%	0	1,00	KK	1,47%	0	1,00	KK	1,39%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	274,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5	68,00	KK	100,00%	5	72,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	259,00	KK	94,53%	5	58,00	KK	96,67%	5	68,00	KK	100,00%	5	59,00	KK	81,94%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,26%				98,33%				100,00%				90,97%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	228,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	59,00	Unit	100,00%	5	65,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		24		TOTAL NILAI		25	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,33%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,02%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,00%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		33,54%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA
Kecamatan : MEURAH DUA
Kawasan : MEURAH DUA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	20,59	Ha
Jumlah Bangunan	228	Unit
Jumlah Penduduk	954	Jiwa
Jumlah KK	274	KK

PALOH COT

Luas SK	1,29	Ha
Luas Verifikasi	1,29	Ha
Jumlah Bangunan	53	Unit
Jumlah Penduduk	230	Jiwa
Jumlah KK	74	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	59,00	Unit	25,88%	1	2,00	Unit	3,77%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	65,00	Unit	28,51%	1	4,00	Unit	7,55%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,13%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	880,00	Meter	12,62%	0	180,00	Meter	16,82%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4.490,00	Meter	64,38%	3	428,00	Meter	40,00%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,19%				20,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	90,00	KK	32,85%	1	27,00	KK	36,49%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,00	KK	0,36%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				16,42%				18,24%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,30	Ha	1,46%	0	0,30	Ha	23,26%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	500,00	Meter	27,84%	1	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.296,00	Meter	72,16%	3	130,00	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	6,00	KK	2,19%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6,00	KK	2,19%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	274,00	KK	100,00%	5	74,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	259,00	KK	94,53%	5	74,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,26%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	228,00	Unit	100,00%	5	53,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	22
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,33%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,65%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK MEUNASAH MANCANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**6,97**	Ha
Kecamatan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Bangunan**	**102**	Unit
Kawasan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Penduduk**	**484**	Jiwa
		Jumlah KK	**129**	KK

LAMBADOK		
Luas SK	**1,95**	Ha
Luas Verifikasi	**1,95**	Ha
Jumlah Bangunan	**24**	Unit
Jumlah Penduduk	**112**	Jiwa
Jumlah KK	**29**	KK

LAM GEUNDRANG		
Luas SK	**3,00**	Ha
Luas Verifikasi	**3,00**	Ha
Jumlah Bangunan	**43**	Unit
Jumlah Penduduk	**205**	Jiwa
Jumlah KK	**53**	KK

PULO SIMINI		
Luas SK	**0,71**	Ha
Luas Verifikasi	**0,71**	Ha
Jumlah Bangunan	**13**	Unit
Jumlah Penduduk	**68**	Jiwa
Jumlah KK	**20**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76,00	Unit	74,51%	3	14,00	Unit	58,33%	3	42,00	Unit	97,67%	5	7,00	Unit	53,85%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	12,75%	0	2,00	Unit	8,33%	0	7,00	Unit	16,28%	0	1,00	Unit	7,69%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,84%				19,44%				32,56%				17,95%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	94,35	Meter	7,47%	0	19,66	Meter	6,17%	0	74,69	Meter	14,17%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	414,07	Meter	32,77%	1	79,15	Meter	24,82%	0	170,53	Meter	32,35%	1	137,83	Meter	45,60%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,38%				0,00%				16,18%				22,80%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	302,29	Meter	40,79%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	302,29	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13,60%				0,00%				0,00%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,00	KK	2,33%	0	1,00	KK	3,45%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	5,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3,00	KK	2,33%	0	1,00	KK	3,45%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	5,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	129,00	KK	100,00%	5	29,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	20,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	129,00	KK	100,00%	5	29,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5	20,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	102,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5	43,00	Unit	100,00%	5	13,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		20		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		21		TOTAL NILAI		24
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,26%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		24,21%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		28,39%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		32,01%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: MEURAH DUA**
Kawasan	**: MEURAH DUA**

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	6,97	Ha
Jumlah Bangunan	102	Unit
Jumlah Penduduk	484	Jiwa
Jumlah KK	129	KK

LAM RABO

Luas SK	1,31	Ha
Luas Verifikasi	1,31	Ha
Jumlah Bangunan	22	Unit
Jumlah Penduduk	99	Jiwa
Jumlah KK	27	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	76,00	Unit	74,51%	3	13,00	Unit	59,09%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	12,75%	0	3,00	Unit	13,64%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,84%				19,70%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	94,35	Meter	7,47%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	414,07	Meter	32,77%	1	26,56	Meter	23,03%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,38%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	302,29	Meter	40,79%	1	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13,60%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,00	KK	2,33%	0	1,00	KK	3,70%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3,00	KK	2,33%	0	1,00	KK	3,70%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	129,00	KK	100,00%	5	27,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	129,00	KK	100,00%	5	27,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	102,00	Unit	100,00%	5	22,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	20			TOTAL NILAI	18
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	29,26%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	24,24%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK MEUNASAH JURONG/TEUPIN PUKAT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	13,42	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	176	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	718	Jiwa
		Jumlah KK	214	KK

PANTE		
Luas SK	4,18	Ha
Luas Verifikasi	4,18	Ha
Jumlah Bangunan	47	Unit
Jumlah Penduduk	197	Jiwa
Jumlah KK	59	KK

TEUNGOH		
Luas SK	2,66	Ha
Luas Verifikasi	2,66	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	211	Jiwa
Jumlah KK	66	KK

TIMUR		
Luas SK	6,59	Ha
Luas Verifikasi	6,59	Ha
Jumlah Bangunan	78	Unit
Jumlah Penduduk	310	Jiwa
Jumlah KK	89	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				PANTE				TEUNGOH				TIMUR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	140,00	Unit	79,55%	5	35,00	Unit	74,47%	3	40,00	Unit	78,43%	5	65,00	Unit	83,33%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	27,00	Unit	15,34%	0	12,00	Unit	25,53%	1	3,00	Unit	5,88%	0	12,00	Unit	15,38%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,52%				33,33%				26,14%				27,78%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	39,89	Meter	1,84%	0	39,89	Meter	6,88%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.384,85	Meter	63,82%	3	227,34	Meter	39,20%	1	535,13	Meter	88,26%	5	622,38	Meter	63,28%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				31,91%				19,60%				44,13%				31,64%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	13,00	KK	6,07%	0	6,00	KK	10,17%	0	-	KK	0,00%	0	7,00	KK	7,87%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	22,00	KK	10,28%	0	10,00	KK	16,95%	0	1,00	KK	1,52%	0	11,00	KK	12,36%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	540,08	Meter	29,53%	1	540,08	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.119,67	Meter	61,22%	3	-	Meter	0,00%	0	445,96	Meter	93,51%	5	673,70	Meter	82,97%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				30,25%				0,00%				31,17%				27,66%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	22,00	KK	10,28%	0	10,00	KK	16,95%	0	3,00	KK	4,55%	0	9,00	KK	10,11%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	22,00	KK	10,28%	0	10,00	KK	16,95%	0	3,00	KK	4,55%	0	9,00	KK	10,11%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	214,00	KK	100,00%	5	59,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5	89,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	214,00	KK	100,00%	5	59,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5	89,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	176,00	Unit	100,00%	5	47,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	78,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		20		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		28	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,10%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		28,99%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,92%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		33,87%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK LUENG BIMBA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	4,86	Ha
Kecamatan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Bangunan**	165	Unit
Kawasan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Penduduk**	689	Jiwa
		Jumlah KK	192	KK

DUSUN TRIGEUNTEUNG		
Luas SK	1,09	Ha
Luas Verifikasi	1,09	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	153	Jiwa
Jumlah KK	45	KK

DUSUN KUPULA		
Luas SK	1,32	Ha
Luas Verifikasi	1,32	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	168	Jiwa
Jumlah KK	47	KK

DUSUN NIPAH		
Luas SK	1,86	Ha
Luas Verifikasi	1,86	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	179	Jiwa
Jumlah KK	47	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	85,00	Unit	51,52%	3	27,00	Unit	65,85%	3	38,00	Unit	92,68%	5	9,00	Unit	21,95%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	4,00	Unit	2,42%	0	1,00	Unit	2,44%	0	2,00	Unit	4,88%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				17,17%				21,95%				30,89%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	520,06	Meter	56,61%	3	103,78	Meter	48,37%	1	194,69	Meter	54,56%	3	67,11	Meter	38,47%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,30%				24,19%				27,28%				19,23%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3,00	KK	1,56%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,13%	0	3,00	KK	6,38%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	52,00	KK	27,08%	1	29,00	KK	64,44%	3	19,00	KK	40,43%	1	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				13,54%				32,22%				20,21%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	323,54	Meter	100,00%	5	13,15	Meter	100,00%	5	162,98	Meter	100,00%	5	123,67	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	30,00	KK	15,63%	0	3,00	KK	6,67%	0	5,00	KK	10,64%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	30,00	KK	15,63%	0	3,00	KK	6,67%	0	5,00	KK	10,64%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	192,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	192,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	165,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	29			TOTAL NILAI	21
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,62%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37,38%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37,39%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	28,94%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: MEURAH DUA**
Kawasan	**: MEURAH DUA**

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	4,86	Ha
Jumlah Bangunan	165	Unit
Jumlah Penduduk	689	Jiwa
Jumlah KK	192	KK

DUSUN NIPAH

Luas SK	0,60	Ha
Luas Verifikasi	0,60	Ha
Jumlah Bangunan	42	Unit
Jumlah Penduduk	189	Jiwa
Jumlah KK	53	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	85,00	Unit	51,52%	3	11,00	Unit	26,19%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	4,00	Unit	2,42%	0	1,00	Unit	2,38%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				17,17%				8,73%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	520,06	Meter	56,61%	3	154,49	Meter	89,34%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,30%				44,67%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	3,00	KK	1,56%	0	(1,00)	KK	-1,89%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	52,00	KK	27,08%	1	4,00	KK	7,55%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				13,54%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	323,54	Meter	100,00%	5	23,75	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	30,00	KK	15,63%	0	22,00	KK	41,51%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	30,00	KK	15,63%	0	22,00	KK	41,51%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				41,51%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	192,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	192,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	165,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	28
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,62%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,75%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

f. NUMERIK PANTE BEUREUNE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	4,63	Ha
Kecamatan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Bangunan**	91	Unit
Kawasan	**: MEURAH DUA**	**Jumlah Penduduk**	425	Jiwa
		Jumlah KK	121	KK

SEUKE

Luas SK	2,99	Ha
Luas Verifikasi	2,99	Ha
Jumlah Bangunan	52	Unit
Jumlah Penduduk	226	Jiwa
Jumlah KK	70	KK

U GADENG

Luas SK	1,64	Ha
Luas Verifikasi	1,64	Ha
Jumlah Bangunan	39	Unit
Jumlah Penduduk	199	Jiwa
Jumlah KK	51	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	81,00	Unit	89,01%	5	46,00	Unit	88,46%	5	35,00	Unit	89,74%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2,00	Unit	2,20%	0	2,00	Unit	3,85%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				29,67%				29,49%				29,91%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	962,20	Meter	83,92%	5	563,13	Meter	87,48%	5	399,07	Meter	79,35%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				41,96%				43,74%				39,68%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	47,00	KK	38,84%	1	34,00	KK	48,57%	1	13,00	KK	25,49%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	11,00	KK	9,09%	0	8,00	KK	11,43%	0	3,00	KK	5,88%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				19,42%				24,29%				12,75%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	293,70	Meter	79,15%	5	293,70	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	30,57	Meter	8,24%	0	-	Meter	0,00%	0	30,57	Meter	39,52%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				26,38%				0,00%				13,17%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	121,00	KK	100,00%	5	70,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	115,00	KK	95,04%	5	64,00	KK	91,43%	5	51,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,52%				95,71%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	91,00	Unit	100,00%	5	52,00	Unit	100,00%	5	39,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	31			TOTAL NILAI	26			TOTAL NILAI	27
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37,85%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,75%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,07%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

g. NUMERIK BEURINGEN

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	13,62	Ha
Kecamatan	: MEURAH DUA	Jumlah Bangunan	204	Unit
Kawasan	: MEURAH DUA	Jumlah Penduduk	845	Jiwa
		Jumlah KK	245	KK

DUSUN BINEH PAYA		
Luas SK	4,91	Ha
Luas Verifikasi	4,91	Ha
Jumlah Bangunan	66	Unit
Jumlah Penduduk	278	Jiwa
Jumlah KK	81	KK

DUSUN PAYA UNOK		
Luas SK	5,01	Ha
Luas Verifikasi	5,01	Ha
Jumlah Bangunan	79	Unit
Jumlah Penduduk	315	Jiwa
Jumlah KK	93	KK

DUSUN KUTA SAGOE		
Luas SK	3,70	Ha
Luas Verifikasi	3,70	Ha
Jumlah Bangunan	59	Unit
Jumlah Penduduk	252	Jiwa
Jumlah KK	71	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BINEH PAYA				DUSUN PAYA UNOK				DUSUN KUTA SAGOE			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	203,00	Unit	99,51%	5	65,00	Unit	98,48%	5	79,00	Unit	100,00%	5	59,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	56,00	Unit	27,45%	1	38,00	Unit	57,58%	3	3,00	Unit	3,80%	0	15,00	Unit	25,42%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				42,32%				52,02%				33,33%				41,81%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	397,21	Meter	16,57%	0	170,18	Meter	17,46%	0	183,68	Meter	21,73%	0	43,34	Meter	7,50%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.717,96	Meter	71,65%	3	709,61	Meter	72,81%	3	473,89	Meter	56,06%	3	534,47	Meter	92,50%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				35,82%				36,40%				28,03%				46,25%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	222,00	KK	90,61%	5	70,00	KK	86,42%	5	81,00	KK	87,10%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	236,00	KK	96,33%	5	81,00	KK	100,00%	5	84,00	KK	90,32%	5	71,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				93,47%				93,21%				88,71%				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	297,34	Meter	12,58%	0	112,84	Meter	0,00%	0	141,73	Meter	20,98%	0	42,76	Meter	4,84%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.065,70	Meter	87,42%	5	691,39	Meter	85,97%	5	533,95	Meter	79,02%	5	840,36	Meter	95,16%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,14%				28,66%				26,34%				31,72%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	28,00	KK	11,43%	0	8,00	KK	9,88%	0	17,00	KK	18,28%	0	3,00	KK	4,23%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	28,00	KK	11,43%	0	8,00	KK	9,88%	0	17,00	KK	18,28%	0	3,00	KK	4,23%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	245,00	KK	100,00%	5	81,00	KK	100,00%	5	93,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	245,00	KK	100,00%	5	81,00	KK	100,00%	5	93,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	204,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	79,00	Unit	100,00%	5	59,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI			39	TOTAL NILAI			41	TOTAL NILAI			38	TOTAL NILAI			41
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH SEDANG
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			50,11%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			51,47%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			46,63%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			52,83%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

7. NUMERIK KECAMATAN MEUREUDU

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	217,99	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	2.729	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	10.740	Jiwa
		Jumlah KK	3.210	KK

Keude Meureudeu		
Luas SK	11,58	Ha
Luas Verifikasi	11,58	Ha
Jumlah Bangunan	144	Unit
Jumlah Penduduk	418	Jiwa
Jumlah KK	121	KK

Meuraksa		
Luas SK	27,34	Ha
Luas Verifikasi	27,34	Ha
Jumlah Bangunan	383	Unit
Jumlah Penduduk	1.618	Jiwa
Jumlah KK	478	KK

Meunasah Balek		
Luas SK	16,92	Ha
Luas Verifikasi	16,92	Ha
Jumlah Bangunan	359	Unit
Jumlah Penduduk	473	Jiwa
Jumlah KK	445	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				Keude Meureudeu				Meuraksa				Meunasah Balek			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	64,13%	3	61,00	Unit	42,36%	1	293,00	Unit	76,50%	5	289,00	Unit	80,50%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit	14,69%	0	13,00	Unit	9,03%	0	45,00	Unit	11,75%	0	68,00	Unit	18,94%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,38%				14,12%				25,50%				26,83%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	8,10%	0	800,00	Meter	29,85%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter	36,75%	1	930,00	Meter	34,70%	1	1.701,99	Meter	29,62%	1	2.103,26	Meter	42,97%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				18,38%				32,28%				14,81%				21,49%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	33,68%	1	10,00	KK	8,26%	0	4,00	KK	0,84%	0	13,00	KK	2,92%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK	47,45%	1	2,00	KK	1,65%	0	477,00	KK	99,79%	5	162,00	KK	36,40%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,56%				0,00%				49,90%				18,20%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9.052,80	Meter	33,99%	1	600,00	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	460,00	Meter	12,22%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	9.460,84	Meter	35,52%	1	1.050,00	Meter	56,76%	3	2.086,93	Meter	60,25%	3	1.958,56	Meter	52,01%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				23,17%				18,92%				20,08%				17,34%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261,00	KK	8,13%	0	9,00	KK	7,44%	0	-	KK	0,00%	0	18,00	KK	4,04%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261,00	KK	8,13%	0	9,00	KK	7,44%	0	-	KK	0,00%	0	18,00	KK	4,04%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.697,00	KK	84,02%	5	53,00	KK	43,80%	1	478,00	KK	100,00%	5	445,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.737,00	KK	85,26%	5	121,00	KK	100,00%	5	223,00	KK	46,65%	1	423,00	KK	95,06%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,64%				71,90%				73,33%				97,53%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.259,00	Unit	82,78%	5	74,00	Unit	51,39%	3	383,00	Unit	100,00%	5	359,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2.489,00	Unit	91,21%	5	128,00	Unit	88,89%	5	383,00	Unit	100,00%	5	359,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,99%				70,14%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		20		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		30
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,30%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,62%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,20%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	217,99	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	2.729	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	10.740	Jiwa
		Jumlah KK	3.210	KK

Pohroh		
Luas SK	6,24	Ha
Luas Verifikasi	6,24	Ha
Jumlah Bangunan	86	Unit
Jumlah Penduduk	359	Jiwa
Jumlah KK	121	KK

Rungkom		
Luas SK	6,16	Ha
Luas Verifikasi	6,16	Ha
Jumlah Bangunan	101	Unit
Jumlah Penduduk	401	Jiwa
Jumlah KK	106	KK

Manyang Cut		
	28,90	Ha
	28,90	Ha
	341	Unit
	1.499	Jiwa
	444	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				Pohroh				Rungkom				Manyang Cut			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	64,13%	3	-	Unit	0,00%	0	9,00	Unit	8,91%	0	280,00	Unit	82,11%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit	14,69%	0	8,00	Unit	9,30%	0	37,00	Unit	36,63%	1	66,00	Unit	19,35%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,38%				0,00%				12,21%				27,37%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	8,10%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	1.180,00	Meter	31,31%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter	36,75%	1	923,92	Meter	39,30%	1	1.375,14	Meter	87,33%	5	1.889,00	Meter	50,12%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				18,38%				19,65%				43,66%				40,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	33,68%	1	68,00	KK	56,20%	3	104,00	KK	98,11%	5	159,00	KK	35,81%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK	47,45%	1	78,00	KK	64,46%	3	102,00	KK	96,23%	5	61,00	KK	13,74%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,56%				60,33%				97,17%				17,91%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9.052,80	Meter	33,99%	1	542,37	Meter	49,49%	1	1.473,07	Meter	0,00%	0	601,00	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	9.460,84	Meter	35,52%	1	2,43	Meter	0,22%	0	-	Meter	0,00%	0	1.048,00	Meter	43,32%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				23,17%				16,50%				0,00%				14,44%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261,00	KK	8,13%	0	14,00	KK	11,57%	0	19,00	KK	17,92%	0	46,00	KK	10,36%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261,00	KK	8,13%	0	14,00	KK	11,57%	0	19,00	KK	17,92%	0	46,00	KK	10,36%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.697,00	KK	84,02%	5	121,00	KK	100,00%	5	106,00	KK	100,00%	5	299,00	KK	67,34%	3
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.737,00	KK	85,26%	5	121,00	KK	100,00%	5	103,00	KK	97,17%	5	307,00	KK	69,14%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,64%				100,00%				98,58%				45,50%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.259,00	Unit	82,78%	5	86,00	Unit	100,00%	5	101,00	Unit	100,00%	5	117,00	Unit	34,31%	1
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2.489,00	Unit	91,21%	5	86,00	Unit	100,00%	5	101,00	Unit	100,00%	5	117,00	Unit	34,31%	1
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,99%				100,00%				100,00%				34,31%	
			TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		36		TOTAL NILAI		17
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,30%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		42,35%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		50,23%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		25,75%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha				**7,14**	Ha			**6,48**	Ha			**15,45**	Ha		
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**217,99**	Ha				**7,14**	Ha			**6,48**	Ha			**15,45**	Ha		
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**2.729**	Unit				**131**	Unit			**113**	Unit			**222**	Unit		
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**10.740**	Jiwa				**446**	Jiwa			**473**	Jiwa			**981**	Jiwa		
		Jumlah KK	**3.210**	KK				**148**	KK			**136**	KK			**283**	KK		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	64,13%	3	62,00	Unit	47,33%	1	74,00	Unit	65,49%	3	82,00	Unit	36,94%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit	14,69%	0	84,00	Unit	64,12%	3	84,00	Unit	74,34%	3	21,00	Unit	9,46%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,38%				37,15%				46,61%				12,31%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	8,10%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter	36,75%	1	631,60	Meter	31,68%	1	639,91	Meter	45,13%	1	961,79	Meter	22,23%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				18,38%				15,84%				22,56%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	33,68%	1	146,00	KK	98,65%	5	65,00	KK	47,79%	1	119,00	KK	42,05%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK	47,45%	1	148,00	KK	100,00%	5	107,00	KK	78,68%	5	106,00	KK	37,46%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,56%				99,32%				63,24%				39,75%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9.052,80	Meter	33,99%	1	734,09	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	1.902,23	Meter	75,41%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	9.460,84	Meter	35,52%	1	-	Meter	0,00%	0	419,70	Meter	32,60%	1	282,15	Meter	11,18%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				23,17%				0,00%				10,87%				25,14%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261,00	KK	8,13%	0	37,00	KK	25,00%	1	28,00	KK	20,59%	0	26,00	KK	9,19%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261,00	KK	8,13%	0	37,00	KK	25,00%	1	28,00	KK	20,59%	0	26,00	KK	9,19%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				25,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.697,00	KK	84,02%	5	148,00	KK	100,00%	5	136,00	KK	100,00%	5	283,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.737,00	KK	85,26%	5	144,00	KK	97,30%	5	136,00	KK	100,00%	5	280,00	KK	98,94%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,64%				98,65%				100,00%				99,47%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.259,00	Unit	82,78%	5	131,00	Unit	100,00%	5	113,00	Unit	100,00%	5	222,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2.489,00	Unit	91,21%	5	131,00	Unit	100,00%	5	113,00	Unit	100,00%	5	222,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,99%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	28			TOTAL NILAI	37			TOTAL NILAI	34			TOTAL NILAI	26	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,30%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	53,71%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49,04%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	39,52%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**217,99**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**2.729**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**10.740**	Jiwa
		Jumlah KK	**3.210**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	64,13%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit	14,69%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,38%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	8,10%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter	36,75%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				18,38%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	33,68%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK	47,45%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,56%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9.052,80	Meter	33,99%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	9.460,84	Meter	35,52%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				23,17%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261,00	KK	8,13%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261,00	KK	8,13%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.697,00	KK	84,02%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.737,00	KK	85,26%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				84,64%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.259,00	Unit	82,78%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2.489,00	Unit	91,21%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,99%	
		TOTAL NILAI			28
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			39,30%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

- 60-80 KUMUH BERAT
- 38-59 KUMUH SEDANG
- 16-37 KUMUH RINGAN
- <16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Masjid Tuha/Dayah U Paneuk

65,19	Ha		
65,19	Ha		
379	Unit		
1.141	Jiwa		
354	KK		

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
263,00	Unit	69,39%	3
-	Ha	0,00%	0
11,00	Unit	2,90%	0
		23,13%	
1.840,00	Meter	17,52%	0
3.475,00	Meter	33,08%	1
		16,54%	
226,00	KK	63,84%	3
(11,00)	KK	-3,11%	0
		31,92%	
-	Ha	0,00%	0
300,00	Meter	16,83%	0
1.483,00	Meter	83,17%	5
		27,72%	
(13,00)	KK	-3,67%	0
(13,00)	KK	-3,67%	0
		0,00%	
54,00	KK	15,25%	0
307,00	KK	86,72%	5
		43,36%	
203,00	Unit	53,56%	3
379,00	Unit	100,00%	5
		76,78%	
	TOTAL NILAI		25
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,35%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Teupin Peuraho

13,09	Ha		
13,09	Ha		
201	Unit		
846	Jiwa		
256	KK		

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
150,00	Unit	74,63%	3
-	Ha	0,00%	0
10,00	Unit	4,98%	0
		24,88%	
-	Meter	0,00%	0
1.140,07	Meter	33,13%	1
		16,57%	
100,00	KK	39,06%	1
184,00	KK	71,88%	3
		55,47%	
-	Ha	0,00%	0
1.727,78	Meter	61,47%	3
118,50	Meter	4,22%	0
		20,49%	
64,00	KK	25,00%	1
64,00	KK	25,00%	1
		25,00%	
256,00	KK	100,00%	5
256,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
201,00	Unit	100,00%	5
201,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		33
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		48,91%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

Rhieng Krueng

8,14	Ha		
8,14	Ha		
150	Unit		
674	Jiwa		
182	KK		

KONDISI AWAL (BASELINE)			
NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
121,00	Unit	80,67%	5
-	Ha	0,00%	0
2,00	Unit	1,33%	0
		26,89%	
-	Meter	0,00%	0
1.170,19	Meter	41,04%	1
		20,52%	
61,00	KK	33,52%	1
87,00	KK	47,80%	1
		40,66%	
-	Ha	0,00%	0
-	Meter	0,00%	0
801,90	Meter	56,73%	3
		18,91%	
4,00	KK	2,20%	0
4,00	KK	2,20%	0
		0,00%	
182,00	KK	100,00%	5
182,00	KK	100,00%	5
		100,00%	
150,00	Unit	100,00%	5
150,00	Unit	100,00%	5
		100,00%	
	TOTAL NILAI		31
	TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,85%
	KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**217,99**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**2.729**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**10.740**	Jiwa
		Jumlah KK	**3.210**	KK

Rhieng Mancang	
5,36	Ha
5,36	Ha
119	Unit
483	Jiwa
136	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.750,00	Unit	64,13%	**3**	66,00	Unit	55,46%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	401,00	Unit	14,69%	**0**	18,00	Unit	15,13%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**21,38%**				**18,49%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3.820,00	Meter	8,10%	**0**	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	17.330,45	Meter	36,75%	**1**	388,56	Meter	24,23%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**18,38%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1.081,00	KK	33,68%	**1**	6,00	KK	4,41%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.523,00	KK	47,45%	**1**	20,00	KK	14,71%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**40,56%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9.052,80	Meter	33,99%	**1**	712,26	Meter	339,69%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	9.460,84	Meter	35,52%	**1**	209,68	Meter	14,15%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**23,17%**				**113,23%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	261,00	KK	8,13%	**0**	9,00	KK	6,62%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	261,00	KK	8,13%	**0**	9,00	KK	6,62%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	2.697,00	KK	84,02%	**5**	136,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	2.737,00	KK	85,26%	**5**	134,00	KK	98,53%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**84,64%**				**99,26%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2.259,00	Unit	82,78%	**5**	119,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	2.489,00	Unit	91,21%	**5**	119,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**86,99%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**28**		**TOTAL NILAI**		**28**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**39,30%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**47,28%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE MEUREUDEU

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**11,58**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**144**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**418**	Jiwa
		Jumlah KK	**121**	KK

Japakeh		
Luas SK	**1,30**	Ha
Luas Verifikasi	**1,30**	Ha
Jumlah Bangunan	**29**	Unit
Jumlah Penduduk	**129**	Jiwa
Jumlah KK	**35**	KK

MALEM DAGANG		
Luas SK	**3,40**	Ha
Luas Verifikasi	**3,40**	Ha
Jumlah Bangunan	**66**	Unit
Jumlah Penduduk	**69**	Jiwa
Jumlah KK	**20**	KK

KAMPUNG BARO		
Luas SK	**4,80**	Ha
Luas Verifikasi	**4,80**	Ha
Jumlah Bangunan	**25**	Unit
Jumlah Penduduk	**118**	Jiwa
Jumlah KK	**33**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				Japakeh				MALEM DAGANG				KAMPUNG BARO			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	61,00	Unit	42,36%	1	29,00	Unit	100,00%	5	3,00	Unit	4,55%	0	11,00	Unit	44,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	9,03%	0	11,00	Unit	37,93%	1	-	Unit	0,00%	0	1,00	Unit	4,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,12%				45,98%				0,00%				14,67%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	800,00	Meter	29,85%	1	200,00	Meter	33,33%	1	-	Meter	0,00%	0	300,00	Meter	33,33%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	930,00	Meter	34,70%	1	250,00	Meter	41,67%	1	-	Meter	0,00%	0	300,00	Meter	33,33%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,28%				37,50%				0,00%				33,33%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	10,00	KK	8,26%	0	-	KK	0,00%	0	4,00	KK	20,00%	0	5,00	KK	15,15%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2,00	KK	1,65%	0	1,00	KK	2,86%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	600,00	Meter	32,43%	1	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	200,00	Meter	33,33%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.050,00	Meter	56,76%	3	150,00	Meter	100,00%	5	300,00	Meter	100,00%	5	200,00	Meter	33,33%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,73%				33,33%				33,33%				22,22%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	9,00	KK	7,44%	0	8,00	KK	22,86%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	9,00	KK	7,44%	0	8,00	KK	22,86%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	53,00	KK	43,80%	1	-	KK	0,00%	0	20,00	KK	100,00%	5	33,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	121,00	KK	100,00%	5	35,00	KK	100,00%	5	20,00	KK	100,00%	5	33,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				71,90%				50,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	74,00	Unit	51,39%	3	-	Unit	0,00%	0	50,00	Unit	75,76%	3	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	128,00	Unit	88,89%	5	29,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	75,76%	3	25,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				70,14%				50,00%				75,76%				50,00%	
		TOTAL NILAI		21		TOTAL NILAI		23		TOTAL NILAI		21		TOTAL NILAI		20	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,17%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		30,97%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,87%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,46%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: MEUREUDU
Kawasan	: MEUREUDU

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	11,58	Ha
Jumlah Bangunan	144	Unit
Jumlah Penduduk	418	Jiwa
Jumlah KK	121	KK

Syiah Kuala

Luas SK	2,08	Ha
Luas Verifikasi	2,08	Ha
Jumlah Bangunan	24	Unit
Jumlah Penduduk	102	Jiwa
Jumlah KK	33	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	61,00	Unit	42,36%	1	18,00	Unit	75,00%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	13,00	Unit	9,03%	0	1,00	Unit	4,17%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,12%				25,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	800,00	Meter	29,85%	1	300,00	Meter	38,46%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	930,00	Meter	34,70%	1	380,00	Meter	48,72%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32,28%				43,59%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	10,00	KK	8,26%	0	1,00	KK	3,03%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2,00	KK	1,65%	0	1,00	KK	3,03%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	600,00	Meter	32,43%	1	400,00	Meter	50,00%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.050,00	Meter	56,76%	3	400,00	Meter	50,00%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				29,73%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	9,00	KK	7,44%	0	1,00	KK	3,03%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	9,00	KK	7,44%	0	1,00	KK	3,03%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	53,00	KK	43,80%	1	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	121,00	KK	100,00%	5	33,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				71,90%				50,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	74,00	Unit	51,39%	3	24,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	128,00	Unit	88,89%	5	24,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				70,14%				100,00%	
			TOTAL NILAI		21		TOTAL NILAI		22
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,17%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,99%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK MEURAKSA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	27,34	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	383	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	1.618	Jiwa
		Jumlah KK	478	KK

DUSUN PASI		
Luas SK	5,96	Ha
Luas Verifikasi	5,96	Ha
Jumlah Bangunan	107	Unit
Jumlah Penduduk	421	Jiwa
Jumlah KK	126	KK

DUSUN ALUE		
Luas SK	2,95	Ha
Luas Verifikasi	2,95	Ha
Jumlah Bangunan	57	Unit
Jumlah Penduduk	248	Jiwa
Jumlah KK	70	KK

DUSUN TIMUR		
Luas SK	4,36	Ha
Luas Verifikasi	4,36	Ha
Jumlah Bangunan	44	Unit
Jumlah Penduduk	218	Jiwa
Jumlah KK	58	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN PASI				DUSUN ALUE				DUSUN TIMUR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	293,00	Unit	76,50%	5	66,00	Unit	61,68%	3	11,00	Unit	19,30%	0	44,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	45,00	Unit	11,75%	0	9,00	Unit	8,41%	0	8,00	Unit	14,04%	0	4,00	Unit	9,09%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				25,50%				20,56%				0,00%				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.701,99	Meter	29,62%	1	571,11	Meter	37,10%	1	201,89	Meter	27,04%	1	187,45	Meter	20,90%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				14,81%				18,55%				13,52%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	4,00	KK	0,84%	0	2,00	KK	1,59%	0	1,00	KK	1,43%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	477,00	KK	99,79%	5	125,00	KK	99,21%	5	70,00	KK	100,00%	5	58,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				49,90%				49,60%				50,00%				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.086,93	Meter	60,25%	3	572,96	Meter	55,66%	3	215,24	Meter	43,04%	1	129,95	Meter	25,69%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,08%				18,55%				14,35%				8,56%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	478,00	KK	100,00%	5	126,00	KK	100,00%	5	70,00	KK	100,00%	5	58,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	223,00	KK	46,65%	1	96,00	KK	76,19%	5	25,00	KK	35,71%	1	29,00	KK	50,00%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				73,33%				88,10%				67,86%				75,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	383,00	Unit	100,00%	5	107,00	Unit	100,00%	5	57,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	383,00	Unit	100,00%	5	107,00	Unit	100,00%	5	57,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	30			TOTAL NILAI	32			TOTAL NILAI	23			TOTAL NILAI	27	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	40,52%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	42,19%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	35,10%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	38,13%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: MEUREUDU
Kawasan	: MEUREUDU

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	27,34	Ha
Jumlah Bangunan	383	Unit
Jumlah Penduduk	1.618	Jiwa
Jumlah KK	478	KK

DUSUN MATANG		
Luas SK	7,29	Ha
Luas Verifikasi	7,29	Ha
Jumlah Bangunan	80	Unit
Jumlah Penduduk	329	Jiwa
Jumlah KK	97	KK

DUSUN BARAT		
Luas SK	6,79	Ha
Luas Verifikasi	6,79	Ha
Jumlah Bangunan	95	Unit
Jumlah Penduduk	402	Jiwa
Jumlah KK	127	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	293,00	Unit	76,50%	5	77,00	Unit	96,25%	5	95,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	45,00	Unit	11,75%	0	8,00	Unit	10,00%	0	16,00	Unit	16,84%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				25,50%				32,08%				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.701,99	Meter	29,62%	1	140,38	Meter	13,76%	0	601,17	Meter	38,96%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				14,81%				0,00%				19,48%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	4,00	KK	0,84%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	0,79%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	477,00	KK	99,79%	5	97,00	KK	100,00%	5	127,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				49,90%				50,00%				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2.086,93	Meter	60,25%	3	701,58	Meter	99,28%	5	467,20	Meter	64,73%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,08%				33,09%				21,58%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	478,00	KK	100,00%	5	97,00	KK	100,00%	5	127,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	223,00	KK	46,65%	1	31,00	KK	31,96%	1	42,00	KK	33,07%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				73,33%				65,98%				66,54%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	383,00	Unit	100,00%	5	80,00	Unit	100,00%	5	95,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	383,00	Unit	100,00%	5	80,00	Unit	100,00%	5	95,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		30
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,17%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,56%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK MEUNASAH BALEK

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**16,92**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**359**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**1.401**	Jiwa
		Jumlah KK	**445**	KK

DAYAH KLENG		
Luas SK	**7,86**	Ha
Luas Verifikasi	**7,86**	Ha
Jumlah Bangunan	**126**	Unit
Jumlah Penduduk	**531**	Jiwa
Jumlah KK	**166**	KK

BALEK		
Luas SK	**5,10**	Ha
Luas Verifikasi	**5,10**	Ha
Jumlah Bangunan	**125**	Unit
Jumlah Penduduk	**447**	Jiwa
Jumlah KK	**157**	KK

DUSUN GUDONG		
Luas SK	**3,96**	Ha
Luas Verifikasi	**3,96**	Ha
Jumlah Bangunan	**108**	Unit
Jumlah Penduduk	**423**	Jiwa
Jumlah KK	**122**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	289,00	Unit	80,50%	5	87,00	Unit	69,05%	3	101,00	Unit	80,80%	5	101,00	Unit	93,52%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	68,00	Unit	18,94%	0	31,00	Unit	24,60%	0	22,00	Unit	17,60%	0	15,00	Unit	13,89%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,83%				23,02%				26,93%				31,17%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.103,26	Meter	42,97%	1	629,26	Meter	28,75%	1	603,91	Meter	43,02%	1	870,09	Meter	66,83%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21,49%				14,37%				21,51%				33,41%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	13,00	KK	2,92%	0	13,00	KK	7,83%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	162,00	KK	36,40%	1	4,00	KK	2,41%	0	147,00	KK	93,63%	5	11,00	KK	9,02%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				18,20%				0,00%				46,82%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	460,00	Meter	12,22%	0	300,00	Meter	16,87%	0	-	Meter	0,00%	0	160,00	Meter	24,29%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.958,56	Meter	52,01%	3	628,04	Meter	35,32%	1	1.106,63	Meter	83,28%	5	223,88	Meter	33,98%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				17,34%				11,77%				27,76%				11,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	18,00	KK	4,04%	0	13,00	KK	7,83%	0	1,00	KK	0,64%	0	4,00	KK	3,28%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	18,00	KK	4,04%	0	13,00	KK	7,83%	0	1,00	KK	0,64%	0	4,00	KK	3,28%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	445,00	KK	100,00%	5	166,00	KK	100,00%	5	157,00	KK	100,00%	5	122,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	423,00	KK	95,06%	5	155,00	KK	93,37%	5	151,00	KK	96,18%	5	117,00	KK	95,90%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,53%				96,69%				98,09%				97,95%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	359,00	Unit	100,00%	5	126,00	Unit	100,00%	5	125,00	Unit	100,00%	5	108,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	359,00	Unit	100,00%	5	126,00	Unit	100,00%	5	125,00	Unit	100,00%	5	108,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		36		TOTAL NILAI		29
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		40,20%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,12%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,87%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,12%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK POHROH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**6,24**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**86**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**359**	Jiwa
		Jumlah KK	**121**	KK

BAROH		
Luas SK	**1,75**	Ha
Luas Verifikasi	**1,75**	Ha
Jumlah Bangunan	**39**	Unit
Jumlah Penduduk	**162**	Jiwa
Jumlah KK	**56**	KK

DUSUN TENGOH		
Luas SK	**2,26**	Ha
Luas Verifikasi	**2,26**	Ha
Jumlah Bangunan	**17**	Unit
Jumlah Penduduk	**62**	Jiwa
Jumlah KK	**26**	KK

DUSUN TUNONG		
Luas SK	**2,23**	Ha
Luas Verifikasi	**2,23**	Ha
Jumlah Bangunan	**30**	Unit
Jumlah Penduduk	**135**	Jiwa
Jumlah KK	**39**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				BAROH				DUSUN TENGOH				DUSUN TUNONG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	8,00	Unit	9,30%	**0**	3,00	Unit	7,69%	0	2,00	Unit	11,76%	0	3,00	Unit	10,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	923,92	Meter	39,30%	**1**	528,34	Meter	37,39%	1	3,12	Meter	1,27%	0	392,47	Meter	56,60%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**19,65%**				**18,69%**				**0,00%**				**28,30%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	68,00	KK	56,20%	**3**	29,00	KK	51,79%	3	12,00	KK	46,15%	1	27,00	KK	69,23%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	78,00	KK	64,46%	**3**	36,00	KK	64,29%	3	12,00	KK	46,15%	1	30,00	KK	76,92%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**60,33%**				**58,04%**				**46,15%**				**73,08%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	542,37	Meter	49,49%	**1**	-	Meter	0,00%	0	241,45	Meter	99,00%	5	300,92	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2,43	Meter	0,22%	**0**	-	Meter	0,00%	0	2,43	Meter	1,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**16,50%**				**0,00%**				**33,00%**				**0,00%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14,00	KK	11,57%	**0**	2,00	KK	3,57%	0	3,00	KK	11,54%	0	9,00	KK	23,08%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	14,00	KK	11,57%	**0**	2,00	KK	3,57%	0	3,00	KK	11,54%	0	9,00	KK	23,08%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	121,00	KK	100,00%	**5**	56,00	KK	100,00%	5	26,00	KK	100,00%	5	39,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	121,00	KK	100,00%	**5**	56,00	KK	100,00%	5	26,00	KK	100,00%	5	39,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	86,00	Unit	100,00%	**5**	39,00	Unit	100,00%	5	17,00	Unit	100,00%	5	30,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	86,00	Unit	100,00%	**5**	39,00	Unit	100,00%	5	17,00	Unit	100,00%	5	30,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**28**		**TOTAL NILAI**		**27**		**TOTAL NILAI**		**27**		**TOTAL NILAI**		**31**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**42,35%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**39,53%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**39,88%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**43,05%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK RUNGKOM

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**6,16**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**101**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**401**	Jiwa
		Jumlah KK	**106**	KK

DUSUN TIMUR		
Luas SK	**3,26**	Ha
Luas Verifikasi	**3,26**	Ha
Jumlah Bangunan	**46**	Unit
Jumlah Penduduk	**176**	Jiwa
Jumlah KK	**50**	KK

DUSUN BARAT		
Luas SK	**2,90**	Ha
Luas Verifikasi	**2,90**	Ha
Jumlah Bangunan	**55**	Unit
Jumlah Penduduk	**225**	Jiwa
Jumlah KK	**56**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	9,00	Unit	8,91%	**0**	4,00	Unit	8,70%	0	5,00	Unit	9,09%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	37,00	Unit	36,63%	**1**	19,00	Unit	41,30%	1	18,00	Unit	32,73%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**12,21%**				**13,77%**				**10,91%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.375,14	Meter	87,33%	**5**	595,32	Meter	96,97%	5	779,82	Meter	81,17%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**43,66%**				**48,48%**				**40,58%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	104,00	KK	98,11%	**5**	49,00	KK	98,00%	5	55,00	KK	98,21%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	102,00	KK	96,23%	**5**	50,00	KK	100,00%	5	52,00	KK	92,86%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**97,17%**				**99,00%**				**95,54%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.473,07	Meter	93,54%	**5**	542,01	Meter	0,00%	0	931,06	Meter	96,91%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**31,18%**				**0,00%**				**32,30%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	19,00	KK	17,92%	**0**	7,00	KK	14,00%	0	12,00	KK	21,43%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	19,00	KK	17,92%	**0**	7,00	KK	14,00%	0	12,00	KK	21,43%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	106,00	KK	100,00%	**5**	50,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	103,00	KK	97,17%	**5**	47,00	KK	94,00%	5	56,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**98,58%**				**97,00%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	101,00	Unit	100,00%	**5**	46,00	Unit	100,00%	5	55,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	101,00	Unit	100,00%	**5**	46,00	Unit	100,00%	5	55,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**				**100,00%**	
			TOTAL NILAI		**41**		**TOTAL NILAI**		**36**		**TOTAL NILAI**		**41**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH SEDANG**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH SEDANG**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**54,69%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**51,18%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**54,19%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

f. NUMERIK MANYANG CUT

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	28,90	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	341	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	1.499	Jiwa
		Jumlah KK	444	KK

MEUNASAH BLANG

Luas SK	8,20	Ha
Luas Verifikasi	8,20	Ha
Jumlah Bangunan	123	Unit
Jumlah Penduduk	521	Jiwa
Jumlah KK	161	KK

MEUNASAH CUT

Luas SK	8,20	Ha
Luas Verifikasi	8,20	Ha
Jumlah Bangunan	101	Unit
Jumlah Penduduk	495	Jiwa
Jumlah KK	138	KK

MEUNASAH KRUENG BAROH

Luas SK	12,50	Ha
Luas Verifikasi	12,50	Ha
Jumlah Bangunan	117	Unit
Jumlah Penduduk	483	Jiwa
Jumlah KK	145	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	280,00	Unit	82,11%	5	123,00	Unit	100,00%	5	52,00	Unit	51,49%	3	105,00	Unit	89,74%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	66,00	Unit	19,35%	0	14,00	Unit	11,38%	0	32,00	Unit	31,68%	1	20,00	Unit	17,09%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				27,37%				33,33%				27,72%				29,91%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.180,00	Meter	31,31%	1	400,00	Meter	32,18%	1	600,00	Meter	41,67%	1	180,00	Meter	16,57%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.889,00	Meter	50,12%	1	843,00	Meter	67,82%	3	690,00	Meter	47,92%	1	356,00	Meter	32,78%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				40,71%				50,00%				44,79%				16,39%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	159,00	KK	35,81%	1	39,00	KK	24,22%	0	53,00	KK	38,41%	1	67,00	KK	46,21%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	61,00	KK	13,74%	0	13,00	KK	8,07%	0	31,00	KK	22,46%	0	17,00	KK	11,72%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				17,91%				0,00%				19,20%				23,10%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	601,00	Meter	24,84%	0	250,00	Meter	0,00%	0	151,00	Meter	18,69%	0	200,00	Meter	33,33%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.048,00	Meter	43,32%	1	511,00	Meter	50,54%	1	237,00	Meter	29,33%	1	300,00	Meter	50,00%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				14,44%				16,85%				9,78%				27,78%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	46,00	KK	10,36%	0	17,00	KK	10,56%	0	20,00	KK	14,49%	0	9,00	KK	6,21%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	46,00	KK	10,36%	0	17,00	KK	10,56%	0	20,00	KK	14,49%	0	9,00	KK	6,21%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	299,00	KK	67,34%	3	161,00	KK	100,00%	5	138,00	KK	100,00%	5	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	307,00	KK	69,14%	3	106,00	KK	65,84%	3	74,00	KK	53,62%	3	127,00	KK	87,59%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				68,24%				82,92%				76,81%				43,79%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	117,00	Unit	34,31%	1	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	117,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	117,00	Unit	34,31%	1	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	117,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				34,31%				0,00%				0,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		17		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		16		TOTAL NILAI		24
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,00%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		26,16%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		25,47%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,43%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

g. NUMERIK MNS KULAM BEURACAN

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	7,14	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	131	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	446	Jiwa
		Jumlah KK	148	KK

DUSUN TUNONG		
Luas SK	**3,53**	Ha
Luas Verifikasi	**3,53**	Ha
Jumlah Bangunan	**66**	Unit
Jumlah Penduduk	**245**	Jiwa
Jumlah KK	**77**	KK

DUSUN BAROH		
Luas SK	**3,61**	Ha
Luas Verifikasi	**3,61**	Ha
Jumlah Bangunan	**65**	Unit
Jumlah Penduduk	**201**	Jiwa
Jumlah KK	**71**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	62,00	Unit	47,33%	1	32,00	Unit	48,48%	1	30,00	Unit	46,15%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	84,00	Unit	64,12%	3	38,00	Unit	57,58%	3	46,00	Unit	70,77%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				37,15%				35,35%				38,97%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	631,60	Meter	31,68%	1	344,32	Meter	35,41%	1	287,28	Meter	28,13%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				15,84%				17,70%				14,06%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	146,00	KK	98,65%	5	75,00	KK	97,40%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	148,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				99,32%				98,70%				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	734,09	Meter	62,98%	3	-	Meter	0,00%	0	734,09	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,99%				0,00%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	37,00	KK	25,00%	1	19,00	KK	24,68%	0	18,00	KK	25,35%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	37,00	KK	25,00%	1	19,00	KK	24,68%	0	18,00	KK	25,35%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,00%				0,00%				25,35%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	148,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	144,00	KK	97,30%	5	73,00	KK	94,81%	5	71,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,65%				97,40%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	131,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	65,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	131,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5	65,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
				TOTAL NILAI	40			TOTAL NILAI	35			TOTAL NILAI	42
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	56,71%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	49,88%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	58,82%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

h. NUMERIK MNS MULIENG BEURACAN

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	6,48	Ha
Kecamatan	: MEUREDU	Jumlah Bangunan	113	Unit
Kawasan	: MEUREDU	Jumlah Penduduk	473	Jiwa
		Jumlah KK	136	KK

MULIENG		
Luas SK	2,30	Ha
Luas Verifikasi	2,30	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	175	Jiwa
Jumlah KK	51	KK

KUTA BLANG		
Luas SK	1,87	Ha
Luas Verifikasi	1,87	Ha
Jumlah Bangunan	24	Unit
Jumlah Penduduk	122	Jiwa
Jumlah KK	35	KK

KUTA I		
Luas SK	1,13	Ha
Luas Verifikasi	1,13	Ha
Jumlah Bangunan	24	Unit
Jumlah Penduduk	89	Jiwa
Jumlah KK	26	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				MULIENG				KUTA BLANG				KUTA I			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	74,00	Unit	65,49%	3	41,00	Unit	100,00%	5	20,00	Unit	83,33%	5	(8,00)	Unit	-33,33%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	18,00	Unit	15,93%	0	2,00	Unit	4,88%	0	2,00	Unit	8,33%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,83%				33,33%				27,78%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	639,91	Meter	45,13%	1	230,05	Meter	44,95%	1	107,79	Meter	44,29%	1	141,77	Meter	50,94%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				22,56%				22,48%				22,14%				25,47%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	65,00	KK	47,79%	1	16,00	KK	31,37%	1	26,00	KK	74,29%	3	20,00	KK	76,92%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	107,00	KK	78,68%	5	50,00	KK	98,04%	5	35,00	KK	100,00%	5	22,00	KK	84,62%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				63,24%				64,71%				87,14%				80,77%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	419,70	Meter	32,60%	1	150,30	Meter	32,61%	1	63,01	Meter	25,89%	1	10,36	Meter	3,92%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,87%				10,87%				8,63%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	28,00	KK	20,59%	0	1,00	KK	1,96%	0	4,00	KK	11,43%	0	19,00	KK	73,08%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	28,00	KK	20,59%	0	1,00	KK	1,96%	0	4,00	KK	11,43%	0	19,00	KK	73,08%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				73,08%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	136,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	35,00	KK	100,00%	5	26,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	136,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	35,00	KK	100,00%	5	26,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	113,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	113,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		33		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		37
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,50%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		47,34%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		49,38%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		54,19%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA
Kecamatan : MEUREDU
Kawasan : MEUREDU

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	6,48	Ha
Jumlah Bangunan	113	Unit
Jumlah Penduduk	473	Jiwa
Jumlah KK	136	KK

KUTA II

Luas SK	1,17	Ha
Luas Verifikasi	1,17	Ha
Jumlah Bangunan	24	Unit
Jumlah Penduduk	87	Jiwa
Jumlah KK	24	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	74,00	Unit	65,49%	3	21,00	Unit	87,50%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	18,00	Unit	15,93%	0	14,00	Unit	58,33%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,83%				48,61%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	639,91	Meter	45,13%	1	160,29	Meter	41,68%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				22,56%				20,84%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	65,00	KK	47,79%	1	3,00	KK	12,50%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	107,00	KK	78,68%	5	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				63,24%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	419,70	Meter	32,60%	1	196,03	Meter	61,52%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,87%				20,51%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	28,00	KK	20,59%	0	4,00	KK	16,67%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	28,00	KK	20,59%	0	4,00	KK	16,67%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	136,00	KK	100,00%	5	24,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	136,00	KK	100,00%	5	24,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	113,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	113,00	Unit	100,00%	5	24,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		32
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		45,50%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,42%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

i. NUMERIK MNS LHOK/MNS GANTUNG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	15,45	Ha
Kecamatan	: MEREUDU	Jumlah Bangunan	222	Unit
Kawasan	: MEREUDU	Jumlah Penduduk	981	Jiwa
		Jumlah KK	283	KK

DUSUN PANTE GEULIMA		
Luas SK	2,60	Ha
Luas Verifikasi	2,60	Ha
Jumlah Bangunan	50	Unit
Jumlah Penduduk	248	Jiwa
Jumlah KK	63	KK

DUSUN LHOK LANGSAT		
Luas SK	6,39	Ha
Luas Verifikasi	6,39	Ha
Jumlah Bangunan	62	Unit
Jumlah Penduduk	291	Jiwa
Jumlah KK	85	KK

DUSUN PULO		
Luas SK	3,86	Ha
Luas Verifikasi	3,86	Ha
Jumlah Bangunan	44	Unit
Jumlah Penduduk	174	Jiwa
Jumlah KK	53	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	82,00	Unit	36,94%	1	-	Unit	0,00%	0	36,00	Unit	58,06%	3	13,00	Unit	29,55%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	21,00	Unit	9,46%	0	1,00	Unit	2,00%	0	7,00	Unit	11,29%	0	10,00	Unit	22,73%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				12,31%				0,00%				19,35%				9,85%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	961,79	Meter	22,23%	0	312,32	Meter	28,06%	1	405,49	Meter	23,42%	0	105,38	Meter	15,45%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				14,03%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	119,00	KK	42,05%	1	26,00	KK	41,27%	1	43,00	KK	50,59%	1	24,00	KK	45,28%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	106,00	KK	37,46%	1	13,00	KK	20,63%	0	81,00	KK	95,29%	5	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				39,75%				20,63%				72,94%				22,64%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.902,23	Meter	75,41%	3	-	Meter	0,00%	0	1.325,53	Meter	100,00%	5	576,70	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	282,15	Meter	11,18%	0	47,01	Meter	19,22%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				25,14%				0,00%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	26,00	KK	9,19%	0	-	KK	0,00%	0	9,00	KK	10,59%	0	14,00	KK	26,42%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	26,00	KK	9,19%	0	-	KK	0,00%	0	9,00	KK	10,59%	0	14,00	KK	26,42%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				26,42%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	283,00	KK	100,00%	5	63,00	KK	100,00%	5	85,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	280,00	KK	98,94%	5	60,00	KK	95,24%	5	85,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,47%				97,62%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	222,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5	62,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	222,00	Unit	100,00%	5	50,00	Unit	100,00%	5	62,00	Unit	100,00%	5	44,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		22		TOTAL NILAI		34		TOTAL NILAI		29	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		33,18%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		46,52%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,75%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: MEREUDU**
Kawasan	**: MEREUDU**

Luas SK	**-**	Ha
Luas Verifikasi	**15,45**	Ha
Jumlah Bangunan	**222**	Unit
Jumlah Penduduk	**981**	Jiwa
Jumlah KK	**283**	KK

DUSUN GANTUNG

Luas SK	**2,60**	Ha
Luas Verifikasi	**2,60**	Ha
Jumlah Bangunan	**66**	Unit
Jumlah Penduduk	**268**	Jiwa
Jumlah KK	**82**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	82,00	Unit	36,94%	**1**	33,00	Unit	50,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	21,00	Unit	9,46%	**0**	3,00	Unit	4,55%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**12,31%**				**16,67%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	961,79	Meter	22,23%	**0**	138,60	Meter	17,30%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**0,00%**				**0,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	119,00	KK	42,05%	**1**	26,00	KK	31,71%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	106,00	KK	37,46%	**1**	12,00	KK	14,63%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**39,75%**				**15,85%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.902,23	Meter	75,41%	**3**	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	282,15	Meter	11,18%	**0**	235,14	Meter	62,56%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**25,14%**				**20,85%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	26,00	KK	9,19%	**0**	3,00	KK	3,66%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	26,00	KK	9,19%	**0**	3,00	KK	3,66%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	283,00	KK	100,00%	**5**	82,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	280,00	KK	98,94%	**5**	82,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**99,47%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	222,00	Unit	100,00%	**5**	66,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	222,00	Unit	100,00%	**5**	66,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**100,00%**				**100,00%**	
				TOTAL NILAI	**26**			**TOTAL NILAI**	**25**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**39,52%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**36,20%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

j. NUMERIK MASJID TUHA/DAYAH U PANEUK

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	65,19	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	379	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	1.141	Jiwa
		Jumlah KK	354	KK

KEULAYU		
Luas SK	15,00	Ha
Luas Verifikasi	15,00	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	171	Jiwa
Jumlah KK	54	KK

TUNONG		
Luas SK	7,00	Ha
Luas Verifikasi	7,00	Ha
Jumlah Bangunan	66	Unit
Jumlah Penduduk	228	Jiwa
Jumlah KK	73	KK

BAROH		
Luas SK	4,90	Ha
Luas Verifikasi	4,90	Ha
Jumlah Bangunan	37	Unit
Jumlah Penduduk	-	Jiwa
Jumlah KK	44	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	263,00	Unit	69,39%	3	40,00	Unit	78,43%	5	52,00	Unit	78,79%	5	37,00	Unit	100,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	11,00	Unit	2,90%	0	-	Unit	0,00%	0	2,00	Unit	3,03%	0	1,00	Unit	2,70%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				23,13%				26,14%				26,26%				33,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.840,00	Meter	17,52%	0	240,00	Meter	11,40%	0	400,00	Meter	21,05%	0	400,00	Meter	23,53%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.475,00	Meter	33,08%	1	1.425,00	Meter	67,70%	3	500,00	Meter	26,32%	1	500,00	Meter	29,41%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,54%				33,85%				13,16%				14,71%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	226,00	KK	63,84%	3	41,00	KK	75,93%	3	34,00	KK	46,58%	1	1,00	KK	2,27%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	(11,00)	KK	-3,11%	0	(13,00)	KK	-24,07%	0	1,00	KK	1,37%	0	1,00	KK	2,27%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,92%				37,96%				23,29%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	300,00	Meter	16,83%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	300,00	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.483,00	Meter	83,17%	5	333,00	Meter	100,00%	5	500,00	Meter	100,00%	5	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				27,72%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	(13,00)	KK	-3,67%	0	(14,00)	KK	-25,93%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,27%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	(13,00)	KK	-3,67%	0	(14,00)	KK	-25,93%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,27%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	54,00	KK	15,25%	0	54,00	KK	100,00%	5	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	307,00	KK	86,72%	5	54,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	72,60%	3	17,00	KK	38,64%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				43,36%				100,00%				36,30%				19,32%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	203,00	Unit	53,56%	3	10,00	Unit	19,61%	0	66,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	379,00	Unit	100,00%	5	10,00	Unit	19,61%	0	66,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				76,78%				0,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	26			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	22	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,35%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,04%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,19%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	28,67%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	65,19	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	379	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	1.141	Jiwa
		Jumlah KK	354	KK

LAMKUTA		
Luas SK	26,41	Ha
Luas Verifikasi	26,41	Ha
Jumlah Bangunan	60	Unit
Jumlah Penduduk	148	Jiwa
Jumlah KK	42	KK

LAWANG		
Luas SK	4,68	Ha
Luas Verifikasi	4,68	Ha
Jumlah Bangunan	112	Unit
Jumlah Penduduk	200	Jiwa
Jumlah KK	60	KK

PULO		
	7,20	Ha
	7,20	Ha
	53	Unit
	255	Jiwa
	81	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	263,00	Unit	69,39%	3	37,00	Unit	61,67%	3	45,00	Unit	40,18%	1	52,00	Unit	98,11%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	11,00	Unit	2,90%	0	-	Unit	0,00%	0	8,00	Unit	7,14%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				23,13%				20,56%				13,39%				32,70%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.840,00	Meter	17,52%	0	200,00	Meter	50,00%	1	300,00	Meter	14,29%	0	300,00	Meter	13,04%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.475,00	Meter	33,08%	1	50,00	Meter	12,50%	0	500,00	Meter	23,81%	0	500,00	Meter	21,74%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,54%				25,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	226,00	KK	63,84%	3	12,00	KK	28,57%	1	60,00	KK	100,00%	5	78,00	KK	96,30%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	(11,00)	KK	-3,11%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,92%				14,29%				50,00%				48,15%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	300,00	Meter	16,83%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.483,00	Meter	83,17%	5	100,00	Meter	100,00%	5	300,00	Meter	100,00%	5	250,00	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				27,72%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	(13,00)	KK	-3,67%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	(13,00)	KK	-3,67%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	54,00	KK	15,25%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	307,00	KK	86,72%	5	42,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5	81,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				43,36%				50,00%				50,00%				33,33%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	203,00	Unit	53,56%	3	23,00	Unit	38,33%	1	67,00	Unit	59,82%	3	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	379,00	Unit	100,00%	5	60,00	Unit	100,00%	5	112,00	Unit	100,00%	5	53,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				76,78%				69,17%				79,91%				50,00%	
		TOTAL NILAI			25	TOTAL NILAI			21	TOTAL NILAI			24	TOTAL NILAI			25
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			31,35%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			30,33%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			32,38%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			28,22%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

k. NUMERIK TEUPIN PEURAHO

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	13,09	Ha
Kecamatan	: MEUREUDU	Jumlah Bangunan	201	Unit
Kawasan	: MEUREUDU	Jumlah Penduduk	846	Jiwa
		Jumlah KK	256	KK

DUSUN KUTA GLUMPANG		
Luas SK	2,80	Ha
Luas Verifikasi	2,80	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	165	Jiwa
Jumlah KK	51	KK

DUSUN MEUNASAH COEH		
Luas SK	3,04	Ha
Luas Verifikasi	3,04	Ha
Jumlah Bangunan	46	Unit
Jumlah Penduduk	201	Jiwa
Jumlah KK	50	KK

DUSUN MNS. MESJID		
Luas SK	4,01	Ha
Luas Verifikasi	4,01	Ha
Jumlah Bangunan	72	Unit
Jumlah Penduduk	292	Jiwa
Jumlah KK	95	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN KUTA GLUMPANG				DUSUN MEUNASAH COEH				DUSUN MNS. MESJID			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	150,00	Unit	74,63%	3	28,00	Unit	68,29%	3	34,00	Unit	73,91%	3	70,00	Unit	97,22%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	10,00	Unit	4,98%	0	4,00	Unit	9,76%	0	2,00	Unit	4,35%	0	2,00	Unit	2,78%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,88%				22,76%				24,64%				32,41%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.140,07	Meter	33,13%	1	251,69	Meter	36,04%	1	-	Meter	0,00%	0	564,12	Meter	72,51%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,57%				18,02%				0,00%				36,25%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	100,00	KK	39,06%	1	4,00	KK	7,84%	0	1,00	KK	2,00%	0	95,00	KK	100,00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	184,00	KK	71,88%	3	27,00	KK	52,94%	3	2,00	KK	4,00%	0	95,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				55,47%				26,47%				0,00%				100,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.727,78	Meter	61,47%	3	-	Meter	0,00%	0	598,16	Meter	69,83%	3	659,49	Meter	84,77%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	118,50	Meter	4,22%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	118,50	Meter	15,23%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,49%				0,00%				23,28%				28,26%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	64,00	KK	25,00%	1	1,00	KK	1,96%	0	2,00	KK	4,00%	0	14,00	KK	14,74%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	64,00	KK	25,00%	1	1,00	KK	1,96%	0	2,00	KK	4,00%	0	14,00	KK	14,74%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	256,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	50,00	KK	100,00%	5	95,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	256,00	KK	100,00%	5	51,00	KK	100,00%	5	50,00	KK	100,00%	5	95,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	201,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	72,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	201,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	46,00	Unit	100,00%	5	72,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		33		TOTAL NILAI		27		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		43
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		48,91%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		38,18%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		35,42%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		56,70%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi : ACEH
Kab/Kota : PIDIE JAYA
Kecamatan : MEUREUDU
Kawasan : MEUREUDU

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	13,09	Ha
Jumlah Bangunan	201	Unit
Jumlah Penduduk	846	Jiwa
Jumlah KK	256	KK

TEUPIN PEURAHO

Luas SK	3,24	Ha
Luas Verifikasi	3,24	Ha
Jumlah Bangunan	42	Unit
Jumlah Penduduk	188	Jiwa
Jumlah KK	60	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	150,00	Unit	74,63%	3	18,00	Unit	42,86%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	10,00	Unit	4,98%	0	2,00	Unit	4,76%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24,88%				14,29%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.140,07	Meter	33,13%	1	324,26	Meter	29,27%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,57%				14,64%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	100,00	KK	39,06%	1	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	184,00	KK	71,88%	3	60,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				55,47%				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	1.727,78	Meter	61,47%	3	470,13	Meter	60,00%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	118,50	Meter	4,22%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,49%				20,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	64,00	KK	25,00%	1	47,00	KK	78,33%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	64,00	KK	25,00%	1	47,00	KK	78,33%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				25,00%				78,33%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	256,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	256,00	KK	100,00%	5	60,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	201,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	201,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%	
				TOTAL NILAI	33			TOTAL NILAI	40
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	48,91%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	53,89%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

1. NUMERIK RHIENG KRUENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**8,14**	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	**150**	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	**674**	Jiwa
		Jumlah KK	**182**	KK

DUSUN SAMUDRA TANJONG

Luas SK	**4,21**	Ha
Luas Verifikasi	**4,21**	Ha
Jumlah Bangunan	**64**	Unit
Jumlah Penduduk	**302**	Jiwa
Jumlah KK	**77**	KK

MAWAR INDAH

Luas SK	**3,93**	Ha
Luas Verifikasi	**3,93**	Ha
Jumlah Bangunan	**86**	Unit
Jumlah Penduduk	**372**	Jiwa
Jumlah KK	**105**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	121,00	Unit	80,67%	5	46,00	Unit	71,88%	3	75,00	Unit	87,21%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	2,00	Unit	1,33%	0	2,00	Unit	3,13%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				26,89%				23,96%				29,07%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.170,19	Meter	41,04%	1	372,45	Meter	24,41%	0	797,75	Meter	60,19%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				20,52%				0,00%				30,10%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	61,00	KK	33,52%	1	1,00	KK	1,30%	0	60,00	KK	57,14%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	87,00	KK	47,80%	1	11,00	KK	14,29%	0	76,00	KK	72,38%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,66%				0,00%				64,76%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	801,90	Meter	56,73%	3	562,57	Meter	62,85%	3	239,32	Meter	46,15%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				18,91%				20,95%				15,38%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	4,00	KK	2,20%	0	2,00	KK	2,60%	0	2,00	KK	1,90%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	4,00	KK	2,20%	0	2,00	KK	2,60%	0	2,00	KK	1,90%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	182,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	100,00%	5	105,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	182,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	100,00%	5	105,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	150,00	Unit	100,00%	5	64,00	Unit	100,00%	5	86,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	150,00	Unit	100,00%	5	64,00	Unit	100,00%	5	86,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		35
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		43,85%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,99%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		48,47%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

m. NUMERIK RHIENG MANCANG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	5,36	Ha
Kecamatan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Bangunan**	119	Unit
Kawasan	**: MEUREUDU**	**Jumlah Penduduk**	483	Jiwa
		Jumlah KK	136	KK

DUSUN DARA BAROE		
Luas SK	1,94	Ha
Luas Verifikasi	1,94	Ha
Jumlah Bangunan	41	Unit
Jumlah Penduduk	169	Jiwa
Jumlah KK	52	KK

DUSUN LAMPOH LADA		
Luas SK	1,76	Ha
Luas Verifikasi	1,76	Ha
Jumlah Bangunan	45	Unit
Jumlah Penduduk	176	Jiwa
Jumlah KK	49	KK

DUSUN JERAT TU		
Luas SK	1,66	Ha
Luas Verifikasi	1,66	Ha
Jumlah Bangunan	33	Unit
Jumlah Penduduk	138	Jiwa
Jumlah KK	35	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN DARA BAROE				DUSUN LAMPOH LADA				DUSUN JERAT TU			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	66,00	Unit	55,46%	3	19,00	Unit	46,34%	1	29,00	Unit	64,44%	3	18,00	Unit	54,55%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	18,00	Unit	15,13%	0	8,00	Unit	19,51%	0	7,00	Unit	15,56%	0	3,00	Unit	9,09%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,49%				15,45%				21,48%				18,18%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	388,56	Meter	24,23%	0	10,74	Meter	1,89%	0	224,31	Meter	38,53%	1	153,52	Meter	33,97%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				19,26%				16,98%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	6,00	KK	4,41%	0	-	KK	0,00%	0	5,00	KK	10,20%	0	1,00	KK	2,86%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	20,00	KK	14,71%	0	8,00	KK	15,38%	0	9,00	KK	18,37%	0	3,00	KK	8,57%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	712,26	Meter	48,07%	1	-	Meter	0,00%	0	426,52	Meter	73,26%	3	285,74	Meter	63,23%	3
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	209,68	Meter	14,15%	0	61,51	Meter	13,74%	0	-	Meter	0,00%	0	148,17	Meter	32,79%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				16,02%				0,00%				24,42%				32,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	9,00	KK	6,62%	0	5,00	KK	9,62%	0	3,00	KK	6,12%	0	1,00	KK	2,86%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	9,00	KK	6,62%	0	5,00	KK	9,62%	0	3,00	KK	6,12%	0	1,00	KK	2,86%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	136,00	KK	100,00%	5	52,00	KK	100,00%	5	49,00	KK	100,00%	5	35,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	134,00	KK	98,53%	5	52,00	KK	100,00%	5	47,00	KK	95,92%	5	35,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				99,26%				100,00%				97,96%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	119,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	45,00	Unit	100,00%	5	33,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	119,00	Unit	100,00%	5	41,00	Unit	100,00%	5	45,00	Unit	100,00%	5	33,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
		TOTAL NILAI			24	TOTAL NILAI			21	TOTAL NILAI			27	TOTAL NILAI			28
		TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN	TINGKAT KEKUMUHAN			KUMUH RINGAN
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			33,40%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			30,78%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			37,59%	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			38,17%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%	KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

8. NUMERIK KECAMATAN TRIENGGADENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	106,49	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	1.624	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	6.237	Jiwa
		Jumlah KK	1.918	KK

Gampong Meue		
Luas SK	9,77	Ha
Luas Verifikasi	9,77	Ha
Jumlah Bangunan	246	Unit
Jumlah Penduduk	864	Jiwa
Jumlah KK	247	KK

Masjid Trienggadeng		
Luas SK	14,51	Ha
Luas Verifikasi	14,51	Ha
Jumlah Bangunan	172	Unit
Jumlah Penduduk	681	Jiwa
Jumlah KK	227	KK

Sagoe		
Luas SK	20,00	Ha
Luas Verifikasi	20,00	Ha
Jumlah Bangunan	197	Unit
Jumlah Penduduk	700	Jiwa
Jumlah KK	255	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	719,00	Unit	44,27%	1	106,00	Unit	43,09%	1	55,00	Unit	31,98%	1	53,00	Unit	26,90%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	286,00	Unit	17,61%	0	24,00	Unit	9,76%	0	9,00	Unit	5,23%	0	26,00	Unit	13,20%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,76%				14,36%				10,66%				8,97%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.144,00	Meter	5,01%	0	-	Meter	0,00%	0	250,00	Meter	6,11%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	13.085,61	Meter	57,33%	3	828,50	Meter	70,22%	3	3.545,00	Meter	86,57%	5	175,66	Meter	7,69%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,67%				35,11%				43,28%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	621,00	KK	32,38%	1	36,00	KK	14,57%	0	37,00	KK	16,30%	0	164,00	KK	64,31%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	592,00	KK	30,87%	1	11,00	KK	4,45%	0	39,00	KK	17,18%	0	2,00	KK	0,78%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,62%				0,00%				0,00%				32,16%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.508,91	Meter	17,17%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	344,00	Meter	23,34%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.841,00	Meter	46,81%	1	1.171,00	Meter	99,49%	5	750,00	Meter	34,09%	1	585,00	Meter	39,69%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,60%				33,16%				11,36%				13,23%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	223,00	KK	11,63%	0	3,00	KK	1,21%	0	5,00	KK	2,20%	0	56,00	KK	21,96%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	223,00	KK	11,63%	0	3,00	KK	1,21%	0	5,00	KK	2,20%	0	56,00	KK	21,96%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.918,00	KK	100,00%	5	247,00	KK	100,00%	5	227,00	KK	100,00%	5	255,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.723,00	KK	89,83%	5	179,00	KK	72,47%	3	196,00	KK	86,34%	5	249,00	KK	97,65%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,92%				86,23%				93,17%				98,82%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2,00	Unit	0,12%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.624,00	Unit	100,00%	5	246,00	Unit	100,00%	5	172,00	Unit	100,00%	5	197,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	20
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,65%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,27%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	29,78%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	29,03%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	106,49	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	1.624	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	6.237	Jiwa
		Jumlah KK	1.918	KK

Keude Trienggadeng		
Luas SK	6,49	Ha
Luas Verifikasi	6,49	Ha
Jumlah Bangunan	142	Unit
Jumlah Penduduk	592	Jiwa
Jumlah KK	168	KK

Kuta Pangwa		
Luas SK	7,59	Ha
Luas Verifikasi	7,59	Ha
Jumlah Bangunan	181	Unit
Jumlah Penduduk	589	Jiwa
Jumlah KK	179	KK

Rawa Sari		
	14,97	Ha
	14,97	Ha
	241	Unit
	760	Jiwa
	295	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				Keude Trienggadeng				Kuta Pangwa				Rawa Sari			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	719,00	Unit	44,27%	1	72,00	Unit	50,70%	1	61,00	Unit	33,70%	1	67,00	Unit	27,80%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	286,00	Unit	17,61%	0	1,00	Unit	0,70%	0	14,00	Unit	7,73%	0	86,00	Unit	35,68%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,76%				16,90%				11,23%				21,16%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.144,00	Meter	5,01%	0	644,00	Meter	20,48%	0	250,00	Meter	6,11%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	13.085,61	Meter	57,33%	3	1.173,00	Meter	37,31%	1	3.545,00	Meter	86,57%	5	1.169,45	Meter	39,11%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,67%				18,65%				43,28%				19,56%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	621,00	KK	32,38%	1	55,00	KK	32,74%	1	105,00	KK	58,66%	3	152,00	KK	51,53%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	592,00	KK	30,87%	1	149,00	KK	88,69%	5	40,00	KK	22,35%	0	156,00	KK	52,88%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,62%				60,71%				29,33%				52,20%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.508,91	Meter	17,17%	0	250,00	Meter	15,85%	0	300,00	Meter	0,00%	0	931,81	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.841,00	Meter	46,81%	1	1.327,00	Meter	84,15%	5	750,00	Meter	30,00%	1	645,00	Meter	40,91%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,60%				28,05%				10,00%				13,64%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	223,00	KK	11,63%	0	-	KK	0,00%	0	5,00	KK	2,79%	0	102,00	KK	34,58%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	223,00	KK	11,63%	0	-	KK	0,00%	0	5,00	KK	2,79%	0	102,00	KK	34,58%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				34,58%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.918,00	KK	100,00%	5	168,00	KK	100,00%	5	179,00	KK	100,00%	5	295,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.723,00	KK	89,83%	5	147,00	KK	87,50%	5	165,00	KK	92,18%	5	285,00	KK	96,61%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,92%				93,75%				96,09%				65,54%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2,00	Unit	0,12%	0	-	Unit	0,00%	0	3,00	Unit	1,66%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.624,00	Unit	100,00%	5	142,00	Unit	100,00%	5	181,00	Unit	100,00%	5	241,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	28			TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	27
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,65%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	38,30%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,28%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	36,67%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

					Deah Pangwa		Cot Lheu Rheng	
Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	-	Ha				
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	106,49	Ha	27,04	Ha	6,13	Ha
Kecamatan	**: TRIENGGADENG**	**Jumlah Bangunan**	1.624	Unit	27,04	Ha	6,13	Ha
Kawasan	**: TRIENGGADENG**	**Jumlah Penduduk**	6.237	Jiwa	284	Unit	161	Unit
		Jumlah KK	1.918	KK	1.230	Jiwa	700	Jiwa
					342	KK	205	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	719,00	Unit	44,27%	1	143,00	Unit	50,35%	1	162,00	Unit	100,62%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	286,00	Unit	17,61%	0	107,00	Unit	37,68%	1	107,00	Unit	66,46%	3
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,76%				29,34%				55,69%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.144,00	Meter	5,01%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	13.085,61	Meter	57,33%	3	2.382,59	Meter	56,00%	3	266,41	Meter	34,08%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,67%				28,00%				17,04%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	621,00	KK	32,38%	1	64,00	KK	18,71%	0	8,00	KK	3,90%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	592,00	KK	30,87%	1	195,00	KK	57,02%	3	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31,62%				28,51%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2.508,91	Meter	17,17%	0	683,11	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	6.841,00	Meter	46,81%	1	1.118,00	Meter	32,31%	1	495,00	Meter	76,39%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15,60%				10,77%				25,46%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	223,00	KK	11,63%	0	46,00	KK	13,45%	0	6,00	KK	2,93%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	223,00	KK	11,63%	0	46,00	KK	13,45%	0	6,00	KK	2,93%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1.918,00	KK	100,00%	5	342,00	KK	100,00%	5	205,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1.723,00	KK	89,83%	5	323,00	KK	94,44%	5	179,00	KK	87,32%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				94,92%				97,22%				93,66%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	2,00	Unit	0,12%	0	-	Unit	0,00%	0	(1,00)	Unit	-0,62%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.624,00	Unit	100,00%	5	284,00	Unit	100,00%	5	161,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	24			TOTAL NILAI	29
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,65%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,84%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,55%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK GAMPONG MEUE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**9,77**	Ha
Kecamatan	**: TRIENG GADENG**	**Jumlah Bangunan**	**246**	Unit
Kawasan	**: TRIENG GADENG**	**Jumlah Penduduk**	**864**	Jiwa
		Jumlah KK	**247**	KK

LAMPOH U		
Luas SK	**5,51**	Ha
Luas Verifikasi	**5,51**	Ha
Jumlah Bangunan	**128**	Unit
Jumlah Penduduk	**468**	Jiwa
Jumlah KK	**128**	KK

TGK MEUNASAH		
Luas SK	**4,26**	Ha
Luas Verifikasi	**4,26**	Ha
Jumlah Bangunan	**118**	Unit
Jumlah Penduduk	**396**	Jiwa
Jumlah KK	**119**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	106,00	Unit	43,09%	1	3,00	Unit	2,34%	0	103,00	Unit	87,29%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	24,00	Unit	9,76%	0	12,00	Unit	9,38%	0	12,00	Unit	10,17%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				14,36%				0,00%				29,10%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	828,50	Meter	70,22%	3	353,16	Meter	51,55%	3	475,34	Meter	96,08%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				35,11%				25,77%				48,04%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	36,00	KK	14,57%	0	-	KK	0,00%	0	36,00	KK	30,25%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	11,00	KK	4,45%	0	-	KK	0,00%	0	11,00	KK	9,24%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				15,13%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.171,00	Meter	99,49%	5	533,00	Meter	99,26%	5	638,00	Meter	99,69%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,16%				33,09%				33,23%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	3,00	KK	1,21%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	2,52%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	3,00	KK	1,21%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	2,52%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	247,00	KK	100,00%	5	128,00	KK	100,00%	5	119,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	179,00	KK	72,47%	3	127,00	KK	99,22%	5	52,00	KK	43,70%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				86,23%				99,61%				71,85%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	246,00	Unit	100,00%	5	128,00	Unit	100,00%	5	118,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	**22**			**TOTAL NILAI**	**23**			**TOTAL NILAI**	**27**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**31,27%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**29,78%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**35,33%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK MASJID TRIENGGADENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	14,51	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	172	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	681	Jiwa
		Jumlah KK	227	KK

JURONG TENGOH		
Luas SK	4,01	Ha
Luas Verifikasi	4,01	Ha
Jumlah Bangunan	71	Unit
Jumlah Penduduk	298	Jiwa
Jumlah KK	93	KK

MENASAH BARO		
Luas SK	2,65	Ha
Luas Verifikasi	2,65	Ha
Jumlah Bangunan	31	Unit
Jumlah Penduduk	111	Jiwa
Jumlah KK	38	KK

JURONG AMIL		
Luas SK	2,69	Ha
Luas Verifikasi	2,69	Ha
Jumlah Bangunan	30	Unit
Jumlah Penduduk	118	Jiwa
Jumlah KK	40	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				JURONG TENGOH				MENASAH BARO				JURONG AMIL			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	55,00	Unit	31,98%	1	1,00	Unit	1,41%	0	18,00	Unit	58,06%	3	24,00	Unit	80,00%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	5,23%	0	7,00	Unit	9,86%	0	-	Unit	0,00%	0	2,00	Unit	6,67%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				10,66%				0,00%				19,35%				26,67%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	250,00	Meter	6,11%	0	150,00	Meter	22,06%	0	100,00	Meter	9,09%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.545,00	Meter	86,57%	5	530,00	Meter	77,94%	5	950,00	Meter	86,36%	5	1.665,00	Meter	89,28%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				43,28%				38,97%				43,18%				44,64%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	37,00	KK	16,30%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	37,00	KK	92,50%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	39,00	KK	17,18%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	39,00	KK	97,50%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%				0,00%				95,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	750,00	Meter	34,09%	1	100,00	Meter	25,00%	1	-	Meter	0,00%	0	450,00	Meter	36,00%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				11,36%				8,33%				0,00%				12,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5,00	KK	2,20%	0	1,00	KK	1,08%	0	-	KK	0,00%	0	4,00	KK	10,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5,00	KK	2,20%	0	1,00	KK	1,08%	0	-	KK	0,00%	0	4,00	KK	10,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	227,00	KK	100,00%	5	93,00	KK	100,00%	5	38,00	KK	100,00%	5	40,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	196,00	KK	86,34%	5	62,00	KK	66,67%	3	38,00	KK	100,00%	5	40,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,17%				83,33%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	172,00	Unit	100,00%	5	71,00	Unit	100,00%	5	31,00	Unit	100,00%	5	30,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		22		TOTAL NILAI		19		TOTAL NILAI		23		TOTAL NILAI		36
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,78%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		25,81%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		30,36%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		46,90%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: TRIENGGADENG
Kawasan	: TRIENGGADENG

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	14,51	Ha
Jumlah Bangunan	172	Unit
Jumlah Penduduk	681	Jiwa
Jumlah KK	227	KK

JURONG MIFTAHUSSALAM

Luas SK	5,16	Ha
Luas Verifikasi	5,16	Ha
Jumlah Bangunan	40	Unit
Jumlah Penduduk	154	Jiwa
Jumlah KK	56	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	55,00	Unit	31,98%	1	12,00	Unit	30,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	9,00	Unit	5,23%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				10,66%				10,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	250,00	Meter	6,11%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.545,00	Meter	86,57%	5	400,00	Meter	88,89%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				43,28%				44,44%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	37,00	KK	16,30%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	39,00	KK	17,18%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	750,00	Meter	34,09%	1	200,00	Meter	44,44%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				11,36%				14,81%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5,00	KK	2,20%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5,00	KK	2,20%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	227,00	KK	100,00%	5	56,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	196,00	KK	86,34%	5	56,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,17%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	172,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	22			TOTAL NILAI	22
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	29,78%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	31,32%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

c. NUMERIK SAGOE

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	20,00	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	197	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	821	Jiwa
		Jumlah KK	255	KK

DUSUN KUNYET		
Luas SK	5,98	Ha
Luas Verifikasi	5,98	Ha
Jumlah Bangunan	70	Unit
Jumlah Penduduk	314	Jiwa
Jumlah KK	101	KK

DUSUN PUUK		
Luas SK	7,98	Ha
Luas Verifikasi	7,98	Ha
Jumlah Bangunan	70	Unit
Jumlah Penduduk	280	Jiwa
Jumlah KK	83	KK

DUSUN RENG		
Luas SK	6,04	Ha
Luas Verifikasi	6,04	Ha
Jumlah Bangunan	57	Unit
Jumlah Penduduk	227	Jiwa
Jumlah KK	71	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	53,00	Unit	26,90%	1	-	Unit	0,00%	0	1,00	Unit	1,43%	0	52,00	Unit	91,23%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	26,00	Unit	13,20%	0	12,00	Unit	17,14%	0	11,00	Unit	15,71%	0	3,00	Unit	5,26%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				8,97%				0,00%				0,00%				30,41%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	175,66	Meter	7,69%	0	87,44	Meter	8,39%	0	88,22	Meter	13,02%	0	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	164,00	KK	64,31%	3	12,00	KK	11,88%	0	83,00	KK	100,00%	5	69,00	KK	97,18%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	2,00	KK	0,78%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	1,20%	0	1,00	KK	1,41%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				32,16%				0,00%				50,00%				48,59%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	344,00	Meter	23,34%	0	-	Meter	0,00%	0	344,00	Meter	100,00%	5	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	585,00	Meter	39,69%	1	253,00	Meter	37,26%	1	(119,00)	Meter	-34,59%	0	451,00	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13,23%				12,42%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	56,00	KK	21,96%	0	37,00	KK	36,63%	1	18,00	KK	21,69%	0	1,00	KK	1,41%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	56,00	KK	21,96%	0	37,00	KK	36,63%	1	18,00	KK	21,69%	0	1,00	KK	1,41%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				36,63%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	255,00	KK	100,00%	5	101,00	KK	100,00%	5	83,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	249,00	KK	97,65%	5	101,00	KK	100,00%	5	77,00	KK	92,77%	5	71,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,82%				100,00%				96,39%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	197,00	Unit	100,00%	5	70,00	Unit	100,00%	5	70,00	Unit	100,00%	5	57,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		20		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		30	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		29,03%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		28,44%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		32,82%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,48%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

d. NUMERIK KEUDE TRIENGGADENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	6,49	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	142	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	592	Jiwa
		Jumlah KK	168	KK

DUSUN MESJID		
Luas SK	3,04	Ha
Luas Verifikasi	3,04	Ha
Jumlah Bangunan	53	Unit
Jumlah Penduduk	207	Jiwa
Jumlah KK	62	KK

DUSUN COT PASI		
Luas SK	1,20	Ha
Luas Verifikasi	1,20	Ha
Jumlah Bangunan	61	Unit
Jumlah Penduduk	270	Jiwa
Jumlah KK	73	KK

DUSUN SALA DUA		
Luas SK	2,25	Ha
Luas Verifikasi	2,25	Ha
Jumlah Bangunan	28	Unit
Jumlah Penduduk	115	Jiwa
Jumlah KK	33	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN MESJID				DUSUN COT PASI				DUSUN SALA DUA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	72,00	Unit	50,70%	1	44,00	Unit	83,02%	5	26,00	Unit	42,62%	1	2,00	Unit	7,14%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,00	Unit	0,70%	0	1,00	Unit	1,89%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				16,90%				27,67%				14,21%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	644,00	Meter	20,48%	0	225,00	Meter	20,93%	0	259,00	Meter	20,57%	0	160,00	Meter	19,75%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.173,00	Meter	37,31%	1	425,00	Meter	39,53%	1	448,00	Meter	35,58%	1	300,00	Meter	37,04%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				18,65%				19,77%				17,79%				18,52%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	55,00	KK	32,74%	1	28,00	KK	45,16%	1	18,00	KK	24,66%	0	9,00	KK	27,27%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	149,00	KK	88,69%	5	57,00	KK	91,94%	5	72,00	KK	98,63%	5	20,00	KK	60,61%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				60,71%				68,55%				49,32%				43,94%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	250,00	Meter	15,85%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	250,00	Meter	41,67%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.327,00	Meter	84,15%	5	425,00	Meter	100,00%	5	552,00	Meter	100,00%	5	350,00	Meter	58,33%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				28,05%				33,33%				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	168,00	KK	100,00%	5	62,00	KK	100,00%	5	73,00	KK	100,00%	5	33,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	147,00	KK	87,50%	5	54,00	KK	87,10%	5	70,00	KK	95,89%	5	23,00	KK	69,70%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				93,75%				93,55%				97,95%				84,85%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	142,00	Unit	100,00%	5	53,00	Unit	100,00%	5	61,00	Unit	100,00%	5	28,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI	28			TOTAL NILAI	32			TOTAL NILAI	27			TOTAL NILAI	22	
			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN	
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	38,30%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	41,84%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37,51%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32,95%	
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

e. NUMERIK KUTA PANGWA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	7,59	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	181	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	589	Jiwa
		Jumlah KK	179	KK

DARUL IKHSAN		
Luas SK	1,53	Ha
Luas Verifikasi	1,53	Ha
Jumlah Bangunan	42	Unit
Jumlah Penduduk	137	Jiwa
Jumlah KK	42	KK

JABAL MAKMUR		
Luas SK	1,08	Ha
Luas Verifikasi	1,08	Ha
Jumlah Bangunan	43	Unit
Jumlah Penduduk	140	Jiwa
Jumlah KK	43	KK

AMAN DAMAI		
Luas SK	1,97	Ha
Luas Verifikasi	1,97	Ha
Jumlah Bangunan	40	Unit
Jumlah Penduduk	132	Jiwa
Jumlah KK	41	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DARUL IKHSAN				JABAL MAKMUR				AMAN DAMAI			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	61,00	Unit	33,70%	1	42,00	Unit	100,00%	5	9,00	Unit	20,93%	0	2,00	Unit	5,00%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	14,00	Unit	7,73%	0	6,00	Unit	14,29%	0	4,00	Unit	9,30%	0	1,00	Unit	2,50%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				11,23%				33,33%				0,00%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	250,00	Meter	6,11%	0	150,00	Meter	22,06%	0	100,00	Meter	9,09%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.545,00	Meter	86,57%	5	530,00	Meter	77,94%	5	950,00	Meter	86,36%	5	1.665,00	Meter	89,28%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				43,28%				38,97%				43,18%				44,64%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	105,00	KK	58,66%	3	29,00	KK	69,05%	3	26,00	KK	60,47%	3	12,00	KK	29,27%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	40,00	KK	22,35%	0	20,00	KK	47,62%	1	1,00	KK	2,33%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				29,33%				58,33%				30,23%				14,63%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	300,00	Meter	12,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	300,00	Meter	19,35%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	750,00	Meter	30,00%	1	100,00	Meter	25,00%	1	-	Meter	0,00%	0	450,00	Meter	29,03%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,00%				8,33%				0,00%				9,68%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5,00	KK	2,79%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	6,98%	0	1,00	KK	2,44%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5,00	KK	2,79%	0	-	KK	0,00%	0	3,00	KK	6,98%	0	1,00	KK	2,44%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	179,00	KK	100,00%	5	42,00	KK	100,00%	5	43,00	KK	100,00%	5	41,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	165,00	KK	92,18%	5	41,00	KK	97,62%	5	40,00	KK	93,02%	5	41,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				96,09%				98,81%				96,51%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3,00	Unit	1,66%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	181,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5	43,00	Unit	100,00%	5	40,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		23		TOTAL NILAI		22
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,28%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		41,11%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,42%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		31,28%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: TRIENGGADENG**
Kawasan	**: TRIENGGADENG**

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	7,59	Ha
Jumlah Bangunan	181	Unit
Jumlah Penduduk	589	Jiwa
Jumlah KK	179	KK

TA'RUF

Luas SK	3,01	Ha
Luas Verifikasi	3,01	Ha
Jumlah Bangunan	56	Unit
Jumlah Penduduk	180	Jiwa
Jumlah KK	53	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	61,00	Unit	33,70%	1	8,00	Unit	14,29%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	14,00	Unit	7,73%	0	3,00	Unit	5,36%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				11,23%				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	250,00	Meter	6,11%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3.545,00	Meter	86,57%	5	400,00	Meter	88,89%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				43,28%				44,44%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	105,00	KK	58,66%	3	38,00	KK	71,70%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	40,00	KK	22,35%	0	19,00	KK	35,85%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				29,33%				53,77%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	300,00	Meter	12,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	750,00	Meter	30,00%	1	200,00	Meter	44,44%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,00%				14,81%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	5,00	KK	2,79%	0	1,00	KK	1,89%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	5,00	KK	2,79%	0	1,00	KK	1,89%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	179,00	KK	100,00%	5	53,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	165,00	KK	92,18%	5	43,00	KK	81,13%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				96,09%				90,57%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	3,00	Unit	1,66%	0	3,00	Unit	5,36%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	181,00	Unit	100,00%	5	56,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	25
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,28%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	36,23%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

f. NUMERIK RAWA SARI

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	14,97	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	241	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	760	Jiwa
		Jumlah KK	295	KK

DUSUN DAMAI		
Luas SK	4,41	Ha
Luas Verifikasi	4,41	Ha
Jumlah Bangunan	53	Unit
Jumlah Penduduk	163	Jiwa
Jumlah KK	66	KK

DUSUN DAYAH		
Luas SK	2,71	Ha
Luas Verifikasi	2,71	Ha
Jumlah Bangunan	58	Unit
Jumlah Penduduk	186	Jiwa
Jumlah KK	72	KK

DUSUN KUTA		
Luas SK	5,68	Ha
Luas Verifikasi	5,68	Ha
Jumlah Bangunan	62	Unit
Jumlah Penduduk	205	Jiwa
Jumlah KK	79	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN DAMAI				DUSUN DAYAH				DUSUN KUTA			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	67,00	Unit	27,80%	1	21,00	Unit	39,62%	1	2,00	Unit	3,45%	0	29,00	Unit	46,77%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	86,00	Unit	35,68%	1	27,00	Unit	50,94%	1	11,00	Unit	18,97%	0	30,00	Unit	48,39%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,16%				30,19%				0,00%				31,72%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.169,45	Meter	39,11%	1	384,86	Meter	38,63%	1	225,26	Meter	38,91%	1	319,90	Meter	29,62%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				19,56%				19,31%				19,45%				14,81%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	152,00	KK	51,53%	3	44,00	KK	66,67%	3	57,00	KK	79,17%	5	43,00	KK	54,43%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	156,00	KK	52,88%	3	44,00	KK	66,67%	3	45,00	KK	62,50%	3	46,00	KK	58,23%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				52,20%				66,67%				70,83%				56,33%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	931,81	Meter	59,09%	3	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	597,09	Meter	78,56%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	645,00	Meter	40,91%	1	243,00	Meter	100,00%	5	239,00	Meter	100,00%	5	163,00	Meter	21,44%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%				33,33%				26,19%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	102,00	KK	34,58%	1	21,00	KK	31,82%	1	14,00	KK	19,44%	0	30,00	KK	37,97%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	102,00	KK	34,58%	1	21,00	KK	31,82%	1	14,00	KK	19,44%	0	30,00	KK	37,97%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				34,58%				31,82%				0,00%				37,97%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	295,00	KK	100,00%	5	66,00	KK	100,00%	5	72,00	KK	100,00%	5	79,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	285,00	KK	96,61%	5	62,00	KK	93,94%	5	72,00	KK	100,00%	5	73,00	KK	92,41%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,31%				96,97%				100,00%				96,20%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	241,00	Unit	100,00%	5	53,00	Unit	100,00%	5	58,00	Unit	100,00%	5	62,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		30		TOTAL NILAI		31		TOTAL NILAI		29		TOTAL NILAI		31	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		44,16%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		46,90%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,09%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		44,75%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: TRIENGGADENG
Kawasan	: TRIENGGADENG

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	14,97	Ha
Jumlah Bangunan	241	Unit
Jumlah Penduduk	760	Jiwa
Jumlah KK	295	KK

DUSUN MAKMUR

Luas SK	2,16	Ha
Luas Verifikasi	2,16	Ha
Jumlah Bangunan	68	Unit
Jumlah Penduduk	206	Jiwa
Jumlah KK	78	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	67,00	Unit	27,80%	1	15,00	Unit	22,06%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	86,00	Unit	35,68%	1	18,00	Unit	26,47%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				21,16%				8,82%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.169,45	Meter	39,11%	1	239,43	Meter	71,53%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				19,56%				35,77%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	152,00	KK	51,53%	3	8,00	KK	10,26%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	156,00	KK	52,88%	3	21,00	KK	26,92%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				52,20%				13,46%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	931,81	Meter	59,09%	3	334,72	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	645,00	Meter	40,91%	1	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				33,33%				33,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	102,00	KK	34,58%	1	37,00	KK	47,44%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	102,00	KK	34,58%	1	37,00	KK	47,44%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				34,58%				47,44%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	295,00	KK	100,00%	5	78,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	285,00	KK	96,61%	5	78,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				98,31%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	241,00	Unit	100,00%	5	68,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	
				TOTAL NILAI	30			TOTAL NILAI	27
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	44,16%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	41,26%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

g. NUMERIK DEAH PANGWA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	27,04	Ha
Kecamatan	: TRIENGGADENG	Jumlah Bangunan	284	Unit
Kawasan	: TRIENGGADENG	Jumlah Penduduk	1.230	Jiwa
		Jumlah KK	342	KK

DUSUN BLANG DALAM		
Luas SK	9,21	Ha
Luas Verifikasi	9,21	Ha
Jumlah Bangunan	96	Unit
Jumlah Penduduk	411	Jiwa
Jumlah KK	113	KK

DUSUN KRUENG BAROH		
Luas SK	10,25	Ha
Luas Verifikasi	10,25	Ha
Jumlah Bangunan	51	Unit
Jumlah Penduduk	210	Jiwa
Jumlah KK	61	KK

DUSUN KRUENG TUNONG		
Luas SK	4,39	Ha
Luas Verifikasi	4,39	Ha
Jumlah Bangunan	95	Unit
Jumlah Penduduk	423	Jiwa
Jumlah KK	122	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BLANG DALAM				DUSUN KRUENG BAROH				DUSUN KRUENG TUNONG			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	143,00	Unit	50,35%	1	63,00	Unit	65,63%	3	18,00	Unit	35,29%	1	38,00	Unit	40,00%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	107,00	Unit	37,68%	1	48,00	Unit	50,00%	1	22,00	Unit	43,14%	1	20,00	Unit	21,05%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				29,34%				38,54%				26,14%				13,33%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.382,59	Meter	56,00%	3	549,70	Meter	30,65%	1	796,03	Meter	72,65%	3	353,75	Meter	51,86%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				28,00%				15,32%				36,33%				25,93%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	64,00	KK	18,71%	0	52,00	KK	46,02%	1	11,00	KK	18,03%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195,00	KK	57,02%	3	29,00	KK	25,66%	1	17,00	KK	27,87%	1	122,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				28,51%				35,84%				13,93%				50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	683,11	Meter	19,74%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.118,00	Meter	32,31%	1	758,00	Meter	65,29%	3	360,00	Meter	27,78%	1	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				10,77%				21,76%				9,26%				0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	46,00	KK	13,45%	0	22,00	KK	19,47%	0	5,00	KK	8,20%	0	10,00	KK	8,20%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	46,00	KK	13,45%	0	22,00	KK	19,47%	0	5,00	KK	8,20%	0	10,00	KK	8,20%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	342,00	KK	100,00%	5	113,00	KK	100,00%	5	61,00	KK	100,00%	5	122,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	323,00	KK	94,44%	5	104,00	KK	92,04%	5	53,00	KK	86,89%	5	122,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				97,22%				96,02%				93,44%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	284,00	Unit	100,00%	5	96,00	Unit	100,00%	5	51,00	Unit	100,00%	5	95,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
		TOTAL NILAI		24		TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		22		TOTAL NILAI		24	
		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,84%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		36,78%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		32,73%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,18%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN
60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**
Kecamatan	**: TRIENGGADENG**
Kawasan	**: TRIENGGADENG**

Luas SK	**-**	Ha
Luas Verifikasi	**27,04**	Ha
Jumlah Bangunan	**284**	Unit
Jumlah Penduduk	**1.230**	Jiwa
Jumlah KK	**342**	KK

DUSUN TANJONG

Luas SK	**3,19**	Ha
Luas Verifikasi	**3,19**	Ha
Jumlah Bangunan	**42**	Unit
Jumlah Penduduk	**186**	Jiwa
Jumlah KK	**46**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	143,00	Unit	50,35%	**1**	24,00	Unit	57,14%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	107,00	Unit	37,68%	**1**	17,00	Unit	40,48%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**29,34%**				**32,54%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	**0**	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.382,59	Meter	56,00%	**3**	683,11	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**28,00%**				**50,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	64,00	KK	18,71%	**0**	1,00	KK	2,17%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195,00	KK	57,02%	**3**	27,00	KK	58,70%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**28,51%**				**29,35%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	**0**	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	683,11	Meter	19,74%	**0**	683,11	Meter	100,00%	5
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.118,00	Meter	32,31%	**1**	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**10,77%**				**33,33%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	46,00	KK	13,45%	**0**	9,00	KK	19,57%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	46,00	KK	13,45%	**0**	9,00	KK	19,57%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	342,00	KK	100,00%	**5**	46,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	323,00	KK	94,44%	**5**	44,00	KK	95,65%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**97,22%**				**97,83%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	**0**	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	284,00	Unit	100,00%	**5**	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**	
			TOTAL NILAI		**24**		**TOTAL NILAI**		**32**
			TINGKAT KEKUMUHAN		**KUMUH RINGAN**		**TINGKAT KEKUMUHAN**		**KUMUH RINGAN**
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		**34,84%**		**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**		**41,86%**
			KONTRIBUSI PENANGANAN		**0,00%**		**KONTRIBUSI PENANGANAN**		**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

h. NUMERIK CUMCOT LHEU RHENG

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**6,13**	Ha
Kecamatan	**: TRIENGGADENG**	**Jumlah Bangunan**	**161**	Unit
Kawasan	**: TRIENGGADENG**	**Jumlah Penduduk**	**700**	Jiwa
		Jumlah KK	**205**	KK

JUMPA		
Luas SK	**2,08**	Ha
Luas Verifikasi	**2,08**	Ha
Jumlah Bangunan	**71**	Unit
Jumlah Penduduk	**313**	Jiwa
Jumlah KK	**86**	KK

PERMAI		
Luas SK	**4,05**	Ha
Luas Verifikasi	**4,05**	Ha
Jumlah Bangunan	**90**	Unit
Jumlah Penduduk	**387**	Jiwa
Jumlah KK	**119**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	162,00	Unit	100,62%	5	71,00	Unit	100,00%	5	91,00	Unit	101,11%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	19,00	Unit	11,80%	0	3,00	Unit	4,23%	0	16,00	Unit	17,78%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**33,54%**				**33,33%**				**33,70%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	266,41	Meter	34,08%	1	-	Meter	0,00%	0	266,41	Meter	52,78%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**17,04%**				**0,00%**				**26,39%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	8,00	KK	3,90%	0	7,00	KK	8,14%	0	1,00	KK	0,84%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	495,00	Meter	76,39%	5	410,00	Meter	100,00%	5	85,00	Meter	35,71%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**25,46%**				**33,33%**				**11,90%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	6,00	KK	2,93%	0	-	KK	0,00%	0	6,00	KK	5,04%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	6,00	KK	2,93%	0	-	KK	0,00%	0	6,00	KK	5,04%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**0,00%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	205,00	KK	100,00%	5	86,00	KK	100,00%	5	119,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	179,00	KK	87,32%	5	78,00	KK	90,70%	5	101,00	KK	84,87%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**93,66%**				**95,35%**				**92,44%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	(1,00)	Unit	-0,62%	0	-	Unit	0,00%	0	(1,00)	Unit	-1,11%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	161,00	Unit	100,00%	5	71,00	Unit	100,00%	5	90,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**50,00%**				**50,00%**				**50,00%**	
				TOTAL NILAI	**26**			**TOTAL NILAI**	**25**			**TOTAL NILAI**	**24**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**31,39%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**30,29%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**30,63%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

9. NUMERIK KECAMATAN PANTERAJA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**22,51**	Ha
Kecamatan	**: PANTERAJA**	**Jumlah Bangunan**	**489**	Unit
Kawasan	**: PANTERAJA**	**Jumlah Penduduk**	**1.893**	Jiwa
		Jumlah KK	**567**	KK

Keude Panteraja

Luas SK	**14,90**	Ha
Luas Verifikasi	**14,90**	Ha
Jumlah Bangunan	**353**	Unit
Jumlah Penduduk	**1.309**	Jiwa
Jumlah KK	**376**	KK

Gampong Teungoh

Luas SK	**7,61**	Ha
Luas Verifikasi	**7,61**	Ha
Jumlah Bangunan	**136**	Unit
Jumlah Penduduk	**584**	Jiwa
Jumlah KK	**191**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	284,00	Unit	58,08%	3	197,00	Unit	55,81%	3	87,00	Unit	63,97%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	58,00	Unit	11,86%	0	-	Unit	0,00%	0	58,00	Unit	42,65%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				**19,36%**				**18,60%**				**35,54%**	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.381,33	Meter	67,67%	3	1.171,73	Meter	50,73%	1	1.209,60	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				**33,83%**				**25,37%**				**50,00%**	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	80,00	KK	14,11%	0	76,00	KK	20,21%	0	4,00	KK	2,09%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	73,00	KK	12,87%	0	-	KK	0,00%	0	73,00	KK	38,22%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				**0,00%**				**0,00%**				**19,11%**	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.261,02	Meter	50,20%	1	565,85	Meter	38,36%	1	695,17	Meter	67,03%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				**16,73%**				**12,79%**				**22,34%**	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	113,00	KK	19,93%	0	14,00	KK	3,72%	0	99,00	KK	51,83%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	113,00	KK	19,93%	0	14,00	KK	3,72%	0	99,00	KK	51,83%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				**0,00%**				**0,00%**				**51,83%**	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	567,00	KK	100,00%	5	376,00	KK	100,00%	5	191,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	498,00	KK	87,83%	5	307,00	KK	81,65%	5	191,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				**93,92%**				**90,82%**				**100,00%**	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	417,00	Unit	85,28%	5	318,00	Unit	90,08%	5	99,00	Unit	72,79%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	489,00	Unit	100,00%	5	353,00	Unit	100,00%	5	136,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				**92,64%**				**95,04%**				**86,40%**	
				TOTAL NILAI	**27**			**TOTAL NILAI**	**25**			**TOTAL NILAI**	**37**
				TINGKAT KEKUMUHAN	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**			**TINGKAT KEKUMUHAN**	**KUMUH RINGAN**
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	**36,64%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**34,66%**			**RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL**	**52,17%**
				KONTRIBUSI PENANGANAN	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**			**KONTRIBUSI PENANGANAN**	**0,00%**

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

a. NUMERIK KEUDE PANTERAJA

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH	Luas SK	-	Ha
Kab/Kota	: PIDIE JAYA	Luas Verifikasi	14,90	Ha
Kecamatan	: PANTERAJA	Jumlah Bangunan	353	Unit
Kawasan	: PANTERAJA	Jumlah Penduduk	1.309	Jiwa
		Jumlah KK	376	KK

DUSUN BARAT		
Luas SK	7,24	Ha
Luas Verifikasi	7,24	Ha
Jumlah Bangunan	210	Unit
Jumlah Penduduk	761	Jiwa
Jumlah KK	221	KK

DUSUN KEUDE		
Luas SK	2,24	Ha
Luas Verifikasi	2,24	Ha
Jumlah Bangunan	35	Unit
Jumlah Penduduk	136	Jiwa
Jumlah KK	38	KK

DUSUN TEUNGOH		
Luas SK	2,83	Ha
Luas Verifikasi	2,83	Ha
Jumlah Bangunan	66	Unit
Jumlah Penduduk	243	Jiwa
Jumlah KK	71	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				DUSUN BARAT				DUSUN KEUDE				DUSUN TEUNGOH			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	197,00	Unit	55,81%	3	122,00	Unit	58,10%	3	26,00	Unit	74,29%	3	35,00	Unit	53,03%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,60%				19,37%				24,76%				17,68%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.171,73	Meter	50,73%	1	703,04	Meter	75,24%	3	63,95	Meter	15,29%	0	237,34	Meter	65,16%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				25,37%				37,62%				0,00%				32,58%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76,00	KK	20,21%	0	73,00	KK	33,03%	1	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				16,52%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	565,85	Meter	38,36%	1	164,63	Meter	41,57%	1	63,95	Meter	23,03%	0	169,87	Meter	57,24%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				12,79%				13,86%				0,00%				19,08%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14,00	KK	3,72%	0	4,00	KK	1,81%	0	2,00	KK	5,26%	0	4,00	KK	5,63%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	14,00	KK	3,72%	0	4,00	KK	1,81%	0	2,00	KK	5,26%	0	4,00	KK	5,63%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	376,00	KK	100,00%	5	221,00	KK	100,00%	5	38,00	KK	100,00%	5	71,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	307,00	KK	81,65%	5	162,00	KK	73,30%	3	38,00	KK	100,00%	5	64,00	KK	90,14%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				90,82%				86,65%				100,00%				95,07%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	318,00	Unit	90,08%	5	210,00	Unit	100,00%	5	-	Unit	0,00%	0	66,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	353,00	Unit	100,00%	5	210,00	Unit	100,00%	5	35,00	Unit	100,00%	5	66,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				95,04%				100,00%				50,00%				100,00%	
			TOTAL NILAI		25		TOTAL NILAI		26		TOTAL NILAI		18		TOTAL NILAI		29
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		34,66%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		39,14%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		24,97%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		37,77%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	: ACEH
Kab/Kota	: PIDIE JAYA
Kecamatan	: PANTERAJA
Kawasan	: PANTERAJA

Luas SK	-	Ha
Luas Verifikasi	14,90	Ha
Jumlah Bangunan	353	Unit
Jumlah Penduduk	1.309	Jiwa
Jumlah KK	376	KK

DUSUN TIMUR

Luas SK	2,60	Ha
Luas Verifikasi	2,60	Ha
Jumlah Bangunan	42	Unit
Jumlah Penduduk	169	Jiwa
Jumlah KK	46	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	197,00	Unit	55,81%	3	14,00	Unit	33,33%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,60%				11,11%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.171,73	Meter	50,73%	1	167,40	Meter	28,24%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				25,37%				14,12%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76,00	KK	20,21%	0	3,00	KK	6,52%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	565,85	Meter	38,36%	1	167,40	Meter	33,18%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				12,79%				11,06%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14,00	KK	3,72%	0	4,00	KK	8,70%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	14,00	KK	3,72%	0	4,00	KK	8,70%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	376,00	KK	100,00%	5	46,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	307,00	KK	81,65%	5	43,00	KK	93,48%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				90,82%				96,74%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	318,00	Unit	90,08%	5	42,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	353,00	Unit	100,00%	5	42,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				95,04%				100,00%	
				TOTAL NILAI	25			TOTAL NILAI	23
				TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
				RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	34,66%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	33,29%
				KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

b. NUMERIK GAMPONG TEUNGOH

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: ACEH**	**Luas SK**	**-**	Ha
Kab/Kota	**: PIDIE JAYA**	**Luas Verifikasi**	**7,61**	Ha
Kecamatan	**: PANTERAJA**	**Jumlah Bangunan**	**136**	Unit
Kawasan	**: PANTERAJA**	**Jumlah Penduduk**	**584**	Jiwa
		Jumlah KK	**191**	KK

LORONG GEUNTENG		
Luas SK	**3,26**	Ha
Luas Verifikasi	**3,26**	Ha
Jumlah Bangunan	**71**	Unit
Jumlah Penduduk	**346**	Jiwa
Jumlah KK	**104**	KK

MANCANG		
Luas SK	**2,08**	Ha
Luas Verifikasi	**2,08**	Ha
Jumlah Bangunan	**28**	Unit
Jumlah Penduduk	**109**	Jiwa
Jumlah KK	**42**	KK

BULOH		
Luas SK	**2,26**	Ha
Luas Verifikasi	**2,26**	Ha
Jumlah Bangunan	**37**	Unit
Jumlah Penduduk	**129**	Jiwa
Jumlah KK	**45**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SAT.	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	87,00	Unit	63,97%	3	45,00	Unit	63,38%	3	28,00	Unit	100,00%	5	14,00	Unit	37,84%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	58,00	Unit	42,65%	1	47,00	Unit	66,20%	3	-	Unit	0,00%	0	11,00	Unit	29,73%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				35,54%				43,19%				33,33%				22,52%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.209,60	Meter	100,00%	5	589,83	Meter	100,00%	5	310,16	Meter	100,00%	5	309,61	Meter	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				50,00%				50,00%				50,00%				50,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	4,00	KK	2,09%	0	3,00	KK	2,88%	0	-	KK	0,00%	0	1,00	KK	2,22%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	73,00	KK	38,22%	1	62,00	KK	59,62%	3	-	KK	0,00%	0	11,00	KK	24,44%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				19,11%				29,81%				0,00%				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0	-	Meter	0,00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	695,17	Meter	67,03%	3	211,64	Meter	44,61%	1	208,89	Meter	88,48%	5	274,63	Meter	84,08%	5
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				22,34%				14,87%				29,49%				28,03%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	99,00	KK	51,83%	3	58,00	KK	55,77%	3	1,00	KK	2,38%	0	40,00	KK	88,89%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	99,00	KK	51,83%	3	58,00	KK	55,77%	3	1,00	KK	2,38%	0	40,00	KK	88,89%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				51,83%				55,77%				0,00%				88,89%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	191,00	KK	100,00%	5	104,00	KK	100,00%	5	42,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	191,00	KK	100,00%	5	104,00	KK	100,00%	5	42,00	KK	100,00%	5	45,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan				100,00%				100,00%				100,00%				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	99,00	Unit	72,79%	3	71,00	Unit	100,00%	5	28,00	Unit	100,00%	5	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	136,00	Unit	100,00%	5	71,00	Unit	100,00%	5	28,00	Unit	100,00%	5	37,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86,40%				100,00%				100,00%				50,00%	
			TOTAL NILAI		37		TOTAL NILAI		41		TOTAL NILAI		35		TOTAL NILAI		37
			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH SEDANG		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		52,17%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		56,23%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		44,69%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		48,49%
			KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,00%

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN

60-80 KUMUH BERAT
38-59 KUMUH SEDANG
16-37 KUMUH RINGAN
<16 DINYATAKAN TIDAK KUMUH

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN

MASTERPLAN

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Kabupaten Pidie Jaya



MASTER PLAN

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN SKALA KAWASAN - MEUREUDU



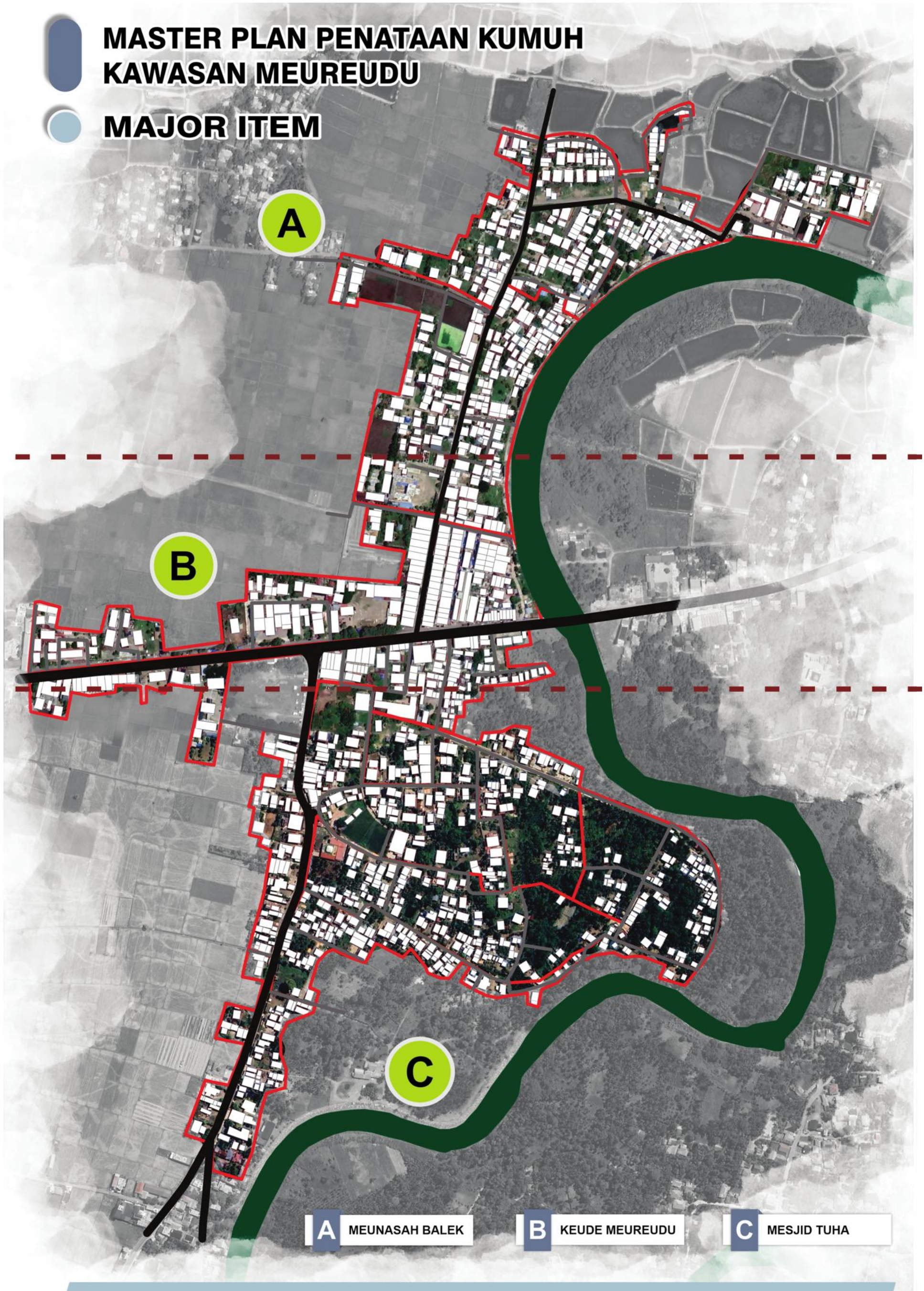




Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya
2023

MASTER PLAN PENATAAN KUMUH
KAWASAN MEUREUDU

MAJOR ITEM



PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR KAWASAN KUMUH - KOTA MEUREUDU

MASTER PLAN PENATAAN KUMUH KAWASAN MEUREUDU

MAJOR ITEM

A Pelestarian Lingkungan
- Pengamanan Sempadan Sungai

B Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
- River Walk

C Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan
- Ipal Komunal
- Bak Sampah 3R

D Penyediaan Air Bersih
- Peningkatan dan Penambahan Jaringan SR

E Proteksi Dan Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Titik Kumpul
- Proteksi Kebakaran

F Perubahan Wajah Kawasan
- Ruang Terbuka Publik
- Penataan Kawasan Sempadan Sungai
- Bangunan Serbagunan (Rumoh Aceh)

MEUNASAH BALEK

KEUDE MEUREUDU

MESJID TUHA

Major Item

1. SMA
2. Puskesmas
3. POLSEK Meureude
4. Pendopo Bupati
5. Kantor Camat
6. Pasar
7. MAN
8. Mesjid
9. Radio
10. Cold Storage
11. Kantor Imigrasi
12. Koramil Meureudu
13. Sekolah Dasar
14. Lapangan Mini
15. Dayah

PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR KAWASAN KUMUH - KOTA MEUREUDU

MASTER PLAN PENATAAN KUMUH KAWASAN MEUREUDU

MAJOR ITEM

A — Pelestarian Lingkungan
- Pengamanan Sempadan Sungai

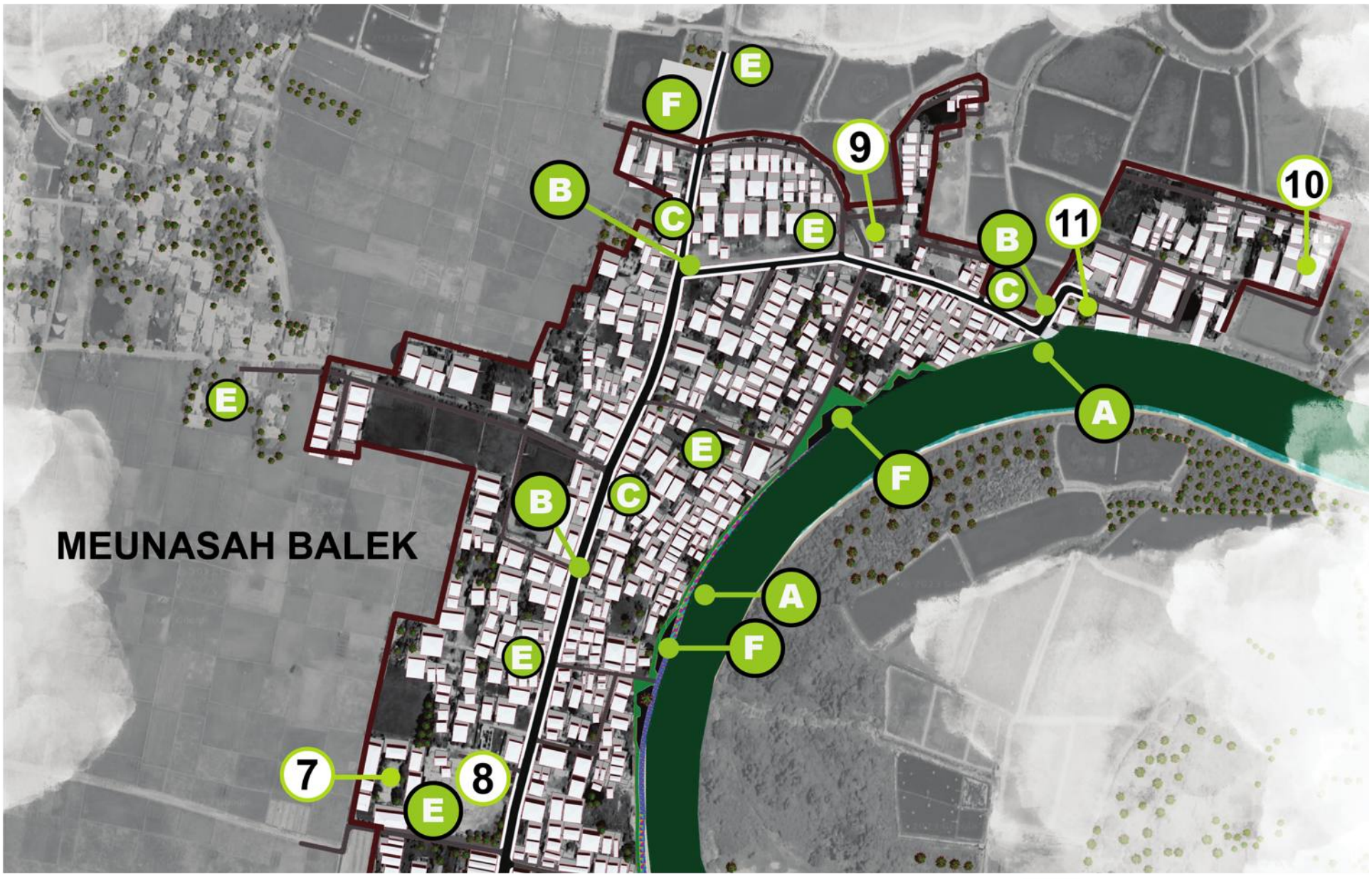
B — Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
- River Walk

C — Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan
- Ipal Komunal
- Bak Sampah 3R

D — Penyediaan Air Bersih
- Peningkatan dan Penambahan Jaringan SR

E — Proteksi Dan Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Titik Kumpul
- Proteksi Kebakaran

F — Perubahan Wajah Kawasan
- Ruang Terbuka Publik
- Penataan Kawasan Sempadan Sungai
- Bangunan Serbagunan (Rumoh Aceh)



Major Item

1. SMA	6. Pasar	11. Kantor Imigrasi
2. Puskesmas	7. MAN	12. Koramil Meureudu
3. POLSEK Meureude	8. Mesjid	13. Sekolah Dasar
4. Pendopo Bupati	9. Radio	14. Lapangan Mini
5. Kantor Camat	10. Cold Storage	15. Dayah

MASTER PLAN PENATAAN KUMUH KAWASAN MEUREUDU

MAJOR ITEM

A — Pelestarian Lingkungan
- Pengamanan Sempadan Sungai

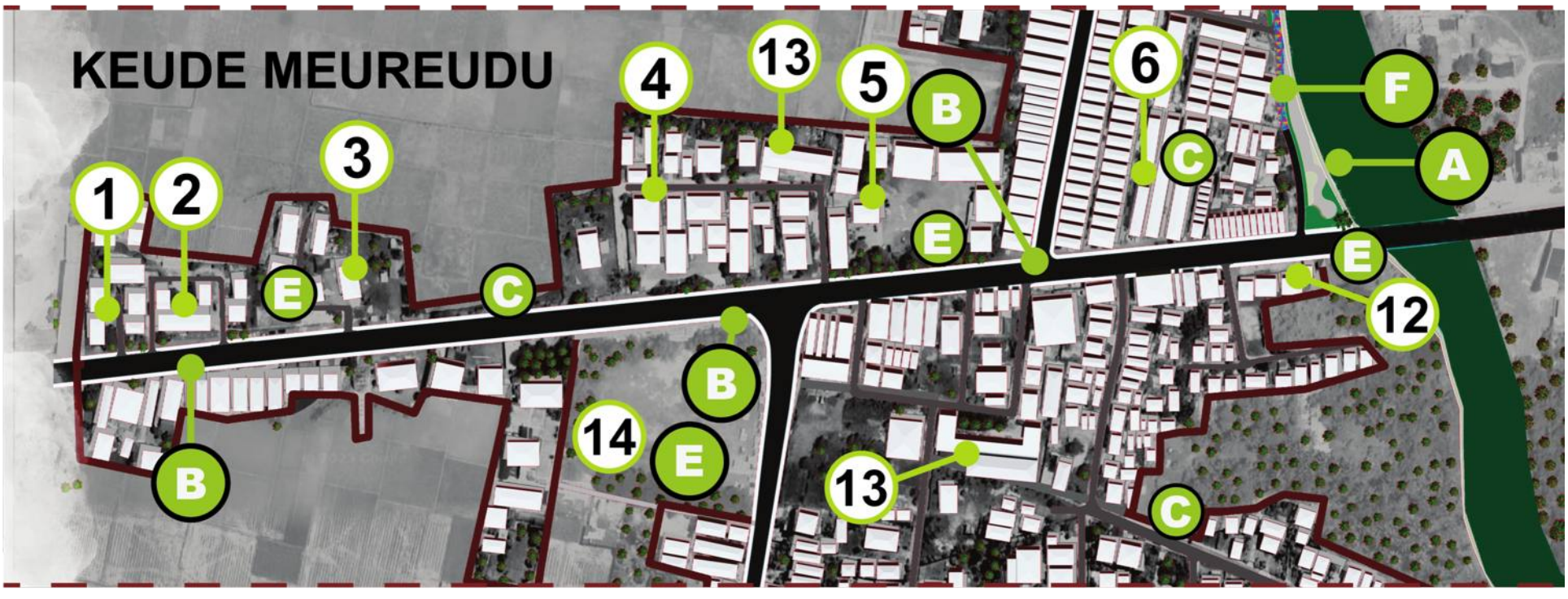
B — Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
- River Walk

C — Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan
- Ipal Komunal
- Bak Sampah 3R

D — Penyediaan Air Bersih
- Peningkatan dan Penambahan Jaringan SR

E — Proteksi Dan Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Titik Kumpul
- Proteksi Kebakaran

F — Perubahan Wajah Kawasan
- Ruang Terbuka Publik
- Penataan Kawasan Sempadan Sungai
- Bangunan Serbagunan (Rumoh Aceh)



Major Item

1. SMA	6. Pasar	11. Kantor Imigrasi
2. Puskesmas	7. MAN	12. Koramil Meureudu
3. POLSEK Meureude	8. Mesjid	13. Sekolah Dasar
4. Pendopo Bupati	9. Radio	14. Lapangan Mini
5. Kantor Camat	10. Cold Storage	15. Dayah

MASTER PLAN PENATAAN KUMUH KAWASAN MEUREUDU

MAJOR ITEM

A — Pelestarian Lingkungan
- Pengamanan Sempadan Sungai

B — Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
- River Walk

C — Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan
- Ipal Komunal
- Bak Sampah 3R

D — Penyediaan Air Bersih
- Peningkatan dan Penambahan Jaringan SR

E — Proteksi Dan Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Titik Kumpul
- Proteksi Kebakaran

F — Perubahan Wajah Kawasan
- Ruang Terbuka Publik
- Penataan Kawasan Sempadan Sungai
- Bangunan Serbagunan (Rumoh Aceh)



Major Item

1. SMA
2. Puskesmas
3. POLSEK Meureude
4. Pendopo Bupati
5. Kantor Camat
6. Pasar
7. MAN
8. Mesjid
9. Radio
10. Cold Storage
11. Kantor Imigrasi
12. Koramil Meureudu
13. Sekolah Dasar
14. Lapangan Mini
15. Dayah

A PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEMPADAN SUNGAI





- Ruang Penyangga Antara Ekosistem Sungai dan Daratan
- Berfungsi Agar Kegiatan Manusia dan Sungai Tidak Saling Terganggu

Penyangga | Sempadan Sungai



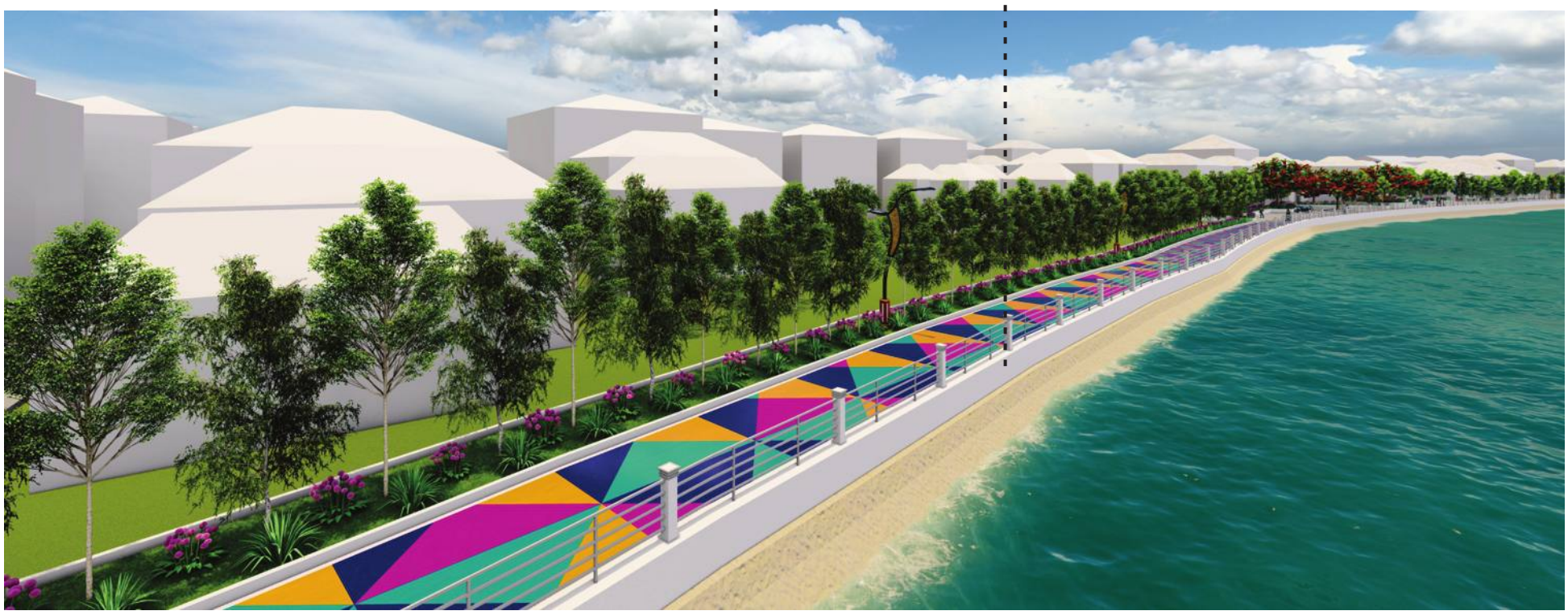
A PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEATBELT PINGGIR SUNGAI



- Melindungi Sungai Dari Gerusan, Erosi dan Pencemaran
- Memiliki Nilai Properti Keindahan Lanskap Yang Tinggi

Lanskap | Pelindung Sungai



B PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

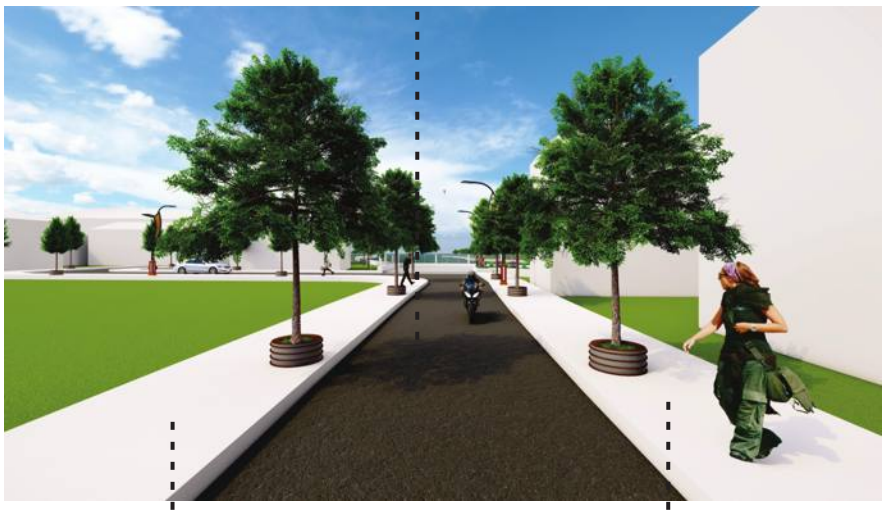
PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE



Bangunan Hunian

Jalan Lingkungan

Peningkatan Kualitas Jalan



Peningkatan Kualitas Drainase

River Walk

B PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE



Bangunan Hunian

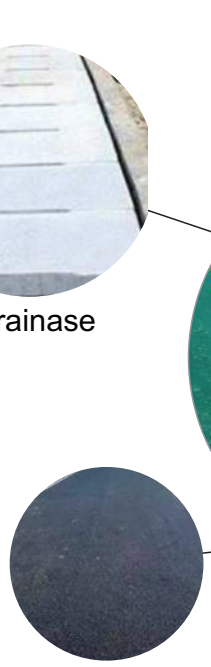
Peningkatan Jalan

Bangunan Hunian



Drainase





Aspal

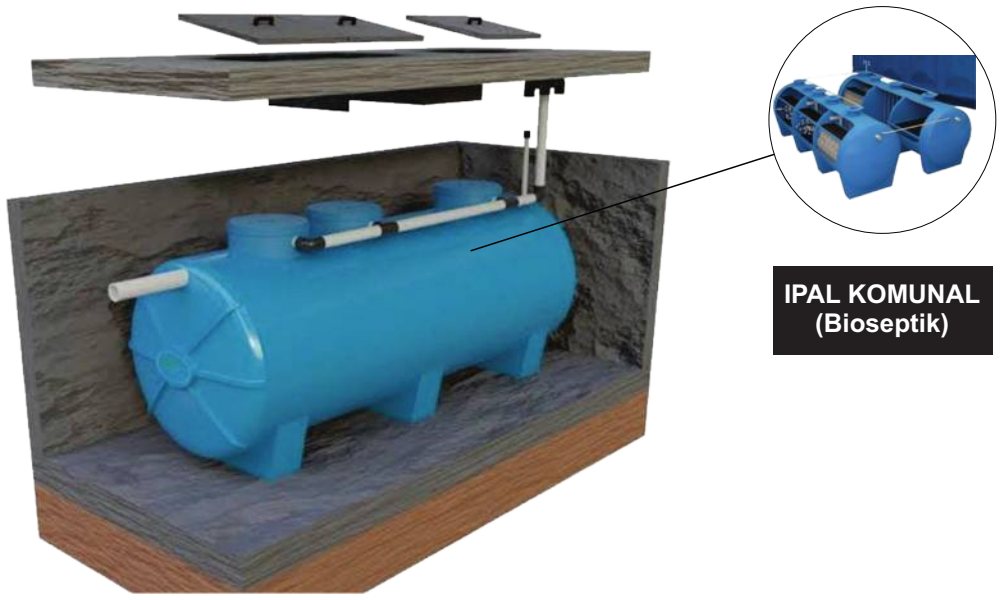


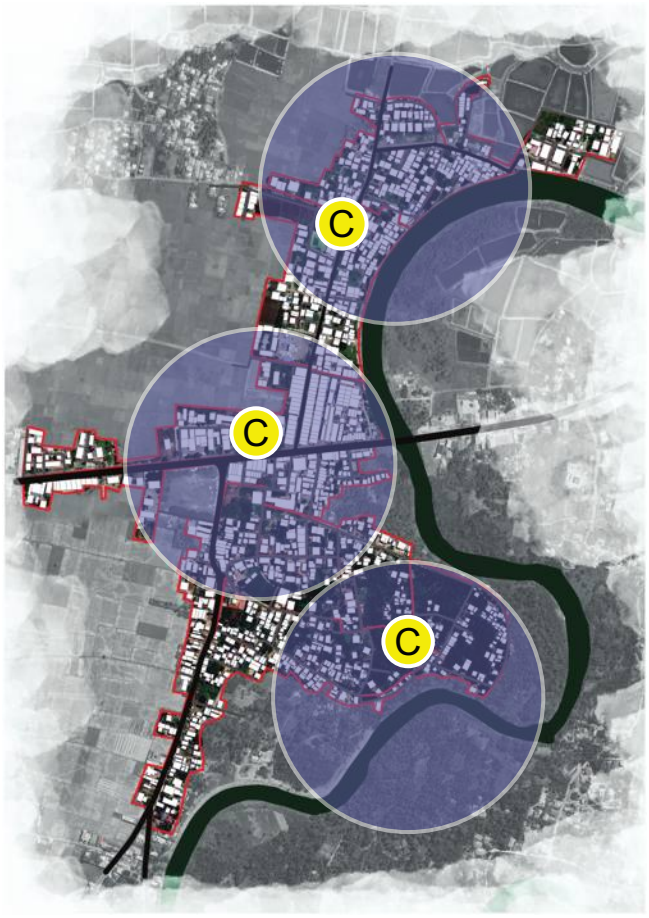
Rabat Beton

River Walk

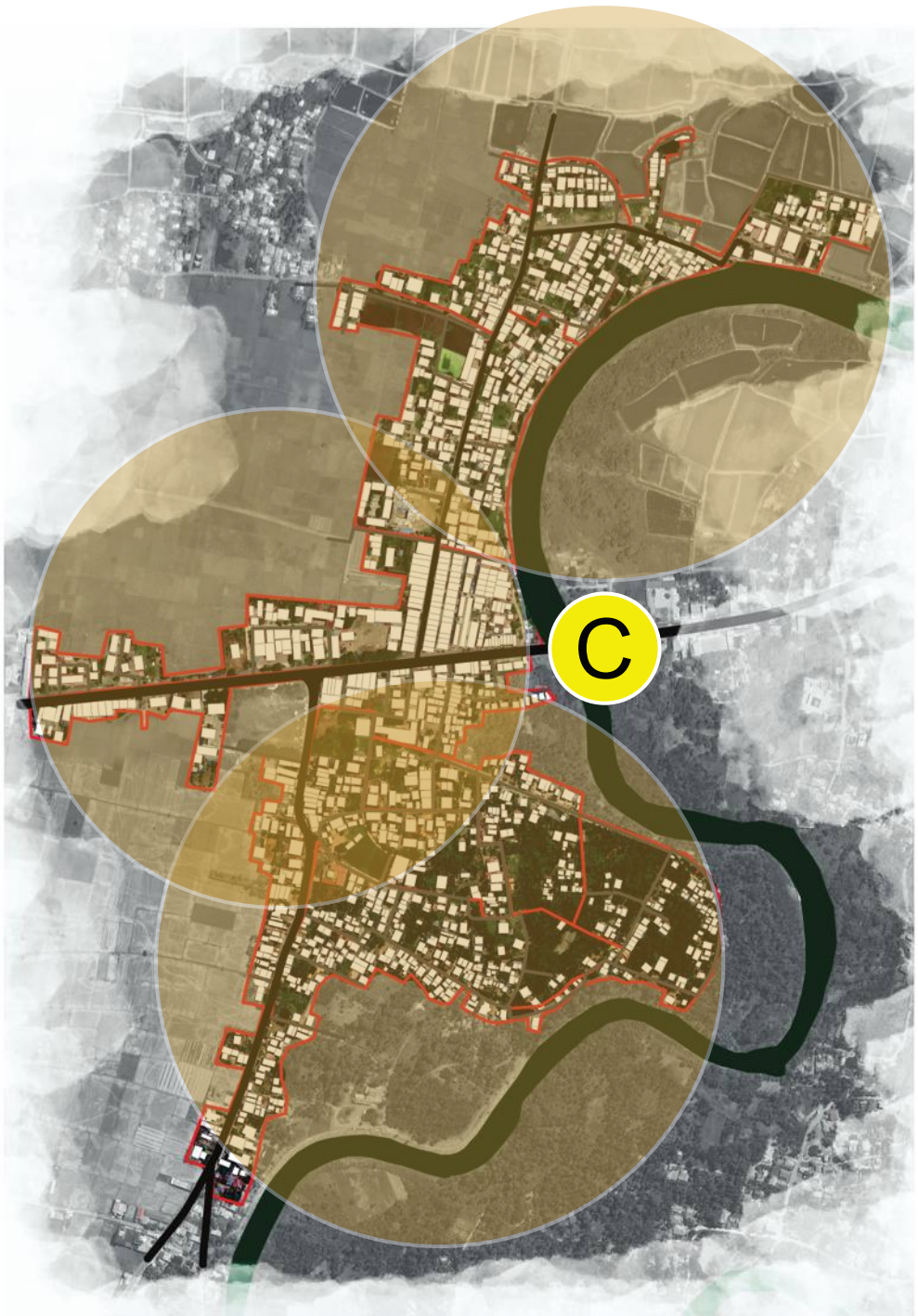
C PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

IPAL KOMUNAL TERINTEGRASI RTP



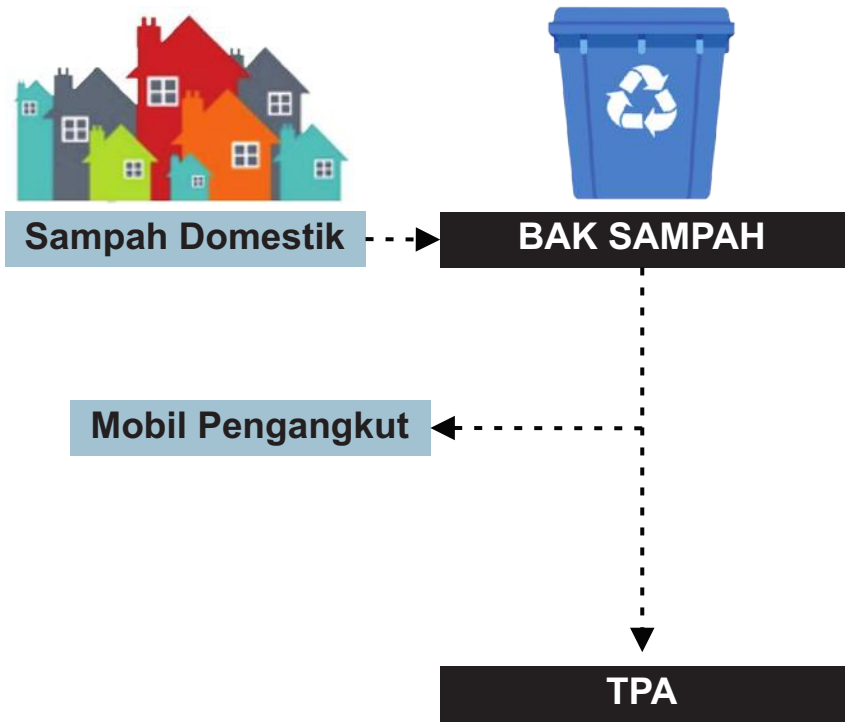


1. Pemanfaatan IPAL fabrikasi mengurangi resiko mal-konstruksi
2. Sistem distribusi menyesuaikan dengan blok rumah atau arah kontur
3. Potensi kerja sama: PUPR, DLHK, DINKES



C PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

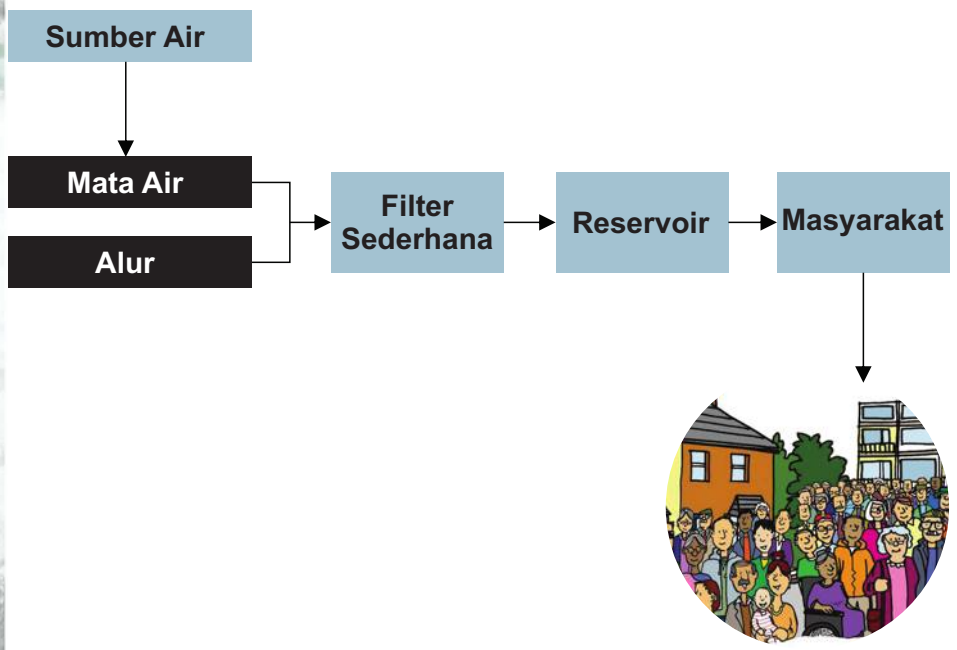
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN



D PENYEDIAAN AIR BERSIH

PENINGKATAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN SR





LINGKUNGAN MEUREUDU



PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR KAWASAN KUMUH - KOTA MEUREUDU

E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

JALUR EVAKUASI BENCANA







E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

PROTEKSI KEBAKARAN







Lapangan Terbuka



Tempat Ibadah

E PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

TITIK KUMPUL



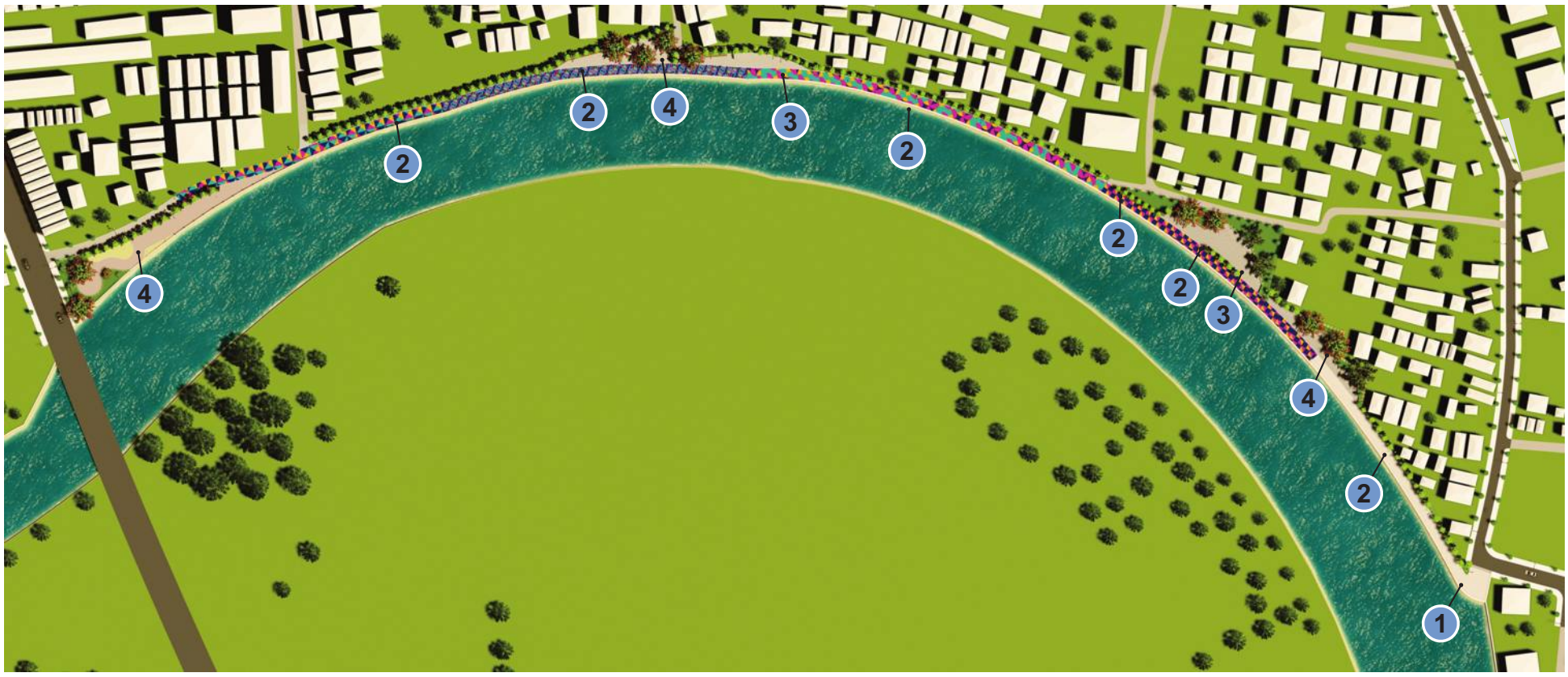
F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RUANG TERBUKA PUBLIK



F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI



1. Viewing Deck 2. River Walk 3. Parkir Roda Dua 4.Taman 5. Rumoh Aceh

F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

VIEWING DECK



F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RIVER WALK










F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RIVER WALK










F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

PARKIR RODA DUA





F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

TAMAN









F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

BANGUNAN SERBAGUNA (RUMOH ACEH)











F PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

OTHER DESIGN

















MASTER PLAN

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN PERMUKIMAN SKALA KAWASAN - PANTE RAJA







Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2023



MASTER PLAN PENATAAN KUMUH KAWASAN PANTE RAJA

MAJOR ITEM



1 Pelestarian Lingkungan
- Pengamanan Sempadan Sungai

2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan
- River Walk

3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Dan Persampahan
- Ipal Komunal
- Bak Sampah 3R

4 Penyediaan Air Bersih
- Peningkatan dan Penambahan Jaringan SR

5 Proteksi Dan Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana
- Titik Kumpul
- Proteksi Kebakaran

6 Perubahan Wajah Kawasan
- Ruang Terbuka Publik
- Penataan Kawasan Sempadan Sungai

A Mesjid

B TPI

C Lapangan Bola

PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR KAWASAN KUMUH - PANTE RAJA

1 PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEMPADAN SUNGAI





- Ruang Penyangga Antara Ekosistem Sungai dan Daratan
- Berfungsi Agar Kegiatan Manusia dan Sungai Tidak Saling Terganggu

Sempadan Sungai | **Penyangga**



1 PELESTARIAN LINGKUNGAN

SEATBELT PINGGIR SUNGAI

- Melindungi Sungai Dari Gerusan, Erosi dan Pencemaran
- Memiliki Nilai Properti Keindahan Lanskap Yang Tinggi



Lanskap | **Pelindung Sungai**



2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE



Bangunan Hunian

Peningkatan Jalan

Peningkatan Kualitas Jalan



Peningkatan Kualitas Drainase

River Walk

2 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN DRAINASE

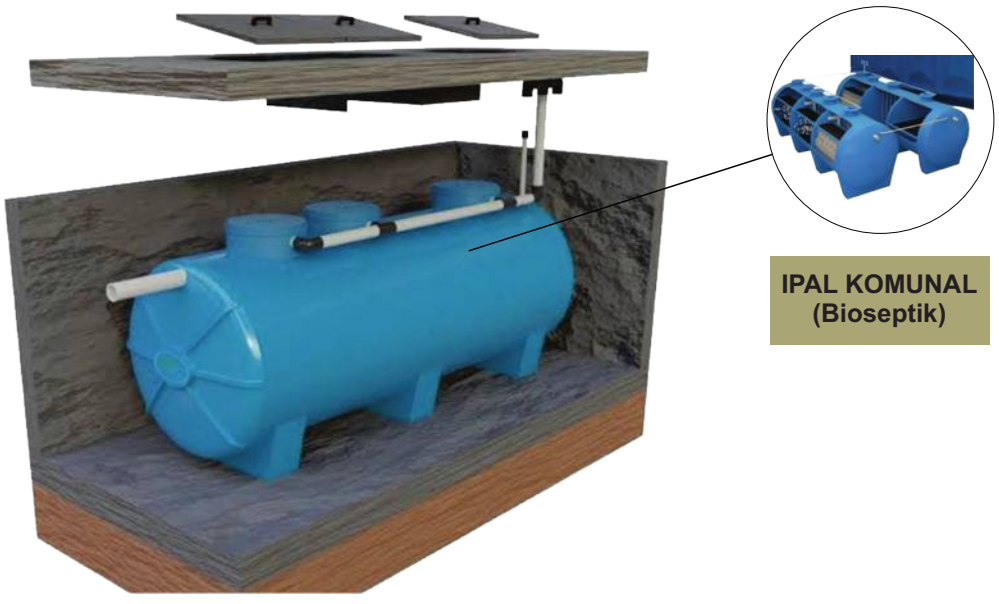


Rabat Beton



3 PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

IPAL KOMUNAL TERINTEGRASI RTP





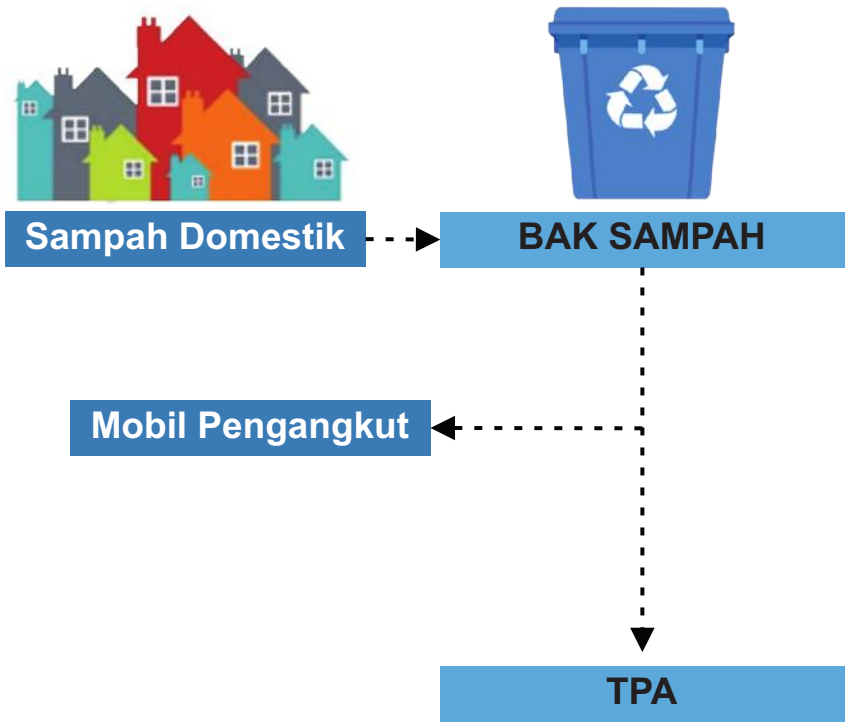
Posisi IPAL harus berada di ketinggian yang lebih rendah dari permukiman

1. Pemanfaatan IPAL fabrikasi mengurangi resiko mal-konstruksi
2. Sistem distribusi menyesuaikan dengan blok rumah atau arah kontur
3. Potensi kerja sama: PUPR, DLHK, DINKES

3 PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

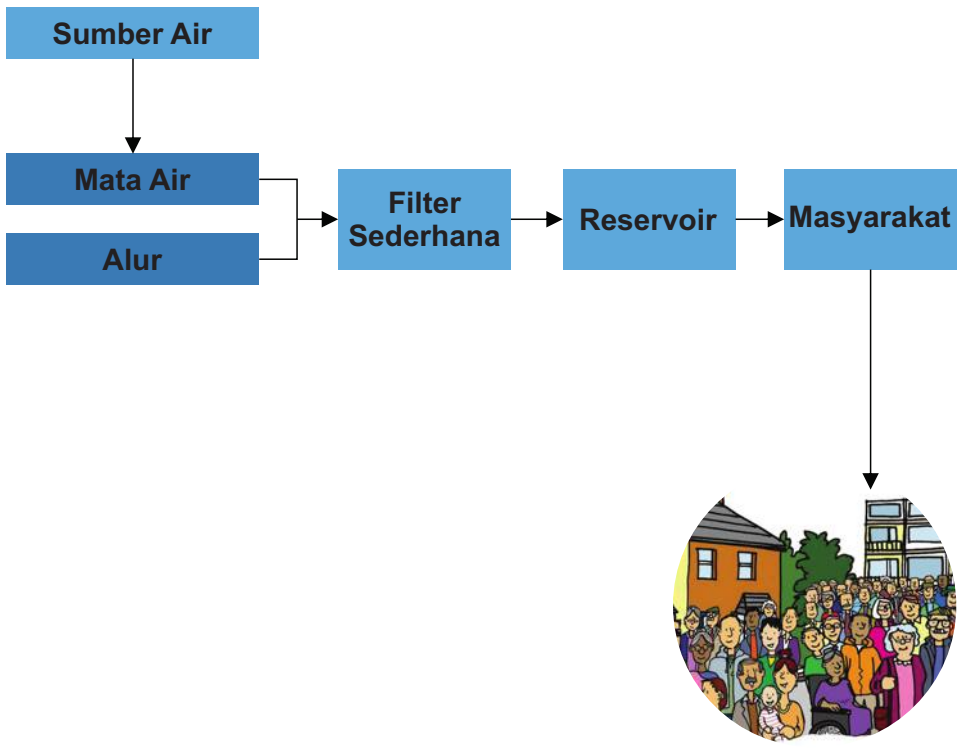




4 PENYEDIAAN AIR BERSIH

PENINGKATAN DAN PENAMBAHAN JARINGAN SR





LINGKUNGAN PANTE RAJA



5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- JALUR EVAKUASI BENCANA







5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- PROTEKSI KEBAKARAN





5 PROTEKSI DAN EVAKUASI BENCANA

- TITIK KUMPUL



Lapangan Terbuka



Tempat Ibadah



6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

RUANG TERBUKA PUBLIK



PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR KAWASAN KUMUH - PANTE RAJA

6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

PENATAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI



1. Parkiran 2. Food Court 3. Playground 4.Plaza
5. Balai Nelayan 6. TPI 7. Dermaga 8. Pantai 9. Penjemuran Ikan
10. Kamar Mandi 11. Parkir Nelayan

6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

1 PARKIRAN







6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

2 FOOD COURT





3 PLAYGROUND





4 PLAZA









6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

5 BALAI NELAYAN



6 TPI





7 DERMAGA



8 PANTAI







6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

9 PENJEMURAN IKAN



10 KAMAR MANDI



11 PARKIRAN NELAYAN



6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

OTHER DESIGN










6 PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

OTHER DESIGN













Dokumen dan Peraturan Bupati tentang RP2KPKPK Kabupaten Pidie Jaya diharapkan menjadi pedoman untuk melaksanakan penanganan kumuh Kabupaten Pidie Jaya menuju terwujudnya lingkungan permukiman bebas kumuh dan layak huni dengan memadainya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berkualitas, tanggap terhadap bencana disertai pemeliharaan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Pidie Jaya.

Pj. BUPATI PIDIE JAYA

TTD

T. AHMAD DADEK